



Prosiding

# Seminar Nasional

SCAN#3 : 2012

## STICKS AND CARROTS Reward and Punishment



Program Studi Arsitektur F.T. UAJY  
Program Pascasarjana UAJY



aprf  
Architecture and Planning  
Research Forum



# STICKS AND CARROTS

## Reward and Punishment

Hak Cipta © 2012, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini  
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 16 15 14 13 12

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta  
Telepon: (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525  
Website: <http://penerbit.uajy.ac.id>  
E-mail: [penerbit@mail.uajy.ac.id](mailto:penerbit@mail.uajy.ac.id)

No. Buku. 548.FT.04.05.12
---------------------------

ISBN. 978-602-8817-36-3
-------------------------



## PROSIDING SEMINAR NASIONAL SCAN#3

### “STICKS AND CARROTS” Reward and Punishment

- Etika, Hukum dan HAM
- Kelestarian Lingkungan
- Arsitektur dan Kota
- Etika dan Politik

15 MEI 2012

#### PENYELENGGARA :

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

#### BEKERJA SAMA DENGAN :

Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas Arsitektur dan Desain, UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
Jurusan Arsitektur, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA  
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Cabang DIY  
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia cabang DIY  
Architecture and Planning Research Forum (APRF)  
Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI)



## **KOMITE SEMINAR NASIONAL SCAN#3: 2012**

**Pelindung** : Dr. Ir. AM. Ade Lisantono, M.Eng  
Dekan Fakultas Teknik UAJY

**Penanggung jawab** : Ir. F.Ch.J. Sinar Tanudjaja, MSA  
Ketua Program Studi Arsitektur FT UAJY

**Panitia Pengarah** : Prof. Ir. Prasasto Satwiko, MBS, Ph.D  
Ir. B. Sumardiyanto, MSc.

**Panitia Pelaksana**

**Ketua** : Ir. Lucia Asdra Rudwiarti, MPhil., Ph.D.

**Wakil Ketua** : Dr. Ir. Y. Djarot Purbadi, MT.

### **Reviewers:**

Prof. Ir. Prasasto Satwiko, MBS, Ph.D  
(dosen Prodi Arsitektur UAJY, Yogyakarta)

Ir. Budi Prayitno, M.Eng, Ph.D, IAP  
(Ketua IAP Yogyakarta, dan dosen Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan FT UGM,  
Yogyakarta)

Dr. Ir. Edi Purwanto, MT  
(APRF dan dosen Jurusan T. Arsitektur Undip, Semarang)

Prof. Ir. Titin Saraswati, M.Arch., Ph.D  
(dosen Jurusan Arsitektur UKDW, Yogyakarta)

Dr. Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, M.Eng  
(dosen Jurusan Arsitektur UII, Yogyakarta)

Dr. Ir. Galih Widjil Pangarsa, DEA  
(dosen Jurusan T. Arsitektur Unibraw, Malang)

### **Tim Penyunting:**

Jackobus Ade Prasetya S., ST, MT.

Prof. Ir. Prasasto Satwiko, MBS, Ph.D

Christina Eviutami Mediastika, ST., Ph.D

Miranda Paramita

Agatha Dhamma

Sherra Fidelia

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	iv
Kata Pengantar .....	viii

### MAKALAH UTAMA

---

- 1. DIMENSI ETIKA, HUKUM DAN HAM DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG**  
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. .... I.1
- 2. MEMBENTUK ARSITEKTUR YANG BERETIKA DALAM DESAIN PERKOTAAN DENGAN KONSEP PERANCANGAN ARSITEKTUR HIJAU**  
Munichy Bachron Edrees ..... I.15

### KELOMPOK A. ETIKA, HUKUM, DAN HAM

---

- 1. Manajemen Sistem Pemadam Kebakaran pada Bangunan Umum di Semarang**  
Dzulfikkar, Sumarwanto ..... II.1
- 2. Kajian Pentingnya Aplikasi Bridge Management System (BMS) dan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam Menjaga Nilai Kualitas dari Infrastruktur Jembatan : Infrastruktur Jembatan-Jembatan di Indonesia**  
Ghoustanjiwani A P, Rio Kusmara, Dwi Hatmojo D..... II.12
- 3. Pelestarian Alam dan Arsitektur Menurut Pandangan Etika Spinoza**  
Alvin Hadiwono..... II.21
- 4. Konsep Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Reklamasi Pantai Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan**  
Bonifacio Bayu Senasaputro ..... II.26

### KELOMPOK B. KELESTARIAN LINGKUNGAN

---

- 1. Turning Road to a Public Place : Case Study of Car Free Day Phenomenon in Bandung**  
R. Aswin Rahadi, Alia Widyarini Hapsariniaty, Siti Larissa Sarasvati, Siti Kania Mevianti, Tara Putri Paramitha .....II.37

2. **Evaluasi Tata Ruang Pesisir Sadeng Gunungkidul : Perspektif Pengurangan Risiko Bencana**  
Ahmad Cahyadi, Ika Afianita, Priliani Gamayanti, Syifa Fauziyah ..... II.47
3. **Rumah Kontainer sebagai Alternatif Desain Ramah Lingkungan dalam Arsitektur**  
Usi Widyaningrum, Loekman Mohamadi .....II.54
4. **Lingkungan Buatan untuk Manusia, Hewan dan Tumbuhan**  
Franky Liauw ..... II.64
5. **Peran Wanita dalam Konservasi Kawasan Hijau di Kabupaten Gunungkidul**  
MRS Darmanijati, Laak Paskalis, Retno Sustyaningsih ..... II.70
6. **Karakter Lokal Lanskap Perkotaan di Kota Malang**  
Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT. .... II.76
7. **Dampak Over Eksploitasi dan Ekspansi Lahan Kawasan Perumahan Terhadap Keberlanjutan Budaya Arsitektur dan Kelestarian Alam di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan**  
Handajani Asriningpuri MT, Ir. Dini Permatawati .....II.87
8. **Minimalisasi Konsumsi Energi dalam Bangunan, Upaya Mendukung Kelestarian Alam**  
IM. Tri Hesti Mulyani, Ign. Christiawan .....II.99
9. **Peningkatan Kualitas Kawasan Selokan Mataram dengan Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan : Kawasan Sekitar Jalan Seturan – Gejayan**  
Luh Putu Widhiari, Amos Setiadi .....II.108
10. **Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Lindung Daerah Aliran Sungai : DAS Bengawan Solo di Wilayah Jawa Tengah**  
Ir. FX. Eddy Arinto, M.Arch., Indah Susilowati,S.T. .... II.119

## **KELOMPOK C. ARSITEKTUR DAN KOTA**

---

1. **Kajian Urban Villages pada Kampung Asli Kota : Kampung Sekayu Semarang**  
Fariz Syaiful Bahar, Eko Nursanty..... II.129

2. <b>Kontradiksi Dalam Ruang dan Fungsi Simbol sebagai Media Kompromi : Ruang Publik adalah Ruang Privat</b> Catharina Dwi Astuti Depari .....	II.140
3. <b>Privatisasi Ruang Publik di Koridor Jalan Tambakbayan Kawasan Babarsari Yogyakarta</b> Yohanes Djarot Purbadi .....	II.150
4. <b>Belajar dari Sebuah Desain Ruang Publik Kota “Memahami Sisi Lain dari Alun-Alun Sebagai Inti Kota yang Berubah Fungsi” : Taman Masjid Raya Bandung</b> Ghoustanjiwani Adi Putra, Hamdiel Kaliesh .....	II.160
5. <b>Implication of Green Open Spaces in The Development of ‘Eco Sustainable City’ and The Future of City Policy Strategy</b> Quintarina Uniaty .....	II.172
6. <b>Studi Karakteristik Permukiman Tepian Sungai di Kalimantan Barat : Kampung Beting, Pontianak</b> Hamdil Khaliesh, Ghoustanjiwani Adi Putra .....	II.185
7. <b>Model Panduan Penataan Pembangunan pada Kawasan Permukiman Tradisional : Alternatif Kebijakan yang Berkelanjutan : Jero Beteng, Kraton, Yogyakarta</b> Riandy Tarigan .....	II.198
8. <b>Relasi Rancangan Kota dan Anarki Warga</b> Edi Purwanto .....	II.209
9. <b>Adaptive Space Sebagai Alternatif Pengembangan Homestay di Desa Wisata : Desa Wisata Gilangharjo Bantul Yogyakarta</b> Vincentia Reni Vita Surya .....	II.220
10. <b>Pengelolaan Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat</b> Ir. Yulita Titik S, M.T, Dr. Y Trihoni Nalesti Dewi, S.H.,M.Hum. ....	II.227
11. <b>Masa Depan Arsitektur Tradisional di Tengah Arus Modernisasi</b> B.Sumardiyanto .....	II.241
12. <b>Pengaruh Perubahan Persil Bangunan Dalem Terhadap Tampilan Fasade di Jalan Mondorakan, Kotagede, Yogyakarta</b> Augustinus Madyana Putra .....	II.252
13. <b>Menuju Arsitektur Bali yang Berkelanjutan</b> Roni Sugiarto.....	II.262

## **KELOMPOK D. ETIKA DAN POLITIK**

---

1. **Telaah Etika & Arah Politik Perencanaan Kawasan Perkotaan :  
Review Terhadap Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 – 2007**  
Udjiyanto Pawitro ..... II.271
  
  2. **Filsuf Arsitektur Sebagai Proposisi Keempat Dalam Upaya  
Regenerasi Budaya Tradisional : Ndalem Pangeranan  
Di Kampung Baluwarti Kraton Kasunanan Surakarta**  
Dyah.S.Pradnya.P,ST,MT. .... II.280
  
  3. **Kajian Mekanisme, Kelembagaan dan Prosedur Perijinan serta  
Pengawasan pada Pengendalian Alih Fungsi Ruang  
di Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah**  
Ir. Marie Ning Murdiyanti MTP ..... II.289
- Indeks Penulis ..... 304**



## KATA PENGANTAR

Seminar SCAN (*Sustainable, Culture, Architecture and Nature*), yang diselenggarakan Program Studi Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memasuki tahun ke-3. Pada penyelenggaraan seminar kali ini, tema yang diangkat agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya, karena seringkali menimbulkan pertanyaan pada kaum awam. Tema SCAN #3 kali ini adalah *'sticks and carrots'*, atau diterjemahkan menjadi *'punishment and reward'*. Para pengajar dan peneliti dalam lingkup bangunan dan arsitektur seringkali merasa kesulitan bila harus mengkaitkan tema ini ke dalam penelitian dan naskah akademik. Namun justru dalam kerumitan inilah kualitas sebuah naskah akademik ditentukan.

Tema SCAN #3 dijabarkan menjadi empat sub tema, yaitu: 'kelestarian lingkungan', 'arsitektur dan kota', 'etika dan politik', serta 'etika, hukum dan HAM'. Sekalipun demikian, ketika membaca dengan seksama 30 karya ilmiah yang disajikan dalam buku prosiding ini, pembaca akan menemukan bahwa beberapa tema dapat muncul sekaligus dalam satu tulisan. Semisal sebuah tulisan ilmiah dapat terkait dengan sub tema kelestarian lingkungan, sekaligus dengan etika, hukum dan HAM. Munculnya beberapa sub tema dalam satu tulisan ilmiah, diharapkan memperkaya isi tulisan tersebut dan mampu menarik lebih banyak pembaca untuk melakukan kajian.

Semoga tulisan ilmiah yang tersaji dalam Buku Proceeding SCAN #3 ini, makin membuka wawasan kita akan banyak hal, khususnya yang terkait dengan dunia rancang bangun. Isi buku prosiding ini, merupakan penjabaran lengkap dari abstraksi-abstraksi yang tersaji dalam Buku Kumpulan Abstrak SCAN #3. Semoga menambah wawasan dan pemikiran yang makin kritis pada para pembaca sekalian. Selamat membaca.

**TIM PENYUNTING**  
**Seminar Nasional SCAN#3 : 2012**





**SEMINAR NASIONAL SCAN#3 : 2012**

**S T I C K S   A N D   C A R R O T S**



## DIMENSI ETIKA, HUKUM DAN HAM DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.<sup>1)</sup>

### ABSTRAK

*Permasalahan lingkungan hidup dan tata ruang merupakan permasalahan sangat penting jika tidak mau dikatakan sebagai permasalahan utama dalam pembahasan mengenai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Kontestasi dalam akses tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen pembangunan di Indonesia dalam beberapa segi belum secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ecocodevelopment dan ecocracy meskipun konstitusi RI pascaamandemen dikatakan telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution). Peran Hukum Administrasi Negara dalam memberikan kerangka hukum (legal framework) terhadap implementasi konsep sticks and carrots dalam pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang seharusnya diletakkan di atas basis etika tanggung jawab dan perlindungan HAM. Konsistensi dalam implementasi konstitusi, sistem legislasi dan penegakan Hukum Administrasi Negara oleh aparat administrasi negara serta partisipasi rakyat sangat menentukan kualitas implementasi gagasan pembangunan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** lingkungan hidup dan tata ruang, pembangunan berkelanjutan,

### 1. DASAR PEMIKIRAN

Persoalan lingkungan hidup dan kontestasi kepentingan dalam ruang merupakan persoalan yang senantiasa melekat dalam pembangunan. Modernisasi kehidupan dan teknologisasi berbagai bidang/sector dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup baik yang berskala kecil hingga yang berskala besar/kompleks. Di sisi lain, akselerasi pertumbuhan penduduk dengan segala kepentingan yang menyertainya telah menimbulkan kontestasi dalam mengakses ruang. Dua persoalan itu (lingkungan hidup dan ruang) tak jarang kian berkelindan dengan kompleksitas permasalahan sosial maupun kebijakan pemerintah. Manusia yang hidup dalam ruang dan waktu tertentu, terus berhadapan dengan berbagai persoalan di seputar lingkungan hidup maupun tata ruang.

Persoalan lingkungan hidup maupun tata ruang seringkali bermuara pada persoalan kebijakan publik yang di dalamnya Pemerintah melalui otoritas publik yang dimilikinya menjadi aktor yang sangat penting atau bahkan yang terpenting, meskipun kajian Hukum Administrasi Negara modern juga semakin menempatkan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang kian menentukan efektivitas kebijakan publik.

Pemerintah dalam arti luas (*government in wider sense*) terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga pilar kekuasaan itu sering disebut dengan trias politika yang pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu. Kebijakan legislasi yang terkait dengan berbagai dimensi sosial kehidupan masyarakat, termasuk yang terkait dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup maupun penataan ruang, merupakan produk legislatif yang dihasilkan oleh parlemen dan Presiden. Namun, akhir-akhir ini semakin menguat wacana mengenai trias politika modern yang menentukan efektivitas penyelenggaraan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 1 Februari 2010- 30 Januari 2014, Associate researcher pada Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.

dalam negara, yaitu negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Keseimbangan fungsi dan peranan di antara ketiga pilar trias politika klasik maupun modern sangat mempengaruhi corak penyelenggaraan kekuasaan dalam negara serta tatanan sosial masyarakat.

Dalam tulisan ini, telaah terhadap etika ingin ditempatkan sebagai basis nilai yang darinya diderivasi seperangkat norma (kaidah) dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan dalam konteks kajian ini juga ingin dikaitkan dengan perspektif perlindungan HAM sehubungan dengan persoalan lingkungan hidup maupun tata ruang.

## 2. DIMENSI ETIKA DAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENATAAN RUANG

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal dan *ta etha* dalam bentuk jamak. Dalam bentuk tunggal, etika memiliki beragam makna, yaitu: tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti yang terakhir itulah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah "etika", yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM), sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>2</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) etika dijelaskan memiliki tiga arti, yaitu: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak; (3). Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>3</sup>

Etika merupakan basis nilai (*value basis*) yang darinya diturunkan seperangkat norma/kaidah dalam pengaturan kehidupan sosial. Istilah hukum dalam analisis ini dimaksudkan tidak saja untuk merujuk pada seperangkat peraturan perundang-undangan/hukum tertulis yang kini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun juga norma hukum tak tertulis yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*the principles of good administration*).

Hukum dalam analisis ini, dengan tak mengurangi rasa hormat terhadap luasnya cakupan bidang hukum dalam kajian keilmuan hukum, hanya dibatasi pada pembahasan Hukum Administrasi Negara (*bestuursrecht*) dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan hidup dan tata ruang.. Hukum Administrasi Negara memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Hukum Tata Negara. Inti dari Hukum Administrasi Negara adalah hubungan antara negara dengan rakyat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kedudukan hukum rakyat dan untuk mengarahkan serta mengorganisasikan hubungan-hubungan sosial melalui berbagai cara di berbagai wilayah.<sup>4</sup> Dalam hukum administrasi negara, dimensi etika sebagai pedoman nilai mengenai salah dan benar telah menempati posisi yang semakin penting. Hal itu dapat dilihat melalui gejala integrasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*) dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (*besturen*).

Mengemudikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selalu dinilai oleh masyarakat. Masyarakat menilai tidak hanya hasilnya, tetapi juga caranya.<sup>5</sup> Dalam berbagai kepustakaan hukum administrasi negara, pedoman etis dalam penyelenggaraan pemerintahan (*besturen*) dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan

---

<sup>2</sup> K Bertens, *Etika*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 4.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Rene Seerden dan Fritz Stroink, *Administrative Law of The European Union, its Member States and The United States-A Comparative Analysis*, Intersentia Uitgevers Antwerpen-Groningen, 2002, hal. 176.

<sup>5</sup> Paulus Effendie Lotulung (ed.), *Himpunan Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal: 36.

yang baik. Wiarda menyebut asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai suatu tendens etik yang menjadi dasar hukum administrasi negara.<sup>6</sup>

Pemerintah harus mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan fungsinya atas kepentingan legalitas (*rechtsmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari setiap tindakan pemerintah yang dilaksanakan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi bagian dari standar umum wewenang pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan (*besturen functie*) di samping pemerintah harus senantiasa mengacu secara konsisten pula asas-asas hukum administrasi sektoral yang tersebar pada berbagai sektor pemerintah yang merupakan standar khusus wewenang pemerintah.

Dalam kajian hukum administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar umum wewenang pemerintah meliputi: 1. asas kepastian hukum (*principle of legal security*); 2. asas keseimbangan (*principle of proportionality*); 3. asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*); 4. asas bertindak cermat (*principle of carefulness*); 5. asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*); 6. asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*); 7. asas permainan yang layak (*principle of fair play*); 8. asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*); 9. asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*); 10. asas meniadakan akibat-akibat hukum suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*); 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*); 12. asas kebijaksanaan (*sapientia*) dan 13. asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).<sup>7</sup> Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya di berbagai bidang harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar umum wewenang pemerintah agar tindakan hukum publik yang dilakukannya memenuhi syarat legalitas (*the principle of legality*). Dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009), syarat keabsahan bertindak bagi pemerintah harus memenuhi dua hal, yaitu: 1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 2. kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan baik.

Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam bidang lingkungan hidup maupun penataan ruang sebagai wujud pemerintahan sektoral, selain harus berpegang pada standar umum wewenang pemerintah tersebut di atas, juga harus mengacu pada standar hukum administrasi sektoral yang lazimnya telah didesain melalui kerangka hukum (*legal framework*) dalam berbagai bidang sektoral pemerintah melalui sistem legislasi.

Dalam bidang lingkungan hidup, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menetapkan adanya 14 (empat belas) asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu meliputi asas-asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

---

<sup>6</sup> Ibid., hal. 37.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, 1994, hal 279.

n. otonomi daerah.

Konsep *sticks and carrots* atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral sering juga disebut sebagai sistem insentif dan disinsentif, dalam penyelenggaraan pemerintahan sektoral di bidang lingkungan hidup tersimpul dalam keenam macam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 4 UUPPLH), yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berpedoman pada standar umum wewenang pemerintah maupun standar wewenang sektoral tersebut di atas agar tindakan pemerintah yang dilakukan memenuhi standar keabsahan (*rechtsmatigheid*).

Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya dapat menggunakan berbagai instrumen pemerintah, seperti: peraturan perundang-undangan (*algemene regel*), perjinan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), peraturan-peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels*), perbuatan materil (*materiele handeling*) maupun berbagai akativitas keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah (*privaathandelingen*). Konsep *sticks and carrots* dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun tata ruang dapat diimplementasikan melalui penggunaan sarana-sarana pemerintah (*bestuursinstrumenten*) di atas. Tentu saja, penggunaan sarana-sarana pemerintah tersebut harus tetap dengan memperhatikan standar umum maupun standar khusus (sektoral) sebagai syarat legalitasnya.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 5 UUPPLH disebutkan meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. Inventarisasi lingkungan hidup; b. Penetapan wilayah ekoregion dan c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam sistem pemerintahan terdapat adagium bahwa *besturen is planen* (memerintah adalah merencanakan). Desain strategis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah menjadi cerminan adagium tersebut. Sekaligus, perencanaan yang mengawali siklus ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti disebutkan pada Pasal 4 UUPPLH, dapat digunakan sebagai pedoman bagi kelima langkah lainnya dalam siklus tersebut dalam kaitannya dengan konsep *sticks and carrots*. Dalam konteks tersebut, menjadi relevan untuk dikaitkan dengan konsep penggunaan sarana-sarana pemerintah (*bestuursinstrumenten*) guna merealisasikan konsep-konsep perencanaan dalam implementasi kebijakan.

Sehubungan dengan konsep *sticks and carrots* dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup, Takdir Rahkadi dalam Faure dan Niessen<sup>8</sup> menuliskan bahwa:

*It is very important for the administration not only to have the power of enforcement but also the power to impose coercive sums. Especially in the case of frequent offences, the power to impose coercive sums is more effective than enforcement by the administration itself. In both situations, however, the perpetrator must be given the opportunity to end the offences by himself and to restore the old situation.*

Kewenangan pemerintah dalam melakukan upaya paksa administratif dalam mengatasi akvitas privat atau korporat yang menimbulkan gangguan lingkungan hidup atau kerusakan ekologis merupakan konsekuensi dari kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).

Sebenarnya, isu lingkungan hidup tak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan isu mengenai tata ruang. Tak jarang dampak dari perubahan tata ruang menimbulkan reduksi

---

<sup>8</sup> Michael Faure and Nicole Nissen, *Environmental Law in Development – Lessons from the Indonesian Experience*, Edward Elgar Publishing Limited Ghensanda House, UK, 2006, 186-187.



terhadap kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya. Misalnya, banjir yang marak terjadi bisa dicari akar masalahnya dari 2 (dua sebab) yaitu: *pertama*, penyebab banjir akibat tindakan manusia yang meliputi hal-hal berikut: perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase, tidak tepatnya sistem pengendalian banjir, penurunan tanah, tidak berfungsinya sistem drainase lahan, bendung dan bangunan air, kerusakan bangunan pengendali banjir. *Kedua*, penyebab banjir akibat alam yang meliputi hal-hal berikut: erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografis/geofisik sungai, kapasitas sungai/drainase tidak memadai dan pengaruh air pasang.

Sehubungan dengan permasalahan etika, salah satu teori dalam hukum lingkungan hidup adalah pengembangan hukum lingkungan hidup berdasarkan teori hak yang dipengaruhi oleh filsafat moral atau etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan jahat (*evils*) sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu. Teori hak ini mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di satu sisi dan aliran tentang hak-hak hewan (*animal rights*) di sisi lain. Menurut libertarianisme hukum lingkungan hidup harus mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menerus meminimalisasi tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan kemudian meniadakan sama sekali pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong lahirnya inovasi teknologi pencegah pencemaran (*technology-forcing pollution control legislation*). Dalam konteks hak-hak hewan (*animal rights*), Aldo Leopold mengusulkan perlunya konsep etika tanah (*land ethic*), yaitu aturan perilaku untuk melindungi komunitas yang tidak saja terdiri dari manusia, tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Sebuah kebijakan itu dianggap baik, bila kebijakan itu tidak mengancam integritas, stabilitas dan keindahan komunitas. Leopold menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap semua makhluk sebagai bagian dari komunitas etik.<sup>9</sup>

Salah satu isu aktual yang menarik dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah persoalan impor limbah B3. Pada tanggal 20 Januari 2012, KLH, Bea Cukai dan BAPETEN melakukan inspeksi lapangan terhadap kontainer-kontainer yang berada di pelabuhan Tanjung Priok. Dari hasil pemeriksaan terhadap 20 kontainer yang dibuka, telah ditemukan di dalamnya berisi *scrap* logam dalam kondisi tidak dalam keadaan bersih, tercampur dengan tanah dan ditemukan adanya limbah B3 (limbah elektronik, tar, aspal, bekas kemasan bahan kimia) dan limbah domestik/sampah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara visual tersebut disimpulkan bahwa importir telah melanggar izin impor limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, karena dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan jenis limbah yang diimpor adalah dalam kondisi bersih dan tidak terkontaminasi dengan limbah B3. Sehubungan dengan ditemukannya limbah elektronik, bekas kemasan bahan kimia dan sampah, maka pihak importir dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan masuknya limbah B3 ke wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelarangan impor sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Kepabeanaan. Pemerintah dengan menggunakan sarana-sarana pemerintah yang relevan dapat mengontrol aktivitas-aktivitas masyarakat yang membahayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ijin lingkungan (*environment licensing*) merupakan sarana yang selama ini diandalkan oleh pemerintah agar mampu memenuhi fungsinya dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Dalam konsep hukum administrasi negara, ijin dimaknai sebagai suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Motif-motif untuk penggunaan sistem ijin dapat berupa: keinginan mengarahkan (*mengendalikan/sturen*)

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 35-37.

aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya ijin bangunan), mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin-ijin lingkungan), keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (ijin terbang, ijin membongkar pada monumen-monumen), hendak membagi benda-benda yang sedikit (ijin penghuni di daerah padat penduduk), pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan penataan ruang, Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas.

Pelaksanaan kewenangan sektoral pemerintah dalam bidang penataan ruang selain harus merujuk pada standar umum wewenang pemerintah juga harus mengimplementasikan standar kewenangan sektoral tersebut. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :

- a. proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai "*guidance of future actions*" RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).
- b. proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,
- c. proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.<sup>11</sup>

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, dapat dicermati sebagai berikut<sup>12</sup>:

---

<sup>10</sup> Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan* (disunting oleh Philipus M. Hadjon), Pengantar Hukum Perijinan, Yuridika, 1993, hal. 4-5.

<sup>11</sup> Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia – Tinjauan Teoretis dan Praktis, *makalah* disajikan dalam Studium Generale STTNAS Yogyakarta, 1 September 2003.

- a. terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
- b. belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Berbagai fenomena bencana (*water-related disaster*) seperti banjir, longsor dan kekeringan – yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada paling tidak 5 tahun belakangan ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
- c. terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan.
- d. belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN.
- e. belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, serta
- f. kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Hal ini juga terlihat dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Di Pulau Jawa misalnya, hutan lindungnya telah terkonversi dengan laju sebesar 19.000 ha/tahun (BPS, 2001). Bahkan Badan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa hingga 2001 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 350.000 ha sehingga luas hutan tersisa 23% saja dari luas daratan Pulau Jawa. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti untuk industri, permukiman dan jasa di Pulau Jawa yang mencapai 1.002.005 ha atau 50.100 ha/tahun antara 1979–1999 (Deptan, 2001).

Penataan ruang tak jarang selain menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan hidup, juga tak jarang dapat menimbulkan dampak pelanggaran HAM akibat penggusuran yang acapkali menyertai *policy* penataan ruang. Dalam buku “Perumahan bagi Kaum Miskin di Kota-kota Asia” yang diterbitkan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* dan *United Nations Human Settlements Programme* (2008)<sup>13</sup> diuraikan bahwa:

Kombinasi antara urbanisasi, globalisasi dan komersialisasi lahan perkotaan memaksa kaum miskin untuk terusir dari rumah dan lahannya. Hampir setiap kota pernah mengalami masapembangunan yang begitu pesat, dan pada masa tersebut, dimana perubahan terjadi begitu cepat dan pendirian bangunan di berbagai tempat, umumnya terjadi penggusuran dalam skala besar. Dengan kata lain, penggusuran hampir selalu meningkat justru pada masa terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan menurun pada sebaliknya. Asia, sebagai kawasan yang sedang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, telah menghasilkan jumlah korban penggusuran yang tinggi sehingga mengakibatkan kesengsaraan dan pemiskinan dalam skala besar. Walaupun terdapat beberapa kasus dimana penggusuran memang tidak terhindarkan, misalnya atas kepentingan umum, pembangunan jalan, fasilitas umum dan bentuk proyek kegiatan infrastruktur kota lainnya, tetapi pelaksanaan dari

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Penyelenggaraan Penataan Ruang (Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi dan Program Strategis), makalah disajikan dalam Acara Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah, Jakarta, 29 November 2005.

<sup>13</sup> *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* dan *United Nations Human Settlements Programme*, *Perumahan bagi Kaum Miskin di Kota-kota Asia*, 2008, hal. 2.

penggusuran tersebut tidak mengikuti peraturan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap hak-hak warga. Seringkali penggusuran ini dilakukan tanpa surat perintah dan tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu.

Dalam buku tersebut juga dicatat bahwa penggusuran bisa semakin memiskinkan kaum miskin dengan beberapa catatan berikut<sup>14</sup>:

- a. Penggusuran adalah faktor utama penyebab kemiskinan di kota Asia. Mereka memindahkan kaum miskin dari pusat kota ke daerah pinggiran yang belum memiliki pelayanan yang baik dan jauh dari tempat bekerja.
- b. Penggusuran menambah beban waktu dan biaya transportasi bagi kaum miskin, sehingga menyulitkan orang tua (terutama ibu) untuk bekerja di luar rumah ataupun area permukiman.
- c. Penggusuran memperkecil aksesibilitas kaum miskin terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan institusi pendidikan, serta memperbesar jarak antara si miskin dan si kaya di kota.
- d. Penggusuran menciptakan alienasi dan konflik, karena pada saat seseorang terus menerus terperangkap di dalam kemiskinan, maka potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan juga meningkat.
- e. Penggusuran menghasilkan kerugian investasi di bidang perumahan, infrastruktur, usaha kecil menengah serta kepemilikan harta benda individu dan rumah tinggal dalam jumlah yang sangat besar.
- f. Penggusuran mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak.
- g. Penggusuran merusak sistem pendukung sosial yang sudah berhasil terbentuk selama bertahun-tahun di pemukiman lama. Setelah penggusuran, hubungan kekerabatan yang sudah terjalin dengan rekan ataupun tetangga seringkali hilang.
- h. Penggusuran menciptakan nuansa kekerasan dan trauma bagi kelompok di masyarakat yang paling rentan. Bagi anak-anak, penggusuran sangatlah traumatis karena mengganggu stabilitas dan rutinitas yang diperlukan dalam pengembangan anak dan dapat mengakibatkan penyakit mental dan pertumbuhan yang serius.
- i. Dampak utama dari penggusuran adalah, hadirnya permukiman yang tidak difasilitasi dengan sistem pelayanan yang baik di daerah pinggiran kota, dimana daerah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tangga pemerintah di masa mendatang.

Sehubungan dengan ilustrasi mengenai dampak penggusuran di atas terkait dengan salah satu dampak penataan ruang, kiranya menarik untuk diuraikan disini sebagai contoh keberhasilan penerapan komunikasi yang efektif dalam kebijakan publik, yaitu kisah Walikota Solo Jokowi yang mampu menindahkan PKL di daerah Banjarsari, sebuah kawasan elite di kota Solo dengan pendekatan dialogis dan tanpa gejolak yang lazimnya menyertai penggusuran selama ini di berbagai daerah. Ilustrasi berikut ini barangkali bisa menggambarkan model komunikasi dialogis Jokowi dalam melakukan relokasi pedagang tanpa menggusur<sup>15</sup>:

989 pedagang yang bergabung dalam 11 paguyuban PKL di daerah Banjarsari melalui para koordinator paguyuban di Loji Gandrung, rumah dinas Walikota oleh Jokowi diundang dan diajak makan. Namun pada pertemuan pertama ini tidak ada pembicaraan mengenai relokasi. Joko sama sekali tidak menyinggungnya. Dia beranggapan, hal itu belum waktunya disampaikan. Makan bersama seperti itu berlanjut hingga pertemuan yang ke 53, dimana Joko hanya makan bersama dan bersilaturahmi kepada para PKL. Baru pada jamuan ke-54, dimana saat itu semua PKL yang hendak dipindahkan hadir, Joko mengutarakan niatnya untuk merelokasi mereka. Dan memang waktu yang tepat. Ketika Joko Widodo mengungkapkan hal itu, tidak ada satu pedagang pun yang menolak. Mereka setuju dengan kebijakan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

<sup>15</sup> (<http://pojokmalam.blogspot.com/2011/01/jokowi-walikota-paling-berhasil-di.html>).

yang diambil Joko Widodo, sepanjang mereka mendapatkan tempat yang baru untuk berdagang. Joko berjanji akan memberikan lokasi baru. Dan nantinya, para pedagang hanya akan membayar biaya retribusi sebesar Rp 2.600 perhari di tempat baru yang suasananya lebih bagus dari tempat para PKL berdagang sekarang. Dengan retribusi sebesar itu, modal pemerintah sebesar Rp 9,8 miliar untuk membangun lokasi baru itu diperkirakan dapat kembali pada kurun 9 tahun. Bukan hanya itu, Joko juga akan mempromosikan tempat berdagang baru itu selama empat bulan di media lokal. Joko juga memperluas jalan menuju pasar dan membuat satu trayek angkutan kota baru. Hasilnya, Joko berhasil menata ulang pasar di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura. Saat relokasi dilakukan, Joko Widodo menggelar arak-arakan sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan dengan iringan musik "klenengan" khas Solo. Joko juga menghadirkan Prajurit Keraton agar timbul rasa kebanggaan pada diri para PKL. Faktanya, para PKL sangat legowo saat pindah lokasi ke tempat yang baru. Bahkan konsumsi dan perlengkapan arak-arakan mereka biayai sendiri. Ini jarang terjadi di daerah lain yang biasanya relokasi selalu bersinggungan dengan kekerasan. Sebanyak 989 PKL dipindah tanpa gejolak, bahkan secara antusias para PKL itu mendukung program pemerintah dengan suka cita. Ini merupakan sebuah terobosan yang mengagumkan.

Berkaitan dengan konsep penataan ruang secara normatif, Penjelasan umum angka 7 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebenarnya juga sudah menekankan bahwa:

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

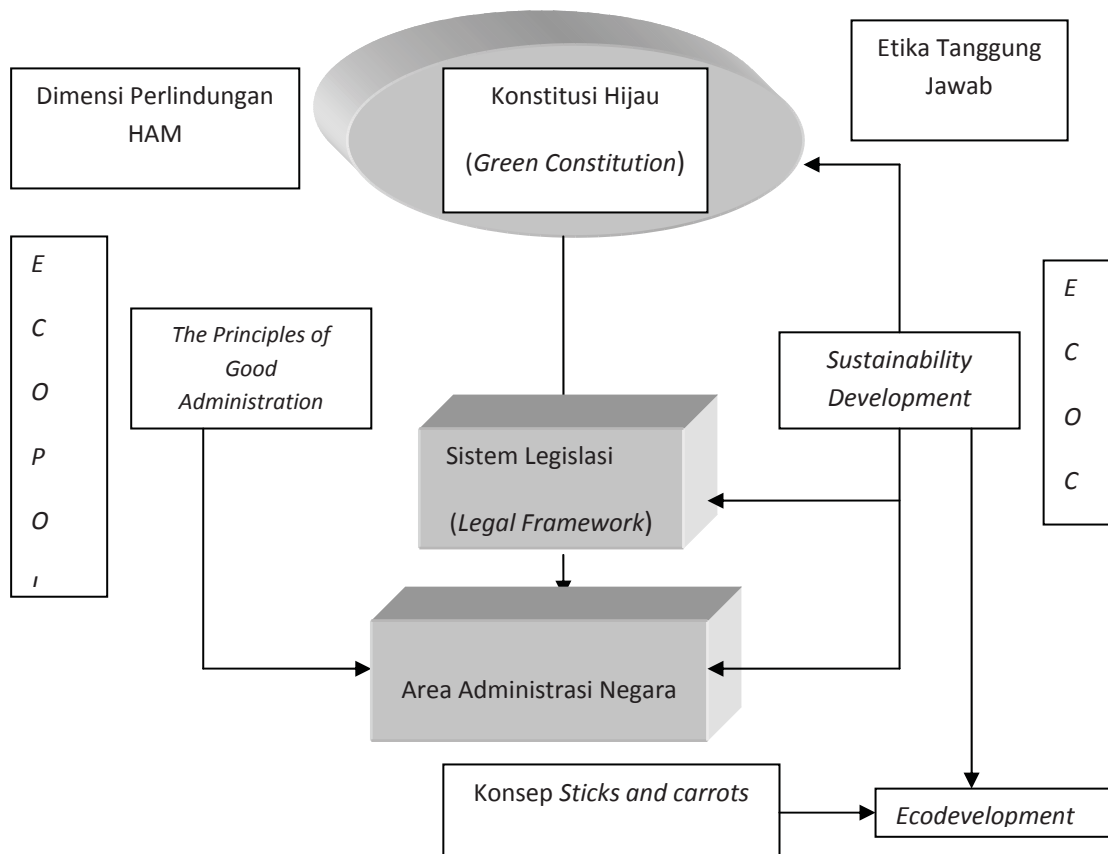
Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Konsep *sticks and carrots* merupakan instrumen untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengaturan pemerintah dalam penataan ruang. Penataan ruang dapat menimbulkan beragam dampak terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan derajat

kehidupan sosial masyarakat. Berkaitan dengan sistem insentif dan disinsentif tersebut, Pasal 116 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur dua hal:

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa insentif kepada pemerintah daerah diberikan antara lain dalam bentuk: a. Pemberian kompensasi, b. Urun saham, c. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur atau d. Penghargaan. Sedangkan Pasal 117 ayat (2) UU yang sama mengatur bahwa insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk: a. Keringanan pajak, b. Pemberian kompensasi, c. Imbalan, d. Sewa ruang, e. Urun saham, f. Penyediaan infrastruktur, g. Kemudahan prosedur perijinan, dan/atau h. Penghargaan. Terkait dengan sistem disinsentif, Pasal 118 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan antara lain dalam bentuk: a. Pembatasan penyediaan infrastruktur, b. Pengenaan kompensasi, dan/atau c. Penalti. Sedangkan Pasal 118 ayat (2) UU tersebut mengatur bahwa disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam bentuk: a. Pengenaan pajak yang tinggi; b. Pembatasan penyediaan infrastruktur; c. Pengenaan kompensasi dan/atau d. Penalti.



**Gambar 1.** Perspektif Hukum Administrasi Negara dalam konteks *Sticks and carrots*

### 3. HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI BAGIAN DARI HAM

Pasca amandemen UUD Negara RI 1945 ditambahkan Bab XA ke dalam konstitusi RI tersebut pengaturan konstitusional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya perlindungan terhadap HAM atas lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) tersebut berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI 1945 menyebutkan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesaatuan ekonomi nasional." Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1), dan dengan diadopsikannya prinsip 'pembangunan berkelanjutan' (*sustainable development*) dan 'berwawasan lingkungan' ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa UUD Negara RI 1945 dewasa ini merupakan konstitusi berwawasan hijau (*green constitution*).<sup>16</sup> Berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), Marjaan Peeters dalam Faure dan Niessen<sup>17</sup> menyatakan bahwa:

*The concept of 'sustainable development' basically aims at upgrading the quality of both society and environment to a satisfactory level. What the optimal level of an environmentally sustainable society would be is hard to determine exactly. However, the concept of sustainable development urges that environmental concerns will be considered within other policy areas that might affect the environment.<sup>4</sup> For instance the Rio Declaration on Environment and Development has emphasized already the integration of environmental concerns within development processes.<sup>5</sup> This principle of (external) integration, aiming at taking environmental concerns into other policy areas, has been laid down as well in the European law order.<sup>6</sup> The basic message is that environmental protection should be integrated into other EC policies, like agriculture, transport, energy, and so on.<sup>7</sup> Integration in this sense has a clear external function: it aims at integrating economic and social development with environmental protection.*

Ada sebuah pendapat menarik yang pernah disampaikan oleh Hans Jonas<sup>18</sup> terkait dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan mengatakan bahwa:

Situasi baru umat manusia, yaitu situasi dimana manusia, karena hasil pekerjaannya sendiri, dapat menghancurkan dunia daripadanya ia hidup, menuntut sebuah prinsip tanggung jawab moral yang sama sekali baru juga: yaitu tuntutan mutlak untuk menjamin bahwa di segala masa depan tetap ada manusia dan, karena itu, tetap ada dunia yang dapat dihuni manusia secara manusiawi. Masalah yang dihadapi etika tanggungjawab atas masa depan umat manusia adalah bahwa kita tidak mempunyai pengalaman tentang akibat-akibat perbuatan kita sekarang di masa depan. Padahal pengalaman itulah yang membantu agar kita mau menaati tuntutan etika. Untuk itu diperlukan sebuah "heuristika ketakutan": ketakutan terhadap masa depan harus membantu kita untuk membangun kesediaan hati untuk bertindak menurut etika masa depan. Jadi bukan dengan menunjuk pada keburukan yang sudah kita ketahui dari lingkungan pengalaman sekarang kita akan digerakkan untuk bertindak secara bertanggungjawab, melainkan dengan memakai fantasi untuk membayangkan apa yang akan terjadi apabila kita terus merusak lingkungan seperti sekarang. Maka, kewajiban pertama etika masa depan adalah berusaha

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution – Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 8-9.

<sup>17</sup> Faure, Michael dan Nicole Nissen, *Op.Cit.*, hal. 93.

<sup>18</sup> Franz magnis-Suseno, *Etika Abad ke-20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 189.

membayangkan dalam fantasi dengan sekuat-kuatnya kehancuran lingkungan masa depan itu.

Imajinasi akan potensi kehanacuran di masa depan akan mendorong sikap untuk bersikap bijak dalam mengelola lingkungan hidup di masa kini. Ungkapan etis dari Hans Jonas menunjukkan arti penting sebuah sikap etis dalam membangun relasi dengan alam/lingkungan hidup. Etika tanggung jawab memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hak atas lingkungan hidup, sebagai komparasi, sejak tahun 1983 UUD Belanda (*Nederlandse Grondwet*) telah memasukkan hak untuk menghuni lingkungan hidup yang baik sebagai salah bagian dari hak-hak asasi sosial (*sociale grondrechten*). Hak<sup>1</sup> hak asasi sosial tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas-tugas modern pemerintah.<sup>19</sup> Sangat penting untuk dicatat disini bahwa konstitusi merupakan upaya untuk secara jelas mewadahi semua kehendak politik rakyat selaku anggota masyarakat hukum.<sup>20</sup> Dimasukkannya hak atas lingkungan hidup sebagai unsur dari HAM modern ke dalam materi muatan konstitusi merupakan wujud kehendak politik rakyat yang ingin menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai orientasi bagi seluruh aktivitas kenegaraan maupun sosial-kemasyarakatan. Ide pembangunan yang berwawasan lingkungan kini harus diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi (*constitutional legal framework*). Hal itu berarti perlindungan lingkungan hidup telah menjadi salah satu tugas konstitusional pemerintah.

Berbagai produk legislasi yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap konstitusi yang dewasa ini telah menjadi konstitusi yang berwawasan lingkungan hidup (*green constitution*). Berbagai aktivitas pemerintah maupun masyarakat yang selama ini dinilai mengabaikan lingkungan hidup menimbulkan dorongan untuk menginisiasi langkah-langkah uji materiil atas produk undang-undang yang diklaim sebagai jaminan keabsahan berbagai aktivitas tersebut entah di bidang pengelolaan tambang pada khususnya maupun pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya atau berbagai perijinan maupun aktivitas bisnis yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Maka, dewasa ini gagasan mengenai *ecodevelopment* maupun ekokrasi semakin menunjukkan pengaruh yang kian signifikan. Bahkan, ada pihak-pihak yang memperluas cakupan konsep tersebut dengan menyatakan bahwa untuk menyelamatkan lingkungan hidup diperlukan pula perubahan politik yang mendasar yang melahirkan *ecopolitics*. Hal ini dipengaruhi secara sangat kuat oleh gagasan *Deep Ecology* yang dipelopori oleh Naess. Dalam konteks yang terakhir ini dituntut adanya perubahan yang bukan hanya melibatkan individu, melainkan juga membutuhkan transformasi kultural dan politis, yang mempengaruhi dan menyentuh struktur-struktur dasar ekonomi dan ideologis.<sup>21</sup> Maka, amandemen konstitusi yang kemudian mengkonstataasikan hak atas lingkungan hidup sebagai HAM yang perlindungannya diberikan oleh UUD mendapat justifikasi dari konsep *ecopolitics* tersebut. Kedudukan konstitusi sebagai apa yang dalam teori *stufenbau des recht*-nya Hans Kelsen disebut sebagai *Grundnorm* dikehendaki untuk menjadi titik tolak sistem legislasi yang memberikan perlindungan atas lingkungan hidup sebagai acuan normatif praksis kebijakan publik yang terkait dengannya.

Ashiddiqie dengan mengutip Bensaid (2002) mengemukakan bahwa *ecodevelopment* menyangkut penguasaan secara sadar dan kolektif atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan keputusan-keputusan mengenai produksi dan konsumsi. Sedangkan *ecocracy* berkaitan dengan *environmentalism* reformis-teknokratis.<sup>22</sup> Dicantumkan konsep hak atas lingkungan hidup dalam konstitusi yang telah mempengaruhi gagasan mengenai *ecodevelopment* dan *ecocracy* perlu ditopang oleh sistem legislasi yang mampu mengkomunikasikan gagasan tersebut agar dapat diterjemahkan ke dalam praksis penyelenggaraan fungsi pemerintah dan

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal 19-20.

<sup>20</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Jakarta, 2010, hal. 276.

<sup>21</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, 2002, hal. 95.

<sup>22</sup> Jimly Ashiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 7



tata kelola pembangunan. Stephen Laws dalam buku yang ditulis oleh Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki sebagai editor menuliskan bahwa dalam legislasi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pendekatan subjektif menekankan pada pendekatan makna pembicara (*speaker*), yang menekankan bahwa legislasi menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan tindakan komunikatif yang menunjukkan bahwa legislator berbicara kepada pendengarnya (*the hearer*) yang menjadi para pengguna produk legislasi. Dari hal itu diargumentasikan bahwa persoalan sesungguhnya adalah makna yang diberikan pembicara.<sup>23</sup> Dalam konteks pendekatan subjektif tersebut, dituntut adanya pemahaman dari para legislator mengenai gagasan konstitusi hijau yang kini menjadi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan konstitusional.

Dalam pendekatan objektif/rasional, ditekankan perlunya berangkat dari teks yang diundangkan sebagai titik tolak penafsiran legislasi. Pendekatan objektif melihat pada makna tekstual dari legislasi. Makna dari legislasi ditemukan dari makna rasional dari apa yang dituliskan dalam teks undang-undang untuk menemukan arti yang sebenarnya dari legislasi.<sup>24</sup> Berdasarkan pendekatan objektif ini, kapasitas produk hukum harus mampu mencerminkan amanat konstitusi yang telah menempatkan hak atas lingkungan hidup yang kini merupakan hak konstitusional sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang perlindungannya diberikan oleh konstitusi. Seluruh uraian tersebut menekankan pentingnya kedudukan legislasi yang didukung oleh institusionalisasi etika dalam sistem kebijakan untuk mewujudkan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun tata ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

#### 4. PENUTUP

Beberapa hal penting yang perlu dikemukakan sebagai catatan akhir dari narasi ini meliputi beberapa hal:

1. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berpedoman pada standar umum wewenang pemerintah maupun standar wewenang sektoral tersebut di atas agar tindakan pemerintah yang dilakukan memenuhi standar keabsahan (*rechtsmatigheid*). Selain itu, diatas semua perspektif normatif di atas sangat penting menempatkan etika, khususnya etika tanggung jawab, guna menopang berbagai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
2. Konsep *sticks and carrots* merupakan instrumen untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengaturan pemerintah dalam penataan ruang. Penataan ruang dapat menimbulkan beragam dampak terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan derajat kehidupan sosial masyarakat. Konsep etis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan manajemen tata ruang menjadi faktor yang sangat signifikan untuk mendukung pengelolaan tata ruang berbasis etika tanggung jawab.
3. Pascaamandemen UUD Negara RI 1945 ditambahkan Bab XA ke dalam konstitusi RI tersebut pengaturan konstitusional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya perlindungan terhadap HAM atas lingkungan hidup.
4. Berbagai produk legislasi yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap konstitusi yang dewasa ini telah menjadi konstitusi yang berwawasan lingkungan hidup (*green constitution*). Berbagai aktivitas pemerintah maupun masyarakat yang selama ini dinilai mengabaikan lingkungan hidup menimbulkan dorongan untuk menginisiasi langkah-langkah uji materiil atas produk undang-undang yang diklaim sebagai jaminan keabsahan berbagai aktivitas tersebut entah di bidang pengelolaan tambang pada khususnya maupun pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya, atau berbagai perijinan maupun aktivitas bisnis yang menimbulkan

---

<sup>23</sup> Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki, *Drafting Legislation-A Modern Approach*, Ashgate Publishing Limited, England and USA, 2010, hal. 37.

<sup>24</sup> Bandingkan, *ibid*, hal. 39.

dampak kerusakan lingkungan hidup. Maka, dewasa ini gagasan mengenai *ecodevelopment* maupun ekokrasi semakin menunjukkan pengaruh yang kian signifikan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

1. Bertens, K., *Etika*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
2. Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Jakarta, 2010.
3. Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki, *Drafting Legislation-A Modern Approach*, Ashgate Publishing Limited, England and USA, 2010
4. Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia – Tinjauan Teoretis dan Praktis, *makalah* disajikan dalam Studium General STTNAS Yogyakarta, 1 September 2003.
5. \_\_\_\_\_, Penyelenggara an Penataan Ruang (Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi dan Program Strategis), *makalah* disajikan dalam Acara Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah, Jakarta, 29 November 2005.
6. Faure, Michael and Nicole Nissen, *Environmental Law in Development – Lessons from the Indonesian Experience*, Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House, UK, 2006.
7. Franz magnis-Suseno, *Etika Abad ke-20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006
8. Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution – Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Rajawali Press, Jakarta, 2009
9. Paulus Effendie Lotulung, *Himpunan Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
10. Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, 1994.
11. Rene Seerden dan Fritz Stroink, *Administrative Law of The European Union, its Member States and The United States-A Comparative Analysis*, Intersentia Uitgevers Antwerpen-Groningen, 2002.
12. Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan* (disunting oleh Philipus M. Hadjon), Pengantar Hukum Perijinan, Yuridika, 1993.
13. Sonny Keraf, A., *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, 2002.
14. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
15. *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* dan *United Nations Human Settlements Programme*, Perumahan bagi Kaum Miskin di Kota-kota Asia, 2008.
16. <http://pojokmalam.blogspot.com/2011/01/jokowi-walikota-paling-berhasil-di.html> (diakses tanggal 4 Maret 2012 pukul 07.00 WIB).
17. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
18. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

## MEMBENTUK ARSITEKTUR YANG BERETIKA DALAM DESAIN PERKOTAAN DENGAN KONSEP PERANCANGAN ARSITEKTUR HIJAU

**Munichy Bachron Edrees**

Staff Pengajar Jurusan Arsitektur

Universitas Islam Indonesia

E-mail : [m\\_bachronedrees@yahoo.co.id](mailto:m_bachronedrees@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Most people said that Green Architecture is the building which is full of plants surrounding it, so the majority color is green. It means many people don't know yet the meaning of Green Architecture. Let alone that Green Architecture is the system to respond the problems of environment while designing buildings/space.*

*Green architecture/green building, also known as green construction or sustainable building, is the practice of creating structures and using processes that are environmentally responsible and resource-efficient throughout a building's life-cycle.*

*Green architecture/green building reduce and ultimately the impacts of building on the environment and human health. It often emphasizes taking advantage of renewable. While the practices, green building are constantly evolving and may differ from region to region, there are fundamental principles that persist from which the method is derived. On the aesthetic side of green architecture or sustainable design is the philosophy of designing a building that is in harmony with the natural features and resources surrounding the site.*

*There are several steps in designing sustainable buildings: specify 'green' building materials from local sources, reduce loads, optimize systems, and generate on-site renewable energy.*

**Keywords:** *problems of environment-fundamental principles-steps in designing sustainable buildings*

### 1. PENDAHULUAN

*"Kerusakan yang meluas di daratan dan lautan karena perbuatan tangan manusia untuk merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka sendiri supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar."*

*"Berjalanlah di bumi dan periksalah bagaimana akibat orang-orang sebelum kamu. Mereka kebanyakan menyekutukan Allah." (Q.S.Ar Ruum:41-42).*

Menurut Firman Allah di atas, jelas bahwa kerusakan yg terjadi di bumi ini karena perbuatan manusia yg tidak 'Amanah', artinya manusia di dalam melakukan sesuatu tidak bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Karena itu manusia harus menyadari, mengapa Allah menciptakan manusia dan menghadirkannya dimuka bumi itu untuk apa? Ternyata Allah menghadirkan manusia dibumi itu sebagai khalifah (Pemimpin), tugas pemimpin adalah "Rahmatan Lil Alamin" (Memberikan rahmat bagi semesta alam). Artinya manusia itu harus peduli terhadap apa yang terjadi disekelilingnya, artinya tanggap terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi disekelilingnya, dan berusaha untuk memperbaikinya.

Karena itu kita bisa melihat fenomena yg terjadi disekeliling kita, kerusakan-kerusakan lingkungan alam seperti adanya panas global itu akibat dari kita sebagai arsitek yang di dalam merancang tidak memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi setelah rancangan kita itu dibangun. Perlu diketahui adanya fakta bahwa, bangunan merupakan

pengguna energi yang terbesar di dunia. Lebih dari setengah pengguna energi di dunia itu didedikasikan untuk bangunan, mulai dari proses pembangunannya, bahan bangunan yang digunakan, sampai saat bangunan itu dioperasikan dan dirawat, hingga bangunan tersebut dihancurkannya.

Bagaimana kita harus bersikap sebagai arsitek yang arif dan bijak dalam merancang bangunan? Ini adalah pertanyaan klasik yang sering muncul dalam benak kita. Semestinya didalam merancang kita harus peduli terhadap lingkungan alam yang ada di sekeliling bangunan yang kita rancang tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkan potensi alam disekitar bangunan, karena banyak Arsitek dalam merancang tidak mempedulikan lingkungannya, mereka hanya fokus kepada bangunan yg dirancangnya sehingga pada akhirnya berakibat fatal terhadap lingkungan.

Merupakan tantangan bagi kita, bagaimana kita melibatkan lingkungan alam disekitar bangunan yang kita rancang dapat saling mendukung dengan rancangan kita. Ian L.McHarg (1967) mengatakan pentingnya kita merancang dengan melibatkan alam di dalam desain, untuk menghindari bahaya dampak lingkungan dikemudian hari. Hal ini dapat kita lihat dampak yang terjadi dengan adanya panas global yang berdampak kepada penduduk bumi itu sendiri termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan manusia.

Namun masalah lingkungan kerap juga berkaitan dengan masalah politis. Banyak kita temui penyalahgunaan pemanfaatan lahan di lingkungan urban yang disebabkan oleh lemahnya regulasi peraturan pemerintah, maupun 'permainan-permainan kotor' para oknum baik dari investor, perencana maupun pemerintah. Solusinya adalah "*Green Architecture* atau *Arsitektur Hijau*", dengan dukungan dari semua pihak, baik itu *stake holder*, perencana, maupun pemerintah. Arsitektur yang ramah lingkungan akan menciptakan lingkungan urban yang mampu memenuhi kebutuhan psikis maupun fisik penghuninya/penggunanya. Lingkungan di sini adalah termasuk di dalamnya lingkungan sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan hijau. Ketiga hal tersebut membentuk hubungan yang saling terkait, sehingga pemenuhannya akan menuju konsep *sustainable architecture/Eco-Architecture* itu sangat relevan digunakan sebagai konsep awal dalam merancang.

## 2. PROBLEMATIKA DALAM LINGKUNGAN URBAN

'Kota' dianggap sebagai pembawa 'udara kebebasan'. Sehingga tidak sedikit masyarakat pedesaan berbondong-bondong menuju kota dengan tujuan masing-masing dan penuh pengharapan. Namun sebenarnya 'kota' adalah penipuan sekaligus pengharapan. Kota mampu menggiring kepada harapan, sekaligus 'kegelapan'. Pengembangan dan pembangunan maupun penataan perkotaan harus menunjukkan kemungkinan-kemungkinan 'transaksi' yang lebih baik antara alam sekitar dengan fisik sosial manusia, mengangkat kondisi yang lebih dalam untuk mendesain dan membangun lingkungan dan masyarakat yang lebih baik.

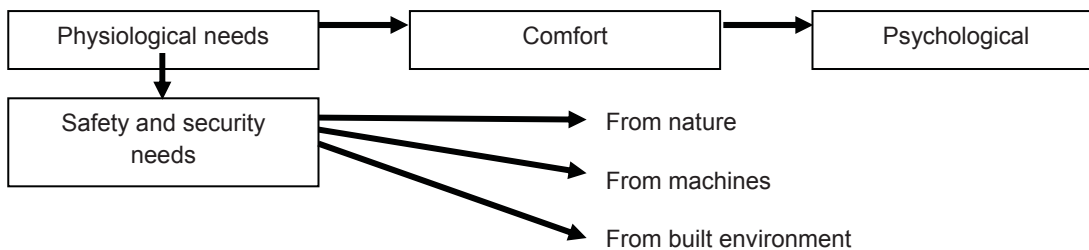


Gambar. 1

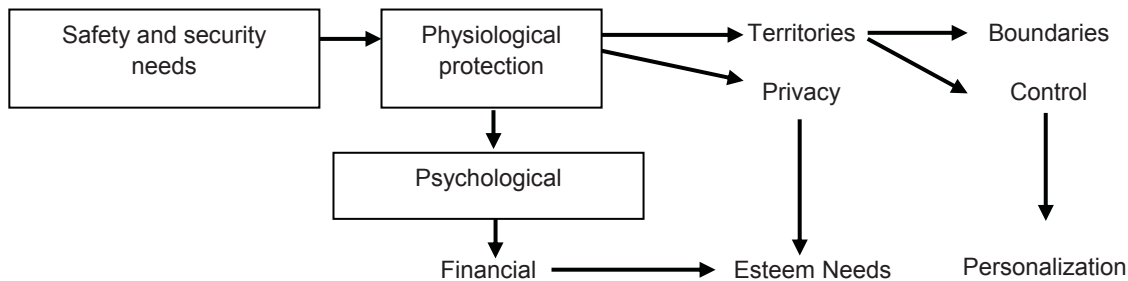
Dari gambar 1 di atas terlihat betapa kota mempunyai 'dosa' terhadap kaum marginal, dimana golongan tidak mampu menempati area yang tidak sah secara hukum, juga lingkungan yang tidak layak huni. Kebutuhan fisik akan bangunan dan lingkungan yang

nyaman, sehat, tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kebutuhan psikis akan keamanan, ketenangan, berestetika, juga tidak terpenuhi. Secara makro, tampilan kota yang seperti nampak pada gambar 1 juga tidak memenuhi kaidah perkotaan yang ramah lingkungan. Lalu kalau ditanya, ini salah siapa? Akan sangat panjang dan luas pemaparannya. Namun dalam konteks kita sebagai arsitek, perlu dicermati bahwa arsitek juga mempunyai peran dalam membentuk wajah kotanya, walau seringkali peran arsitek juga dipengaruhi oleh masalah politis dan uang. Banyak arsitek yang lebih senang mengapresiasi jati dirinya dengan desain-desain bangunan 'mercusuar', namun tidak ramah lingkungan dan tidak peka dengan konteks lingkungan sekitarnya.

Namun sebagai seorang arsitek, pertama-tama kita harus berpikir yang ideal, supaya pencapaiannya pun bisa optimal. Hal ini harus memenuhi semua kebutuhan fisik maupun psikologis/psikis (seperti tampak pada diagram 1 dan diagram 2).



**Diagram 1. Physiological Needs**  
(Source: Jon Lang, *The American Experience*, 1994)



**Diagram 2. Safety and Security Needs (Psychological Needs)**  
(Source: Jon Lang, *The American Experience*, 1994)

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan sejalan dengan konsep arsitektur hijau karena konsep ini merupakan konsep yang selaras dengan alam, sehingga akan mampu menciptakan arsitektur berkelanjutan (menciptakan lingkungan yang *sustainable*).

### 3. ARSITEKTUR EKOLOGIS sebagai TERAPAN DALAM ARSITEKTUR BERKELANJUTAN

*Sustainable architecture* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai arsitektur berkelanjutan, adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam, lingkungan ekologis manusia, dan arsitektur, sehingga dalam merancang bangunan dengan memperhatikan

konsep berkelanjutan tersebut, akan menghasilkan rancangan arsitektur yang efisien. Paradigma bagaimana arsitektur dapat berperanserta dalam pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana para arsitek dapat membuat keputusan dan menentukan prioritas dalam membuat konsep rancangannya, sehingga dasar pemikiran ekologis menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merancang arsitektur.

Arsitektur berkelanjutan didukung oleh *Green Architecture/Eco-Architecture*. Namun, "*eco-architecture*" bukanlah langgam arsitektur. "*Eco-architecture*" adalah paradigma bagaimana arsitektur dapat berperanserta dalam pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana para arsitek membuat keputusan dan menetapkan prioritas. Dasar pemikiran ekologis sepatutnya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam arsitektur.

"*Eco-architecture*" telah berkembang hingga memiliki kosakata dan ekspresinya sendiri. Namun, para arsitek jangan sampai melihat paradigma ini sebagai "gaya dan trend *eco-architecture*" dan mengabaikan pemikiran ekologis di dalamnya.

*Eco-architecture* sudah selayaknya mulai diterapkan dalam lingkungan binaan. Pengertian lingkungan binaan atau lingkungan terbangun adalah suatu lingkungan yang ditandai dominasi struktur buatan manusia. Sistem lingkungan binaan bergantung pada asupan energi, sumberdaya, dan rekayasa manusia untuk dapat bertahan. Dalam perencanaan kota, istilah ini memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar lingkungan yang dipakai manusia adalah lingkungan buatan, dan lingkungan buatan ini harus diatur agar dapat mempertahankan hidup manusia dengan baik.

Sebenarnya arsitektur ekologis itu mengandung juga bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan penghuninya), arsitektur hemat energi (dengan memanfaatkan energi surya dan udara), arsitektur bionik(memperhatikan keberadaan alam), serta arsitektur berkelanjutan. Sehingga istilah arsitektur ekologis adalah istilah holistic yang sangat luas dan mengandung semua bidang tersebut.

Setiap konstruksi bangunan yang didirikan oleh manusia dari bahan bangunan apa pun, setelah selesai pasti akan menjadi tua, lapuk, lemah dan lama-kelamaan akan rusak dan hancur. Berbeda dengan konstruksi alami, artinya pembangunan konstruksi yang dibangun oleh alam itu sendiri, yang pada saat mulai tumbuh, kemudian besar dan bertambah kuat dan tahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Oleh karena itu kita bisa belajar dari alam dalam membangun.

Berbicara tentang lingkungan tentunya tidak lepas dari masalah ruang. Ruang, dalam undang-undang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan definisi tersebut, ruang dilihat sebagai wadah di mana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut, mari kita belajar dengan alam agar kita didalam membangun tidak hanya mempertimbangkan dari segi fungsi, estetika, teknik saja tapi juga kita mempertimbangkan dari segi keberlanjutannya artinya kita memperhatikan nilai ekologisnya. Kesadaran atas hubungan-hubungan tersebut telah mengembangkan pengertian tentang pembangunan berkelanjutan dan rasa tanggung jawab terhadap alam yang perlu dilestarikan.

#### 4. ECO-ARSITEKTUR DAN PENGARUHNYA PADA MANUSIA

Udara adalah campuran berbagai gas (nitrogen, oksigen, dll) yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihirup oleh manusia ketika bernafas. Hubungan erat antara udara dan kehidupan adalah pengalaman kehidupan manusia. Makin tercemar udara, makin susah pernafasan dan kualitas kehidupan menurun. Pencemaran lingkungan bukan hal yang baru. Sejak awal masa industrialisasi, pencemaran udara oleh manusia meningkat sangat tajam sehingga sistem pembersihan udara secara alami tidak berfungsi lagi dengan sempurna. Disamping itu pencemaran udara juga menimbulkan efek samping seperti pemanasan global dan lubang ozon.

Debu merupakan partikel-partikel kecil yang mengikat pada molekul udara. Emisi debu tersebut banyak yang berasal dari industri, asap kendaraan, rumah tangga, dll. Selain debu yang mengikat molekul udara dan yang mengganggu kesehatan manusia serta mengakibatkan shelter kabut ada juga partikel zat cair atau gas yang bersifat mirip (aerosol) dan yang dapat mengakibatkan pemanasan global dan mempengaruhi lubang ozon, hal ini sangat mengganggu dan dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia.

Pemanasan global adalah naiknya suhu permukaan bumi antara lain dikarenakan meningkatnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca di atmosfer meningkat akibat adanya peningkatan kadar gas-gas rumah kaca antara lain karbondioksida, metana dan ozon. Prinsipnya sinar matahari yang menerpa rumah-rumah kaca (bangunan-bangunan yang selubungnya dari kaca), memantulkan inframerah kemana-mana sehingga gas menyebar dan suhu udara menjadi panas, sehingga menjadikan masalah yang serius bagi kehidupan manusia.

Lubang ozon (perusakan lapisan ozon). Ozon adalah gas yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Satu molekul ozon mempunyai tiga atom oksigen. Oleh karena itu molekul ozon mudah bereaksi dengan zat-zat lain. Udara itu mengandung beberapa macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbondioksida, ozon dll. Ozon memiliki konsentrasi jauh lebih rendah dibandingkan nitrogen dan oksigen, yang mana ini semua sangat mengganggu manusia karena atmosfer bumi yang naik tajam.

Oleh karena itu yang menjadikan masalah bagi kita adalah bagaimana kita mengantisipasi kerusakan-kerusakan itu dengan merespon unsur eco-arsitektur tersebut sehingga itu semua dapat kita manfaatkan ketika kita merancang bangunan.

Pada hakekatnya kegiatan penataan ruang memiliki tujuan akhir berupa penciptaan lingkungan bermukim yang lebih baik, di mana menetapkan apakah suatu lingkungan bermukim tersebut 'baik', 'kurang baik' atau bahkan 'buruk' bukanlah suatu pekerjaan yang dengan mudah dapat dilakukan. Seringkali pengkategorian kualitas tersebut berkaitan erat dengan konteks budaya setempat (Rapoport, 1979), sehingga kualitas baik bagi suatu kelompok pada suatu tempat akan berbeda dengan kelompok lain (atau kelompok yang sama, pada masa yang berbeda) pada tempat yang sama.

Dengan demikian, kualitas lingkungan bermukim perlu dipahami dan dikaji dalam konteks budayanya, seperti yang telah ditetapkan dan dimengerti oleh kelompok yang terlibat dalam pengkajian tersebut (Samadhi, 2004). Dengan kata lain, 'apa arti kualitas lingkungan bermukim bagi suatu kelompok masyarakat tertentu' merupakan pertanyaan mendasar sebelum melakukan kegiatan penataan.

Bangunan gedung dan lingkungan disekitarnya merupakan tempat aktivitas utama kita sehari-hari. Pembentukan lingkungan yang memadukan keserasian antara bentuk rancang bangun dengan lingkungan sekitarnya menjadi konsep yang diusung *eco-settlement*. Salah satunya menggalakkan pembangunan permukiman dengan konsep arsitektur ramah lingkungan atau arsitektur hijau.

Permukiman ramah lingkungan adalah permukiman yang aman, nyaman, dan dirancang sedemikian rupa sehingga minim mengkonsumsi sumber daya alam (listrik, air, mineral dan material) serta minim memberikan dampak negatif terhadap alam, lingkungan dan manusia (minim mengemisi CO<sub>2</sub>, minim menyisakan limbah padat, cair dan gas, tidak menimbulkan

pemanasan lingkungan, banjir, tanah longsor, dsb). Beberapa kriteria yang patut ditempuh untuk mewujudkan bangunan hijau diantaranya adalah taat peraturan, *zero waste*, *zero run off* (air hujan dapat diserap tanah, tidak menjadi aliran air permukaan).

## 5. KONSEP PERANCANGAN YANG BERETIKA LINGKUNGAN

Dalam arsitektur, hendaknya kita memasukkan etika lingkungan dalam mendesain, karena pengertian arsitektur itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bukan hanya tentang ilmu bangunan tapi juga secara luas mempelajari keterkaitannya dengan manusia, dan lingkungannya. Arsitektur bukanlah perburuan filosofis atau estetis pribadi oleh perorangan, melainkan arsitektur haruslah mempertimbangkan kebutuhan manusia sehari-hari dan menggunakan teknologi untuk mencapai lingkungan yang dapat ditempati. *Design Methodology Movement* yang melibatkan orang-orang seperti Chris Jones atau Christopher Alexander mulai mencari proses yang lebih inklusif dalam perancangan, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian mendalam dalam berbagai bidang seperti perilaku, lingkungan, dan humaniora dilakukan untuk menjadi dasar proses perancangan. Sedangkan menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia (*human needs*), adalah:

- *Physiological needs (hunger, thirst)*
- *Safety needs (securing and protection from physical harm)*
- *Belonging and love needs (membership in a group and the receiving of affection)*
- *Esteem needs (desires of an individual to be held in high value by himself/herself)*
- *Actualization needs (representing the desire to fulfill one's capacities)*
- *Cognitive and aesthetic needs (the thirst for knowledge and the desire for its own sake)*

Dalam sebuah perencanaan dan perancangan, arsitek harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia (klien). Kebutuhan-kebutuhan ini akan membentuk perilaku dari masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk karakter-karakter bangunan/lingkungan sesuai dengan yang mereka inginkan. Kesalahan akan terjadi apabila sebuah bangunan/lingkungan yang dirancang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dan tidak sesuai dengan pola perilakunya, karena bagaimanapun juga manusia sebagai pemakai dan hidup dalam bangunan/lingkungan tersebut akan meresponnya.

Yang juga harus diperhatikan adalah 3 *Primary emotional responses* (Mehrabian&Russel, 1974):

- *Pleasure (feelings of liking and disliking)*
- *Arousal (interest-evoking qualities of the environment)*
- *Dominance (individual's feeling of freedom for action)*

Namun, dalam aplikasinya di lapangan, terjadi kecenderungan utama dalam mengidentifikasi suatu tempat yaitu melalui keberadaan bangunan-bangunan monumental yang menjadi *landmark* di daerah tersebut. Tidak heran kenapa pemerintah kita pun mengalokasikan anggaran yang cukup proporsional dalam hal konstruksi bangunan-bangunan yang dianggap bisa memberikan identitas pada daerahnya, namun di sisi lain 'melupakan' pembangunan lingkungan yang menyeluruh termasuk di dalamnya adalah penataan lingkungan kumuh.

Merancang bangunan yang ramah lingkungan maupun merancang lingkungan yang berkelanjutan sebagai wujud dari perancangan yang beretika, dapat dimulai dari:

- Penggunaan material yang efisien, yaitu dengan memanfaatkan material sisa untuk digunakan dalam bangunan, sehingga tidak ada material bekas yang terbuang, misalnya kayu sisa bekesting dan lain-lain.
- Penggunaan teknologi dan material baru, dengan memanfaatkan potensi energi alami seperti energi angin, sinar matahari dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik untuk kegunaan pada rumah tangga dan bangunan lain. Juga engan memanfaatkan material baru melalui hasil *research* yang secara global dapat



membuka kesempatan menggunakan material yang cepat diproduksi, murah dan terbuka terhadap inovasi, misalnya bambu.

- Efisiensi penggunaan lahan, lahan yang semakin sempit dan mahal, maka lahan tidak harus digunakan seluruhnya untuk bangunan, karena harus mempertimbangkan keberadaan lahan hijau sebagai keberlanjutan potensi lahan, juga perlu dipertimbangkan penggunaan lahan secara efisien, kompak dan terpadu. Potensi hijau didalam lahan dapat digantikan atau dimaksimalkan dengan berbagai inovasi, misalnya pembuatan atap diatas bangunan (*roof garden*), atau taman gantung, pagar tanaman, tanaman rambat dll. Menghargai adanya tanaman yang ada dilahan, dengan tidak mudah menebang pohon-pohon, sehingga pohon-pohon yang dilahan itu merupakan bagian dari bangunan yang akan kita rancang.
- Desain ruang terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka menghadap ke taman dapat menjadikan inovasi untuk mengintegrasikan luar dan dalam bangunan dan juga memberikan fleksibilitas ruang yang lebih besar. Dalam merancang dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat menjadi tolok ukur dalam menggunakan berbagai potensi lahan, misalnya; berapa luas dan banyak ruang yang diperlukan? Dimana letak lahan? (Di kota/di desa?) dan bagaimana konsekuensinya terhadap desain? Bagaimana bentuk site dan pengaruhnya terhadap desain ruang? Berapa banyak potensi cahaya dan penghawaan alami yang digunakan?
- Efisiensi penggunaan energi, memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara maksimal pada siang hari sehingga dapat mengurangi penggunaan energi listrik. Memanfaatkan penghawaan alami sebagai pengganti pengkondisian udara buatan (*air conditioner*). Menggunakan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan dengan cara-cara inovatif lain. Memanfaatkan air hujan dalam cara-cara inovatif untuk menampung dan mengolah air hujan untuk keperluan domestik.
- Manajemen limbah. Dengan membuat system pengolahan limbah domestik seperti air kotor (*black water, grey water*) yang mandiri dan tidak membebani system aliran air kota. Cara-cara inovatif yang perlu dicoba seperti membuat system dekomposisi limbah organik agar terurai secara alami dalam lahan, membuat benda-benda yang biasa menjadi limbah atau sampah domestik dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau dapat dengan mudah terdekomposisi secara alami.
- Efisiensi penggunaan energi seperti pencahayaan dan penghawaan alami merupakan konsep spesifik untuk wilayah dengan iklim tropis.
- Sikap hormat terhadap Alam.
- Tanggung Jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan isinya.
- Prinsip Solidaritas. Yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solid, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan.
- Kasih Sayang dan Kepedulian. Prinsip satu arah, menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam.
- "No Harm", yaitu Tidak Merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu
- Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam. Ini berarti, pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai obyek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia.
- Prinsip Keadilan. Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari.

- Prinsip Demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbeaan keanekaragaman sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan didalam menentukan baik-buruknya, tusak-tidaknya, suatu sumber daya alam.
- Integritas Moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.

## 6. KESIMPULAN

Setelah kita melihat dampak lingkungan yang terjadi di sekitar kita akibat ulah manusia dalam beraktifitas di kehidupannya dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan, akhirnya bumi akan semakin rusak, hal ini bisa kita lihat pencemaran lingkungan dimana-mana,. Sejak masa industrialisasi, pencemaran udara sangat meningkat tajam sehingga sistem pembersihan udara secara alami ttdak berfungsi lagi dengan sempurna. Oleh karena itu mulai dari sekarang ini kita harus berupaya untuk tidak mencemari lingkungan dalam beraktifitas apapun. Juga bagi para arsitek mestinya dapat bersikap lebih arif dan bijak dalam mengambil keputusan didalam membuat konsep rancangannya, artinya dalam merancang harus cerdas, tidak merusak alam tapi mengajak alam itu untuk bermain-main dalam rancangannya (hidup selaras dengan alam).

Konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang nantinya dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia. Dan paradigma bagaimana arsitektur dapat berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini bagaimana para arsitek mengambil keputusan didalam membuat konsep desain, atas dasar pemikiran ekologis yang diterapkan dalam arsitektur, dalam hal ini sering orang menyebutnya arsitektu yang ramah lingkungan atau dengan istilah, arsitektur hijau (*Green building*).

Untuk membentuk suatu lingkungan yang berkelanjutan, sebagai arsitek kita perlu mempertimbangkan dan menggunakan dasar-dasar pemikiran ekologis, yang juga terkait dengan kebutuhan manusia baik dari sisi psikologis maupun fisiologis, tanpa melupakan konteks dimana bangunan ataupun lingkungan tersebut dibangun.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

1. Ardianto, Anton., 2007, *Ilmu fisika bangunan*, Yogyakarta: Kanisius.
2. Breheny, M., 1992, *European Research in Regional Science 2, Sustainable Development and Urban Form*, Pion, London.
3. Daldjoeni,N., 1977, *Penduduk, lingkungan dan masa depan*, Bandung.
4. Daniels, Klaus., 1977, *The technology of ecological building*. Basel: Birkhauser.
5. Frick,Heinz/Mulyani., 2006, *Arsitektur ekologis*, Yogyakarta: Kanisius.
6. Henry J/Smith,Peter., 1983, *Environmental system*, New York, Reinhold.
7. Mc.Graw-Hill., 1995, *Designing With Nature*, USA.
8. Prestel., 2000, *The Green Skyscraper: The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings*, Germany.
9. Soemarwoto., 1991, *Ekologi,lingkungan hidup dan pembangunan*, Jakarta, Jembatan.
10. *The HOK Guidebook to Sustainable Design*
11. Wiley-Academy, *Ecodesign: Instruction Manual*, UK
12. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Yogyakarta,UII Press,1997

**KELOMPOK A**

**ETIKA, HUKUM, DAN HAM**



**MANAJEMEN SISTIM PEMADAM KEBAKARAN  
PADA BANGUNAN UMUM DI SEMARANG  
MANAJEMEN SISTIM PEMADAM KEBAKARAN  
PADA BANGUNAN UMUM DI SEMARANG**

**Dzulfikkar<sup>1)</sup>, Sumarwanto<sup>2)</sup>**

Mahasiswa Program Studi Teknik Arsitektur<sup>1)</sup>

Dosen Program Studi Teknik Arsitektur<sup>2)</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang<sup>1,2)</sup>

E-mail : [fikkardzul@gmail.com](mailto:fikkardzul@gmail.com)<sup>1)</sup>

E-mail : [wanto.sumar@gmail.com](mailto:wanto.sumar@gmail.com)<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*The rate of growth is very rapid development in Indonesia, especially public buildings as a community service center in a wide range of activities and interests. But as an increasing number of public buildings is not supported by aspects of safety and security in the building and its environment. Because most of the buildings generally are not met standards of fire protection. Lack of community understanding of the importance of fire prevention may lead to greater fire risk again. The lack of preparation of human resources from both the government and team building outage can threaten the security and safety of buildings. Therefore, the required number of fire protection strategies in order to anticipate the risk of fire hazard, especially in public buildings.*

*New facilities and renovation projects need to be designed to incorporate efficient, cost-effective passive and automatic fire protection systems. These systems are effective in detecting, containing, and controlling and/or and extinguishing a fire event in the early stages. Fire protection engineers must be involved in all aspects of the design in order to ensure a reasonable degree of protection of human life from fire and the products of combustion as well as to reduce the potential loss from fire (i.e., real and personal property, information, organizational operations). Planning for fire protection in/around a building involves knowing the four sources of fire: natural, manmade, wildfire and incidental and taking an integrated systems approach that enables the designer to analyze all of the building's components as a total building fire safety system package.*

**Keywords:** *public buildings, strategies, fire protection*

**1. PENDAHULUAN**

Pada perkembangan pembangunan gedung di Indonesia yang semakin pesat terutama di dalam bangunan umum banyak sekali aspek-aspek keselamatan yang kurang diperhatikan yaitu perlindungan terhadap kebakaran. Padahal dalam sebuah bangunan dituntut harus memiliki standarisasi proteksi terhadap kebakaran.

Dari kondisi tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam bangunan umum:

- a. Belum terpenuhi berbagai alat penyelamatan di luar bangunan terhadap tinggi bangunan.
- b. Kurangnya pemahaman tentang fleksibilitas desain bangunan tinggi khususnya perkantoran yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
- c. Kurangnya pemenuhan terhadap standart yang ditetapkan akibat adanya pertumbuhan kebutuhan yang sangat kompleks.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- d. Tidak adanya persiapan pada SDM dalam rangka penanggulangan kebakaran baik dari tim pemadam kebakaran dari pihak pemerintah maupun tim pemadam kebakaran gedung juga menentukan keamanan dan keselamatan bangunan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Tujuan Fire Safety

Tujuan perencanaan penanggulangan kebakaran (Fire Safety) adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia dan kemudian menghindari kerusakan seminimal mungkin. Beberapa fungsi langkah penyelamatan terhadap bahaya kebakaran, antara lain:

- mencegah api/kebakaran
- mencegah api berkembang tidak terkendali
- mendeteksi adanya api sedini mungkin
- memadamkan api secepatnya
- memudahkan pengevaluasian penghuni dan barang
- meminimalkan kerusakan

### Klasifikasi Bangunan

Kelas bangunan adalah pembagian bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan jenis penggunaan bangunan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi	Spesifikasi bangunan
1.	Kelas 1	Gedung hunian biasa
2.	Kelas 2	Gedung hunian terdiri dari 2 atau lebih unit hunian (terpisah)
3.	Kelas 3	Gedung hunian diluar bangunan gedung kelas 1 atau kelas 2
4.	Kelas 4	Gedung hunian campuran
5.	Kelas 5	Gedung kantor
6.	Kelas 6	Gedung perdagangan
7.	Kelas 7	Gedung penyimpanan gudang
8.	Kelas 8	Gedung laboratorium/industri/pabrik
9.	Kelas 9	Gedung umum
10.	Kelas 10	Gedung atau struktur yang bukan hunian

(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000)

### Sarana Penyelamatan

Adapun komponen sarana penyelamatan dalam sebuah bangunan antara lain :

1. Sumber daya listrik darurat ( *Emergency Power* )  
Beberapa sumber daya listrik darurat yang digunakan. : batre dan generator (PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000). Dengan asumsi harus dapat bekerja secara otomatis terlebih saat sumber listrik utama sedang padam dan sumber daya listrik darurat dapat digunakan setiap saat.
2. Pencahayaan darurat ( *Emergency Light* )  
Proses evakuasi pastinya memerlukan penerangan atau pencahayaan(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000), yakni suatu sistem pencahayaan darurat harus dipasang di setiap jalur keselamatan.
3. Pintu darurat ( *Fire Door* )  
Dalam sarana penyelamatan, peran pintu darurat sangat penting. Beberapa syarat yang harus dipenuhi pada pintu darurat (Juwana, 2005), yakni :
  - a. tahan terhadap api sekurang – kurangnya dua jam.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- b. dilengkapi dengan minimal tiga engsel.
  - c. dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis ( *door closer* ).
  - d. dilengkapi dengan tuas atau tangkai pembuka pintu berada di luar ruang tangga
  - e. dilengkapi tanda peringatan : “ TANGGA DARURAT – TUTUP KEMBALI “
  - f. dilengkapi dengan kaca tahan api dengan luas maksimal 1m<sup>2</sup>
  - g. dicat dengan warna merah.
4. Tangga kebakaran ( *Fire Escape* )  
Pada saat terjadi keadaan darurat, bagi bangunan bertingkat, tangga darurat sangat penting untuk penyelamatan jiwa manusia. Syarat – syarat tangga darurat (Tanggoro, 2006) adalah :
- a. Tangga terbuat dari konstruksi beton atau baja yang mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam.
  - b. Tangga dipisahkan dengan dinding beton yang tebalnya minimum 15 cm atau tebal tembok 30 cm yang mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam.
  - c. Bahan – bahan *finishing*, seperti lantai dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak licin, susunan tangga terbuat dari besi.
  - d. Lebar minimum 120 cm ( untuk lalu lintas 2 orang ).
  - e. Supaya asap kebakaran tidak masuk dalam ruangan tangga, berupa *Exhaust fan* (menghisap asap) dan *Pressure fan* (menekan atau memberi tekanan asap).
  - f. Di dalam dan di depan tangga diberi alat penerangan sebagai penunjuk arah ke tangga dengan daya otomatis atau *emergency*.
5. Sistem kendali asap ( *Smoke Vestibule* ).  
Salah satu contoh untuk pengendalian asap yakni *Vent and Exhaust*. Alat ini dipasang pada tempat – tempat khusus seperti tangga kebakaran. *Vent and Exhaust* memiliki beberapa peran atau fungsi (Tanggoro, 2006) diantaranya adalah :
- a. Dipasang di depan tangga kebakaran yang akan berfungsi mengisap asap yang akan masuk pada tangga yang dibuka pintunya.
  - b. Dipasang di dalam tangga, secara otomatis berfungsi memasukkan udara untuk memberikan tekanan pada udara di dalam ruangan tangga. Tekanan tersebut akan mengatur tekanan udara di dalam ruangan lebih besar daripada udara
6. Komunikasi darurat  
Sistem komunikasi darurat, sebaiknya slalu ada pada bangunan gedung. Hal ini sangat penting dan berperan pada saat terjadi keadaan darurat. Sistem komunikasi darurat dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelamatan. Adapun penjelasan mengenai beberapa alat komunikasi (Tanggoro, 2006), adalah :
- a. Speaker Sound Pressure
  - b. Horn Speaker
  - c. Microphone dan Amplifier
7. Petunjuk arah jalan keluar  
Petunjuk “ EXIT “ harus dapat dilihat dengan jelas, diberi lampu yang menyala pada kondisi darurat, dengan kuat cahaya tidak kurang dari 50 lux dan luas tanda minimum 155 cm<sup>2</sup> serta ketinggian huruf tidak kurang dari 15 cm ( tebal huruf minimum 2 cm ) (Juwana, 2005).
8. APAR  
APAR harus mudah dilihat keberadaannya, karena jika terjadi keadaan darurat, maka akan mempermudah dan mempercepat menjangkaunya APAR sehingga api dapat segera dipadamkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh APAR yang berbentuk tabung, yakni :
- a. Tabung dengan segelnya harus dalam keadaan baik.
  - b. Etiket atau label mudah dibaca dengan jelas dan dapat dimengerti
  - c. Selang harus tahan terhadap tekanan tinggi.
  - d. Bahan baku pemadam selalu dengan keadaan baik.
  - e. Isi tabung gas sesuai dengan tekanan yang diisyaratkan.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- f. Penggunaannya belum kadaluwarsa.
  - g. Warna tabung harus mudah dilihat ( merah, hijau, biru, atau kuning )
9. Sprinkler
- Adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata (PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000). Berdasarkan jenis dan fungsi bangunan maka jenis sprinkler dibedakan menjadi tiga yakni :
- a. Wet Pipe Sprinkler System
  - b. Dry Pipe Sprinkler System
  - c. Special Sprinkler System (ASS), terdapat 2 macam yaitu menggunakan kabut air ( FOG ) bukan cairan dan menggunakan *Dry Chemical*

**Tabel 1:** Tabel klasifikasi bangunan dan kebutuhan sprinkler (Juwana, 2005)

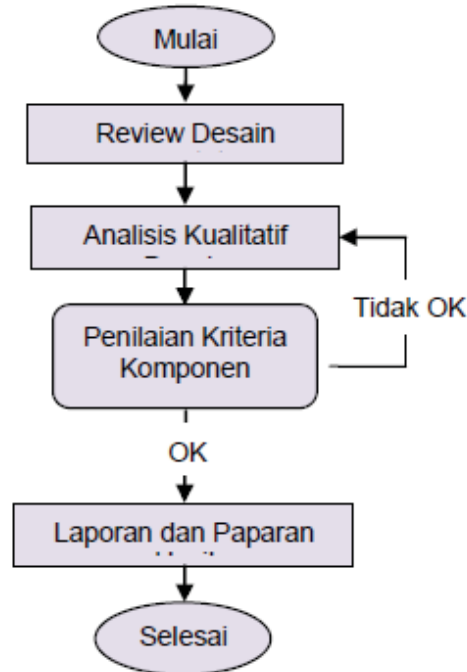
	Klasifikasi Bangunan	Tinggi/ Jml Lantai	Penggunaan Sprinkler
A.	Tidak Bertingkat	s/d 8 m (1lantai)	Tidak diharuskan
B.	Bertingkat rendah	s/d 8 m (2lantai)	Tidak diharuskan
C.	Bertingkat renah	s/d 14 m (4 lantai)	Tidak diharuskan
D.	Bertingkat Tinggi	s/d 40 m (8 lantai)	Diharuskan,mulai dari lantai 1
E.	Bertingkat Tinggi	Lebih dari 40 m (8 lantai)	Diharuskan,mulai dari lantai 1

10. Hydrant
- Hidran kebakaran adalah suatu alat yang dilengkapi dengan siang dan mulut pancar ( *nozzel* ) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran (PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000).
- Berdasarkan lokasi penempatan (Juwana, 2005), jenis hidran dibagi atas :
- a. Hidran Bangunan ( *Box Hydrant* – Kotak Hidran ), ditempatkan pada jarak 35 meter, ditambah 5 meter jarak semprotan air.
  - b. Hidran Halaman ( *Pole Hydrant* ), diletakkan di luar bangunan pada lokasi yang aman dari api.
11. Detektor
- Alat ini bertugas untuk mendeteksi adanya sinyal – sinyal bahaya. Beberapa jenis alat detektor ada 3 macam (Poerba, 2007), yakni :
- a. Alat deteksi asap ( *Smoke Detector* )
  - b. Alat deteksi nyala api ( *Flame Detector* )
  - c. Alat deteksi panas ( *Heat Detector* )
12. Sistem Alarm
- Adanya alarm kebakaran, dapat meminimalkan jumlah korban yang terjadi pada bahaya. Hal ini dikarenakan pada saat ada bahaya seperti kebakaran, maka alarm ini akan berdering keras, memberi tanda pada penghuni gedung bahwa ada bahaya yang mengancam, sehingga para penghuni dapat melakukan proteksi dini.
13. FSM ( *Fire System Management* )
- Dalam suatu keamanan pada bangunan gedung, selain didukung oleh peralatan atau komponen – komponennya ( utilitas ), perlu juga adanya sistem manajemen yang mengatur secara aktif tentang jalannya semua peralatan, teknis untuk keamanan bangunan gedung tersebut. Manajemen seperti ini sering disebut sebagai *Fire System Management* ( FSM ).



### 3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini kita mengambil beberapa sampel dari bangunan umum di Indonesia terutama terhadap komponen sarana penyelamatan :

1. Jalur Evakuasi (koridor) dan Jarak Tempuh  
 Jalur evakuasi atau koridor berfungsi sebagai penghubung antar ruangan, hal ini bertujuan untuk menghubungkan ruangan umum menuju ke ruangan aman atau area aman.

**Tabel 2:** Perbandingan jalur evakuasi dengan persyaratan dalam standart

Lantai	Dimensi Lebar		Standar (*)	Keterangan
	Maksimal (m)	Minimal (m)		
Basement	4,75	3,60	>180 cm	M
Lower Ground	5,05	4,30		M
Ground	1,60	1,20		TM
1 st Floor	2,45	2,00		M
2 nd Floor	2,45	2,00		M
3 rd Floor	2,40	1,50		TM
Sarana Pelengkap	Fire Detector	Ada		M
	Alarm	Ada		M
	APAR	Ada		M
	Hidrانت Box	Ada		M
	Sprinkler	Ada		M

(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000)

Keterangan : M =Memenuhi, TM= Tidak memenuhi

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

Berikut tabel mengenai Evaluasi Jarak tempuh dengan pembandingan Peraturan menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008,tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

**Tabel 3:** Perbandingan jarak tempuh dengan persyaratan dalam standart (\*)

Lantai	Dimensi Panjang		Standar (*)		Keterangan
	Maksimal (m)	Minimal (m)	Tanpa Sprinkler (m)	Bersprinkler (m)	
Basement	76,90	43,20	45	120	M
Lower Ground	76,80	45,90			M
Ground	76,40	44,50			M
1 st Floor	74,40	38,90			M
2 nd Floor	73,90	39,10			M
3 rd Floor	74,80	38,70			

(PU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan, 2008)

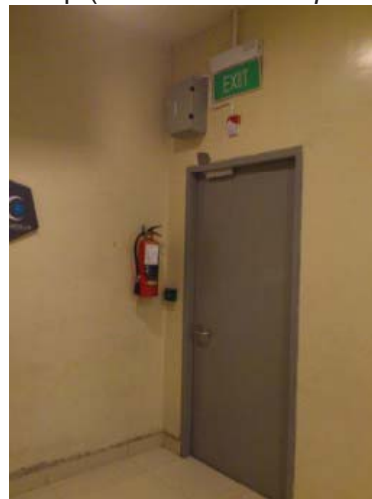
Keterangan : M =Memenuhi, TM= Tidak memenuhi

2. Tangga darurat

Tangga darurat terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar (Tanggoro, 2006) Selain itu juga terdapat pegangan besi baja pada tangga darurat. Pada ruang tangga juga terdapat pencahayaan darurat seperti lampu emergency. Namun pada tangga atau ruang tangga tidak terdapat sistem kendali asap (*exhaust fan* dan *pressure fan*).



**Gambar 1.**Pintu koridor



**Gambar 2.** Pintu darurat

**Tabel 4:** Perbandingan jalur evakuasi dengan persyaratan dalam standart

Aspek		Keterangan	Standart (*)	Ket
Fisik	Dimensi	Lebar = 125 cm	Dapat dilewati 2 orang secara bersamaan minimum 120 cm	M
		Lebar pijakan min (G)=300 mm	250-355 mm	M
		Tinggi Pijakan	115-190 mm	M

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

		(R)=176 mm		
		Jumlah (2R+G)=652 mm	Tidak lebih dari 700 mm dan tidak kurang dari 550 mm	M
		Jumlah Tanjakan=15 tanjakan	Tidak lebih dari 18 atau kurang dari 2 tanjakan	M
	Bahan	Anak Tangga= beton	Terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar	M
		Susunan=besi	Terbuat dari besi minimal dipasang di satu tepi tangga yang tidak dibatasi dinding	M
Fungsi	Banyak tangga darurat yang disfungsi karena tidak pernah dipakai (terkunci), yang berfungsi hanya jalur tangga darurat.		Hanya digunakan untuk keadaan darurat. Tidak disalahgunakan.	M
Jumlah	Terdapat 6 jalur tangga darurat, yakni untuk pengunjung dan untuk karyawan		-	-
Pintu Darurat	Fisik	Lebar = 90 cm	Minimum bila terbuka sempurna tidak kurang dari 1 meter	TM
		Tinggi= 210 cm	Tidak kurang dari 200 cm ( 2 m )	M
		Bahan= Besi	Terbuat dari bahan api	M
		Jumlah Engsel=3	Pintu harus dilengkapi minimal 2 engsel	TM
		Warna=Abu-abu	Pintu harus dicat dengan warna merah	TM
		Arah Bukaannya=keluar	Keluar ( menuju ke jalur penyelamatan )	M
	Fungsi	Disfungsi karena tidak pernah terpakai, selalu terkunci	Hanya digunakan pada waktu evakuasi	M
	Perlengkapan	Panic bar = ada	Pintu dilengkapi panic bar	M
		Tulisan EXIT = ada	Pintu dilengkapi dengan peringatan tulisan “ EXIT “	M
		Kaca tahan api = ada	Terdapat kaca tahan api	M
		Penutup otomatis= ada	Pintu dilengkapi dengan penutup pintu	M

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

Perlengkapan	Basement	Terpendek = 43,20 Terpanjang = 76,90	otomatis Mudah dijangkau, tidak lebih dari 60 m	TM
	Lower Ground	Terpendek = 45,90 Terpanjang = 76,80	jarak antar eksit. Jarak dari sentral	
	Ground	Terpendek = 44,50 Terpanjang = 76,40	kegiatan tidak lebih dari 30 m. Tangga berada dalam ruangan tahan api.	
	1 st Floor	Terpendek = 38,90 Terpanjang = 74,40		
	2 nd Floor	Terpendek = 39,10 Terpanjang = 73,90		
	3 rd Floor	Terpendek = 38,70 Terpanjang = 74,80		

(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000)

Keterangan : M =Memenuhi, TM= Tidak memenuhi

3. APAR



**Gambar 3.** APAR warna merah

**Tabel 5:** Perbandingan data APAR dengan persyaratan dalam standart

Lantai	Jumlah APAR	Jenis Media	Luas Lantai Tiap Zona (m <sup>2</sup> )	1 tabung /luas (m <sup>2</sup> )	Standart (*)	Ket
	Tiap Zona					
Basement	12	DP=12	13.526	1 tabung/1.127	1 tabung/ 500 m <sup>2</sup>	TM
Lower Ground	12	DP=12	13.526	1 tabung/1.127		TM
Ground	12	DP=12	13.526	1 tabung/1.127		TM
1 st Floor	14	DP=14	12.990	1 tabung/927		TM
2 nd Floor	14	DP=14	12.990	1 tabung/927		TM
3 rd Floor	14	DP=14	12.793	1 tabung/913		TM

(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000)

Keterangan : M =Memenuhi, TM = Tidak memenuhi

4. Detektor

Detektor yang digunakan adalah Heat Detector. Sistem detektor juga berhubungan dengan sistem alarm. Alarm dihubungkan oleh Panel Fire Alarm.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



**Gambar 4.** Fire Detektor



**Gambar 5.** Alar

**Tabel 6:** Perbandingan detektor dengan persyaratan dalam standart

Lantai	Jumlah detektor	Luas lantai tiap zona	1 detektor /luas	Standart (*)	Lebar Dinding Koridor
Basement	297	13.526	45,5	1 detektor/ 46 m <sup>2</sup>	M
Lower Ground	298	13.526	45		M
Ground	301	13.526	45		M
1 st Floor	290	12.990	44		M
2 nd Floor	290	12.990	44		M
3 rd Floor	293	12.793	43		M

(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000)

Keterangan : M =Memenuhi, TM = Tidak memenuhi

5. Hidrant Box

Hydrant box berwarna merah. Berikut pengukuran fisik hydrant box ;



**Gambar 6.** Hidrant box ruangan



**Gambar 7.** Hidrant box halaman

**Tabel 7:** Perbandingan data hidrant box dengan persyaratan dalam standart

No.	Aspek	Keterangan		Standart 1	Ket
1.	Fisik	Kotak hydrant :	Plat baja	Baja, besi, tembaga	M
		Panjang :	66 cm	52 cm	M
		Lebar :	20 cm	15 cm	M
		Tinggi :	66 cm	66 cm	M
		Katup Hidrant :	2 inch	1,5 inch	M
		Selang			
		Diameter :	2 inch		M
		Panjang :	30 m	30 m	M
2.	Sumber Air	Nozle :	2 inch	1,5 inch	M
		Air sumur		PAM, sumur	M

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

Luas Lantai (m <sup>2</sup> )		Jumlah Hidrant Box	1 hidrant/ luas	
Basement=13.526 m <sup>2</sup>		10	1/800 m <sup>2</sup>	TM
Lower Ground=13.526 m <sup>2</sup>		10		TM
Ground=13.526 m <sup>2</sup>		14		M
1 st Floor=12.990 m <sup>2</sup>		7		TM
2 nd Floor=12.990 m <sup>2</sup>		18		M
3 rd Floor=12.793 m <sup>2</sup>		12		TM
3.	Pompa	Motor listrik dan mesin	Minimal 1 1 bekerja secara otomatis dan manual	M
		Diesel		

(PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000)

6. Sumber Listrik

Yaitu daya listrik yang dipasok untuk mengoperasikan sistem daya listrik darurat diperoleh sekurang – kurangnya dari dua sumber tenaga listrik (PU, Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 2000) berikut :

a) PLN,

b) Sumber daya listrik darurat berupa batere, generator, dan lain-lain.

Sumber listrik pada gedung Paragon Mall menggunakan 2 sumber listrik yakni PLN dan Genset.

7. Sistem Komunikasi Darurat

Pada beberapa bangunan ini sistem komunikasi darurat menggunakan HT yang dibawa security, dan pada gedungnya menggunakan speaker sound pressure. Hal ini untuk memberikan informasi pada pengunjung jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat yang membahayakan.

8. Sprinkler

Pada beberapa bangunan sudah terdapat beberapa spinkler pada tiap ruang dan koridor



**Gambar 8.** Sprinkler

9. FSM ( Fire System Management )

FSM ( Fire System Management ) pada beberapa bangunan tidak ada. Namun hanya terdapat manajemen teknisi, yang manajemen ini hanya mengurus masalah mesin– mesin dan kelistrikan. Sehingga tidak terdapat pelatihan kebakaran dan pelatihan evakuasi. Namun masih terdapat pemeriksaan APAR oleh Kodamkar secara berkala.

**5. KESIMPULAN**

Pembahasan pada kajian ini dibahas dengan menggunakan beberapa perbandingan, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000, Peraturan menteri Pekerjaan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Umum No.26/PRT/M/2008,tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Juwana;2005. Hal ini dikarenakan beberapa bangunan gedung dibangun tahun 2009. Berikut kesimpulannya :

1. Bentuk fisik dari Sarana Penyelamatan pada sebagian besar bangunan telah memenuhi persyaratan.. Berikut komponen – komponen emergency exitnya :
  - a. Jalur evakuasi ditinjau dari segi fisik perhitungan jarak tempuh menurut Peraturan menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008, sudah memenuhi syarat.
  - b. Tangga darurat ditinjau secara fisik menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000 memenuhi syarat. Namun ditinjau dari fungsinya tidak memenuhi syarat karena tidak terpakai (terkunci)..
  - c. APAR menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000, sebagian besar sudah memenuhi syarat karena jumlah APAR dengan sebanding dengan luas lantai bangunannya.
  - d. Sprinkler menurut Juwana, 2005 sebagian besar telah memenuhi syarat karena jumlah sprinkler hampir di setiap ruangan tersedia.
  - e. Detektor ditinjau menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000, sudah sesuai karena hampir setiap sprinkler di pasang detektor. Sedangkan untuk alarm, ditinjau dari Peraturan menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008,tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, memenuhi syarat karena alarm berjalan secara otomatis.
  - f. Hidran Box ditinjau secara fisik menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000, hidrant box Paragon Mall memenuhi syarat. Namun ditinjau secara jumlah hidran dan jangkauannya banyak yang tidak aman.
  - g. Sumber listrik menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.10/KPTS/2000, sumber listrik pada beberapa bangunan memenuhi persyaratan karena memiliki 2 sumber listrik yakni PLN dan Genset.
  - h. Sistem komunikasi darurat pada Paragon Mall sudah cukup memenuhi karena terdapat HT yang slalu siap digunakan oleh petugas dan speaker sound pressure.
2. Perencanaan tata letak Sarana Penyelamatan ditinjau dari aturan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008, Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, bahwa perencanaan tata letak Sarana Penyelamatan pada beberapa bangunan banyak yang tidak memenuhi persyaratan ( tidak aman ).

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

1. Juwana, J. S. (2005). *Panduan Sistem Bangunan Tinggi Untuk Arsitek dan Praktisi Bangunan*. Jakarta: Erlangga.
2. Poerba, H. (2007). *Utilitas Bangunan*. Jakarta: Djembatan.
3. PU, K. M. (2000). *Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.
4. PU, K. M. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan*.
5. Tanggoro, D. (2006). *Utilitas Bangunan*. Jakarta: UI Press.

# KAJIAN PENTINGNYA APLIKASI BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM (BMS) DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) DALAM MENJAGA NILAI KUALITAS DARI INFRASTRUKTUR JEMBATAN

## Studi Kasus : Infrastruktur Jembatan-Jembatan di Indonesia

Ghoustonjiwani Adi Putra<sup>1)</sup>, Rio Kusmara<sup>2)</sup>, Dwi Hatmojo Danurdoro<sup>3)</sup>  
Mahasiswa Magister Jurusan Arsitektur , SAPPK, Institut Teknologi Bandung  
Jl. Ganeca 1 Bandung 57102<sup>1,2,3)</sup>  
Email: [Ghoustonputra@yahoo.com](mailto:Ghoustonputra@yahoo.com)<sup>1)</sup>

### ABSTRAK

*Manajemen Infrastruktur jembatan di Indonesia diatur oleh Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik, mempunyai tugas dari pelaksanaan pembinaan teknis baik penyelenggaraan dan perencanaan jembatan maupun penyusunan sistem manajemen infrastruktur jembatan atau lebih dikenal dengan Bridge Management System (BMS). Bina Marga juga memiliki tugas dalam pembinaan teknis penyelenggaraan jembatan dengan mengeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS). Walaupun ada 2 kebijakan dan pedoman ini, kenyataannya masih banyak berberapa kasus jembatan yang runtuh di Indonesia, salah satunya Jembatan Kukar (Kutai Kartanegara). Dalam paper ini akan dikaji dari bagaimana proses pembangunan jembatan Kutai Kartanegara hingga proses pemeliharannya. Berberapa contoh dari kasus serupa di seluruh Indonesia juga dianalisa dari faktor penyebab kerusakan dan keruntuhan. Kasus-kasus ini dikaitkan dengan peraturan dan prosedur teknik terkait dengan jembatan, seperti BMS (Bridge Management System) dan POS (Prosedur Operasional Standar). Metode penulisan dengan telaah dan studi dokumen dan arsip dari Dinas Bina Marga tahun 2009 tentang POS (Prosedur Operasional Standar), dan Bridge Management System (BMS). Bridge Management System (BMS) seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dengan baik sesuai fungsinya; agar semua kegiatan penanganan jembatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum dan standar-standar yang seragam. Telaah dari adanya sistem kebijakan dalam hukum dan etika yang seharusnya ditegakkan dan diaplikasikan dengan benar seperti ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang lebih mendalam dalam penanganan infrastruktur daerah, mengingat jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang vital bagi keberlangsungan dan perkembangan suatu daerah.*

**Kata kunci :** POS (prosedur operasional Standar), BMS (Bridge Management System), Jembatan Kukar

## 1. PENDAHULUAN

### Latar belakang

Jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewati massa (lalu lintas, air) di atas suatu penghalang. Semakin lebar halangan yang harus dilewati, makin besar panjang jembatan yang dibutuhkan. Jembatan yang dibangun harus direncanakan untuk mampu melewatkan lalu lintas yang dilayaninya dengan aman dan nyaman. (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009)

Proses pengadaan suatu jembatan yang merupakan fasilitas infrastruktur yang vital bagi perkembangan suatu daerah karena dapat menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya menjadi lebih cepat tidak boleh asal dilakukan, harus melalui prosedur operasional standar dalam pembangunannya apalagi jika yang dibangun merupakan jembatan khusus yang memiliki kriteria tertentu dalam pembangunan dan pemeliharannya.



Dimulai dari proses desain sampai proses pengkonstruksian harus diperhitungkan dengan matang, selain itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa semakin bertambahnya usia suatu infrastruktur maka akan semakin rapuh sesuai dengan umur yang telah direncanakan, begitu pula dengan sistem pemeliharaan yang akan semakin banyak dilakukan, sehingga ketika telah mencapai umur yang telah direncanakan maka infrastruktur atau bangunan yang ada dapat segera direhabilitasi atau diganti dengan yang baru.

Rusaknya suatu infrastruktur dapat dilihat dari berbagai aspek kajian dimulai dari desain pada jembatan itu sendiri, pengkonstruksian jembatan dan sistem pemeliharaan jembatan. Jika dalam desain dan pengkonstruksian sudah benar dan layak maka dalam menjaga kualitas infrastruktur agar dapat bertahan lama sangat diperlukannya suatu sistem pemeliharaan yang ketat apalagi jika infrastruktur tersebut menggunakan teknologi maka yang menanganinya juga harus memiliki SDM yang tinggi, sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam suatu pemeliharaan yang bisa berakibat keruntuhan suatu infrastruktur yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

### **Rumusan masalah**

Kerusakan yang terjadi pada suatu infrastruktur dapat di tinjau dari berbagai aspek dimulai dari proses tender, desain, pengkonstruksian sampai pada pemeliharaan. Sekarang ini banyak jembatan yang mengalami keruntuhan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana, pengaruh dari luar ( kelebihan beban, tertabrak perahu atau kapal, dll), atau dari proses pembangunan dan pemeliharaan yang kurang baik.

Dalam studi ini akan dikaji bagaimana proses pembangunan jembatan kutai kartanegara yang runtuh beberapa waktu yang lalu mulai dari proses pembangunan sampai proses pemeliharannya yang dikaitkan dengan peraturan dan prosedur teknik terkait dengan jembatan dikarenakan belum adanya pedoman dalam pembangunan jembatan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **2. KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Manajemen**

Terdapat pendapat berberapa ahli mangemen tentang fungsi manajemen yang beragam misalnya, *Harold Koonzt dan O Donnell* dalam bukunya “*Management*” berpendapat bahwa fungsi manajemen terdiri dari:

- *planning*,
- *organizing*,
- *staffing*,
- *directing*,
- *controlling*,

Namun pada umumnya yang dimaksud fungsi manajemen adalah fungsi POAC yaitu:

- *Planning*(perencanaan)
- *Organizing*(pengorganisasian)
- *Actuating*(pelaksanaan)
- *Controlling*(pengendalian).

Sedangkan menurut Scheemerhom mendefinisikan manajemen sebagai : “ *management is the prosses of planning, organizing, leading, and controlling rhe use of resources to accomplish performance goals*” Yang berarti manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kerja.(Schermerhorm, 2005)

### **Manajemen infrastruktur Jembatan di Indonesia**

Sistem manajemen infrastruktur jembatan merupakan suatu paket operasional, berupa metode, prosedur, data, perangkat lunak, kebijakan, dan lain-lain yang menghubungkan dan memungkinkan pelaksanaan aktivitas – aktivitas yang terlibat dalam manajemen infrastruktur jembatan. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa perencanaan, pemograman, desain, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengoperasian, dan evaluasi.

Manajemen Infrastruktur jembatan di Indonesia sendiri telah diatur oleh Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik yang merupakan salah satu institusi terdepan dalam menyelenggarakan jembatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis baik penyelenggaraan dan perencanaan jembatan maupun penyusunan sistem manajemen infrastuktur jembatan.

Selain menetapkan manajemen infrastruktur jembatan di Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik juga memiliki tugas dalam pembinaan teknis penyelenggaraan jembatan dengan mengeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS) dan ketentuan terkait dalam perwujudan konstruksi jembatan.

### **Prosedur Operasional Standar (POS)**

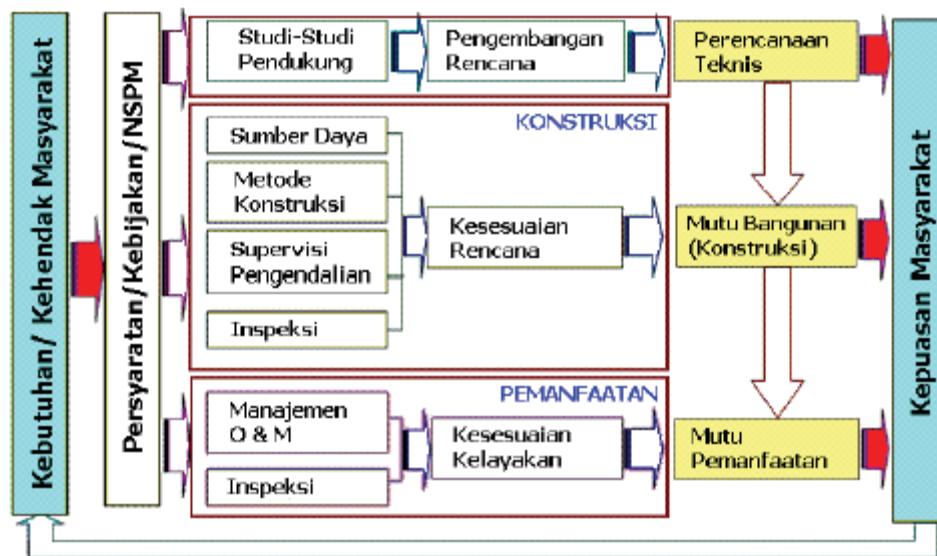
Prosedur Operasional Standar (POS) adalah sebuah salah satu tugas pembinaan teknis penyelenggaraan jembatan oleh Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga, Perencanaan teknis jembatan sebagai domain kegiatan dari Sub Direktorat Teknik Jembatan Dit. Bintek Ditjen. Bina Marga meliputi Pengembangan gagasan (design development), Preliminary Desain, Detail Engineering Design (DED) sampai dengan penyiapan rencanakerja (shopdrawing).

Penyelenggaraan jembatan ini meliputi seluruh rangkaian yang dimulai dari suatu gagasan/impian akan suatu infrastruktur sampai dengan tahapan operasional jembatan, dan biasanya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar antar lain: ( Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009):

1. Studi-studi pendukung terwujudnya gagasan
2. Perencanaan teknis, adalah perwujudan blueprint dalam bentuk produk rekayasa atau perencanaan teknis
3. Fisik konstruksi, adalah perwujudan blueprint dalam bentuk fisik konstruksi yang merupakan sinergi antara pihak kontraktor dan konsultan pengawas dalam mengamankan produk perencanaan teknis
4. Pemanfaatan dan pemeliharaan, sesuai dengan asumsi dan pertimbangan dalam rekayasa

Keterkaitan berbagai pihak dalam mewujudkan produk infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatan rencana, ditunjukkan pada skema sbb:

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
“Sticks and Carrots”  
Reward and Punishment



Gambar 1. Skema Keterkaitan berbagai pihak dalam mewujudkan produk infrastruktur Sumber: PU Bina Marga (2009)

Pada umumnya penyusunan rencana penyelenggaraan pelaksanaan jembatan mengikuti skema penjadwalan, lamanya waktu perwujudan suatu pelaksanaan jembatan, berkisar antara 2 sampai dengan 5 tahun, tergantung pada besaran pelaksanaan yang ditinjau.

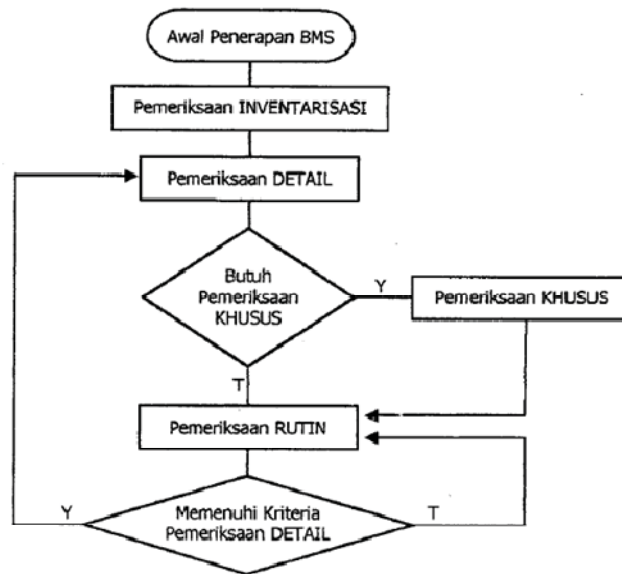
### BMS (Bridge Management System)

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jendral Bina Marga melihat kebutuhan akan suatu sistem manajemen infrastruktur jembatan untuk mengelola jembatan-jembatan di Indonesia, oleh karena itu Bina Marga telah berhasil menyusun suatu Sistem Manajemen Jembatan (SMJ) atau lebih dikenal dengan *Bridge Management System* (BMS), dengan bantuan salah satu konsultan Australia, yaitu SMEC-KinHill [BMS-01 93]. (Ginting, 2001) BMS diterapkan dan disusun dengan fungsi agar semua kegiatan penanganan jembatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum dan standar-standar yang seragam. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di BMS sendiri mencakup:(Ginting, 2001)

1. Inventarisasi seluruh jembatan
2. Nilai kondisi, nilai lalu lintas dan nilai muatan
3. Identifikasi penanganan jembatan
4. Ranking prioritas penanganan jembatan.
5. Optimasi alokasi dana
6. Standar prosedur implementasi pekerjaan jembatan

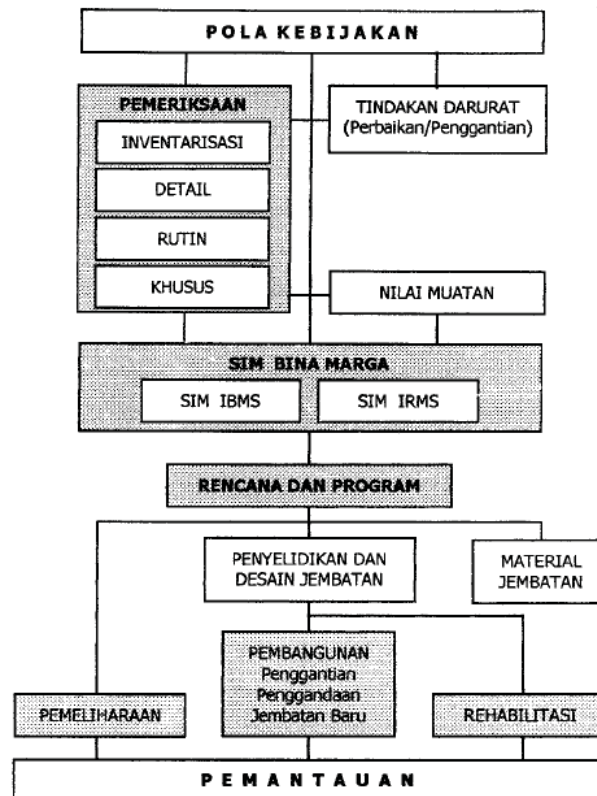
Sedangkan alur kegiatan dari BMS itu sendiri dapat dilihat di skema sebagai berikut :

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



**Gambar 2.** Skema alir kegiatan BMS  
*Sumber:(Ginting, 2001)*

Salah satu komponen terpenting dari sistem manajemen jembatan (BMS), pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan merupakan komponen yang vital untuk menjaga kualitas dan usia dari jembatan. Program pemeriksaan dan pemeliharaan BMS Bina Marga dibagi dalam 4 kategori, yaitu pemeriksaan inventarisasi, pemeriksaan detail, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus, dengan tahapan pelaksanaan seperti yang diperlihatkan seperti skema seperti ini:



**Gambar 3.** Skema alir pemeriksaan dan pemeliharaan  
*Sumber:(Ginting, 2001)*

### 3. STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Jembatan-jembatan di Indonesia

elama kurang lebih 4 tahun kebelakang, Indonesia telah mengalami lebih dari 15 kali peristiwa jembatan roboh dan terdapat kerusakan, tercatat 17 x kejadian jembatan roboh diketahui dari beberapa kota di Indonesia antara lain :

**Tabel 1:** Jembatan runtuh selam 4 tahun terakhir di Indonesia Sumber: (Lumbanrau, 2011)

No	JEMBATAN	KERUSAKAN
01	Kutai Kartanegara	Dugaan kurang perawatan
02	Bandarjaya-Sungaiputih	Pengerjaan tidak sesuai standar
03	Ulak Kembang	Pengerjaan tidak sesuai standar
04	Soekarno	Faktor usia Pondasi dan fisik rapuh
05	Tanjung Baru- Burai	Kurang perawatan
06	Baliase	Banjir
07	Km 142, Padang	Kelebihan muatan
08	Bojong Kojor- Bludru	Lahar dingin
09	Gunung Lemah- Daleman	Lahar dingin
10	Suradadi- Gondosuli	Lahar dingin
11	Teupin Me - Desa Blang	Dugaan kurang perawatan
12	Cipameng- Bantar Caringin	Banjir
13	Cirompang	Banjir dan longsor
15	Jembatan Sungai Kapuas	Kesalahan Konstruksi Baja
16	Jembatan gantung Calau	Faktor usia, dan kelebihan muatan
17	Jembatan Jati Magetan	Pondasi jembatan rapuh

#### Jembatan Bandar jaya



**Gambar 4.** Kelebihan muatan pada jembatan Bandarjaya  
Sumber: *inilah.com*

Jembatan ini roboh akibat muatan yang berlebih. Disamping itu pengadaan jembatan juga kurangnya kajian tentang daya guna jembatan yang memungkinkan kendaraan alat berat dapat lewat untuk pembangunan infrastruktur didearah lainnya. Kurangnya perhatian dalam pengerjaan dan kajian dari kontruksi jembatan ini mengakibatkan runtuhnya jembatan dalam waktu kurang dari satu tahun.

### Jembatan Ulak Kembang



**Gambar 5.** Kesalahan teknis pelaksanaan  
*Sumber: www.bin.infor.com*

Penyebab robohnya jembatan ini akibat kelalaian pelaksana dan kesalahan teknis pengerjaan, namun ada juga dugaan praktek korupsi. Kontraktor pelaksana dari pembangunan jembatan ini adalah PT. Wijaya Karya.

### Pembahasan Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar)

Jembatan Kukar (Kutai Kartanegara) adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam, Jembatan yang diresmikan pada 2001 ini merupakan sarana penghubung utama Kota Samarinda dengan Kecamatan Tenggarong Seberang, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan bentang bebas atau area yang tergantung tanpa penyangga mencapai 270 meter dari total panjang jembatan sekitar 710 meter.

Sesuai disain awal mestinya jembatan sekaliber ini dibuat untuk usia daya tahan minimal 40 tahun bahkan hingga 100 tahun. Jembatan ini masih relatif muda karena dibuat pondasinya sejak 2000 dan selesai 2001.



**Gambar 6.** Dugaan konstruksi yang kurang kuat

### **3.3. Pihak Pihak Yang Terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan**

#### **PT. Hutama Karya**

Adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini berawal dari perusahaan swasta *Hollandsche Beton Maatschappij* (HBM) milik Hindia-Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.

PT. Hutama Karya (Persero) merupakan kontraktor pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), yang memulai pembangunan Jembatan ini tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2001, Hutama Karya bertanggung jawab terhadap konstruksi dan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), dengan masa pemeliharaan konstruksi biasa 1 atau 2 tahun sedangkan Jaminan terhadap konstruksinya antara 10 tahun, sehingga tepat pada tahun 2011 ini pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) telah ditenderkan dan dari hasil tender pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) diambil alih oleh PT. Bukaka Teknik Utama.

#### **PT. Bukaka Teknik Utama**

Dibentuk pada tahun 1978, dari kontraktor kecil dengan 12 pekerja, hingga akhirnya menjadi sebuah kontraktor swasta besar di Indonesia dengan ratusan pekerja. PT Bukaka, merupakan kontraktor swasta yang melakukan perawatan Jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, PT Bukaka memenangkan tender sebesar Rp2,7 miliar dari Kementerian PU daerah Kutai selama dua bulan terhitung dari akhir Oktober sampai Desember, dengan memenangkan tender tersebut PT Bukaka memiliki kewajiban dalam manajemen perawatan dan manajemen resiko dari kerusakan struktural jembatan.

Sedangkan kontraktor ini berfokus pada berberapa penyediaan jasa antara lain

1. Manajemen resiko dan pemeliharaan berdasarkan kontrak,
2. Resiko kegagalan tender
3. Resiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah
4. Resiko dalam penurunan situasi ekonomi di Indonesia
5. Resiko ketidak tepatan dalam harga besi dan baja.
6. Resiko Bencana Alam
7. Resiko finansial
8. Resiko penurunan harga
9. Resiko pemasaran
10. Dsb

Sedangkan pada kasus jembatan Kutai Kartanegara PT Bukaka mendapat tender perbaikan jembatan dari kementerian PU Kutai selama 2 bulan terhitung dari akhir Oktober sampai Desember.

#### **Kementerian PU Bina Marga Kutai**

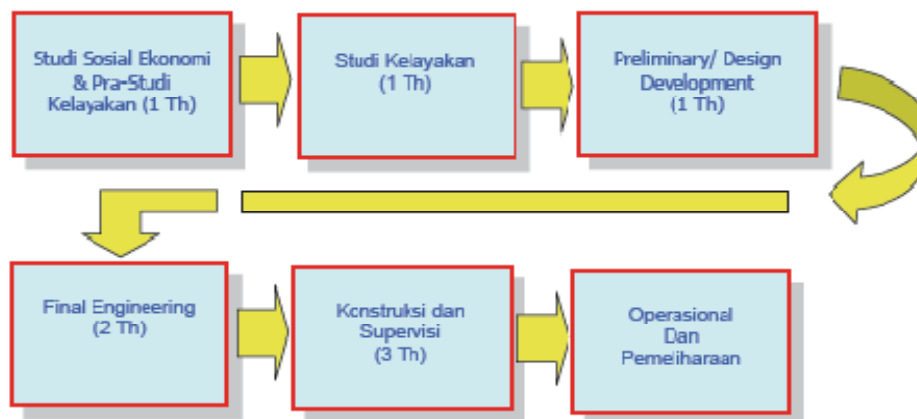
Merupakan instansi yang merumuskan serta melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang Bina Marga sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PU Bina Marga menjadi penanggungjawab pada pelaksanaan dari pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara dimana PU Bina Marga memiliki peran dalam pelaksanaan manajemen infrastruktur dari jembatan Kukar, dan pembuatan dari POS (Prosedur Operasional Standar).

#### **Pentingnya Sistem manajemen infrastruktur jembatan di Indonesia.**

Manajemen infrastruktur jembatan yang baik sangat diperlukan bagi penjagaan kualitas dan menjaga usia jembatan, oleh karena itu setiap langkah-langkah dan komponen dari manajemen infrastruktur jembatan perlu diperhatikan dan jalankan dengan sesuai prosedur dari PU Bina Marga, skema prosedur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) itu bisa digambarkan sbb:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---



**Gambar 7.** Skema Penjadwalan rencana penyelenggaraan pelaksanaan jembatan  
Sumber: PU Bina Marga (2009)

Sedangkan pada kasus Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), dapat dinilai tidak sesuai prosedur hal ini dapat dilihat dari belum adanya POS (Prosedur Operasional Standar), yang seharusnya dikeluarkan oleh PU Bina Marga, seharusnya berdasarkan POS, setiap jembatan seharusnya diawasi oleh sebuah komite pengawas yang terdiri dari berbagai instansi yang berkepentingan. (Novi, 2011)

POS untuk jembatan sendiri seharusnya terdiri dari empat komponen yakni, perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan perawatan.

#### **4. KESIMPULAN**

Sebagai fasilitas vital, pembuatan jembatan memerlukan perhatian serius pada hal-hal khusus, seperti yang tercantum pada Prosedur Operasional Standar (POS) yakni perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan perawatan. Mengingat, peristiwa jembatan roboh di Indonesia yang lebih sering diakibatkan oleh hal-hal terkait kesalahan manusia dibandingkan dengan yang diakibatkan oleh bencana alam, manajemen infrastruktur jembatan menjadi aspek krusial. Bukan hanya Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga yang perlu waspada, melainkan keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai pengguna juga turut bertanggung jawab terhadap terpeliharanya fasilitas jembatan di Indonesia.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

1. Direktorat Jenderal Bina Marga. (2009). *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Jembatan Khusus*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
2. Ginting, D. T. (2001). *Kajian Efisiensi Pemeliharaan jembatan pada BMS Bina Marga dan upaya penentuan pola pengalokasian biaya pemeliharaan*. Bandung: 2006.
3. Lumbanrau, R. E. (2011, 11 29). [www.okezone.com](http://www.okezone.com). Dipetik 12 3, 2011, dari [www.okezone.com](http://www.okezone.com).
4. Novi, A. D. (2011, 12 1). *Suara Karya Online*. Dipetik 12 4, 2011, dari [www.Suarakarya-Online.com](http://www.Suarakarya-Online.com): <http://www.Suarakarya-Online.com/news.html?id=292170>
5. Schermerhorm. (2005). *Management*. Jhon wiley and Sons, inc. 8th edition.



## PELESTARIAN ALAM DAN ARSITEKTUR MENURUT PANDANGAN ETIKA SPINOZA

**Alvin Hadiwono**

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Tarumanagara  
E-mail : [alvinhadiwono@gmail.com](mailto:alvinhadiwono@gmail.com)

### ABSTRACT

*Preserving nature is preserving life. Architecture as a building and a man who are part of nature are modified forms from the ethics. Ethics in Spinoza's view is not ethics that formed by human mind, because its formed partially and trapped by the ideals that made by men in making laws, rules and concepts of nature conservation and architecture. Imperfection is always covered with discourse of reward and punishment, so that all human ethical behavior herded into made by the common conception that seemed perfect. Ethics by Spinoza related "substance" which is the center of a modified form. Thus, the established sense of ethics is just one form of modification of nature, so it should not be used fully in the grip of conservation practices and architecture. On the other hand, it also have not accommodate the total real dimension of nature. So an understanding of the substance is central to the actual ethics. The substance is embedded in nature, people and architecture as a foundation in ethics are beyond reason. Preservation is seen as a dynamic that is changing continuously, so that the human ethics according to Spinoza would have to shed the various versions of the concept of ethical sense in itself and position it back in order to be able to see more clearly how it should address the nature and architecture in order to be sustainable in the context of substance.*

**Keywords:** *substance, ethics, preservation*

### 1. PENGANTAR

Alam yang lestari merupakan impian umat manusia sejak dari zaman dulu. Dengan lestarinya alam, maka manusia yang hidup di dalamnya juga menjadi lebih baik dan seimbang. Dalam proses pelestarian alam tersebut, manusia membutuhkan cara berpikir dan bertindak yang tepat yang terwujud dalam sikap-sikapnya terhadap alam. Sikap-sikap ini merupakan etika, yang pada umumnya diatur secara bersama-sama dalam masyarakat manusia hingga terbentuk seperangkat konsensus atau kesepakatan. Konsensus ini pada akhirnya menjadi berbagai jenis aturan, yang mana di dalamnya sudah termuat mana tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Di sisi lain juga memuat bagaimana seharusnya manusia menyikapi alam agar menjadi lestari, sehingga muncul berbagai proposisi, teori, aturan dan lain-lain.

Urut-urutan penjelasan di atas memperlihatkan bahwa apa yang disebut etika yang baik terhadap alam, ditopang oleh berbagai perangkat yang dilandasi pembentukannya menurut akal budi. Akal menjadi dasar untuk memahami alam, agar tercapai jalan yang terbaik dalam pelestarian. Namun apakah gambaran alam yang direfleksikan oleh akal adalah dimensi alam yang sesungguhnya. Karena akal itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tubuh dan indera yang dimiliki oleh manusia. Apakah dimensi alam yang direfleksikan oleh akal adalah alam itu sendiri? apa adanya?

Di sisi lain, arsitektur sebagai salah satu produk dalam kehidupan dapat dikatakan sebagai hasil interaksi antara alam dan manusia. Arsitektur yang ber-etika dapat tercipta dan lestari tentu tidak terlepas dari bagaimana cara manusia memperlakukan alam. Akal yang menjadi media untuk memahami alam dalam membentuk arsitektur cenderung terbatas dan terjadi pengkotak-kotakan. Hal ini dapat terlihat jelas pada Arsitektur Modern, yang

menjadikan rasionalitas sebagai dasar pembangunan. Lalu apa yang disebut arsitektur yang lestari? Apakah arsitektur yang tidak lekang oleh waktu? Apakah arsitektur yang memiliki nilai sejarah harus dilestarikan, karena kondisi minoritas-nya yang berdiri diantara arsitektur modern? Semua pertanyaan ini muncul dengan landasan akal, dengan berbagai atribut turunannya seperti rasio, nalar, empirik dan lain-lain.

Dua istilah kunci dalam tulisan ini, yaitu etika dan lestari sungguh-sungguh harus dilihat dari sudut yang berbeda. Bagi Spinoza, akal hanyalah salah satu atribut, hasil pecahan dari realitas yang lebih utuh, yang lebih murni dimana dapat melihat alam lebih total. Dengan kata lain jika manusia yang ber-etika yang melestarikan alam dan arsitektur hanya sebatas akal, maka itu adalah jalur etika yang parsial. Dan pelestarian pun dilihat dari sudut yang terbatas pula.

## **2. ETIKA PELESTARIAN ALAM DAN ARSITEKTUR MENURUT AKAL BUDI**

”Akal merupakan sebuah atribut yang tidak memiliki pengetahuan tentang tubuh, dan bahkan tidak tahu bahwa ia itu ada. Tetapi ketika berinteraksi dengan tubuh, ide bermunculan”<sup>1</sup>

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa akal menyatu dengan tubuh dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga apa yang dilihat dari akal merupakan “keterpisahan” antara realitas alam yang sebenarnya dengan realitas alam yang terproyeksi oleh tubuh.

Etika dalam definisi umumnya adalah bagaimana perilaku / sikap kita sebagai manusia terhadap alam. Seperti yang diurai secara singkat pada bagian pendahuluan di atas, perangkat-perangkat produk akal seperti proposisi, teori, aturan, norma dan sebagainya merupakan pengendali dan penuntun kita dalam berinteraksi dengan alam. Produk akal yang paling objektif menjadi penuntun adalah segala pengetahuan yang dihasilkan dari metode ilmiah. Di luar ini, adalah kesesuaian antara budaya dan tradisi.

Akal budi merupakan sebuah wilayah pikiran yang menjadi landasan bagi manusia dalam hidup di dunia ini. Manusia juga memiliki emosi sebagai hasil reaksi antara akal dan tubuh. Emosi adalah rasa yang muncul, yang memicu kenikmatan dan kesengsaraan yang silih berganti. Lautan akal dan emosi yang naik turun ini merupakan mekanisme abadi. Di dalam semua itu, semua manusia menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Akal terpaut tubuh bersifat inderawi dan terbatas. Semua persepsi manusia terhadap seluruh realitas alam di luarnya melalui saringan ini. Karena itu pecahan ke dalam ruang dan waktu yang begitu banyak pun terjadi. Ruang dan waktu yang paling objektif hasil ciptaan akal adalah objektivitas ilmiah. Objektivitas ini telah mewarnai dan telah menjadi jalan tengah antara keterbatasan manusia dengan segala realitas yang ada di luar jangkauan akal manusia. Dengan demikian, sebenarnya apa pun yang dikenal manusia adalah proyeksi dari dirinya sendiri.

Alam terbagi ke dalam bagian-bagian yang terpotong-potong dan tercerabut dari makna yang sebenarnya. Walau demikian kehidupan manusia tetap berjalan dengan caranya sendiri. Alam terpecah ke dalam elemen-elemen seperti angin, cahaya, kelembaban, suhu dan sebagainya. Ini adalah cara akal memahami alam, pada hal realitas alam yang sebenarnya telah tertutup. Di berbagai sisi kehidupan terkandung cara yang mekanistik ini, termasuk wilayah etika ciptaan akal manusia.

Etika dalam definisi umumnya adalah bagaimana perilaku / sikap kita sebagai manusia terhadap alam. Seperti yang diurai secara singkat pada bagian pendahuluan di atas, perangkat-perangkat produk akal seperti proposisi, teori, aturan, norma dan sebagainya merupakan pengendali dan penuntun kita dalam berinteraksi dengan alam. Produk akal yang paling objektif menjadi penuntun adalah segala pengetahuan yang dihasilkan dari metode ilmiah.

---

<sup>1</sup>Prop XIX, Part II, The Ethics ~ Baruch Spinoza

Objektivitas etika ciptaan zaman ilmiah akal tersebut merupakan media dan petunjuk berperilaku yang benar saat ini. Manusia dilarang untuk menggunduli hutan, tetapi hal itu pun tetap terjadi karena pada sudut akal yang berbeda, penggundulan hutan sebenarnya memiliki manfaat untuk menghidupkan elemen alam yang lain. Maka, untuk membendung tindakan yang disebut terlarang tadi diberlakukan hukuman (punishment). Sedang dari sudut akal yang berbeda, manfaat penggundulan hutan tadi justru mendapatkan nilai penghargaan (reward).

Oleh karena itu apa yang disebut reward dan punishment sebenarnya hanyalah paket-paket nilai yang berbeda-beda, terbatas pada ruang dan waktu. Reward dan punishment di satu wilayah berbeda dengan reward dan punishment pada wilayah yang lain. Demikian juga etika. Etika objektif ciptaan zaman ilmiah berlaku global, walau demikian kadang tetap berbenturan di wilayah-wilayah tertentu pada budaya lokal setempat. Globalitas etika objektif tersebut yang didukung perkembangan teknologi dapat/telah menjadi satu-satunya kebenaran dalam memperlakukan alam. Dan hal ini sudah terjadi di sekitar kita.

Arsitektur dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga berlaku hal yang sama. Etika pelestarian arsitektur versi akal budi juga terbelah. Merawat budaya arsitektur tertentu berarti tidak mengizinkan budaya arsitektur yang lain untuk hadir. Tetapi demikian lah pertarungan di dunia akal, bahwa setiap budaya arsitektur berlomba-lomba untuk melestarikan (mengabadikan) objek arsitektur yang identik dengan budaya yang melekat pada manusianya. Pengabdian selalu memunculkan pertentangan dan ini berlangsung terus menerus, baik disadari oleh manusianya atau tidak. Dalam zaman akal budi seperti ini, pertarungan etika akal lebih banyak terjadi di belakang panggung formalitas. Pada wilayah formalitas semua terlihat baik-baik saja, seolah dunia ini dipenuhi dan sempurna oleh manusia-manusia yang beritikad baik. Tetapi di balik formalitas tersebut justru roh pelestarian versi akal tadi bekerja keras. Dengan kreativitasnya yang rumit, hasrat untuk mengabadikan diri melalui objek arsitektural terdorong terus.

Demikian, bahwa antara yang terlihat dan tidak terlihat tetap berada di dalam dunia etika akal dalam melestarikan alam maupun arsitektur. Dan semua itu merupakan keseimbangan dalam dimensi hidup pada tataran akal budi.

### **3. ETIKA PELESTARIAN ALAM DAN ARSITEKTUR MENURUT PANDANGAN SPINOZA**

#### **3.a. Substansi**

Dalam karya utamanya yang berjudul “Etika” (The Ethics) dari Spinoza, prop. I berbunyi bahwa substansi adalah kekuatan utama dalam modifikasi kehidupan. Substansi adalah sesuatu tanpa sebab. Ia seperti *sesuatu yang berpikir* (thinking thing). Ia juga adalah penyebab utama dan merupakan esensi sekaligus eksistensi dari segala sesuatunya. Ia bersifat kekal. Substansi dapat ditemukan dalam wilayah Kesadaran. Sedang Kesadaran merupakan sebuah keadaan ketika manusia “bangun”, menurut tulisan salah seorang spiritualis terkenal Anthony De Mello. Dalam konteks ini disebutkan kita tidak hidup dalam lautan analisa (pikiran) dan rasa (emosi), tetapi dalam “pemahaman” inti. Itu-lah inti keberadaan kita dan semesta, dalam wilayah substansi.

#### **3.b. Pikiran Dan Emosi**

Pada bab II dan III dalam buku The Ethics, Spinoza menjelaskan keterpecahan antara pikiran dan emosi. Pikiran dikatakan terjebak dalam tubuh sehingga memunculkan emosi. Maka terbukalah sebuah realitas tersendiri bagi manusia dalam kehidupannya. Akal menjadi pikiran sadar manusia dan bersifat konkret, sedang emosi adalah pengalaman rasa yang terhubung dengan kenikmatan dan penderitaan, positif dan negatif, segala unsur dalam lautan dualitas yang bergerak tiada akhir. Substansi memodifikasi sekaligus berada di dalam

pikiran dan emosi. Hidup di lapisan pikiran dan emosi yang tidak terbuka terhadap substansi merupakan hidup yang terbatas.

### **3.c. Etika Pelestarian Alam**

Etika dalam konteks pemahaman Spinoza, bukanlah etika yang hanya berlandaskan akal saja. Cara manusia menyikapi dan memperlakukan alam sekitar haruslah melampaui keterpecahan antara pikiran dan emosi. Dengan pengkondisian pikiran oleh tubuh, manusia cenderung memproyeksikan alam menurut tubuhnya, bukan alam pada dirinya sendiri. Kungkungan ini merupakan sebuah wilayah besar tempat hidup ide-ide manusia untuk berkembang, termasuk etika turunan akal budi pikiran.

Alam merupakan sebuah totalitas. Pikiran dan emosi manusia adalah teritori yang sangat kecil. Hanya karena kedua-duanya digunakan untuk memproyeksikan alam, maka terlihat besar. Seolah manusia sudah memahami alam. Substansi memodifikasi pikiran dan emosi manusia. Ketika manusia dapat menyatukan dan melampaui keduanya, serta menembus menuju substansi, pada wilayah ini akan muncul horizon yang baru dalam menyikapi alam. Pada wilayah intuitif ini-lah seharusnya etika pelestarian alam itu muncul.

Pemahaman, perilaku dan sikap terhadap alam dalam konteks substansi tidak mengenal syarat dan aturan apapun. Hal ini juga mencakup persoalan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Tidak ada pendorong untuk sebuah reaksi, karena semuanya bergerak secara alami tanpa paksaan. Semuanya datang dan pergi menurut eksistensi yang telah ditetapkan oleh substansi.

Sebagai contoh dikatakan bahwa pemanasan global merupakan sebuah situasi negatif yang tidak kondusif untuk lingkungan hidup manusia. Sungguhkah demikian? Atau hal ini hanya merupakan proyeksi dari kungkungan konsep dalam pikiran manusia tentang iklim yang ideal pada sebuah planet. Dan justru dengan menghilangkan atau menyadari kungkungan konsep ini, horizon baru untuk menyikapi alam akan muncul. Di sinilah letak wilayah etika sesungguhnya menurut Spinoza.

Seperti halnya air mengalir, gerakan etika harusnya muncul secara *spontan*, bukan sebuah sikap yang perlu dipikirkan, bahkan dirasakan terlebih dahulu. Dengan demikian ruang dan waktu pun menyatu dan utuh. Ruang dan waktu yang menyatu ini mengatasi di “sini” dan di “sana”, masa depan dan masa lalu, aku dan engkau dan lain-lain. Karena dualitas ini merupakan kondisi “keterpecahan”, dimana skal melalui tubuh melahirkan pengalaman. Pengalaman melahirkan emosi positif dan negatif, kepuasan dan kecemasan dan seterusnya.

Masa kini dengan kontinuitas yang terus menerus merupakan sebuah sikap yang menyatu dengan alam. Alam adalah sebuah totalitas spontan. Untuk dapat mengikuti gerakannya, menyatu dengan sikapnya, dibutuhkan pemahaman (*understanding*) tentang segala sesuatu apa adanya. Pemahaman ini diuraikan pada Bagian V dalam buku *The Ethics*. Pemahaman ini bersifat intuitif dan membebaskan bagi manusia. Bebas untuk datang dan pergi. Merelakan pergi untuk sebuah kepentingan yang lebih besar, yang akan datang.

### **3.d. Etika Pelestarian Arsitektur**

Arsitektur berupa bangunan memang patut dilestarikan dan dipelihara, terutama karya bangunan yang memiliki nilai khusus, seperti nilai kearifan lokal, nilai sejarah, nilai budaya dan lain-lain. Tetapi perlu diketahui, pelestarian yang terlalu dipaksakan dan bersifat absolut, dapat menjadi cara ber-etika yang buruk. Karena menahan dinamika perubahan.

Pelestarian arsitektur tidaklah berarti mempertahankan nilai-nilai bangunan dan merawatnya. Pelestarian seperti ini bersifat kaku, seolah menantang arus kehadiran gaya arsitektur lain untuk mempengaruhi nilai sebuah bangunan yang sudah ada. Apa yang disebut etika yang lestari dalam konteks arsitektur adalah manusia harus memiliki

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

pemahaman bahwa nilai arsitektur yang tertanam dalam sebuah bangunan adalah selalu dalam proses “menjadi”. Dalam keseharian kita selalu melihat banyak teoritis arsitek berusaha mengkategorikan dan mendefinisikan nilai-nilai arsitektur dari sebuah bangunan. Ketika berhasil menyusun karakteristik nilai tersebut, selalu muncul celah atau kritikan yang kembali membuka peluang pembiasaan nilai tadi. Karena realitas yang sesungguhnya dari nilai arsitektur tidak dapat dijelaskan dengan akal yang selalu berusaha mengkonseptualisasikan nilai-nilai arsitektur yang ada.

Realitas nilai arsitektur yang sesungguhnya terhubung dengan etika pelestarian menurut Spinoza. Substansi sebagai mata pemahaman tertinggi melihat esensi yang sama terhadap datang dan perginya sebuah karya atau gaya arsitektur. Gerakan silih berganti yang bersahaja tanpa paksaan merupakan aktivitas pelestarian yang sebenarnya. Dengan menyadari dan memahami bahwa akal dan emosi adalah pecahan dari substansi inti, maka pelestarian terhadap arsitektur dapat tercapai.

#### **4. KESIMPULAN**

Etika yang tanpa syarat dan tuntutan merupakan etika yang alami. Hadir, bergerak dan tanpa paksaan merupakan gerakan yang spontan. Etika yang terpaut oleh akal dan emosi adalah etika yang memiliki banyak syarat, tuntutan, teori, aturan dan norma. Sehingga dalam responnya terhadap pelestarian alam dan arsitektur mengundang pertentangan yang tiada habisnya. Etika yang baik menurut satu kelompok orang, belum tentu disambut oleh kelompok orang yang lain.

Etika pelestarian alam dan arsitektur menurut Spinoza mengalir tanpa paksaan bagi semua elemen yang ada di alam, termasuk manusia. Hal ini dikarenakan substansi inti sebagai sudut dalam bertindak yang melampaui akal dan emosi. Apa yang disebut penghargaan (reward) dan punishment (hukuman) juga tidak memiliki reaksi lagi bagi seseorang yang menjadikan pusat substansi sebagai landasan ber-etika, walau ia masih hidup di belantara aksi reaksi tersebut. Karena setiap tindakan dari seluruh elemen alam tunduk pada satu gerakan alami untuk sebuah kepentingan secara keseluruhan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

1. De Mello Anthony, 2011, *Awareness : Butir-butir Mutiara Pencerahan*, Jakarta, Gramedia
2. Hadiwijono Harun, 2000, *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid II*, Yogyakarta, Kanisius
3. Hadiwono Alvin, 2007, *KATHARSIS : Catatan Perjalanan Menuju Pemahaman Diri dan Alam Semesta*, Jakarta, Granit
4. Spinoza Benedict, 1951, *Work of Spinoza ; volume II*, New York, Dover Publications

## KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN REKLAMASI PANTAI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

**Bonifacio Bayu Senasaputro**  
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
E-mail : [boni.prabacipta@gmail.com](mailto:boni.prabacipta@gmail.com)

### ABSTRACT

*According to the policy implementation of regional development program, the coastal reclamation is one of the listed agenda in order to raised the local income, and also includes in the city development strategy, in order to reclaim a living-space, besides founding a vertical high raises. There are several fundamental principles that should be accomplished among the stakeholders, which is to determined the integrated policy concept and also the execution impact upon the economic value, environmental sustainability, social and cultural values.*

*The major issues within the decades, the reclamation development program has been decreases the environmental quality. The raise of the economic value is always being put on the top priority, which is more considerable than environmental sustainability issue, and also degradation issues of the public-spaces which provide an integrated mixed-use among the locals. As the considerable of local regional autonomic policy, includes to reclaim an authority to maintain a procedural systematic feasibility study, including a technical, economics, also the social-culture value (spatial-behaviour quality). This papper aims to re-discover the basic implementation of the policy concept and implementation which based upon the the integrated coastal management system, that should be hand-to-hand with the territorial planning regulation and respons the socio-culture and environmental issue, which should be gain the positive impact upon the sustainable development program.*

**Keywords:** Coastal development reclamation, sustainable, integrated policy

### 1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu Negara kepulauan maritim terbesar di dunia, Indonesia termasuk Negara yang meng-agendakan penataan kawasan sekitar pesisir pantai pada setiap kepulauan, dengan tujuan utama selain sebagai agenda promosi terhadap potensi utama sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada data statistik kepulauan, di Indonesia terdapat 17.500 pulau, dengan panjang sekitar 81.000 km. Indonesia termasuk Negara kepulauan terbesar di dunia setelah Kanada, dengan luas daratan mencapai 1.9 juta km<sup>2</sup>, serta luas lautan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>.

Beberapa dasawarsa terakhir, terdapat beberapa laporan sumber yang menyebutkan bahwa isu pemanasan global sangat mengancam kestabilan beberapa aspek kehidupan masyarakat, khususnya bagi yang tinggal di kawasan pesisir pantai, yang terancam akan naiknya permukaan air laut sehingga mengurangi titik garis pantai dalam peta. Jadi dalam hal ini, penataan kawasan di sekitar garis pantai menjadi sebuah agenda yang mampu berintegrasi dengan isu yang tengah dihadapi, salah satunya adalah dengan mengupayakan reklamasi pantai yang mampu bersinergi dengan kebijakan daerah, tata kota, sosial masyarakat, serta aspek sumber daya alam kawasan.

Kawasan pantai, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan kawasan transisi antara daratan dan lautan, dimana hampir 67,3% penduduk Indonesia tinggal di kawasan Kota yang memiliki pantai. Sebagai salah satu bagian lingkungan yang terhubung dengan laut, tentunya isu lingkungan menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian utama, selain aspek

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

sosial. Pembangunan di sekitar kawasan pantai, merupakan daya tarik internal bagi masyarakat pendatang, khususnya para investor serta penentu kebijakan pemerintah pusat. Dan menjadikan kawasan pantai menjadi sebuah simpul baru perekonomian, jasa, transportasi, dan tidak menutup kemungkinan memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat.

Dalam teori perencanaan kota dan kawasan, reklamasi pantai menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pemekaran kota, sebagai salah satu upaya untuk menyediakan lingkungan yang terintegrasi, selain menciptakan penataan secara vertikal. Kondisi ekosistem kawasan pantai yang terintegrasi dalam sebuah penataan berbasis lingkungan hidup yang harus bersinergi dan masuk dalam agenda penataan kawasan sebagai bagian dari upaya perwadahan sosial masyarakat sebagai bagian dari agenda penataan kawasan pesisir.



**Gambar 1.** Reklamasi Pantai di Keppel Bay, Singapura, melalui Pendekatan Kebijakan Pembangunan *Waterfront City*, yang terintegrasi dengan Faktor Daya Dukung Lahan (sumber : <http://www.studio-libeskind.com>)

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, implementasi kebijakan otonomi daerah dituntut selalu untuk melakukan pantauan secara berkala terhadap dampak dan perkembangan dari hasil pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang telah diagendakan. Dalam hal ini, setiap Pemerintah Daerah, yang berwenang mengelola perkembangan kawasan di daerahnya, menjadi faktor penentu final dalam hal pemberian ijin kegiatan pembangunan khususnya di kawasan pesisir. Secara prosedural, pemberian ijin terhadap kegiatan reklamasi pantai tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan penting demi memenuhi standar kelayakan baik secara teknis, ekonomi, AMDAL, sosial dan budaya masyarakat setempat dari segi peruntukannya. Banyak faktor yang menjadikan kebijakan reklamasi pantai tersebut menjadi sebuah unsur yang negatif jika dalam pengelolaan pengembangan oleh para investor tersebut salah arah, beberapa diantaranya adalah faktor teknis seperti *'land subsidence'* (penurunan muka tanah) karena beban struktur yang overload, serta dampak psikologis apabila terjadi tsunami maupun banjir *rob* akibat naiknya permukaan air laut.

Sebagai bagian dari strategi pemekaran kota, tentunya kegiatan reklamasi pantai sangat perlu untuk memerhatikan dampak sosial- psikologis yang ditimbulkan, mengingat kawasan tersebut merupakan *public space* bagi masyarakat suatu kota. Kebijakan pemberian ijin yang seolah-olah 'membabi-butu' dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, menyebabkan timbulnya privatisasi lahan (pengkaplingan), dimana para investor seolah-olah memegang kendali

dalam pengelolaan penataan kawasan pesisir tersebut, sehingga peruntukkan ruang publik yang bersinergi seolah-olah berangsur-angsur memudar. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengajak kita untuk meninjau kembali apakah kebijakan yang selama ini diberlakukan dalam penataan kawasan pesisir mampu bersinergi dengan konteks lingkungan yang berkelanjutan.

Latar belakang permasalahan utama yang dapat diangkat dalam penulisan ini adalah, sampai sejauh mana *impact* dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang mengeluarkan ijin untuk memberikan ‘lampu hijau’ dalam penataan kawasan sekitar pantai mampu disinergikan dalam konteks berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

## 6. TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Kawasan Pesisir

Dalam Sugiarto (1976), disebutkan bahwa kawasan pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik yang kering maupun yang terendam air laut, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Jika ditinjau dari peruntukkannya, kawasan tersebut juga memiliki nilai fungsi sebagai tempat bermukim, pusat dan distribusi barang dan jasa pemerintahan, sosial, serta kegiatan ekonomi. Kawasan pesisir memiliki dua macam *boundary* (batas), yakni batas yang sejajar dengan pantai (*long-shore*), serta batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*). Dalam hal pengelolaan, yang paling mudah ditetapkan adalah wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai, dimana setiap negara memiliki perbedaan dalam penetapannya, mengingat setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, SDA serta sistem pemerintahan yang berbeda.satu dengan yang lain (Dahuri, 1999).

### Definisi, Metode dan Tujuan Reklamasi Pantai

Secara definitif, reklamasi pantai merupakan sebuah proses pembentukan lahan baru di wilayah pesisir atau daerah bibir pantai berdasarkan garis tertentu. Sesuai dengan definisi peruntukkannya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan lahan tidur yang tergenang air laut, menjadi lebih potensial dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata.

Secara umum, metode teknis pelaksanaan reklamasi terdiri atas dua jenis reklamasi, yaitu reklamasi menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai daratan induk. Cara pelaksanaan reklamasi di lapangan, sangat tergantung dari sistem yang digunakan. Dibedakan atas 4 sistem, yaitu :

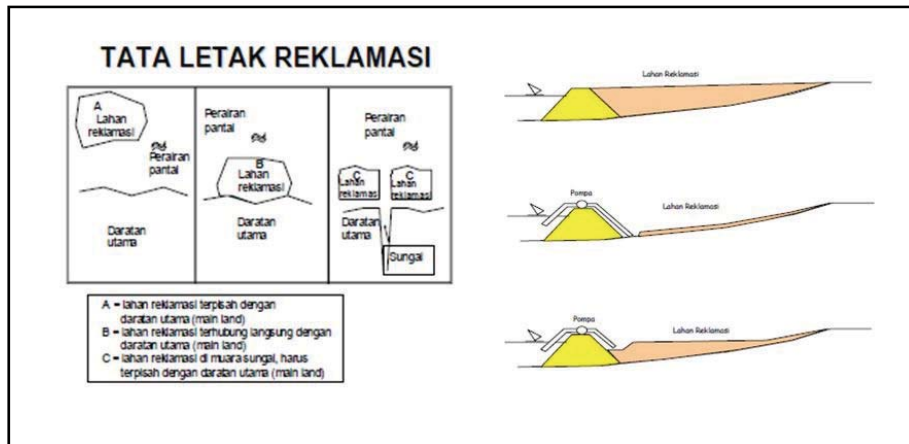
- Sistem Timbunan. Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi (*high water level*).
- Sistem *Polder*. Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada didalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi.
- Sistem Kombinasi antara *Polder* dan Timbunan. Reklamasi ini merupakan gabungan sistem *polder* dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar.



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- Sistem *Drainase*. Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.



**Gambar 2.** Skematik Posisi Tata Letak Reklamasi Pantai  
(sumber : *Database Penulis*, 2012)

Mengambil salah satu contoh metode pelaksanaan reklamasi pantai di Dubai, diberlakukan dengan metode pengurugan lahan di sekitar pantai maupun dengan menciptakan pulau – pulau baru. Hal demikian hamper serupa dengan apa yang diberlakukan pada *project* pembangunan bandara Kansai International Airport di Jepang. Tujuan utama reklamasi pantai yang dilakukan oleh negara – negara maju seperti Dubai dan Jepang, adalah untuk meningkatkan daya tarik tertentu. Hal demikian tentunya harus disinergikan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Daerah setempat guna peningkatan sektor pendapatan daerah.

Meninjau studi contoh kasus di Dubai, penataan kualitas fisik sangatlah diperhatikan dalam hal estetika, yakni penataan komposisi pulau – pulau buatan yang berbentuk palem dan menambah 250 km pantai kota Dubai. Pada pulau – pulau tersebut akan direncanakan pembangunan hotel mewah, villa dan apartemen tepi pantai, taman hiburan air, restoran, pusat perbelanjaan dan fasilitas olahraga. Dalam agenda pembangunan reklamasi pantai tersebut, tentunya harus diintegrasikan dengan faktor teknis, yakni dengan pembangunan *sea-defence* dan pemecah gelombang. Dari sisi kebijakan, pada akhirnya lahan hasil reklamasi menjadi milik pemerintah, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta (*private sector*) dengan kontribusi pajak tinggi.



**Gambar 3.** Reklamasi Pantai di Jumeira *Palm Island*, Dubai, Uni Emirat Arab; sebagai faktor daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara  
(sumber : <http://www.google.co.id/search?coastalengineering>)

### **Landasan Hukum Pengelolaan Reklamasi Pantai**

Dalam menata sebuah regulasi dan kebijakan sebuah wilayah atau kawasan, tentunya harus disinergikan dengan sebuah agenda proses kelayakan teknis dan sosial budaya, yang tentunya harus dikoordinasikan secara terpadu antar sektor dengan instansi terkait, dan mengkondisikan bahwa penerima dampak dan penerima manfaat terkoordinasi secara komprehensif dan ada kejelasan sesuai prosedur.

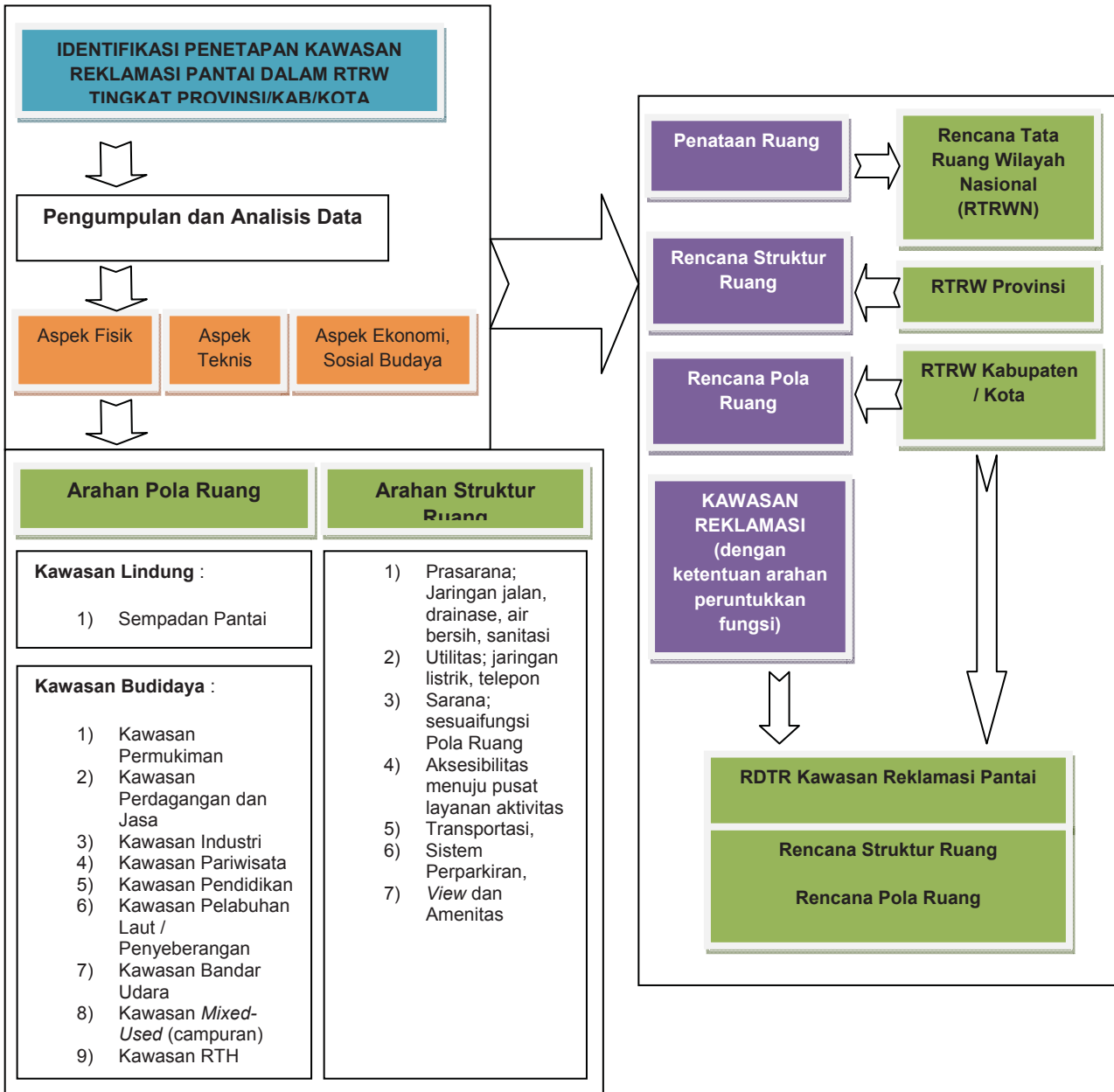
Alhasil, pelaksanaan kegiatan program pembangunan maupun proyek pelaksanaan yang berlangsung, tentunya harus mengacu pada pendekatan pengelolaan kawasan pesisir terpadu atau ICM (*Integrated Coastal Management*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Azdan, D. (2009) dalam acara simposium CENS UI 2009, bahwa agenda pendekatan pengelolaan melalui ICM tersebut memberikan beberapa rumusan aturan main dalam pengelolaan kawasan pesisir, yakni 1). Keterpaduan antar sektor, yang mencakup integrasi horizontal; 2). Keterpaduan antar tingkat Pemerintahan; 3). Keterpaduan ruang antara daratan dan lautan; 4). Keterpaduan Science-Management, yakni yang mencakup integrasi antar berbagai disiplin ilmu dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan hasil reklamasi dan rehabilitasi; 5). Keterpaduan Internasional, demi mengatasi isu masalah perselisihan maritim, jalur pelayaran, hingga pencemaran lintas batas perairan.

Para pihak penentu kebijakan, tentunya sudah meng-agendakan kegiatan reklamasi pantai sebagai bagian dari kontribusi pembangunan daerah. Nilai keberhasilan yang diraih tentu tidak terlepas dari posisi kedudukan agenda reklamasi pantai dalam agenda penataan ruang kawasan. Beberapa undang – undang yang berkaitan dengan landasan hukum reklamasi pantai berikut penataan kawasan didalamnya adalah :

- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
- PERMEN PU No. 40/PRT/M Tahun 2007, tentang Pedoman Perencanaan Reklamasi Kawasan Pantai

Khususnya mengacu pada Pedoman PERMEN PU No. 40/PRT/M Tahun 2007 tersebut, diatur dan disebutkan mengenai ketentuan umum dan teknis, khususnya yang diperuntukkan bagi perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan. Ketentuan umum meliputi persyaratan, tipologi, aspek sosial, budaya serta ekonomi kawasan, aspek pergerakan, kemudahan transportasi, akses publik, serta ketersediaan ruang public. Sedangkan ketentuan teknis meliputi struktur dan pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta *boundary* kawasan.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



**Gambar 4.** Posisi Kedudukan Reklamasi Pantai dalam Kebijakan Penataan Ruang  
 (sumber : Modul Terapan Kawasan Reklamasi Pantai; Pedoman Perencanaan Tata Ruang; Ditjen Penataan Ruang; Departemen Pekerjaan Umum, 2007)

## 7. STUDI KASUS

Program Kebijakan Pembangunan Kawasan sekitar pesisir, atau yang melibatkan kegiatan reklamasi pantai, tentunya tidak terlepas dari penentuan kebijakan pembangunan kota – kota besar yang terletak di wilayah pesisir. Seiring dengan sejarah perkembangannya, kota – kota besar ini menjadi salah satu faktor embrio perkembangan wilayah semakin jauh ke pedalaman, karena menjadi kota pelabuhan yang memberikan prioritas utama dalam perdagangan.

Di Indonesia, terdapat banyak kota – kota besar yang termasuk dalam wilayah pesisir, terutama di Pulau Jawa, yakni diantaranya Teluk Jakarta, Semarang, dan Surabaya, dimana ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi geografis, peruntukkan tata guna lahan, demografis, struktur spasial serta daya tampung.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

**Reklamasi Kawasan Teluk Lamong, Surabaya**

Sebagai salah satu strategi pengembangan yang diterapkan, Kawasan Teluk Lamong menjadi salah satu agenda daya tarik bagi Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan sektor pendapatan daerah. Pembangunan *Lamong Bay* merupakan salah satu agenda mega-proyek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan merupakan proyek lanjutan dari pembangunan Jembatan Suramadu. *Lamong Bay* memiliki agenda pengembangan dengan konsep pelabuhan modern yang mengacu pada pelabuhan-pelabuhan modern Jepang dan Korea Selatan. Selain sebagai pelabuhan, *Lamong Bay* juga akan dikembangkan sebagai kawasan pergudangan, industri, dan pariwisata. Pembangunan *Lamong Bay* tersebut direncanakan akan mereklamasi pantai di sisi timur Terminal Peti Kemas Surabaya seluas 400 Ha (Bapeprov Jatim, 2010).

**Reklamasi Kawasan Teluk Jakarta**

Pantura Jakarta merupakan kawasan yang meliputi teluk Jakarta yang terletak di sebelah Utara kota Jakarta, yang pada umumnya merupakan perairan dangkal yang memiliki kedalaman rata-rata 15 meter dengan luas sekitar 514 km<sup>2</sup>. Teluk ini merupakan muara 13 sungai yang melintasi kawasan metropolitan Jakarta dan daerah penyangga Bodetabek yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa. Proyek reklamasi dan revitalisasi yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk membangun daerah bisnis dan perekonomian maupun pemukiman kelas atas. Melalui prakarsa tersebut, Pemda DKI dan beberapa perusahaan vendornya bermaksud merubah predikat Jakarta menjadi *Water front City*, yang secara menyeluruh mengubah daerah tersebut menjadi kawasan elit yang menurut Pemda sebagai solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,7% per tahun dan untuk mengatasi kesulitan penyediaan ruang public serta dinamika pembangunan yang terjadi.


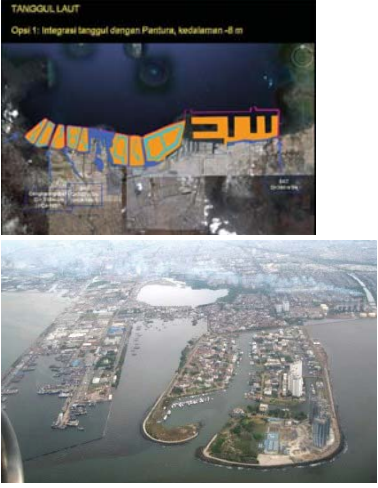
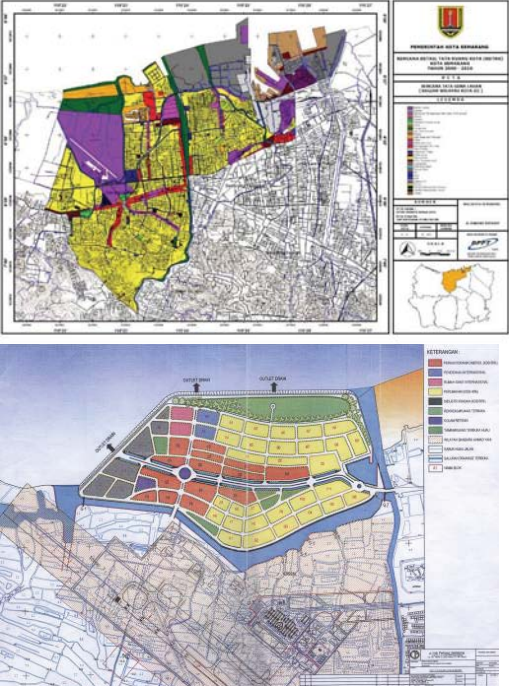
**Reklamasi Kawasan Pantai Marina, Semarang**

Ruang Kawasan kota Semarang memiliki karakter Geografis yang unik dengan pembagian Semarang Atas dan Semarang bawah. Dengan penyesuaian terhadap FGD yang direncanakan, kawasan kota Semarang Bawah (yakni di zona Utara, BWK III), mendapat perhatian utama dalam pengembangannya ke dalam sektor pusat pelayanan transportasi darat dan laut, pergudangan, kawasan rekreasi (Marina), Perumahan, Perdagangan dan Perindustrian.

**Tabel 1 : Perbandingan Konsep Kebijakan Studi Kasus Kawasan Pesisir**

KASUS	PERENCANAAN	PEMBAHASAN
1). Reklamasi Lamong Bay, Pantura Surabaya		<p><b><u>Issue Eksisting</u></b>  Pembangunan Teluk Lamong (<i>Lamong Bay</i>) merupakan upaya perluasan Pelabuhan Tanjung Perak ke arah sisi timur Terminal Peti Kemas Surabaya. Selain difungsikan sebagai kawasan pelabuhan, Lamong Bay akan difungsikan sebagai kawasan komersil, industri, dan pariwisata sebagai upaya mewujudkan <i>Surabaya Waterfront City</i>.</p> <p><b><u>Konsep Kebijakan</u></b>  Pembangunan <i>Lamong Bay</i> tersebut akan mengkonversi kawasan konservasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 1996 tentang Tata Ruang yang menetapkan perluasan Pelabuhan Surabaya dilakukan ke arah wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura. Sedangkan, kawasan Teluk Lamong ditetapkan sebagai kawasan konservasi.</p>

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

		<p><b>Implementasi / Dampak</b>          Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadi abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dalam waktu yang cukup lama.</p>
<p><b>2). Reklamasi Pantura Jakarta</b></p>		<p><b>Issue Eksisting</b>          Memberdayakan serta meningkatkan daya tarik pantai termasuk pelestarian unsur – unsur lama seperti bangunan – bangunan tua yang akan direvitalisasi serta mewujudkan waterfront city.</p> <p><b>Konsep Kebijakan</b>          Pembentukan elemen – elemen stakeholder yang dilaksanakan melalui pendekatan ICM (<i>Integrated Coast Management</i>), dengan mengacu pada Keppres No.52 tahun 1995, dan Perda No.8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.</p> <p><b>Implementasi / Dampak</b>          Kerusakan terumbu karang di pulau seribu, isu proyek tersebut akan ‘menenggelamkan’ kota Jakarta.</p>
<p><b>3). Reklamasi Pantai Marina, Pantura Kota Semarang</b></p>		<p><b>Issue Eksisting</b>          Menjawab beberapa tantangan permasalahan yang terkait dengan banjir rob, sedimentasi, genangan air yang notabene merupakan dampak dari banjir kiriman, banjir lokal serta banjir pasang dari daerah hulu melalui program reklamasi pantai.</p> <p><b>Konsep Kebijakan</b>          Mengacu pada undang – undang no. 32 tahun 2004 yang mengarah pada aspek aturan Pemerintahan Daerah tentang kewenangan pengelolaan SDA wilayah yang memiliki kawasan tepi laut, dan pasal 18 ayat (1), melalui penerbitan SK pemanfaatan lahan perairan dan pelaksanaan reklamasi perairan pantai Marina.</p> <p><b>Implementasi / Dampak</b>          Kegiatan pelaksanaan yang strategis berdasarkan upaya penanggulangan bahaya kenaikan permukaan air laut, namun diharuskan memiliki payung hukum yang kuat.</p>

(Sumber : Analisis Penulis, 2012)

**8. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Melalui kajian data yang telah di-studi, dalam pengembangannya, memang seyogyanya perkembangan kota – kota besar di wilayah kawasan pesisir menjadi salah satu perhatian utama dalam agenda pemerintah daerah. Mengingat dalam pengelolaan manajemen pembangunan serta pengembangan dalam kurun waktu jangka panjang, maka konsep

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

wawasan lingkungan yang berkelanjutan yang seperti apa yang perlu diterapkan, dan dalam hal ini konsep yang terintegrasi antar elemen penentu kebijakan.

Fenomena yang berkembang dewasa ini, seiring dengan pertumbuhan embrio kota pantai di Indonesia, seringkali dipandang oleh Pemerintah Daerah secara minim-peran, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya kelautan yang seharusnya mampu diintegrasikan dengan potensi yang didapat dari daratan. Jika seandainya ada agenda kebijakan yang mampu menumbuhkan atmosfer yang sinergi antar kedua potensi sumber daya tersebut, tentunya secara langsung dapat memberi nilai manfaat yang cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan serta perkembangan kota pantai.

Dalam hal ini, tentu aspek pemahaman tentang instrumen kebijakan mana yang seharusnya diterapkan, tentunya tidak terlepas dari pemahaman terhadap konteks karakteristik kondisi social – ekonomi masyarakat, termasuk dinamika perubahan yang mungkin terjadi; serta pemahaman karakteristik kondisi lingkungan geografis.

### **Faktor Daya Dukung dan Integrasi Terhadap Jejak Ekologi**

Berkaitan dengan pemanfaatan struktur tata ruang yang diberlakukan sebagai pengembangan kawasan kota-baru, pasti muncul berbagai permasalahan yang sangat pelik terjadi, yakni kaitannya dengan degradasi teknis, fungsi serta pemintakatan lahan yang jelas. Fenomena yang berkembang dewasa ini, tentu tidak terlepas dari observasi yang memungkinkan untuk dilakukan, yakni yang bertujuan untuk menemukan nilai degradasi lingkungan yang terjadi, dengan menelaah tentang harga tanah dan bangunan, biaya pengganti dan kerusakan dan lain sebagainya.

Terkait dengan faktor daya dukung, tentunya tidak terlepas dari kemampuan semua unsur alam dan buatan untuk mendukung tempat hidup manusia (terkait dengan populasi) dan lingkungannya (alam eksisting). Daya dukung tersebut juga dapat dinilai dari *ecological carrying capacity*, atau *ecological footprint / EF* (Hariandi, 2006), yakni dimana pengukuran beban yang diakibatkan oleh sebuah populasi yang harus ditanggung oleh lingkungan. Komponen yang dapat diukur dalam hal ini adalah, berapa besar lahan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan konsumsi serta *re-cycle* terhadap limbah yang dihasilkan.

### **Faktor Akses Publik serta Penyediaan Ruang Publik**

Akses Publik dapat diperoleh apabila terdapat penyediaan sarana transportasi yang memadahi dan terintegrasi pola pergerakannya tanpa adanya batasan ruang, waktu dan biaya. Khususnya mengacu pada posisi geografis kota – kota seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, pengembangan akses publik dapat membuka efek domino perkembangan kota-kota ke wilayah pedalaman. Tata letak bangunan melalui komposisi dengan konfigurasi yang tertata melalui garis ketinggian bangunan juga menjadi salah satu faktor bagi masyarakat untuk menikmati panorama ruang pantai.



**Gambar 5.** Faktor Akses Publik untuk Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Cao Fe Dian, Tian Jin, China (sumber : <http://www.google.co.id/search?coastalengineering>)

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

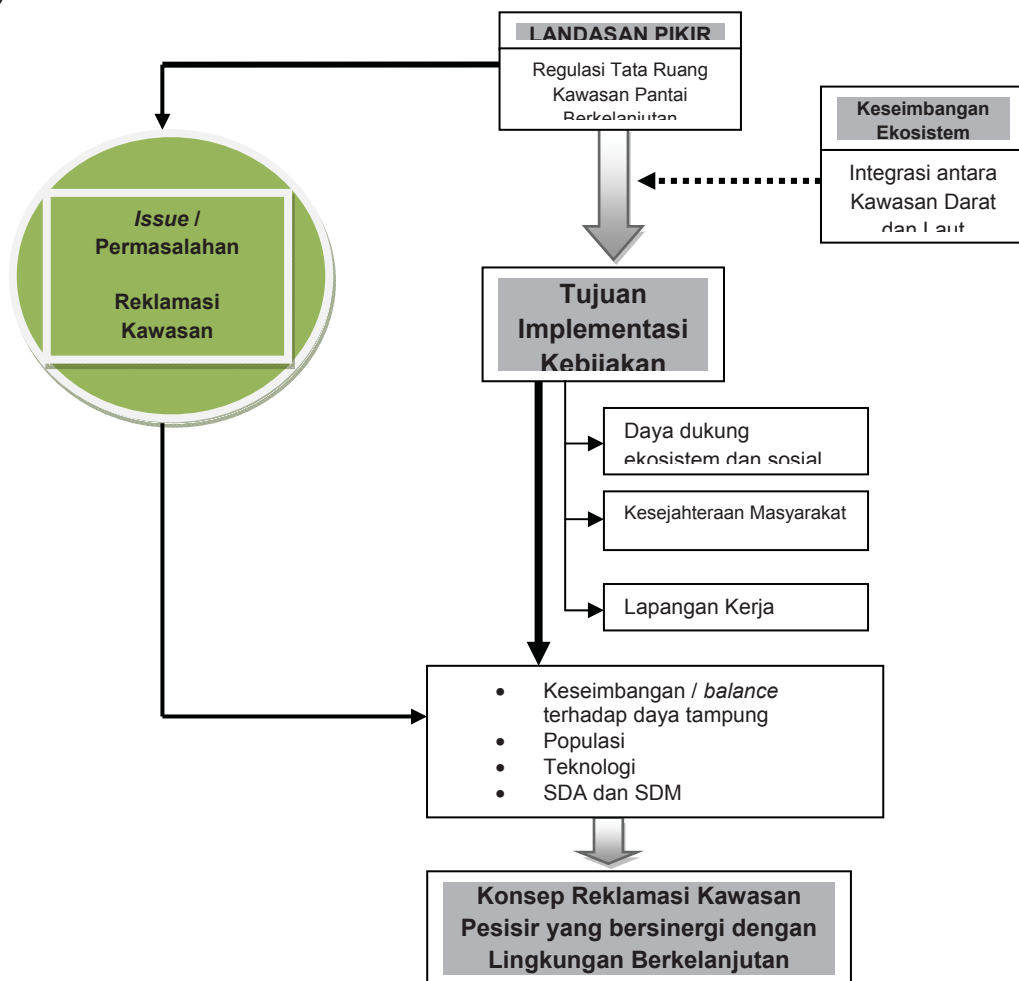
---

Potensi alam yang terdapat di pantai, dan sekaligus dapat dikonservasi melalui tata regulasi pemintakatan yang jelas dan terstruktur, disinergikan dengan konsep perencanaan dan perancangan yang terpadu, yang mempertimbangkan posisi garis bibir pantai, kontur, panorama, pemandangan serta menjaga laut tetap biru.

**Paradigma Pembangunan Reklamasi Pantai Berkelanjutan**

Kerangka berfikir ketika kita mengacu pada pemikiran berkelanjutan, tentunya tidak terlepas dari instrumen kebijakan pembangunan yang bersinergi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Terpeliharanya aspek penataan ruang kawasan yang terintegrasi antar sektor, tentunya mampu membuka ruang bagi terpeliharanya faktor jejak ekologi yang ditinggalkan. Soemarwoto (1999) juga mengemukakan tentang “pembangunan ekonomi tanpa merusak”, yang member perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan.

Sebagai indikator pembangunan kota pantai (*waterfront city*) yang berkelanjutan, tentu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sejahtera dan bermatapencaharian tetap, mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, pertimbangan aspek ekologi, daya dukung dan terpeliharanya sistem pendukung kehidupan yang layak melalui kebijakan penataan kawasan berbasis konservasi, bersinergi, serta menampung tempat ruang publik yang terjangkau bagi segala lapisan masyarakat



**Gambar 6.** Skematik Issue Dinamika Penerapan Regulasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir (Sumber : Analisis Penulis)

## 9. KESIMPULAN

Dalam agenda penerapan regulasi kebijakan penataan kawasan pesisir yang berawasan lingkungan berkelanjutan, seyogyanya harus mampu menelaah kembali tentang sinergi atau tidaknya konsep pembangunan berkelanjutan yang di-agendakan, dan harus seiring dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Merujuk kembali pada konsep ‘membangun tanpa merusak’ seharusnya menjadi sebuah agenda utama yang mengacu pada pemintakatan (*boundary*) pada kawasan sekitar pantai.

Terkait dengan esensi kebijakan, reklamasi pantai tidak terlepas dari intervensi manusia terhadap keseimbangan lingkungan alam yang dinamis namun serasi, asri dan seimbang. Reklamasi pantai seharusnya dapat dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor pertimbangan kepadatan kota yang membutuhkan pengembangan wilayah daratan baru. Agenda pelaksanaan reklamasi pantai tersebut haruslah secara signifikan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). Penyusunan RDTRK ini dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan seperti memiliki RTRW yang telah ditetapkan oleh Perda dalam agenda deliniasi kawasan reklamasi pantai, penetapan lokasi reklamasi pantai sesuai SK Bupati / Walikota, dan studi kelayakan investasi properti dan studi kelayakan AMDAL.

## 10. DAFTAR PUSTAKA

1. Azdan, Donny, 2009. *Kaidah Reklamasi Dalam Keterpaduan Perencanaan Pembangunan*. Kumpulan Makalah Seminar CENS UI Tahun 2009. Jakarta
2. Bappeda, 1996. *Buku Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Wilayah*
3. *Pesisir & Lautan*. Jawa Tengah.
4. Dahuri, R, A. 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Perkotaan Pantai dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.
5. Hariandi, 2006, *Kajian Daya Dukung Pulau Jawa*. Modul Konsep Kajian dengan Menko Perekonomian, Jakarta.
6. Juniarso, R. dan Sodik, A.,2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Penerbit Nuansa, Bandung.
7. Kepmen DKP. No. 34 Tahun 2002. *Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*. Jakarta.
8. Keraf A., Sonny, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit Media Kompas, Jakarta.
9. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura. Jakarta.
10. *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai*, 2007. Kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.
11. Soemarwoto, Otto, 1999, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta.
12. Soehoed, AR. 2004, *Reklamasi Laut Dangkal*, Penerbit Djembatan, Jakarta.
13. Sugiarto, A. 1976, *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*, LON-LIPI, Jakarta.



**KELOMPOK B**

**KELESTARAN LINGKUNGAN**



## Turning Road to a Public Place: Case Study of Car Free Day Phenomenon in Bandung

R. Aswin Rahadi<sup>1)</sup>, Alia Widyarini Hapsariniaty<sup>2)</sup>, Siti Larissa Sarasvati<sup>3)</sup>, Siti Kania Mevianti<sup>4)</sup>, Tara Putri Paramitha<sup>5)</sup>  
School of Business & Management<sup>1, 4)</sup>  
School of Architecture, Planning, and Policy Development<sup>2, 3)</sup>  
Industrial Engineering Management, Faculty of Industrial Technology<sup>5)</sup>  
Bandung Institute of Technology<sup>1, 2, 3, 4, 5)</sup>  
E-mail : [aswin.rahadi@sbm-itb.ac.id](mailto:aswin.rahadi@sbm-itb.ac.id)<sup>1)</sup>  
E-mail : [alia.widyarini@students.itb.ac.id](mailto:alia.widyarini@students.itb.ac.id)<sup>2)</sup>  
E-mail : [sitilarissa@yahoo.com](mailto:sitilarissa@yahoo.com)<sup>3)</sup>  
E-mail : [sitikania@gmail.com](mailto:sitikania@gmail.com)<sup>4)</sup>  
E-mail : [taraputriparamitha@yahoo.com](mailto:taraputriparamitha@yahoo.com)<sup>5)</sup>

### ABSTRACT

*Due to increased number of population and the decrease of land plots in Indonesia, currently resulted in the increase of land price and value. Besides the problem of decrease land plots, the government also faced problem lack of infrastructures to support the increased number of cars and other vehicles. As a result, public spaces development has been abandoned in favor of infrastructure development.*

*This is also worsening with the facts that numbers of public spaces in cities around Indonesia has not being able to support the adequate ratio with the growing population.*

*There are several attempts by the government to try and cope with the issue, either by strict regulation, reclaiming land plots in the center of the cities to be converted as public spaces permanently, and temporary converting infrastructure to become public spaces.*

*Car Free Day (CFD) is an attempt to temporarily increase the number of public spaces in cities in Indonesia by blocking vehicles and other means of transportation into several major roads in the city. Then by quarantining the road, citizens can temporary used it as public spaces for an amount of time. This phenomenon was started in Jakarta, and now due to its popularity has been implemented in several cities around Indonesia, including Bandung.*

*This paper will try to discuss about the CFD phenomenon, how it is initiated; what is the initial expectation; the current state of CFD itself; and the future of CFD viewed from the citizen perspective. For this research we took the sample from the city of Bandung, and we will try and find answers using qualitative and quantitative approach. The result of this study is expected to give a better understanding about the phenomenon and its future implementation.*

**Keywords:** *making place, car free day (CFD), urban areas, public spaces*

### 1. PENDAHULUAN

Gerakan Car Free Day (CFD) dimulai dari kesadaran penduduk dunia mengenai bahaya pemanasan global dan pentingnya pengurangan emisi bahan bakar dalam di dunia. Dimulai di Perancis pada tahun 1997, kemudian menyebar ke dua belas negara di Uni Eropa dan akhirnya secara global mulai pada tahun 2005, Car Free Day dirayakan pada setiap tanggal 22 September di seluruh dunia. Secara garis besar pada hari pelaksanaan Car Free Day, ada beberapa bagian ruas jalan kendaraan bermotor yang ditutup dan digunakan untuk pejalan kaki dan pengendara kendaraan tidak bermotor (*Non-Motorized Transportation/ NMT*). Juga biasanya dalam acara pelaksanaan Car Free Day, dilakukan penyuluhan mengenai bahaya polusi udara dan pemanasan global (UNCRD, 2008)

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Makalah ini disiapkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena Car Free Day dapat membantu secara sementara memenuhi kebutuhan penduduk akan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Riset akan dilakukan di Bandung, dengan responden berasal dari pengunjung tetap/ tidak tetap acara Car Free Day.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Sejarah Diadakannya Car Free Day**

Pada tahun 1997, acara “No Car Day” pertama kali dilaksanakan di La Rochelle, Perancis. Pada tahun 2000 acara Car Free Day mulai dilaksanakan di dua belas Negara, termasuk Prancis untuk pertama kalinya dibawah pengawasan Komisi Eropa. Pada tahun 2002 mengawali acara Johannesburg Summit, The Energy and Transport Branch of the Division for Sustainable Development (UN-DESA) meluncurkan program UN Car Free Day (UNCFD). Pada tahun yang sama “European Mobility Week” juga diluncurkan di Uni Eropa, dimana acara satu hari kemudian diperluas menjadi acara satu minggu, dimana selain penutupan akses kendaraan dan minggu bebas kendaraan bermotor, juga digunakan untuk mempromosikan kepedulian lingkungan dan pengenalan kendaraan yang ramah lingkungan. Pada acara ini pun diperkenalkan tanggal 22 September sebagai Hari Bebas Kendaraan. Pada tahun 2005, di 1<sup>st</sup> Regional EST (Environmentally Sustainable Transport) Forum, para peserta forum menyetujui untuk mempromosikan hari bebas kendaraan dinegaranya, dengan tiga tujuan utama, yaitu (UNCRD, 2008):

1. Memberikan penyuluhan dan penyebaran informasi mengenai efek dari penggunaan kendaraan pribadi secara terus menerus dan akibatnya terhadap kemacetan, polusi udara, keamanan berkendara dan lingkungan.
2. Memotivasi pembuat kebijakan untuk membuat sistem transportasi publik yang efisien dan berkualitas
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari penduduk akan pentingnya sistem transportasi publik dan kendaraan tidak bermotor.

### **Car Free Day di Asia**

Sejak tahun 2007, beberapa negara di Asia sudah mulai menerapkan konsep Car Free Day di negaranya. Di Cina, 108 kota termasuk Beijing dan Guangzhou telah menganjurkan penduduknya untuk tidak menggunakan kendaraan setiap tanggal 22 September setiap tahunnya. Lalu lintas diblokir di beberapa area spesifik, kecuali untuk pejalan kaki, sepeda, taksi dan bis mulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 07.00 malam. Jalan kemudian digunakan untuk penampilan acara seni oleh anak-anak, pelukis jalanan, dan tukang reparasi sepeda. Pada bulan Agustus, sebulan sebelum acara Car Free Day dilaksanakan, pembatasan kendaraan pribadi diterapkan di Beijing. Di Indonesia, gerakan Car Free Day dimulai dengan Jakarta dan menyebar kebeberapa kota di Indonesia, dan terus berkembang hingga saat ini. Di Jepang, kota Yokohama, Nagoya, Saitama, Matsumoto, Hukui dan Naha satu hari setiap tahunnya mengadakan acara untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Di Korea, khususnya di kota Seoul dan Daegu, satu hari pada hari kerja pembatasan kendaraan bermotor dilakukan setiap tahunnya. Pada hari itu pengguna kendaraan bermotor diberikan tiket bus gratis sampai pukul 09.00 malam. Pembatasan kendaraan bermotor dilakukan sejak pukul 04.00 pagi sampai dengan pukul 06.00 sore, dan tempat parkir kendaraan ditutup. Di jalan yang ditutup dilakukan pameran kendaraan hibrid, acara bersepeda bersama dan acara lainnya (UNCRD, 2008).

Seperti dapat dilihat di gambar 1, Kerjasama trilateral dilaksanakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Regional EST Forum. Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum bersama-sama dengan Pemerintah Pusat saling melakukan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

koordinasi, memberikan dukungan dan saran untuk pengembangan konsep Car Free Day di negara tersebut. Dari hasil konseptual tersebut, kemudian diimplementasikan di kota-kota. Pemerintah Pusat dan EST Forum bersama-sama memberikan dukungan, saran dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Pusat dan Regional EST Forum. Dengan skema ini diharapkan acara Car Free Day dapat dilaksanakan dengan baik dan melalui penyempurnaan seiring dengan berjalannya waktu.



**Gambar 1.** Konsep Pelaksanaan Car Free Day (UNCRD, 2008)

### **Prospek Pengembangan Car Free Day di Masa Yang Akan Datang**

Dimasa yang akan datang diharapkan pelaksanaan Car Free Day akan dilakukan lebih sering dan menjangkau jumlah negara yang lebih luas. Untuk itu ada beberapa langkah yang diusulkan oleh UNCRD pada 3<sup>rd</sup> Regional EST Forum di Singapura (2008) sebagai berikut:

1. Menganalisa kondisi sosial dan ekonomi negara. Faktor yang dilihat mencakup kondisi penggunaan lahan, pengembangan transportasi publik, dan faktor penunjang lainnya.
2. Menganalisa kondisi geografis dari negara. Faktor yang dilihat mencakup kondisi iklim, topografi, dan faktor penunjang lainnya.
3. Menganalisa latar belakang budaya negara. Disini kita melihat kebiasaan transportasi yang umum di negara tersebut, misalkan budaya Cina dan Belanda yang terbiasa menggunakan sepeda dalam berkomuter. Atau budaya Jepang yang terbiasa menggunakan moda transportasi kereta dan berjalan kaki.
4. Setelah menganalisa ketiga faktor diatas, kemudian even “Car Free Day” mulai dilaksanakan, dengan disesuaikan dengan kondisi kota tempat dilaksanakan.
5. Setelah Car Free Day dilaksanakan, diharapkan semakin banyak anggota masyarakat yang tertarik dan mendukung kegiatan Car Free Day dan produk Environmentally Sustainable Transport (EST). Diharapkan gerakan ini juga menular kearea diluar negara masing-masing.
6. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah berupa kontribusi terhadap promosi Environmentally Sustainable Transport (EST) di Asia dan di Dunia.

### **Car Free Day di Bandung**

Car Free Day di Indonesia dimulai di kota Jakarta pada tahun 2007. Pada awalnya hanya dilakukan pada sebagian jalan Sudirman, Jakarta Selatan, namun seiring dengan waktu dan dikarenakan kesuksesan program ini, maka pembatasan kendaraan meluas ke sebagian besar jalan Sudirman, Jalan HR. Rasuna Said, dan jalan-jalan di area Jakarta lainnya (Montlake, 2011). Dari kesuksesan pelaksanaan Car Free Day di Jakarta, kemudian meluas kebeberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Bandung.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Di Bandung, Car Free Day mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Dimulai di area jalan Ir. H. Juanda, Car Free Day di Bandung terhitung unik dan berbeda dibandingkan dengan yang dilaksanakan di Jakarta, mengingat Bandung merupakan kota tujuan wisata, dan di seluruh area jalan Ir. H. Juanda merupakan area yang penuh dengan toko-toko dan restoran, dimana acara ini menjadi salah satu destinasi wisata di Bandung. Awalnya dilakukan setiap bulan sekali, kemudian frekuensinya dipersering menjadi setiap hari Minggu. Pada tahun 2011, Car Free Day diperluas pelaksanaannya di beberapa lokasi di Bandung dan sekitarnya, seperti di daerah Cimahi dan di jalan Buahbatu.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Car Free Day di Bandung (Dokumentasi Pengarang)

### **Definisi Ruang Terbuka Publik**

Ruang publik (*public spaces*) merupakan tempat untuk berkumpul atau bagian dari lingkungan hunian (*neighborhood*), pusat kota, distrik tertentu, kawasan tepi air (*waterfront*) atau kawasan lainnya yang berada di dalam dunia publik yang mendukung interaksi sosial dan *sense of community*. Ruang yang termasuk ke dalam ruang publik tersebut adalah plaza, alun-alun kota, taman, pasar, dan lain sebagainya (APA, 2011). Pada umumnya, ruang publik ini terbuka dan dapat dimasuki oleh siapapun, serta tidak dikenakan biaya tertentu atau tiket untuk berada di dalamnya. Menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi: ruang tertutup publik yang terletak dalam bangunan; dan ruang terbuka publik yang terletak di luar bangunan, dipergunakan setiap orang, serta multifungsi, seperti jalan, jalur pejalan kaki, taman kota, dan sebagainya (Hakim & Utomo, 2012).

Ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Dephukum, 2007). Ruang terbuka hijau kota adalah bagian dari penataan ruang perkotaan sebagai kawasan lindung yang terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, dan pekarangan (Fandeli, 2004). Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi (Dwiyanto, 2009).

Menurut kegiatannya ruang terbuka publik terbagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka publik aktif yang memiliki unsur kegiatan di dalamnya, seperti bermain, berolahraga, dan rekreasi; ruang terbuka pasif tidak digunakan untuk berkegiatan lebih berfungsi ekologis dan pengindah visual, seperti penghijauan tepi jalan. Setelah itu, menurut Rob Rimer, ruang terbuka secara umum memiliki bentuk, yaitu memanjang (koridor), umumnya memiliki batas pada sisinya, seperti jalan, sungai, dan sebagainya; serta membulat yang memiliki batas pada sekelilingnya, seperti lapangan upacara, taman kota, dan sebagainya.

Menurut sifatnya, ruang terbuka publik terdiri atas: ruang terbuka lingkungan yang bersifat umum dan terdapat di suatu lingkungan; serta ruang terbuka antar bangunan yang terbentuk oleh massa bangunan dan dapat bersifat umum atau pribadi sesuai dengan fungsi bangunan. Ruang terbuka publik memiliki fungsi sosial, antara lain: sebagai tempat bermain dan berolahraga; bersosialisasi; peralihan dan menunggu; mendapatkan udara segar;

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya; pembatas di antara massa bangunan; sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; serta sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan keserasian dan keindahan lingkungan (Hakim & Utomo, 2012).

Menurut American Planning Association (APA) terdapat beberapa karakteristik dari suatu ruang terbuka publik yang baik yaitu: mendukung interaksi masyarakat dan aktivitas sosial; ruang yang aman, terbuka dan mengakomodasi untuk seluruh penggunaannya; memiliki desain dan fitur arsitektural yang secara visual menarik; mendukung keterlibatan komunitas; mencerminkan budaya atau sejarah setempat; terpelihara dengan baik; serta memiliki karakter yang unik dan spesial. Selain itu, terdapat tiga faktor yang meliputi persyaratan untuk ruang terbuka publik yang baik yaitu fitur dan elemen; aktivitas dan interaksi sosial; kualitas, kekhasan, dan karakteristik.

### **Kondisi Ruang Terbuka Publik di Bandung**



**Gambar 3.** Ruang terbuka publik di kota Bandung (Dokumentasi Pengarang)

Pada awalnya ruang terbuka publik di Barat merupakan ruang yang berada di sekitar monumen utama atau landmark kota seperti alun-alun (*town centre*), piazza, dan ruang di sekitar gereja (*church square*). Menurut Habermas (1989) dalam Purwanto (2011), ruang publik ideal adalah yang mampu menjadi jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat dari beragam kelas, dimana hanya melalui ruang publik inilah dapat terwujud masyarakat yang dewasa, bebas penindasan dan menanggulangi krisis. Ruang terbuka publik ideal ini berhubungan dengan perkembangan demokrasi karena pada ruang tersebut masyarakat berdiskusi mengenai seni dan literatur sampai dengan masalah ekonomi dan politik.

Pada saat ini, ruang terbuka publik di Indonesia, khususnya Bandung sangat jauh dari deskripsi Habermas, bahkan tidak sesuai dengan definisi ruang terbuka publik menurut American Planning Association. Ruang terbuka publik yang seharusnya bersifat terbuka dan dapat dimasuki oleh siapapun, kini diberi pagar dan hanya terdapat satu atau dua akses masuk ke dalamnya, seperti ruang terbuka di sekitar Monumen Perjuangan atau Taman Maluku. Bahkan terdapat beberapa ruang terbuka publik yang kini harus membayar apabila ingin masuk ke dalamnya, seperti di Tegalega. Ruang terbuka publik di kota Bandung sangat minim, baru sekitar 8,76 persen (Agustina dkk, 2008) dari ketentuan berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26/2007 yang mengharuskan ruang terbuka hijau publik dalam suatu kota itu minimal 30 persen, selain itu ruang terbuka publik tersebut memiliki kondisi yang buruk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dari Pemerintah Kota dan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas umum. Pada beberapa ruang terbuka publik di Bandung memiliki kesan tidak memiliki keselamatan dan keamanan, bahkan sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang negatif, seperti premanisme, prostitusi dan lain sebagainya.

Ruang terbuka publik di Bandung cenderung mengalami penurunan karena ruang terbuka publik yang ada merupakan hasil peninggalan dari pemerintahan Belanda. Ruang terbuka publik ini pun persebarannya tidak merata, hanya terdapat di sekitar wilayah

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Bandung Utara, sedangkan wilayah lainnya jarang atau bahkan tidak ada ruang terbuka publik. Dengan kondisi ruang terbuka publik tersebut, maka masyarakat berpindah ke ‘ruang publik lainnya’ yaitu mal, bahkan kini terdapat mal yang memiliki ruang-ruang terbuka diantara bangunannya, seperti Parisz Van Java dan Cihampelas Walk. ‘Ruang publik seperti ini lebih disukai oleh masyarakat karena kondisinya yang baik dan memperhatikan keselamatan dan keamanannya.

### **Car Free Day sebagai Alternatif Sementara Ruang Terbuka Publik**

Car Free Day yang pada awalnya dilaksanakan untuk kesadaran masyarakat akan bahaya pemanasan global dan pentingnya pengurangan emisi bahan bakar dalam di dunia dan hanya sekali setahun pada tanggal 22 September memiliki dampak yang positif untuk masyarakat Indonesia. Program ini disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia, bahkan antusiasme Car Free Day membuat program ini terus menyebar di kota-kota lain selain Jakarta dan salah satunya adalah Bandung.

Salah satu alasan mengapa program ini sukses adalah memberikan jawaban terhadap kerinduan masyarakat akan ruang terbuka publik yang bersifat terbuka, dapat dimasuki oleh siapapun, serta aman.

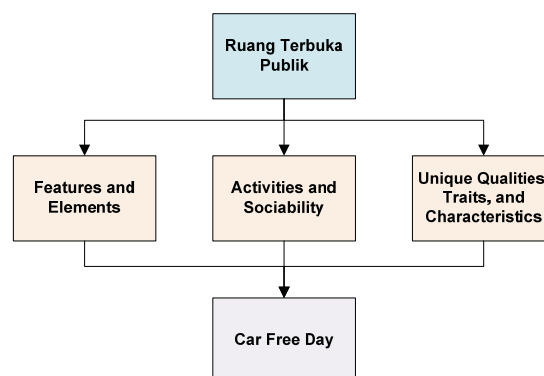
### **3. METODE PENELITIAN**

Untuk riset ini, metodologi yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana besar pengaruh Car Free Day sebagai alternatif sementara Ruang Terbuka Publik di Indonesia adalah sebagai berikut:

Untuk penelitian ini, digunakan definisi yang ditetapkan oleh American Planning Association (2011) mengenai definisi Ruang Terbuka Publik, dan kemudian faktor-faktor yang mendefinisikan Ruang Terbuka Publik ini dicoba diriset melalui kuesioner sederhana kepada responden, untuk mendapatkan masukan mengenai apakah aktifitas Car Free Day dapat menggantikan secara sementara fungsi dari Ruang Terbuka Publik di Indonesia.

Beberapa batasan permasalahan yang akan diambil dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sehubungan dengan batasan waktu, maka riset akan dilaksanakan secara online dan offline. Online melalui situs web kuesioner, sedangkan offline melalui wawancara terhadap responden secara manual.
- Batasan responden adalah pengunjung tetap/ tidak tetap acara Car Free Day di Bandung.



**Gambar 4.** Metodologi Penelitian



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dari kuestioner dan analisa statistic menggunakan software JMP. Kuestioner didistribusikan dengan metode wawancara manual dan survey internet (<http://svy.mk/CFDBdg>). Total 63 responden mengisi kuestioner ini.

#### Temuan Demografis dan Kebiasaan di Car Free Day

**Tabel 1:** Temuan Demografis (kiri); Kebiasaan di Car Free Day (kanan)

Temuan Demografis		
Pertanyaan & Kategori		%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	35
	Perempuan	65
Kota	Bandung	82
	Luar Bandung	18
Pekerjaan	PNS	31
	Swasta	21
	Mahasiswa/ Pelajar	44
	Lain-lain	3
Usia	< 17	0
	18-25	37
	25-35	34
	35-45	6
	> 45	23

Kebiasaan di Car Free Day		
Pertanyaan & Kategori		%
Pernah ke CFD?	Pernah	82
	Belum Pernah	18
Seberapa sering ke CFD?	< 1x sebulan	63
	1-2x per bulan	33
	1x seminggu	4
Untuk apa datang ke CFD?	Olahraga	22
	Mencari makanan	24
	Mencari hiburan	38
	Berinteraksi	16

Berdasarkan temuan demografis diatas, didapat kesimpulan bahwa responden sebagian besar terdiri dari usia 18-35, dan berstatus pekerja atau mahasiswa. 82% dari mereka pernah datang ke acara Car Free Day, baik di Dago, Cimahi, Buahbatu, maupun Merdeka. Walaupun begitu, frekuensi kehadiran mereka hanya berkisar paling banyak sekali setiap bulan. Tujuan mereka datang ke Car Free Day adalah untuk mencari hiburan, mencari makanan, berolahraga dan berinteraksi.

#### Car Free Day dan Hubungannya Dengan Faktor Pembentuk Ruang Terbuka Publik

Untuk pertanyaan utama kuestioner, dibagi menjadi tiga bagian. Ada tujuh pertanyaan didalam kuestioner mengenai Car Free Day dan hubungannya dengan fitur dan elemen, sebelas pertanyaan didalam kuestioner mengenai Car Free Day dan hubungannya dengan aktivitas dan sosiabilitas, dan delapan pertanyaan didalam kuestioner mengenai Car Free Day dan hubungannya dengan kualitas dan karakteristik unik. Pertanyaan dalam bentuk skala Likert, dengan empat pilihan jawaban: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

**Tabel 2:** CFD vs. Fitur dan Element

Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)
Saya datang ke Car Free Day menggunakan fasilitasnya untuk bermain	4	34	51	11
Saya datang ke Car Free Day untuk mencari udara segar	2	21	53	25
Saya mendapatkan udara yang lebih segar di Car Free Day	4	38	45	13
Saya datang ke Car Free Day untuk berolahraga	6	38	49	8
Saya dapat berolahraga dengan tenang di Car Free Day	17	49	30	4
Semua orang dapat bebas datang ke Car Free Day	0	0	57	43
Secara umum, Car Free Day sementara dapat memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka public dari sisi fitur dan elemen	2	19	66	13

\*) Keterangan: STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; S: Setuju; SS: Sangat Setuju

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

**Tabel 3:** CFD vs. Aktivitas dan Sosiabilitas

Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)
Saya datang ke Car Free Day untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman	0	8	79	13
Saya datang ke Car Free Day untuk melihat orang lain	8	32	51	9
Saya datang ke Car Free Day untuk dilihat oleh orang lain	23	55	19	4
Saya datang ke Car Free Day untuk relaksasi	4	13	66	17
Saya datang ke Car Free Day untuk berjalan-jalan dengan keluarga	0	23	55	23
Saya datang ke Car Free Day untuk bersenang-senang	0	8	72	21
Saya datang ke Car Free Day untuk mencari makanan	4	11	64	21
Saya mendapatkan teman baru melalui acara Car Free Day	6	60	32	2
Saya mengikuti komunitas baru melalui Car Free Day (ex. Komunitas sepeda ontel)	19	64	15	2
Saya rutin berolahraga sejak Car Free Day diselenggarakan	17	72	9	2
Secara umum, Car Free Day sementara dapat memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka publik dari sisi aktivitas dan interaksi sosial	0	11	79	9

\*) Keterangan: STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; S: Setuju; SS: Sangat Setuju

**Tabel 4:** CFD vs. Kualitas dan Karakteristik Unik

Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)
Saya datang ke Car Free Day untuk mendapatkan ketenangan hati	8	55	36	2
Saya merasa Car Free Day telah menjadi salah satu tempat yang saya kenal, dimana saya merasa aman disana	2	66	28	4
Saya merasa kegiatan Car Free Day memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas udara di Bandung dan sekitarnya	6	21	57	17
Saya senang datang ke acara Car Free Day karena kualitas lingkungannya terjaga dengan baik	2	40	51	8
Saya menjadi lebih peduli dengan lingkungan karena mengikuti Car Free Day	4	45	43	8
Keselamatan saya terjaga setiap saya hadir di acara Car Free Day	4	48	48	0
Kebersihan selalu terjaga setiap saya hadir di acara Car Free Day	11	53	34	2
Secara umum, Car Free Day memiliki kualitas dan karakteristik unik dari sebuah ruang terbuka publik	0	11	77	11

\*) Keterangan: STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; S: Setuju; SS: Sangat Setuju

Dari jawaban yang diberikan oleh responden, kita dapat melihat bahwa Car Free Day secara garis besar memiliki kemiripan faktor dengan ruang terbuka publik.

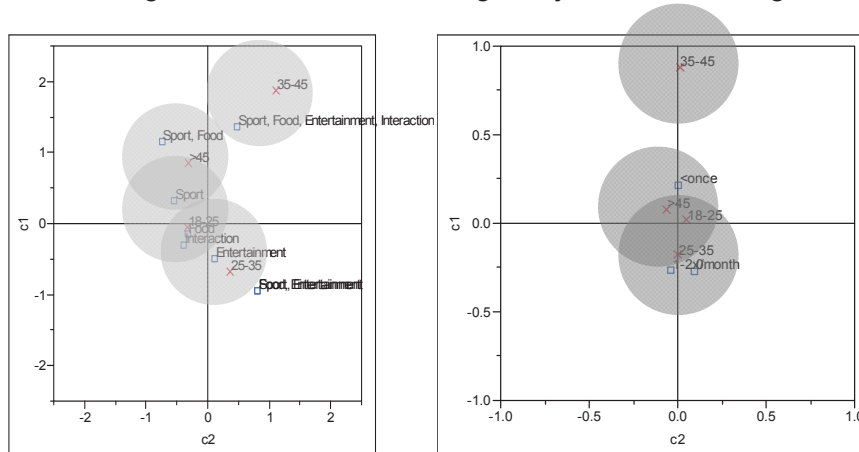
### Deskripsi Analisa Statistik

Analisa statistik dilakukan dengan menggunakan software JMP 7 yaitu berupa analisis korespondensi, analisis komponen utama dan analisis faktor. Analisis koresponden yang sering juga disebut multi dimension scaling digunakan untuk mencari koinsiden, variabel yang terjadi bersamaan atau *concurrent*. Pada penelitian ini yang dicari adalah koinsiden antara usia responden dengan tujuan dan frekuensi kedatangan ke Car Free Day. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 5 yang berupa *scatter-plot* atau *special map*.

Dari hasil diagram atau special map analisis korespondensi usia dan tujuan datang ke CFD didapatkan bahwa responden dengan usia antara 18-25 tahun datang ke CFD dengan satu tujuan apakah untuk mencari makanan, berinteraksi, hiburan atau olahraga saja. Hal ini hampir sama dengan usia antara 25-35 tahun, tetapi mereka juga datang ke CFD dengan tujuan untuk mencari makanan dan hiburan, atau berolahraga dan hiburan. Berbeda halnya dengan kelompok usia 35-45 tahun yang bertujuan datang untuk semua hal, yaitu berolahraga, mencari makanan, hiburan dan untuk berinteraksi, sedangkan kelompok usia

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

diatas 45 tahun datang ke CFD untuk olahraga saja, serta olahraga sambil mencari makanan.



**Gambar 5.** Analisis korespondensi usia dan tujuan datang ke CFD (kiri), serta usia dan frekuensi kedatangan ke CFD (kanan)

Hasil analisis korespondensi antara usia dan frekuensi kedatangan ke CFD didapatkan bahwa kelompok usia yang sering mendatangi CFD atau 1-2 kali per bulan adalah kelompok usia 25-35 tahun, kemudian kelompok usia 18-25 tahun dan lebih dari 45 tahun yang kurang lebih sekali, setelah itu kelompok usia 35-45 tahun yang paling jarang.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis korespondensi ini adalah: 1) Kelompok usia 25-35 tahun merupakan kelompok usia yang paling sering mendatangi CFD dengan satu atau dua tujuan sekaligus; 2) Kelompok usia 18-25 tahun lebih jarang datang, yaitu lebih dari sekali saja dengan salah satu tujuan saja dan mirip dengan kelompok usia 25-35 tahun; 3) Kelompok usia di atas 45 tahun sama seperti kelompok usia 18-25 tahun frekuensi kedatangannya dan bertujuan untuk olahraga saja atau olahraga sambil mencari makanan; 4) Kelompok usia 35-45 tahun paling jarang ke CFD dan memiliki tujuan untuk semua hal.

**Tabel 6:** Karakteristik ruang terbuka publik vs variabel laten hasil analisis komponen utama dan analisis faktor

Karakteristik Ruang Terbuka Publik	Variabel Laten	Faktor Dominan
Elemen dan fitur	Elemen dan fitur	Saya senang datang ke acara Car Free Day karena kualitas lingkungannya terjaga dengan baik
Aktivitas dan interaksi sosial	Aktivitas berolahraga dan interaksi dengan komunitas/teman baru	Saya rutin berolahraga sejak Car Free Day diselenggarakan
	Aktivitas rekreasi dan interaksi dengan keluarga/teman	Saya datang ke Car Free Day untuk bersenang-senang
	<i>Seen and to be seen</i>	Saya datang ke Car Free Day untuk melihat orang lain
Keunikan, Kualitas, dan Karakteristik	Kualitas udara dan lingkungan	Semua orang dapat bebas datang ke Car Free Day
	Ketenangan dan keamanan	Saya merasa Car Free Day telah menjadi salah satu tempat yang saya kenal, dimana saya merasa aman disana
	Keselamatan	Keselamatan saya terjaga setiap saya hadir di acara Car Free Day
	Kebersihan	Secara umum, Car Free Day sementara dapat memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka public dari sisi fitur dan elemen

Dari hasil analisis komponen utama dan faktor analisis didapatkan delapan variabel laten dari pertanyaan kuesioner, yaitu: **kualitas udara dan lingkungan; aktivitas berolahraga dan interaksi dengan komunitas/teman baru; aktivitas rekreasi dan interaksi dengan**

**keluarga/teman; kebersihan; ketenangan dan keamanan; seen and to be seen; elemen dan fitur; keselamatan.** Dengan demikian, karakteristik ruang terbuka publik yang dijadikan kerangka penelitian dalam menjelaskan Car Free Day sebagai alternatif Ruang Terbuka Publik kurang tepat karena terdapat variabel-variabel lainnya yang lebih tepat memperlihatkan Car Free Day sebagai alternatif ruang terbuka publik. (Tabel 6.) Selain itu, pada tabel 6 dapat dilihat faktor-faktor dominan diantara variabel-variabel laten.

## **5. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis paper ini, didapatkan kesimpulan bahwa Car Free Day dapat menjadi alternatif solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka publik dari sisi rekreasi, olahraga, dan hiburan. Akan tetapi ada banyak kekurangan yang masih harus dibenahi, dilihat dari jarangnyanya masyarakat datang ke acara Car Free Day. Faktor utama yang perlu dibenahi adalah keamanan dan kebersihan yang belum terkelola dengan baik. Diharapkan dimasa yang akan datang selain dengan penambahan ruang terbuka publik, juga penyelenggaraan Car Free Day yang lebih baik akan membantu memberikan kualitas udara dan rekreasi yang lebih baik bagi warga kota Bandung.

Selain itu, terdapat perbedaan diantara kelompok usia dalam hal tujuan kedatangan dan frekuensi kedatangan ke Car Free Day. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas Car Free Day ke depannya.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih disampaikan kepada panitia Sustainable, Culture, Architecture, dan Nature #3 2012 dan kepada Universitas Atma Jaya, Jogjakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penelitian ini.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

1. UNCRD, 2008, *Future Activities under Asian EST Initiative*, Singapore: Third Regional EST Forum in Asia.
2. Montlake, S., 2011, *Jakarta launches 'car-free' days to give residents respite from traffic*, (Online), Jakarta, The Christian Science Monitor, ([www.csmonitor.com/layout/set/print/content/view/print/380418](http://www.csmonitor.com/layout/set/print/content/view/print/380418)), diakses pada tanggal 4 April 2012.
3. Depkumham RI, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Fandeli, C., Kaharuddin, Mukhlison, Universitas Gadjah Mada, 2004, *Perhutanan Kota*, Jogjakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
5. American Planning Association, 2011, *Characteristics and Guidelines of Great Public Spaces*, American Planning Association, (Online), (<http://www.planning.org/greatplaces/spaces/characteristics.htm>), diakses pada tanggal 13 April 2012.
6. Hakim, R., Utomo, H., *Ruang Terbuka Hijau Kota: Definisi, Fungsi, Cakupan, dan Manfaatnya*. (Online), Gicara, (<http://gicara.com/kebijakan-pemerintah/ruang-terbuka-hijau-kota-definisi-fungsi-cakupan-manfaatnya.html#>), diakses pada tanggal 13 April 2012.
7. Dwiyanto, A., 2009, *Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan*, Jogjakarta, Jurnal Teknik Vol. 30 No. 2 Tahun 2009, ISSN 0852-1697.
8. Agustina, W., Ramdani, A., R., Fitriawan, R., A., 2008, *Berebut Jantung Bandung*, (Online), Bandung, Tempo Interaktif, (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/06/LIN/mbm.20081006.LIN128375.id.html>), diakses pada tanggal 13 April 2012.

## EVALUASI TATA RUANG PESISIR SADENG GUNUNGKIDUL (Perspektif Pengurangan Risiko Bencana)

Ahmad Cahyadi<sup>1)</sup>, Ika Afianita<sup>2)</sup>, Priliani Gamayanti<sup>3)</sup>, Syifa Fauziyah<sup>4)</sup>

Program Beasiswa Unggulan BPKLN KEMDIKBUD RI pada Magister Internasional Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (MPPDAS) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta<sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail : [ahya.edelweiss@gmail.com](mailto:ahya.edelweiss@gmail.com)<sup>1)</sup>

### ABSTRACT

*Sadeng Coastal Area is a susceptible area for tsunami disaster. Tsunami incidents since 1629 have been occurred nine times. This research aims to evaluate the spatial of Sadeng Coast, reviewed by reducing disaster risk aspect. Furthermore, it also attempt to give a spatial planning based on disaster risk reduction. The method used is analyzing the regional site effect and the local site effect of tsunami disaster. In addition, it also conducted a risk analysis based on overlay or superimpose the tsunami hazard maps which are based on inundation scenario using the iteration method and the neighborhood operation using geographic information system (GIS) by landuse maps. The spatial planning is based on regional site effect and local site effect analysis of the tsunami disaster and the tsunami hazard maps that have been made.*

*Sadeng Coastal Area is susceptible area for tsunami disaster because it regionally facing the Indian Ocean which is a subduction area of the tectonic plate. The subduction area in southern Sadeng Coastal is a seismic gap that have major potential earthquake and followed by the tsunami. Locally, Sadeng Coastal Area is susceptible to the tsunami disaster because of the coastal form as a bay and followed by elongated valley with relatively flat slope. This condition reflect the past history of Sadeng Coastal Area that is a former estuary of the Ancient Bengawan Solo River. The overlay results of hazard maps and land use maps shows that the land use form of the settlements, the fish auction, and the refueling station are located in areas with high and very high hazard. This will cause a huge risk of tsunami disaster. Therefore, it is recommended to relocate the settlements and the other public facilities to areas with the lowest hazard, i.e >600 meters from the shoreline, while the areas with low hazard with up to very high ( 0 – 600 meters from the shoreline along the walley of the Ancient Bengawan Solo River) should be use for the harbor and the rear is used as a green belt. The green belt can be a Cemara Shrimp plant, Ketapang, coconut and hibiscus. Moreover, an early warning system, the determination of evacuation routes and an effort to increase the awareness of the community are necessary.*

**Keywords** : Disaster Risk Reduction, Overlay, Spatial Arrangement, Tsunami, Tsunami Disaster, Tsunami Vulnerability

### 1. PENDAHULUAN

Pesisir Sadeng merupakan sebuah pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan yang terletak di Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesisir ini terletak pada suatu muara sungai bengawan solo purba dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Potensi perikanan yang besar menjadikan pelabuhan ini berkembang (Sunarto, 2007). Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berencana memperluas dan meningkatkan kelas pelabuhan menjadi pelabuhan yang lebih besar.

Meskipun memiliki potensi yang besar, Pesisir Sadeng memiliki kerawanan tsunami yang besar. Selama 4006 tahun (2000 sebelum masehi sampai dengan Tahun 2006) kejadian tsunami di Selatan Jawa terjadi sebanyak 33 kali (*National Geophysical Data Centre, 2005; Marfaei dkk, 2008*). Fakta yang lain yang disampaikan oleh Kodoatie dan Sjarief (2006) serta

Marfai dkk. (2008) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu antara Tahun 1629 sampai dengan Tahun 2006 telah terjadi 9 kali kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa, yakni pada tahun; 1818, 1840, 1859, 1904, 1921, 1925, 1957, 1994, dan 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi tata ruang Pesisir Sadeng saat ini berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana. Evaluasi dilakukan berdasarkan skenario genangan tsunami (bahaya tsunami/*tsunami hazard*) menggunakan sistem informasi geografis serta kondisi penggunaan lahan saat ini di Pesisir Sadeng. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun suatu rekomendasi tata ruang dalam rangka pengembangan pembangunan Pesisir Sadeng pada masa mendatang.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsepsi Bencana**

Bencana (*disaster*) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Istilah yang sering digunakan terkait dengan bencana diantaranya risiko (*risk*), kerentanan (*vulnerability*), kerawanan (*susceptibility*) dan bahaya (*hazard*). Berikut beberapa pengertian istilah-istilah tersebut berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

- a. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- b. Kerawanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- c. Bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- d. Kerentanan adalah kondisi suatu masyarakat yang menyebabkannya menjadi lebih lemah dalam menghadapi bencana.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Analisis Kerawanan Tsunami di Pesisir Sadeng**

Analisis kerawanan tsunami di Pesisir Sadeng dilakukan dengan analisis *regional site effect* dan *local site effect* terhadap bencana tsunami. Analisis *regional site effect* adalah analisis lokasi Pesisir Sadeng secara regional, serta menganalisis struktur keruangan regional dan pengaruhnya terhadap kerawanan tsunami di pesisir Sadeng. Analisis *local site effect* adalah analisis berdasarkan karakteristik struktur tata ruang Pesisir Sadeng secara lokal dan pengaruhnya terhadap kerawanan tsunami.

### **Analisis Bahaya Tsunami di Pesisir Sadeng**

Analisis bahaya tsunami di Pesisir Sadeng dilakukan dengan peta skenario genangan tsunami yang didasarkan pada penelitian Dewi dan Dulbahri (2009) menggunakan sistem informasi geografis dengan metode iterasi *neighbourhood operation* (Tabel 1). *Neighbourhood Operation* adalah aplikasi berbasis raster yang digunakan untuk mengetahui

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

luasan penjalaran dengan berbasis data *DEM* (Marfai, 2003; 2004 dan 2006). Data yang digunakan adalah data *digital elevation model* (*DEM*). *DEM* dihasilkan dari ekstraksi data ketinggian dari Peta Rupa Bumi Indonesia (*RBI*) skala 1:25.000 lembar Parangupito dan data titik-titik ketinggian yang diperoleh dari pengukuran lapangan. Pemodelan beberapa skenario ketinggian genangan dilakukan dengan menggunakan *Software Ilwis 3.6*.

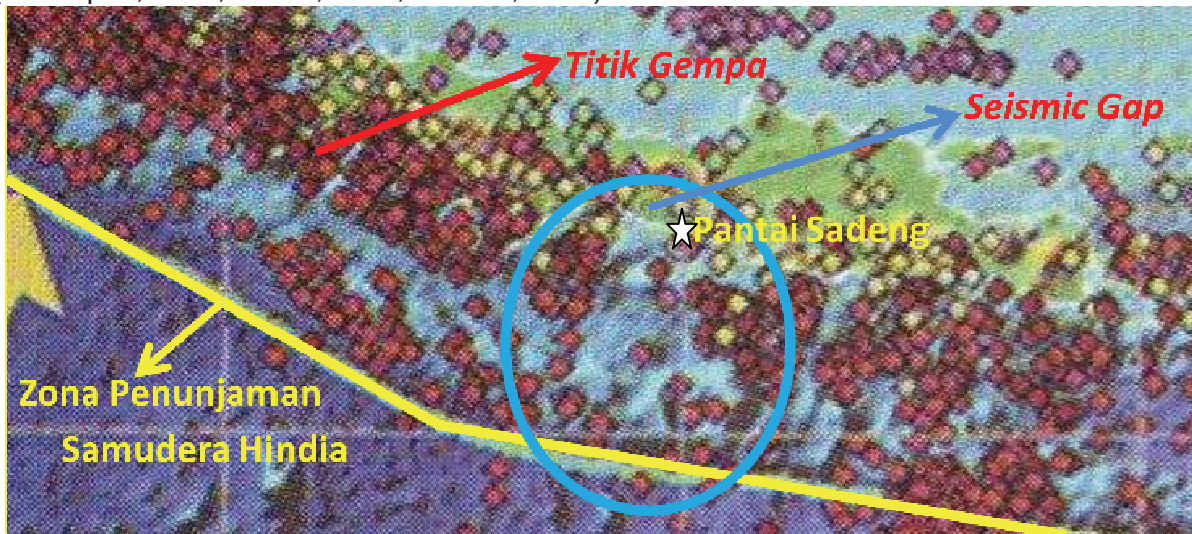
**Tabel 1:** Skor Bahaya pada Setiap Skenario Genangan

Skenario Ketinggian	Skor Bahaya	Tingkat Bahaya
1m	5	Bahaya Sangat Tinggi
2m	4	Bahaya Tinggi
3m	3	Bahaya Sedang
6m	2	Bahaya Rendah
>6m	1	Bahaya Sangat Rendah

Sumber: Dewi dan Dulbahri (2009)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis *regional site effect* menunjukkan bahwa Pesisir Sadeng memiliki kerawan tsunami yang besar. Hal ini disebabkan Pesisir Sadeng terletak di pesisir selatan Pulau Jawa yang berdekatan dengan lokasi penunjaman lempeng Samudera Hidia-Australia di bawah lempeng Eurasia (Gambar 1). Lokasi ini merupakan wilayah yang rawan terjadi gempa bumi yang disertai dengan dislokasi dasra samudra sehingga dapat menimbulkan tsunami (Verstapen, 2000; Marfai, 2008; Sutikno, 2009).



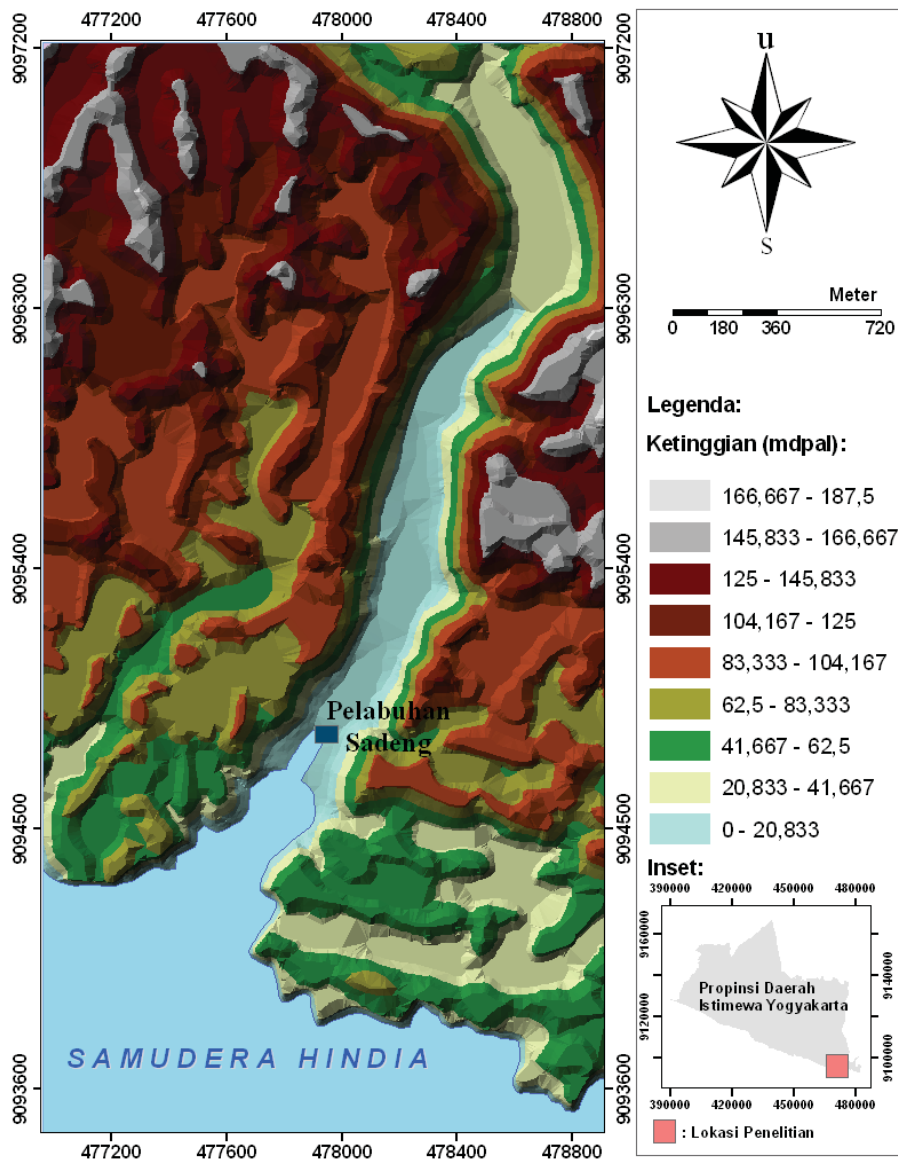
**Gambar 1.** Lokasi Pesisir Sadeng pada Skala Regional  
(Subandono dan Budiman, 2008 dengan modifikasi)

Selain terletak di dekat zona penunjaman lempeng tektonik, Pesisir Sadeng terletak pada suatu celah seismik/*seismic gap* (Marfai dkk, 2012a). Zona ini adalah zona yang jarang mengalami gempa bumi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Namun demikian, pelepasan yang tenaga yang jarang terjadi (melalui mekanisme gempa) menyebabkan kejadian gempa sering terjadi dalam magnitudo yang besar. Kondisi ini menyebabkan peluang terjadinya dislokasi dasar samudra yang menjadi pemicu tsunami akan semakin besar.

Analisis *local site effect* menunjukkan bahwa Pesisir Sadeng memiliki kerawanan tsunami yang tinggi. Hal ini karena Pesisir Sadeng berbentuk lembah memanjang yang diapit oleh tebing curam di sekitarnya. Selain itu lembah memanjang yang terdapat di Pesisir Sadeng

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
"Sticks and Carrots"  
Reward and Punishment

memiliki morfologi yang datar sehingga *run up* tsunami akan mencapai jarak yang cukup tinggi. Kondisi local site Pesisir Sadeng diperlihatkan Gambar 2.

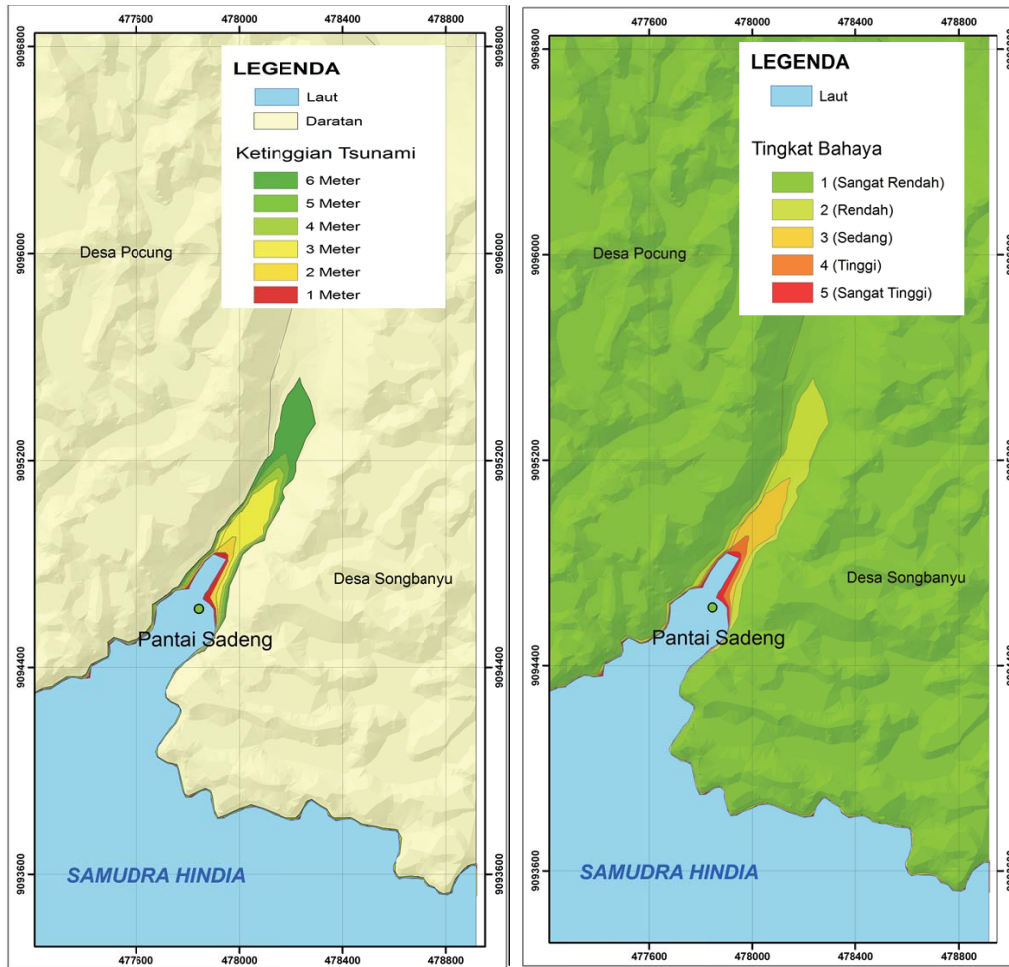


Gambar 2. Local Site Pesisir Sadeng Berdasarkan Digital Elevation Model/DEM (Marfai dkk, 2012b)

Pemodelan genangan tsunami dengan beberapa skenario menunjukkan bahwa tsunami akan menjalar mengikuti sepanjang lembah di Pesisir Sadeng. Wilayah bahaya tsunami meliputi sepanjang lembah dari garis pantai sampai dengan jarak 600 meter dari garis pantai (Gambar 3). Lokasi yang memiliki tingkat bahaya tsunami paling tinggi adalah bekas muara Bengawan Solo purba yang berada di ujung lembah.



SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
"Sticks and Carrots"  
Reward and Punishment

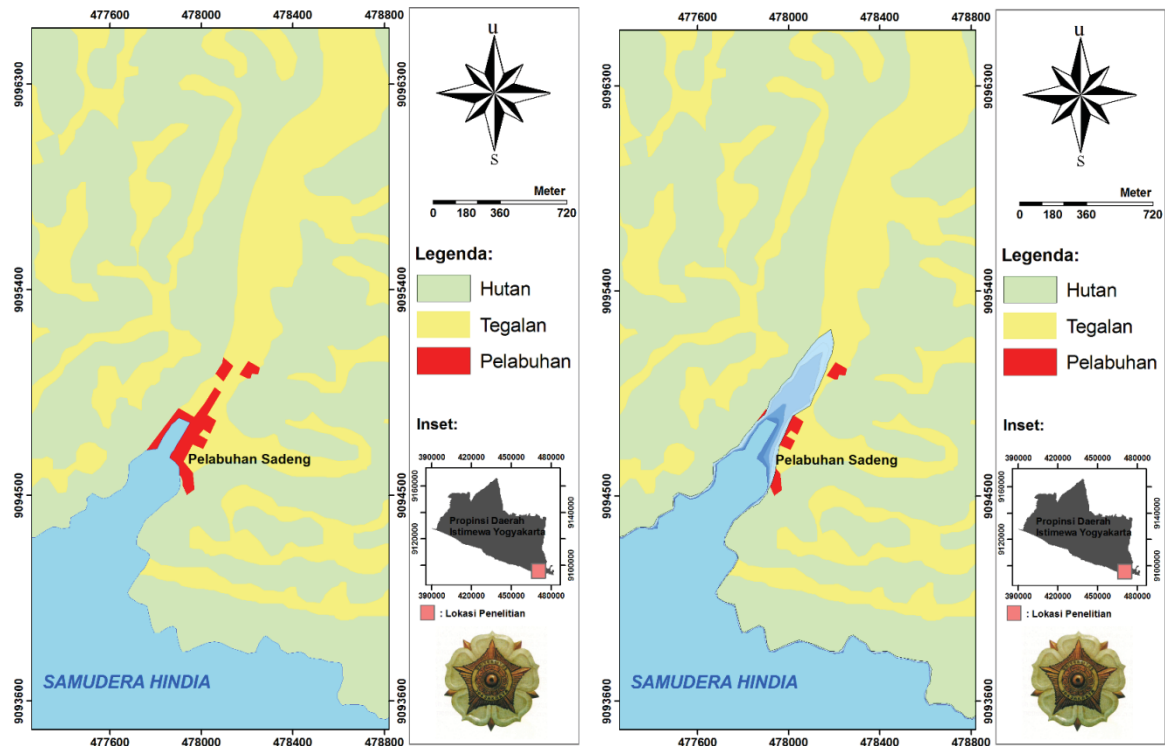


Gambar 3. Peta Skenario Genangan Tsunami (kiri) dan Peta Bahaya Tsunami di Pesisir Sadeng

Hasil *overlay* dengan peta penggunaan lahan menunjukkan hampir semua fasilitas umum seperti pelabuhan, SPBU dan tempat pelelangan ikan serta permukiman terletak pada wilayah bahaya tsunami (Gambar 4). Hal ini berarti bahwa risiko tsunami akan besar. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang di Pesisir Sadeng agar risiko bencana tsunami dapat semakin kecil.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tsunami adalah merelokasi permukiman dan fasilitas umum lain ke wilayah dengan bahaya sangat rendah, yakni >600 meter dari garis pantai, sedangkan wilayah dengan bahaya rendah sampai dengan sangat tinggi (0 – 600 meter dari garis pantai di sepanjang lembah Bengawan Solo Purba) sebaiknya digunakan untuk pelabuhan dan di belakangnya digunakan sebagai sabuk hijau. Sabuk hijau dapat berupa tanaman Cemara Udang, Ketapang, kelapa dan waru. Tanaman-tanaman tersebut terbukti dapat meredam kekuatan tsunami di Pesisir Bantul saat terjadi Tsunami Pangandara Tahun 2006 (Triatmadja, 2010). Selain itu diperlukan sistem peringatan dini (*early warning system*), penentuan jalur evakuasi dan peningkatan kesiapsiagaan bagi masyarakat.

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
"Sticks and Carrots"  
Reward and Punishment



Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan di Pesisir Sadeng (kiri) dan Peta Penggunaan Lahan yang Tenggelam oleh Tsunami pada Skenario Genangan 6 Meter (kanan)

## 5. KESIMPULAN

Pesisir Sadeng merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami. Hal ini karena secara regional terletak di dekat zona penunjaman lempeng tektonik serta pada *seismic gap* yang berpotensi mengalami gempa besar yang mengakibatkan tsunami. Secara lokal, bentuk Pesisir Sadeng yang berupa lembah memanjang akan menyebabkan kerawanan semakin tinggi. Hasil pemetaan bahaya menunjukkan bahwa hampir semua fasilitas umum dan permukiman terletak pada wilayah yang bahaya terhadap tsunami. Oleh karena itu, diperlukan relokasi permukiman dan fasilitas umum lain (selain pelabuhan) ke arah Utara sejauh >600 meter dari garis pantai, serta membuat sabuk hijau pada jarak 0-600 meter dari garis pantai.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Dewi, R.S. dan Dulbahri. 2009. Bencana Tsunami Parangtritis. Dalam Sunarto; Marfai, Muh Aris; dan Mardiatno, Djati. (eds), *Penaksiran Multirisiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Parangtritis*. Yogyakarta: Pusat Studi Bencana (PSBA) Universitas Gadjah Mada, 65-88.
2. Kodoatie, R.J. dan Sjarief, R. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yarsif Watampone.
3. Lavigne, F.; Gomez, C.; Gifo, M.; Wassmer, P.; Hoebreck, C.; Mardiatno, D.; Priyono, J.; dan Paris, R. 2007. Field observations of the 17 July 2006 Tsunami in Java. *Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 7(1)*. Hal:177-183.
4. Marfai, M.A. 2003. GIS modelling of river and tidal flood hazards in a waterfront city: case study, Semarang City, Central Java, Indonesia. *M.Sc. thesis*, International Institute for Geo-Information and Earth Observation, ITC, Enschede, The Netherlands
5. Marfai, M.A. 2004. Tidal flood hazard assessment: modelling in raster GIS, case in western part of Semarang coastal area. *Indonesian Journal of Geography, Vol. 36(1)*. Hal: 25-38.
6. Marfai, M.A. 2006. Analisis Neighbourhood Operations Dalam Teknologi Sistem Informasi Geografis Berbasis Raster Dan Aplikasinya Untuk Pemetaan Genangan Pasang Air Laut. *Makalah dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 17 Juni 2006.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

7. Marfai, M.A.; King, Lorenz; Singh, Lalan Prasad; Mardiatno, Djati; Sartohadi, Junun; Hadmoko, Danang Sri; dan Dewi, Anggraini. 2008. Natural hazards in Central Java Province, Indonesia: an overview. *Environmental Geology*, Vol. 56. Hal: 335–351.
8. Marfai, M.A.; Cahyadi, A.; dan Anggraini, D.A. 2012a. Tipologi, Dinamika Dan Potensi Bencana Di Pesisir Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul. *Laporan Penelitian*. Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
9. Marfai, M.A.; Cahyadi, A.; Sekaranom, A.B.; dan Nucifera, F. 2012b. Pemetaan Risiko Bencana Tsunami Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Pesisir Sadeng, Kabupaten Gunungkidul. *Laporan Penelitian*. Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
10. National Geophysical Data Centre. 2005. *Tsunami Run-ups Where All Records Returned*. Diakses Oleh Ahmad Cahyadi Tanggal 15 September 2006 Pukul 18.30 WIB dari [Paula.Dunbar@Noaa.Gov](mailto:Paula.Dunbar@Noaa.Gov). [NOAA-Satelite-and-Information-Service-Natural-Hazard](http://NOAA-Satelite-and-Information-Service-Natural-Hazard)
11. Subandono, D. dan Budiman, 2008. *Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami*. Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer.
12. Sunarto. 1997. Potensi Pantai Selatan Propinsi Jawa Tengah. *Laporan Penelitian*. Semarang: BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
13. Sutikno. 2009. Indonesia Negeri 1001 Bencana. *Makalah dalam Seminar Sistem Informasi Kebencanaan Sebagai Sebuah Kearifan di Negeri 1001 Bencana*. Environmental Geography Student Association (EGSA) Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, 3-5 Desember 2009.
14. Triatmadja, Radiana. 2010. *Tsunami: Kejadian, Penjalaran, Daya Rusak dan Mitigasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
15. Verstappen, H.Th. 2000. *Outline of The Geomorphology of Indonesia*. Enschede: ITC.

## RUMAH KONTAINER SEBAGAI ALTERNATIF DESAIN RAMAH LINGKUNGAN DALAM ARSITEKTUR

Usi Widyaningrum<sup>1)</sup>, Loekman Mohamadi<sup>2)</sup>

Student at Department of Architecture<sup>1)</sup>

Lecturer at Department of Architecture<sup>2)</sup>

University of 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang<sup>1,2)</sup>

E-mail : [u\\_she@rocketmail.com](mailto:u_she@rocketmail.com)<sup>1)</sup> E-mail : [loekman@archuntagsmg.co.cc](mailto:loekman@archuntagsmg.co.cc)<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*In Indonesia, generally the value of accommodation's need are proportional to the increase of human population. 70% social population has been settled on urban area, continuously to be a resident issues with narrow sites. Housing problem become necessary to concern about, following the increase of graphic resident's inclining, as land sites become narrowest, and the incline price on building costs.*

*Generally, this research is intended to see about alternative building or a more-ecological architecture, which has been used in many countries, and can be adapted as a construction of high rise building or public facilities on many cities in Indonesia., using shipping container unit. In particular, this research is due to develop the idea that a shipping container unit can be used as primary building material, with all advantages in size, shape, physical and psychological comfort, and its thermal condition. Hopefully this research can be take place as basic for the further research, as one of an act of the environment awareness done by the future students and professionals.*

*In this case, a container house can be described as green architecture with a building approach which can minimize various harmful effects that can endanger the human and environment health. However, this Container house can also be likened as an architecture work with a harmonic human and environmental living concept which included the main sustainable environment itself.*

*This study showed that the use of shipping container as materials are recycled and environmentally friendly. Moreover, that statement can be referred a basic material for sustainable design, which mean a used shipping container has been proved attain many resistance to time, weather, vibration, and other environment extrem's condition. From this research and studies, the manufacturing of a container house is faster and convenient yet affordable in term of time, cost, and technical.*

**Keywords:** container house, green architecture

### 1. PENDAHULUAN

Letak poin kontainer yang merupakan elemen arsitektur disebut sebagai desain / struktur yang berkelanjutan. Normalnya dengan ukuran 40' (12,1m) atau 20' (6m), dengan lebar 2,43m dan tinggi 2,43m, dengan luas lantai dalam minimal 27,95 m<sup>2</sup> dan 13.6 m<sup>2</sup>. Karena itu, penggunaan sebuah unit container 40' bekas atau dua buah container bekas 20' akan sangat cukup menampung luasan gerak dan kegiatan satu orang, seperti yang diungkapkan dalam Metric handbook (Adler, 2003). Selain itu tidak ada batasan untuk pengembangan kreatif.

Penggunaan kembali container sebagai komponen bangunan mendukung proses daur ulang yang lebih ramah lingkungan, dan juga mewujudkan bangunan di mana penghematan energy bangunan dapat diterapkan. Kontainer juga mempunyai nilai perbandingan penghematan energy yang lebih tinggi dibandingkan dengan material bangunan lainnya. Di saat unit container bekas itu sudah dapat dimanfaatkan untuk tujuan lainnya, bahan bangunan lainnya tidak dapat, dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang di saat peti kemas bekas sudah dianggap wajar sebagai material bangunan utama. Maka dari itu container sebagai komponen bangunan dapat disebut sebagai struktur yang berkelanjutan.

## 2. KONTAINER SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DESAIN

Kontainer atau dikenal juga sebagai peti kemas intermodal, adalah peti kemas besi daur ulang terstandarisasi yang digunakan untuk penyimpanan yang aman dan pemindah material berat dan hasil produksi yang digunakan di seluruh dunia, di bawah sistem transportasi intermodal peti kemas berstandar.

Diperkirakan terdapat sekitar 17 juta intermodal kontainer di seluruh dunia dengan berbagai bentuk untuk digunakan dalam berbagai tipe pengiriman kargo. Setiap unit container, di kedelapan sudutnya mempunyai kait twistlock yang berfungsi untuk menumpuk unit satu dengan unit lainnya, mengunci unit dengan galangan kapal atau cargo, dan untuk mengait unit dengan crane.

Ketika sebuah kontainer sudah tidak digunakan dalam kargo lagi, sebuah unit kontainer dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia, dengan tujuan untuk menghemat energi dan mendaur ulang. Sebuah kontainer besi beratnya 3629 kg, dan membutuhkan energi sebesar 8000 kWh untuk meleleh. Pengalihfungsian kontainer bekas adalah solusi yang sangat tepat untuk masalah ekologis maupun masyarakat. Arsitektur kontainer adalah konsep desain baru dalam arsitektur yang menggunakan kontainer bekas sebagai rangka / modul utama desain rumah, di mana besi menjadi bagian menarik dari sebuah hunian, atau disamarkan menjadi rumah yang terlihat sangat sederhana. (Sawyer, 2005,2008)

Berikut keuntungan dan kerugian menggunakan bahan peti kemas :

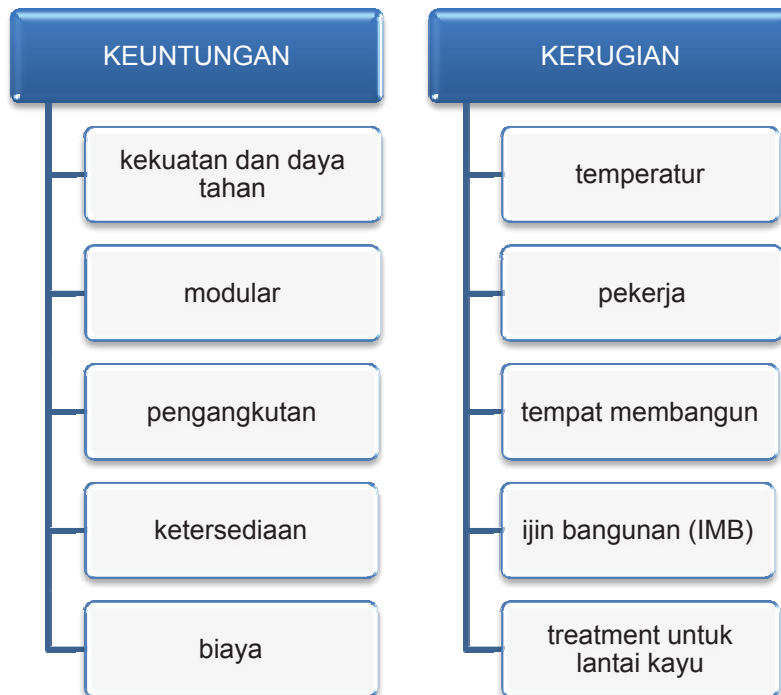


Diagram 1 : Keuntungan dan Kelebihan Bangunan Kontainer. Sumber (Kotnik, 2008)

### • Bahan

Container pada umumnya berbahan dasar besi baja ringan dengan lapisan anti karat dan anti api. Pada container bekas di negara tropis seperti Indonesia yang dimodifikasi menjadi rumah, harus ditambah beberapa bahan insulator untuk mengantisipasi panas yang masuk. Berikut adalah material yang dapat digunakan :(Kotnik, 2008)

- Kayu lapis, untuk lantai dan seng untuk dinding atau atap.
- Glasswool, untuk isolator bunyi, dan isolator panas di dinding dan atap

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

- Rockwool ; alternative selain glaswool.Rockwool bisa diaplikasikan di ruang-ruang dengan aplikasi panas dan bunyi yang tinggi (ruang genset, dapur, kantor, atau untuk partisi ruangan)
- Polyurethane foam spray, digunakan untuk melapisi dinding container sebelum dipasang glasswol atau bahan lainnya.

• **Standart Ukuran**

**Tabel 1: Berat dan Ukuran Standart Kontainer**

		20' container		40' container		40' high-cube container		45' high-cube container	
		imperial	metric	imperial	metric	imperial	metric	imperial	metric
external dimensions	length	19' 10 1/2"	6.058 m	40' 0"	12.192 m	40' 0"	12.192 m	45' 0"	13.716 m
	width	8' 0"	2.438 m	8' 0"	2.438 m	8' 0"	2.438 m	8' 0"	2.438 m
	height	8' 6"	2.591 m	8' 6"	2.591 m	9' 6"	2.896 m	9' 6"	2.896 m
interior dimensions	length	18' 8 13/16"	5.710 m	39' 5 45/64"	12.032 m	39' 4"	12.000 m	44' 4"	13.556 m
	width	7' 8 19/32"	2.352 m	7' 8 19/32"	2.352 m	7' 7"	2.311 m	7' 8 19/32"	2.352 m
	height	7' 9 57/64"	2.385 m	7' 9 57/64"	2.385 m	8' 9"	2.650 m	8' 9 15/16"	2.698 m
door aperture	width	7' 8 1/8"	2.343 m	7' 8 1/8"	2.343 m	7' 6"	2.280 m	7' 8 1/8"	2.343 m
	height	7' 5 3/4"	2.280 m	7' 5 3/4"	2.280 m	8' 5"	2.560 m	8' 5 49/64"	2.585 m
volume		1,169 ft <sup>3</sup>	33.1 m <sup>3</sup>	2,385 ft <sup>3</sup>	67.5 m <sup>3</sup>	2,660 ft <sup>3</sup>	75.3 m <sup>3</sup>	3,040 ft <sup>3</sup>	86.1 m <sup>3</sup>
maximum gross mass		66,139 lb	30,400 kg	66,139 lb	30,400 kg	68,008 lb	30,848 kg	66,139 lb	30,400 kg
empty weight		4,850 lb	2,200 kg	8,380 lb	3,800 kg	8,598 lb	3,900 kg	10,580 lb	4,800 kg
net load		61,289 lb	28,200 kg	57,759 lb	26,600 kg	58,598 lb	26,580 kg	55,559 lb	25,600 kg

Sumber : (Shipping Container Achitecture, 2010)

• **Desain**



**Diagram 2: Desain Bangunan Kontainer Sumber (Kotnik, 2008)**

- **Desain yang Berkelanjutan**

Secara umum, sustainable development atau pembangunan berkelanjutan dijabarkan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia, lingkungan, jaman saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Brundtland et al., 1987)

Ada banyak 'konsep' mengenai sustainabilitas atau keberlanjutan di berbagai negara, baik negara maju maupun negara dunia ketiga. Pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan, adalah tentang memastikan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang di masa sekarang dan untuk generasi mendatang. Hal ini memerlukan pertemuan dari empat tujuan utama di waktu yang sama di Indonesia dan dunia secara keseluruhan, yaitu:

kemajuan sosial masyarakat yang mengakui kebutuhan semua orang;

Perlindungan efektif terhadap lingkungan;

Bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan

Pemeliharaan tingkat tinggi dan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. (Achieving a Better Quality of Life, 2002)

Sedangkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat tersambung dalam rangka mencapai sustainability:

tingkat penggunaan sumber daya terbarukannya tidak melebihi tingkat regenerasi.

tingkat penggunaan sumber daya tak terbarukannya tidak melebihi tingkat di mana sumber daya pengganti berkelanjutan dikembangkan.

Tingkat emisi polusinya tidak melebihi kapasitas asimilatif lingkungan. (Steady State Economics, 1991)

Acuan-acuan untuk sustainable design (desain yang berkelanjutan), diambil dari Royal Institute of British Architects' Key Indicators for Sustainability Design, dan RIBA Environmental Checklist for Development, dikelompokkan berdasarkan struktur bab ini. Hal-hal yang patut dipertimbangkan sebagai rekomendasi:

- Lokasi dan Lingkungan
- Komunitas
- Kesehatan
- Energi
- Air

- **Material**

Bahan, energi dan air adalah tiga sumber daya utama yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan bangunan. Sebuah pendekatan desain bangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan 3 sumber daya dalam hal minimalisasi dampak lingkungan dan sosial yang terkait. Desain bentuk dan penentuan material yang tepat akan membantu untuk meminimalkan dampak yang terkait dengan penggunaan bahan.

- **Dampak lingkungan dari penggunaan bahan**

Bahan yang digunakan sepanjang hidup bangunan, awalnya dan terutama selama tahap konstruksi dan selanjutnya untuk pemeliharaan atau untuk perubahan. Bahan memiliki dampak besar pada bangunan mulai dari estetika dan daya tarik gedung untuk buildability dan biaya. Selama 30 tahun terakhir peningkatan pemahaman bahan di kalangan umum telah menyebabkan dampak ringan lain yang mempengaruhi orang dan lingkungan baik di luar konteks sebuah bangunan.

Sebagai contoh, kayu-kayu yang ditebang dari ribuan kilometer dari tempat deforestasi terjadi dan efek merugikan pada kesehatan asbes hanya menjadi jelas setelah sedekade setelah kontaminasi terjadi. Sumber daya material, proses manufaktur mereka, kebutuhan transportasi, penggunaan dan pembuangan akhir dapat melibatkan seluruh -mencapai kerusakan lingkungan dan sosial, termasuk pemanasan global, polusi, menipisnya sumber daya alam, perusakan habitat alami, kepunahan spesies tumbuhan dan hewan, produksi

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

limbah, penghancuran komunitas dan kesehatan problems. Untuk menilai dampak ini, spesifikasi materi ketat harus mempertimbangkan rantai reaksi dan efek jangka panjang dari menggunakan bahan apapun, bahkan yang mungkin tampak tidak mungkin terkait dengan dampak lingkungan yang negatif.

Life Cycle Assessment (LCA) adalah penilaian dampak yang terkait dengan bahan dari mereka sumber daya dan manufaktur untuk pembuangan mereka. Dalam buku Green Panduan Spesifikasi Penghijauan, Anderson, dan Sinclair Shiers menggambarkan proses penilaian dengan menggunakan dinding bata sebagai contoh dan daftar proses yang perlu dipertimbangkan untuk membentuk dampak lingkungan dari dinding bata di atas umurnya total. Dampak lingkungan yang terkait dengan isu-isu berikut harus dipertimbangkan:

- Pembuatan dan transportasi bahan tambahan
- Ekstraksi dan pengangkutan tanah liat untuk batu bata.
- Ekstraksi dan distribusi gas alam untuk kiln bata
- Pertambangan dan transportasi bahan bakar untuk pembangkit listrik untuk digunakan dalam pabrik.
- Produksi dan transportasi bahan baku untuk kemasan.
- Pembuatan dan transportasi bahan kemasan untuk bata.
- Pembuatan batu bata
- Pengangkutan batu bata ke lokasi bangunan
- Ekstraksi pasir dan semen untuk produksi lesung
- Pembangunan dinding bata
- Pemeliharaan dinding
- Pembongkaran dinding. (Anderson, Sinclair Shiers, 2006)

Bahan biasanya diklasifikasikan menjadi bahan terbarukan dan tidak terbarukan. Bahan tak terbarukan termasuk macam material dengan siklus regenerasi milenium (misalnya batu, batubara, minyak, bijih logam), dan bahan terbarukan termasuk orang-orang dengan siklus regenerasi dekade atau kurang (misalnya kayu, rami, rami, gabus). Bahan dapat berlimpah atau langka: pasir dianggap sebagai sumber daya berlimpah, sementara cadangan minyak terbatas dan diperkirakan lalu apa antara 40 dan 60 tahun (beberapa perkiraan selama lebih dari 60 tahun) tergantung pada tingkat konsumsi. Sumber daya terbarukan umumnya dianggap berlimpah. Namun, jika bahan terbarukan selesai dipanen, mungkin menjadi langka dan akhirnya bahkan habis, gabus dan kayu yang contoh yang relevan.

Untuk menghindari over-panen, sumber daya harus dikelola. Untuk kayu, sejumlah organisasi, seperti Forest Stewardship Council (FSC), memantau dan hutan mengakreditasi yang menerapkan sistem manajemen yang sukses berkelanjutan. Oleh karena itu, sementara bahan terbarukan harus digunakan dalam preferensi untuk non-terbarukan yang, ini tunduk pada sumber-sumber terbarukan yang dikelola secara lestari. Pertambangan skala besar, di sisi lain, dapat menyebabkan lebih permanen perubahan: pertambangan strip bauixite untuk memproduksi aluminium berhubungan dengan banjir di lembah-lembah untuk menghasilkan skema pembangkit listrik tenaga air, menyebabkan hilangnya hutan hujan habitat dan, akibatnya, hilangnya keanekaragaman hayati. Polusi air, tanah dan udara juga dapat menjadi konsekuensi dari ekstraksi bahan: ekstraksi minyak dikaitkan dengan udara polusi dari pembakaran dan pencemaran laut atau air tanah dari kebocoran dan tumpahan minyak. Peningkatan keprihatinan tentang dampak lingkungan dari pertambangan dan sumber daya ekstraksi telah menghasilkan beberapa perbaikan dalam praktek, meningkatkan jumlah hutan dikelola secara lestari dan ada bergerak menuju skala kecil pertambangan di preferensi untuk skala besar. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dan dengan mengacu pada masalah ini ketika menentukan bahan, konsumen dapat membantu mendorong pasar untuk mengadopsi praktek-praktek mendesain yang lebih berkelanjutan.

Point-point yang harus diperhatikan dalam memilih bahan untuk desain yang berkelanjutan, antara lain:

- Meminimalkan kebutuhan bahan;



- Membangun hanya bila benar-benar diperlukan.
- Membangun kecil.
- Desain untuk penggunaan yang efektif material.
- Desain untuk daya tahan dan pemeliharaan berkurang.
- Gunakan bahan yang sudah ada
- Reuse bangunan yang ada.
- Reuse komponen bangunan yang ada.
- Gunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang.

### **3. RUMAH KONTAINER SEBAGAI ALTERNATIF DESAIN BERKELANJUTAN**

Sebuah desain yang berkelanjutan berarti:

Desain yang memungkinkan akan tetap dan menjadi bangunan masa depan, dan dibangun dengan menggunakan kembali material dan daur ulang.

Desain untuk fleksibilitas dan keinginan untuk memaksimalkan fungsi bangunan.

Desain untuk daya tahan dan keinginan untuk memaksimalkan pembangunan komponen kehidupan.

Kita dapat memilih bahan baru dengan treatment yang lebih ramah lingkungan, dengan cara:

- Tentukan bahan terbarukan dengan siklus regenerasi singkat.
- Tentukan kayu dari sumber yang dikelola
- Tentukan sumber daya berlimpah dan hindari sumber daya yang langka.
- Tentukan bahan yang ditambang, dipanen atau diekstraksi dengan dampak minimal pada lingkungan lokal dan global.
- Tentukan bahan yang terkait dengan produksi rendah polusi.
- Tentukan bahan terkait dengan tingkat emisi CO<sub>2</sub> rendah, kehidupan dalam bangunan juga mempertimbangkan dampak-dampaknya pada penghematan energi sehari-hari.
- Pertimbangkan kebijakan lingkungan produsen.
- Tentukan bahan yang tidak mencemari udara dalam ruangan.
- Pilih bahan yang diproduksi secara lokal dan membutuhkan transportasi minim sekalipun
- Bahan pembuangan dan minimalisasi limbah.
- Pisahkan sampah kayu, inert, logam dan tanah selama konstruksi dan pembongkaran dan pastikan bahan-bahan itu bisa didaur ulang.
- Aturlah untuk bahan yang berlebihan, jika memungkinkan limbah bahan bangunan akan diambil kembali oleh pemasok bahan.
- Sertakan ketentuan daur ulang dalam bangunan.

- **Daya Guna Sampah atau Barang bekas**

Daur ulang sampah menjadi barang atau produk yang berdaya fungsi dan bernilai ekonomi tinggi sudah lazim dilakukan di kalangan industri besar maupun rumah tangga.

Sampah adalah masalah umum kehidupan di perkotaan, yang mengakibatkan banyak masalah sosial karena over-wasting, terlalu banyak sampah di perkotaan sehingga tidak ada tempat untuk membuangnya lagi. Konsep sustainability mempunyai regulasi pengaturan tentang bagaimana menghindari supaya dalam pembangunan tidak terjadi 'penyampahan' di lingkungan setempat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mewujudkan bangunan dengan konsep sustainable.

Pada Tahap desain

- ketahui ukuran dan desain arsitektural bangunan yang fix
- maksimalkan efisiensi struktur dan elemen bangunan lainnya.
- buat desain yang rasional dengan standard ukuran penuh.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- sertakan fasilitas / fungsi daur ulang dalam pengolahan limbah di semua jenis bangunan
- pertimbangkan segmen-segmen yang memungkinkan untuk mendaur ulang limbah rumah tangga.

- **Hindari Eksploitasi SDA**

Konsep desain yang berkelanjutan sangat mempertimbangkan masa depan dan pemikiran jangka panjang. Dalam memilih bahan bangunan asal, sumber daya tak terbarukan akan dipakai dengan hati-hati. Tidak hanya karena bahan tersebut baru dapat diproduksi lagi dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi juga karena kondisi tentang bahan tersebut nantinya mungkin tidak akan ada lagi.

Sebagai contohnya dalam membuat lantai kayu, dimana material aslinya 100% kayu lapis. Kayu adalah material yang paling sering diekspos penggunaannya dalam membangun bangunan. Bambu adalah material alami lainnya yang juga digunakan, tapi tidak sesering kayu. Padahal dari segi kecepatan regenerasi (tumbuh kembali) bambu 10x lebih cepat daripada pohon jati atau sejenisnya. Bambu dapat tumbuh 25 - 30 cm dalam sehari, dan dapat ditebang setelah 3 tahun (idealnya). Kayu gelondongan dapat dipanen setelah 5-20 tahun, kayu yang lebih tua dipanen setelah 30 tahun. Maka lebih dianjurkan untuk membuat lantai kayu dengan perkuatan dari bambu, lantai akan lebih kuat dan tahan gaya lendut, dan menggunakan lebih sedikit kayu.

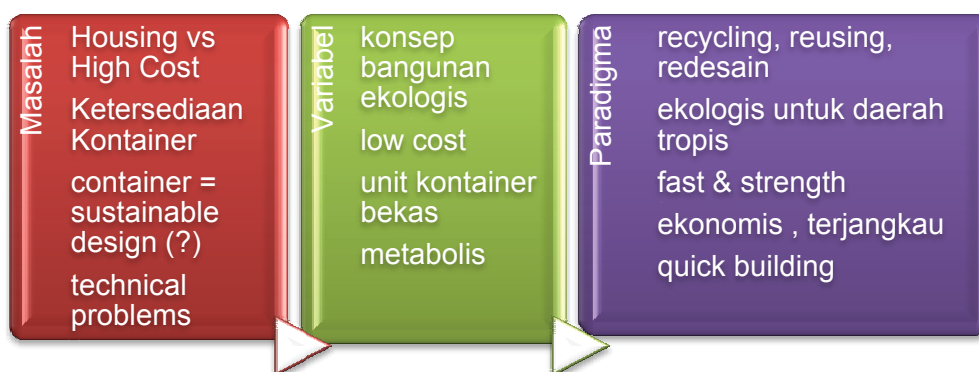
Perlu dicatat bahwa konteks sustainability ini tidak melarang penggunaan bahan tak terbarukan. Jadi dalam sebuah hunian dari kontainer bekas, sah-sah saja jika menggunakan jendela kaca, karena penggunaan kaca < penggunaan besi bekas, juga kayu lapis untuk dinding isolator panas dan lantai sah-sah saja karena penggunaan kayu < besi bekas.

Tekait konteks pelestarian alam, berikut adalah poin yang ditonjolkan dalam sebuah konsep desain berkelanjutan.

- Lokasi dan ekologi
- Komunitas dan budaya
- Kesehatan
- Bahan bangunan

#### 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif. Kami menggali sebuah fenomena recent arsitektur mengenai eksistensi desain dan bangunan dari unit kontainer bekas, dan potensi serta kelebihan dan kekurangannya dan tindakan teknis yang menyertainya. Untuk menghindari peneliti memilih variable yang akan digunakan untuk studi di lapangan dari masalah yang ada, dan menyusun batasan berupa paradigma-paradigma.



**Diagram 3:** Masalah, Variabel, Paradigma

## 5. DISKUSI

Untuk menyempurnakan penelitian ini tim peneliti melakukan studi literature dan juga menggunakan observasi dan survei dalam pengumpulan data penyusun analisis. Dalam pengamatan di lapangan diketahui bahwa unit container bekas sebagai material reuse yang digunakan dalam bangunan yang dirancang mungkin belum umum digunakan di Indonesia.



Foto 1: The Contertainer – Taman Baca & Poli Gigi AMIN , Malang- Jawa Timur

Tujuan utama adalah melihat cukup relevankah peti kemas bekas di gunakan di Indonesia yang beriklim tropis ataupun di Negara lain. Studi kasus ini juga membuktikan keberadaan dan keberhasilan stuktur bangunan yang terbuat murni dari unit-unit container bekas. Peneliti melakukan studi kasus di Poli Gigi dan Taman Baca "Amin" atau disebut juga The Contertainer. Mungkin bangunan ini merupakan bangunan pertama di Indonesia yang dibuat dari container. Terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. The Contertainer adalah sebuah poliklinik dan perpustakaan umum yang dirancang oleh sebuah perusahaan di Indonesia yang bernama Dpavilion Arsitek, yang mengubah kontainer petualang menjadi perpustakaan, yang berfungsi sebagai "jendela dunia". Nama untuk klinik kesehatan dan perpustakaan umum ini adalah campuran dari dua kata: container dan entertainment, yang mencerminkan tujuan mendirikan bangunan tersebut untuk memberikan kualitas hiburan dan layanan masyarakat yang lebih baik bagi mereka yang memiliki sedikit uang.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---



**Foto 2** : Interior Ruang Bacaan

The Contertainer terletak di Batu, Jawa Timur yang merupakan kota yang relatif baru dengan akar yang kuat di bidang pertanian. Kesenjangan yang tumbuh di antara mereka yang memiliki uang di Indonesia dan mereka yang tidak memiliki, merupakan dorongan untuk proyek yang menyenangkan dan berwarna-warni ini, yang benar-benar gratis untuk umum. Di dalamnya adalah klinik kesehatan yang menyediakan kebutuhan penduduk desa, seperti perawatan kesehatan dan perpustakaan umum untuk belajar, melakukan kegiatan masyarakat, inspirasi, dan hiburan.

Pusat dari bangunan ini terdiri dari lima kontainer pengiriman yang diletakkan di atas konstruksi “panggung” dari pipa baja. Kontainer bekas merupakan material yang mudah didapatkan dan murah di Indonesia jadi Dpavilion Arsitek memutuskan untuk menggunakan mereka karena sifat multi fungsi mereka dan kemudahan konstruksi.

## **6. KESIMPULAN**

Hunian berbahan dasar peti kemas atau container bekas adalah salah satu konsep hunian green construction. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan container bekas yang didaur ulang dan ramah lingkungan (sesuai dengan treatment yang sudah dilakukan) sesuai dengan prinsip green construction. Bahkan dapat disebut sebagai bahan dasar untuk sustainable design (desain berkelanjutan), yang berarti container bekas sudah teruji memiliki daya tahan lama terhadap waktu, cuaca, getaran, dan kondisi alam lainnya. Dari hasil studi dan pengamatan, didapat bahwa dari segi biaya, waktu, dan teknis, pembuatan rumah container lebih cepat dan praktis, dengan biaya yang lebih terjangkau daripada biaya pembuatan hunian / bangunan konvensional.

Dari berbagai studi perbandingan, disimpulkan hunian berbahan container bisa digunakan di semua tipe iklim di seluruh dunia. Tidak hanya terpaku pada perumahan horizontal saja, container bekas juga dapat diaplikasikan sebagai kantor, fasilitas pendidikan, kesehatan, apartemen, kafe, fasilitas umum lainnya. Selain menghasilkan bentuk dan tampilan yang

unik, modul balok pada container tidak mengikat perancang atau arsitek sehingga tetap dapat dibuat berbagai desain yang unik dan akomodatif.

Karena saat ini sudah ditemukan cara dan bahan isolator yang dapat mengisolasi panas ataupun mengakomodasi suhu hangat, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, karena sudah banyak diterapkan di luar negeri sebagai hunian permanen, dapat dikatakan bahan container bekas layak diaplikasikan sebagai hunian dan fasilitas umum lainnya.

Penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan, agar didapat pengertian secara meluas, bahwa rumah berbahan container bekas layak dan sangat dianjurkan sebagai bahan utama maupun bahan alternative bangunan tinggal.

## **7. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pengelola poli gigi dan taman baca “Amin” Malang Jawa Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan Ibu Eko Nursanty, ST,MT selaku Dosen pengampu yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, arahan dan koreksi sehingga menambah luas wawasan peneliti dalam penyusunan penelitian ini, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## **8. REFERENSI**

1. Achieving a Better Quality of Life. (2002). *DEFRA* .
2. Anderson, Sinclair Shiers. (2006). *The Green Spesification's Guide*.
3. Brundtland et al. (1987). *Our Common Future* .
4. Daly's. (1991). Steady State Economics. *Daly Journal* .
5. Kotnik, J. (2008). *Container Architetecture*.
6. sawyer, p. (2005,2008). *intermodal shipping container small steel building*.
7. *Shipping Container Achitecture*. (2010). Retrieved December Sunday, 2011, from [www.wikipedia.en](http://www.wikipedia.en).

## LINGKUNGAN BUATAN UNTUK MANUSIA, HEWAN DAN TUMBUHAN

**Franky Liauw**

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Tarumanagara  
E-mail : [d.dan5656@yahoo.com](mailto:d.dan5656@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Ethics occur not only among human being, but also with other being, like animals and plant. Although animals and plant are not as smart as human being, without them human being can not survive. So, animals and plant deserve equal rights as human being. Technologies make human being can live on non-arable land, but animals and plant need arable land to support their life. So, it is important to protect arable land, animals and plant, to sustain the life of all beings on earth.*

*On the relatively constant and limited size of earth surface, we can estimate the size of arable for animals and plant to live and produce food for human being, also the size of non-arable land for human being to live on, and fallow land for the wild life. We need to maintain the equilibrium of the allotment of land use. The growth of human population need to be maintain to keep this equilibrium. Human being also have to treat the environment with friendly behavior. Otherwise, human being is threatening their life.*

*Built environment must be design to maintain the equilibrium of all environmental elements. Built environment have to become also the habitat of animals and plant. They deserve equal treatment like human being do to their fellow. The yard of a house, for example, not only design just for the comfort of the owner, but also for the sake of animals and plant.*

**Keywords:** *ethics, equilibrium, human being, animal, plant.*

### 1. LINGKUNGAN BUATAN

Setiap makhluk hidup di bumi, selalu akan berusaha membuat tempat tinggal yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanannya. Ada hewan yang merasa cukup dengan sekedar tempat yang cukup terlindung, seperti gua atau di bawah pohon, untuk tempat tidurnya, ada pula hewan yang membuat sarang, misalnya lebah, semut, burung, atau hewan lainnya. Sarang yang dibuat oleh para hewan ini umumnya berasal dari bahan alami seperti tanah, ranting, atau daun pohon, sering tanpa diolah lebih dulu, hanya disusun sesuai insting mereka. Biasanya "tempat tinggal" seperti ini terlihat dan bersifat alami, sehingga seolah menyatu dengan alam.

Manusia pun membuat bangunan untuk tempat tinggalnya, juga tempat belajar, bekerja, atau berkegiatan lainnya. Berbeda dengan hewan lainnya, dengan kecerdasannya manusia menciptakan teknologi yang terus berkembang, yang digunakan untuk mengolah bahan alami seperti tanah liat menjadi bata, genteng, keramik, atau bahan bangunan lainnya. Dengan teknologi yang canggih, manusia juga mengembangkan bangunan cerdas.

Lingkungan tempat tinggal dan berkegiatan manusia biasanya disebut sebagai lingkungan buatan atau lingkungan binaan, yang kontras dengan lingkungan alami. Di perkotaan, hutan sebagai tempat hidup tanaman dan hewan berubah menjadi hutan bangunan dan beton, yang hanya cocok untuk hidup manusia, hewan dan tanaman liar tergusur menyingkir dari tempat tinggal manusia. Manusia yang semula merupakan bagian dari alam, seolah mengambil tempat yang terpisah dari alam. Lingkungan buatan dibedakan dan terpisah dari lingkungan alami, Taman, kebun, sawah, atau penghijauan yang dibuat oleh manusia juga dianggap sebagai lingkungan buatan.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Lingkungan buatan sengaja dirancang oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang cenderung terus meningkat secara cepat. Kriteria rancangan dibuat untuk memenuhi kepentingan manusia, baik sebagai perancang, sebagai klien, atau sebagai pengguna dan masyarakat lainnya. Sangat jarang, atau barangkali tidak pernah, lingkungan buatan dirancang sambil memikirkan kepentingan hewan atau tanaman. Sebelum bangunan dibuat, lahan yang dipenuhi tanaman dan hewan biasanya “dimatangkan” dulu, tanaman dibabat, otomatis hewan tergusur, dan tanah diratakan untuk memudahkan proses pembangunan. Sangat jarang atau bahkan tidak pernah, manusia memikirkan pemindahan hewan dan tanaman yang tersingkir, ke tempat yang memadai, seperti ketika sekelompok orang miskin tergusur dari lahan tempat tinggalnya.

Kebun binatang, yang dirancang untuk memelihara dan membudidayakan hewan, juga lebih banyak dirancang dengan kriteria yang terutama memperhatikan kepentingan manusia. Hewan menjadi tontotan manusia. Bahkan taman safari yang mendekati alam pun masih sangat kuat kesan sebagai lingkungan yang dibuat oleh manusia.

Lingkungan buatan memperlihatkan “kekuasaan” manusia untuk mengubah alam yang kadang tidak ramah menjadi “surga” bagi dirinya sendiri, dengan mengorbankan banyak unsur alam lainnya seperti hewan dan tanaman. Namun alam yang ditaklukkan kemudian ternyata dapat “membalas” berupa berbagai bencana seperti tanah longsor, banjir, tsunami, pemanasan global, perubahan iklim, badai, polusi, atau bencana lainnya, yang kali mengambil banyak korban dari pihak manusia. Manusia cenderung memposisikan diri terpisah dari lingkungan alami, terpisah dari dunia hewan dan tanaman “liar”.

## **2. LINGKUNGAN BUATAN DAN LINGKUNGAN ALAMI**

Dalam lingkungan buatan dan hubungan antara sesama manusia, berlaku hukum dan etika. Pelanggaran terhadap hak seseorang dapat dituntut berdasar hukum setempat. Sekelompok kecil manusia mengambil peran mewakili kepentingan hewan dan tanaman. Beberapa kelompok itu seperti *Green Peace*, Walhi, atau lainnya, selama ini melakukan gerakan untuk mencegah tindakan manusia yang dapat berakibat pada kerusakan dan kepunahan *species* hewan atau tanaman tertentu.

Dalam masyarakat manusia, pengusuran sekelompok orang dari suatu lahan biasanya disertai dengan tuntutan untuk memikirkan tempat penampungan, ganti rugi, atau tindakan kompensasi lainnya. Bila tidak, penggusur dapat dikenai tuntutan karena melanggar hak asasi manusia. Namun bila manusia “menggusur” hewan dan tanaman dari habitat alaminya karena akan diubah menjadi lingkungan buatan manusia, sangat jarang dipikirkan untuk menampung atau memindahkan hewan dan tanaman tersebut ke tempat yang sepantasnya. Mungkin hanya bila terdapat hewan atau tanaman langka saja, baru mereka diperlakukan dengan penuh perhatian.

Ekosistem bumi tergantung pada hubungan semua makhluk dan benda di dalamnya. Salah satu sistem yang berlangsung adalah rantai dan jaring makanan. Berkurang atau punahnya salah satu *species* dapat merusak sistem rantai dan jaring makanan ini, lebih jauh dapat merusak keseimbangan yang berlangsung di muka bumi. Contoh yang sering disebutkan adalah ketika mewabahnya ulat bulu dan munculnya kasus tomcat, atau hama lainnya, yang membuat manusia tidak nyaman, bahkan memakan korban di kalangan manusia.

Lingkungan buatan pasti dibuat di atas lahan yang tadinya adalah lingkungan alami. Sama seperti dalam dunia manusia, pertarungan kalah dan menang akan membuat sakit hati dan dendam pada pihak yang kalah, memendam keinginan untuk membalas kekealahannya suatu ketika, maka hubungan manusia dengan alam pun demikian. Lebih baik manusia mengambil langkah untuk bersikap bersahabat terhadap alam, hewan dan tanaman.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu mempertimbangkan juga kebutuhan hewan dan tanaman. Hewan dan tanaman tidak hanya diperlakukan sebagai pihak yang diperas dan dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia. Manusia tidak mungkin

hidup bila seluruh muka bumi merupakan lingkungan buatan, perlu ada bagian yang tetap alami untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi.

Lingkungan buatan dan lingkungan alami yang selama ini berada pada posisi berseberangan dan “bermusuhan”, harus diubah menjadi lingkungan yang saling melebur bersahabat.

### **3. PERAN HEWAN DAN TANAMAN BAGI MANUSIA**

Manusia sangat tergantung pada hewan sebagai sumber makanan dan pakaian. Beberapa jenis hewan dianggap sebagai teman setia manusia, seperti anjing dan kucing. Beberapa jenis lagi digunakan sebagai alat percobaan dalam penelitian pengobatan. Sebagian hewan liar lainnya menjadi sasaran perburuan, dijadikan sebagai korban untuk memenuhi “kebutuhan” manusia akan “rekreasi” dan *hobby*.

Mungkin hewan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti hewan yang hidup bebas di alam, tidak dipengaruhi oleh manusia, atau hewan peliharaan yang dianggap sebagai teman, bahkan saudara oleh manusia, atau hewan ternak yang dimaksudkan untuk sumber makanan bagi manusia, atau hewan yang dianggap “menggangu” kehidupan manusia, seperti tikus, kecoa, *tomcat*, atau lainnya.

Setiap hari manusia makan makanan yang berasal dari tanaman dan hewan. Berbagai jenis daging, seperti ayam, sapi, kambing, dan lainnya, yang berasal dari jutaan hewan dikonsumsi secara rutin. Manusia mengatur semua sistem pengembangbiakan, hidup hewan ternak diatur sepenuhnya oleh manusia, hanya untuk menghasilkan produksi yang cukup, dengan mutu daging sesuai selera manusia. Hal yang sama terjadi pada tanaman di lahan-lahan pertanian dan perkebunan.

Para ahli terus meneliti untuk menghasilkan tanaman dan hewan ternak yang dapat cepat tumbuh, tahan penyakit, dengan bentuk tertentu, serta rasa yang unik. Tanaman dan hewan ternak terus menerus dieksploitasi, dijadikan bahan percobaan untuk memenuhi “kepentingan” manusia, tanpa dapat memberikan perlawanan.

Dibanding dengan manusia, hewan yang paling kuatpun menjadi lemah. Manusia tidak takut lagi berhadapan dengan harimau, ular, singa, buaya, mungkin dinosaurus bila masih ada, dan semua lainnya. Dengan teknologi senjata yang semakin mematikan, semua hewan buas tersebut dengan mudah dapat dibinasakan. Tanpa senjata, manusia akan kalah.

Dalam dunia manusia, umumnya dianut paham keadilan dengan membela pihak yang lebih lemah. Penyakit dan ketuaan dilawan dengan terus melakukan penelitian di bidang pengobatan, sehingga usia manusia semakin panjang. Jumlah manusia semakin bertambah dengan cepat, dan konsumsi terhadap hewan dan tanaman, serta lahan juga semakin meningkat, mengusur hewan dan tanaman bebas.

Dalam dunia antarspesies, antara manusia dengan hewan dan tanaman, perlu diterapkan paham yang sama. Hewan dan tanaman adalah pihak yang jauh lebih lemah dibanding manusia, sekarang ini. Ada memang sekelompok orang, sedikit, yang membela kepentingan hewan dan tanaman, terutama yang langka dan hampir punah.

Selama ini hewan dan tanaman banyak memberi manfaat, dengan pemaksaan, dalam menunjang kehidupan manusia. Manfaat apa yang sudah diberikan oleh manusia bagi kepentingan hewan dan tanaman bebas? Saling bermanfaat adalah bentuk hubungan yang lebih sehat. Dalam dunia manusia dikenal istilah *win-win solution*. Kemenangan total manusia atas alam, hewan dan tanaman, hanya bersifat sementara, akhirnya semua pihak akan kalah.

### **4. GERAKAN HIJAU**

Gerakan hijau sudah sangat lama muncul di berbagai belahan dunia. Namun sejak banyak terjadi bencana, polusi, dan krisis secara menyeluruh di berbagai belahan muka bumi, gerakan hijau kembali mengemuka dengan lebih menonjol dan merata ke seluruh



aspek kehidupan manusia di berbagai negara. Gerakan hijau ini mengubah lingkungan buatan secara mendasar dari segi hemat energi, kesehatan, bangunan yang lebih produktif, atau meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan perkotaan dan lingkungan lokal, regional dan global (Yudelson, 2008, xv).

Gerakan hijau semakin menyadarkan banyak masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup, dan manusia harus aktif berperan serta dalam mewujudkannya. Semakin banyak orang yang menggunakan produk yang “hijau” dan ramah lingkungan. Semakin banyak juga orang yang mengubah gaya hidupnya menjadi lebih efisien dan hemat energi.

Gerakan penyadaran seperti ini perlu terus dijalankan dan ditingkatkan, serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar gaya hidup yang berubah-ubah mengikuti *trend*.

## **5. LINGKUNGAN BUATAN YANG “ALAMI”**

Manusia sudah terlanjur merasa nyaman hidup dalam lingkungan buatan, tidak mungkin membuat semua manusia mau hidup dalam lingkungan alami, bercampur dengan tanaman dan hewan liar lainnya seperti pada masa manusia belum mengembangkan banyak teknologi.

Dengan kesadaran yang semakin meningkat tentang akibat yang ditimbulkan oleh berbagai pola dan gaya hidup manusia selama ini, serta penggunaan teknologi yang salah sehingga menimbulkan banyak polusi, manusia harus mau dan berani mengubah segala sesuatu yang mengancam dan merusak lingkungan hidup, termasuk kehidupan hewan dan tanaman.

Alam yang tergusur ketika manusia mengubahnya menjadi lingkungan buatan, perlu “dimunculkan” kembali. Manusia harus mau berbagi lingkungan buatan dengan *species* hewan dan tanaman yang hidup bebas, bukan sebagai hewan ternak atau hewan peliharaan. Perancangan dan perencanaan lingkungan buatan tidak lagi hanya bagi kepentingan manusia. Tentu saja tidak semua jenis hewan dapat hidup berdampingan secara bebas dengan manusia, tapi cukup banyak jenis serangga, burung, dan hewan lainnya yang selama ini sudah terbukti dapat hidup bersisian dengan manusia. Keragamannya perlu ditingkatkan.

Dalam skala kota kita sudah mengenal adanya hutan kota. Di sana berbagai jenis hewan dan tanaman dapat hidup bebas. Dalam skala yang lebih kecil, hingga ke tingkat rumah tinggal, pola yang sama dapat diterapkan, tentu saja dengan jenis tanaman dan hewan yang disesuaikan.

## **6. PERANCANGAN BERBASIS RANTAI DAN JARING MAKANAN**

Keseimbangan di alam tergantung pada keseimbangan *ratio* berbagai *species* hewan dan tanaman. Berkurangnya *species* pemangsa dapat mengakibatkan mewabahnya *species* yang dimangsa. Kita sudah sering mengalami “gangguan” hama ulat bulu, hama wereng, *tomcat*, tikus, dan berbagai hama lainnya. Keseimbangan *ratio* berbagai *species* ini perlu dijaga agar dapat tetap berjalan. Lingkungan buatan perlu dirancang agar juga menjadi habitat hewan dan tanaman bebas yang dapat menunjang terciptanya keseimbangan rantai dan jaring makanan di alam. Kita perlu menghidupkan kembali rantai dan jaring makanan di dalam kawasan lingkungan buatan. Untuk itu, rantai dan jaring makanan perlu dijadikan sebagai dasar perancangan bangunan maupun kawasan.

Myler (2010, h46) menjelaskan bahwa semua makhluk hidup, dalam keadaan hidup ataupun mati, berpotensi menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya. Proses makan memakan ini berlangsung berjenjang, secara alami yang kuat memangsa yang lebih lemah. Proses dan saling ketergantungan ini disebut rantai makanan (*food chain*). Rantai-rantai makanan dapat saling silang dan bercabang membentuk jaringan makanan (*food web*). Manusia, walaupun secara fisik kalah kuat dibanding banyak hewan lainnya, tapi berada pada pemangsa tingkat teratas karena mengandalkan kecerdasannya.

Dalam merancang, biasanya arsitek berusaha memfungsikan setiap jengkal lahan dan pojok ruangan untuk kepentingan manusia. Untuk berbagi tempat tinggal dengan species lainnya, perlu disisakan sedikit sudut ruang luar atau bagian bangunan sebagai habitat tumbuhan dan hewan bebas, seperti serangga, burung, atau hewan lain yang memungkinkan. Cukup banyak burung, seperti walet, merpati, atau jenis lainnya yang kita tahu dapat dan bersedia hidup menempel dan bersarang di bangunan, misalnya pada overstek atau dinding bangunan. Arsitek perlu bekerja sama dengan ahli lingkungan dan hewan untuk menentukan hewan jenis apa yang memungkinkan untuk “dibuatkan” habitatnya di dalam lingkungan buatan.

Para ahli lingkungan sudah mempunyai pola rantai dan jaring makanan di alam. Seharusnya sudah ada juga data tentang tanaman dan hewan setempat, dengan segala sifat dan kebutuhannya. Berdasarkan ini dapat dibuatkan model rantai dan jaring makanan. Model ini kemudian dijadikan dasar dalam merancang, misalnya dalam menentukan jenis tanaman yang akan menjadi habitat tanaman dan hewan yang sesuai dengan potensi setempat.

Lingkup perancangan harus mencakup kawasan yang cukup luas, mungkin skala kota, yang kemudian dibagi-bagi menjadi kawasan-kawasan kehidupan berbagai tanaman dan hewan yang saling terkait membentuk rantai dan jaring makanan, terintegrasi. Penanaman pohon menggunakan model rantai dan jaring makanan ini akan cenderung membutuhkan keragaman, sehingga tercipta berbagai jenis habitat dari berbagai jenis tanaman dan hewan, yang saling terkait sebagai pemangsa dan yang dimangsa. Jenis tanaman tidak lagi dipilih seragam agar terlihat rapi seperti yang biasa kita lihat di sepanjang jalan, atau berdasar estetika semata.

Penghijauan di halaman rumah perlu dikoordinasikan dalam kawasan yang cukup luas, agar dapat saling melengkapi sebagai habitat tanaman dan hewan yang dapat saling menunjang terbentuknya rantai dan jaring makanan. Pemilik setiap rumah dan halaman perlu merelakan sebagian halaman atau bangunannya sebagai habitat tanaman dan hewan bebas. Setiap pemilik halaman perlu ikut berpartisipasi dalam menentukan jenis tanaman yang ditanam dengan tetangga, dalam lingkup rukun warga atau bahkan kelurahan. Penentuan jenis tanaman tidak lagi hanya berdasar “selera” pemilik, tapi juga mempertimbangkan kemungkinan menjadi tempat hidup hewan. Perancangan ruang terbuka hijau publik juga mengacu pada model rantai dan jaring makanan, termasuk penetapan jenis tanaman di sepanjang jalan-jalan.

Lingkungan buatan tidak lagi dirancang hanya bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya saja, tapi dengan sengaja disediakan juga tempat bagi tanaman dan hewan bebas untuk hidup berdampingan dengan manusia. Lingkungan buatan dan “alami” diusahakan dapat menyatu.

Pada saat membangun lingkungan buatan, lingkungan alami selalu menjadi korban, untuk itu sudah sepantasnya bila sebagian lingkungan buatan disisihkan bagi kepentingan tanaman dan hewan bebas. Lingkungan alami diusahakan untuk “dipulihkan” kembali. Sama seperti bila kita menggusur penduduk untuk alasan kepentingan umum, kita harus memikirkan kepentingan penduduk yang tergusur tadi.

Rancangan rumah dan kawasan dengan menggunakan rantai dan jaring makanan sebagai dasar akan bermanfaat juga bagi manusia. Kita semua akan dapat lagi melihat dan menikmati capung, kupu-kupu, burung, kepik, dan berbagai jenis hewan lainnya yang sudah sangat jarang terlihat di tengah-tengah kehidupan perkotaan.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

1. Beatley, Timothy, 2011, *Biophilic Cities. Integrating Nature into Urban Design and Planning*, Washington : Island Press.
2. Boddice, Rob, ed., 2011, *Anthropocentrism. Humans, Animals, Environments*, Leiden : Brill.

3. Broadbent, G. and C.A. Brebbia, eds., 2006, *Eco-Architecture. Harmonisation between Architecture and Nature*, Southhampton : WIT Press.
4. Duerksen, Christopher and Cara Snyder, 2005, *Nature Friendly Communities. Habitat Protection and Land Use*, Washington : Island Press.
5. Fewings, Peter, 2009, *Ethics for the Built Environment*, London : Taylor & Francis.
6. Fisher, Thomas, 2008, *Architectural Design and Ethics. Tools for Survival*, Amsterdam : Elsevier.
7. Gardiner, Stephen M., Simon Caney, Dale Jamieson, and Henry Shue, eds., 2010, *Climate Ethics. Essential Readings*, Oxford : Oxford University Press.
8. Gibson, William E., ed., 2004, *Eco-Justice. The Unfinished Journey*, New York : State University of New York Press.
9. Haugestad, Anne K. and J.D. Wulfhorst, eds., 2004, *Future as Fairness. Ecological Justice and Global Citizenship*, Amsterdam : Rodopi.
10. Hile, Kevin, 2004, *Animal Rights*, Philadelphia : Chelsea House Publishers.
11. Konijnendijk, Cecil C., Kjell Nilsson, Thomas B. Randrup and Jasper Scipperijn, eds., 2005, *Urban Forests and Trees*, Berlin : Springer.
12. Konijnendijk, Cecil C., 2008, *The Forest and the City*, Denmark : Springer.
13. Liddick, Donald R., 2006, *Radical Environmental and Animal Liberation Movements*, London : Praeger.
14. Miller, G. Tyler and Scott Spoolman, 2010, *Environmental Science. Problems, Concepts, and Solutions, 13th ed.*, Canada : Thomson Brooks/Cole.
15. Muller, Norbert, Peter Werner and John G. Kelcey, eds., 2010, *Urban Biodiversity and Design*, Chichester : Blackwell Publishing Ltd.
16. Naeem, Shahid, Daniel E. Bunker, Andy Hector, Michel Loreau, and Charles Perrings, eds., 2009, *Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing*, Oxford : Oxford University Press.
17. O'Brien Karen, Asuncion Lera St.Clair, and Berit Kristoffersen, eds., 2010, *Climate Change, Ethics and Human Security*, Cambridge : Cambridge University Press.
18. O'Brien, Kevin J., 2010, *An Ethics of Biodiversity. Christianity, Ecology, and the Variety of Life*, Washington, D.C. : Georgetown University Press.
19. Olson, Eric G., 2010, *Better Green Business. Handbook for Environmentally Responsible and Profitable Business Practices*, New Jersey : Wharton School Publishing.
20. Palmer, Clare, ed., 2006, *Teaching Environmental Ethics*, Leiden : Brill.
21. Posner, Eric A. and David Weisbach, 2010, *Climate Change Justice*, Princeton : Princeton University Press.
22. Postma, Dirk Willem, 2006, *Why Care for Nature ?* Dordrecht : Springer.
23. Rosenzweig, Michael L., 2003, *Win-Win Ecology : How the Earth's Species Can Survive in the Midst of Human Enterprise*, Oxford : Oxford University Press.
24. Schlosberg, David, 2007, *Defining Environmental Justice. Theories, Movements, and Nature*, Oxford : Oxford University Press.
25. Tremmel, Joerg Chet, 2009, *A Theory of Intergenerational Justice*, London : Earthscan.
26. Vayda, Andrew P., 2009, *Explaining Human Actions and Environmental Changes*, Lanham : Altamira Press.
27. White, Rob, 2008, *Crimes Against Nature. Environmental Criminology and Ecological Justice*, Portland : Willan Publishing.
28. Yudelson, Jerry, 2008, *The Green Building Revolution*, Washington Island Press.

## PERAN WANITA DALAM KONSERVASI KAWASAN HIJAU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MRS Darmanijati<sup>1)</sup>, Laak Paskalis<sup>2)</sup>, Retno Sustyaningsih<sup>3)</sup>  
Dosen Sekolah Teknik Lingkungan Yogyakarta

### ABSTRACT

*Gunungkidul is one of regencies in Daerah Istimewa Yogyakarta, which is 80% of the land is a critical area with limestone mountains that will depend of the season, therefore, very low water absorption capacity. Thus the function of green areas, especially forests are needed in this area. In the DIY this district have the largest forest area of 11.072 ha. Income from agriculture is very low, and young men work outside the area to supplement their income. Women are the backbone of the activities at home on the farm. Respondents made 300 women farmers in Kecamatan Playen, Paliyan and Karangmojo. In conducting the activities of women farmers in cooperation with the government in the areas of land, plant spacing, seeding, fertilizing, maintenance and harvesting of timber does not disturb the forest conservation and the environment. Land area managed by the average area 200-500 m<sup>2</sup> (47,5%) and 500-1000 m<sup>2</sup> (42,7%). Forest products are utilized by the public is eucalyptus leaves are sold at a nominal < Rp 150.000 (8,3%), Rp150.000-Rp250.000 (71,7%) and >Rp 250.000 (20%). Origin of seedlings 50% and 50% self-government. Live trees were planted <25 trees (0,3%), 25-50 trees (6%), 51-75 trees (65,6%), >75 trees (28%). More than 80% of people know about the importance of forests as providers of water supply, barriers to erosion, absorbing air pollutants and flood retention.*

**Key words:** *women, green conservation, forests*

### 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul adalah bagian dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara geografis terletak antara 110°21' - 110°50' Bujur Timur serta 70°46'-80°09'Lintang Selatan dengan ibukota Wonosari yang terletak 39 km arah tenggara kota Yogyakarta. Tingkat kesuburan lahan di kabupaten ini sangat rendah, lapisan tanah sangat tipis yang seakan menyelimuti lapisan karbatuan yang terhmpar di seluruh wilayah kabupaten oleh sebab itu kemampuan resapan air sangat rendah. Air hujan kebanyakan langsung hanyut di permukaan tanah dengan melarutkan permukaan dan tanah yang subur sehingga tanah menjadi semakin kurus, sedang resapan air sangatlah sedikit. Topografi wilayah berpegunungan sehingga banyak lereng-lereng terjal, lereng yang terjal sangatlah mempercepat erosi tanah, sementara tanaman tegakan sudah banyak berkurang (Mursito,2003).

Hutan adalah tanah luas yang ditanami pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang tetapi ada juga yang ditanami pohon-pohonan),(Purwodarminto,1986). Hutan dalam suatu ekosistem hidrologi sungai menjaga kestabilan tata air sehingga dalam musim penghujan hutan berfungsi untuk meresapkan air ke dalam tanah melalui proses infiltrasi sedangkan pada musim kemarau merupakan cadangan air yang sangat baik, sehingga dapat dikatakan sebagai pengatur tata air yang baik. Hutan dikenal beberapa fungsi (Simon,1993) yaitu fungsi ekonomi, fungsi perlindungan air dan fungsi keindahan. Fungsi-fungsi hutan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sumber daya hutan dengan kepentingan masyarakat akan sumber tersebut (Maaren,1985 :8 dalam Simon,1993:83).

Dalam kehidupan masyarakat tradisional titik berat pengelolaan hutan adalah untuk memperoleh keuntungan fungsi ekonomi hutan, hutan untuk kepentingan rakyat, tetapi dengan perubahan pentingnya tiga fungsi tersebut pemanfaatan hutan dalam pembangunan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

wilayah telah mengalami pergeseran yaitu lebih menuju pada usaha untuk memelihara hutan bagi perlindungan lingkungan hidup, mengendalikan erosi, menjaga kesuburan tanah dan tata air serta menghindari polusi udara.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki hutan seluas 43.694,95 ha, yang terdiri dari hutan Negara seluas 18.044,95 ha dan hutan rakyat seluas 25.650 ha. Luas hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11.072 ha, di Kabupaten Sleman seluas 3.030 ha, di Kabupaten Bantul seluas 5.667 ha, dan Kabupaten Kulonprogo seluas 5.881 ha.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang 80% tanahnya merupakan lahan kritis dengan pegunungan kapur yang sangat bergantung akan musim, sehingga sangat rawan terhadap bahaya kekeringan. Untuk mempertahankan penghijauan pemerintah selalu berusaha mempertahankan atau menanam kembali tanaman melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui penghijauan maupun teknik konservasi lainnya. Untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai upaya konservasi tanah dan air, pemerintah melakukan penanaman bibit kayu putih. Kegiatan dilakukan di lahan Negara dan lahan milik rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, Bab I pasal 1 ayat 59, Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan dimana hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Sedang ayat 84 menyebutkan, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penanaman pohon yang dilakukan oleh masyarakat di hutan rakyat merupakan salah satu peran masyarakat yang sengaja melakukan penanaman.

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul seluas 11.072 ha. Sebagian besar berada di Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Karangmojo. Luas hutan rakyat di Kecamatan Paliyan kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) hektar; Kecamatan Playen kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar dan di Kecamatan Karangmojo kurang lebih 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar;

Sudah sejak lama penduduk yang ada di ketiga kecamatan tersebut berperan serta dalam reboisasi hutan yaitu lewat penanaman tanaman baru dan usaha tumpangsari palawija didalam kawasan hutan rakyat tersebut. Penghasilan sebagai petani sangat sedikit yaitu Rp 150.000,- sampai dengan Rp 250.000 per 3 bulan (1 kali panen), banyak penduduk yang berusia muda dan para bapak bekerja sambilan ke luar daerah yaitu di kota Yogyakarta, Jakarta, Surabaya dan lain lain. Pekerjaan mereka beragam dari pembantu rumah tangga, sopir, kacung, tukang bakso sampai pegawai. Di saat lebaran mereka baru pulang daerah dan meninggalkan sebagian hasil kerjanya untuk orang di rumah kemudian pergi lagi bekerja dan bila mungkin membawa teman atau saudara bekerja bersama. Perlu diketahui pendapatan perkapita di kabupaten ini 80% pendapatan berasal dari sector informal, seperti kursus pembantu rumah tangga, baby siter dan lain lain. Itulah sebabnya penduduk yang berusia muda di kabupeten ini semakin lama semakin sedikit. Dari data jumlah penduduk di wilayah kawasan hutan di tiga kecamatan tersebut terdapat 72.671 laki laki dan 75.124 perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Sebagai istri petani, wanita dituntut membantu suami bertani dan merawat anak-anak selama ditinggal bekerja. Di tiap RT dibentuk kelompok tani, bila suami tidak ada, pertemuan dihadiri oleh istrinya karena dia juga bertani membantu suaminya. Pada penelitian ini ingin diketahui bagaimana peran wanita dalam membantu ekonomi keluarga dari hasil bertani dan usaha membantu pemerintah untuk menghijaukan daerahnya, mengkonservasi air dan tanah dan menjaga tumbuh kembang bibit yang disediakan pemerintah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul di wilayah Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Karangmojo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner pada 300 responden petani wanita. Variabel yang diteliti adalah jenis tanaman yang ditanam, luas lahan yang ditanami, kemampuan menanam setiap hari, kemampuan memelihara dan tingkat kesadaran membantu program pemerintah dan besar pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Data dikumpulkan dan dianalisis secara diskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konservasi kawasan hijau dengan cara penanaman kembali, penghijauan maupun teknik konservasi lainnya diarahkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan fungsi sosial hutan serta mutu lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan peran aktif sumberdaya manusianya. Menurut UU Nomor 41 tahun 1999, hutan dibagi atas (2) status yaitu 1) hutan Negara, dan 2) hutan hak. Hutan Negara diartikan sebagai hutan hak sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Suriani, 2006). Hutan hak inilah yang disebut hutan rakyat. Untuk mensukseskan keberhasilan konservasi kawasan ini diperlukan partisipasi masyarakat sekitar hutan baik pria maupun wanita.

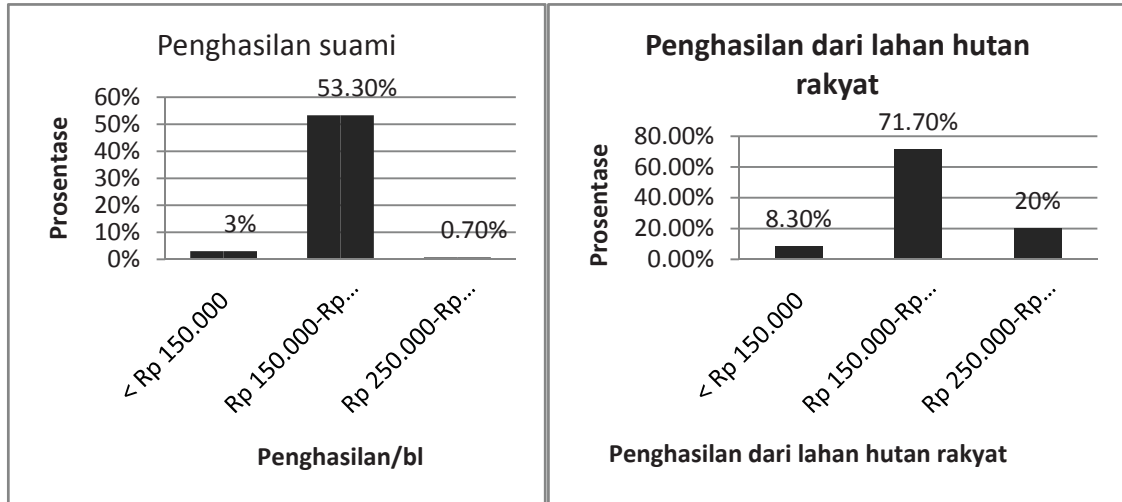
### **a. Data Pribadi Responden**

Wanita yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 300 orang dengan rincian 46 %, berumur 36-40 tahun, dan 54% diatas 40 tahun, sedang umur 15-29 tahun dan 31-35 tahun tidak ada (0%). Pendidikan mereka sebagian besar adalah SD (51%) dan SMP (47%) dan sebagian kecil (2%) adalah SMA. Pekerjaan mereka 96,3 % petani dan ibu rumah tangga 3,7%. Pekerjaan suami rata-rata petani 59,4%, wiraswasta 40% , PNS 0,3% dan karyawan swasta 0,3%. Jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang (83,7%), 2 orang ( 10%) , lebih dari 3 orang (3,7%) dan 1 orang (2,7%).

Luas lahan yang dikelola rata rata seluas 200-500 m<sup>2</sup> (47,5%) dan 500-1000 m<sup>2</sup> (42,7%). Jarak lahan dari rumah mereka kurang dari 1 km (93,3%) dengan 94,7% sebagian besar adalah dataran, 3,7 % berupa lereng dan 1,7 % perbukitan. Asal bibit 50 % swadaya dan 50 % pemerintah. Waktu melakukan kegiatan di pagi hari 21,4 %, siang hari 2,1 % dan sore hari 76,5 %. Keluarga yang terlibat 2 % menjawab 1 orang, 91 % menjawab 2 orang, 6 % menjawab 3 orang, 1 % menjawab lebih dari 3 orang. Kegiatan yang dilakukan di lokasi 85,3 % menjawab pemeliharaan dan penanaman dan 14,7 % menjawab semua dikerjakan. Jenis konservasi tanah yang dilakukan jika bertanam di lereng : 94,7 % membuat galengan dan 4,3 % membuat talut dan 1 % menjawab dibiarkan saja.

Penghasilan suami per bulan dibandingkan dengan penghasilan dari hasil hutan rakyat dapat digambarkan sebagai berikut :

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



**Gambar 1.** Hitogram penghasilan per bulan dari suami dan dari hasil hutan rakyat

Dari gambar 1, kedua histogram menunjukkan bahwa hasil dari hutan rakyat dapat menambah penghasilan masyarakat lebih dari 53,3 % responden. Hasil tersebut berasal dari hasil penjualan daun kayu putih. Dengan demikian hasil hutan rakyat betul betul sangat membantu perekonomian masyarakat.

**b. Peran serta dalam penghijauan**

Kemakmuran dan keberlanjutan keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan social, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Perbaikan terus menerus dalam bentuk rehabilitasi hutan memerlukan peran serta masyarakat sekitar hutan untuk mensukseskan program ini. Peran responden yang diteliti terhadap jumlah bibit dan pohon yang ditanam terdapat pada tabel berikut :

**Table 1:** Jumlah pohon yang ditanam, yang hidup dan yang mati di lahan pemerintah

No.	Uraian	< 25 pohon	25-50 pohon	51-75 Pohon	>75 pohon	Jumlah responden
1.	Jumlah bibit yang diusahakan sendiri/swadaya dalam setahun	134 (44,6%)	135 (45%)	20 (6,6%)	11 (3,6%)	300
2.	Jumlah bibit yang diberikan pemerintah dalam setahun	10 (3,3%)	118 (39,3%)	49 (16,3%)	123 (41%)	300
3.	Jumlah pohon yang ditanam di lokasi lahan pemerintah	7 (2,3%)	32 (10,6%)	88 (29,3%)	173 (57,6%)	300
4.	Pohon yang ditanam hidup	1 (0,3%)	18 (6%)	197 (65,6%)	84 (28%)	300
5.	Pohon yang ditanam mati	82 (27,3%)	201 (67%)	16 (5,3%)	1 (0,3%)	300

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Jenis bibit yang ditanam adalah kayu putih. Saran dari Dinas Kehutanan penanaman bibit tersebut berjarak 5m , hasil kuisioner masyarakat menanam 55,7 % dengan jarak 5 m antar pohon dan sebanyak 44,3 % berjarak 6 m. Sedang yang diperbolehkan diambil adalah renekan kayu, hasil tumpangsari dan hasil penjualan daun kayu putih.

Adanya kemauan masyarakat mengadakan bibit sendiri, menunjukkan peran aktif yang besar terhadap keberadaan hutan walaupun bibit dari pemerintah tetap diberikan tetapi secara kelompok melalui kelompok tani mereka melakukan pengadaan bibit dan pembagian bibit. Adanya pengawasan bibit yang baru saja ditanam dan mengganti bibit yang mati dengan bibit yang baru merupakan tindakan yang sangat arif dan perlu dilakukan terus menerus. Kesadaran akan pentingnya fungsi hutan yang dapat membantu mereka secara ekonomi membuat mereka tetap bertahan melakukan kegiatan tersebut. Pemanfaatan tanaman hutan yang mereka lakukan adalah mengambil kayu (100%) dan menanam tanaman tumpangsari disekitar pohon.

Di dalam menjalankan kegiatan ini, para wanita bekerjasama dengan pemerintah , baik dibidang luas lahan, jarak tanam, pembibitan dan pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan kayu agar tidak mengganggu pelestarian hutan dan lingkungan. Sedang hambatan yang mereka alami adalah keterbatasan tenaga (72%) dan keterbatasan alat (28%).

Dalam melakukan programnya pemerintah tidak bias melaksanakan programnya dengan baik jika tidak ada peran serta dari masyarakat. Jiwa berbagi dan menumbuhkembangkan bersama antara pemerintah ( Dinas PU,Perhutani) dan masyarakat dan *stakeholders* lainnya merupakan salah satu esensi yang ingin dibangun.

Pada system pengelolaan hutan bersama masyarakat,masyarakat menjadi mitra sejajar dalam membangun,melindungi dan memanfaatkan sumber daya hutan. Dengan demikian budaya “memiliki” dan “bertanggung jawab” terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya hutan oleh masyarakat dapat terbangun dan pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri ( Marsanto,2003).

**c. Pengetahuan tentang fungsi hutan sebagai kawasan hijau dan konservasi lingkungan**

Pengetahuan responden terhadap fungsi hutan dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2:** Pengetahuan responden terhadap fungsi hutan

No:	Uraian	Ya	Tidak
1.	Mengetahui bahwa hutan mampu berfungsi menyediakan cadangan air	86%	14 %
2.	Mengetahui bahwa hutan mampu berfungsi menahan erosi	85,6%	14,3 %
3.	Mengetahui bahwa hutan mampu berfungsi penyerap pencemar udara	83,3%	16,6 %
4.	Mengetahui bahwa hutan mampu berfungsi penahan banjir	99%	1 %

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden cukup faham terhadap fungsi hutan. Hal ini didukung oleh data jenis konservasi tanah yang dilakukan dengan membuat galengan atau talut. Pemahaman yang mereka pahami cukup sederhana misalnya udaranya menjadi segar,



tidak ada “galengan” nanti longsor merupakan pengetahuan yang harus dimiliki dan dilanjutkan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Wanita ikut serta berperan dalam konservasi kawasan hijau di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Kecamatan Playen, Paliyan dan Karangmojo.
2. Rehabilitasi hutan dilakukan oleh wanita untuk membantu suami.
3. Dalam menjalankan kegiatan ini para wanita bekerjasama dengan pemerintah baik di bidang luas lahan, jarak tanam, pembibitan, pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan kayu tidak mengganggu pelestarian hutan dan lingkungan.

Saran :

1. Tingkatkan manajemen pengelolaan kolaborasi antara pemerintah dan petani hutan, sehingga tercipta hutan bagi kesejahteraan petani kecil.
2. Tingkatkan pengetahuan petani, khususnya wanita tentang hutan sebagai tempat penyimpanan air, penahan erosi, penyerapan pencemar udara, penahan banjir dan terlebih lagi sebagai system penyangga kehidupan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

1. Anonim, 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030
2. Marsanto, 2003, Peran serta Perum Perhutani dalam menanggulangi bencana kekeringan di pulau Jawa, dalam buku Kekeringan Dampak dan Penanggulangannya, BIGRAF bekerjasama dengan STTL, Yogyakarta.
3. Mursito, Adi, 2003, Keadaan Dampak dan Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, dalam buku Kekeringan Dampak dan Penanggulangannya, BIGRAF bekerjasama dengan STTL, Yogyakarta.
4. Simon, Hasan, 1993, Hutan Jati Kemamkmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya, Aditya Media, Yogyakarta

## KARAKTER LOKAL LANSEKAP PERKOTAAN DI KOTA MALANG

**Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT**

Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya-Malang  
E-mail : lisaromansya@yahoo.co.uk

### ABSTRACT

*Sustainability of human life and nature is an ideal destination development, which must always be sought. Digging the local character of the urban landscape conditions conducted in this study represents an initial effort to realize the hope of sustainability and continuity of human life and the natural environment in the Malang City. Chronology of the formation of Malang city is thick with the colonial culture, and unique natural environment of the mountains are split in two by the Brantas river, the rationale to explore the urban landscape character (which is eclectic between colonial culture with a strong indigenous livelihood traditions of Javanese). So the focus of studies in the former Dutch government community housing (at the Colonial).*

*With Anatomy of Urban Landscape methods approach, carried out direct observation in the field for the physical identification of the natural environment in terms of 13 components of the landscape characteristics as variables (Page, Gilbert & Dolan, 1998). While to explore the social and cultural character of the city of Malang, who was instrumental in forming the landscape character of his city, pyramidal depth interview conducted with the involvement of elders, elders of the town (who are members of the Society of Pasinaon Kaweruh Jiwo) as its keyperson, some political sampling selected by purposive sampling technique.*

*At the end of the study found differences in form and function of a urban public open space in the Malang landscape fabric, which is based on differences in the influence of 'authority and ownership' of public open space by the Government. Local characteristics of the landscape in this colonial town was the inspiration for further study and research, as well as could be guidelines for urban landscape structuring in the sustainability city with the concept of designing with nature.*

**Keywords:** *urban landscape, the colonial culture, the local character*

### 1. PENDAHULUAN

Keberagaman kondisi lingkungan alam, lingkungan binaan, tradisi dan kehidupan sosial budaya masyarakat pada berbagai wilayah di Indonesia, mencerminkan ke-Bhinekaan Nusantara. Keberagaman yang berkelanjutan dan berkesinambungan diawali dari suatu kekhasan dan keunikan yang menciptakan suatu karakter wilayah dan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, setiap kota memiliki karakter yang berbeda. Karakter perkotaan ini tercipta dari kekhasan kondisi lingkungan alam dan lingkungan binaannya, sebagai wadah kehidupan social budaya masyarakat kotanya. Penataan lansekap, menjadi salah satu unsur yang berperan penting dalam menciptakan karakter sebuah kota. Karakter lokal lansekap perkotaan mencerminkan tatanan beragam unsur dan elemen lansekapnya.

Kota Malang memiliki keunikan yang kompleks atas kondisi alamnya. Keberadaannya yang dikelilingi oleh pegunungan, menjadikannya diidentikan sebagai Paris van Java yang menjadi tujuan utama wisatawan di Jawa Timur. Pusat kotanya yang dibelah menjadi dua oleh aliran sungai Brantas, menjadikannya memiliki dua pusat pemerintahan (pemerintahan kota dan kabupaten) dan dua buah alun-alun (tradisional dan bentukan pemerintah Kolonial) sebagai landmark kotanya.

Historis kota Malang yang pernah dikuasai Pemerintah Kolonial, menjadikan struktur kota dan tatanan elemen perancangan kotanya kental dengan budaya Pemerintah Hindia Belanda.

Kekuasaan dan kewenangan Pemerintah terimplementasikan dalam bentukan dan penataan bangunan dan ruang terbukanya, yang mencerminkan radius power para penguasa kotanya.

Dengan kolaborasi antara keunikan struktur alam dan kekhasan bentukan Kolonial di kota Malang, maka sangat menarik untuk digali karakter local lansekap kotanya, guna keberlanjutan dan kesinambungan penataan lansekapnya di masa mendatang.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Karakteristik lansekap pada sebuah kawasan terdiri dari aspek yang kasat mata (*tangible*) dan tidak kasat mata (*intangible*). Aspek-aspek ini akan memberi karakter historis pada lansekap dan memberi pemahaman akan pentingnya nilai kebudayaan. Karakter lansekap sangat beragam mulai dari pola beskala besar hingga detail dan material pada sebuah kawasan (Page, Gilbert & Dolan, 1998) yaitu:

1. Sistem dan ciri alam (*Natural system and features*)  
Ciri alam yang mempengaruhi perkembangan lansekap dan bentukan yang dihasilkan alam pada kawasan (*geomorfologi, geologi, hidrologi, ekologi, iklim, vegetasi*)
2. Organisasi keruangan (*Spatial organization*)  
Pengaturan elemen pencipta bidang dasar, bidang vertical dan bidang atap yang membentuk system keruangan dalam skala tapak maupun kawasan.
3. Penggunaan Lahan (*Land use*)  
Organisasi, bentukan lansekap terkait dengan penggunaan lahan.
4. Tradisi budaya (*Cultural Tradition*)  
Kegiatan yang mempengaruhi penggunaan dan pola pembagian lahan, bentuk bangunan dan penggunaan material.
5. Penataan cluster (*Cluster arrangement*)  
Lokasi bangunan dan struktur lain dalam bangunan.
6. Sirkulasi (*Circulation*)  
Ruang-ruang, fitur-fitur, dan material-material yang membentuk system pergerakan.
7. Topografi (*Topography*)  
Konfigurasi tiga dimensi permukaan lansekap yang dicirikan oleh struktur yang terbentuk dan orientasinya.
8. Vegetasi (*Vegetation*)  
Tanaman-tanaman asli atau baru berupa pohon, semak, tanaman rambat, rumput dan tanaman herbal.
9. Bangunan dan struktur (*Buildings and structures*)  
Konstruksi tiga dimensi seperti bangunan umum, jalan, rumah, jembatan.
10. View dan vista (*View and vista*)  
Fitur-fitur alami atau buatan yang dapat menciptakan kontrol pandangan.
11. Fitur-fitur air buatan (*Construction water features*)  
Fitur buatan dan elemen-elemen air untuk tujuan fungsional dan estetika.
12. Fitur berskala kecil (*Small scale features*)  
Kombinasi fungsi dan estetik dengan elemen-elemen detail yang memberikan keanekaragaman.
13. Kawasan arkeologis (*Archeological sites*)  
Kawasan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau bernilai historis.  
Penciptaan karakter dari lansekap juga bisa diambil dari perbandingan dengan lansekap pada kawasan lain sehingga dapat diketahui ciri khas dan keunikannya.

## **3. METODE PENELITIAN**

Melalui observasi langsung di lapangan, yang divalidasi oleh data-data dokumenter atas kajian historis yang dilakukan pada kota Malang ini, serta wawancara tidak terstruktur pada *keyperson* (para sesepuh kota Malang yang tergabung dalam Paguyuban Pasinaon Kaweruh

*Jiwo*), *political sampling* serta *accidental sampling* dalam *purposive sampling* yang telah dilakukan, didapatkan data-data tentang kronologis pembentukan ruang terbuka yang ada di Malang serta perubahannya. *Political mapping* yang dilakukan menghasilkan validasi atas makna yang tercipta atas keberadaan ruang terbuka utama bagi masyarakat dan penguasanya. Berdasarkan hal tersebut dilakukan Analisa Anatomi Ruang Terbuka. Dan pada akhir proses analisa, dihasilkan pemahaman tentang karakter local lansekap kota Malang, melalui identifikasi fisik, optimalisasi fungsi dan perubahan makna yang terjadi pada bentukan ruang-ruang terbuka di Malang. Khususnya yang terkait dengan peran dan besarnya power pemerintah atas keberlanjutan tatanan lansekapnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Kronologis Pembentukan Ruang Terbuka Kota Malang**

Pembentukan ruang terbuka di kota Malang terkait erat dengan pola bentukan jaringan jalan baru di masa Kolonial. Jalan adalah ruang penghubung antar kawasan/wilayah/area sebagai sirkulasi umum yang bisa dipergunakan untuk aktivitas publik atas dasar kepemilikan bersama (Krier, 1979:20-21 dalam Wulandari, 2006). Di kota Malang pembangunan jaringan jalan baru ini untuk menghubungkan antar permukiman yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan kajian historis kota Malang, kronologis pembentukan jaringan jalan tersebut meliputi :

- a. Jaringan jalan yang terbentuk tahun 1767-1880an :  
Jl. Klodjen Lor; Jl. Cilaket; Oro-oro Dowo; Kayutangan; Temenggungan; Sekitar Alun-alun hingga Sawahan
- b. Jaringan jalan yang dibentuk tahun 1917-1918 (Bouwplan 1) di area Oranjebuurt:  
Wilhemina Straat (Jl. Dr. Cipto); Juliana Straat (Jl. RA Kartini); Emma Straat (Jl. Dr. Soetomo); Maurist Straat (Jl. Diponegoro); Sophia Straat (Jl. Cokroaminoto)
- c. Jaringan jalan yang terbentuk tahun 1918-1922 (Bouwplan 2) di area Gouverneur-Generaalbuurt: Deandles Boulevard (Jl. Kertanegara); Van imhoffStraat (Jl. Gajahmada); Speelman Straat (Jl. Mojopahit); Maetsuucker Straat (Jl. Tumapel); Riebeck Straat (Jl. Kahuripan); Van Outhoom Straat (Jl. Brawijaya); Idenburg Straat (Jl. Soeropati); Van den Bosch Straat (Jl. Sultan agung); Van heutz Straat (Jl. Pajajaran); Van der Cappelen Straat (Jl. Sriwijaya)
- d. Jaringan jalan yang dibuat pada tahun 1929-1935 adalah jalur lingkaran (ringweg): Titik silang Timur-Barat yaitu Jl. Kayutangan (1920) dan Jl. Semeru ; Perhubungan interlokal dari pusat kota ke Surabaya; Perhubungan interlokal dari pusat kota Batu; Dari pasar besar ke arah Timur-Barat; Rute Malang selatan menuju Surabaya
- e. Jaringan jalan yang dibuat atau diperbaiki oleh Ir. Karsten atas jaringan jalan lama yang telah ada, antara lain : Jalan di sekitar alun-alun Kotak; Jalan di sekitar Alun-alun Bunder; Jalan sambungan Timur-Barat ; Deandles Boulevard (Jl. Kertanegara) ; Jalan di depan Stasiun Baru (Jl. Trunojoyo); Jembatan viaduck Klojenlor ; Jalan kereta api di bawah jalan raya ; Viaduct yang terencana ; Jalan Kayutangan dan Cilaket ; di sekitar tangsi militer
- f. Perkembangan pembentukan jalan pada periode selanjutnya meliputi:  
Perkembangan kota ke arah Barat (1920-1930) dibuat jalan di sekitar daerah Talun; Perkembangan ke arah Utara (1930-1934) dibuat jalan di sekitar Lowokwaru; Perkembangan ke arah Selatan (1932-1934) dibuat dua jalur jalan utara menuju arah luar kota; Tahun 1940 banyak dibuat jalan lokal lingkungan pada perbaikan utilitas dan permukiman Belanda kelas atas; Pembuatan jalan pada tahun 1954-1964 antar lain : di perumahan Purwantoro, Bengawan Solo, di Kompleks Klampok Kasri, Karang Jepun, Bebekan, Betek-Penanggungan, Sukun, Jalan Jakarta, Ketawanggede, Purwodadi, Blimbing, Djanti, Jalan Rajekwesi dan Wilis.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

g. Jaringan jalan yang dibentuk setelah tahun 1964 antara lain: Jl. Pegadaian hingga Kudus; Jalan depan Gereja Kayutangan hingga Jalan Mojopahit; Pertigaan Talun hingga Kayutangan; Sukun hingga daerah Tanjung; Kasin Kidul hingga Kasin Kulon; Terusan Kidul Pasar hingga Kutobedah (Kebalen Wetan); Terusan Bengawan Solo hingga Blimbing; Terusan jalan Kaliurang hingga Oro-oro Dowo; Terusan Jalan Ijen hingga Tanjung; Terusan jalan Urip Sumoharjo hingga Ngadipuro;

Sedangkan terbentuknya ruang terbuka di Malang bisa dikategorikan menurut periode sebelum kemerdekaan (pada masa kolonial) dan sesudah kemerdekaan. Taman-taman bentukan Belanda di kota Malang (Wulandari, 2006) meliputi:

- Penataan Alun-alun Kotak sebagai pusat dari pemerintahan kota lama tahun 1880-an.
- Sophia Park, merupakan ruang terbuka yang dihasilkan dari pembentukan jaringan jalan di area Oranjebuurt (Bouwplan 1).
- JP Coen Plein, Alun-alun Bunder yang menjadi orientasi pusat pemerintahan baru pada kawasan Gouverneur-Generaalburt (Bouwplan 2).
- Cilaket Park, ruang terbuka yang dibentuk pada pengembangan kampong ke utara kota (Bouwplan 4).
- Ardjuna Park, ruang terbuka yang dibentuk pada pembangunan jalan dan permukiman perkembangan timur-barat kota Malang (Bouwplan 5).

Pembentukan taman di kota Malang setelah masa Kemerdekaan meliputi:

Taman Bahagia pada tahun 1946, Taman Indrakila tahun 1952, sebagian taman Indrakila dirombak menjadi Museum Brawijaya, Dibuat taman rotonde dan air mancur di depan gereja Kayutangan pada tahun 1961, Tahun 1963 taman di kota Malang seluruhnya pada tahun 1978, antara lain: SPMA Tanjung dijadikan Central Park, Senaputra sebagai taman kota, Malabar sebagai kebun kota, Bukit Buring sebagai hutan kota, lingkungan perumahan dan sekolah dilengkapi dengan tempat bermain anak-anak. Taman Indrakila dijadikan taman Wisata Wijayakusuma.

Renovasi pada Alun-Alun kotak tahun 1982-1983 yaitu perubahan perkerasan, sitting group dan pohon beringin diganti dengan air mancur. Pada tahun 1992 dibuat taman Kalimewek dan pemagaran pada Alun-alun Kotak. Pada tahun 2002 ada pemagaran di Alun-alun Tugu.

## **4.2 Karakter Ruang Terbuka Kota Malang**

### **4.2.1 Sistem dan Ciri Alam**

Sumbu timur barat merupakan rangkaian dari konsep Garden City pada Kota Malang yang dirancang oleh Thomas Karsten. Pada sumbu timur barat ini, menjadikan Gunung Kawi sebagai *point of interest*. Stasiun di sebelah timur sebagai titik awal kedatangan menuju ke Alun-alun Bunder kemudian ke arah perempatan Kayutangan dengan bangunan kembar sebagai *gerbang* menuju ke arah barat. *Gerbang* ini menjadi pendukung untuk mengarahkan visualisasi ke arah Gunung Kawi.



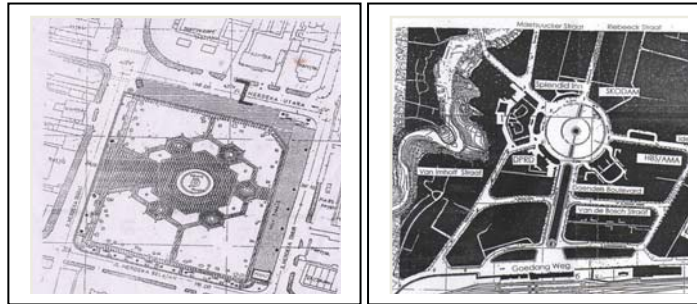
**Gambar 1.** Gunung Kawi sebagai sistem dan ciri alam dari sumbu timur-barat Kota Malang

Alun-alun Kota Malang sebagai taman kota sekaligus landmark kota yang selalu difungsikan secara intens oleh masyarakat, keberadaannya dipisahkan oleh aliran sungai

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Brantas yang membelah kota Malang jadi dua. Alun-alun Merdeka (tradisional) pada pusat pemerintahan kabupaten (sisi barat sungai) dan Alun-alun Tugu (bentukan kolonial) pada pusat pemerintahan kota baru (sisi timur sungai).

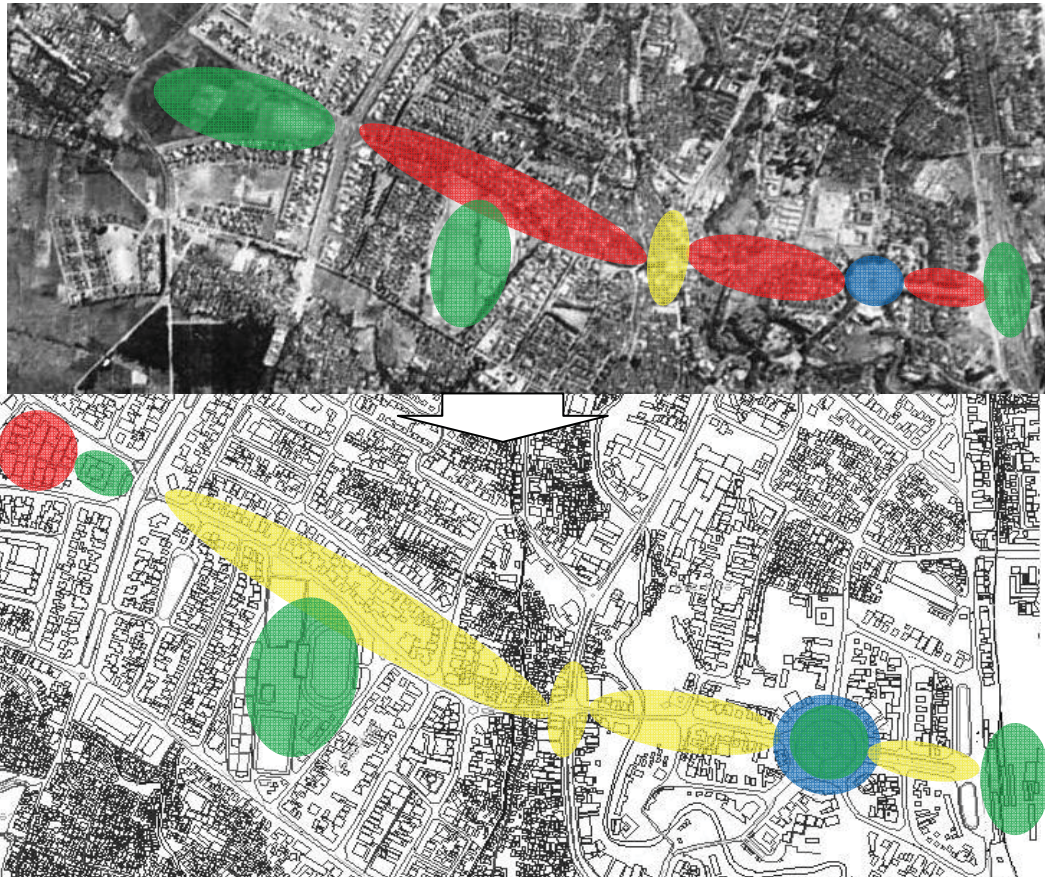


**Gambar 2.** Alun-alun Merdeka dan Alun-alun Tugu Kota Malang

Sumber : Wulandari, 2007

**4.2.2 Penggunaan lahan (land use) dan organisasi keruangan**

Penggunaan lahan di sepanjang sumbu timur-barat telah mengalami banyak perubahan. Semula kawasan timur dan barat yang termasuk dalam Bouwplan 2 dan 5 adalah untuk perluasan kawasan pemerintahan (Gouverneur-generaalbuurt) dan kawasan permukiman, sekarang koridor jalan Kahuripan-Semeru telah didominasi oleh kawasan perdagangan. Taman Beatrix yang dulunya sebagai ruang terbuka sekaligus merupakan akhir tujuan dari sumbu timur-barat sekarang telah berubah menjadi perumahan elite.







**Gambar 3.** Peta perubahan penggunaan lahan (land use) pada sumbu timur-barat

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

**Keterangan:**

	Rumah tinggal (privat)
	Area perdagangan (semi publik)
	Area pemerintahan dan sekolah (semi publik)
	Fasilitas umum (publik)

Alun-alun Bunder yang pada jaman Kolonial merupakan area yang disegani oleh penduduk pribumi (karena merupakan wilayah Pemerintah Belanda), sekarang sudah menjadi fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, untuk fungsi taman rekreasi murah, wadah berolahraga terbatas dan tempat menikmati keindahan visual kota. Pergeseran makna juga terjadi pada Alun-alun Merdeka sebagai taman kota Malang.

#### **4.2.3 Sirkulasi dan Vegetasi**

Sirkulasi utama kota Malang yang memberi karakter dengan ciri khusus dan kekhasannya, adalah sirkulasi yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan wilayah bekas permukiman Pemerintah Belanda. Keberadaan sirkulasi ini biasanya ditandai dengan atribut berupa vegetasi khusus sebagai tanaman tepian jalan, tanaman boulevard dan lainnya. Meliputi :

- Koridor jalan Ijen, yang khas dengan tatanan pohon palem raja sebagai greenbeltnya, khas dengan jalur pejalan kakinya, dan tatanan vegetasi di boulevard yang menambah keindahan kota secara visual.
- Sirkulasi di sekitar Alun-alun Tugu, dikelilingi oleh pohon trembesi yang sangat rindang, dengan tajuk pohon yang menjorok dan menaungi Alun-alun dan Balaikota. Vegetasi ini juga berfungsi sebagai climate control dan visual control
- Sirkulasi di sekitar Alun-alun Merdeka, dikelilingi oleh pepohonan beringin yang menjadi symbol keberadaan alun-alun tradisional Jawa



#### **4.2.4 Bangunan dan struktur**

Struktur tatanan massa dan bangunan yang khas menjadi karakter kota Malang bisa dipahami dari tatanan di sekitar Alun-alun Merdeka, pada periode Kolonial dan periode Masa Pasca Kolonial berikut



Gambar 4. Komposisi Massa Bangunan di sekitar Alun-alun Merdeka pada Masa Kolonial dan Masa Pasca Kolonial

#### 4.2.5 Fitur-fitur air buatan

- **Kolam di Monumen Tugu**

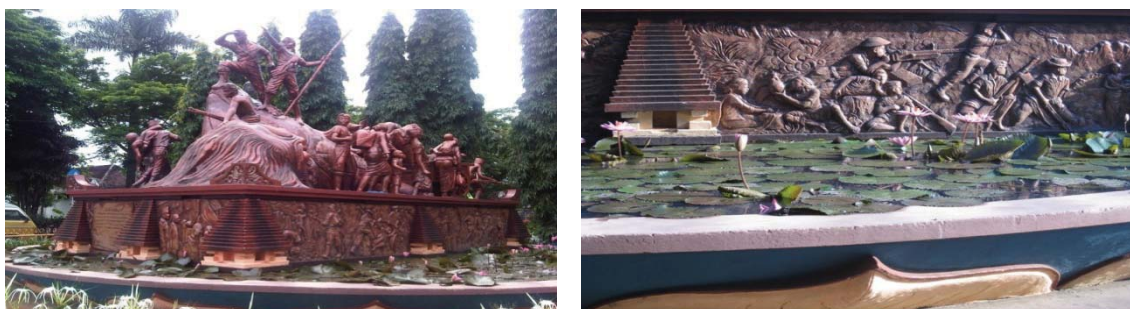
Kolam yang mengelilingi Monumen tugu ini berada di tengah Alun-Alun Bunder. Kolam ini dipenuhi oleh bunga teratai yang konon pada jaman dahulu bunga teratai yang ada berwarna merah dan putih yang melambangkan warna bendera Indonesia. Tetapi sekarang bunga teratai yang menghiasi kolam tersebut hanya berwarna merah muda.



Gambar 5. Kolam yang mengelilingi Monumen Tugu

- **Kolam di Monumen Perjuangan '45**

Kolam yang berada di Taman Kertanegara ini kesannya seperti belanga yang mewadahi Monumen Perjuangan '45. Kolam ini juga dihiasi dengan bunga teratai sama dengan kolam yang mengelilingi Monumen Tugu.



Gambar 6. Kolam yang terkesan mewadahi Monumen Perjuangan '45



#### 4.2.6 Fitur berskala kecil

- **Monumen Perjuangan '45 (1)**  
Monumen Perjuangan '45 ini berada di Taman Kertanegara yang lokasinya berada di depan Stasiun Baru Kota Malang. Monumen ini merupakan refleksi sebuah penghargaan terhadap para pejuang dalam melawan penjajah.
- **Monumen Tugu (2)**  
Monumen Tugu yang berada pada Alun-alun Bunder dibangun tanggal 17 Agustus 1946, setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Desain Monumen Tugu ini mempunyai makna tersendiri yaitu Puncak berbentuk bambu tajam sebagai senjata untuk melawan penjajah. Rantai yang menggambarkan kesatuan rakyat Indonesia. Tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut, yang mempunyai 8 tingkat dan 17 pondasi melambangkan tanggal bersejarah Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Monumen Tugu ini dijadikan sebagai lambang dari Kota Malang.
- **Monumen Piala Adipura (3)**  
Monumen dengan Model Piala Adipura Tahun 1993 yang terletak di Jalan Semeru adalah sebuah wujud apresiasi sekaligus dorongan untuk mempertahankan citra Malang sebagai kota yang terus berbenah di bidang kebersihan dan lingkungan.
- **Monumen TGP (4)**  
Monumen yang berbentuk patung dua prajurit Tentara Genie Pelajar (TGP) yang terletak di Kawasan Stadion Gajayana, Jalan Semeru adalah salah satu dari sejumlah monumen penghargaan bagi jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
- **Monumen Melati (5)**  
Monumen Melati terdapat di taman jalur tengah jalan Ijen. Lokasinya tepat di pertigaan Jl. Semeru dan Jl. Ijen sekaligus berada di depan Museum Brawijaya.



Gambar 7. Monumen sebagai fitur berskala kecil di jalur Stasiun - Ijen

#### **4.2.7 Kawasan Arkeologis**

Kawasan arkeologis yang ada pada sumbu timur barat Kota Malang terletak pada keempat simpulnya yaitu Taman Kembar di Stasiun Kota Malang, Alun-alun Bunder (JP. Coen Plein), Perempatan Kayutangan dan Semeroe Plein.

##### **a. Taman kembar di Stasiun Kota Malang**

Jalan kereta api Surabaya-Malang sudah dibuka sejak tahun 1876. Stasiun kereta api ditempatkan di sebelah timur rel kereta api dan berhadapan langsung dengan tangsi militer. Pada saat perkembangan kota mulai menuju ke arah barat sekitar tahun 1920an, maka letak stasiun lama yang ada disebelah timur rel dirasa tidak menguntungkan. Sehingga pada tahun 1930 terjadi pemindahan letak stasiun yang ada di sebelah timur rel ke sebelah barat rel untuk menunjang perencanaan kota yang berkembang dari timur-barat. Untuk memberi kesan yang lebih monumental pada bangunan stasiun kereta api yang baru ini maka dibuat jalan kembar yang diberi nama Deabdles dengan taman ditengahnya yang disebut dengan Boulevard, sehingga jalan yang menghubungkan Alun-alun Bunder dengan stasiun ini disebut Deandels Boulevard.



**Gambar 8.** Stasiun Kota Baru dan aktivitas di sekitarnya

Kondisi stasiun pada saat ini telah mengalami perkembangan, bangunannya tidak banyak berubah hanya saja banyaknya aktivitas manusia yang menjadikan tampilan stasiun tidak dapat dinikmati secara keseluruhan seperti jaman dahulu. Didepannya sudah dipasang kanopi yang menutupi fasade depan dari pintu masuk stasiun. Kemudian area didepannya dibuat untuk parkir sepeda motor dan mobil. Bangunan di sisi kanan dan kiri penuh dengan bangunan komersil yang digunakan untuk perdagangan. Pada hari minggu, di kawasan stasiun kota baru terdapat aktivitas temporer yaitu sebagai tempat berkumpulnya komunitas sepeda pancal.

##### **b. Alun-alun Bunder (J.P Coen Plein)**

Pemindahan pusat pemerintahan dari Alun-alun Kotak ke Alun-alun Bunder juga terkait dengan perubahan status Kota Malang menjadi *Gemeente*. Keberadaan gedung Balaikota sebagai pusat pemerintahan yang baru dilengkapi dengan ruang terbuka didepannya yang berbentuk bulat dan dinamai JP Coen Plein (Plein berarti lapangan, dan JP Coen adalah Gubernur Jendral periode awal datangnya Belanda di Indonesia). Ruang terbuka yang dibentuk Belanda tahun 1922 ini merupakan poros yang menghubungkan stasiun kota baru dengan gunung Kawi pada sumbu timur-barat. Masyarakat pribumi lebih mengenalnya sebagai alun-alun bunder, dengan kolam air mancur ditengahnya.

Pada masa awal kemerdekaan tepatnya tanggal 17 Agustus 1946 dilakukan peletakan batu pertama tugu oleh Presiden Sukarno sebagai upaya meresmikan pembuatan tugu di tengah kolam pada JP Coen Plein. Pembangunan tugu yang sudah 95% terpaksa dihentikan karena adanya agresi militer dari tentara Belanda. Sebelum menghancurkan tugu tersebut mencoba mengkamufase tugu yang berbentuk bambu

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

runcing tersebut dengan membungkus badan tugu dengan bendera Belanda dan puncaknya diberi mahkota raja. Pada tanggal 23 Desember 1948 tugu dihancurkan, dan kota Malang dibumihanguskan. Pada 20 Mei 1953 tugu kemerdekaan selesai dibangun lagi dan diresmikan Presiden Sukarno. Kemudian pada 17 Juni 1970 Tugu Kemerdekaan dijadikan lambang Kota Malang menggantikan lambang kota lama yang berbentuk garuda.



**Gambar 9.** Sejarah pembangunan Monumen Tugu.  
(sumber: Basundoro, 2009)

Bentuk dari Monumen Tugu memiliki arti yaitu Puncak Monumen Tugu yang berbentuk bambu tajam sebagai senjata yang pertama kali digunakan bangsa Indonesia untuk melawan tentara Belanda dalam usaha merebut kemerdekaan. Rantai yang menggambarkan kesatuan rakyat Indonesia yang sangat menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut bintang yang mempunyai 8 tingkat dan 17 pondasi melambangkan tanggal bersejarah Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Bunga Teratai yang ada disekitar monumen yang berwarna putih dan merah melambangkan keberanian dan kesucian sesuai bendera Indonesia tercinta.

### c. Perempatan Kayutangan

Keberadaan simpul Kayutangan mempertemukan antara sumbu panjang kota utara-selatan yang lama dan sumbu timur-barat yang baru. Oleh Karsten simpul ini dimaksudkan sebagai titik pusat kota Malang sekaligus membuka *gerbang* ke arah barat sebagai perkembangan kota yang baru. Arah barat ini memiliki view ke Gunung Kawi (*de ligende vrouw* – wanita yang sedang berbaring). Pada perempatan dirancang fungsi bangunan komersial seperti kompleks pertokoan dan perhotelan, 1935-1936 (Kusdiwanggo, 2004). Karsten sebagai perencana Kota Malang memaknai pertemuan sumbu ini sebagai *gerbang* yang didukung dengan bangunan sudut (*Woningen met winkles*) karya Karel H.G. Bos sehingga menunjang view dan vista ke Gunung Kawi. Komposisi jalan dan massa bangunan ternyata menciptakan gerak yang berorientasi ke arah barat yaitu menuju Beatrixpark.



#### **4.2.8 View dan Vista**

Pada saat ini kawasan Balaikota dan Alun-alun Tugu memunculkan view dan vista tersendiri di Kota Malang. Terlihat adanya perpaduan antara unsur alam dan buatan manusia. Rerimbunan daun pohon trembesi yang seakan menaungi bundaran tugu beserta hijaunya dedaunan dapat menyejukan pemandangan ditengah kota Malang yang semakin padat oleh bangunan. Layaknya sebuah oase yang berada di tengah kota Malang.

Tatanan pedestrian ways dan taman di Alun-alun Tugu yang khas menuju Balaikota Malang terkesan ingin menunjukkan bahwa taman ini dibuat untuk menunjang keberadaan Balaikota sebagai pusat pemerintahan Kota Malang.

### **5. KESIMPULAN**

Karakter lansekap kota Malang sangat dipengaruhi historis pembentukan kotanya yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Struktur kota dan penataan ruang terbukanya sangat kuat mencirikan gaya Kolonial yang syarat akan tujuan politik. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan dua buah Alun-alun pada dua pusat pemerintahan kota dan kabupatennya yang merupakan upaya politik dari penguasa kotanya. Keunikan struktur lingkungan alamnya, yang dipadukan dengan gaya penataan lingkungan binaannya, menjadikan Malang memiliki karakter local yang khas dalam penataan ruang solid dan ruang voidnya. Besarnya power pemerintah atas pengendalian bentukan ruang terbukanya yang menyebar di seluruh wilayah kota, berbeda seiring dengan radius persebaran ruang-ruang terbuka tersebut dari pusat kota Malang.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

1. Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
2. Handinoto, Soehargo. 1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. UK Petra Surabaya. Penerbit Andi. Yogyakarta.
3. Kusdiwanggo, Susilo. 2004. *Membaca Konfigurasi Gerak Ruang Urban pada Perempatan Kayutangan Malang melalui Sifat Kegerbangan*. Journal RUAS, Volume 2 No.2, Desember, 2004.
4. Page, Robert R., Gilbert, Cathy A., Dolan, Susan A., 1998. *A Guide to Cultural Landscape Reports : Contents, Process and Techniques*. Government Printing Office Washington DC
5. Wulandari, Lisa Dwi. 2007. *Konsep Metafora-Ruang pada Ruang Terbuka Perkotaan. Studi Kasus: Alun-Alun Kota Malang*. Desertasi S3. Jurusan Arsitektur, FTSP, Pascasarjana ITS, Surabaya.

**DAMPAK OVER EKSPLOITASI dan EKSPANSI LAHAN  
KAWASAN PERUMAHAN TERHADAP KEBERLANJUTAN BUDAYA  
ARSITEKTUR dan KELESTARIAN ALAM  
Di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan**

**Handajani Asriningpuri MT<sup>1)</sup>, Dini Permatawati, Ir<sup>2)</sup>**  
Program Studi Teknik Arsitektur<sup>1)</sup>  
Institut Teknologi Indonesia Serpong - Tangerang Selatan  
Email : [hasriningpuri@yahoo.com](mailto:hasriningpuri@yahoo.com)  
Email : [depekbs@yahoo.co.id](mailto:depekbs@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Development and the increasing of housing sector due to the expansion of recidencies area has impacted on the ricefields, plantation, and riverbanks, in most of Tangerang City occurs after the government system of South Tangerang transform from district to munacipilty, that raises negative impacts on preserve nature, architecture, culture, and lifestyle. This reason urge author to convey thoughts and empirical experience to use as knowledge and guidelines to keep sustainability culture, architecture, and preserve nature.*

*Development of the housing sector in South Tangerang is thriving alongside the inaugural of three subdistricts of Tangerang to be South Tangerang City and the construction of the JORR; majorly caused by the development of BSD as an independent city, the transformation of Pamulang as the capital of the municipality and Ciputat - Serpong areas expansion as supporting region.*

*The authors observe physical changes and landscape and the profile concerned arising damage to nature in the next twenty years while there are provisions about AMDAL in force at the time of development and construction of the region. Physical change and landscape profile majority occurs in the subdistrict of Pamulang, West and South Ciputat, and West and South Serpong.*

*The research starts from Pamulang subdistrict, espescially in Pondok Benda and Benda Baru Village. The change of physical profile and landscape shown by the hilling of ricefields in the Parakan Village, diminution Angke River physical profile, plantation trimming in Poncol Village, function changes of Pondok Benda Lake from catchment area into fish cages.*

*The study starts from goals invetion with facts consideration concerning ethics, law, and human rights due to NEEDS such as AMDAL provision through data and architectural knowledge. This study is tested to idealistic concept (EARLY HYPOTHESIS), seek and trace (PROBLEM STATEMENT), discuss to find PROBLEM SOLVING then analyzed to be FINAL HYPOTHESIS and conclusion.*

**Key Word** : Sustainable, Culture, Architecture, Environment, AMDAL

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi-budaya penduduk Kotamadya Tangerang Selatan dipicu oleh perubahan sistim pemerintahan daerah Kedaung-Pamulang menjadi Kemantren Pamulang tahun 1985 kemudian berubah menjadi Kecamatan Pamulang ditahun 1992 dan akhirnya menjadi ibukota Kotamadya Tangerang Selatan pada tahun 2008<sup>1</sup> di dukung adanya pembangunan jalan tol Tangerang-Cikunir sebagai JORR (JaKARTA Outer Ring Road) yang memudahkan accesibilitas ke dan dari Kotamadya Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Hal ini dibuktikan adanya pertambahan jumlah penduduk antara lain didaerah Kecamatan Pamulang, misalnya di tahun 2008 jumlah penduduk Kecamatan pamulang 162.229 jiwa, luas area hunian 2.682 ha atau 26.82 km<sup>2</sup> kepadatan penduduk 6048 jiwa/ km<sup>2</sup> (data per Desember 2008), saat ini jumlah penduduk 288.511 jiwa, luas area tetap, kepadatan penduduk 10.757 jiwa /km<sup>2</sup> data per Januari 2012,

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

pertambahan penduduk ini berakibat pada perkembangan pembangunan sektor perumahan. Peningkatan luas kawasan hunian berdampak pada tergusurnya lahan persawahan, perkebunan dan sungai sehingga fisik profil dan bentang alam (lansekap) menjadi lebih kecil.

Di Kecamatan Pamulang saat ini terdapat banyak perumahan antara lain Witanaharja, Pamulang permai I-II, Renijaya, Pd Cabe indah, Taman Harmoni, Bukit Pamulang Indah, Pamulang Estate, Taman Kedaung, Kedaung Hijau, Permata Pamulang, Villa Pamulang, Villa dago, Gria Batavia, Pamulang Elok, Pamulang Mas, Puri Pamulang, beberapa cluster Benda Residence, Bumi Eksekutif, Pinasti dan lain-lain.

Kecamatan Pamulang dengan luas 2788 ha terdiri dari tanah darat ± 2286 ha, tanah sawah 502 ha, tinggi dari permukaan laut 2000 m, laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 sebesar 41,9 %, dijadikan sebagai lokasi awal penelitian khususnya wilayah Desa Pondok Benda dan Desa Benda Baru, karena perubahan fisik profil dan bentang alam (lansekap) banyak terjadi antara lain pengurangan lahan sawah disekitar kampung Parakan desa benda Baru; pengecilan profil fisik sungai Angke di Desa pondok Benda dan Benda baru; pemangkasan lahan perkebunan atau tanah darat di kampung Poncol dan Setu; perubahan fungsi danau Situ Pondok Benda (Cileduk) di Desa Pondok Benda yang awalnya kedalam situ 9m menjadi 5 m, tahun 1985 luasnya 3,3 ha diakhir tahun 2001 menyusut menjadi 1,2 ha dan sekarang menyusut karena pembangunan Mall Pamulang Square, Sekolah Al zhar, dan sebagian Perumahan Pamulang Villa, sebagian lain menjadi area keramba ikan.

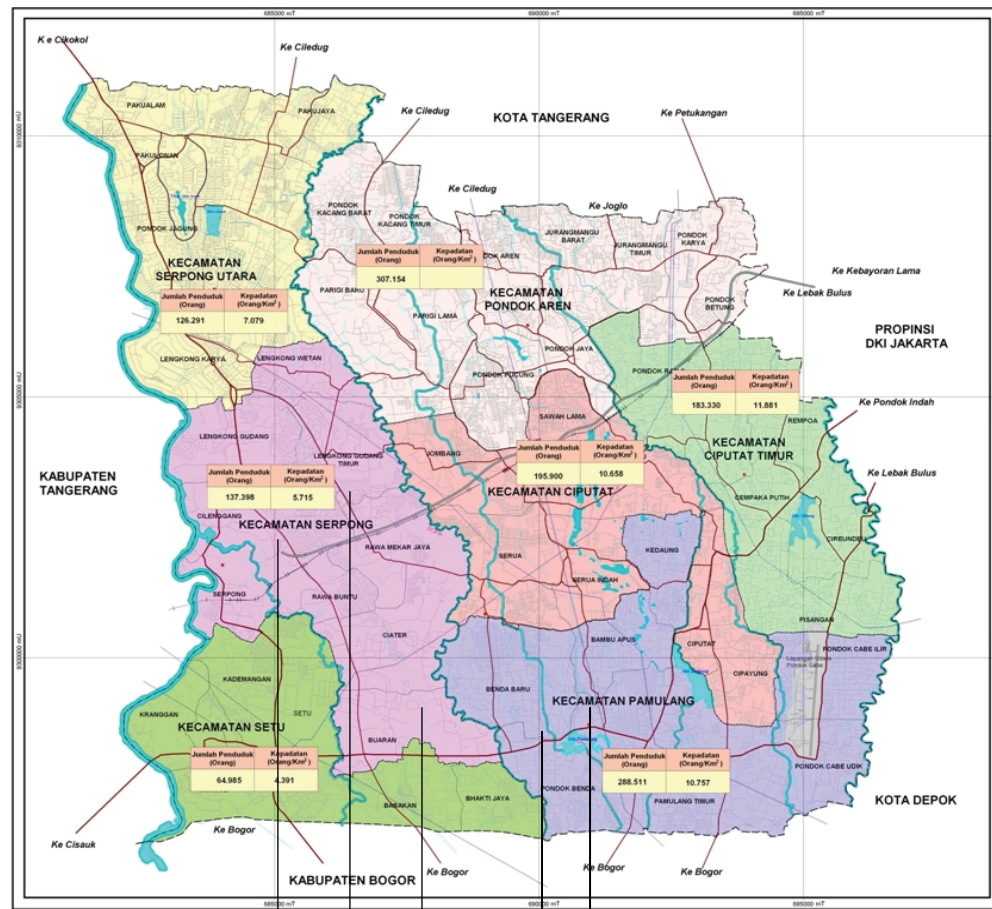
Permukiman (human settlement) adalah tempat (ruang) untuk hidup dan berkehidupan bagi sekelompok manusia, (Doxiadis:Ekistics:1971) sedangkan pemukiman (land settlement) berasal dari kata housing adalah kumpulan rumah beserta sarana dan prasarana lingkungannya yang menitik beratkan pada fisik atau benda yaitu perumahan (houses). Sementara bentuk topografi lahan adalah unsur penting permukiman manusia, jika pada suatu kawasan permukiman terjadi pembangunan suatu kawasan tidak terencana akibat desakan penduduk terhadap lahan menjadi tinggi misalnya pengurangan sawah, pemangkasan lahan dan penebangan vegetasi serta pengubahan fisik profil sungai (daerah aliran sungai) maka permasalahan fisik, sosial-ekonomi dan sosial budaya akan timbul, akibat dari pemanfaatan ruang yang diluar batas toleransi.

Dari fakta dilapangan dan teori tersebut diatas, dikhawatirkan dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang timbul dampak negatif terhadap kelestarian alam, arsitektur, budaya, dan gaya hidup penghuni kecamatan Pamulang. Oleh karena itu untuk mengantisipasi pemanfaatan ruang yang melampaui batas (over eksploitasi) diperlukan kajian pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah dan pedoman untuk membatasi ekspansi ruang demi terjaganya keseimbangan dalam hal Keberlanjutan Budaya, Arsitektur dan Kelestarian alam.

---

<sup>1</sup> H.Moch. Natsir, - *Sejarah Kecamatan Pamulang* – Pemerintah Daerah Tangerang Selatan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



- Kecamatan Pamulang
- Lokasi Kajian Ds Pondok Benda dan Benda baru
- Jalan Arteri antar Provinsi Serpong-Pamulang-Ciputat<sup>2</sup>
- Jalur TOL Tangerang-Cikunir (JORR)
- Rel Kereta Api Jakarta – Rangkas Bitung

**Gambar 1.** Lokasi Kecamatan Pamulang di Peta Tangerang Selatan<sup>3</sup> -

<sup>2</sup> Undang-undang no 38 tahun 2004 TENTANG JALAN

<sup>3</sup> Diunduh dari situs Kecamatan Pamulang

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

**2. PERMASALAHAN**

Permasalahan kawasan perumahan umumnya terjadi karena desakan jumlah penduduk yang meningkat dan perencanaan pembangunan tidak direncanakan dengan baik, hal ini timbul karena pembangunan perumahan dilakukan dalam skala besar sementara sarana dan prasarana tidak disiapkan, demi harga rumah dapat terjangkau maka pembangunan diarahkan kepinggiran kota hal tersebut diatas terjadi di Tangerang Selatan. Mempertimbangkan luasnya permasalahan dan luasnya area objek maka kajian dilakukan hanya di Kecamatan Pamulang khususnya wilayah Desa Pondok Benda dan Desa Benda Baru, sebagai awal kajian.

Penelusuran masalah diperlihatkan melalui tabel agar terlihat perubahan fisik profil sebagai berikut :

**Tabel 1:** Masalah perumahan di lapangan desa Pondok benda dan Desa Benda Baru

No	Tahun Terjadi	Lokasi	Perubahan	Dampak Thd Lingkungan	Permasalahan
1	1985-1989	Reni Jaya,	Perkebunan rakyat menjadi perumahan.	Perubahan sebagian fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.	Wajah lansekap, tata huni, sosial ekonomi masyarakat naik
2	1989-1995	Reni Jaya Baru,	Kebun rakyat dan sebagian situ Pd benda menjadi perumahan dengan pengurangan sebagian pinggiran situ  Situ Pondok Benda menjadi keramba dan kebun warga lokal	Perubahan total fisik profil & lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.  Situ Pd Benda tercemar sampah perumahan  Resapan air berkurang	Wajah lansekap, tata huni, sosial budaya masyarakat berubah ter jadi persaingan sosial  Fisik profil situ menge cil, situ dangkal, jenis & jumlah ikan berku rang
3	1993-2012	Pamulang Villa	Perluasan lahan dg mengurug sebagian Situ	Perubahan sebagian fisik profil lansekap / bentang alam, vegetasi tidak dipertahankan	Wajah lansekap, tata huni sosial budaya masyarakat berubah, sosial ekonomi naik
4	1993-2012	Pamulang Benda Baru;	Sawah tadah hujan menjadi perumahan	Resapan air berkurang	Wajah lansekap, tata huni, sosial budaya masyarakat berubah ter jadi persaingan sosial Tidak mudah ditemukan mata air sbg sumber
5	2005-2012	Puri Pamulang, Pamulang Mas, Gria Batavia,  Benda Residen, Al Fal lah	Bulak atau rawa kering menja di perumahan  Kebun anggrek & peternakan ayam menjadi perumahan	Perubahan sebagian fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan	Wajah lansekap, tata huni, dan kondisi sosial masyarakat berubah  Resapan air berkurang
6	2005-2012	Pinasti, Sasmita Lestari	Lahan pribadi menjadi cluster	Perubahan sebagian fisik profil lansekap & vegetasi	Perubahan Sosial Budaya dan Sosial ekonomi

Dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan dikelompokkan dalam kategori<sup>2</sup>

**Tabel 2:** Masalah lingkungan di lapangan desa Pondok benda dan Desa Benda Baru

No (1)	Kelompok (2)	Jenis (3)	Masalah (4)
	Fisik-padat	Penangan sampah  Pemangkasan lahan perkebunan	Penumpukan, timbul penyakit dan bau menyengat, bau asap pembakaran, kontaminasi air tanah dan menghambat saluran air kotor. Vegetasi rusak, penurunan kandungan air tanah ber potensi erosi dan tanah longsor, pengecilan pori <sup>2</sup> tanah akibat penyumbatan air hujan, perubahan tataguna lahan
	Fisik Cair	Sumber Air bersih	Penyaluran air terhambat, resapan air berkurang, Air tanah berkurang,



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

		Air Hujan  Pembuangan Air Kotor	kontaminasi air tanah Karakter permukaan lahan berubah, jumlah air tanah berkurang, erosi tanah dan genangan air meningkat, sedimentasi lumpur, jalan rusak, over loading dan merusak sarana aksesibilitas Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran.
	Udara dan iklim	Kualitas udara Iklim	Udara kotor, temperatur tinggi, rasa pengab bagi penghuni Presipitasi rendah berpengaruh pada curah hujan, angin cenderung besa
(1)	(2)	(3)	(4)
	Manajemen transportasi	Sarana Prasarana	Pertambahan jumlah kendaraan bermotor berdampak pada kemactan, Polusi udara (asap&debu), kecelakaan, pemborosan waktudan energi, suasana tidak nyaman Pertambahan jumlah jaringan jalan tidak terpenuhi
	Non Phisik (Masyarakat)	Perubahan struktur ekonomi akibat peningkatan pendapatan	perubahan gaya hidup, perubahan pola pikir, penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar, ketidak seimbangan kualitas lingkungan karena tidak adanya program pembangunan infra struktur yang terencana
	Regulasi	Kebijakan Publik bersifat distributif	Tidak adanya kebijakan publik bersifat distributif untuk mengatur dan menjaga kekayaan perkotaan tetap terjaga berkaitan dengan pelestarian dan konservasi situ
		AMDAL	Pada pembangunan berskala besar tidak dilengkapi Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketentuan pelengkap untuk menjaga terjadinya perubahan lingkungan.

### 3. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa pustaka yang menjadi rujukan dalam kajian ini antara lain tentang kawasan perumahan yaitu menurut Undang undang no 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa kawasan perumahan adalah

*Suatu kawasan terdiri kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan.*

Sedangkan permukiman adalah *bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan*

Disadari bahwa bagi manusia tempat tinggal merupakan hal yang sangat vital. Peran tempat tinggal bukan lagi sekedar tempat untuk bernaung tapi juga merupakan tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan Tanpa adanya tempat tinggal manusia tidak dapat hidup dengan layak, seperti diungkap oleh Maslow (Suparno Sastra: 2006) bahwa *Sesudah manusia terpenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan kesehatan kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan motivasi untuk pengembangan kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi.*

Tentang Eksploitasi Lahan merujuk pada ungkapan bahwa :

*Pembangunan kota yang tidak terencana dan tidak tertata dengan baik akan menimbulkan banyak permasalahan baik fisik , sosial maupun ekonomi yang saling berkaitan dan dan saling mempengaruhi. Desakan penduduk yang semakin tinggi akan menyebabkan tumbuhnya pemanfaatan ruang di luar batas toleransi (pengantar perencanaan kota) seperti penebangan vegetasi dan mengubah lahan yang semula menjadi hunian penduduk dengan segala kegiatan penunjang lainnya.*

Hal ini akan menimbulkan masalah ketidak seimbangan lingkungan, yaitu : Penebangan vegetasi disertai penurunan kandungan air tanah secara bersama-sama sehingga potensial menimbulkan ketidak seimbangan daya dukung tanah pada akhirnya menyebabkan erosi dan tanah longsor, yang terutama membahayakan penduduk yang tinggal di dekatnya; Peningkatan erosi tanah dan semakin kecilnya pori-pori permukaan tanah karena partikel-partikel tanah yang terbentur langsung oleh air hujan menyumbat pori-pori tanah tersebut; Penurunan kapasitas infiltrasi tanah berpengaruh kuat terhadap penurunan kandungan air tanah, sebaliknya peningkatan volume aliran air permukaan menyebabkan banjir dengan membawa partikel-partikel tanah yang lepas disaat terjadinya benturan air hujan dengan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

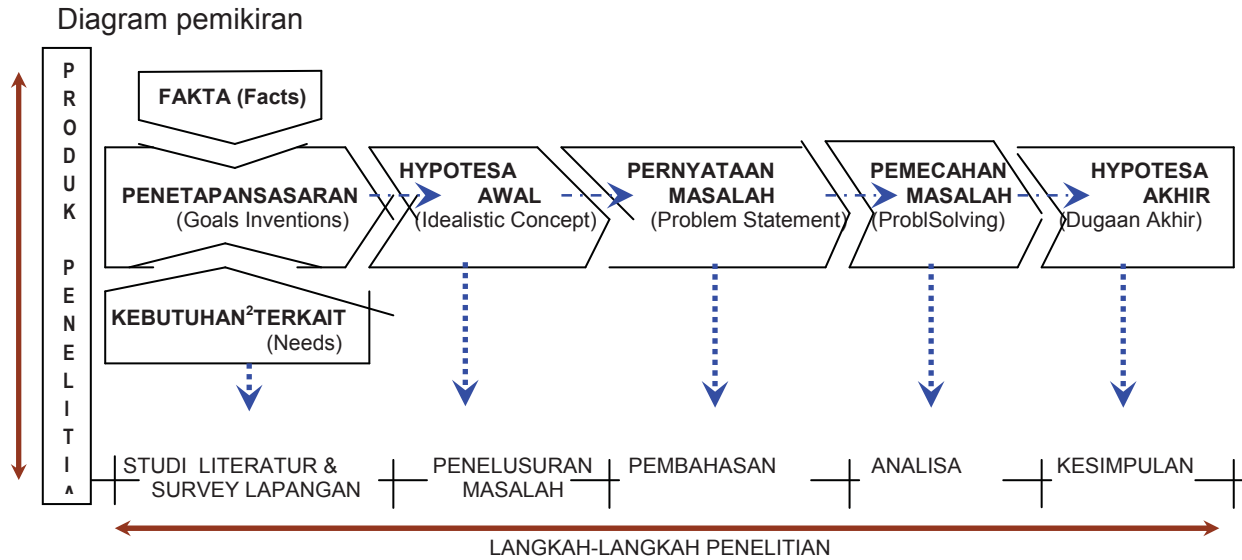
tanah; Kurang tersedianya prasarana penampung dan pengalir limpasan air permukaan menimbulkan banjir sekaligus partikel yang terbawa menyebabkan pendangkalan; Adanya saluran drainase bawah tanah yang penuh dengan kabel listrik dan telpon, sehingga air hujan tidak dapat masuk ke dalam saluran drainase; Dampak lain adalah rusaknya jalan akibat hujan membahayakan kendaraan.

Tentang Karakteristik Lahan Pasca pembangunan menurut: Rustam Hakim dalam ASPEK KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI NILAI TAMBAH KAWASAN PERUMAHAN PERKOTAAN Jurnal FALTL Universitas Trisakti. bahwa: *Beberapa permasalahan pokok dalam pembangunan perumahan antara lain adalah terjadi perubahan terhadap lingkungan awal, yang awalnya terbuka dan ada vegetasi sehingga air terserap, karena adanya pembangunan, lahan tertutup oleh bangunan, jalan dan perkerasan lain. Akibatnya daerah resapan air dan ketersediaan air tanah berkurang selain itu, run off akan terjadi dan aliran air sukar masuk ke badan sungai. Hal ini menyebabkan volume air sungai akan meningkat menyebabkan banjir di wilayah yang lebih rendah permukaan. Tentang Limbah cair Pembuangan limbah cair khususnya limbah domestic (Individual Septic Tank) pada setiap rumah menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah. Semakin padat satuan hunian dalam kawasan tersebut, semakin tinggi pula pencemaran yang terjadi. Bahkan akan berpengaruh pada air bersih yang berasal dari air tanah. Tentang Limbah Padat bahwa Limbah padat atau sampah memerlukan penanganan khusus. Sampah dan limbah padat merugikan lingkungan baik berupa pencemaran tanah, pencemaran udara (bau), dampak visual, sensori, dan sebagainya. Tentang Perubahan Iklim Mikro bahwa adanya pengurangan vegetasi pada pembangunan perumahan berpengaruh terhadap iklim mikro dengan peningkatan suhu udara di kawasan tersebut. Tentang Peningkatan Volume Lalulintas dan Kemacetan jalan bahwa Pembangunan perumahan di daerah pinggiran kota besar berakibat pada peningkatan arus ulang alik (komuter) ke dan dari kota induk sebagai daerah kerja berakibat pada peningkatan kemacetan lalulintas. Tentang Perubahan hak atas tanah bahwa akibat dari pembangunan perumahan timbul masalah pelaksanaan pembebasan tanah. Kepemilikan tanah akan berganti kepemilikan melalui poses ganti-rugi akan tetapi kesiapan mental masyarakat akan rasa kepemilikan tanah belum ada berakibat pada rasa malas dan gaya hidup yang konsumtif timbul, sehingga gaya hidup berubah dari petani menjadi industrial-kapital.*

Tentang AMDAL dirujuk pada (Otto Sumarwoto:1997) "*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*", bahwa Analisis Mengenai Dampak lingkungan tertera dalam Pasal 16 Undang-undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan –ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: *AMDAL merupakan bagian dari konsep ekologi pembangunan yang mempelajari timbal balik dari dampak pembangunan pada lingkungan dan dampak lingkungan pada pembangunan. Tujuannya mendukung pembangunan berkelanjutan agar pembangunan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan tidak akan menurunkan atau menghapus kemampuan lingkungan dalam peningkatan kualitas hidup terdiri dari rencana penanganan dampak dan rencana pemantauan dampak*

Dari keempat rujukan tersebut diharapkan dapat digunakan dalam pembahasan permasalahan sehingga alternatif pemecahan masalah dapat ditemukan sebagai hipotesa akhir.

#### 4. METODA PENELITIAN



Kajian diawali dari penetapan Sasaran (goals invention) dengan pertimbangan Fakta (Facts) tentang etika, hukum dan hak asasi manusia dirujuk pada Kebutuhan-kebutuhan terkait (needs) antara lain ketentuan AMDAL melalui data lapangan dan dukungan pengetahuan arsitektur, kemudian melalui pendataan dan pengamatan dan diujicobakan pada konsep yang ideal (Idealistic Concept) menjadi HYPOTHESA AWAL, ditelusuri, ditampilkan sebagai PERNYATAAN MASALAH, ditahap pembahasan ditemukan beberapa PEMECAHAN MASALAH yang dianalisa menjadi HYPOTHESA AKHIR sebagai kesimpulan hasil pemikiran.

Sasaran yang akan dicapai adalah pembuktian apakah pada pembangunan kawasan perumahan di Kecamatan Pamulang yang diamati, terjadi over eksploitasi. Melalui pencarian fakta apabila indikasi tersebut terduga maka ditetapkan sebagai hypotesa awal yang melalui penelusuran masalah, pembahasan ditemukan alternatif – alternatif pemecahan, kemudian alternatif-alternatif tersebut dianalisa untuk mendapatkan jalan keluar sebagai Hypotesa akhir yang merupakan kesimpulan dari tindakan penelitian.

#### 5. PEMBAHASAN

Melalui diagram dinyatakan masalah-masalah yang timbul pada pembangunan kawasan perumahan di Kecamatan Pamulang khususnya wilayah Desa Pondok Benda dan Desa Benda Baru. Kawasan perumahan sesuai pernyataan kajian pustaka adalah Sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, Beberapa kawasan perumahan menjadi telaaahan yaitu: Renijaya, Renijaya baru, Pamulang Villa; Benda Baru; Puri Pamulang; Pinasti, Sasmita Lestar; Pamulang Mas, Gria Batavia; Benda Residen, dan Al Fallah misalnya.

**Tabel 3:** Tabulasi Pembahasan Pemecahan Masalah

Nama Perumahan	Asal permukiman	Dampak Thd Lingkungan	Masalah	Pemecahan Masalah melalui penerapan2
Renijaya,	Perkebunan rakyat.	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tdk dipertahankan.	Kualitas udara, Iklim	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Renijaya baru,	Kebun rakyat dan sebagian pengurangan sebagian pinggirannya situ Pondok benda;	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.	Penangan sampah Pembuangan Air Kotor	Kebijakan Publik distributif AMDAL

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

	Situ Pondok Benda menjadi keramba, dan kebun warga	Situ Pd Benda tercemar sampah Resapan air berkurang	Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih	
Pamulang Villa;	Dari pengurangan sebagian Situ	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Situ Pd Benda tercemar sampah Resapan air berkurang	Penangan sampah Pembuangan Air Kotor Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Benda Baru	Sawah tadah hujan menjadi lahan	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Resapan air berkurang	Penangan sampah Pembuangan Air Kotor Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Puri Pamulang	Bulak atau rawa kering	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Resapan Air berkurang	Penangan sampah Pembuangan Air Kotor Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih Buangan air hujan	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Grya Pinasti	Perkebunan rakyat.	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.	Kualitas udara, Iklim	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Sasmita Lestar	Lahan pribadi menjadi cluster		Penangan sampah Pembuangan Air Kotor Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih Buangan air hujan	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Pamulang Mas	Bulak atau rawa kering dirug		Pembuangan Air Kotor Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih Buangan air hujan	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Gria Batavia	Bulak atau rawa kering dirug		Penangan sampah Pembuangan Air Kotor Kualitas udara, Iklim Sumber Air Bersih Buangan air hujan	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Benda Residen	Perkebunan rakyat.	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan	Pembuangan Air Kotor Sumber Air Bersih Buangan air hujan	Kebijakan Publik distributif AMDAL
Al Fallah	Kebun angrek & peternakan ayam	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.	Penangan sampah Pembuangan Air Kotor	Kebijakan Publik distributif AMDAL

Untuk mengetahui kebijakan yang harus diterapkan maka dari masalah yang ada dan kebutuhan konsep ideal dicari kemungkinan pemecahan masalah dengan penerapan kebijakan seperti terlampir:

**Tabel 4:** Tabulasi Pembahasan Penerapan Kebijakan

<b>Nama Perumahan</b>	<b>Dampak Thd Lingkungan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Pemecahan Masalah melalui penerapan2</b>	<b>Penerapan Kebijakan tentang</b>
Renijaya,	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tdk dipertahankan.	Presipitasi rendah ber pengaruh pada curah hujan, angin	Kebijakan Publik distributif Program pembangunan	Penangan vegetasi, erosi tanah

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

		cenderung besar Kualitas udara kotor Iklim: temperatur tinggi, rasa pengab karena kelembaban tinggi	infra struktur ysg terencana  AMDAL  Program pembangunan infra strukturu terencana	Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan.  Polusi udara (asap&debu), kecelakaan
Renijaya baru,	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.  Situ Pd Benda tercemar sampah Resapan air berkurang	Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih, Kua litas udara kotor; tempe ratur tinggi,rasa pengab krn kelembabn tinggi	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra strukturu terencana  AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas Ingkungan
Pamulang Villa;	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.  Pd Benda tercemar sampah  Resapan air berkurang	Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih, Kua litas udara kotor; Iklim: temperatur tinggi, rasa pengab karena kelem baban tinggi Jml jaringan jln tambah	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana  AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah  Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas Ingkungan
Benda Baru	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Resapan air berkurang	Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih Pertambahan jml jaring an jalan	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas Ingkungan
Puri Pamulang	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Resapan Air berkurang	Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih Berdekatan & dibawah sutet (saluran untuk teganggan tinggi)	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas Ingkungan
Grya Pinasti	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.	Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih.	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

		Pertambahan jml jaringan jalan		peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas lingkungan
--	--	--------------------------------	--	---

**Tabel 5:** Tabulasi Pembahasan Penerapan Kebijakan

<b>Nama Perumahan</b>	<b>Dampak Thd Lingkungan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Pemecahan Masalah melalui penerapan2</b>	<b>Penerapan Kebijakan tentang</b>
Sasmita Lestar		Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Pertambahan jml jaringan jalan	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana  AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas lingkungan
Pamulang Mas		Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih, Kua litas udara kotor; Iklim: temperatur tinggi, rasa pengab karena kelem baban tinggi Pertambahan jml jaringan jalan	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana  AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas lingkungan
Gria Batavia		Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Sumber Air Bersih, Kua litas udara kotor; Iklim: temperatur tinggi, rasa pengab karena kelem baban tinggi Pertambahan jml jaringan jalan	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana  AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas lingkungan
Benda Residen	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan	Penangan sampah Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah Pertambahan jml jaringan jalan	Kebijakan Publik distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana  AMDAL	Over loading saluran, aliran tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas lingkungan
Al Fallah	Perubahan fisik profil	Penangan sampah	Kebijakan Publik	Over loading saluran, aliran

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

	lansekap, vegetasi tidak dipertahankan.	Penyaluran air terham bat,Air tanah berkurang  Pembuangan Air Kotor & kontaminasi air tanah  Pertambahan jml jaring an jalan	distributif  Program pembangunan infra struktur ysg terencana  AMDAL	tidak lancar, pencemaran dan sampah.  Penangan vegetasi, erosi tanah Perubahan tataguna lahan  Studi AMDAL sebagai peraturan dan ketetapan untuk menjaga perubahan lingkungan dan ketidak seimbangan kualitas lngkungan
--	---	--	--	--

## 6. KESIMPULAN

Perubahan fisik profil dan lansekap yang mayoritas terjadi pada lahan sawah; perkebunan; sungai dan situ/danau dikhawatirkan berpengaruh pada Keberlanjutan Budaya Arsitektur dan Kelestarian Alam, pemikiran untuk meminimalisasi kekhawatiran tersebut serta usulan penanggulangannya dituangkan pada karya ilmiah dengan judul dampak over eksploitasi dan ekspansi lahan untuk kawasan perumahan terhadap keberlanjutan budaya arsitektur dan kelestarian alam

**Tabel 6:** Tabulasi kesimpulan

Asal pemukiman	Dampak terhadap lingkungan	Pemecahan masalah	Penerapan kebijakan	Nama perumahan
Perkebunan rakyat.	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tdk dipertahankan	Penanaman vegetasi	Kebijakan Publik distributif AMDAL	Renijaya, Renijaya baru, Grya Pinasti
Dari pengurangan sebagian Situ	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Resapan air berkurang	Penanaman vegetasi, Konservasi lahan	Kebijakan Publik distributif AMDAL	Pamulang Villa
Sawah tadah hujan menjadi lahan	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan. Resapan air berkurang	Penanaman vegetasi Konservasi lahan	Kebijakan Publik distributif AMDAL	Benda Baru
Bulak atau rawa kering	Perubahan fisik profil lansekap	Penanaman vegetasi Konservasi lahan	Kebijakan Publik distributif AMDAL	Puri Pamulang, Pamulang Mas, Griya Batavia
Lahan pribadi menjadi Cluster	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan	Penanaman vegetasi  Konservasi lahan	Kebijakan Publik distributif	Sasmita Lestari  Al Fallah
Kebun anggrek & peternakan ayam	Perubahan fisik profil lansekap, vegetasi tidak dipertahankan	Penanganan terhadap pembuangan sampah	Kebijakan Publik distributif	Pamulang Villa
Situ Pd Benda tercemar sampah	Penyempitan dan pendangkalan situ		Kebijakan Publik distributif	

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

1. Doxiadis, 1968. *Human Settlement are by Definition, Settlement Inhabited by Man*, Athens
2. Hakim, R. *Aspek Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Nilai Tambah Pada Kawasan Perumahan Perkotaan*, Karya Tulis, FTAL Trisakti
3. Heryanto, B., 2011, *Roh dan Citra Kota*, Surabaya : Brillian International.
4. Mulyandari, H., 2011, *Pengantar Arsitektur Kota*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
5. Sastra, S & Marlina, E, 2006, *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
6. Undang-undang Republik Indonesia no 4 Tahun 1992 *Tentang Perumahan dan Permukiman*
7. Undang-undang Republik Indonesia no 51 Tahun 2008 *Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten*



## MINIMALISASI KONSUMSI ENERGI DALAM BANGUNAN, UPAYA MENDUKUNG KELESTARIAN ALAM

IM. Tri Hesti Mulyani<sup>1)</sup>, Ign. Christiawan<sup>2)</sup>

Program Studi Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain,  
dan Lembaga Pendidikan Lingkungan-Manusia-Bangunan Unika Soegijapranata Semarang<sup>1)</sup>  
Program Studi Diploma III Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang<sup>2)</sup>

E-mail : [hesti.lmb.unika@gmail.com](mailto:hesti.lmb.unika@gmail.com)<sup>1)</sup>

E-mail : [christiawan@undip.ac.id](mailto:christiawan@undip.ac.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*Energy consumption in works of architecture associated with the six stages of the circulation of materials: raw materials, production, construction, maintenance, demolition, and disposal. In addition to the six stages, the energy consumption is also determined by the design of the building. Building design that is intended in this case is the spatial space that allows the creation of an optimal comfort. Leisure space is related to the energy of thermal comfort / aeration and natural lighting to allow any part of the building is cool and getting enough light throughout the day. Thus, the use of assistive devices for air conditioning and lighting can be reduced to conserve energy use. In addition to creating a comfortable space, building design should also allow an optimal use of building materials and the availability of green open spaces.*

*Raw materials and production processes are relates to the choice of materials to be used. Determination of building materials to be used should be pay attention to the environmental balance. Energy of the construction is the energy contained (required) since building materials are available at the construction site until the completion of the development process. This is related to the use of technology during the construction process. Maintenance energies calculated from the development process has been completed and the scope includes the use and maintenance of buildings. Energy of the use is the amount of energy needed at a particular time period. The amount is includes the energy used for lighting and running support tools. Maintenance energy is determined by the choice of building materials. Some things that must be considered related to the energy of demolition and disposal is to reuse and recycle as much as possible. With the steps above then ecological sustainability can be maintained.*

**Keywords:** *construction, maintenance, demolition*

### 1. PENDAHULUAN

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan / kerja atau usaha. Suatu benda dikatakan mempunyai energi, jika benda tersebut dapat melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat dilihat, yang dapat dilihat hanya efek dari energi tersebut, misalnya tumbuhan menjadi besar, badan dapat melakukan kerja, kendaraan / mesin dapat berjalan, lampu dapat menyala, dsb. Konsumsi energi dalam bidang pembangunan berkaitan dengan enam tahap peredaran bahan bangunan (Widmer & Frick, 2007).



**Gambar 1.** Enam tahap peredaran bahan bangunan (Widmer & Frick, 2007)

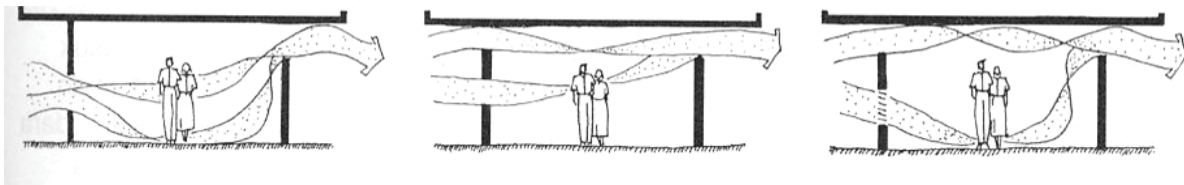
Cakupan energi yang dibahas dalam makalah ini adalah strategi penghematan energi yang terkandung (dibutuhkan) sejak bahan bangunan sudah tersedia di tempat pembangunan hingga proses pemeliharaan dan pembongkaran saat bangunan tersebut rusak atau direnovasi.

## 2. DESAIN BANGUNAN

Desain bangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tata ruang yang memungkinkan terciptanya kenyamanan ruang. Kenyamanan ruang berkaitan dengan energi adalah kenyamanan termal/pengudaraan dan pencahayaan secara alami sehingga memungkinkan setiap bagian bangunan sejuk dan mendapatkan cahaya yang cukup sepanjang hari. Dengan demikian maka penggunaan alat-alat bantu untuk pengkondisian udara dan penerangan dapat dikurangi sehingga menghemat penggunaan listrik.

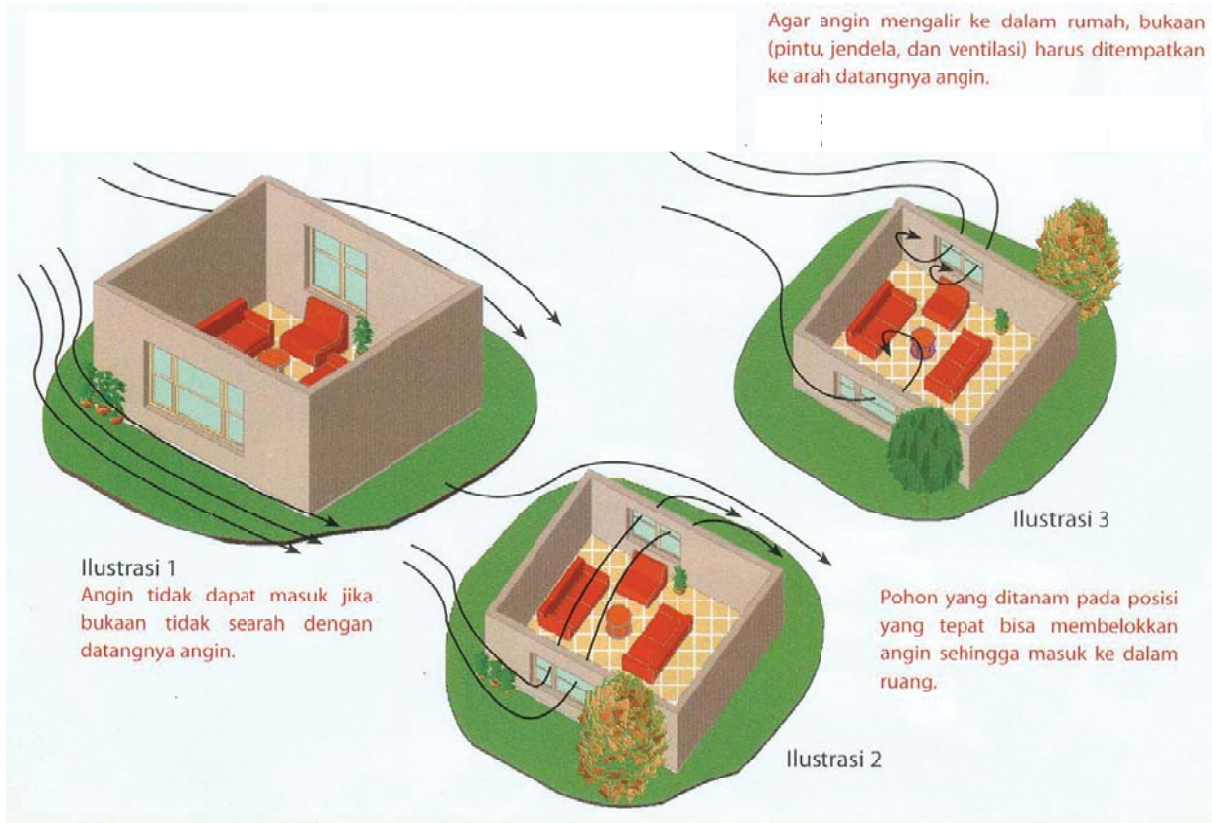
Penciptaan penghawaan alami dalam bangunan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **ventilasi silang**, intinya adalah menciptakan perbedaan tekanan udara sehingga udara bisa mengalir. Ventilasi silang dapat diperoleh dengan meletakkan lebih dari satu bukaan pada sisi (bidang) yang berbeda.



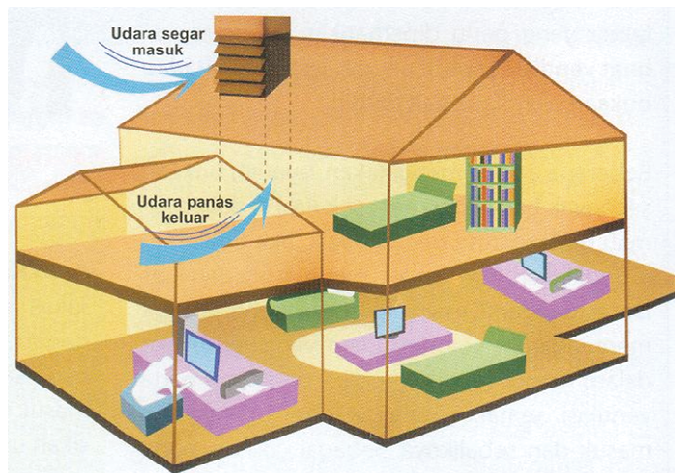
**Gambar 2.** Prinsip ventilasi silang (Frick H & Mulyani TH, 2006)

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
"Sticks and Carrots"  
Reward and Punishment



Gambar 3. Peran vegetasi dalam membelokkan angin (Serial Rumah, *Rumah hemat energi*)

- **ventilasi atap**, sebaiknya ruang dibawah atap dilengkapi dengan bukaan agar udara panas tidak terperangkap dibawahnya.
- **menara angin**, berfungsi menghisap dan menangkap angin sehingga udara senantiasa bersirkulasi



Gambar 4. Menara angin berfungsi menghisap dan menangkap angin (Sumber: Serial Rumah, *Rumah hemat energi*)

- **plafon tinggi**, jarak yang jauh antara lantai dan plafon memungkinkan udara bergerak bebas pada ruang kosong.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

- **material dan kemiringan atap**, pilihan material akan dibahas secara khusus pada bagian pilihan bahan di belakang. Jika sudut atap landai, maka radiasi panas matahari yang masuk kedalam ruang semakin banyak. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka selain pilihan bahan yang tepat disarankan menggunakan sudut kemiringan atap yang cukup (tidak terlalu landai).
- **penggunaan material alam**, material alami tidak mengalami banyak proses dalam pembuatannya sehingga dapat lebih menyatu dengan alam dibandingkan dengan material pabrikasi. Semakin tebal bahan untuk pembatas luar maka semakin baik dalam meredam suhu karena waktu rambat panas dalam bahan tersebut relatif lama.
- **warna terang**
- **menghadirkan teras**
- **teritisan**

Untuk mendapatkan pencahayaan alami yang optimal, maka perlu diperhatikan kebutuhan tingkat pencahayaan masing-masing ruang sesuai dengan fungsinya. Kebutuhan rata-rata tingkat pencahayaan ruang pada rumah tinggal adalah sebagai berikut (SNI: 03 – 6197 – 2000)

**Tabel 1:** Kebutuhan Rata-Rata Tingkat Pencahayaan Ruang Pada Rumah Tinggal

Fungsi Ruang	Tingkat Pencahayaan (Lux)
Teras	60
Ruang tamu	120—250
Ruang makan	120—250
Ruang kerja	120—250
Kamar tidur	120—250
Kamar mandi	250
Dapur	250
Garasi	60

Sumber: SNI 03-6197-2000

Kebutuhan bukaan untuk cahaya alami pada satu ruang kurang lebih 9% dari total luas ruang. Menurut data SNI, banyaknya lubang cahaya ideal dalam suatu ruang dinyatakan oleh nilai WWR (*Wall Window Ratio*). WWR adalah perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan. Dari ketentuan ini nilai idealnya adalah 20% dari luas dinding keseluruhan.

Selain menciptakan kenyamanan ruang, desain bangunan juga harus memungkinkan:

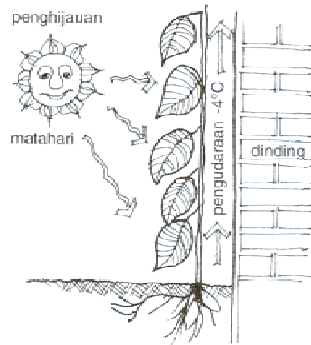
- Penggunaan bahan bangunan secara optimal. Guna mendukung hal ini maka penentuan modul/ukuran bagian bangunan menyesuaikan dengan ukuran bahan bangunan yang akan digunakan. Dengan demikian maka potongan bahan bangunan dapat diminimalkan sehingga jumlah sampah bangunan dapat berkurang.
- Tersedianya ruang terbuka yang dihijaukan dengan vegetasi karena kehadiran vegetasi yang optimal dapat menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kemampuan vegetasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah (Frick & Mulyani, 2006, 89).

**Tabel 2:** Kemampuan Vegetasi Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan (Frick & Mulyani, 2006, 89)

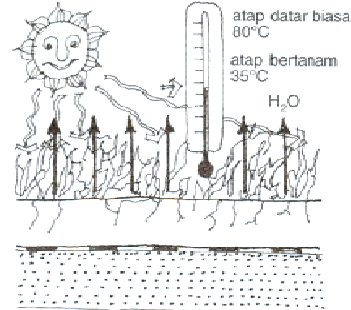
	1 pohon berumur ± 100 tahun	Tumbuh-tumbuhan* seluas 1 hektar
Produksi oksigen	1.7 kg/jam	600 kg/hari
Penerimaan karbon dioksida	2.35 kg/jam	900 kg/hari
Zat arang yang terikat	6 ton	-
Penyaringan debu	-	sampai 85%
Penguapan air	500 liter/hari	-
Penurunan suhu	-	sampai 4 °C

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

- Dihijaukannya dinding dan atap rumah, karena hal ini akan menimbulkan hawa lingkungan setempat sejuk, nyaman, dan segar (Frick & Mulyani, 2006, 108).



Penghijauan pada dinding

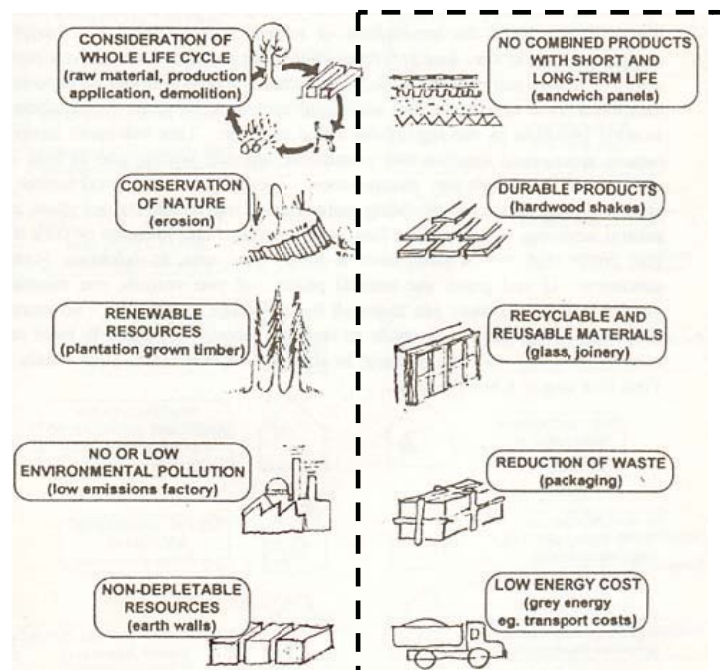


Penghijauan pada atap datar

### 3. PILIHAN BAHAN

Penentuan bahan bangunan yang akan dipakai dipertimbangkan terhadap keseimbangan lingkungan berkaitan dengan konsumsi energinya:

- Ketersediaan bahan dipasar lokal → akan menghemat energi yang dibutuhkan untuk transportasi bahan.
- Keawetan bahan: penggunaan bahan yang tahan lama akan menghemat energi berkaitan dengan tenaga tukang, dan transportasi bahan → bandingkan dengan bahan yang tidak tahan lama, sehingga membutuhkan penggantian secara berkala.
- Tidak mengkombinasikan bahan dengan usia bahan (keawetan) yang berbeda, karena penggantian bahan yang berusia pendek akan merusak bahan pasangannya yang berusia panjang sehingga justru mengurangi usia bahan tersebut.
- Memilih bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga akan mengurangi sampah bangunan jika bangunan tersebut rusak atau dibongkar.



Gambar 5. Ecological Considerations of A Building Material (Fuchs RK, 1996, 61)

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

Pilihan bahan juga berkait dengan iklim setempat dan warna bahan. Pilihan warna dipertimbangkan terhadap kemampuannya untuk menyerap dan memantulkan panas dan cahaya. Disarankan untuk tidak menggunakan cahaya alam secara langsung, tetapi dipantulkan sehingga panas tidak langsung masuk ke dalam ruang. Kemampuan beberapa bahan dan keadaan permukaan dalam penyerapan dan pemantulan panas dapat dilihat pada tabel dibawah (Frick & Suskiyatno, 1998, 64).

**Tabel 3:** Kemampuan Bahan dan Keadaan Permukaan Dalam Menyerap dan Memantulkan Panas (Frick & Suskiyatno, 1998, 64)

Bahan dan keadaan permukaan		penyerapan	pemantulan
Lingkungan alam	rumput	80 %	20 %
	tanah, ladang	70-85 %	30-15 %
	pasir perak	70-90 %	30-10 %
Dinding kayu	warna muda	40-60 %	60-40 %
	warna tua	85 %	15 %
Dinding batu	marmer	40-50 %	60-50 %
	batu bata merah	60-75 %	40-25 %
	beton exposed	60-70 %	40-30 %
Lapisan atap	semen-berserat	60-80 %	40-20 %
	genting flam	60-75 %	40-25 %
	genting beton	50-70 %	50-30 %
	seng gelombang	65-90 %	35-10 %
	seng aluminium	10-60 %	90-40 %
Lapisan cat	kapur putih	10-20 %	90-80 %
	kuning	50 %	50 %
	merah mudah	65-75 %	35-25 %
	hijau mudah	50-60 %	50-40 %
	aspal hitam	85-95 %	15-5 %

#### 4. PEMBANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Beberapa indikator berkait dengan penggunaan energi yang digunakan dalam tahap pembangunan dan konstruksi adalah (Widmer & Frick, 2007, 60-61):

##### a. Cara membangun, pemasangan

Hal ini berkait dengan mutu bahan bangunan, optimalisasi pada penggunaan bahan (bebas sisa dan sampah), penggunaan lahan, air, dan energi. Mutu bahan bangunan dan optimalisasi penggunaan bahan sudah dibahas dalam pilihan bahan dan desain bangunan diatas. Jika dalam proses pembangunan masih terdapat sisa bahan (sampah), maka sisa tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk keperluan lain ( misal: sampah potongan kayu dapat digunakan untuk memasak). Penggunaan air dikaitkan dengan upaya menciptakan bangunan sekering mungkin, karena semakin kering bangunan maka semakin baik (sehat) bagi penghuninya. Beberapa contoh jumlah penggunaan air pada pembangunan adalah sebagai berikut: (Frick & Koesmartadi, 1999, 16)

**Tabel 4:** Jumlah Penggunaan Air Pada Pembangunan

Bangunan	Penggunaan air
Beton kelas II, K-225	± 250 liter air/m <sup>3</sup>
Dinding batu bata 11,5 cm tebal	± 42 liter air/m <sup>2</sup>
Dinding conblock 10 cm tebal	± 5 liter air/m <sup>2</sup>
Turap (plesteran) ± 2 cm tebal	± 12 liter air/m <sup>2</sup>

Jumlah air yang digunakan untuk membangun sebuah rumah biasa (seluas 36 m<sup>2</sup>) ialah sekitar 28.000 liter yang harus menguap sebelum rumah tersebut dapat dianggap kering dan sehat dihuni.

**b. Cara penyambungan, pemasangan**

Penyambungan dan penyusunan bahan bangunan sebaiknya merupakan cara yang sederhana sehingga perubahan (perbaikan) pada gedung dimasa depan dapat dilakukan dengan mudah oleh penghuni atau tukang setempat (menggunakan teknik lokal).

**c. Kemasan bahan bangunan**

Kemasan bahan bangunan sebaiknya dimanfaatkan dalam proses pembangunan (misal: kayu dan kertas semen). Kemasan yang benar-benar tidak dapat digunakan (misal: kardus, plastik) sebaiknya dikumpulkan dan dikirim/dijual ke pihak lain untuk didaur ulang.

## **5. PEMELIHARAAN**

Beberapa indikator dalam pemeliharaan bangunan berkait dengan penggunaan energi yang digunakan adalah (Widmer & Frick, 2007, 61-62):

**a. Penggunaan**

Penggunaan menilai jumlah energi yang dibutuhkan pada masa waktu tertentu. Jumlah dalam hal ini meliputi energi yang digunakan untuk penerangan dan menjalankan alat-alat pendukung (pendingin ruang, pemanas air, perlengkapan rumah tangga). Jumlah energi yang dibutuhkan untuk penerangan dan penghawaan ruang dapat dihemat dengan menerapkan desain bangunan yang tepat (sudah dibahas didepan). Dalam kegiatan memasak penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan kompor surya dan botol hitam untuk memanaskan air ditempat panas.

**b. Perawatan dan pemeliharaan**

Biaya pada tahap ini sangat ditentukan oleh pilihan bahan bangunan yang digunakan. Semakin lama masa pakai bahan, maka semakin murah biaya pemeliharaan dan biasanya semakin hemat penggunaan energinya. Demikian pula bahan yang tidak membutuhkan finishing khusus, maka akan menghemat energi pula. Sebagai contoh dapat dibandingkan perawatan dan pemeliharaan dinding batu bata yang membutuhkan cat dan dinding batu alam yang tidak membutuhkan cat sama sekali. Masa pakai bagian-bagian bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah (Frick & Suskiyatno, 1998, 96-97).

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

**Tabel 5: Masa Pakai Bagian-Bagian Bangunan (Frick & Suskiyatno, 1998, 96-97)**

Bagian bangunan	Masa pakai (tahun)			Bagian bangunan	Masa pakai (tahun)		
	30	60	90		30	60	90
<b>Bagian struktur</b>				Lantai tegel keramik			
Dinding batu alam	██████████	██████████	██████████	Lantai papan kayu	██████████	██████████	██████████
Dinding batu bata	██████████	██████████	██████████	Lantai parket kayu	██████████	██████████	██████████
Dinding beton	██████████	██████████	██████████	Lantai linolium	██████████	██████████	██████████
Dinding konstruksi kayu	██████████	██████████	██████████	Lantai permadani	██████████	██████████	██████████
Lantai beton bertulang	██████████	██████████	██████████	Kosen kayu jati	██████████	██████████	██████████
Lantai konstruksi kayu	██████████	██████████	██████████	Kosen kayu Kalimantan	██████████	██████████	██████████
Tangga beton bertulang	██████████	██████████	██████████	Krepyak kayu	██████████	██████████	██████████
Kolom beton bertulang	██████████	██████████	██████████	Jendela bingkai kayu	██████████	██████████	██████████
Kuda-kuda atap kayu	██████████	██████████	██████████	Jendela Naco	██████████	██████████	██████████
Kuda-kuda atap baja	██████████	██████████	██████████	Pintu dalam daun triplex	██████████	██████████	██████████
Atap pelat beton	██████████	██████████	██████████	Pintu rumah kayu masif	██████████	██████████	██████████
<b>Bagian sekunder</b>				Pintu lipat baja	██████████	██████████	██████████
Dinding pemisah dari batu-bata	██████████	██████████	██████████	Pintu kerai aluminium	██████████	██████████	██████████
Dinding papan di luar	██████████	██████████	██████████	Peran, kasau, reng	██████████	██████████	██████████
Dinding papan di dalam	██████████	██████████	██████████	Atap rumbia, ijuk, dll.	██████████	██████████	██████████
Dinding eltenit board	██████████	██████████	██████████	Atap sirap kayu	██████████	██████████	██████████
Dinding gipskarton	██████████	██████████	██████████	Genting flam tanah liat	██████████	██████████	██████████
Plesteran dinding luar	██████████	██████████	██████████	Genting pres tanah liat	██████████	██████████	██████████
Plesteran dinding dalam	██████████	██████████	██████████	Genting beton	██████████	██████████	██████████
Lantai ubin semen	██████████	██████████	██████████	Pelat semen berserat	██████████	██████████	██████████
Lantai ubin teraso	██████████	██████████	██████████	Talang seng	██████████	██████████	██████████
				Tangga konstr. kayu	██████████	██████████	██████████
				Tangga berlapis tegel	██████████	██████████	██████████

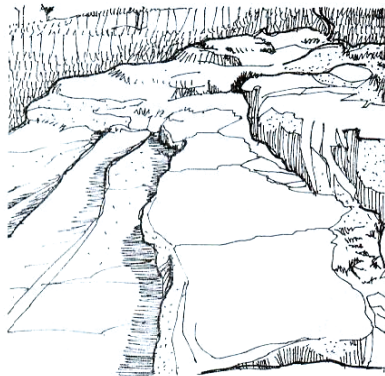
Bagian bangunan	Masa pakai (tahun)			Bagian bangunan	Masa pakai (tahun)		
	30	60	90		30	60	90
<b>Bagian finishing</b>				Saluran air kotor tembikar	██████████	██████████	██████████
Langit semen berserat	██████████	██████████	██████████	Kakus monoblok	██████████	██████████	██████████
Langit tripleks	██████████	██████████	██████████	Kakus jongkok	██████████	██████████	██████████
Langit gipskarton	██████████	██████████	██████████	Wastafel	██████████	██████████	██████████
Cat kayu bagian luar	██████████	██████████	██████████	Keran dll.	██████████	██████████	██████████
Cat kayu bagian dalam	██████████	██████████	██████████	Cuci piring teraso	██████████	██████████	██████████
Cat besi	██████████	██████████	██████████	Cuci piring nonkarat	██████████	██████████	██████████
Cat tembok di luar	██████████	██████████	██████████	Instalasi saluran listrik	██████████	██████████	██████████
Cat tembok di dalam	██████████	██████████	██████████	Stopkontak, sakelar dll.	██████████	██████████	██████████
Dinding tegel di luar	██████████	██████████	██████████	<b>Perlengkapan dan perabot</b>			
Dinding tegel di dalam	██████████	██████████	██████████	Lemari es	██████████	██████████	██████████
Wall paper	██████████	██████████	██████████	Mesin cuci	██████████	██████████	██████████
Kawat nyamuk	██████████	██████████	██████████	Peralatan AC	██████████	██████████	██████████
<b>Bagian teknik</b>				Mebel-mebel	██████████	██████████	██████████
Pipa air minum PVC	██████████	██████████	██████████	Kasur	██████████	██████████	██████████
Pipa air minum baja	██████████	██████████	██████████				
Saluran air kotor PVC	██████████	██████████	██████████				



## 6. PEMBONGKARAN DAN PEMBUANGAN

Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan penggunaan energi dalam tahap ini adalah:

- Bahan bongkaran harus dapat dimanfaatkan kembali untuk bangunan (*reuse*) baik secara langsung maupun dijual kepada pihak lain, hal ini menuntut kehati-hatian dalam proses pembongkarannya sehingga keutuhan bahan dapat dimaksimalkan.
- Daur ulang bahan bongkaran yang tidak memungkinkan digunakan kembali (*recycle*) sehingga dapat digunakan lagi untuk fungsi yang berbeda. Hal ini berarti memperpanjang daya guna bahan sehingga tidak cepat menjadi sampah yang membebani lingkungan.
- Pembuangan bahan bongkaran yang tidak dapat didaur ulang usahakan seminimal mungkin membebani lingkungan, misal: bahan bongkaran ditata sedemikian rupa dan dibiarkan beberapa lama sehingga akan menjadi taman puing seperti gambar dibawah (Frick & Mulyani, 2006, 100).



Taman puing yang baru ...

... dan taman yang sama sesudah 2 tahun

## 7. PENUTUP

Dengan meminimalkan konsumsi energi dalam karya arsitektur, maka upaya mengurangi kerusakan lingkungan sudah mulai dilakukan, karena sebagian besar energi yang digunakan saat ini masih berasal dari sumber yang tidak terbarukan. Selanjutnya pemanfaatan energi dalam karya arsitektur seyogyanya menggunakan sumber yang terbarukan (panas matahari, angin, air). Dengan langkah-langkah tersebut diatas maka keberlanjutan ekologis semoga dapat dilakukan secara berkesinambungan.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

1. Fuchs RK. 1996. *Healthy home and healthy office*. Building iology & Ecology Institute, New Zealand.
2. Frick H & Koesmartadi Ch, 1999. *Ilmu bahan bangunan: eksploitasi, pembuatan, penggunaan, dan pembuangan*. Kanisius – Soegijapranata University Press. Jogjakarta – Semarang.
3. Frick H & Mulyani TH, 2006. *Arsitektur ekologis*. Kanisius – Soegijapranata University Press. Jogjakarta – Semarang.
4. Frick H & Suskiyatno B, 1998. *Dasar-dasar eko arsitektur*. Kanisius – Soegijapranata University Press. Jogjakarta – Semarang.
5. Serial Rumah, *Rumah hemat energi*
6. Widmer P & Frick H, 2007. *Hak konsumen dan ecolabel: informasi konsumen tentang produk yang ramah lingkungan dan kebutuhan atas ecolabel*. Kanisius – Soegijapranata University Press. Jogjakarta – Semarang.

**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN SELOKAN MATARAM  
DENGAN PENERAPAN KONSEP PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**

**Studi Kasus Kawasan Sekitar Jalan Seturan – Gejayan**

**Luh Putu Widhiari<sup>1)</sup>, Amos Setiadi<sup>2)</sup>**

Program Magister Teknik Arsitektur <sup>1,2)</sup>

Universitas Atma Jaya Yogyakarta <sup>1,2)</sup>

E-mail : [arie\\_widhi4121@yahoo.co.id](mailto:arie_widhi4121@yahoo.co.id)<sup>1)</sup>

E-mail : [amos.setiadi@yahoo.com](mailto:amos.setiadi@yahoo.com)<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*Sustainable development is a development process that considers the needs of society today without compromising the needs of future generations. Sustainable development relates to many disciplines involving environmental issues, social, economic and also related with government policies. This paper will discuss about the concept of sustainable development in its application to improve the quality of the region around Mataram Canal Street specializes in Seturan and Gejayan. This research was conducted with a library of books, and internet, besides it was done by looking directly in field conditions. The end result of this paper is to form a solution a few suggestions to improve the quality of the Mataram Canal area with the concept of Sustainable Development.*

**Keywords :** Mataram Canal, Sustainable Development.

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Saluran Mataram atau yang lebih dikenal dengan Selokan Mataram merupakan suatu kawasan yang memiliki nilai sejarah dan arti penting bagi petani yang berada di kawasan sekitar aliran sungai Progo (barat) dan sungai Opak (timur) dan berperan sebagai kanal irigasi pertanian masyarakat sekitar wilayah Yogyakarta bagian utara. Kanal irigasi ini memiliki panjang 31,2 km dan dibangun pada masa kependudukan Jepang ketika masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sejak adanya Selokan Mataram, kehidupan warga di sekitar Yogyakarta menjadi lebih makmur, karena dua aliran sungai yang disatukan tersebut menyebabkan lebih dari ribuan hektar lahan pertanian menjadi subur begitu pula pada saat musim kemarau datang.<sup>1</sup> Selokan Mataram ini dibangun setelah selesai dibuatnya Saluran *Van der Wijck* yaitu pada tahun 1932, pada saat itu Selokan Mataram masih bernama Kanal Yoshiro. Dalam pengelolaan jaringan air ini dilakukan oleh Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Opak Progo –Opak-Oyo (Balai PSDA WS POO/Balai POO) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Cakupan pengairan potensial adalah 33.000 ha, untuk penggelontor sistem sanitasi kota sekitar 0,4m<sup>3</sup>/detik dan pemasokan keperluan industri gula PG Madukismo 0,55 m<sup>3</sup>/detik pada musim giling, serta 0,22m<sup>3</sup>/detik pada musim pemeliharaan melalui suplesi di Sungai Winongi yang diambil Bendung Korbri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran\\_Mataram](http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_Mataram), April 2010.

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan\\_Saluran\\_Induk\\_Mataram](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Saluran_Induk_Mataram), April 2010.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Walapun keberadaan Selokan Mataram dikatakan berhasil di dalam memenuhi kemakmuran warga terutama dalam hal pertanian. Namun, seiring dengan perkembangannya, kawasan disekitar ruas jalan pada kanal ini menjadi ramai dipadati kendaraan lalu lalang atau dipergunakan sebagai jalan alternatif menuju ke Jalan Gejayan atau ke Jalan Seturan. Sedikit demi sedikit menjamur para pedagang kaki lima (PKL) yang membuka areal penjualan dan menambah sesak dan kumuhnya kawasan ini. Walapun telah dilakukan penertiban dan sosialisasi pendataan PKL, tetapi permasalahan belum bisa selesai begitu saja. Adanya kawasan yang semakin padat akibat pemukiman menyebabkan penyusutan luas area pelayanan air irigasi yang sekarang diperkirakan menjadi 21,194 Ha. Namun, ketersediaan air irigasi bukannya menjadi berlimpah tetapi justru menghadapi berbagai macam masalah, petani pada areal aliran sungai bagian timur sering kali tidak mendapat air karena dilakukan penutupan aliran. Aliran sungai ke arah timur menyebabkan memperoleh air yang sudah tercemar dari arah barat akibat aktivitas masyarakat pada kawasan seperti di sekitar Seturan dan Gejayan. Areal ini merupakan salah satu jalur yang dilalui aliran Selokan Mataram yang merupakan kawasan padat hunian dan kendaraan, menjamurnya peruntukan kawasan baru seperti PKL, kawasan pemukiman penduduk yang semakin padat pada bagian utara jalur Selokan Mataram, adanya bengkel dan cuci kendaraan bermotor menyebabkan aliran air menjadi tercemar, pembuangan limbah rumah tangga yang dialirkan langsung menuju ke aliran sungai yang memberikan pengaruh buruk pada kualitas air Selokan Mataram. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan arti penting Selokan Mataram untuk pertanian, pembangunan yang kurang memperhatikan jarak dengan keberadaan Selokan Mataram akan berpengaruh pada kedangkalan muka air tanah. Secara umum perhatian terhadap lingkungan dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas air dan lingkungan kawasan Selokan Mataram terutama di Jalan Seturan sampai dengan Jalan Gejayan mengingat kondisi ekisting merupakan kawasan yang sudah sangat cepat berkembang dan tidak memadainya kondisi lingkungan maka perlu dikembangkan dengan konsep berkelanjutan (*sustainable*) yaitu memperhatikan aspek lingkungan tidak hanya kondisi saat ini tetapi juga bagaimana jangka panjangnya agar tidak merusak lingkungan sekitar kawasan dan generasi mendatang.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang bisa diangkat antara lain: apa yang menyebabkan penurunan kualitas kawasan di Selokan Mataram terutama pada kawasan sekitar Jalan Seturan sampai dengan Jalan Gejayan.

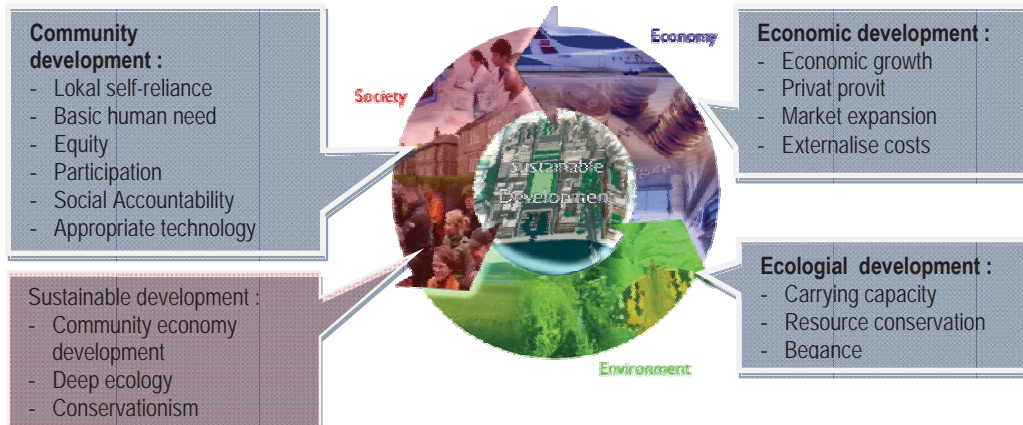
### **1.3. Tujuan dan Sasaran**

- a. Tujuan dari Karya tulis ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan yang bisa dilakukan di dalam mengatasi masalah yang mengakibatkan penurunan kualitas kawasan Selokan Mataram yaitu pada Jalan Seturan sampai dengan Jalan Gejayan. Dalam hal ini berkaitan dengan aspek fisik atau wujud dalam arsitektur.
- b. Sasaran dari karya tulis ini adalah untuk mencapai konsep kawasan lingkungan yang *sustainable* atau berkelanjutan dalam peningkatan kualitas kawasan Selokan Mataram yaitu pada Jalan Seturan sampai dengan Jalan Gejayan.

## 2. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KAWASAN SELOKAN MATARAM

### 2.1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pengertian *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan menurut beberapa sumber antara lain :



Gambar 1. *Sustainable Development*

Sumber : <http://sorinplaton.files.wordpress.com/2008/03/sustanaible-1.jpg>, 2009.

- Menurut Brundtland dari PBB (1987), *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan baik itu berupa lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan terdapat salah satu faktor yang harus dihadapi yaitu bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan social.<sup>3</sup>
- Berdasarkan laporan PBB, KTT Dunia 2005. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat.<sup>4</sup>
- Sustainable Construction* dijelaskan, *Sustainable Development* mencakup semua segi kehidupan, mulai dari kebijakan politik pemerintah, strategi bisnis, sampai gaya hidup, tidak hanya permulaan tapi juga proses dan hasil akhir. Dimana pembangunan berkelanjutan bersifat kompleks dan harus menerapkan system interdisipliner.<sup>5</sup>
- Menurut Emil Salim, Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.<sup>6</sup>
- Menurut Sofyan Effendi : Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat meperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara konsepsual, pembangunan diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_berkelanjutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan).

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_berkelanjutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan).

<sup>5</sup> Akmal Imelda Studio Architecture, (2007), *Sustainable Constuction*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (hal : 26)

<sup>6</sup> Abdurrahman, (2003), *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Indonesia*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.

Sumber : <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf>

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.<sup>7</sup>

Ide pokok atau teori dasar pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim antara lain :

- a. Proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus menerus ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
- b. Sumber alam baik itu udara, air dan tanah memiliki ambang batas dalam penggunaannya sehingga berpengaruh pada kualitas dan kuantitasnya. Hal ini dimaksudkan berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
- c. Kualitas lingkungan berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan maka semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup.
- d. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi yang memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesejahteraan untuk generasi masa depan.

Dalam mendesain bangunan berkelanjutan atau *sustainable building* harus memperhatikan tiga indikator yaitu indikator sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa kriteria tersebut bisa dilihat pada tabel halaman selanjutnya.

**Tabel 1:** Tiga Indikator *Sustainable Buildings*

NO	INDIKATOR SOSIAL ( <i>Social</i> )	INDIKATOR EKONOMI ( <i>Economic</i> )	INDIKATOR LINGKUNGAN ( <i>Environment</i> )
1.	Kenyamanan Pengguna bangunan.	Pendayagunaan komponen lokal demi memajukan pendapatan lokal atau daerah setempat.	Penggunaan air.
2.	Akses dalam bangunan.	Efsiensi bangunan.	Penggunaan energy.
3.	Kemudahan akses menuju lokasi bangunan.	Fleksibilitas dalam tata ruang dalam dan luar bangunan.	Pegolahan limbah.
4.	Partisipasi dan control.	Biaya-biaya yang keluar sejak proyek bangunan akan dimulai.	Pemilihan material dan komponen bahan.
5.	Segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan.	Alokasi total dana yang dipakai untuk membangun.	Situasi <i>site</i> .

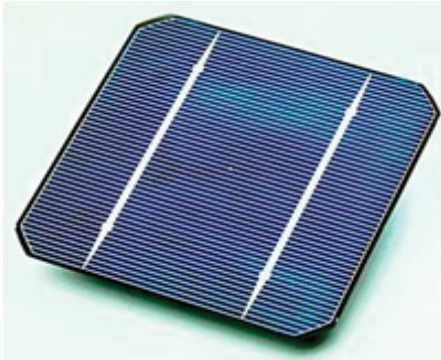
Sumber : *Sustainable Construction*, Rumah Ide. 2007

## 2.2. Arah Rancangan Desain Berkelanjutan

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi di dalam rancangan *sustainable* antara lain : penggunaan energi dan penerapan prioritas pembangunan berkelanjutan seperti merancang dan membangun bangunan hemat energi, memanfaatkan ulang bangunan yang ada serta infrastrukturnya daripada menggunakan ruang terbuka, merancang masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pemakaian kendaraan bermotor serta mendorong kepekaan masyarakat sekitar, mengurangi pemakaian bahan: mengoptimalkan rancangan yang menggunakan ruang lebih kecil serta memanfaatkan materi dengan lebih efisien, melindungi dan meningkatkan mutu lahan: menjaga kelestarian dan mengembalikan ekosistem lokal dan keanekaragamannya, memilih bahan bangunan yang berdampak paling rendah terhadap lingkungan : menggunakan materi bangunan yang berdampak paling kecil terhadap lingkungan dan juga bahan dengan sumber efisien, memaksimalkan umur panjang : merancang agar dapat bertahan lama dan mudah beradaptasi, menyelamatkan air:

<sup>7</sup> Ibid.

merancang bangunan serta ruang luar yang hemat air, membuat bangunan sehat : menghasilkan lingkungan ruang dalam yang aman serta nyaman, meminimalkan sampah konsumsi dan sampah hasil pengancran bangunan: mengembalikan, memakai ulang, serta mendaur ulang sampah dari bidang pekerjaan dan mempraktekkan sifat peduli lingkungan, menghijaukan bisnis yang dikerjakan: meminimalkan dampak lingkungan di tempat bekerja.



**Gambar 2.** Pemanfaatan *Photovoltaic* sebagai upaya penghematan energi  
Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics>, Mei 2010.

Penerapan *Green Architecture*, arsitektur ekologis atau arsitektur berwawasan lingkungan sebagai contoh konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Berikut ini merupakan contoh penerapan arsitektur berkelanjutan antara lain dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan yaitu dengan pemanfaatan matahari, angin, biomass, *hydroelectric* (hydro – listrik), dan geothermal. Penerapan *water threatment* sebagai usaha untuk penanggulang air kotor. Penerapan sistem *biocemeric system*

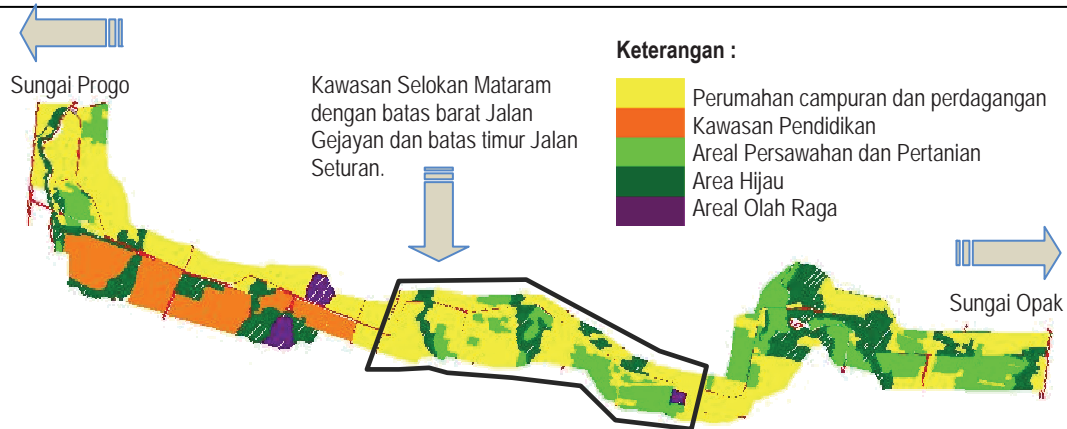
sebagai teknologi pengolahan limbah sederhana.

### 3. TINJAUAN KAWASAN SELOKAN MATARAM (STUDI PADA JALAN SETURAN – GEJAYAN)

#### 3.1. Peruntukan Kawasan Selokan Mataram (Jalan Gejalan – Seturan)

Jaringan Saluran Induk Mataram adalah sistem irigasi yang menjadi tulang punggung penyediaan air pertanian di wilayah Yogyakarta bagian utara. Jaringan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Saluran Induk Karangtalun (panjang lebih dari 3 km), Saluran Mataram (31,2 km), dan Saluran Van der Wicjk (17 km). Aliran sungai yang digunakan bagi saluran ini adalah aliran Sungai Progo di barat dan Sungai Opak di bagian timur. Untuk menangkap air dari sungai-sungai ini dibuat sejumlah bendung. Di bagian paling barat atau pangkal Saluran Van der Wijck adalah Bendung Karangtalun (populer dinamakan Ancol dan sekarang menjadi tempat wisata). Instalasi ini dibangun antara tahun 1909-1932. Saluran Van der Wijck kemudian diteruskan dengan pembangunan Saluran Mataram di masa pendudukan Jepang (kala itu dinamakan Kanal Yoshiro). Dengan selesainya Saluran Mataram, terhubunglah aliran Kali Progo menuju Kali Opak. Pada tahun 1950 (dan diperbaiki 1980) dibangun Bendung Karangtalun.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



**Gambar 3.** Peruntukan Kawasan Selokan Mataram  
 Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2010.



**Gambar 4.** Kawasan Selokan Mataram (Jalan Gejayan \_ Jalan Seturan)  
 Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2010.

Pengelolaan jaringan irigasi ini dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo (Balai PSDA WS POO/Balai POO) dan meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Cakupan pengairan potensial adalah 33.000 ha, untuk pengelontoran sistem sanitasi kota sekitar 0.4m<sup>3</sup>/detik dan pemasokan keperluan industri gula PG Madukismo 0,55 m<sup>3</sup>/detik pada

musim giling, serta 0,22 m<sup>3</sup>/detik pada musim pemeliharaan melalui suplesi di Sungai Winongo yang diambil di Bendung Korbri.<sup>8</sup>

### **3.2. Masalah Kawasan Sekitar Selokan Mataram (Batas Jalan Seturan – Gejayan)**

Beberapa masalah terkait dengan penurunan kualitas kawasan Selokan Mataram (Jalan Gejayan – Seturan) adalah sebagai berikut.

- 1) Permasalahan visual
  - Aspek kepadatan bangunan. Munculnya areal penjualan PKL (Pedagang Kaki Lima) disekitar tepi jalan Selokan Mataram.
  - Adanya kondisi lingkungan yang kurang nyaman. Hal ini bisa dilihat dari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perumahan dan pemukiman sekitar kawasan, banyaknya bermunculan areal cuci motor kendaraan, adanya sistem pembuangan menuju ke aliran air irigasi selokan yang berpengaruh pada kualitas air untuk irigasi pertanian masyarakat, bahkan terkadang pada beberapa tempat terjadi pembuangan sampah ke areal aliran irigasi Selokan Mataram.
- 2) Permasalahan kependudukan
  - Kondisi pemukiman penduduk yang semakin padat menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Kepadatan tidak membuat ketersediaan air irigasi Selokan Mataram semakin banyak justru membuat berkurangnya air tersebut.
  - Kurangnya kesadaran dari penduduk akan kualitas air dari Selokan Mataram untuk pertanian, dan pada kenyataannya mereka juga memerlukannya agar tidak terjadi pendangkalan muka air tanah dan keperluan air bersih.
- 3) Permasalahan kepadatan lalu lintas
  - Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi dan ruas jalan yang terlalu sempit dan permukaan jalan yang rusak membuat kurang nyamannya kawasan untuk dilalui.
  - Timbulnya masalah kebisingan karena aktivitas kendaraan tersebut.

## **4. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH SELOKAN MATARAM (STUDI PADA JALAN GEJAYAN – SETURAN)**

Konsep *sustainable* digunakan sebagai acuan di dalam pemecahan masalah untuk memenuhi kriteria kualitas kawasan yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak hanya untuk kepentingan masyarakat saat ini tetapi juga pemikiran generasi dan lingkungan masa depan mendatang.

Beberapa aspek masalah dan penanggulangannya adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya pencemaran lingkungan terhadap fungsi irigasi Selokan Mataram, baik yang berasal dari aktivitas penduduk, sampah dan limbah buangan cuci kendaraan atau limbah rumah tangga lain yang berasal dari pemukiman sekitar.
- 2) Pemukiman penduduk yang semakin padat dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Perlu dikontrolnya pemukiman penduduk, karena kepadatan penduduk yang terlalu tinggi jikalau sudah terjadi maka untuk menerapkan kawasan dengan konsep keberlanjutan (*sustainable*) akan semakin sulit. Kepadatan penduduk dan pembangunan yang semakin padat, serta kurang diperhatikannya jalan inspeksi untuk selokan berakibat pada kedangkalan muka air tanah serta kualitas air bersih yang diperoleh dari sumur air tanah yang semakin tercemar.

---

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran\\_Mataram](http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_Mataram), April 2010.



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



- c. Kondisi Air Irigasi Pertanian Selokan Mataram.
- b. Kondisi jalan yang kurang nyaman akibat permukaan jalan dan jalan yang terlalu sempit.
- a. Jalan pada Areal Jembatan Gajah Wong dengan aktivitas kendaraan bermotor yang tinggi.

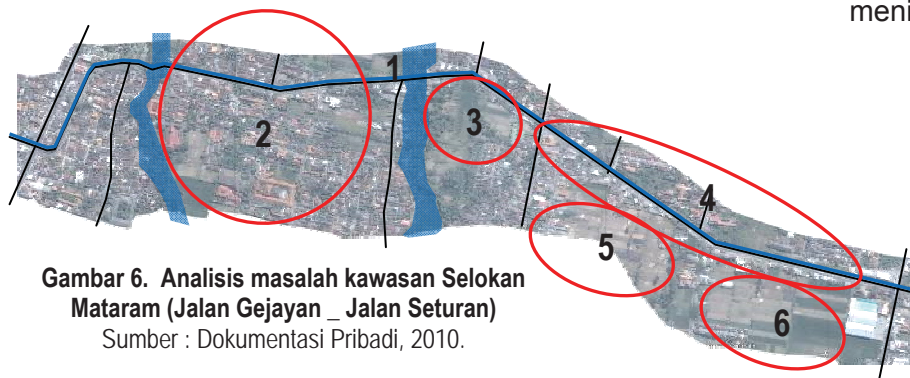


- f. Kondisi permukaan jalan yang rusak sehingga terjadi ketidaknyamanan di dalam mengendarai kendaraan.
- e. Areal penjualan oleh PKL yang terkesa kumuh dan kurang tertata (berada di sekitar aliran sungai irigasi Selokan Mataram).
- d. Areal aliran kanal irigasi Selokan Mataram.

**Gambar 5.** Kondisi kawasan Selokan Mataram (Jalan Gejayan \_ Jalan Seturan)  
 Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2010.

- 3) Aktivitas kendaraan yang padat karena areal Jalan Seturan-Gejayan berkembang sebagai jalan alternatif dan ruas jalan yang terlalu sempit. Perlu dilakukannya pelebaran jalan karena kondisi ekisting saat ini masih sangat kurang dalam menampung aktivitas kendaraan untuk Jalur Gejayan – Seturan yang berkembang sebagai jalan alternatif. Perkembangan dan prediksi mendatang ketika dilakukannya pelebaran jalan akan menimbulkan

berbagai



**Gambar 6.** Analisis masalah kawasan Selokan Mataram (Jalan Gejayan \_ Jalan Seturan)  
 Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2010.

- permasalahan baru apabila tidak dikontrol dari sekarang, seperti pemukiman dan perdagangan pada kawasan seputar Jalan.
- 4) Munculnya kawasan disekitar jalan Selokan Mataram dengan pemukiman dan fungsi penjualan yang terkesa kumuh. Perlu dilakukan penataan kawasan sekitar Selokan Mataram.
- 5) Areal pemukiman yang semakin berkembang. Terjadi permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga memerlukan ketegasan aturan dan kesadaran masyarakat sekitar.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- 6) Areal pertanian yang masih perlu irigasi dari Selokan Mataram. Air dengan kondisi yang sudah bercampur dengan limbah buangan cuci kendaraan bermotor pada kawasan sekitar dan limbah rumah tangga lainnya.

Pemecahan masalah dengan penerapan pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kawasan Selokan Mataram (Gejayan – Seturan) antara lain:

- 1) Menciptakan lingkungan kawasan yang bersih dan nyaman dengan aspek perancangan bangunan dan ruang luar hemat air beserta pemeliharannya. Program hemat air dan pemeliharaan sumber air dilakukan dengan memelihara ketersediaan air sekitar, seperti pada aliran Selokan Mataram dibuat dengan pengembangan sistem *water treatment* sehingga menghasilkan kualitas air yang layak untuk dipergunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar seperti pengairan.

Mewujudkan lingkungan kawasan Selokan Mataram lebih rindang dengan penanaman pepohonan.



Sistem penerangan jalan dengan mempergunakan energi *solar cell* sebagai usaha untuk penghematan energi dengan menggunakan *photovoltaic*.

Menyediakan area hijau sebagai pencegah polusi kawasan dan sekaligus sebagai ruang inspeksi muka air tanah.



Membuat areal terbuka hijau sekaligus untuk mengurangi polusi kawasan.

Penghijauan kawasan bangunan PKL dengan penanaman tanaman merambat (*roof garden*) dan penanaman pepohonan pada areal sekitar.



Penataan areal PKL

Dilakukan pelebaran jalan

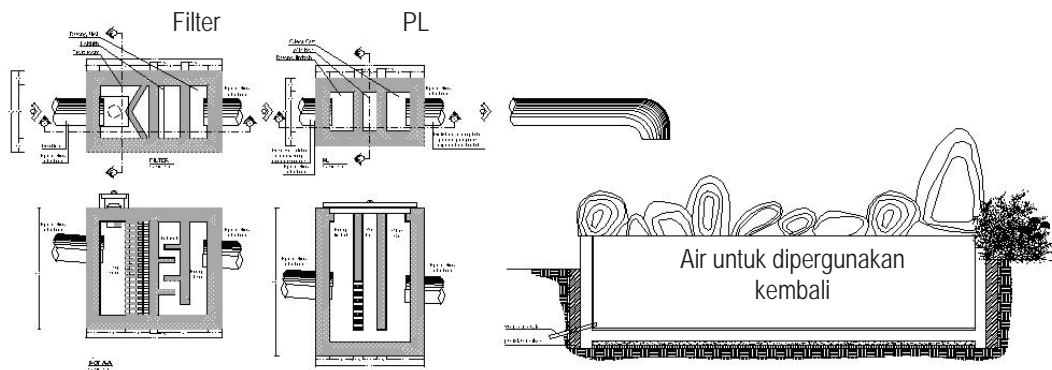
**Gambar 7.** Pelebaran Jalan dan Penataan Areal PKL disekitar Jalan Selokan Mataram (Jalan Gejayan-Seturan)  
Sumber : Desain Pribadi, April 2010.

- 2) Penerapan teknologi hemat energi dengan penggunaan sel *photovoltaic* (sel solar / matahari) sebagai upaya membentuk kawasan sadar energi. Hal ini dilakukan dan ditempatkan pada penataan Jalan yang telah dilakukan pelebaran.
- 3) Penerapan teori keberlanjutan dengan keterlibatan dan sosialisasi dengan masyarakat yaitu merancang masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pemakaian kendaraan bermotor serta mendorong kepekaan masyarakat sekitar terhadap lingkungan.
- 4) Peningkatan kualitas perairan dan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan dengan cara:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- Meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan baik dari aktivitas bisnis kawasan, pemukiman penduduk dan perilaku masyarakat, seperti pembuangan sampah atau limbah menuju ke aliran air Selokan Mataram. (seperti pada penjelasan diatas dengan pengembangan program *water treatment* dan selain itu dengan pengenalan sistem pengolahan limbah sederhana yaitu sistem *bioceramic* pada pemukiman penduduk hal ini dimaksudkan agar sumber air tanah tidak tercemar).
- Melindungi dan meningkatkan mutu lahan.
- Meminimalkan sampah konstruksi dan sampah hasil pehancuran bangunan. Mengembalikan, memakai ulang, serta mendaur ulang sampah dari bidang pekerjaan dan mempraktekkan sifat peduli lingkungan. Dipraktekkan pula dengan memilah tempat sampah, antara sampah organik dan anorganik.



**Gambar 8.** Penerapan Sistem *bioceramic*  
Sumber : Desain Pribadi, April 2010.

Untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran masyarakat dan ketegasan aturan serta sikap peduli lingkungan.

## 5. KESIMPULAN

Dalam mewujudkan kualitas lingkungan Selokan Mataram yang lebih baik maka dilakukan dengan pendekatan konsep keberlanjutan dengan pemikiran jangka panjang bahwa segala usaha yang diupayakan adalah untuk mewujudkan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik nantinya. Hal ini perlu melibatkan berbagai pihak baik itu masyarakat, pemerintah dan ketegasan ataupun kebijakan peraturan bangunan. Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan Selokan Mataram antara lain dengan meningkatkan kualitas visual lingkungan yaitu dengan cara penataan dan pembuatan areal hijau sekaligus untuk jalan inspeksi dan melindungi muka air tanah sehingga tidak terjadi kedangkalan. Penataan visual areal PKL dan pelebaran jalan, pengenalan dan penerapan sistem *water threatment* dan sistem *bioceramic* untuk mencegah pencemaran lingkungan dari limbah penduduk dan aktivitas pencemar lain dari kawasan sekitar Selokan Mataram. Dalam penataan kawasan dilakukan pula dengan penggunaan energi surya atau *photovoltaic* sebagai penerangan jalan.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdurrahman, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Indonesia. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, 2003.
2. Akmal Imelda Studio Architecture, *Sustainable Constuction*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
3. Heinz Frick, Bambang Suskiyatno, *Dasar-dasar Arsitektur Ekologis*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
4. Lechner Norbert, *Heating, Cooling, Lighting Metode Desain untuk Arsitektur* (Edisi Kedua), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
5. <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf>, 2009.
6. [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_berkelanjutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan), April 2010.
7. [http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran\\_Mataram](http://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_Mataram), April 2010.
8. [http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan\\_Saluran\\_Induk\\_Mataram](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Saluran_Induk_Mataram), April 2010.
9. <http://sorinplaton.files.wordpress.com/2008/03/sustanaible-1.jpg>, 2009.
10. <http://forum.tamanroyal.com/pics/anatomy-of-green-building.gif>, 2009.
11. <http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics>, Mei 2010.

**PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN  
PADA KAWASAN LINDUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI  
Studi Kasus DAS Bengawan Solo di Wilayah Jawa Tengah**

Ir. FX. Eddy Arinto, M.Arch.<sup>9)</sup>, Indah Susilowati, S.T.<sup>10)</sup>

**ABSTRACT**

*The development of the region as a result of the development of human needs, infrastructure support and all of the activities encourage land use changing. This condition occurs in both cultivated area and protected area. Land use changing on protected areas can be seen from increasing use in protected area for settlement activity on border area and disaster-prone areas of the river. For it function of protected areas-one of the environmental function-the necessary efforts is to maintain and save the existence of protected areas.*

*A change of land use in protected areas around Bengawan Solo describes the tree levels of change are: high, medium and low. This change of use is happened because of the inconsistency of policy and regulatory implementation.*

*The study approach use a combination model of "less quantitative more qualitative". Quantitative approach is the emphasis on the identification and utilization of land use change on protected areas in the field with the support of quantitative data base. Identification result is then processed through the exploration of variables that are available to provide an overview on the field, which is part of a qualitative approach. This study used qualitative descriptive analysis techniques, qualitative comparative and superimpose on the planning area of both urban and rural areas. Control the use of protected urban areas priority on activities which support efforts to limit the conversion and restore the function of protected areas. In rural areas, controlling the use of protected areas, priority on activities to support the improvement of management system to control and develop the function of protected areas.*

**Keywords:** *changes, utilization, cause factor, rate of change, recommendation.*

**1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan wilayah sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan manusia akan permukiman, infrastruktur pendukung dan segala aktivitasnya, mendorong terjadinya perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi ini terjadi baik pada kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Fenomena menunjukkan bahwa banyak terjadi perubahan dan pemanfaatan alam, dimana kondisi ini akan menyebabkan terjadi penurunan daya dukung lingkungan yang berakibat jauh lebih fatal pada masa yang akan datang. Indikasi ini sudah dapat kita lihat pada masa sekarang dengan semakin banyaknya kawasan rawan bencana alam baik karena faktor alam maupun faktor manusia yang tidak memahami kehendak alam.

Perubahan penggunaan dan pemanfaatan alam pada kawasan lindung dapat dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan dan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung untuk aktivitas permukiman dan aktivitas ekonomi, seperti :

- Permukiman pada kawasan sempadan sungai dan kawasan rawan bencana
- Pertambahan di kawasan pantai dengan menghilangkan hutan bakau
- Pertambangan galian golongan C pada kawasan lindung

---

<sup>9)</sup> Team Leader/ Dosen pada Program Studi Arsitektur FT UAJY

<sup>10)</sup> Asisten Tenaga Ahli/ Sedang mengikuti Pendidikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
UNDIP

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Kondisi ini jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan antisipasi sejak dini maka akan terjadi hal – hal yang cukup fatal, seperti : Penurunan daya dukung lingkungan akibat penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan penggunaannya

Indikasi penurunan daya dukung lingkungan secara rinci adalah :

- a. Semakin berkurangnya kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang (tidak memenuhi kebutuhan).
- b. Semakin meningkatnya kebutuhan daya tampung (misalnya : populasi penduduk yang berlebih).
- c. Semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- d. Banyaknya kawasan rawan bencana alam baik karena faktor alam maupun faktor manusia.
- e. Semakin banyaknya kejadian bencana alam seperti tanah longsor dan banjir

## **2. PERMASALAHAN**

Permasalahan utama yang menjadi prioritas diangkatnya studi ini, yaitu:

1. Seberapa jauh penggunaan dan pemanfaatan lahan sekitar kawasan DAS yang sudah kurang sesuai sehingga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan.
2. Bagaimana tata cara penanganan dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung yang tepat, sebagai upaya dalam penyelamatan kawasan lindung.

## **3. LINGKUP STUDI**

Secara spatial studi ini mengambil kasus kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo dengan focus pada batas administrasi desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan sungai.

Secara Substansial, studi ini mencoba menginventarisasi perubahan yang terjadi dan mencari peluang pemecahannya secara keruangan.

## **4. PENDEKATAN DAN METODE STUDI**

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan campuran dengan model “*less quantitative more qualitative*”. Pendekatan kuantitatif merupakan penekanan terhadap identifikasi perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang terjadi di lapangan dengan dukungan basis data secara kuantitatif. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya diolah melalui proses eksplorasi terhadap variabel yang tersedia untuk menggambarkan fenomena di lapangan, yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif.

Studi ini menggunakan metode dan teknik analisis kualitatif deskriptif, kualitatif komparatif dan superimpose dengan wilayah studi Kawasan Sekitar Sungai Bengawan Solo.

## **5. KARAKTERISTIK KAWASAN LINDUNG**

Karakteristik Kawasan Lindung seperti yang terdapat dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang *Pengelolaan Kawasan Lindung* meliputi :

- 1) **Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya**, meliputi: Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Resapan Air.
  - Kawasan Hutan Lindung:
    - Untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
    - Mencegah terjadinya erosi tanah pada kawasan dengan kelerengan yang terjal
    - Melindungi ekosistem wilayah sub tropis
  - Kawasan Resapan Air :

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

- 2) **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**, meliputi : Kawasan Suaka Alam ( Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Hutan wisata), Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
  - Kawasan Suaka Alam
  - Sebagai upaya untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
  - Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
  - Untuk melindungi kekayaan budaya bangsa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- 3) **Kawasan Perlindungan Setempat**
  - Sempadan Sungai:  
Untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
  - Kawasan Sekitar Danau/Waduk:  
Untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.
  - Kawasan Sekitar Mata Air:  
Untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- 4) **Kawasan Rawan Bencana Alam**  
Untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.meliputi : Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Bencana Lain, meliputi : Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Gempa, Kawasan Rawan Bencana Kekeringan, Kawasan Rawan Kebakaran, dan Kawasan Rawan Angin Ribut.

## **6. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI WILAYAH STUDI**

Masalah Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Lindung secara singkat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Aspek Pemanfaatan Ruang**

Konflik dalam pemanfaatan dan penataan ruang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menimbulkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial berupa peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal dan kegiatan perekonomian seperti industri dan perdagangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya dalam pengelolaan Sumberdaya Air (SDA). Adapun penyebab utama terjadinya konflik pemanfaatan ruang di WS Bengawan Solo, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- a) Semakin berkurangnya luasan kawasan-kawasan konservasi akibat proses konversi lahan untuk fungsi-fungsi budidaya.
- b) Adanya lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk fungsi yang kurang sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui peraturan penataan ruang yang berlaku.
- c) Prasarana dan sarana wilayah yang ada juga merupakan masalah yang cukup besar, hal itu dibuktikan dengan masih adanya ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh belum meratanya prasarana dan sarana wilayah. Prasarana pengairan berupa waduk-waduk dan jaringan pengairan belum mampu memenuhi kebutuhan untuk kegiatan non pertanian.

## **2) Aspek Lingkungan**

Berdasarkan hasil kajian, permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah studi adalah sebagai berikut:

- a) Kerusakan tanah (ekosistem kawasan budidaya lahan bawah) yang disebabkan karena penambangan tanah lempung untuk batu bata. Sebagai contoh terdapat di wilayah Kecamatan Kebonarum, Jogonalan, Klaten yang terdapat di Sub DAS Dengkleng.
- b) Kerusakan lingkungan, tanah, tata air dan sedimentasi embung (ekosistem kawasan penyangga, lahan kering) yang disebabkan karena penambangan bahan endapan vulkan sebagai bahan urug. Sebagai contoh terdapat di Kawasan Mertan, Bendasari, Kabupaten Sukoharjo.
- c) Pencemaran lahan persawahan dan perairan sungai (kawasan budidaya lahan basah) yang disebabkan karena adanya limbah industri kecil. Masalah ini terjadi di Desa Ngemplah Kecamatan Sukoharjo yaitu pada DAS Bengawan Solo.
- d) Pencemaran air sungai (ekosistem kawasan lindung sungai) akibat limbah industri tekstil. Masalah ini terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada DAS Bengawan Solo.
- e) Kerusakan hutan dan sedimentasi waduk (ekosistem kawasan lindung daerah tangkapan waduk) yang disebabkan karena penangkapan batu gamping. Masalah ini terjadi di Desa Puloharjo, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri yaitu pada Sub DAS Alang.
- f) Kerusakan jalur buatan waduk (ekosistem kawasan lindung waduk/ *green belt*) yang diakibatkan karena adanya penambangan batu tufan. Masalah ini terdapat di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri yaitu pada DAS Bengawan Solo.
- g) Kebakaran hutan dan kekeringan (ekosistem kawasan lindung hutan) yang diakibatkan karena kelangkaan akan unsur kesengajaan oknum. Masalah ini terjadi di Desa Karangnongko, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.
- h) Kerusakan sempadan sungai (ekosistem kawasan lindung sungai) yang diakibatkan adanya penambangan. Masalah ini terjadi di Desa Wates, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yaitu pada DAS Bengawan Solo Hulu.
- i) Kerusakan lahan dan hutan lindung (ekosistem kawasan lindung lereng vulkan) yang diakibatkan penambangan teras. Masalah ini terjadi di Desa Gardu Kecamatan Metasih Kabupaten Karanganyar.
- j) Pencemaran lahan sawah (ekosistem kawasan lahan basah/ dataran alluvial) yang diakibatkan adanya limbah industri. Masalah ini terjadi di Desa Karangploso, Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar yaitu pada DAS Bengawan Solo.
- k) Kerusakan lahan hutan perhutani (ekosistem kawasan penyangga perbukitan struktural) yang diakibatkan karena adanya penambangan batu gamping. Masalah ini terdapat di Desa Jekuni, Kecamatan Mendokasi Kabupaten Sragen yaitu di DAS Bengawan Solo.
- l) Kerusakan tebing dan tanggul sungai dan bangunan seperti jembatan (ekosistem kawasan lindung sempadan sungai) yang diakibatkan karena penambangan pasir.



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Masalah lingkungan ini terdapat di Desa Klendungan, Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen yaitu di DAS Bengawan Solo.

**3) Aspek Konservasi Wilayah Sungai**

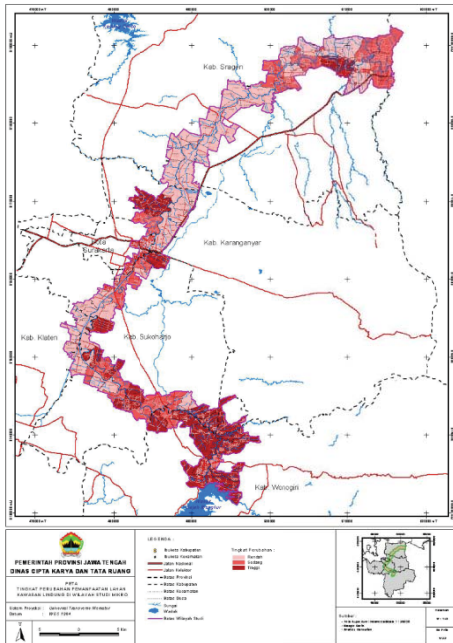
Beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek konservasi (kelestarian sumberdaya tanah dan air) wilayah sungai khususnya di wilayah studi adalah sebagai berikut:

- a) Menurunnya kualitas dan kuantitas air dan sumberdaya air yang terdapat di wilayah studi. Terjadi polusi air yang mempengaruhi tingkat kualitas air, baik itu dari sampah, industri dan bahan kimia yang cenderung mengakibatkan adanya sedimentasi. Kuantitas air merupakan pengaruh terhadap volume air sehingga bisa menyebabkan bencana banjir, kekeringan, longsor dan lain-lain.
- b) Menurunnya kondisi hutan yang merupakan salah satu sumberdaya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian, tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.
- c) Praktik penebangan liar dan konservasi lahan menimbulkan dampak yang luas di WS Bengawan Solo. Dengan semakin meningkatnya lahan kritis yang ada akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri dan konsumsi rumah tangga.
- d) Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan dan memiliki potensi ekonomi belum berkembang seperti yang diharapkan.
- e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumberdaya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan secara cuma-cuma. Terdapat pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan semacam ini perlu diluruskan, agar masyarakat termotivasi untuk turut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup disekitarnya

**7. TINGKAT PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN LINDUNG**

Tingkat perubahan pemanfaatan lahan kawasan lindung merupakan gambaran tingkatan perubahan pemanfaatan lahan kawasan lindung di wilayah studi mikro. Tingkatan ini dihasilkan dari analisis tingkat perubahan penggunaan lahan kawasan lindung di wilayah studi mikro. **Proses analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasikan total nilai perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi di wilayah studi mikro.** Klasifikasi tingkat perubahan pemanfaatan lahan dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu : tinggi, sedang dan rendah dengan metode klasifikasi *Natural Breaks*. Interval Tingkatan perubahan pemanfaatan lahan kawasan lindung:

Tingkat	Interval	Keterangan
I	1,54 – 2,27 dan > 2,27	Tinggi
II	0,76 – 1,53	Sedang
III	0,11 – 0,75	Rendah



**PETA TINGKAT PERUBAHAN  
KAWASAN LINDUNG WILAYAH STUDI  
MIKRO**

Sumber : Hasil Kajian Peneliti, 2010

- TINGKAT PERUBAHAN TINGGI
- TINGKAT PERUBAHAN SEDANG
- TINGKAT PERUBAHAN RENDAH

a) Tingkat Perubahan Tinggi di Perkotaan



– Lokasi: Desa Palur, Kecamatan Mojolaban  
– Keterangan: Kawasan Lindung Sempadan Sungai di perkotaan yang teralih fungsi menjadi permukiman.

a) Tingkat Perubahan Tinggi di Perdesaan



– Lokasi: Desa Nguter, Kecamatan Nguter.  
– Keterangan: Kawasan Lindung Sempadan Sungai di perdesaan yang teralih fungsi menjadi permukiman.

b) Tingkat Perubahan Sedang di Perkotaan



– Lokasi: Desa Telukan, Kecamatan Grogol.  
– Keterangan: Kawasan Lindung Sempadan Sungai di perkotaan yang teralih fungsi menjadi permukiman.

b) Tingkat Perubahan Sedang di Perdesaan



– Lokasi: Desa Dawung, Kecamatan Jenar.  
– Keterangan: Kawasan Lindung Sempadan Sungai di perdesaan yang teralih fungsi menjadi permukiman.

c) Tingkat Perubahan Rendah di Perkotaan



- Lokasi: Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Sukoharjo
- Keterangan: Kawasan Lindung Sempadan Sungai di perkotaan yang teralih fungsi menjadi perkebunan.

c) Tingkat Perubahan Rendah di Perdesaan



- Lokasi: Desa Tambakboyo, Kecamatan Sukoharjo.
- Keterangan: Kawasan Lindung Sempadan Sungai di perdesaan yang teralih fungsi menjadi perkebunan.

## 8. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN TIPOLOGI PERUBAHAN

Secara umum, penyebab perubahan penggunaan kawasan lindung di kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo, adalah :

### a) Aspek Kebijakan dan Peraturan

- Adanya kebijakan pengembangan wilayah yang mempengaruhi perkembangan wilayah, seperti : kebijakan pengembangan struktur ruang dan sistem transportasi wilayah.
- Adanya konflik dalam pemanfaatan dan penataan ruang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menimbulkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial berupa peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal dan kegiatan perekonomian seperti industri dan perdagangan.

### b) Aspek Perkembangan Wilayah

- Perkembangan wilayah yang menuntut adanya ketersediaan lahan dan ruang.
- Kebutuhan ruang untuk menampung aktivitas utama penduduk dan semua aktivitas penduduk, seperti : permukiman, perdagangan jasa dan lain-lain.
- Nilai lahan yang tidak seimbang, sehingga masyarakat memilih lahan yang cenderung bernilai rendah bahkan memilih lahan yang memiliki status kepemilikan ilegal, seperti : kawasan bantaran sungai.

### c) Aspek Lingkungan

- Terjadinya bencana alam yang mempengaruhi ketersediaan lahan kawasan lindung, seperti : longsor, gempa, banjir dan lain-lain.
- Pencemaran air sungai (ekosistem kawasan lindung sungai) akibat limbah industri tekstil.

### Tipologi Perubahan di Perkotaan

Perubahan pemanfaatan kawasan lindung di perkotaan secara umum disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki daya tarik kuat untuk penduduk bermukim.
- Kawasan perkotaan memiliki lahan yang dapat dijadikan komoditas investasi.
- Kawasan perkotaan merupakan pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang menjadi tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

- Kawasan perkotaan memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Beberapa faktor diatas, merupakan penyebab terjadinya perubahan kawasan lindung di perkotaan dengan jenis perubahan yang tentunya lebih kepada fungsi terbangun. Hal itu dikarenakan kawasan perkotaan cenderung lebih dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan kawasan budidaya untuk mawadahi kebutuhan ruang dalam segala aktivitas pendukungnya. Perubahan dengan fungsi terbangun misalnya : untuk perumahan permukiman, infrastruktur perumahan, sarana pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan lain-lain.

### **Tipologi Perubahan di Perdesaan**

Perubahan pemanfaatan kawasan lindung di perdesaan secara umum disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- Kurangnya informasi mengenai aturan pemanfaatan kawasan lindung di masyarakat perdesaan, sehingga masyarakat memanfaatkan kawasan lindung untuk kawasan budidaya.
- Kawasan bantaran sungai di perdesaan merupakan kawasan yang subur. Hal ini mendorong peningkatan aktivitas masyarakat disektor pertanian dan peternakan.
- Kawasan perdesaan lebih memiliki ketersediaan lahan yang relative murah dan mampu menampung kebutuhan ruang untuk mendukung kegiatan pembangunan, misalnya: untuk pembangunan pabrik/ industri rumah tangga ("kemudahan pembuangan limbah"), pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang lain.

Beberapa faktor diatas, menunjukkan penyebab terjadinya perubahan kawasan lindung di perdesaan dengan jenis perubahan yang tentunya lebih kepada fungsi non terbangun. Hal itu dikarenakan kawasan perdesaan cenderung lebih dimanfaatkan masyarakat sebagai wadah kegiatan dalam mendukung aktivitas utama (bermukim), misalnya : aktivitas bertani, berkebun, beternak dan lain-lain. Perubahan dengan fungsi non terbangun lainnya dapat dikemukakan yaitu sebagai lahan pertanian sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegal/kebun, padang rumput untuk berternak dan lain-lain.

## **9. REKOMENDASI**

Persoalan utama mengenai penyimpangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan lindung adalah kurang-sadaran masyarakat akan fungsi kawasan lindung dan kurang konsistennya pelaksanaan peraturan. Maka rekomendasi pertama dan bersifat umum yang dapat diajukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan lindung adalah peningkatan pendidikan bagi masyarakat tentang lingkungan hidup. Yang kedua, adalah pelaksanaan yang konsisten dari peraturan yang telah dibuat. Sebelum kedua hal ini dapat dijalankan maka tentu diperlukan langkah-langkah kreatif yang saling menguntungkan.

Secara rinci rekomendasi pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dirumuskan mempertimbangkan tipologi perubahan pemanfaatan lahan kawasan lindung yang terjadi di wilayah studi. Masing-masing rekomendasi akan dibedakan dalam tingkat perubahan pemanfaatan lahan kawasan lindung yang disesuaikan dengan tipologi perubahan pemanfaatan lahan kawasan lindung. Selengkapny rumusan rekomendasi diuraikan sebagai berikut :

### **Untuk Kawasan Perkotaan :**

Berdasarkan faktor penyebab dan jenis perubahan fungsi kawasan lindung yang cenderung beralih fungsi sebagai lahan terbangun, maka rekomendasi pengendalian pemanfaatan kawasan lindung lebih diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung upaya

---

**membatasi alih fungsi dan mengembalikan fungsi kawasan lindung.** Sedangkan rumusan rekomendasi akan disajikan pada masing-masing tingkat perubahan tinggi, sedang dan rendah di perkotaan dengan fokus kegiatan rekomendasi yaitu :

- Tinggi : diprioritaskan pada kegiatan yang langsung dapat diimplementasikan dalam **upaya pembatasan, penghentian alih fungsi serta pengembalian** fungsi kawasan lindung.
- Sedang : diprioritaskan pada kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam **upaya pencegahan alih fungsi dan antisipasi** terjadinya alih fungsi dalam pengendalian fungsi kawasan lindung.
- Rendah : diprioritaskan pada kegiatan yang dapat diimplementasikan secara bertahap dalam **upaya memperingatkan dan mengendalikan** terjadinya alih fungsi.

#### **Untuk Kawasan Pedesaan :**

Berdasarkan faktor penyebab dan jenis perubahan fungsi kawasan lindung yang cenderung beralih fungsi sebagai lahan non terbangun, maka rekomendasi pengendalian pemanfaatan kawasan lindung lebih diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung upaya **meningkatkan sistem pengelolaan dalam mengendalikan dan mengembangkan fungsi kawasan lindung.** Sedangkan rumusan rekomendasi akan disajikan pada masing-masing tingkat perubahan tinggi, sedang dan rendah di pedesaan dengan fokus kegiatan rekomendasi sebagai berikut :

- Tinggi : diprioritaskan pada kegiatan yang langsung dapat diimplementasikan dalam **upaya mempertahankan dan mengendalikan** fungsi kawasan lindung.
- Sedang : diprioritaskan pada kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam **upaya pelestarian fungsi kawasan lindung.**
- Rendah : diprioritaskan pada kegiatan yang dapat diimplementasikan secara bertahap dalam **upaya mengembangkan fungsi kawasan lindung.**

#### **Intervensi Arsitektural Yang Memungkinkan**

Studi ini telah menjawab permasalahan, bahwa perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan disepanjang kawasan lindung Bengawan Solo telah banyak menyalahi peruntukannya. Telah diketahui pula bahwa faktor penyebab terutama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi kawasan lindung. Peraturan yang berisi tata cara penanganan dan pemanfaatan telah disiapkan namun pada kenyataan sulit sekali diterapkan, apalagi yang menyangkut pemukiman padat di bantaran sungai.

Untuk itu diperlukan pendekatan kreatif dan manusiawi dalam tata cara penanganan dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan dapat dilakukan dengan intervensi arsitektural. Contoh intervensi arsitektural yang menarik adalah kasus pengembalian fungsi lindung di Pucang sawit, Jebres, Surakarta. Pada awalnya, kawasan ini dihuni pemukiman padat penduduk sepanjang DAS Bengawan Solo. Kawasan ini adalah kawasan rawan banjir. Program yang mendahului adalah relokasi penduduk ke tempat pemukiman yang baru. Syarat pemukiman yang baru agar penduduk mau untuk pindah adalah dengan melakukan sosialisasi terutama berkaitan dengan bahaya banjir yang mengancam. Prasyarat lingkungan yang baru juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kualitas lingkungan yang baru harus minimal sama dengan kualitas lingkungan pemukiman sebelumnya. Kualitas lingkungan yang dimaksud tidak hanya dari kenyamanan untuk tinggal saja namun juga akses untuk kegiatan ekonomi harus dapat dijamin keberlangsungannya.

Fungsi arsitektural lain yang memungkinkan untuk di "infill" untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung di seputar DAS adalah tempat rekreasi seperti *Playground*, Tempat Olah Raga Terbuka, Taman Kota, Tempat Pemancingan ataupun tempat bermain.

"Punishment/stick" hanya dapat diterapkan ketika masyarakat sudah paham dan sadar akan pentingnya kawasan lindung. Pra kondisi masyarakat menjadi sesuatu yang wajib

dipertimbangkan apabila ingin mengembangkan kawasan yang berkelanjutan. Dan dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, agar tidak terjadi gejolak sosial, rasanya "reward/carrot" lebih didahulukan.

## 10. DAFTAR REFERENSI

1. Creswell, John. W. 1994. *Research Design: Qualitative dan Quantative Approaches*. London: Sage Publications.
2. Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang *Pengelolaan Kawasan Lindung*
3. Peckham, Alexander, 1991, *Changing Landscapes, Green Issues Thinking for the Future*, Gloucester Press.
4. Philip, H. Lewis, Jr. 1996, *Protecting Environmental Coridor, Tomorrow By Design, A Regional Design Process for Sustainability*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
5. Rejeki, Sri, *Relokasi dan Permainan Solusi Cegah Banjir*, Kompas, Jumat, 20 April 2012.
6. Steele, James, 1997, *Sustainable Architecture, Principles, Paradigms, and Case Studies*, New York, McGraw Hill.
7. Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

**KELOMPOK C**

**ARSITEKTUR DAN KOTA**





**KAJIAN URBAN VILLAGES PADA KAMPUNG ASLI KOTA**  
**Studi Kasus: Kampung Sekayu Semarang**

**Fariz Syaiful Bahar<sup>1)</sup>, Eko Nursanty<sup>2)</sup>**  
Mahasiswa Program Studi Arsitektur<sup>1)</sup>  
Dosen Program Studi Arsitektur<sup>2)</sup>  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang<sup>1,2)</sup>  
E-mail : [farizsyaifulbahar@yahoo.com](mailto:farizsyaifulbahar@yahoo.com)<sup>1)</sup>  
E-mail : [santy@archuntagsmg.co.cc](mailto:santy@archuntagsmg.co.cc)<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*Di Indonesia ada banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan adatnya melalui berbagai cara. Di antaranya tetap mempertahankan kondisi lingkungan dan cara hidup yang selama ini dianutnya. Semarang, salah satunya, juga memiliki sejarah berbeda dan keunikan tersendiri sehingga tradisi serta keaslian kampung yang dimilikinya harus tetap terjaga. Selain itu faktor cuaca juga perlu di perhatikan agar tidak terjadi bencana yang dapat merusak lingkungan itu sendiri, dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan topografi sebuah kampung asli yang menjadi "babat alas" sebuah kota. Suatu kampung asli bisa hilang karena faktor cuaca dan kerusakan lingkungan, seperti kampung Senik di Demak, Jawa Tengah. Salah satu yang sangat disayangkan adalah keterancaman hilangnya Kampung Sekayu dari peta sejarah masa depan Kota Semarang, karena Kampung Sekayu merupakan kampung asli yang memiliki bangunan cagar budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan budaya lokal yang memiliki dimensi cukup luas. Bukan hanya sekedar mempertahankan fisik bangunannya namun juga kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan manfaat yang ingin dicapai dari terbentuknya budaya lokal adalah menumbuhkan spirit dari masyarakat. Selain itu, nilai komersial dari sebuah kota harus tetap dijaga walaupun arah pengembangannya mempertahankan nilai budaya lokal.*

*Seperti halnya dengan kota taman dan gerakan kota baru pada abad terakhir ini, kita kembali menemukan diri kita mencari solusi jangka panjang yang dapat mengatasi secara cepat dan berkelanjutan masalah perkotaan yang sekarang kita hadapi. Kini dirasa perlu dimulai kebijakan renaissance perkotaan yang pada intinya memiliki visi yang mencoba untuk membangun kembali kota-kota sebagai wilayah yang berkembang dan menarik. Menjadikan lingkungan memiliki peran sentral dalam proses ini, untuk lingkungan perkotaan yang memiliki dasar utama sosial dan fisik yang akan membuat kota-kota kita akan berkembang.*

**Keywords:** kampung asli, sekayu, semarang, urban village.

## **1. PENDAHULUAN**

Berkurangnya kampung yang ada di kota Semarang terjadi karena beberapa masalah. Hal ini menjadi suatu kerugian bagi sebuah kota, karena dengan hilangnya sebuah kampung, maka hilang juga sebuah sejarah yang menjadi "babat alas" suatu kota. Sangat di sayangkan jika generasi-generasi yang akan datang hanya dapat mengenang bahwa dahulu ini adalah sebuah kampung.

Warga juga menjadi korban kerugian hilangnya sebuah kampung, karena kampung merupakan tempat tinggal dan bersosialisasi terhadap masyarakat. Jika kampung digusur lalu tidak mendapatkan tempat lingkungan yang tidak sesuai ini menimbulkan suatu masalah sosial. Dimana sebuah keluarga harus kembali beradaptasi di lingkungan yang baru, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga tersebut.

### **The Village Model**

Di akhir 1980-an konsep desa urban dikembangkan sebagai pendekatan penting dan layak untuk menciptakan sukses dan tahan lama lingkungan. Ia muncul sebagai cara untuk mengurangi kegagalan terkemuka di perkotaan. Perencanaan masa lalu kita lebih baru dan sarana untuk mengevaluasi dan membangun kembali banyak dari prinsip-prinsip gambaran sukses kota-membuat yang telah dengan kami selama berabad-abad. Tempat-tempat seperti telah menyediakan beberapa tempat paling populer hidup, untuk itu jelas bahwa orang-orang memilih untuk tertarik ke arah berhasil, sering kompak, perkotaan lingkungan yang memberikan vitalitas dan dekat dengan banyak. Fasilitas yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi harus diingat bahwa ini menarik dan terpadu lingkungan perkotaan tidak hanya terjadi oleh mereka sendiri sesuai mereka telah diciptakan oleh pilihan, suara desain dan efisien organisasi.

Bagi banyak istilah 'perkotaan desa' muncul di pertama membingungkan, yang hampir sempurna oxymoron bahwa meskipun bawaan akrab, diproyeksikan berpotensi ambigu dan bahkan penderita skizofrenia identitas. Itu mungkin, namun sendiri masuk akal, untuk mencoba menempatkan ideal pesona desa dalam besar dan kadang-kadang bermusuhan perkotaan lingkungan? ' Bagaimana Anda bisa memiliki tempat yang terasa seperti desa dan kota besar pada saat yang sama?' bertanya David Sucher. Desa ini kecil, akrab, dan tenang. salah satu tahu warga lainnya dan mungkin bahkan berhubungan dengan mereka. Kota ini besar, sibuk, beragam dan penuh dengan orang asing. Hidup dapat menjadi kesepian di kota besar. (Sucher, 1995)

Dalam penguraian kompleksitas yang ada di balik istilah itu bernilai mungkin risiko bahaya beberapa prinsip-prinsip formatif atas yang kami pusat-pusat perkotaan telah dibangun — karena di sini terdapat banyak esensi dan tujuan untuk membuat tempat perkotaan. Meskipun duta dan Stout's luas kota. Pembaca memberikan jauh lebih komprehensif daripada yang dapat dicapai di sini, salah satu yang paling ringkas dan tahan lama definisi dapat dihubungkan dengan Aristoteles: Kota harus dibangun untuk memberikan penduduknya keamanan dan kebahagiaan. (Sitte, 1979)

'Apakah kota itu?' dipertanyakan Lewis Mumford dalam edisi tahun 1930-an *Architectural Record*. (Mumford, 2011) Ini adalah ' plexus geografis, organisasi ekonomi, proses kelembagaan, teater aksi sosial, dan simbol dari persatuan kolektif. Pada 1960-an Jane Jacobs, dari siapa kita akan belajar lebih dalam berikut. Bab, menyarankan bahwa ' nilai nyata dari kota terletak dalam perbedaan mereka, berbagai arsitektur, penuh jalan kehidupan dan manusia skala. Hanya ketika kita menghargai mendasar seperti realitas yang kita bisa berharap untuk membuat kota-kota yang aman, menarik dan ekonomis, juga sebagai tempat bahwa orang ingin tinggal di. (Jacobs, 1961) Pasti seperti kritikus perkotaan yang penting dan dihormati mampu jelas mengartikulasikan penghargaan kompleksitas dan vitalitas yang melekat dalam lingkungan perkotaan kami tapi di mana melakukan karakteristik dari desa sesuai dengan ini?

Kualitas bawaan desa seperti-keamanan, sociability dan tujuan ekonomi masih menyediakan banyak bahan-bahan penting yang ditemukan dalam kami berhasil, dan sangat dicintai, lingkungan. Mereka menetapkan patokan atas mana keberhasilan ada tempat dan perkembangan baru yang dihargai dan diukur. Sangat mudah untuk mengenali dan mengidentifikasi tempat-tempat di mana kualitas ini diwujudkan, dan tentu saja literatur perkotaan desa erat selaras dirinya dengan karakteristik tempat-tempat seperti Rye di Sussex, Richmond di Yorkshire dan lingkungan yang Clerkenwell di London. Namun kita terus-menerus menemukan diri kita melawan paradoks yang meskipun kita memahami dan menghargai sifat-sifat ini, banyak dari kami baru lingkungan perkotaan gagal untuk menyampaikan harapan seperti dihargai. ' Mengapa, diberikan bahwa lingkungan perkotaan tradisional bekerja sangat baik di masa lalu, kita tampaknya tidak mampu membangun tempat dengan kualitas ini sama hari ini?' mempertanyakan Pangeran Wales pada awal kampanye desa Urban pada tahun 1990. (T.Aldous, 1992)

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Banyak dari jawaban terletak pada kenyataan bahwa untuk selama abad ke perencana dan arsitek telah diberikan hampir kebebasan untuk percobaan akan dengan sebagian besar kota-kota dan kota-kota kita. Gelombang setelah gelombang teoritis telah membawa baru dan pendekatan yang kontras dengan cara kami lingkungan perkotaan telah diizinkan untuk mengubah kadang-kadang lebih baik, tetapi sering untuk lebih buruk. Banyak dari awal upaya untuk menciptakan komunitas baru muncul melalui reaksi nyata dan dirasakan eksese yang mengeluarkan revolusi industri di kota-kota kita dan warga negara. Dipimpin oleh sejumlah orang terkemuka, mereka berusaha untuk membuat segera, ideal dan abadi masyarakat yang. Terdapat berbagai keyakinan industri, agama dan politik. Banyak ini direncanakan perkembangan, termasuk orang-orang seperti Port sinar matahari, Bournville dan Saltaire, diletakkan di tahun 1800-an, telah jelas mempengaruhi bentuk dan arsitektur kosakata dari lingkungan perkotaan kita saat ini. Beralih kepada Gillian Darley cermat direferensikan *Villages and Vision*. (Darley, 1975) Anda dapat melihat evolusi komunitas model ini secara rinci, untuk itu jelas bahwa mereka masih menyediakan laten inspirasi bagi banyak lingkungan lebih berhasil dirancang di Britania dan luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kota Semarang merupakan kota perdagangan. Kota ini telah ada sejak zaman kolonial, dan pada saat itu merupakan salah satu akses perdagangan di Asia Tenggara. Sejak zaman dahulu terbentuk beberapa kampung yang memiliki sejarah masing-masing, dan hingga saat ini kampung itu menjadi kampung asli kota Semarang.

Kawasan yang didalamnya terdapat kampung asli mayoritas hanya ada di wilayah Semarang bagian utara dan tengah, karena selain di kawasan tersebut belum ada kampung yang terbentuk. Dari kedua kawasan tersebut masih terbagi menjadi empat bagian, yaitu kawasan Kampung Melayu, kawasan Pekojan, kawasan Mataram dan kawasan Bodjong yang kini berubah menjadi jalan Pemuda.

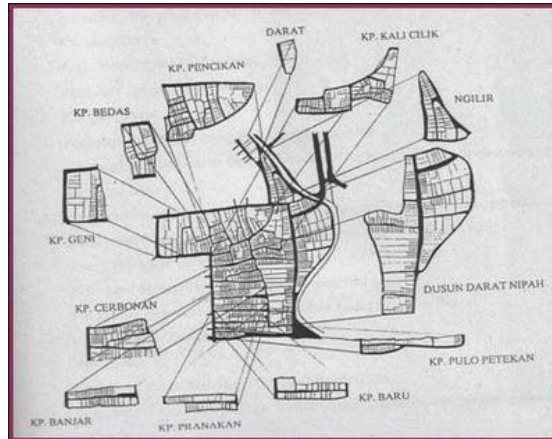
Jumlah kampung asli yang berada di kota Semarang cukup banyak, khususnya yang berada di kawasan kota “tengah”, karena zaman dahulu kawasan tersebut merupakan awal dari terbentuknya kota Semarang. Berdasarkan pembagian wilayah, ada beberapa zoning keberadaan kampung asli Semarang.

### **- Kawasan Kampung Melayu**

Blok - blok permukiman di Kampung Melayu terjadi karena adanya proses pengelompokan sosial, berdasarkan pada kekerabatan dan identitas etnik penghuninya. Dalam perkembangannya muncul toponim blok - blok permukiman untuk menunjukkan tempat bermukim mereka secara spesifik, dan juga menunjukkan keberadaan tempat(space)tersebut pada suatu lingkungan binaan tertentu. Munculnya toponim (nama) blok permukiman di Kampung Melayu berdasarkan fenomena pada waktu itu. Misalnya muncul sebutan "spesifik" karena kondisi topografinya (pohon, rawa, sungai, daratan), asal - usul penduduknya (Banjar, Pecinan, Cirebonan), dan adanya peristiwa penting pada kawasan tersebut (Kampung Geni, Kampung Baru).

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---



**Gambar 1.** Toponim Kawasan Kampung Melayu Semarang

Pola tatanan permukiman menunjukkan adanya toponim dan pengelompokan blok permukiman, menunjukkan fenomena historis pada waktu itu, yaitu antara lain :

1. Kampung Darat  
Arti : tempat ( daratan ) orang pertama kali menapakan kakinya setelah melakukan pelayaran di laut  
Penduduknya : perantau dan pedagang dari berbagai etnik, setelah dipindahkannya pelabuhan Mangkang ke boom Lama.
2. Kampung Hilir  
Arti : hilir atau tempat sungai mengalir  
Penduduk : kebanyakan orang Madura dan Bugis
3. Kampung Kali Cilik  
Asal usul nama : di daerah tersebut terdapat sungai kecil (Kali Cilik), salah satu anak sungai Kali Semarang.  
Penduduk : kebanyakan orang Melayu dan Banjar  
Keterangan : dulu Kali Cilik dapat dilalui oleh perahu kecil. dan sampai dengan tahun 1955 kapal keruk (sarana untuk membersihkan sungai) masih bisa masuk Kali Cilik.
4. Kampung Pencikan  
Asal usul nama : Encik adalah sebutan perempuan dari Malaka  
Penduduk : kebanyakan orang Melayu
5. Kampung Geni  
Asal usul nama : geni adalah api ( bahasa Jawa )  
Penduduk : kebanyakan orang pribumi pedalaman  
Keterangan : pada awalnya kawasan ini dikenal dengan sebutan "deni". Tahun 1975 daerah ini terbakar, kira - kira 200 meter persegi lahan permukiman terbakar. Sejak itu daerah ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Geni.
6. Kampung Cerbonan  
Arti : kota Cirebon  
Penduduk : mayoritas orang perantau dari Cirebon
7. Kampung Banjar  
Arti : etnik Banjar (Kalimantan)  
Penduduk : mayoritas orang Banjar
8. Kampung Baru  
Penduduk : mayoritas orang Banjar dan orang Arab  
Keterangan : diperkirakan blok ini muncul belakangan, sehingga disebut dengan Kampung Baru.
9. Kampung Peranakan  
Asal usul kata : peranakan atau campuran

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Arti : hasil dari perkawinan dua budaya yang berbeda

Penduduk : mayoritas keturunan peranakan antara Arab dengan koja dan Banjar

10. Kampung Pulo Patekan

Arti : Pulau

Penduduk : mayoritas orang pribumi dari pedalaman

Keterangan : blok permukiman ini dikelilingi oleh jalan, menyerupai pulau di tengah lautan.

11. Kampung Bedas

Arti : tidak diketahui secara pasti

Penduduk : Orang Arab Hadramaut

Keterangan : daerah ini termasuk kawasan Pesantren Darat

12. Kampung Darat Nipah

Asal usul nama : tidak diketahui pasti

Penduduk : kebanyakan orang Cina dan Arab Hadramaut

Keterangan : kawasan ini terbagi menjadi tiga segmen (zona), yaitu Belanda (pergudangan dan kantor dagang), Cina (Pasar Regang) dan Arab (permukiman).



**Gambar 2.**Foto Kawasan Kampung Melayu Semarang  
(foto diambil tahun 2011)

- Kawasan Pekojan

Kawasan kampung Pekojan merupakan salah satu kawasan pusat perekonomian kota Semarang. Pekojan berasal dari kata “koja” yang berarti orang Jawa keturunan Arab, hal ini dikarenakan saat itu kampung ini banyak didominasi oleh orang – orang pendatang dari Gujarat, dan timur tengah. Karena pesatnya perekonomian saat itu, membuat warga etnis tionghoa tertarik untuk berdagang di kawasan itu, sehingga sampai saat ini tak heran banyak masyarakat tionghoa yang menjadi penduduk sekitar kawasan pekojan, terbukti dengan banyaknya kelenteng dan tempat peribadatan warga tionghoa, tak terkecuali bangunan yang memiliki karakter timur tengah seperti masjid dan bangunan rumah tinggal.

Di kawasan Pekojan terdapat beberapa kampung asli yang masih ada hingga saat ini :

1. Kawasan Gang Pinggir
2. Gang Besen
3. Gang Tengah
4. Gang Warung
5. Kampung Petudungan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

6. Kampung Gambiran
7. Kampung Purwodinatan
8. Kanjengan

Dari nama – nama kampung tersebut, kampung Gambiran merupakan kampung tertua di kawasan Pekojan, daerah tersebut sampai saat ini masih produktif dalam hal kerajinan patung batu. Walau hanya ada beberapa rumah yang berpenghuni, kampung Gambiran cukup dikenal dari penjurukota Semarang.

Sedangkan Gang Pinggir hingga saat ini menjadi pusat perekonomian dari kawasan Pekojan, karena merupakan salah satu akses masuk kota Semarang bagian tengah. Gang Besen saat ini berfungsi sebagai kawasan perbankan di kawasan Pekojan.

Nama yang disebut terakhir adalah daerah yang kini menjadi tempat pedagang Pasar Johar berjualan. Kanjengan berasal dari kata “kanjeng” yang berarti raja, yang saat itu merupakan Kantor Bupati Semarang, sebelum Semarang menjadi Kotamadya.

Di Semarang banyak sekali peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih bisa kita temukan hingga sekarang, bangunan yang dibangun sejak zaman penjajahan tersebut tidak hanya berwujud perkantoran yang dulunya diperuntukkan pemerintah kolonial maupun swasta atau benteng saja, namun juga banyak tempat ibadah.

Salah satu tempat ibadah yang dibangun pada zaman kolonial Belanda tersebut Masjid Jami Pekojan yang berada di Jalan Petolongan Semarang. Menilik dari prasasti yang ditemukan di dinding dalam masjid itu jelas masjid tersebut dibangun pada tahun 1309 Hijriah atau 1878 Masehi.

Selain itu masih banyak jam kuno di tempel di beberapa bagian dinding masjid, menurut Ngatiman ada salah satu jam kuno yang merupakan hadiah dari salah satu pabrik rokok Nithisumito Kudus. Hebatnya lagi meski jam-jam dinding itu kuno namun hampir semuanya masih berdetak hingga sekarang. Bukan hanya jam dinding kuno saja, pintu dan kaca patri pintu warna warni khas tempo dulu.

Masjid ini dulunya hampir semuanya di kelilingi makam, hingga saat ini makam-makam tersebut masih ada dan terawat baik. Makam yang banyak dikunjungi oleh peziarah di Masjid Jami Pekojan ini merupakan makam keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yakni Syarifah Fatimah binti Syekh Abu Bakar.

- **Kawasan Mataram**

Jalan Mataram yang kini bernama Jalan MT Haryono juga merupakan salah satu akses kota Semarang bagian tengah, selain karena berada di tengah kota, saat ini kawasan Mataram menjadi pusat pertokoan dari berbagai macam kebutuhan. Di kawasan Mataram terdapat beberapa kampung asli yang telah ada zaman dahulu.

1. Kampung Bustaman
2. Kampung Brondongan
3. Kampung Jagalan
4. Kampung Petolongan
5. Kampung Gandhekan
6. Kampung Kulitan
7. Kampung Batik
8. Kampung Pandean
9. Kampung Yusup

Kampung asli yang berada di kawasan Mataram juga merupakan sentra perdagangan, seperti kampung Pandean, merupakan sentra produk makanan khas Semarang wingko babat, sedangkan kampung Batik adalah pusat produksi Batik Semarang, namun saat ini hanya ada beberapa rumah yang hanya memproduksi.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Kampung Bustaman juga merupakan kampung penghasil daging kambing, karena di kampung tersebut ada beberapa warga yang berprofesi sebagai jagal kambing, sehingga Bustaman terkenal sebagai kampung penghasil daging kambing.

- Kawasan Bodjong (jalan Pemuda)

Jalan Bodjong yang kini berubah nama menjadi jalan Pemuda juga memiliki kampung yang ada sejak zaman kolonial Belanda. Saat ini masih ada beberapa kampung yang masih ada di toponim Kota Semarang, bahkan ada yang telah hilang karena tergusur oleh bangunan-bangunan baru.

Beberapa kampung di wilayah Bodjong antara lain :

1. Kampung Sekayu
2. Kampung Basahan
3. Kampung Gendingan
4. Kampung Benjol
5. Kampung Bedagan
6. Kampung Patihan
7. Kampung Jayenggaten
8. Kampung Petempen

Dari beberapa kampung yang ada di kawasan Bodjong, ada yang telah hilang dari toponim kota Semarang, yaitu Kampung Benjol dan Kampung Jayenggaten, terakhir pada tahun 2006, Kampung Jayenggaten telah menjadi milik bangunan Hotel Gumaya. Saat ini kamung tersebut menjadi lahan parkir hotel yang merupakan terbesar di Kota Semarang.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kampung Sekayu merupakan salah satu kampung asli kota Semarang yang masih eksis hingga saat ini, walaupun ada beberapa blok yang telah hilang karena adanya bangunan tinggi di sekitarnya.

Hasil dari penelitian berdasarkan survey lapangan dan melakukan kuesioner terhadap masyarakat yang tinggal di kota Semarang menunjukkan bahwa, sebagian masyarakat usia remaja hingga dewasa pernah melintasi jalan Pemuda untuk mengunjungi Mall Paragon, dan sebagian memarkirkan motornya di kampung Sekayu. Walaupun berada persis di samping Mall Paragon yang mereka lewati, yang saat ini menjadi permasalahan antara Kampung Sekayu dengan Pihak dari Mall Paragon karena lahan sekitar kampung sekayu akan dibeli untuk dibuat gedung baru, namun banyak juga yang tidak tahu nama kampung Sekayu.



**Gambar 3.** Kampung Sekayu bersebelahan dengan Mall Paragon  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
"Sticks and Carrots"  
Reward and Punishment

---



**Gambar 4.** Kampung Sekayu di balik Mal Paragon  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)

Ada beberapa aspek yang membedakan Sekayu dengan kampung asli Semarang yang lain, yaitu adanya elemen asli berupa Masjid peninggalan wali dan rumah penduduk asli yang memiliki karakter khas Semarang.



**Gambar 5.** Saka Guru Masjid At-Taqwa yang menjadi keunikan Kampung Sekayu  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)



**Gambar 6.** Salah satu rumah asli Sekayu yang masih tersisa  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Dari pantauan peneliti, ada beberapa rumah yang telah di beli oleh pihak Mall Paragon untuk dijadikan tempat parkir. Bahkan hanya menyisakan kantor Kelurahan Sekayu saja.



**Gambar 7.** Beberapa rumah telah di bongkar untuk keperluan parkir  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)



**Gambar 8.** Akses masuk kampung telah menjadi lahan parker  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)

Beberapa masyarakat tahu nama kampung Sekayu karena pernah berkuliner/jajan di angkringan yang ada di pinggir jalan.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**



**Gambar 9.** Akses utama kampung menjadi tempat kuliner  
(Sumber : Hasil Survey Lapangan)

Bahkan banyak juga masyarakat yang tidak tahu bahwa di kampung Sekayu terdapat masjid peninggalan para wali yang merupakan masjid tertua di kota Semarang. berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan kampung sekayu tidak banyak diketahui masyarakat semarang, dan dari hasil survey yang mengetahui keberadaan kampung sekayu adalah dari beberapa pengunjung, karyawan mall, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki yang sering melakukan aktivitas disekitar kampung Sekayu.

Dan dari hasil survey yang peneliti dapat, ada empat kawasan kampung asli yang kini masih tetap keberadaannya yaitu kawasan Kampung Melayu / layur, kawasan pekojan, kawasan Mataram dan kawasan Bodjong yang kini berubah nama menjadi Jalan Pemuda.

**Tabel 1:** Tabulasi Data Penelitian Kampung Sekayu

<b>Masalah Penelitian</b>	<b>Kerangka Teori (variabel)</b>	<b>Populasi/ Sampel</b>	<b>Alat Penelitian</b>	<b>Cara Mendapatkan Data</b>
Bekurangnya Kampung Asli Semarang	Elemen asli : - Masjid - Rumah penduduk asli	- Rumah asli kampung Sekayu - Masjid	- Peta Kota Semarang - Peta penyebaran rumah asli	Observasi Survey wawancara

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran terkait adaptasi kawasan kampung yang ada semarang terhadap perubahan kearifan lokal, sebagai berikut :

1. Kawasan bersejarah perkotaan menyimpan potensi nilai budaya dan kearifan lokal baik yang bersifat tangible dan intangible baik berupa adat istiadat, norma, tata

aturan, artefak arsitektur dan sebagainya yang pada dasarnya merupakan strategi adaptasi masyarakat.

2. Artefak-artefak arsitektur berupa bangunan, landmark ataupun rumah tradisional dikawasan bersejarah perkotaan dengan nilai kearifan lokalnya merupakan kekayaan dalam variasi khasanah arsitektur tradisional di Indonesia, yang dapat memberikan kontribusi positif sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutamaterkait dengan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan iklim.
3. Terdapat peluang integrasi nilai kearifan lokal secara cerdas dalam perencanaan.
4. Nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang secara turun temurun perlu di inventarisasi dan dilestarikan sebagai aset sosial budaya masyarakat setempat dan untuk menjaga kesinambungan masa lalu, sekarang dan masa depan.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

1. Darley, G. (1975). *Villages of Vision*. London: Architectural Press.
2. F.Stout, R. a. (2000). *The City Reader (2nd edn)*. London: Routledge.
3. Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. London: Penguin Books.
4. Mumford, L. (2011). "What is a City" *Architectural Record* (1937). In R. T. LeGates, & F. Stout, *The City Reader Fifth Edition* (pp. 91-95). New York: Routledge.
5. Sitte, C. (1979). *The art of building cities: city building according to its artistic fundamentals*. Minnesota: Hyperion Press.
6. Sucher, D. (1995). *City Comforts*. City Comforts Press.
7. T.Aldous. (1992). *Urban Villages*. Urban Villages Group.

**KONTRADIKSI DALAM RUANG  
DAN FUNGSI SIMBOL SEBAGAI MEDIA KOMPROMI**  
Ruang Publik adalah Ruang Privat

**Catharina Dwi Astuti Depari**  
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
E-mail : [catharina2bfree@yahoo.com](mailto:catharina2bfree@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Indonesian development policy which is mostly driven by Western modern-capitalism ideology has created kampung settlement phenomenon that is now understood to be one entity with the city living. Its presence is oftenly seen as a threat to the city existence which forces the local authority to implement some crude actions and condemnation is one among them. The solution-finding over the city problem needs to employ a humanistic approach which emphasizes the understanding on human-environment relationship and to treat the cityspace as an open-ended system considering all dimensions of the city in its planning process (Human Aspects on Settlement, 1977:3-44). The specific problem related to kampung's organic-sporadic structure is blurred boundaries between public and private space which could be identified at Kampung Jagalan in Yogyakarta. The research has aims to reveal the local territory concept and the ways of the locals to communicate their intentions or meanings by creating and arranging specific elements within their environment. By having a deep understanding on the local territory concept, how they use their public space for personal activities and how they unintentionally or intentionally build territory with the use of specific elements, some useful insights or knowledge would be gained by which the local authority could design or plan for the local's future development. Those knowledge would also provide some basis for the Government to apply a control function as a legal mechanism over the local activity. According to Lang (Urban Design: A Typology of Procedures and Products, 2005:35-36), the control package would be an effective tool to structure urban areas into specific directions and therefore choosing the most suitable methodology for the research is crucial. Methodology used on the research is phenomenology using the socio-semiotic analysis (Gottdiener & Lagopoulos, 1986:126) which relates the local activities to the shape of each preferred elements and symbols.*

**Keywords:** kampung, territory, public space, private space, symbols, elements

**1. PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan di Indonesia yang sebagian besar dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme-modern Barat, mendorong lahirnya fenomena perkampungan kumuh yang kini semakin dipahami sebagai satu entitas dari realitas hidup perkotaan. Dalam sejarah perkembangannya, kehadiran kampung di daerah perkotaan sering dipandang sebagai sesuatu yang mengancam, baik dilihat dari sudut pandang ekologi, estetika maupun sosial budaya sehingga memicu lahirnya berbagai tindakan represif oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka mengatasi masalah perkampungan maupun perkotaan selalu dibutuhkan sebuah strategi humanistik dengan meninggalkan pemahaman mekanistik, yaitu pendekatan yang membutuhkan pemahaman terhadap interaksi antara manusia dengan lingkungannya sebagai sesuatu yang bermakna dan senantiasa melihat ruang sebagai suatu *open-ended system* yang mempertimbangkan seluruh dimensi sosial, ekonomi dan politiknya (*Human Aspects on Settlement*, 1977). Terkait dengan pengertian bahwa ruang perkotaan sebagai ruang sosial dan politik, Lefebvres (*Design of Urban Space*, 1996:16) menjelaskan ruang perkotaan berdasarkan tiga momentum, yaitu: (1) *spatial practice* yang menekankan pada

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

cara bagaimana ruang diorganisasikan dan digunakan serta membentuk asosiasi dalam alam pikir pengamat mengenai kegiatan lokal dalam realitas urban, (2) *representations of space* sebagai ruang konseptual yang mendominasi ruang-ruang di setiap kelompok masyarakat yang mengarah pada sebuah sistem tata tanda, dan (3) *representational space* sebagai ruang yang tinggal dalam gambaran asosiatif/alam pikir pengamat melalui fungsi simbol-simbol batas ruang antar penghuni yang semestinya mudah dipahami secara non verbal.

Sebagai kawasan permukiman ilegal yang terletak di jantung Kota Yogyakarta, tumbuhnya daerah permukiman di sepanjang Kali Code seringkali diasosiasikan dengan latar belakang sejarahnya yang kelam, yaitu sebagai sarang kriminalitas yang potensial mengancam kehidupan warga kota sehingga keberadaannya mengundang sikap apatis dari berbagai pihak serta menciptakan situasi dilematis bagi Pemerintah untuk menentukan arah kebijakan rencana tata ruang kawasan. Pemerintah dituntut untuk dapat melestarikan Kali Code sebagai jalur biru dan hijau kawasan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekologi lingkungan perkotaan, namun Pemerintah dituntut pula untuk bersikap adil dalam menanggapi isu hak hidup sekelompok masyarakat yang secara permanen telah menetap di daerah bantaran. Meskipun status Kali Code sebagai kawasan permukiman masih belum sepenuhnya memperoleh pengakuan hukum/legalitas, namun upaya untuk memahami berbagai strategi lokal dalam menyiasati permasalahan ruang kampung yang terbatas tetap dibutuhkan dengan tujuan untuk menemukan formula yang paling tepat dalam merencanakan dan merancang kawasan tersebut pada masa yang akan datang. Upaya pelestarian permukiman Kali Code sebagai sebuah ruang huni yang bermartabat dipelopori oleh Romo YB. Mangun Wijaya yang mencoba memandang permasalahan Kali Code dari perspektif humanistik. Berkat pemikiran Romo YB. Mangunwijaya, permukiman Kali Code kini tumbuh menjadi sebuah ruang huni yang semakin tertata dengan baik sehingga mulai memperoleh perhatian dari berbagai kalangan termasuk Pemerintah Kota. Sebagai bagian dari permukiman Kali Code, Kampung Jagalan khususnya yang wilayahnya mencakup daerah bantaran sungai turut menghadapi beberapa bentuk permasalahan ruang. Permasalahan ruang kampung pada hakikatnya diakibatkan oleh morfologi ruang kampung yang bersifat organik sporadik sehingga batas teritori antara ruang publik dengan ruang privat menjadi kabur/tidak jelas. Selain diakibatkan oleh alasan fisik, menurut Haryadi dan Setiawan (Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, 1995) permasalahan kaburnya batas teritori antara ruang publik dengan ruang privat diakibatkan pula oleh sistem sosial masyarakat kampung yang pada dasarnya bersifat komunal sehingga melahirkan beberapa kesepakatan tidak tertulis ketika secara bersama-sama memanfaatkan ruang kampung yang terbatas. Dalam pemahaman masyarakat lokal, kampung dipahami bukan sebagai ruang publik namun sebagai sebuah ruang semi publik. Meskipun demikian, kebutuhan akan batas teritori yang jelas antar penghuni tetap dibutuhkan untuk menjamin kenyamanan penghuni dalam melakukan aktivitas personal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat fenomena perilaku warga yang disadari atau tidak merepresentasikan keinginan untuk membangun batas-batas teritori melalui fungsi elemen, atribut atau simbol tertentu. Semakin heterogen aktivitas masyarakat, semakin terlihat jelas upaya pembedaan yang dilakukan pada desain ruang kampung.

Konsep teritori yang akan dibahas dalam penelitian akan menekankan pada persoalan mengenai mekanisme pembedaan yang disepakati oleh warga secara non verbal untuk memperlihatkan batas teritori antara zona privat dengan zona publik serta antar ruang personal pada koridor bantaran sungai. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep teritori menurut pemahaman warga Kampung Jagalan, mengetahui korelasi antara aktivitas penghuni dengan preferensi terhadap bentuk elemen yang mengisi ruang koridor serta mengetahui jenis elemen yang berfungsi sebagai simbol/penanda batas teritori antar ruang personal pada koridor bantaran. Hal penting yang perlu ditekankan adalah perlu dibedakan antara elemen yang sekadar berfungsi untuk mendukung aktivitas warga dengan elemen

yang berfungsi sebagai simbol/penanda batas teritori antar zona/ruang pada koridor bantaran.

Menurut Husserl (*Design of Urban Space*, 1996:65), pendekatan perilaku dalam metodologi fenomenologi tepat digunakan untuk memahami lingkungan sekitar dengan menggunakan konsep semiotik yang berbicara tentang tata tanda dan persepsi. Analisis dilakukan menggunakan paradigma *socio-semiotic* (Gottdiener & Lagopoulos, 1986:126) yang mengkaitkan antara aktivitas sosial budaya setempat dengan bentuk setiap elemen. Kajian tentang konsep teritori pada area kampung penting dilakukan untuk membantu para pemangku kebijakan dalam memahami perilaku dan berbagai preferensi warga lokal ketika membangun sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan kawasan objek studi atau apabila akan diimplementasikan di lokasi yang berbeda dengan tetap memperhatikan karakteristik masyarakat lokal. Dengan adanya batas teritori yang jelas, bersifat tetap dan mudah dikenali, maka otoritas setempat dapat melakukan kontrol terhadap setiap aktivitas formal/informal yang berlangsung di dalam ruang kampung termasuk untuk menetapkan norma dan sanksi yang tepat bagi setiap aktivitas pembangunan yang berlangsung. Sistem kontrol yang dilakukan oleh Pemerintah, baik berupa pemberian insentif (*carrots*) atau disinsentif (*sticks*) menurut Lang (*Urban Design*, 2005:35-36) merupakan sebuah mekanisme efektif untuk membangun struktur ruang kawasan yang diharapkan termasuk untuk mencegah terjadinya konflik antar kepentingan ketika memanfaatkan ruang-ruang yang sama.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian dan Konflik Ruang**

Secara terminologi kata *space* (ruang) berakar dari istilah klasik *spatium* dalam makna yang abstrak, berbeda dengan kata *ruum* yang berasal dari bahasa Jerman yang secara jelas mengungkapkan adanya batas-batas fisik dalam pemahaman ruang. Sekitar akhir abad ke-19, teori Hegel yang telah bercampur dengan Arsitektur mendorong lahirnya sebuah ilmu baru, yaitu psikologi persepsional yang merupakan ilmu tentang konsep ruang sebagai media pembentukan citra visual dan yang dapat diindera/diraba (Ruang dalam Arsitektur, 1991:xiii). Menurut Rapoport (*Human Aspects of Urban Form*, 1977:9), ruang merupakan sesuatu yang dialami sebagai dunia tiga dimensional yang berada di sekitar manusia. Terkait dengan kota, Rapoport mendefinisikan ruang sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial budaya dengan seluruh variabel teritorialnya yang di dalamnya mengandung makna/intensi tertentu yang ingin dikomunikasikan.

Secara umum, ruang kota dapat dibedakan menjadi beberapa zona yang dilengkapi dengan perangkat aturan tertentu. Selain itu perlu dipahami bahwa aktivitas yang berlangsung di masing-masing zona dapat saling berbeda sehingga privasi perlu ditegaskan sebagai sesuatu yang membutuhkan kontrol dari interaksi yang tidak diharapkan. Interaksi yang tidak diharapkan dapat dikontrol melalui aturan, media psikologi (*psychological means*), petunjuk perilaku (*behavioral cues*), sistem penjadwalan, pemisahan ruang atau melalui beberapa *physical devices*. Ketika mekanisme teritori tidak diindahkan atau pemisahan antara ruang/zona bersifat kabur, maka potensi konflik antara pengguna dapat saja terjadi. Dalam tataran kota modern, permasalahan tersebut terjadi ketika sejumlah kelompok masyarakat yang berbeda tidak dapat saling berbagi sistem simbol, tidak mampu membaca petunjuk yang ada atau menolak untuk mematuhi. Rapoport mengklasifikasikan tipologi teritori menjadi 4 kategori, yaitu: (1) *public territories* dimana setiap orang dapat secara bebas memasuki suatu area tertentu meskipun tidak berupa kebebasan absolut sehingga seseorang tetap harus mempelajari norma yang berlaku; (2) *home territories* merupakan area yang diklaim atau diakui oleh suatu kelompok tertentu; (3) *interactional territories* yang ditemukan dalam suatu kelompok kecil yang saling berinteraksi secara sosial serta potensial untuk diperluas dalam rangka mewadahi interaksi sosial yang lebih permanen; dan (4) *body*

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

*territories* yang berhubungan dengan konsep ruang pribadi (*personal space*) dan dengan jasmani seorang individu. Selain itu, dalam perencanaan kawasan permukiman terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) perlunya batas-batas yang jelas ketika memanfaatkan ruang/lahan yang sama dan perlu adanya kesepakatan bersama antar pengguna melalui penggunaan tata tanda secara komprehensif; (2) perlunya kesepakatan nama, gambar dan identitas yang dapat diterima oleh seluruh warga; dan (3) perlunya norma/aturan yang secara subjektif memperlihatkan adanya satu kesamaan/homogenitas. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen, lingkungan binaan/kawasan memiliki tiga jenis *physical devices* yang digunakan dalam rangka mengkomunikasikan batas-batas teritori antar ruang (Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, 1995), yaitu: (1) *fixed element* sebagai elemen tetap pembentuk ruang, misalnya lantai, dinding, kolom, atap dan elemen fisik lainnya yang bersifat; (2) *semi fixed element* yang bersifat semi tetap dan dapat dipindahkan sesuai dengan suatu pola penataan tertentu, misalnya perabotan meja, kursi; dan (3) *non fixed element* yang merupakan elemen tidak tetap yang memberikan kualitas tertentu pada fisik ruang, misalnya warna, tekstur atau dekorasi.

**Konsep Etologikal Teritori**

Etologi merupakan sebuah metodologi yang mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungannya akibat dari adanya isu kesesakan (*crowding*) dari sejumlah perilaku dan peran berbagai organisasi sosial. Menurut Rapoport (*Human Aspects of Urban Form*, 1977:278-279) terdapat lima unsur konsep teritori, yaitu: (1) *Home Range* yang merupakan batas umum pergerakan berkala penduduk perkotaan yang terdiri dari beberapa lokasi serta jaringan penghubung antar lokasi; (2) *Core area* yang merupakan area inti dalam jangkauan hunian (*home range*) yang paling banyak dihuni, digunakan, dipahami dan dikendalikan oleh sekelompok penduduk kota; (3) *Territory* sebagai area yang dimiliki dan dipertahankan baik secara fisik dan non fisik melalui aturan dan simbol-simbol yang memperlihatkan batas suatu ruang domain tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau satu kelompok. Simbol dapat berupa dinding, pagar, perubahan pada struktur, warna dan lambang yang harus mudah dikenali, dipahami, dibaca dan dipatuhi. Secara umum, simbol dan aturan merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi teritori tertentu; (4) *Jurisdiction* sebagai area yang dikuasai/dikendalikan secara temporer oleh sekelompok penduduk kota; dan (5) *Personal distance*, merupakan jarak antar individu sehingga intervensi dari pihak luar dirasakan sebagai sesuatu yang mengganggu.

**Arsitektur dan Pendekatan Semiotik**

Dalam rangka memahami makna yang terkandung dalam setiap simbol pada suatu lingkungan binaan, maka dibutuhkan pengetahuan tentang sistem tata tanda maupun proses perseptual seorang *interpreter* sebagaimana yang diuraikan oleh Juan Pablo Bonta (*Architecture and Its Interpretations*, 1979) melalui teori analisis semiotika-nya.

	penterjemah ( <i>interpreter</i> ) membuat asumsi secara disengaja (komunikasi)	penterjemah ( <i>interpreter</i> ) membuat asumsi secara tidak disengaja (indikasi)
adanya <i>emitter</i> yang disengaja	<b>SIGNAL</b>	<b>INTENTIONAL INDEX</b>
adanya <i>emitter</i> yang tidak disengaja	<b>PSEUDO-SIGNAL</b>	<b>INDEX</b>

**Gambar 1.** Klasifikasi Indikator dalam sistem tata tanda

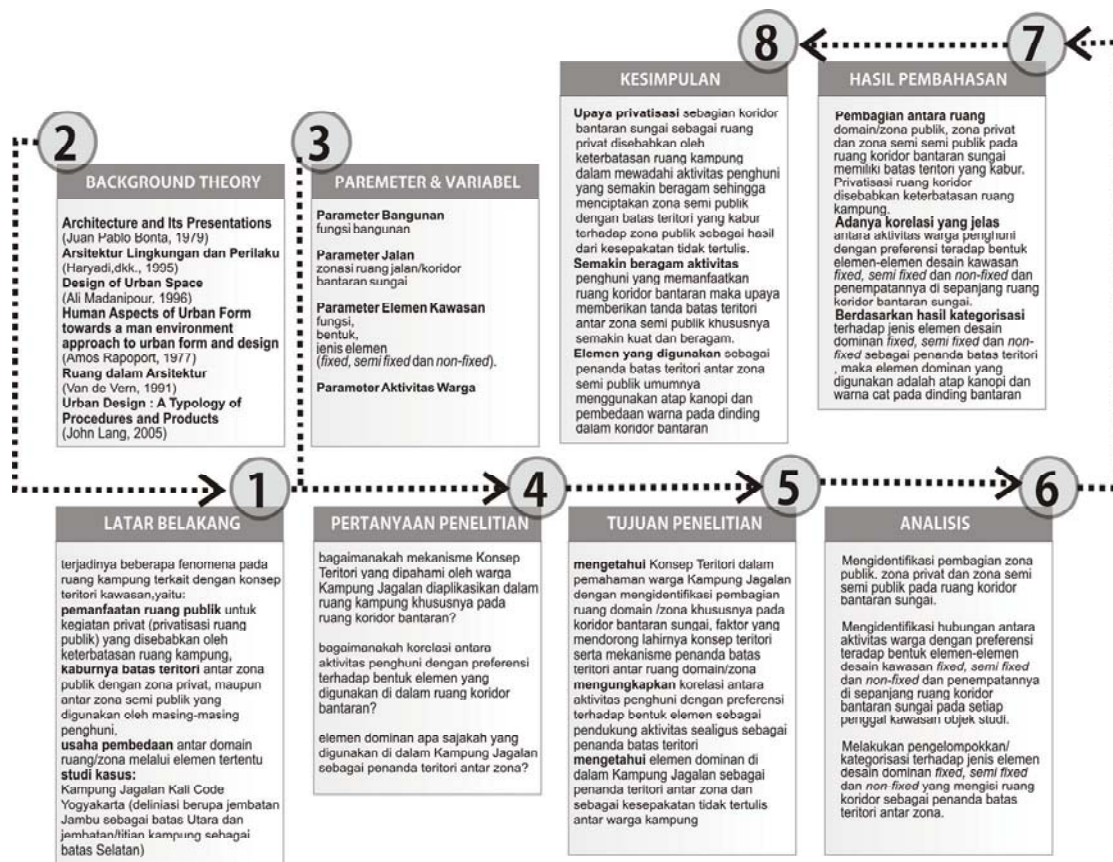
Bonta (*Architecture and Its Interpretations*, 1979:26-28) menjelaskan beberapa hal terkait dengan analisis semiotika, yaitu: (1) Indikator merupakan peristiwa langsung yang ditangkap oleh *interpreter* melalui media tertentu yang memungkinkannya untuk mempelajari sesuatu dari peristiwa lain yang pernah dialaminya; (2) *Signals* dipahami oleh seorang *interpreter*

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

sebagai sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi. Makna dari sebuah *signal* merupakan sebuah produk budaya yang mengandung cara pandang *emitter* sedangkan *index* ditujukan untuk lahir secara langsung dari realitas sebagaimana yang diharapkan oleh *emitter*. Namun ketika *index* ditafsirkan oleh seseorang, maka pengalaman di masa lampau, kepercayaan dan konsepsi alam pikirnya akan mempengaruhi interpretasinya, dan (3) *Intentional indexes* merupakan indikator yang secara bebas memang ditujukan untuk mengkomunikasikan sesuatu namun tidak dapat dimengerti oleh *interpreter*. Indikator yang dipercaya oleh *interpreter* berfungsi sebagai *signal* meskipun pada kenyataannya tidak direncanakan demikian disebut *pseudo-signal*.

**3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif fenomenologi yang berfokus pada usaha untuk memahami makna di balik pengalaman tertentu sekelompok masyarakat dengan menggunakan berbagai data subjektif guna mendeskripsikan kebenaran objektif dan yang dalam prosesnya menyatukan peneliti dengan objek penelitian. Mempersiapkan kerangka teoritis dalam penelitian harus dihindari untuk menjaga agar sifat dari temuan penelitian jauh dari sifat artifisial. Kajian teori dalam penelitian tidak digunakan sebagai landasan teoritis untuk melakukan analisis, namun sekadar sebagai *background theory/data theory* yang diharapkan mampu memperkuat argumentasi pemilihan topik dan lokasi penelitian. Dalam rangka memperoleh hasil pengamatan secara mendetail, maka lokasi kawasan studi dibagi menjadi 2 penggal/spot lokasi dengan batas geografis sebagai kriteria deliniasi..



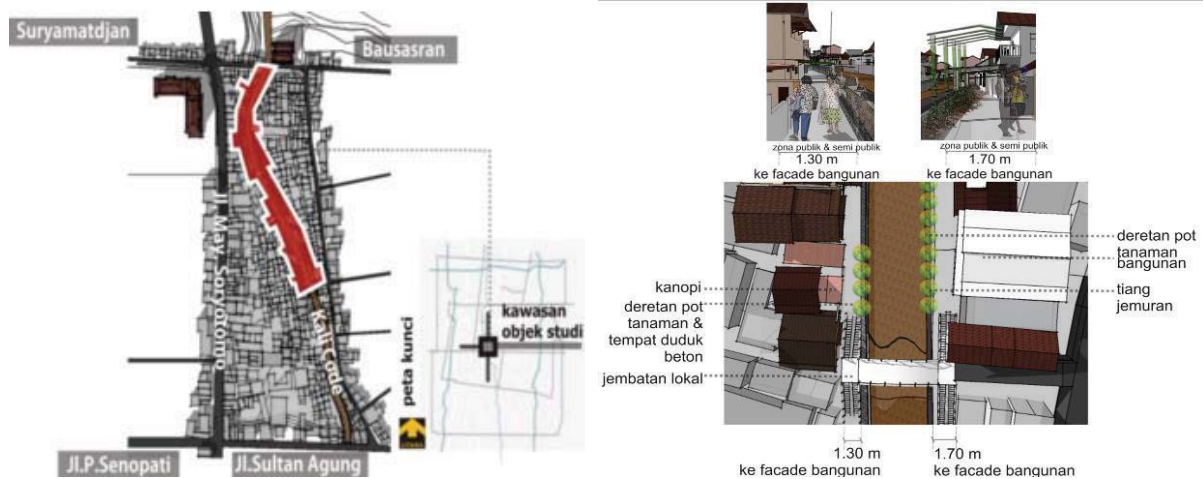
Skema 1. Alur Pikir Penelitian



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Kondisi Fisik dan Non Fisik Kawasan Objek Studi

Sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Yogyakarta, Kali Code berperan untuk menjadi daerah aliran air hujan sekaligus sebagai jalur lahar dingin vulkanik sehingga berbagai bentuk pembangunan di sepanjang bantaran pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dilarang. Namun dalam perkembangannya, daerah Kali Code kini telah beralih fungsi menjadi suatu permukiman padat akibat dari peristiwa *booming* ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun 1960-an dan yang kemudian mendorong terjadinya arus urbanisasi ke wilayah D.I.Yogyakarta. Lokasi penelitian berada di Kampung Jagalan yang sebagian wilayahnya mencakup permukiman Kali Code. Letak Kampung Jagalan sangat strategis, yaitu berada di pusat kota sehingga dampak dari aktivitas perdagangan dan bisnis sangat mempengaruhi pola perkembangan fisik dan non-fisik kampung. Kriteria deliniasi kawasan studi didasarkan pada batas geografis, yaitu jembatan Jambu sebagai batas Utara dan jembatan kampung sebagai batas Selatan. Penelitian ditujukan untuk mengungkapkan konsep teritori dalam pemahaman lokal sehingga ruang koridor bantaran sungai menjadi parameter penting dalam rangka penelitian.



**Gambar 2.** Lokasi kawasan objek studi (*kiri*) dan tipomorfologi koridor bantaran Kali Code (*kanan*)

Secara sosial budaya, karakteristik kampung yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan antar warga tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut terlihat dari tetap berlangsungnya aktivitas berkumpul antar warga terutama pada sore hari yang memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi berkumpul. Tingginya tingkat toleransi antar warga tercermin pula pada pemanfaatan ruang koridor oleh warga untuk menjalankan aktivitas personalnya yang didasarkan pada suatu kesepakatan bersama. Sebagai pendukung aktivitas hidup sehari-hari, warga memanfaatkan sebagian ruang di sepanjang sisi dinding bantaran sebagai zona privat sedangkan jalur di tengah koridor tetap berperan sebagai zona publik untuk mewardahi pergerakan. Privatisasi sebagian ruang koridor bantaran mengakibatkan ruang koridor sebagai zona publik beralih fungsi menjadi zona semi publik sehingga desain ruang koridor dipenuhi oleh beragam jenis elemen, atribut atau simbol yang di dalamnya mengandung fungsi dan makna tertentu.

##### Pembahasan terhadap Penggal I Kawasan Objek Studi

Fungsi bangunan di penggal I kawasan objek studi didominasi oleh fungsi hunian dan hanya sebagian kecil yang berfungsi sebagai KM umum, pos jaga atau bercampur dengan fungsi komersial. *Fixed element* yang mendominasi secara berurutan adalah atap kanopi,

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

pergola tanaman rambat, pot beton pada dinding bantaran dan tempat duduk beton yang ditujukan untuk mendukung kegiatan berkumpul warga/antar tetangga.



**Gambar 3.** Hubungan antara aktivitas penghuni dengan *fixed element* koridor bantaran penggal I

Sedangkan *semi fixed element* yang mendominasi kawasan penggal I secara berurutan adalah pot tanaman rendah, sangkar/kandang, tiang jemuran, perabotan dan papan pengumuman di depan pos jaga dan *non fixed element* yang mendominasi berupa pemanfaatan warna yang kontras pada dinding bantaran kali/sungai.



**Gambar 4.** Hubungan antara aktivitas penghuni dengan *semifixed* dan *non-fixed element* koridor bantaran penggal I

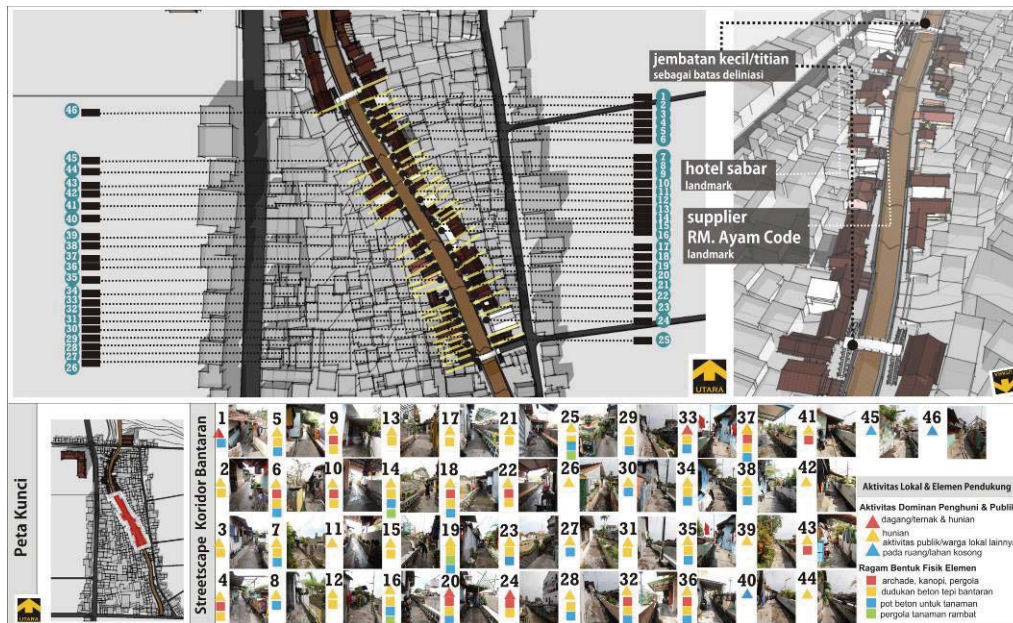
Elemen desain yang sejak awal disepakati oleh warga menjadi penanda batas teritori antar zona di sepanjang koridor bantaran tidak ditemukan, namun privatisasi sebagian ruang koridor saat ini cenderung semakin jelas terlihat dengan adanya penempatan berbagai elemen pendukung aktivitas penghuni di sepanjang koridor. Elemen yang dinilai potensial

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

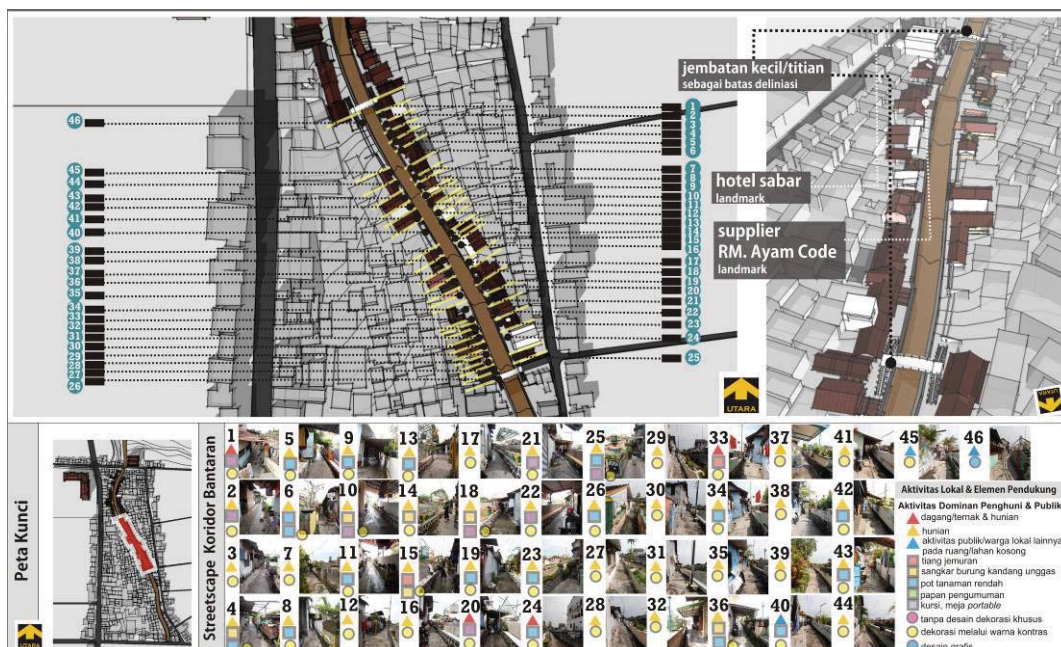
sebagai penanda batas teritori antar ruang personal pada koridor bantaran adalah atap kanopi permanen dan perbedaan warna cat pada dinding bantaran.

**Pembahasan terhadap Penggal II Kawasan Objek Studi**

Fungsi bangunan di penggal II kawasan objek studi didominasi oleh fungsi hunian dan sebagian kecil berfungsi sebagai hotel, bisnis pengolahan ayam goreng dan warung. *Fixed element* yang mendominasi secara berurutan adalah tempat duduk beton, atap kanopi, pot beton dan pergola tanaman rambat di sisi bantaran sungai.



**Gambar 5.** Hubungan antara aktivitas penghuni dengan *fixed element* koridor bantaran penggal II

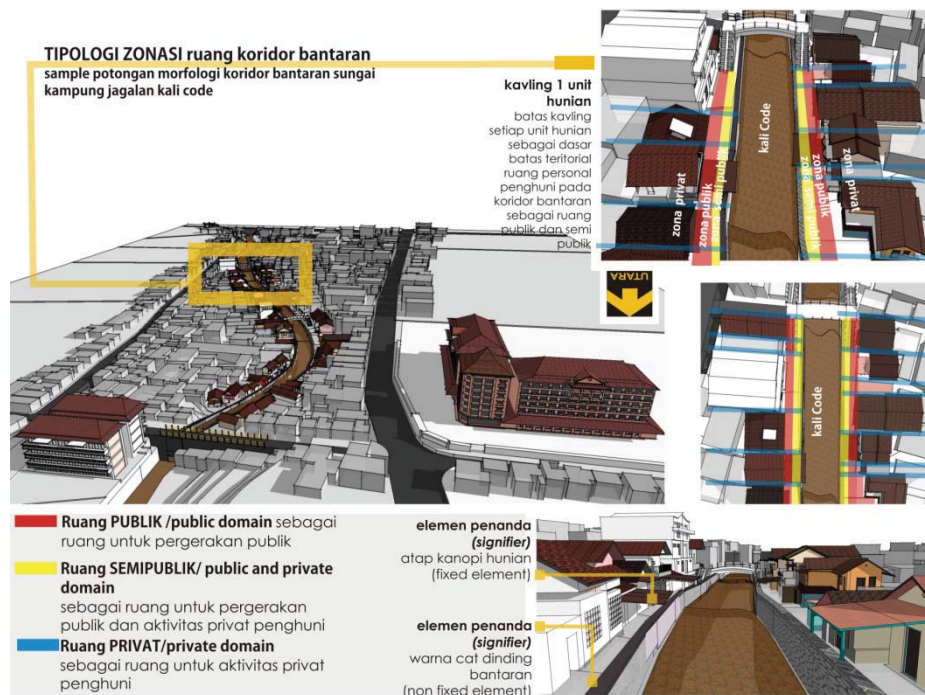


**Gambar 6.** Hubungan antara aktivitas penghuni dengan *semifixed* dan *non-fixed element* koridor bantaran penggal II

*Semi fixed element* yang mendominasi koridor penggal II secara berurutan adalah pot tanaman rendah/tanaman hias, sangkar/kandang burung hias/merpati/ayam, perabotan kursi

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

dan meja serta tiang jemuran pakaian. Sedangkan *non fixed element* didominasi oleh pemanfaatan warna kontras pada dinding bantaran sungai serta desain grafis pada dinding jembatan.



**Gambar 7.** Ruang domain publik, privat dan semi publik pada koridor bantaran Kali Code

Elemen desain yang sejak awal disepakati oleh warga menjadi penanda batas teritori antar zona di sepanjang koridor bantaran tidak ditemukan, namun privatisasi sebagian ruang koridor saat ini cenderung semakin jelas terlihat dengan adanya penempatan berbagai elemen pendukung aktivitas penghuni di sepanjang koridor. Tidak berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh pada penggal I, bahwa elemen yang dinilai potensial sebagai penanda batas teritori antar ruang personal pada koridor bantaran di penggal II adalah atap/kanopi permanen dan perbedaan warna cat/tekstur pada dinding bantaran.

## 5. KESIMPULAN

Berikut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan fisik ruang kampung, maka toleransi antar warga dapat disimpulkan sebagai modal utama yang menjadi sebuah solusi efektif. Upaya privatisasi sebagian koridor bantaran sungai disebabkan oleh terbatasnya daya dukung/fisik ruang kampung yang tidak lagi mampu menampung aktivitas penghuni yang semakin beragam. Sehingga meskipun didukung oleh tingginya toleransi antar warga kampung, namun permasalahan ruang tetap potensial terjadi terutama ketika kebutuhan akan batas teritori antar ruang personal pada koridor bantaran dirasakan semakin mendesak. Berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat kecenderungan warga yang mulai membangun batas-batas teritori pada ruang personal di sepanjang koridor bantaran sungai dengan memanfaatkan elemen tertentu yang sekaligus berfungsi pula untuk mendukung aktivitas yang sedang dijalankannya.
2. Terdapat korelasi yang kuat antara aktivitas penghuni dengan preferensi elemen yang dibangun di sepanjang bantaran. Semakin beragam aktivitas penghuni yang memanfaatkan ruang koridor bantaran, maka semakin beragam jenis elemen yang dapat diidentifikasi di sepanjang ruang koridor.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

**Tabel 1.** Kategorisasi jenis & bentuk elemen koridor bantaran Kampung Jagalan Kali Code

JENIS & BENTUK ELEMEN	FUNGSI & AKTIVITAS			
	hunian	hunian & komersial	km umum	pos jaga
<b>Fixed Element</b>				
Atap kanopi	14	2	-	1
Kursi/dudukan beton	29	3	-	1
Pot beton	21	3	-	-
Pergola tanaman rambat	7	-	-	-
<b>Semi Fixed Element</b>				
Tiang jemuran	7	3	-	-
Sangkar burung	5	-	-	-
Pot tanaman	25	1	-	-
Papan pengumuman	-	-	-	1
Meja kursi	4	-	-	-
<b>Non Fixed Element</b>				
Warna cat	45	4	-	-
Seni desain grafis	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa elemen desain yang paling banyak digunakan, baik untuk aktivitas hunian maupun komersial, adalah pembedaan warna pada dinding bantaran, kursi beton di sepanjang dinding bantaran dan pot tanaman (*portable* maupun permanen yang menjadi satu bagian dari struktur dinding beton bantaran).

3. Elemen lokal yang umumnya digunakan sebagai penanda batas teritori antar ruang personal pada ruang koridor bantaran adalah atap/kanopi yang berfungsi pula sebagai elemen pelindung aktivitas penghuni serta melalui pembedaan warna pada dinding bantaran yang dapat diidentifikasi di sejumlah lokasi dalam kampung. Pembedaan warna pada dinding bantaran ditujukan sebagai simbol identitas sekelompok warga dari suatu RT/RW tertentu atau identitas pribadi dalam level penghuni.
4. Dalam perencanaan pembangunan Kampung Jagalan di masa yang akan datang, Pemerintah perlu mempertimbangkan pentingnya menyediakan ruang potensial pada desain ruang kampung yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh kemampuan Pemerintah bekerjasama dengan warga dalam menentukan mekanisme teritori yang paling tepat dengan memanfaatkan elemen multifungsi yang disepakati oleh seluruh warga kampung. Dengan semakin jelasnya batas teritori antar ruang/zona dalam desain kampung, maka sistem kontrol melalui pemberian insentif atau disinsentif pada setiap praktik kegiatan pembangunan akan dapat lebih mudah diterapkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Bonta, J.P., 1979, *Architecture and Its Interpretations*, London: Lund Humphries Publishers, Ltd.
2. Haryadi, 1995, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
3. Lang, J., 2005, *Urban Design: A Typology of Procedures and Products*, London: Architectural Press.
4. Madanipour, A., 1996, *Designs of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process*, Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
5. Rapoport, A., 1977, *Human Aspects of Urban Form Towards A Man-Environment Approach to Urban Forms and Design*, London: Pergamon Press.
6. Van de Ven, C., 1991, *Ruang dalam Arsitektur*, Jakarta: PT.Gramedia.

## PRIVATISASI RUANG PUBLIK DI KORIDOR JALAN TAMBAKBAYAN KAWASAN BABARSARI YOGYAKARTA

**Yohanes Djarot Purbadi**  
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
E-mail: [purbadi@staff.uajy.ac.id](mailto:purbadi@staff.uajy.ac.id)

### ABSTRACT

*Street as urban corridor have two functions, there are public and private functions. Some research found many unique phenomena, especially privatization of public spaces occurred on the urban streets. The phenomena of privatization of urban space are using private properties for expressing intentions into public domain or utilizing public properties for private benefit. Field observation with phenomenology paradigm at Tambakbayan street found many unique cases indicated into the concept of privatization of public spaces. Privatization of public spaces at Tambakbayan street which done by commercial actors occurred on two sides of the street, and by family units or lokal communities (RT-RW) occurred on one side (west side) of the Tambakbayan street. Privatization of public spaces at Tambakbayan street caused by the lacking of properties owned by private or public institutions and the existing many lost spaces on Tambakbayan urban street. The main character of privatization of public spaces at Tambakbayan urban street called occupation by private and public functions into public spaces, and driven by social, economic and household motives as internal push factors.*

**Keywords:** *urban street, private function, public spaces, privatization of public space*

### 1. PENDAHULUAN

Jalan sebagai bagian dari ruang kota (*urban space*) memiliki ciri sebagai ruang publik (*public space*) yang berfungsi majemuk, yaitu fungsi publik dan fungsi privat. Jalan yang berkembang menjadi koridor kegiatan dengan sifat multi fungsi pada hakekatnya mencerminkan suasana budaya kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat demokrasi, jalan sebagai ruang publik memiliki peran mendukung perkembangan demokrasi, termasuk penyampaian suara politik berbagai pihak (Kohn, 2004: 147) dan bermanfaat dalam proses membangun modal sosial (*social capital*) (Kohn, 2004: 148; Carmona dkk, 2008:7). Kelangkaan ruang publik akan berakibat komunikasi politik menjadi sulit (Kohn, 2004:6), tentunya juga akan menghambat terbangunnya modal sosial dalam masyarakat. Artinya, ruang publik sangat penting bagi kehidupan sosial dan politik bagi masyarakat.

*Public space* hakekatnya memiliki manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat (Carmona dkk, 2008: 8). Terkait dengan multi-manfaat tersebut, fenomena perebutan ruang kota merupakan perkara yang nyaris biasa terjadi di kota-kota. Salah satu bentuk perebutan ruang kota yang banyak muncul adalah privatisasi ruang publik. Jika ditilik lebih mendalam, privatisasi ruang publik bukan semata-mata masalah sosial, estetika atau ekonomi (Kohn, 2004:5). Golongan masyarakat tertentu (misalnya, minoritas) seringkali menggunakan aset privat untuk menyampaikan suara politiknya ke ranah publik, sehingga pemilik aset privat merasa keberatan dan estetika ruang publik terganggu (Kohn, 2004: 4-5). Oleh karenanya, privatisasi ruang publik pada suatu koridor ruang kota perlu mendapat perhatian serius, khususnya untuk memahami keragaman pola pemanfaatan, fungsi dan maknanya bagi kehidupan perkotaan.

Ruang publik atau *public space*, adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bebas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Ruang publik

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

hakekatnya adalah ruang yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya atau ongkos (Kohn, 2004). Ruang publik dapat terdiri atas ruang dalam bangunan (interior) dan ruang-ruang terbuka (*open spaces*), misalnya lapangan, taman atau koridor jalan tertentu. Ruang publik sangat dibutuhkan masyarakat, sebab menjadi tempat bersama untuk saling berjumpa guna membangun relasi-relasi sesama warga (Carmona dkk, 2008:7). Ruang-ruang publik secara langsung dan tidak langsung dapat memberi dampak dan makna positif bagi berkembangnya relasi-relasi yang hidup dalam masyarakat. Ruang publik dapat menjadi oasis dan penyegar sekaligus penyehat kehidupan bermasyarakat.

Fenomena privatisasi ruang publik pada banyak kasus menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitasnya. Privatisasi menyebabkan keleluasaan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik menjadi berkurang, atau mengakibatkan masyarakat harus membayar untuk memanfaatkannya. Artinya, penguasaan dan pemanfaatan ruang publik semestinya diatur agar kepentingan publik tidak dikorbankan, melainkan justru berkembang di ruang publik yang tertata baik. Fenomena yang cukup menonjol terjadi di kota-kota di Indonesia, berbagai pihak cenderung melakukan privatisasi untuk kepentingan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Artinya, pengaturan pemanfaatan ruang publik semestinya menjadi penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat serta berbagai pihak yang terkait.

Fenomena privatisasi ruang publik pada berbagai kota di Indonesia mengarah pada komersialisasi ruang publik. Pihak pengusaha berbekal ijin dari instansi pemerintah berusaha memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan bisnis, khususnya menarik keuntungan ekonomis jangka pendek maupun panjang. Fenomena privatisasi sekaligus komersialisasi ruang publik seperti itu hakekatnya mengingkari keberadaan ruang publik sebagai aset publik yang dapat diakses secara leluasa tanpa harus membayar (Kohn, 2004). Celaknya, pemerintah (kota) kadang terkesan membiarkan proses privatisasi-komersialisasi ruang-ruang publik kota terjadi dan berkembang terus. Artinya, lambat-laun proses privatisasi dan komersialisasi ruang publik di Indonesia akan terus terjadi dan menjadi fenomena yang tidak menggembirakan untuk membangun suasana kehidupan kota yang *guyub*.

Kawasan Babarsari terletak di timur laut kota Yogyakarta, semula adalah kawasan yang sepi. Sekitar tahun 1970-an Babarsari dikenal sebagai kawasan luar kota, yang masih didominasi persawahan, suasananya sepi karena jarang dilewati orang. Satu-satunya bangunan publik penting di kawasan Babarsari pada waktu itu adalah Instalasi Nuklir KARTINI<sup>1</sup> milik pemerintah yang dibangun sekitar tahun 1980-an. Pada waktu itu jalan Babarsari sudah beraspal namun tidak terlalu lebar, kiri dan kanan jalan masih banyak sawah, belum ada bangunan-bangunan. Jalan Babarsari yang ada waktu itu dan menjadi jalan yang ada saat ini seolah-olah dibangun hanya untuk melayani instalasi nuklir tersebut. Kawasan Babarsari pada waktu itu belum menjadi kawasan penting, masih berkarakter lingkungan alamiah, bahkan masih sepi aktivitas manusia. Kini kawasan Babarsari telah berkembang pesat, beberapa perguruan tinggi berkembang di tengah permukiman warga. Berbagai fasilitas muncul, melayani kebutuhan pendidikan yang tumbuh di kawasan Babarsari.

Koridor jalan Tambakbayan merupakan salah satu koridor kegiatan di kawasan Babarsari yang berkembang cukup pesat dan merupakan fasilitas publik yang penting, sebab merupakan sarana untuk memwadahi pergerakan orang dan barang yang intens. Koridor jalan Tambakbayan berkembang menjadi semakin ramai terkait dengan berkembangnya permukiman mahasiswa dan berbagai fasilitas yang mendukungnya. Pengamatan lapangan menunjukkan, fenomena privatisasi ruang publik terjadi di jalan Tambakbayan dan memiliki

---

<sup>1</sup> Reaktor nuklir yang berlokasi di Babarsari bernama Kartini, merupakan sebuah reaktor nuklir kecil berkapasitas 250 kW. Reaktor Nuklir kartini di Babarsari adalah reaktor nuklir kedua milik Indonesia setelah reaktor yang ada di Bandung. Reaktor nuklir Kartini berjenis Triga Mark II, diresmikan pada tahun 1979, masih berstatus operasi. Semua reaktor nuklir di Indonesia dioperasikan oleh BATAN.

keunikan yang perlu dipahami (diungkapkan) dalam konteks perencanaan ruang perkotaan. Privatisasi yang dipahami sebagai pemanfaatan aset publik oleh kepentingan privat tertentu cukup berkembang di jalan Tambakbayan dan menyebabkan ruang jalan menjadi hidup sekaligus kotor serta tidak tertata dengan baik.

Tulisan ini memaparkan fenomena privatisasi ruang publik yang berkembang di koridor jalan Tambakbayan di kawasan Babarsari, Yogyakarta. Fokus tulisan adalah tentang keragaman, fungsi, dan makna privatisasi ruang publik di koridor jalan Tambakbayan. Kehadiran universitas-universitas di kawasan Babarsari telah merangsang tumbuhnya berbagai fasilitas yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa. Masyarakat lokal maupun pendatang tergoda untuk memunculkan berbagai aktivitas ekonomi, yang memanfaatkan properti privat demi meraih berkah atas kehadiran mahasiswa di kawasan Babarsari. Fenomena privatisasi ruang publik berkembang dan seringkali melanggar kepentingan publik dengan cara melakukan okupansi ke ruang-ruang yang terlihat “kosong” dan tak terawat atau tak termanfaatkan (*Lost Spaces*, Trancik, 1986).

## **2. METODA PENELITIAN**

Tulisan ini berdasarkan pada penelitian lapangan yang dilandasi oleh pendekatan fenomenologi Husserlian (Bertens, 1990; Hamersma, 1983; Peursen, 1988), menggunakan proses mengalami langsung fenomena di lapangan melalui observasi kehidupan di lapangan (Spradley, 1997), mengamati tanda-tanda fisik (Rapoport, 1928, Zeisel, 1985) dan wawancara mendalam (Spradley, 1997) untuk melakukan eksplorasi terhadap kasus-kasus privatisasi ruang publik di koridor jalan Tambakbayan. Pengamatan lapangan bertujuan untuk menemukan dan mendalami fenomena pemanfaatan, fungsi dan makna serta latar belakang terjadinya fenomena privatisasi tersebut. Penelitian fenomena ini dilakukan sekitar bulan Maret dan April 2012 dengan cara pengamatan lapangan untuk merekam fenomena privatisasi ruang publik berbasis data primer. Data dikelola dengan cara kerja induktif untuk menemukan intisari fenomena tentang apa yang terjadi dan latar-belakangnya (Purbadi, 2010).

Peneliti telah melakukan pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi dan mengalami fenomena privatisasi ruang publik. Sambil terjun di lapangan, peneliti melakukan perekaman data lapangan berisi berbagai kejadian di ruang publik yang termasuk kategori pemanfaatan ruang publik secara umum. Rekaman berupa foto-foto digital kemudian dikategorisasikan dan disistematisasi untuk menemukan hakekat fenomena privatisasi ruang publik yang berkembang. Tabulasi data visual lapangan dipertemukan dengan informasi lain dalam analisis, kemudian ditemukan peta-peta pemahaman tentang fenomena privatisasi ruang publik, fungsi dan maknanya. Hasil keseluruhan dituangkan dalam tabulasi yang menunjukkan fenomena, fungsi dan maknanya.

## **3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa privatisasi ruang publik dilakukan oleh pengusaha komersial (warung, kios, PKL, toko kecil), kalangan keluarga (rumah tangga) maupun masyarakat RT/RW setempat. Privatisasi oleh pengusaha komersial terjadi pada ruang-ruang trotoar sisi barat dan timur, sedangkan oleh keluarga dan kelompok masyarakat terjadi pada ruang trotoar sisi barat dan timur serta ruang badan jalan. Pemanfaatan privatisasi ruang publik terkait dengan motivasi yang berbeda, yaitu dilandasi oleh kepentingan rumah tangga, ekstensi dan fasilitasi usaha komersial dan kehidupan bersama warga RT/RW setempat. Privatisasi pada umumnya bersifat okupansi ruang yang berfungsi memperluas ruang aktivitas para pelaku menggunakan ruang-ruang kosong milik publik karena mereka mengalami kekurangan ruang serta adanya ruang-ruang kosong yang tersedia di jalan Tambakbayan. Makna privatisasi ruang publik di jalan Tambakbayan cenderung terkait erat dengan kepentingan sosial, ekonomi dan rumah tangga. Privatisasi



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

oleh masyarakat lokal (RT-RW) disebabkan oleh ketiadaan ruang untuk melayani masyarakat dan ketersediaan ruang-ruang kosong yang dapat dimanfaatkan karena letaknya strategis.

Pengamatan lapangan menemukan fenomena privatisasi ruang publik di jalan Tambakbayan terjadi pada tiga tempat, yaitu pada (1) ruang badan jalan (akses publik); (2) ruang trotoar sisi barat, dan (3) ruang trotoar sisi timur. Intensitas privatisasi ruang publik cukup tinggi pada jalan Tambakbayan sisi selatan dan makin ke utara semakin berkurang. Privatisasi pada badan jalan menggunakan material penutup badan jalan (aspal vs *conblock*), yang berusaha menunjukkan bahwa jalan beraspal lebih bersifat publik dan jalan ber-*conblock* lebih berkarakter privat. Pelaku privatisasi terdiri atas tiga kategori, yaitu (1) para pengusaha ekonomi komersial (warung, PKL, kios), (2) unit-unit rumah tangga yang tinggal di tepi jalan, dan (3) warga RT atau RW setempat.

Privatisasi ruang publik pada ruang jalan (akses publik) terjadi pada badan jalan utama, badan jalan gang, dan pertigaan gang. Privatisasi menggunakan instrumen bahan bangunan (*conblock*, beton cor), pembuatan elemen ruang (pintu besi di pertigaan, portal pembatas, polisi tidur) dan tulisan peringatan (“Awat!!! Jalan pelan-pelan, maksimum 10 km per jam”), serta pembuatan atap penutup gang yang berada tepat di ujung gang, yang di dekatnya terdapat fasilitas ibadah.

**Tabel 1:** Keragaman Privatisasi pada Fasilitas Akses Publik

KERAGAMAN PRIVATISASI PADA FASILITAS AKSES PUBLIK			
RAGAM PRIVATISASI	JALAN UTAMA	JALAN GANG	PERTIGAAN GANG
Privatisasi oleh masyarakat untuk kepentingan publik	Penggunaan material <i>conblock</i> untuk lapisan badan jalan untuk menandai teritori privat dan batas teritori publik.	Penggunaan material beton cor untuk badan jalan gang untuk menandai teritori privat dan batas teritori publik.	Pembuatan pintu besi masuk gang (membatasi orang) untuk keamanan lingkungan.
	Penggunaan polisi tidur pada jalan utama sebelah utara agar perilaku tamu atau pengunjung terkendali	Pemberian atap pada gang yang terletak di dekat tempat ibadah.	Penggunaan tulisan "Awat !!! Jalan pelan-pelan, maksimum 10 km per jam" agar tamu berperilaku baik.
			Pembuatan portal, pintu besi dan atap seng pada pintu masuk gang dekat masjid untuk menegaskan dan meningkatkan nilai privacy ruang.
			Pembuatan portal masuk gang (membatasi kendaraan roda empat) untuk keamanan lingkungan.
Privatisasi oleh individu untuk kepentingan usaha komersial	Badan jalan utama digunakan untuk parkir motor di depan toko sebagai fasilitas bagi tamu atau pelanggan.		
	Tepian badan jalan digunakan untuk parkir sepeda motor milik pelanggan toko/warung/kios		

(Sumber: pengamatan lapangan, Maret-April 2012)

Privatisasi yang dilakukan oleh masyarakat RT-RW hakekatnya dilandasi kepentingan untuk melayani masyarakat dan terjadi pada jalan utama, lorong gang dan pertigaan gang. Penggunaan *conblock* sebagai pelapis badan jalan utama dan lorong-lorong gang didorong oleh keinginan menciptakan teritori privat (*conblock*) dan publik (aspal) yang jelas dan tegas

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

batas-batasnya. Terciptanya teritori privat yang dikehendaki masyarakat didukung semakin kuat dengan adanya pintu besi di ujung gang, polisi tidur di sepanjang jalan tertentu, pembuatan portal di ujung gang, pembuatan atap di ujung gang dekat masjid dan pembuatan tulisan anjuran untuk berperilaku baik.

Cara privatisasi yang terjadi ditujukan pada upaya menegaskan teritori privat dari teritori publik yang ada, untuk peningkatan keamanan teritori privat, dan imbauan pengaturan perilaku bagi tamu-tamu teritori privat agar berperilaku seperti yang diharapkan pembuatnya. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa maksud tersembunyi dari privatisasi ruang publik pada ruang akses publik adalah untuk menegaskan, mewujudkan dan menjaga kepentingan, khususnya menciptakan suasana privasi masyarakat lokal pada teritori mereka agar terhindar dari gangguan luar.

Privatisasi yang dilakukan oleh individu yang terjadi di jalan utama dilandasi kepentingan ekonomi pihak pelaku. Fungsi ruang yang diprivatisasi adalah digunakan sebagai tempat parkir sepeda motor milik pelanggan yang datang berbelanja. Pemilik usaha komersial umumnya tidak menyediakan atau memiliki area yang disediakan untuk memarkir kendaraan para pelanggannya. Usaha komersial di jalan Tambakbayan umumnya menggunakan bangunan yang langsung berhadapan dengan jalan, tanpa adanya area parkir di depan bangunan sebagai fasilitasnya. Fenomena ini hakekatnya adalah memanfaatkan hak milik publik untuk mendapat manfaat bagi kepentingan privat. Artinya, para pelaku privatisasi pada dasarnya menggunakan obyek (ruang) bukan miliknya untuk kepentingan pribadi.

Moda privatisasi oleh pelaku ekonomi formal ataupun informal di jalan Tambakbayan sangat kuat dilandasi oleh kepentingan keuntungan ekonomi. Mereka tidak menyediakan fasilitas parkir namun para pelanggannya dipaksa menggunakan ruang publik untuk memarkir kendaraannya ketika datang berbelanja. Cara privatisasi seperti ini cukup mengganggu kenyamanan publik, sebab kendaraan yang parkir di ruang jalan (badan jalan) mengurangi area pergerakan kendaraan dan cara meletakkannya yang tidak diatur (seenak sendiri) kadang membuat arus lalu lintas pada titik-titik tertentu menjadi tidak lancar.

Privatisasi yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan publik memang dapat menciptakan suasana privacy yang cukup bagi mereka, namun privatisasi tersebut hakekatnya melakukan intervensi terhadap penataan elemen-elemen ruang publik diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan publik. Privatisasi yang dilakukan oleh pengusaha komersial di ruang jalan untuk kepentingan privat justru menciptakan masalah berantai, karena penguasaan ruang publik oleh privat untuk kepentingan privat (ekonomi) lebih banyak memunculkan masalah bagi kepentingan publik.

Privatisasi ruang publik juga terjadi di area trotoar sepanjang jalan Tambakbayan, dari ujung selatan hingga utara (dekat makam dan masjid). Pemanfaatan ruang publik di trotoar berlangsung pada sisi timur dan barat. Secara umum, intensitas privatisasi berlangsung tinggi di sisi selatan dan semakin berkurang di sisi utara. Umumnya, privatisasi dilakukan oleh (1) usaha komersial (warung, toko, gerobak PKL), dan (2) kalangan rumah tangga di tepi jalan. Privatisasi oleh masyarakat RT atau RW setempat tidak terjadi di trotoar sisi timur, melainkan di trotoar sisi barat karena merupakan “kapling kosong”.

Privatisasi ruang publik di trotoar sisi timur dimanfaatkan untuk fungsi: parkir, menjemur pakaian, *ramp* warung/kios, papan informasi, tangga bawah bangunan 2 lantai, perletakan tempat duduk permanen, dan perletakan bak sampah. Fenomena yang terjadi, privatisasi ruang publik oleh pengusaha ekonomi adalah untuk kepentingan komersial, khususnya mendukung usaha komersial yang dijalankan. Privatisasi oleh kalangan rumah tangga ditujukan untuk mengakomodasi fungsi-fungsi rumah tangga karena kekurangan ruang.

Privatisasi oleh pengusaha komersial pada trotoar sisi timur dapat dikatakan merupakan tindakan okupansi ruang untuk kepentingan pengusaha. Pemanfaatan ruang trotoar untuk meletakkan papan informasi pada hakekatnya termasuk privatisasi yang meminjam ruang publik. Demikian pula pada kasus-kasus trotoar yang dimanfaatkan untuk parkir pelanggan atau menjemur pakaian pada usaha laundry merupakan okupansi atau ekstensi ruang untuk pemanfaatan ekonomi, bukan sekedar meminjam ruang publik. Bagian trotoar yang

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

dimanfaatkan untuk ramp akses masuk ke ruang toko dan badan tangga yang berujung di trotoar pada usaha persewaan komputer merupakan okupansi dan akuisisi ruang secara fisik dengan mengubah ruang.

**Tabel 2:** Keragaman Privatisasi pada Fasilitas Trotoar Sisi Timur oleh Usaha Komersial

KERAGAMAN PRIVATISASI OLEH USAHA KOMERSIAL PADA TROTOAR SISI TIMUR					
RAGAM PRIVATISASI	Parkir	Jemur Pakaian	Ramp Warung/Kios/Toko	Papan Informasi	Tangga bawah bangunan lantai dua
Privatisasi oleh individu untuk kepentingan usaha komersial	Trotoar digunakan untuk parkir sepeda motor warung/kios/toko (fasilitas bagi pembeli)	Trotoar digunakan untuk menjemur pakaian dengan peralatan jemur oleh pihak usaha laundry.	Trotoar digunakan untuk ramp masuk warung.	Trotoar digunakan untuk meletakkan papan informasi oleh pihak toko/kios/warung.	Trotoar digunakan untuk letak bagian bawah tangga naik ke lantai dua bangunan rental komputer.

(Sumber: pengamatan lapangan, Maret-April 2012)

Fenomena privatisasi ruang publik pada trotoar sisi timur oleh kalangan pengusaha cenderung merupakan tindakan okupansi atau akuisisi ruang. Tindakan mereka terdiri atas dua kategori, yaitu meminjam ruang secara temporer dan merekayasa elemen ruang publik. Ciri ekstensi ruang merupakan salah satu unsur yang menonjol pada privatisasi ruang publik oleh kalangan pengusaha komersial ini. Fenomena ekstensi aktivitas ke ruang publik mendukung kegiatan pengusaha namun merugikan publik karena kadang mereka tidak mempedulikan dampak tindakannya bagi publik; lalu lintas terganggu, jalur pejalan kaki terpotong oleh perlengkapan menjemur pakaian.

Privatisasi ruang publik di trotoar sisi timur juga dilakukan oleh kalangan rumah tangga. Mereka melakukan okupansi ke ruang publik untuk fungsi parkir kendaraan pribadi, menjemur pakaian, memanfaatkan untuk ramp masuk rumah, meletakkan tempat duduk dan memanfaatkan untuk meletakkan sampah rumah tangga. Privatisasi oleh kalangan rumah tangga pada hakekatnya merupakan upaya melengkapi fasilitas rumah (parkir, ramp) sekaligus merupakan tindakan ekstensi fungsi rumah tangga ke ruang publik (menjemur pakaian, meletakkan kursi untuk duduk-duduk, dan tempat bak sampah).

Moda privatisasi oleh kalangan rumah tangga cenderung bersifat okupansi ruang secara temporer dan permanen, termasuk melakukan rekayasa terhadap elemen-elemen ruang publik secara fisik (membuat ramp, bangku duduk dari pasangan bata). Unit-unit rumah tangga yang melakukan privatisasi sebagian besar terletak di sisi timur jalan Tambakbayan, sehingga perubahan atau rekayasa fisik terhadap elemen-elemen ruang publik banyak terjadi di ruang trotoar sisi timur. Akibat privatisasi ini, desain trotoar di sisi timur tidak kontinyus, terputu-putus, bahkan pada bagian tertentu ruang trotoarnya justru tidak ada.

**Tabel 3:** Keragaman Privatisasi pada Fasilitas Trotoar Sisi Timur oleh Rumah Tangga

KERAGAMAN PRIVATISASI OLEH UNIT RUMAH TANGGA PADA TROTOAR SISI TIMUR					
RAGAM PRIVATISASI	Parkir	Jemur Pakaian	Ramp Warung/Kios/Toko	Tempat duduk permanen	Bak Sampah
Privatisasi oleh individu untuk kepentingan rumah tangga	Trotoar digunakan untuk parkir sepeda motor individu	Trotoar digunakan untuk menjemur pakaian dengan peralatan jemur oleh pihak rumah tangga.	Trotoar digunakan untuk ramp masuk rumah tinggal tepi jalan.	Trotoar digunakan untuk tempat duduk permanen dari pasangan bata.	Trotoar digunakan untuk meletakkan bak sampah individu

(Sumber: pengamatan lapangan, Maret-April 2012)

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

Privatisasi ruang trotoar di sisi barat dilakukan oleh pengusaha komersial (formal maupun informal: warung, laundry, warung tenda, warung angkringan, PKL gerobak, dan PKL berpayung. Ragam privatisasinya adalah difungsikan untuk parkir (fasilitas pembeli di warung), menjemur nasi sisa (warung makan), menjemur pakaian (usaha laundry), ekstensi warung (warung makan), dan tempat mangkal PKL (gerobak es jus, martabak), dan meletakkan papan informasi (jual tiket, jasa komputer, rental motor, cetak foto). Tujuan privatisasi yang melandasinya adalah mendukung usaha komersial yang mereka kerjakan karena kekurangan tempat atau wadah kegiatan dan tempat strategis untuk komunikasi dengan masyarakat.

**Tabel 4:** Keragaman Privatisasi pada Fasilitas Trotoar Sisi Barat oleh Usaha Komersial

KERAGAMAN PRIVATISASI OLEH USAHA KOMERSIAL PADA TROTOAR SISI BARAT					
RAGAM PRIVATISASI	Parkir	Jemur Nasi	Jemur Pakaian	Warung/gerobak/tenda	Papan informasi
Privatisasi oleh pengusaha untuk kepentingan usaha komersial	Trotoar digunakan untuk parkir kendaraan pelanggan warung.	Trotoar digunakan untuk tempat menjemur nasi kering	Trotoar digunakan untuk kegiatan menjemur pakaian dengan peralatan jemur (usaha laundry)	Trotoar digunakan untuk ekstensi warung makan (almari makan berkaca).	Trotoar digunakan untuk meletakkan tempat informasi penjualan tiket, pulsa, komputer, jasa terjemahan, rental motor, dan cetak foto.
				Trotoar digunakan untuk kegiatan warung makan bertenda "Lotek gaul", "Bu Kenuk" dan Tenda Biru	
				Trotoar digunakan untuk kegiatan gerobak martabak bandung dan Es Jus	
				Trotoar digunakan untuk kegiatan warung payung berjualan pulsa.	

(Sumber: pengamatan lapangan, Maret-April 2012)

Privatisasi pada ruang trotoar di sisi barat juga dilakukan oleh kalangan rumah tangga yang letak rumah tinggalnya berada di sepanjang tepi timur jalan Tambakbayan. Ragam privatisasinya adalah untuk fungsi parkir kendaraan roda empat milik pribadi, menjemur sisa makanan (nasi sisa), menjemur pakaian dengan peralatan jemur, tempat untuk meletakkan kursi relatif permanen, tempat meletakkan keranjang sampah, dan tempat membuang bongkaran bangunan (bongkaran tembok). Adapun tujuan privatisasi pada umumnya adalah menambah (ekstensi) ruang untuk fasilitas rumah tangga karena kekurangan ruang (rumah tinggal yang mereka miliki tidak mampu menampung atau mewadahi aktivitas dan fasilitas yang ada).

**Tabel 5:** Keragaman Privatisasi pada Fasilitas Trotoar Sisi Barat oleh Unit-unit Rumah Tangga

KERAGAMAN OKUPANSI OLEH PIHAK RUMAH TANGGA PADA TROTOAR SISI BARAT					
RAGAM PRIVATISASI	Parkir	Jemur Nasi	Jemur Pakaian	Duduk permanen	Sampah/bongkaran
Privatisasi oleh individu untuk kepentingan rumah tangga	Trotoar digunakan untuk parkir beberapa mobil secara rutin mirip	Trotoar digunakan untuk tempat menjemur nasi kering	Trotoar digunakan untuk kegiatan menjemur pakaian dengan	Trotoar digunakan untuk meletakkan kursi duduk permanen.	Trotoar digunakan untuk meletakkan keranjang-keranjang sampah.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

	parking lot.		peralatan jemur.		
					Trotoar digunakan untuk membuang bongkaran bangunan

(Sumber: pengamatan lapangan, Maret-April 2012)

Cara privatisasi yang dilakukan cenderung merupakan tindakan permanensi ruang, yaitu memanfaatkan ruang secara reguler dalam jangka panjang. Privatisasi yang dilakukan umumnya menggunakan properties yang diletakkan di ruang publik, antara lain bak sampah, gerobak, atau papan bertulisan. Pihak rumah tangga cenderung melihat bahwa ruang publik yang mereka gunakan menjadi ruang mereka, sejauh tidak ada yang melakukan tindakan pencegahan atau pelarangan. Mereka cenderung memanfaatkan ruang-ruang kosong yang terletak dekat dengan unit rumah, sehingga secara fisik memang relatif menyatu. Dari fenomena ini dapat dikatakan bahwa privatisasi ruang publik oleh unit-unit rumah tangga dipicu oleh dua hal yaitu: kebutuhan ruang untuk ekstensi kegiatan dan ketersediaan ruang kosong yang letaknya dekat.

Privatisasi pada ruang trotoar sisi barat, selain dilakukan oleh usaha komersial dan rumah tangga, juga dilakukan oleh masyarakat RT atau RW setempat. Ragam privatisasi yang dilakukan adalah memanfaatkan ruang untuk parkir gerobak sampah komunal, membangun bangunan pos ronda, pos kamling dan balai RT, dan trotoar untuk meletakkan penyangga tiang bendera. Tujuan privatisasi adalah untuk menciptakan fasilitas layanan publik. Privatisasi dilakukan karena masyarakat berpayung pada kepentingan umum, bahwa demi kepentingan umum maka privatisasi boleh dilakukan.

Cara privatisasi oleh masyarakat cenderung melakukan okupansi dan rekayasa elemen-elemen ruang publik. Okupansi ruang dilakukan secara fisik, misalnya mereka membangun balai RT atau poskamling di depan gang. Bangunan fisik diletakkan di ruang yang strategis agar dapat mudah diakses oleh warga. Privatisasi oleh masyarakat ini dilakukan pada trotoar sisi barat, sebab ruang di sisi timur tidak tersedia lahan karena merupakan milik pribadi. Akibatnya, pada ruang trotoar di sisi barat muncul bangunan-bangunan milik publik (RT/RW) yang menutupi ruang trotoar. Akibat lanjutannya, trotoar sisi barat terpotong oleh bangunan-bangunan atau properties yang lain, sehingga keberadaannya tidak menerus (tidak kontinyus).

**Tabel 6:** Keragaman Privatisasi pada Fasilitas Trotoar Sisi Barat oleh Masyarakat

KERAGAMAN PRIVATISASI OLEH MASYARAKAT PADA TROTOAR SISI BARAT			
	Parkir	Pos Ronda	Tiang Penyangga Bendera
Privatisasi oleh masyarakat untuk kepentingan publik	Trotoar digunakan untuk parkir gerobak sampah.	Trotoar digunakan untuk meletakkan bangunan pos ronda	Trotoar digunakan untuk meletakkan penyangga tiang bendera
		Trotoar digunakan untuk bangunan pos kamling dan balai RT.	

(Sumber: pengamatan lapangan, Maret-April 2012)

Fenomena privatisasi ruang publik di jalan Tambakbayan hampir seluruhnya termasuk dalam kategori “pemanfaatan ruang kosong” untuk kepentingan pihak tertentu. Pengusaha komersial memanfaatkan ruang badan jalan untuk memberi tempat pelanggannya memarkir sepeda motor di depan warung/toko karena mereka tidak menyediakannya (tidak memiliki lahan). Bangunan para pengusaha komersial ini sebagian besar sudah sangat dekat dengan garis batas badan jalan. Akibatnya mereka memang tidak memiliki lahan parkir, dan jika diupayakan akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Usaha komersial di jalan

Tambakbayan sebagian merupakan penghuni lokal yang mengubah hunian menjadi ruang usaha, dan tidak sempat menyediakan fasilitas yang memadai bagi para pelanggannya.

Kalangan keluarga melakukan privatisasi ruang publik, misalnya menjemur cucian di trotoar sisi barat seberang jalan karena mereka tidak memiliki ruang sisa lagi untuk menjemur pakaian. Fenomena ini sudah berlangsung cukup lama, sebab semula jalan Tambakbayan sepi seperti jalan desa, sehingga kebiasaan menjemur pakaian di tepi jalan sudah berlangsung lama. Ketika terjadi perubahan ruang, warga masyarakat belum menyesuaikan perilakunya dengan perubahan yang terjadi, karena rumah mereka sudah mepet dengan jalan. Kebiasaan lama menjemur pakaian di pinggir jalan terus dilakukan.

Kalangan warga setempat juga melakukan privatisasi dengan cara menggunakan material *conblock* untuk melapisi badan jalan. *Conblock* digunakan untuk badan jalan karena memberi persepsi sebagai ruang privat. Preseden penggunaan *conblock* sudah ada, yaitu di perumahan elite maupun kampus Universitas Gadjah Mada. Warga juga menggunakan beton cor berbentuk kotak untuk pelapisan badan jalan, untuk memberi kesan privat, sebab dilawankan dengan material aspal yang konotasinya publik. Cara warga yang lain dan sangat penting adalah mendirikan bangunan pos ronda atau balai RT di ruang trotoar. Cara ini sangat menyolok, sebab muncul bangunan dengan atribut jelas. Keberadaan bangunan ini menjadi semacam patok teritori yang sangat menyolok.

Dari pengamatan yang dilakukan dan informasi yang berhasil dikumpulkan, fenomena privatisasi ruang publik di jalan Tambakbayan berlangsung karena pihak-pihak pelaku berusaha memanfaatkan ruang-ruang atau tempat-tempat yang relatif kosong. Ruang tersebut merupakan ruang yang tidak jelas fungsinya, kumuh atau kotor, penghuni atau penggunaannya tidak ada, maka sering dilihat sebagai ruang terbuang (Trancik, 1986). Ruang yang terlihat kosong dan tak termanfaatkan itu kebetulan berdekatan dengan pihak yang membutuhkan, sehingga secara keruangan sangat potensial difungsikan atau dimanfaatkan.

Pemanfaatan ruang kosong tersebut berlangsung terus-menerus dan secara teratur, sehingga akhirnya secara alamiah menjadi bagian dari teritori keruangan pelaku privatisasi. Apalagi selama pemanfaatan berlangsung, tidak pernah ada pihak-pihak yang merasa terganggu atau peduli atau menegur penggunaannya. Waktu berjalan terus, akhirnya pemanfaatan ruang-ruang bukan milik sendiri itu berlangsung dengan nyaris tanpa hambatan. Mengingat privatisasi dilandasi motivasi memanfaatkan saja, maka ruang-ruang yang terkena privatisasi cenderung kurang terawat. Kesan ini hampir ada pada seluruh fenomena privatisasi ruang publik di koridor jalan Tambakbayan.

Dari informasi lapangan tidak terdapat informasi yang terkait dengan pelimpahan hak mengelola ruang kosong dari pemilik tertentu kepada pengguna ruang yang ada. Artinya, pemanfaatannya berlangsung secara alamiah atau spontan, bukan atas dasar kesepakatan antar pihak. Privatisasi yang hakekatnya adalah okupansi tersebut belum melibatkan aktor dari luar yang kuat, melainkan terjadi dalam skala kecil-kecil namun intens di sepanjang jalan Tambakbayan.

#### **4. KESIMPULAN**

Privatisasi ruang publik yang terjadi di jalan Tambakbayan dilakukan oleh pengusaha komersial (warung, kios, PKL, toko kecil), unit-unit keluarga (rumah tangga) maupun masyarakat RT/RW setempat. Privatisasi di jalan Tambakbayan dipicu oleh dua sebab, yaitu (1) dorongan dari dalam (kebutuhan ruang karena kekurangan) dan (2) daya tarik luar (ketersediaan ruang-ruang kosong) di ranah publik. Privatisasi oleh pengusaha komersial (formal dan informal) terjadi pada ruang-ruang trotoar sisi barat dan timur, sedangkan oleh keluarga (rumah tangga) dan kelompok masyarakat terjadi pada ruang trotoar dan ruang badan jalan. Pemanfaatan privatisasi ruang publik terkait dengan kepentingan rumah tangga, ekstensi dan fasilitasi usaha komersial dan kehidupan bersama warga RT/RW setempat. Privatisasi pada umumnya berfungsi memperluas aktivitas di ruang-ruang kosong karena kekurangan ruang dan ketersediaan ruang-ruang kosong di jalan Tambakbayan. Makna

privatisasi ruang publik cenderung terkait erat dengan kepentingan usaha komersial, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan fasilitas bersama warga RT/RW.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

1. Bertens, K., 1990, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Jakarta : Gramedia.
2. Carmona, M. dkk, 2008, *Public Space, The Management Dimension*, London: Routledge.
3. Hamersma, H., 1983, *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*, Jakarta: PT Gramedia
4. Kohn, M., 2004, *Brave New Neighborhoods, The Privatization of Public Space*, New York: Routledge.
5. Madanipour, A., 1996, *Design of urban space: an inquiry into a socio-spatial process*, Chichester: John Wiley and Sons
6. Peursen, C.A van., 1988, *Orientasi di Alam Filsafat*, terjemahan Dick Hartoko, Jakarta: PT. Gramedia
7. Purbadi, Y.D., 2010, *Tata Suku dan Tata Spasial pada Arsitektur Permukiman Suku Dawan di Desa Kaenbaun di Pulau Timor*, disertasi tidak diperbitkan, Program Pascasarjana Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
8. Rapoport, A., 1928, *The Meaning of the Built Environment : A Nonverbal Communication Approach*, Beverly Hills : Sage Publikation.
9. Rapoport, A., 1977, *Human Aspects of Urban Form: Towards a Man-Environment Approach to Urban Form and Design*, New York: Pergamon Press
10. Spradley, J. P., 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiarawacana
11. Trancik, R., 1986, *Finding Lost Space: Theories of Urban Design*, New York: John Wiley and Sons
12. Zeisel, J., 1981, *Inquiry by Design : Tools for Environment-Behavior Research*, Cambridge University Press, Cambridge

**BELAJAR DARI SEBUAH DESAIN RUANG PUBLIK KOTA  
“MEMAHAMI SISI LAIN DARI ALUN-ALUN SEBAGAI INTI KOTA  
YANG BERUBAH FUNGSI”**  
Studi kasus: Taman Masjid Raya Bandung

**Ghoustonjiwani Adi Putra<sup>1)</sup>, Hamdiel Kaliesh<sup>2)</sup>**  
Mahasiswa Jurusan Arsitektur, SAPPK, Institut Teknologi Bandung<sup>1,2)</sup>  
Jl. Ganeca 1 Bandung 57102  
Email: Ghoustonputra@yahoo.com<sup>1)</sup>  
Email: Hamdiel\_st@yahoo.com<sup>2)</sup>

**ABSTRAK**

*Alun-alun Bandung merupakan salah satu produk Arsitektur perkotaan yang mengalami beberapa kali renovasi. Terakhir pada tahun 2006, Alun-alun kota Bandung telah dirancang ulang dengan harapan memberikan wadah aktifitas masyarakat kota yang lebih positif dan berkelanjutan. Perancangan ulang ini antara lain dengan pelebaran Masjid Raya Bandung yang menghabiskan ruas jalan barat Alun-alun dan memakan separuh lahan Alun-alun Bandung. Alun-alun Bandung sebagai inti kota seakan-akan berubah fungsi menjadi Taman Masjid Raya Bandung. Makalah ini bertujuan melakukan studi peninjauan ulang terhadap desain ruang publik inti kota Bandung, yang diharapkan dengan adanya peninjauan ini akan diambil suatu pembelajaran dalam memahami sisi lain dari ruang publik inti kota, baik dalam dimensi fisik maupun sosial. Metode penulisan diawali dengan tahapan eksplorasi, yaitu mengeksplorasi pola aktifitas pengguna Alun-alun Bandung dengan pendekatan unobstrusive Metode, dan analisis Faktual yang ditampilkan kedalam bentuk Behaviour Mapping. Dari pre-eliminatory survei ini didapat berbagai ragam pola aktifitas yang bersifat Insidental, Festival dan Temporer harian. Aktifitas-aktifitas ini merupakan aktifitas umum yang terjadi pada ruang publik, mengutip pada (Matthew Carmona, 2003) yang melihat nilai kualitas ruang publik berdasarkan 3 aktifitas: Necessary, Spontaneous, dan Social, demikian halnya dengan studi kasus ini, tetapi karena adanya perubahan setting spasial, aktifitas-aktifitas baru muncul menjadi aktifitas religi, aktifitas ekonomi dan aktifitas kriminal. Aktifitas-aktifitas informal ini muncul dengan adanya setting spasial yang berubah, artinya Desain alun-alun kota Bandung memunculkan ragam aktifitas baru baik bersifat formal maupun informal. Desain alun-alun yang baik seharusnya memiliki setting spasial yang mendukung aktifitas-aktifitas dari pengguna alun-alun. Keberhasilan sebuah desain tidak bisa dilihat dari segi fisik maupun estika semata, dimensi sosial tidak bisa dilupakan. Diharapkan dengan adanya peninjauan Desain ini mampu memberikan pembelajaran lebih dalam memahami sisi lain dari inti kota.*

**Kata kunci :** Alun-alun, Inti kota, Behaviour Mapping, pola aktifitas.

**1. PENDAHULUAN**

Alun-alun yang terdapat di pusat kota biasanya berada diantara pada bangunan komersial, hiburan dan jasa, yang menjadikan sebagai bagian dari struktur fisik kota dimana bentuk elemen fisiknya ada yang tetap dan ada yang berubah. (Ahdiat, 1993), Pola alun-alun di pulau Jawa pada umumnya adalah :

1. Bangunan penguasa disebelah selatan
2. Masjid disebelah barat
3. Penjara disebelah utara atau timur
4. Dikelilingi oleh jalan pada ke-empat sisinya



Sedangkan desain Alun-alun kota Bandung pada saat ini, berbeda dengan alun-alun kota lainnya yang dikelilingi 4 penjuru jalan dan dikelilingi berberapa bangunan inti kota, seperti kantor pemerintahan, penjara dan umumnya dengan sebelah barat alun-alun selalu di rancang adanya sebuah masjid, sedangkan tatanan spasial pada alun-alun Bandung yang sekarang batas jalan sebelah barat di tutup dan menjadi satu kesatuan dengan halaman Masjid Raya Bandung, sehingga taman alun alun kota ini terlihat seperti halaman Masjid Raya Bandung.

Selain itu alun-alun kota Bandung mengalami kehilangan jati diri dan citra sebagai daerah kawasan inti pusat kota Bandung, permasalahan yang juga penting pada kawasan ini adalah mulai hilangnya makna tempat. Kawasan alun-alun tidak lagi menjadi pusat kegiatan dan pusat kota yang menarik bagi masyarakat. Jika dahulu alun-alun menjadi tempat utama untuk ke pusat kota. Maka sekarang alun-alun hanya sebagai tempat persinggahan setelah lelah berbelanja di jalan dalam kaum ataupun jalan kepatihan, (Ningsih, 2008)

Perubahan setting spasial ini dilakukan kurun waktu 3 th dari tahun 2003-2006, selain itu perubahan fungsi ruang juga ada pada penambahan basement sebagai fungsi parkir mobil dan motor dengan luas lantai B1 9.255 m dan areal parkir lantai B2 seluas 837 m, area parkir seluas ini sebenarnya bisa menampung 1.000 mobil dan 250 motor sehingga dapat membebaskan parkir kendaraan bermotor di seputar taman alun-alun. Adanya Perubahan fungsi ruang dan perubahan setting spasial seperti ini diduga merubah pola aktifitas dari pengguna, dalam penelitian ini setting spasial Alun-alun kota Bandung merupakan studi kasus yang akan dilakukan penilaian mengenai ketepatan desainnya. Perubahan fungsi ruang dan perubahan setting spasial atau tatanan fisik seperti ini dapat merubah pola aktifitas dari pengguna. Seperti yang dikutip oleh (Sunaryo, 2004) pada (Lang, 1994) yaitu “perubahan tatanan fisik erat kaitannya dengan perubahan pola aktivitas. Tatanan fisik yang berbeda akan memicu perilaku yang berbeda karena hubungan timbal balik antara pola perilaku dengan *milieu* pada kawasan”.

Dalam penelitian ini setting spasial atau tatanan fisik Alun-alun kota Bandung merupakan studi kasus yang akan dilakukan penilaian mengenai ketepatan desainnya. Sedangkan penilaian dari disain alun-alun itu sendiri dapat dilakukan dengan tahapan penilaian eksplorasi yaitu: dengan mengkaji kesesuaian tujuan dan harapan pembangunan alun-alun kota Bandung bila dilihat dari kesesuaian pola aktifitas pengguna.

## **2. KAJIAN TEORI**

### **2.1. Alun-alun Sebagai *public Space***

*“Public space is stage upon which the drama of communal life unfolds”* (Stephen Carr, 1992). Dalam bukunya yang berjudul *“Public Space”*, Stephen Carr memaparkan bahwa makna sebuah ruang publik adalah sebuah panggung yang terbentang dengan segala bentuk aktifitas dan pergerakan manusia didalamnya, interaksi sosial, dan sebuah ruang yang berfungsi sebagai sarana permainan dan relaksasi. *“Public space (i.e., physical spaces that are open to all) is hub of activity that can influence both the daily lives of individuals and the development of the community”* (Bélanger, 2007), Hélène Bélanger memaknai ruang publik merupakan sebuah ruang fisik yang terbuka secara keseluruhan, menjadi pusat dari aktifitas yang dapat berpengaruh pada keseharian seseorang dan perkembangan dari sebuah komunitas. Sedangkan dalam (Sunaryo, 2004). Ruang publik dapat dikatakan sebagai wadah interaksi sosial masyarakat dan ruang dimana semua lapisan masyarakat bertemu dan berinteraksi – bahwa ruang publik potensial sebagai katalisator pembentuk ikatan sosial dalam sebuah komunitas. Ruang publik pada sebuah kawasan potensial sebagai ruang bersama dimana pelaku-pelaku aktivitas dari berbagai fungsi dalam kawasan bertemu dan berinteraksi. Ruang publik kota sebagai elemen kualitatif dari perkembangan sebuah kota yang memiliki arti penting bagi perancangan kota dan arsitektur, ruang publik bukan hanya sebagai infrastruktur sebuah kota yang sekedar harus ada melainkan perlu

diperhatikan kualitas desainnya yang diharapkan mampu menghidupkan kehidupan sosial pengguna. (Sabine Friedrich, 2006)

## **2.2. Nilai Kualitas Ruang publik**

Nilai kualitas dalam ruang publik adalah Dimensi nilai-nilai yang harus dipenuhi sebuah ruang publik untuk dapat dikatakan berhasil dalam perencanaan maupun pemakaiannya, Sedangkan dalam (Matthew Carmona, 2003), *“good places frequently serve more than one purpose”*. dalam pencapaian kualitas ruang publik yang baik seharusnya memperhatikan :

### **1. Kenyamanan**

Kenyamanan merupakan syarat utama dalam menilai keberhasilan desain ruang publik. lamannya waktu pengguna ruang publik dalam menggunakan ruang publik adalah fungsi dan indikator dari kenyamanan. Dimensi dari tingkat nyaman itu sendiri ada 3 kategori kenyamanan antara lain : kenyamanan lingkungan alam (pencahayaan, angin, air dsb), kenyamanan fisik (tempat duduk, jalan setapak, lampu dsb), dan nyaman sosial psikologi.

### **2. Relaksasi**

Kenyaman psikologi merupakan syarat utama dalam mendapatkan rasa rileks, *relaxation is more developed state with the “body and mind at ease”* (Stephen Carr, 1992). dalam setting spasial ruang publik elemen alam seperti- vegetasi, air, jauh dari kebisingan suara lalu lintas kendaraan mampu memberikan suasana rileks.

### **3. Passive engagement**

Keterlibatan pengguna secara pasif terhadap obyek dan aktifitas pengguna lain, dalam ruang publik disebut Passive engagement, dimana dapat membuat pengguna merasakan relaksasi, contohnya pengguna ruang publik akan lebih betah tinggal dan duduk di bangku ruang publik apabila melihat aktifitas orang lain dan obyek-obyek fisik ruang publik lainnya seperti, air mancur, vegetasi, dsb. Oleh karena itu sebuah ruang publik diharapkan tercipta adanya passive engagement dalam aktifitas penggunaannya.

### **4. Active engagement**

Pengguna tidak lagi berperan sebagai subyek yang melihat, dan mendengar tetapi secara aktif sebagai pelaku dari aktifitas pada ruang publik tersebut, ruang publik diharapkan mampu menyediakan kesempatan pengguna dalam aktif sebagai subyek aktifitas yang saling berinteraksi sosial satu sama lain.

### **5. Discovery**

Dapat dikatakan discovery merupakan kegembiraan baru dalam sebuah ruang publik, ruang publik diharapkan mampu memeberikan kenyamanan dalam visual secara mengejutkan. Artinya adalah ada jenis kegiatan-kegiatan mengembirakan dan mengejutkan baru yang bersifat ceria dan menarik, contohnya adalah adanya berberapa kegiatan lomba mingguan, street teater, festival seni, parade, pasar pagi.dsb.

## **2.3. Nilai kualitas ruang publik, pola aktifitas dan karkarakteristik fisik spasial**

Selain itu sebuah ruang publik skala kota juga dapat dikatakan memiliki nilai dan memiliki sebuah aktifitas yang lebih hidup tergantung dari kualitas ruang publik tersebut, kualitas ini dapat dinilai dari sejauh mana ruang publik tersebut mampu mewedahi aktifitas pengguna yang beragam, memberikan kenyamanan dan keamanan. (Jan Gehl, 2006).

Pada kawasan yang sedang berubah, pola aktivitas akan berasimilasi dengan tatanan fisik yang mengakomodasinya dan sebaliknya. Akan tetapi, perubahan yang terlalu cepat cenderung menimbulkan permasalahan ketimpangan antara pola aktivitas dengan lingkungan fisiknya. (Sunaryo, 2004). Lebih lanjut Sunaryo mengutip dari (Lang, 1984), *“Bahwa Setiap tatanan fisik akan mengundang atau memicu perilaku tertentu dalam beraktivitas. Sebagai sebuah lingkungan fisik dansosial, sebuah kawasan akan selalu memiliki hubungan timbal balik (synomorphy) antara standing pattern of behavior dengan millieu”*. Pada kawasan yang sedang berubah, pola aktivitas akan berasimilasi dengan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

tatanan fisik yang mengakomodasinya dan sebaliknya. Akan tetapi, perubahan yang terlalu cepat cenderung menimbulkan permasalahan ketimpangan antara pola aktivitas dengan lingkungan fisiknya

Sedangkan hubungan pola aktifitas dengan karakteristik fisik spasial menurut (Gehl, 2007) dapat digambarkan Gambaran sbb: Sedangkan hubungan pola aktifitas dengan kualitas ruang publik menurut (Gehl, 2007) dapat digambarkan Gambaran sbb:

**Tabel 1:** Hubungan kualitas ruang publik dengan ragam aktifitas pengguna  
 sumber: (Gehl, 2007)

Kategori aktifitas	Kualitas ruang publik	
	Buruk	Baik
<i>Necessary activities</i>	●	●
<i>Optional /spontaneous Activities</i>	●	●●●●●
<i>Social activities</i>	●	●

Pada figure diatas dapat digambarkan adanya hubungan kualitas dari ruang publik dengan ragam/kategori aktifitas pada ruang publik, lebih lanjut Jan Gehl memaparkan bahwa dalam kualitas ruang publik yang buruk akan hanya terjadi necessary activities, dengan cepat pengguna akan menggunakan ruang publik seperlunya dan akan segera meninggalkan ruang publik secepatnya, tetapi ketika kualitas ruang publik membaik necessary activities mengalami peningkatan. Kualitas ruang publik yang baik memberikan pilihan dan alternatif pengguna ruang publik untuk menggunakan dan menikmati ruang publik lebih lama sehingga pola necessary activities akan lebih beragam. Sedangkan *optional activities* pada ruang publik yang buruk akan sedikit terjadi atau bahkan tidak sama sekali, Ruang publik yang baik akan menjadi daya tarik pengguna dalam melakukan aktifitas bersifat pilihan dengan motif yang berbeda dan jumlah dari optional activities akan meningkat dengan signifikan. Akan ada variasi dari optional activities yang sangat beragam apabila kualitas ruang publik membaik. Berikut pula pada social activities, aktifitas jenis ini disebut juga sebagai resultan activities, karena jenis aktifitas bisa menjadi hasil dari 2 aktifitas sebelumnya necessary activities, maupun optional activities. (Gehl, 2007)

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan diawali dengan tahapan eksplorasi, yaitu mengeksplorasi pola aktifitas pengguna Alun-alun Bandung dengan pendekatan *unobstrusive Method*, dan analisis Faktual dengan *Graphic analysis* yang ditampilkan kedalam bentuk *Behaviour Mapping*.

**Unobstrusive Method**, Yaitu metode pengumpulan data menggunakan audio visual materials, observasi langsung (pengamatan terlibat) secara faktual, Wawancara tidak terstruktur, dan sketsa spasial.

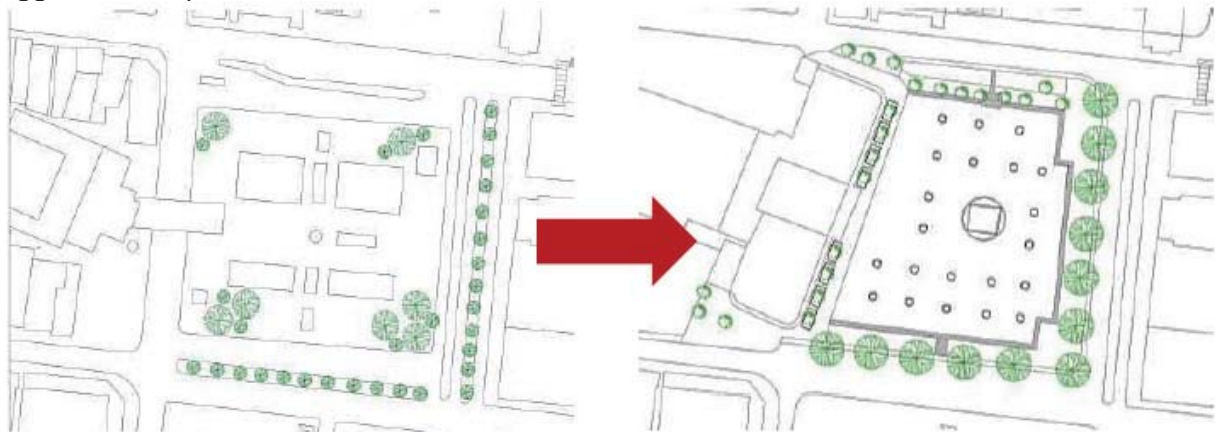
**Graphic Analysis**, Dalam proses *Graphic Analysis* diperlukan analisa visual dari images yang didapat dengan menstrukturkan dari karakteristik fisik spasial yang telah didapat, dan dilakukan pendataan atribut dari karakteristik fisik spasial tersebut. Dalam ruang publik karakteristik fisik spasial dapat dianalisis dan dipetakan melalui proses melihat, analisa, dan menstrukturkan informasi dalam satu unit analisis, bisa disebut pula dengan

proses Graphic Analysis, yaitu menganalisa maupun memetakan elemen dari karakteristik fisik sebuah spasial ruang publik. Lebih jelas lagi contoh dari proses Graphic analysis seperti yang digambarkan oleh Sadler, B dan A. Carlson, eds., dalam (Richard C. Sardon, 1986)

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Perubahan karakteristik fisik spasial Alun-alun Bandung**

Kawasan inti pusat kota mengalami penurunan citra, hal ini disebabkan oleh hilangnya jati diri kawasan, dahulu alun alun kota sebagai salah satu ruang terbuka publik dan sebuah tempat sehingga banyak dikunjungi oleh warga kota, Namun setelah Alun-alun berubah menjadi halaman Masjid Raya Bandung, jatidirinya sebagai ruang publik yang bebas dikunjungi oleh semua warga tanpa terkecuali semakin menurun dan pengunjung alun-alun pun semakin berkurang, (Ningsih, 2008). Masih dalam (Ningsih, 2008), Dengan adanya perubahan karakter spasial alun-alun kota Bandung yaitu dengan perluasan Masjid raya Bandung memberikan penambahan fungsi alun-alun kota yang lebih bervariasi, aktifitas pengguna alun-alun kota Bandung semakin bervariasi Masjid raya bandung merupakan bangunan penting yang menjadi tengaran landmark pusat kota Bandung, sekarang pengolalaanya dibawah pemerintahan propinsi Jawa Barat. Dulunya dulunya dikenal sebagai Masjid Agung berupa bangunan sederhana dengan atap rumbia. Masjid ini mengalami perombakan besar-besaran sekitar tahun 2003 dengan arsitektur timur tengah, dua menara setinggi 80m dan perluasan kearah alun-alun,





**Gambar 1**  
Perubahan karakteristik fisik spasial alun-alun bandung  
Sebelum 2006 (kanan), setelah 2006 (kiri)

##### **Ragam aktifitas pada Alun-alun Bandung**

Sesuai dengan 3 pengkategorian aktifitas menurut Jan Ghel, yang dikutip oleh (Matthew Carmona, 2003), pada Alun-alun kota Bandung sendiri juga dapat dikategorikan sebagai ruang publik skala kota memiliki 3 aktifitas tersebut, aktifitas-aktifitas ini dapat diamati dengan faktual dan graphic analysis yang dapat dikenali dengan melihat pola aktifitas pelakunya, contoh dari aktifitas-aktifitas ini antara lain:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**




**Tabel 2:** Ragam aktifitas pengguna pada ruang publik menurut (Jan Gehl, 2006)

Kategori	Jenis aktifitas	Aktifitas alun-alun
Necessary activities		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Necessary activities</i> berjalan melintang untuk mencari jalan pintas (Kiri),</li> <li>• <i>Necessary activities</i> berjalan lurus sesuai alur pedestrian (Kanan)</li> </ul> <p><i>Merupakan aktifitas seperlunya dengan motif yang jelas, dalam aktifitas jenis ini dapat di ketahui dengan melihat pergerakan aktifitas yang cenderung memiliki 1 arah tujuan yang jelas dan cenderung beraktifitas lebih cepat, dimana para pelaku aktifitas ini biasanya cenderung memiliki motif dalam menggunakan fasilitas pada ruang publik.</i></p>
Optional spontaneous Activities		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Spontaneous Activities</i>, duduk bercakap-cakap dan melihat-lihat (Kiri)</li> <li>• <i>Spontaneous Activities</i>, duduk, berdiri berjalan dan berbincang-bincang (kanan)</li> </ul> <p><i>Merupakan aktifitas pilihan dan bersifat spontan, aktifitas ini erat hubungannya dengan perubahan suasana dan perasaan dari pengguna cenderung untuk merubah aktifitas dan perilakunya karena adanya setting behaviour dan tatanan spasial tertentu, misalnya : aktifitas duduk lalu membaca, duduk berdiri dan berjalan kearah tertentu, duduk dengan melihat-lihat suasana, berjalan dengan mengamati sekitar dsb.</i></p>
Social activities		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Social Activities</i>, anak-anak kecil bermain bersama</li> <li>• <i>Social Activities</i>, sekumpulan remaja bergerombol berbincang-bincang</li> </ul> <p><i>Social activities merupakan aktifitas social yang bersifat interaksi dengan sesama (bersosialisasi), aktifitas ini biasanya dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan cenderung dilakukan secara berkelompok, dimana pelaku aktifitas ini memiliki kesamaan tujuan tertentu dalam penempatan spasial maupun setting behaviour, aktifitas seperti ini dapat diamati biasanya berkumpul dalam sebuah setting spasial tertentu, contoh dari aktifitas social ini antara lain : sekumpulan pengamen, sekumpulan pelajar yang duduk dan bermain, sekumpulan anak-anak bermain, satu keluarga yang duduk dan bercakap-cakap dsb.</i></p>

Sebelumnya telah dijelaskan pada ruang publik setidaknya ada 3 pengkategorian aktifitas menurut Jan Ghel, yang dikutip oleh (Matthew Carmona, 2003), pada Alun-alun kota Bandung sendiri yang dapat dikategorikan sebagai ruang publik skala kota memiliki 3 aktifitas tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi dengan perubahan karakteristik fisik spasial pada rung publik ini memberikan ragam aktifitas-aktifitas baru yang tak terduga, umumnya aktifitas aktifitas ini bersifat informal, aktifitas-aktifitas ini antara lain:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

**Tabel 3:** Ragam aktifitas baru pada Alun-alun Bandung yang terbentuk dari perubahan setting spasial

Kategori	Jenis aktifitas	Aktifitas alun-alun
Religious Activities		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Religious activities</i>, aktifitas penjual barang religi (Kiri)</li> <li>• <i>Religious activities</i>, aktifitas pengajian pada masjid raya. (kanan)</li> </ul> <p><i>Religious activities merupakan aktifitas-aktifitas dari pengguna yang timbul karena adanya pengaruh penempatan Masjid Raya terhadap alun-alun kota, aktifitas ini sebenarnya dapat digolongkan pada ragam Necessary activities, tetapi karena aktifitasnya sangat beragam dan memiliki persamaan proses terbentuk (dari penempatan masjid) maka dapat digolongkan menjadi aktifitas baru, aktifitas-aktifitas ini antara lain: aktifitas jual-beli perlengkapan solat, kegiatan pengajian, dsb</i></p>
Economics Activities		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Economic Activities</i>, Aktifitas jual beli oleh pengguna dan penjual mukena dan jilbab (kiri).</li> <li>• <i>Economic Activities</i>, Aktifitas jual beli oleh pengguna dan penjual religi songkok dan tasbih (kanan)</li> </ul> <p><i>Economic activities adalah aktifitas ekonomi yang didasari kepentingan untuk berjual beli/transaksi, aktifitas ini merupakan jenis aktifitas tambahan yang sengaja di masukan dalam pengkategorian batasan aktifitas dan perilaku pengguna dengan pertimbangan bahwa pada studi kasus (alun-alun kota Bandung) terdapat banyak pelaku aktifitas ini seperti penjual informal, PKL, dsb.</i></p>
Criminal Activities		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Criminal activities</i>, Homeless, pemulung dan pengemis pada gasebo alun-alun tidak tetap sebagai salah satu bentuk aktifitas insidental informal.</li> </ul> <p><i>Criminal activities merupakan aktifitas yang memberikan visualisasi yang buruk bagi pengguna, aktifitas ini terbentuk dari aktifitas-aktifitas pengguna terutama oleh pengguna informal, aktifitas ini dapat dilihat dari kecenderungan memberikan rasa ketidak nyamanan pengguna baik secara visual maupun emosional, misalnya: segorombolan anak muda, aktifitas dari homeless, pengemis, dsb.</i></p>

3 aktifitas baru ini muncul karena adanya perubahan setting spasial yang berubah, Alun-alun Bandung yang awalnya berfungsi sebagai ruang publik inti kota secara fisik maupun spasialnya mampu menciptakan aktifitas-aktifitas baku seperti *Necessary*, *spontaneous*, dan *social*. Tetapi dengan perubahan setting spasialnya baik secara fisik maupun spasialnya mampu menjadi generator penarik aktifitas-aktifitas baru yang muncul karena perubahan setting ini.

### Pola aktifitas pengguna Temporer harian



Gambar 2

Pola aktifitas temporer harian dan Generator penarik pengguna  
Pola Generator penarik pengguna (kanan), Pola aktifitas temporer harian (kiri)

Pola aktifitas pengguna temporer harian adalah pola tatanan ragam aktifitas pengguna alun-alun Bandung yang terjadi tiap hari dan menjadi aktifitas harian umum. Ruang publik di konstruksi oleh aktifitas-aktifitas yang temporer artinya aktifitas ini tidak terjadi 24 jam dan cenderung berpindah. Pada hari biasa senin-kamis. Aktifitas-aktifitas harian dapat dilihat pada alun-alun ini. aktifitas-aktifitas ini meliputi:

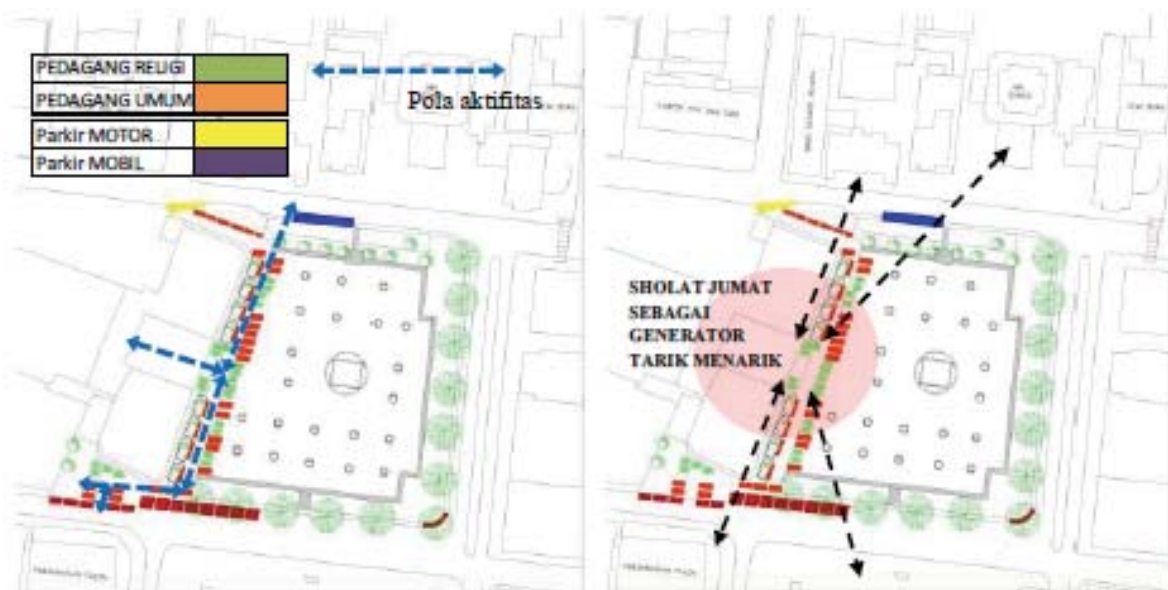
1. Pola Aktifitas Religi yang terkonstruksi dari pedagang Religi dan pembeli religi
2. Pola Aktifitas Ekonomi yang terkonstruksi dari pedagang umum dan pembeli umum.
3. Pola aktifitas Ekonomi yang terkonstruksi dari Pkl makanan dan pembeli.
4. Pola aktifitas yang terkonstruksi dari pengguna Parkir motor
5. Pola aktifitas yang terkonstruksi dari pengguna Parkir mobil

Bentuk dari pola aktifitas ini bersifat *radial* dan menyebar keseluruhan penjurus alun-alun Bandung. Berberapa pola aktifitas seperti aktifitas religi, ekonomi bersifat sebagai aktifitas stimulasi yaitu aktifitas yang mendorong aktifitas-aktifitas seperti *Spontaneous* dan *Social activities* lebih sering terjadi dan lebih bervariasi.

Sedangkan yang menjadi generator penarik dari ragam aktifitas pengguna ini adalah alun-alun Bandung sebagai inti kota, pertokoan jl. Asia Afrika, Parayangan Plasa, Gedung Merdeka dan berberapa bangunan historis disekitarnya. Generator penarik ini bersifat menarik pengguna untuk menggunakan maupun sekedar singgah pada alun-alun Bandung, Selain itu keberadaan Basement pada alun-alun juga menjadi generator utama dalam penarik pengguna. Kebutuhan parkir masyarakat kota yang tinggi membutuhkan ruang parkir menarik pengguna basement alun-alun dalam menggunakan ruang parkir. Alun-alun sebagai inti kota memiliki daya tarik kuat oleh pengguna dalam menempati ruang. Generator penarik ini bersifat 2 arah atau tarik menarik. Tarik menarik ini dapat diumpamakan seperti:

1. Pengguna formal datang ke alun-alun Bandung hanya untuk memarkir kendaraan, tujuan awal dari pengguna ini adalah pada generator sekitar seperti Parayangan plasa, otista, The Kings, dll (masih dalam areal inti kota).
2. Pengguna formal datang ke alun-alun hanya untuk singgah, menunggu waktu sholat, makan, istirahat, berjalan jalan setelah berbelanja pada generator sekitar (pertokoan jl. Asia Afrika, Parayangan Plasa)

Pola aktifitas pengguna temporer mingguan (sholat jumat)



Gambar 3

Pola aktifitas temporer mingguan dan generator penarik pengguna  
Pola Generator penarik pengguna (kanan), Pola aktifitas temporer mingguan (kiri)

Pola aktifitas pengguna temporer mingguan adalah pola tatanan ragam aktifitas pengguna alun-alun Bandung yang terjadi tiap 1 minggu sekali yaitu pada hari jumat, dimana pada tiap hari jumat alun-alun Bandung ramai dan didominasi pengguna yang melakukan ibadah sholat jumat. Aktifitas-aktifitas ini meliputi:

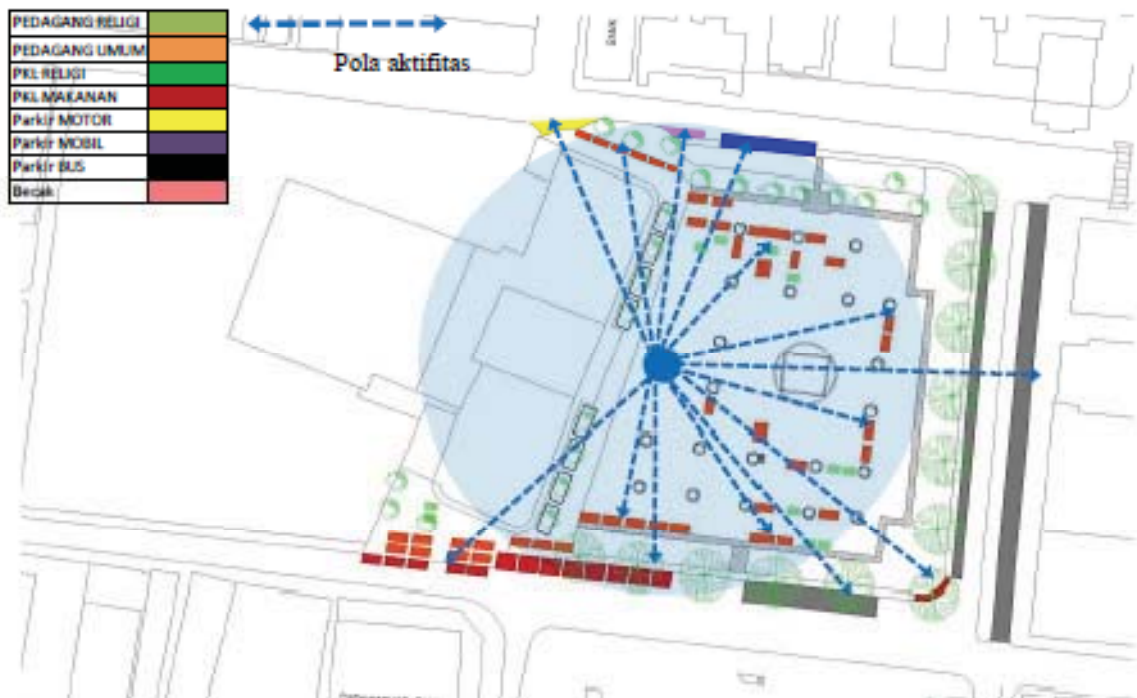
1. Pola Aktifitas Religi yang terkonstruksi dari pedagang Religi dan pembeli religi
2. Pola Aktifitas Ekonomi yang terkonstruksi dari pedagang umum dan pembeli umum.
3. Pola aktifitas Ekonomi yang terkonstruksi dari Pkl makanan dan pembeli.
4. Pola aktifitas yang terkonstruksi dari pengguna Parkir motor.
5. Pola aktifitas yang terkonstruksi dari pengguna Parkir mobil

Bentuk dari pola aktifitas ini bersifat *linear* tegak lurus mengikuti setting pedestrian masjid yang langsung berhubungan dengan 2 pintu keluar diujung alun-alun Bandung Berberapa pola aktifitas seperti aktifitas religi, ekonomi bersifat sebagai aktifitas stimulasi yaitu aktifitas yang mendorong aktifitas-aktifitas seperti *Spontaneous* dan *Social activities* lebih sering terjadi dan lebih bervariasi. Selain itu dominasi aktifitas religi sangat kuat terjadi pada pintu keluar dan masuk masjid dimana pada spot ini aktifitas religi bersifat ekonomi terjadi.

Sedangkan yang menjadi generator penarik dari ragam aktifitas pengguna ini adalah alun-alun Bandung sebagai inti kota, dengan kegiatan sholat jumat yang menjadikan ruang publik inti kota ini didominasi oleh pengguna pria.



### Pola aktifitas pengguna insidental festival



Gambar 4

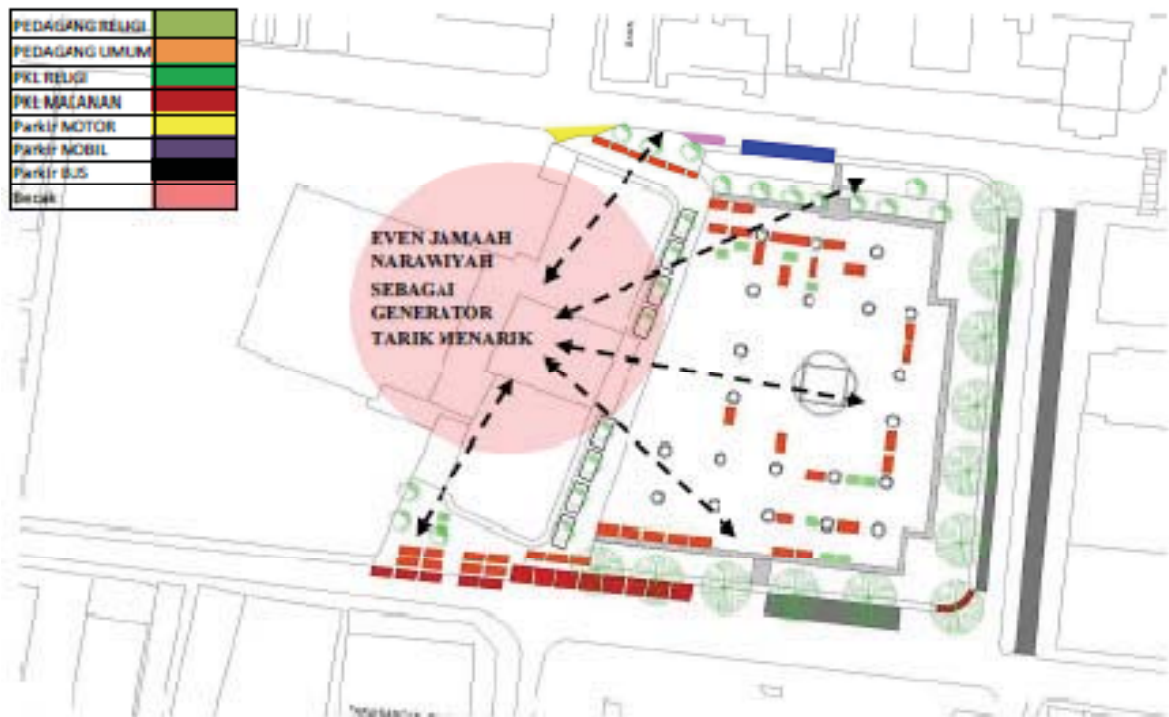
Pola aktifitas pengguna Insidental Festival

Pola aktivitas insidental festival merupakan pola penggunaan ruang terbuka yang muncul secara insidental dan muncul karena adanya suatu even-even tertentu seperti festival. Alun-alun Bandung yang menjadi satu kesatuan dengan masjid raya Bandung, secara langsung setting spasialnya berubah dan mengakibatkan adanya perubahan pola aktifitas penggunaannya. Jamaah Narawiyah merupakan salah satu even festival yang bersifat *discovery* yaitu kegembiraan baru dalam sebuah ruang publik, ruang publik diharapkan mampu memberikan kenyamanan dalam visual secara mengejutkan. Artinya adalah ada jenis kegiatan-kegiatan mengembirakan dan mengejutkan baru yang bersifat menarik baik pengguna formal maupun informal sehingga terpenuhinya 5 dimensi kualitas ruang publik (Matthew Carmona, 2003), *Kenyamanan, relaxation, passive Engagement, Active engagement, dan Discovery* dari ruang publik yang mengutip dari "good places frequently serve more than one purpose".

Pola aktifitas yang terbentuk insidental antara lain:

1. Pola Aktifitas Religi yang terkonstruksi dari pedagang Religi
2. Pola Aktifitas Ekonomi yang terkonstruksi dari pedagang umum
3. Pola aktifitas Ekonomi yang terkonstruksi dari Pkl makanan
4. Pola aktifitas Religi yang terkonstruksi dari Pkl Religi
5. Pola aktifitas Religi yang terkonstruksi dari Parkir motor
6. Pola aktifitas Religi yang terkonstruksi mobil
7. Pola Aktifitas Religi yang terkonstruksi dari keberadaan Parkir bus
8. Pola Aktifitas Religi yang terkonstruksi dari pangkalan Becak

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
"Sticks and Carrots"  
Reward and Punishment



Gambar 5  
Pola Generator penarik insidental dan festival

Jamaah Narawiyah merupakan kegiatan tahunan yang bisa dikategorikan sebagai insidental festival/ Discovery yang menjadi generator penarik utama pengguna ruang publik. berbagai ragam pengguna menempati dan memposisikan diri pada ruang publik ini untuk mendapatkan teritori tertentu sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pengguna. Adanya kegiatan ini tiap 1 tahun sekali. Merupakan generator penarik dari keragaman aktifitas pengguna Alun-alun Bandung. Pada tanggal 31 april 2012 Jamaah Narawiyah diselenggarakan hingga mampu menarik pengguna dalam menempati ruang publik ini. adanya tarik menarik antara kegiatan Jamaah Narawiyah dengan para ragam pengguna yang membentuk pola aktifitas-aktifitas ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu yaitu pada waktu adanya festival tertentu dan bersifat insidental. Pola aktifitas dari aktifitas informal ini bersifat menyebar keseluruh Alun-alun Bandung, hal ini disebabkan kegiatan Jamaah Narawiyah menggunakan sebagian ruang publik ini untuk kegiatannya. Pola aktifitas dari informal ini juga bersifat *sporadic* artinya berkembang semakin besar dan luas juga semakin bervariasi menjelang berlangsungnya kegiatan inti dan peak time dari Jamaah Narawiyah (19.00-22.00).

## 5. KESIMPULAN DAN TEMUAN

Alun alun sebagai inti kota seharusnya memiliki karakteristik fisik dan spasial yang mampu mengidentitaskan kota, alun-alun kota merupakan Landmark kota yang harus dija keberlangsungan dan kualitasnya. Kualitas Alun-alun yang baik tidak hanya dilihat dari segi fisik spasialnya saja, keberlangsungan aktifitas sosial didalamnya harus diperhatikan dengan baik untuk memebri suatu gambaran inti kota yang berkualitas, aman dan sehat. Desain dari alun-alun Bandung sendiri sudah keluar dari pakem inti kota di indonesia yang seharusnya dikelilingi jalan pada ke-empat sisinya, tetapi pada kasus alun-alun Bandung berbeda dengan penyatuan dari masjid raya Bandung dengan alun-alun yang menghabiskan hampir separuh Alun-alun kota sehingga inti kota menjadi berubah menjadi Taman Masjid

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Raya Bandung. Dengan perubahan setting spasial ini mampu merubah pola aktifitas pengguna menjadi lebih bervariasi.

1. Adanya Multi aktifitas yang saling bertumbukan menyebabkan inti kota memiliki fungsi dan identitas dan citra yang berbeda-beda. Fungsi dan identitas sebuah Inti kota dapat berubah dengan adanya perubahan setting spasial ini, hal ini bisa dilihat dari adanya multi aktifitas yang bervariasi, yang terjadi dengan saling bertumbukan bergerak dalam konteks waktu yang berbeda-beda (Harian, Mingguan, dan Tahunan)
2. Setting Spasial yang berubah (penggabungan fungsi Ibadah dan fungsi Inti kota) memunculkan 3 aktifitas baru yaitu: Aktifitas Religi, Aktifitas Ekonomi, dan Aktifitas kriminal.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

1. Ahdiat, D. (1993). *Morfologi Pusat Kota, Suatu Telaah Tentang Pertumbuhan Alun-Alun, Studi Kasus Kota Bandung*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
2. Barliana, M. S. (2010). *Arsitektur, Komunitas, Sosial*. Bandung: Metatekstur, penerbit Diskursus.
3. Bélanger, H. (2007). *Public Spaces in Gentrifying Neighbourhoods: Conflicting Meanings? ENHR 2007 International Conference „Sustainable Urban Areas“*, 2.
4. Debra Efroymsen, T. T. (2009). *Public Spaces: How They Humanize Cities*. Dhaka: HealthBridge - WBB Trust.
5. Gehl, J. (2007). *“three types of outdoor activities” and “life between buildings” from life between buildings using public spaces (1987)*. In a. E. Michael Larice, *The Urban design Reader* (p. 365). New York: Routledge.
6. Jan Gehl, d. L. (2006). *Public Spaces for a Changing Public Life*.
7. Matthew Carmona, T. h. (2003). *Public Places Urban Spaces*. London: Architectural Press.
8. Ningsih, Y. T. (2008). *Penciptaan Tempat Dalam Konteks Revitalisasi Kawasan, Studi Kasus : Kawasan Inti Pusat Kota*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
9. Richard C.Smardon, J. F. (1986). *Voundations for Visual Projects Analysis*. Toronto: Jhon Wiley & Sons.
10. Sabine Friedrich, d. p. (2006). *Suitability of Public Spaces in restructured areas for Appropriation by Young People. Aesop 05*.
11. Stephen Carr, M. F. (1992). *Public Space*. New York: Cambridge University Press.
12. Sunaryo, R. G. (2004). *Penataan Ruang Publik Yang Memadukan Pola Aktivitas Dengan Perubahan Fisik Kawasankasus Kawasan Tambak Bayan - Babarsari, Yogyakarta*. Seminar & Lokakarya Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, 1.

## IMPLICATION OF GREEN OPEN SPACES IN THE DEVELOPMENT OF 'ECO SUSTAINABLE CITY' AND THE FUTURE OF CITY POLICY STRATEGY

**Quintarina Uniatty**

Landscape Architecture Department  
Faculty of Landscape Architecture and Environmental Technology  
Trisakti University  
E-mail : [quintarina@yahoo.com](mailto:quintarina@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Sustainability and success of urban areas depends on readiness and accuracy of the primary considerations of community needs, in the sense that the continuity of life and living can be maintained in balance. Problems can immediately be seen in city's physical environment due to the imbalance, such as; population density, building density, environmental and natural resources (land, water, air) pollution, reduction in environmental quality and urban energy resources quantity, and natural disaster (flood, droughts, etc.)*

*Issues of urban failure in Indonesia caused by the failure in environmental and urban management systems, both in planning process and management. The preparation of sustainable urban planning require an integration technique of problem-solving in order to produce a concept of "Eco Sustainable City". Benchmark of the assessments are not only oriented to the economic aspects and physical structure, but in the formation of education aspects on concerns, attitudes and understanding of the environment in which they settled. Planning targets through an "Eco Sustainable City" put forward the aspects of sustainability concept as a simple concept; living together and coexist with nature, balancing the quality of life and carrying capacity of the city, designing and managing urban settlement they can live a decent life but remain aligned. Urban planning with City Of The Future Policy Strategy will build equality and harmony between the Urban Development and Conservation; which explains that the basic philosophy of city planning as a community of urban environments is the need to consider the processes of nature and culture in an integral system. Implications of urban green open space integrated to the context of environmental quality improvement become a tool to control the growth and development of urban areas proportionally, as the implications of spatial harmony, resources, regional infrastructure; that it becomes part of the planning system as a whole. Green open spaces create the identity of a city, building a mental image that is formed from the biological rhythms of certain places and spaces that reflect the time (sense of time), which grown from within by society social-economic-culture activities of the city itself. In urban policy strategy in Indonesia; green open space will play an effective role in the urban ecosystem, supporting a variety of its fundamental sub systems, becoming the core of the development of Eco Sustainable City that accomodates the principles of sustainable development.*

### 1. PENDAHULUAN

*Sustainable Development* adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang didalam memenuhi kebutuhan mereka (WCED - Piagam Brundtland, 1987). *Sustainable Development* merupakan perkembangan yang melahirkan pelayanan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi tanpa membahayakan keberadaan sistem alam, sosial dan lingkungan terbangun sebagai tempat hidup dan bergantung. Sustainable Development bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek dengan tidak memboroskan sumberdaya alam yang tidak terbarukan serta tidak melampaui kapasitas dan daya dukung lingkungan. Sosialisasi pembangunannya harus melalui mekanisme pengawasan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

masyarakat yang dilakukan secara vertikal dan horizontal, sehingga dapat menjadi satu kesatuan *sustainable management* yang akan menghasilkan kepercayaan masyarakat dan hasil pembangunan yang efektif dan efisien.

Dokumen *Caring for the Earth* dalam *Strategy for Sustainable Living*, 1991 sebagai usulan dari UNEP, IUNC, WWF; menyebutkan bahwa antara pembangunan dan konservasi sumber daya alam haruslah seimbang. Konservasi bukan dimaksudkan sebagai penghambat, tetapi merupakan pendukung utama dari pembangunan. Konservasi akan menjamin kebutuhan masa datang, untuk memastikan pembangunan dapat berlanjut. Dengan demikian suatu kawasan perlu menjaga keseimbangan perkembangannya melalui nilai-nilai dan fungsinya dengan baik. Makna *sustainable* harus memenuhi prasyarat utama terhadap kondisi surplus atau minimal sama; antara *total natural capital stock* sebagai *total resources* masa yang akan datang. Dengan demikian pemahaman *sustainable* (Stern, 1992 dan Srinivas, 1997) harus berpijak pada tiga aspek utama, yaitu ; sistem ekologi, ekonomi dan sosial.

Sistem perkotaan terpadu adalah perkotaan yang mampu membangun sinergi antara elemen terbangun, lingkungan dan sosial, yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan perkembangan kota masa depan (Srinivas,1997).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Kota adalah wadah aktifitas manusia dimana mereka merupakan konsumen terbesar terhadap sumber daya alam. Perkembangan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang esensial bagi kota-kota di dunia, demikian pula bagi kota-kota di Indonesia. Karena aktifitas manusia tidak dapat selalu memanfaatkan sumber daya alamnya tanpa upaya penyelamatannya untuk generasi penerus.

Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada dua konsep terkait, yaitu ;

- Konsep kebutuhan (*the concept of needs*) ; menciptakan kondisi yang menjaga tetap terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai bagi masyarakat,
- Konsep keterbatasan (*the concept of limits*) ; memperhatikan dan menjaga kapasitas lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

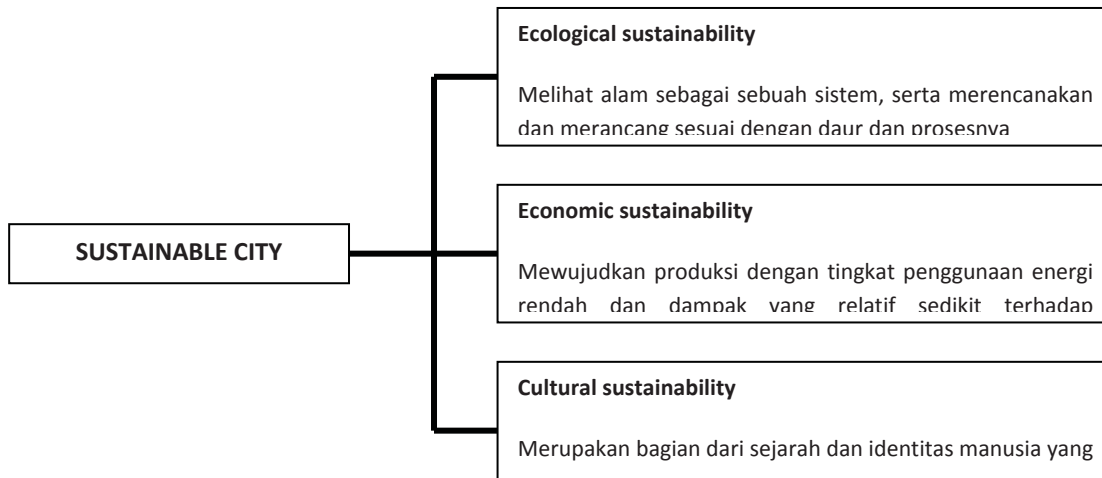
Dalam wacana lingkungan; ‘*sustainable*’ sering digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk pada istilah ‘*ecologically sustainable*’ atau ‘*environmentally sustainable*’. Pada pertengahan abad kedua puluh manusia mulai memahami sepenuhnya bahwa keberlangsungan keberadaan manusia bergantung pada jaringan proses-proses alam. Kapasitas sistem ini untuk mendukung kehidupan terbatas dan sangat mungkin untuk dikurangi oleh tuntutan-tuntutan yang ada.

Aktivitas manusia dapat dianggap ‘*ecologically sustainable*’, jika aktivitas tersebut tidak mengurangi kapasitas sistem alam untuk mendukung kehidupan. Aktivitas tersebut dianggap ‘*ecologically unsustainable*’, jika ia tidak dapat dilanjutkan dalam jangka panjang tanpa membahayakan sistem-sistem yang memungkinkan adanya kehidupan. Istilah ‘*carrying capa city*’ telah digunakan dalam ekologi untuk merujuk jumlah maksimum spesies yang dapat didukung oleh sebuah kawasan dalam jangka waktu tertentu.

*Sustainable City* mengakomodasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan integrasi pembangunan terhadap lingkungan alam, ekonomi dan sosial. Dalam lingkup *urban sustainability*; pemahaman *sustainable city* dapat digambarkan seperti diagram berikut dibawah ini:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---



**Gambar 1.** Diagram pendekatan Urban Sustainability dan ruang lingkup pemahaman Sustainable City (Sumber: Foo, A.F. & Yuen, Belinda, 1999)

Pada karya-karya perancangan urban selama ini terdapat indikasi kecenderungan perancangan yang berorientasi pada masalah mikro, terbatas pada tapak terbatas yang direncanakan. Produk-produk rancangan lebih bersifat kompetitif parsial tanpa penciptaan integritas ruang satu dengan yang lain, baik ditinjau dalam skala dua dimensi dan tiga dimensi serta dimensi ke empat yaitu aspek sosial-budaya. Dibutuhkan suatu alat untuk menjembatani ketiga kutub, antara; perencanaan kota (**urban planning**), perancangan urban (**urban design**) dan arsitektur kota (**urban architecture**); yang dalam hal ini adalah perancangan lansekap perkotaan (**urban landscape**), dalam bentuk perencanaan dan manajemen infrastruktur hijau; yang banyak berperan pada pengaturan pemukiman jaringan ruang-ruang hijau pada lingkungan binaan dan manajemen kota yang berkelanjutan

Penyusunan perancangan kota yang berkelanjutan membutuhkan sebuah teknik pengintegrasian solusi pemecahan permasalahan dalam tujuan menghasilkan suatu konsep **sustainability** (keberlanjutan). Pendekatan **penataan ruang kota berbasis ekologi** memiliki pertimbangan-pertimbangan terhadap penilaian lingkungan terbangun tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan struktur fisik, melainkan lebih luas dalam terbentuknya aspek edukasi tentang kepedulian dan pemahaman pelestarian lingkungan, utamanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur hijau; sebagai strategi penyelamatan lingkungan perkotaan dalam tingkat keseimbangan hubungan anatara lingkungan alam, kondisi sosial dan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan.

Pendekatannya mengisyaratkan keharusan mengurangi penggunaan sumber daya alam dan produksi limbah, serta memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan layak.

Permasalahan global yang terjadi adalah menurunnya daya dukung lingkungan akibat dari ledakan jumlah penduduk, peningkatan aktifitas manusia dengan eksploitasi sumber daya alam dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Permasalahan yang kemudian muncul antara lain seperti; makin meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan kumuh terutama di kawasan perkotaan besar, makin menurunnya kualitas lingkungan hidup; banjir, kekeringan, pencemaran udara, tanah, air dan sebagainya.

Alam memiliki keterbatasan daya tampung dan daya dukung terhadap beban dari setiap akibat dalam berbagai aspek. Terutama kota dan pemukiman serta seluruh kegiatannya sangat bergantung pada sumber daya alam. Kota-kota dunia mengkonsumsi  $\frac{3}{4}$  energi dunia, dan menyebabkan hampir  $\frac{3}{4}$  pencemaran global. Kota dianggap sebagai parasit dari lansekap (Richard Roger & Philip. G, 1997).

Penduduk dunia terutama di perkotaan akan diprediksi menghadapi krisis air bersih dalam 10 tahun kedepan, kekurangan sumber energi pada dua dekade kedepan, dan minimnya udara bersih. Tantangan global berupa perubahan iklim terjadi akibat emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia secara berlebihan, membawa dampak meningkatnya konsentrasi efek gas rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Peningkatan kebutuhan energi di perkiraan akan meningkat sebesar 50% hingga tahun 2030, yang berarti peningkatan emisi gas buang (CO<sub>2</sub>) yang diperkirakan meningkat sebesar 55% dari tahun 2004-2030, terlebih terus berlangsungnya penggundulan hutan-hutan.

Perlu disadari dan disepakati bahwa antara pembangunan dan konservasi sumberdaya alam harus merupakan keseimbangan sistem, dimana konservasi akan mendukung pembangunan dan menjamin kebutuhan masa yang datang. Perlu dilakukan perubahan yang mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan yaitu perencanaan tata ruang berbasis ekologi dengan pendekatan konsep pembangunan berkelanjutan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pendekatan Kepada Konsep Sustainable City**

Kota adalah wadah aktifitas manusia di mana mereka merupakan konsumen terbesar terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang esensial bagi kota-kota di dunia, demikian pula bagi kota-kota di Indonesia. Karena aktifitas manusia tidak dapat selalu memanfaatkan sumber daya alamnya tanpa upaya penyelamatannya untuk generasi penerus.

Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada dua konsep terkait, yaitu

- Konsep kebutuhan (*the concept of needs*) ; menciptakan kondisi yang menjaga tetap terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai bagi masyarakat,
- Konsep keterbatasan (*the concept of limits*) ; memperhatikan dan menjaga kapasitas lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

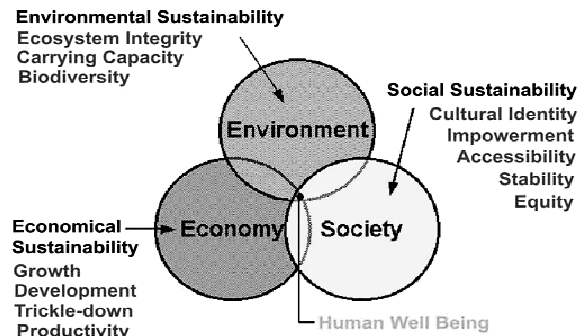
Dalam wacana lingkungan, ‘sustainable’ sering digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk pada istilah ‘*ecologically sustainable*’ atau ‘*environmentally sustainable*’. Pada pertengahan abad ke dua puluh manusia mulai memahami sepenuhnya bahwa keberlanjutan keberadaan manusia bergantung pada jaringan proses-proses alam. Kapasitas sistem ini untuk mendukung kehidupan terbatas dan sangat mungkin untuk dikurangi oleh tuntutan-tuntutan yang ada.

Aktivitas manusia dapat dianggap ‘*ecologically sustainable*’, jika aktivitas tersebut tidak mengurangi kapasitas sistem alam untuk mendukung kehidupan. Aktivitas tersebut dianggap ‘*ecologically unsustainable*’, jika ia tidak dapat dilanjutkan dalam jangka panjang tanpa membahayakan sistem-sistem yang memungkinkan adanya kehidupan. Istilah ‘*carrying capacity*’ telah digunakan dalam ekologi untuk merujuk jumlah maksimum spesies yang dapat didukung oleh sebuah kawasan dalam jangka waktu tertentu.

*Sustainable City* mengkomodasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan integrasi pembangunan terhadap lingkungan alam, ekonomi dan sosial. Dalam lingkup *urban sustainability*; pemahaman *sustainable city* dapat diperlihatkan seperti gambar 2 dibawah ini:

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---



**Gambar 2.** Diagram Hubungan Peingkatan Kualitas Hidup Dengan Pembangunan Berkelanjutan  
Sumber Jenks, M. Burton, E, William, K, 1996

### 3.1. IMPLIKASI RUANG TERBUKA HIJAU

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Infrastruktur Hijau adalah perencanaan yang strategis dan sistem distribusi jaringan ruang-ruang hijau yang berkualitas tinggi dan ciri-ciri alam lain, yang dirancang dan dikelola sebagai suatu kemampuan multiguna sumberdaya dengan kemampuan perbaikan dan memberi manfaat secara ekologis bagi kualitas hidup masyarakat yang dibutuhkan untuk menyokong keberlanjutan (*sustainability*) sistem lingkungan. Perencanaan dan pengelolannya harus mampu meningkatkan karakteristik dan kekhasan dari sebuah kawasan/area dengan memperhatikan habitat yang ada dan jenis lansekapnya.

Infrastruktur Hijau termasuk menetapkan ruang-ruang hijau dan tapak dengan fungsi fungsi baru dalam lingkungan binaan dan area perkotaan sampai ke kawasan penyangga. Dengan demikian dibutuhkan penyebaran ke seluruh skala keruangan dari tingkat sub-regional sampai tingkat lingkungan tempat tinggal sebagai sebuah jaringan, sehingga dapat mengakomodasikan seluruh ruang-ruang hijau alami kedalam komunitas setempat dan kawasan di pinggiran kota serta daerah luar kota yang lebih luas

**Intensifikasi Infrastruktur Hijau** merupakan implikasi dari ruang terbuka hijau yaitu suatu konsep pendekatan pembangunan yang mengutamakan kaidah-kaidah lingkungan dan sistem ekologi terkait kepada sumber daya alam. Sistem ini dapat menjadi tolok ukur dalam penerapan konsep Sustainable development dalam lingkup kawasan regional, kawasan perkotaan atau pada tapak terbatas.

Pembangunannya menitik beratkan pada integrasi komponen-komponen alam dan manusia serta kegiatan manusia dalam satu sistem yang secara terus menerus dapat dikoordinasikan, baik dalam pengembangan-pengembangan fungsi dan estetika maupun manfaatnya bagi etika lingkungan hidup. Mekanisme pengelolannya menghendaki dibangunnya suatu sistem terpadu bagi koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan dan perkembangannya. Mekanisme pengawasan dibangun dalam *Sustainable Management dan Good Governance*.

#### 3.1.1. LANDSCAPE SUSTAINED BY NATURE

Sebagai parameter dan dukungan implikasi pengembangan dan Intensifikasi Infrastruktur Hijau terhadap keberhasilan Perencanaan Tata Ruang dan pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan dukungan konsep **Eco-Sustainable City** melalui metoda Urban Sustainable Landscape untuk memperhitungkan, merencanakan, dan merancang lansekap berdasarkan perhitungan keseimbangan energi dan daur energi dalam suatu lingkungan dalam bentuk infrastruktur hijau. Pembangunan kembali kawasan hijau dalam bentuk hutan, baik di perkotaan mau pun pedesaan serta kawasan-kawasan lin dung merupakan pemikiran bijak, peren canaan dan pengembangan fungsi-fungsi hijau tersebut perlu didukung sepenuhnya dalam kebijakan politik nasional, sehingga manfaatnya dapat dibangun secara



**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

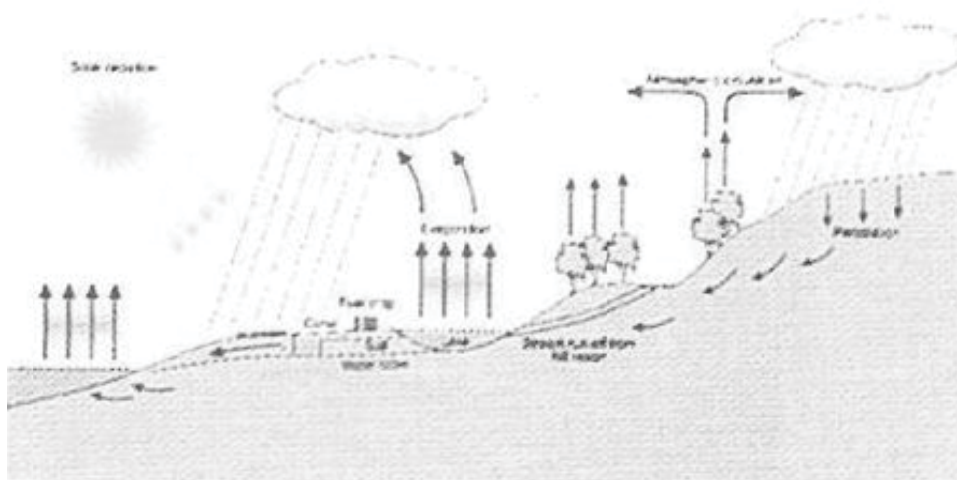
---

sistemik dan menerus. Lanskap kawasan tidak akan dinilai hanya melalui nilai politis, tampilan ataupun nilai ekonominya saja, tetapi akan potensi ekologis yang tidak terpisahkan dengan keberlanjutan aliran energi pada setiap tapak, distrik, ekosistem atau bioma.

Pendekatan yang perlu diterapkan dalam *landscape planning and design* adalah sebagai berikut :

- *Assesing* / penilaian : penilaian terhadap kualitas lingkungan dalam kaitan daya dukung kawasan,
- *Planning* / perencanaan ; perencanaan kawasan berbasis lingkungan dengan penekanan pada aspek ekologi,
- *Designing*/perancangan; dimana perancangan kawasan merupakan sub-sistem dari perencanaan dalam skala yang lebih luas.

Pengembangan *park system* kawasan perencanaan baik dalam lingkup regional, distrik maupun terhadap kawasan atau tapak-tapak terbatas menjadi alternatif pilihan. Upaya ini akan mewujudkan peningkatan pelestarian lahan dan konservasi sistem tata air, yang merupakan pertimbangan utama dalam dukungan terhadap intensifikasi infrastruktur hijau.



**Gambar 3.** Sistem Alam Daur Tata Air  
(Sumber: Guy Battle & Christopher Mc. Carthy, 2001)

### **3.1.2. IMPLIKASI RUANG TERBUKA HIJAU KE DALAM TIPOLOGI INFRASTRUKTUR HIJAU**

Infrastruktur hijau terdiri dari ruang terbuka hijau dan unsur alami, yaitu unsur-unsur alam yang dapat menjalankan proses-proses ekologis. Infrastruktur Hijau juga mencakup sistem (daerah aliran) sungai dan kawasan pantai; yang disebut sebagai Infrastruktur Biru.

Kerangka dan mata rantai dalam implikasi ruang terbuka yang membentuk infrastruktur hijau, yaitu;

*Links*, Mata rantai yang merupakan hubungan mengikat kesatuan jaringan sistem dan memungkinkan infrastruktur hijau berperan. Mereka terangkai dalam ukuran, fungsi/kegunaan dan termasuk kepemilikannya.

#### *Landscape Linkages* :

Keterhubungan lanskap; kawasan alami luas yang menghubungkannya dengan park yang ada, dilindungi atau kawasan alami dan meningkatkan ketersediaan ruang bagi tanaman asal dan satwa untuk kesuburannya, sementara juga bermanfaat sebagai koridor untuk menghubungkan ekosistem dan lanskap. Keterhubungan lanskap juga menumbuhkan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

ruang-ruang untuk melindungi kawasan bersejarah dan pengembangannya untuk penggunaan tempat rekreasi.

*Conservation Corridors :*

KORIDOR KONSERVASI; Sebagai jalur linear yang ekstensif; seperti koridor sungai yang melindungi kehidupan satwa liar dan dapat dikembangkan sebagai lahan penelitian dan tempat rekreasi

*Greenways :*

JALUR HIJAU JALAN Melindungi koridor dari lahan yang dikelola sebagai kawasan konservasi dan/atau kawasan rekreasi

*Greenbelts :*

JALUR HIJAU; Melindungi lahan lahan alami atau lahan yang berfungsi sebagai bagian dari ke rangka pembangunan dan juga melindungi ekosistem alam dan/atau lahan-lahan per tanian dan perkebunan serta peternakan

*Ecobelts :*

SABUK HIJAU; hutan linear yang dapat merupakan zona hijau pembatas antara tata guna lahan perkotaan dan bermanfaat secara ekologis dan sosial ba gi warga perkotaan dan pedesaan

Dalam penataan ruang kawasan; ruang terbuka hijau seharusnya diintegrasikan dalam rencana tata ruang kota, tata ruang wilayah, dan rencana tata ruang regional sebagai satu kesatuan sistem.

Klasifikasi ruang terbuka hijau terdiri dari:

- Ruang terbuka hijau lindung (*wilderness areas, protected areas, natural park areas*)
- Ruang terbuka hijau binaan (*urban park areas, recreational areas, urban development open spaces*)

Adapun landasan yang merupakan tipologi sebagai tulang punggung infrastruktur hijau di suatu kawasan terutama adalah :



**Gambar 4. JALUR HIJAU PENGAMAN  
TEPI SUNGAI**

*Strip buffer* , DAS di Putnam County,  
Ohio, Lake Erie (Sumber : Wikipedia)



**Gambar 5. KORIDOR HIJAU  
PENGAMAN PANTAI**

*Greenbelt* pantai berupa (rehabilitasi)  
hutan mangrove di pantai Suwung,

- Adanya faktor air; berupa sungai, danau, situ, rawa,
- Adanya faktor hutan; hutan alami, hutan kota, tempat rekreasi, taman nasional, parks, padang rumput, lembah
- Adanya lahan-lahan produksi; sawah perkebunan, perladangan, pertanian
- Adanya faktor tepian; danau, pantai, sungai
- Adanya ruang-ruang terbuka akibat perkembangan teknologi; ruang antar bangunan, taman kota,
- Koridor hijau; jalur hijau jalan /ROW, jalur kereta api, jalur hijau tepi sungai, kanal, tegangan tinggi dan lapangan terbang

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

- Adanya faktor tuntunan agama, tradisi, maupun budaya; taman istana, alun-alun, pemakaman
- Lapangan olah raga; lapangan golf, tempat latihan militer

Konsep pengembangan ruang terbuka hijau secara terpadu berbentuk *political decisions* dalam konteks *environmental quality improvement* dapat merupakan alternatif intensifikasi dan pengembangan sekaligus merupakan alat kendali bagi pertumbuhan dan perkembangan kawasan secara proporsional sebagai bentuk im plikasi dari keserasian antara penataan ruang, sumber daya pendukung serta in- frastruktur kawasan, sehingga ruang ter buka hijau menjadi bagian yang menye luruh dari perencanaan dan perancangan kawasan, bukan hanya merupakan hasil dari suatu perencanaan kawasan. Salah satu contoh pengembangan konsep ruang terbuka hijau adalah *separators* and *buffer* yang berfungsi sebagai pemisah tata guna lahan/pembatas ruang satu dengan ruang lainnya pada suatu kawa san. Terdapat beberapa tipe *separator* dan *buffer* : *Greenbelts*, *Green ways*, *Corridor separators*, *Strip buffer*, *Area buffers*, yang merupakan struktur hijau alami.



**Gambar 6.** Lingkungan alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis  
Ruang terbuka hijau (green open space/green space)  
Infrastruktur hijau (green infrastructure/ecological infrastructure)  
Sumber: Iwan Ismaun, 2009

### **3.1.3. MANFAAT EKONOMI DALAM IMPLIKASI RTH SEBAGAI INFRASTRUKTUR HIJAU**

#### **Pencegahan Banjir dan Pengelolaan Air**

Meningkatkan keterlindungan/keteduhan, peningkatan ruang hijau serta keberlangsungan pengaturan sistem drainase perkotaan dalam mengurangi dan mengendalikan run off, peningkatan penyerapan, dan peningkatan kapasitas pembuangan,

untuk menghasilkan pengurangan bahaya banjir di area perkotaan, dengan demikian mengurangi biaya sebagai hasil dari peningkatan secara regular akibat hal-hal /kejadian yang merupakan bencana besar.

### **Peningkatan Kualitas Ruang**

Peningkatan infrastruktur hijau bertujuan menambah/meningkatkan *sense of quality of place*, bagi peruntukan rekreasi, memberdayakan komunitas dan potensi keindahan visual, meningkatkan atraksi lingkungan sebagai akibat harga properti, penanaman modal, kesempatan kerja dan nilai sosial.

### **Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia**

Intensifikasi Infrastruktur Hijau memberikan peningkatan kesehatan berikut dan manfaat ekonomis, melalui peningkatan kualitas udara, penurunan tingkat stress/ketegangan, peningkatan kesempatan bagi aktivitas fisik informal dan normal serta kegiatan rekreasi, semuanya berperan dalam penurunan resiko penyebaran penyakit dan biaya pelayanan kesehatan, mengurangi hari-hari yang hilang dalam industri karena sakit serta meningkatkan produktivitas.

### **Peningkatan harga lahan dan properti**

Pembangunan ruang hijau dan pengembangan lingkungan di lokasi kunci memiliki manfaat yang signifikan pada harga lahan dan perumahan. Pendekatan Infrastruktur Hijau berkualitas dan aksesibel memberikan dampak positif secara langsung pada harga rumah. Kota yang lebih “hijau” meningkatkan jumlah pengunjung yang tentunya akan berbelanja, yang berarti meningkatkan nilai sewa dan meningkatkan peluang kerja.

### **Menciptakan/meningkatkan kesempatan investasi**

Penciptaan dan pembangunan ruang hijau dan landscaping dapat mendorong dan menarik industri bernilai tinggi dan pekerja. Hal ini dapat memberikan banyak keuntungan pada area urban dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan hijau yang terbangun dapat meningkatkan perekonomian daerah.

### **Peluang baru untuk produksi energi terbarukan**

Peningkatan Infrastruktur Hijau memberikan peluang besar untuk menciptakan dan mendorong pengembangan sumber energi terbarukan. Daerah pinggiran dan industri agrikultur melalui perubahan struktural dilengkapi dengan peluang diversifikasi untuk memenuhi biofuel dan biomass bagi pasar lokal, yang pada gilirannya memiliki efek mitigasi bagi perubahan iklim melalui generasi energi yang lebih bersih dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

### **Meningkatkan penawaran kepariwisataan dan rekreasi**

Infrastruktur Hijau memainkan peranan penting dalam menciptakan peluang rekreasi dan menstimulasi aktivitas ekonomi melalui pertanian, kehutanan, dan pelayanan publik. Potensi untuk menciptakan ruang-ruang hijau di dalam area yang dibangun menghubungkan kembali masyarakat dengan lahan. Pusat-pusat kota yang “hijau” menarik pengunjung-pengunjung baru, yang nantinya akan mendukung sektor pariwisata dan urban retail.

### **Penyerapan tenaga kerja dalam bidang manajemen lahan dan biodiversity/keanekaragaman hayati**

Infrastruktur Hijau memiliki peranan penting dalam mendukung pekerjaan langsung dan tidak langsung dalam industri agrikultur/pertanian, kehutanan, manajemen lahan dan konservasi. Potensi untuk menciptakan ruang-ruang hijau dalam area terbangun menghubungkan masyarakat urban/ perkotaan dengan lahan produksi dan meningkatkan kesempatan pemasaran produk yang dihasilkan daerah.

### **Pengurangan perubahan iklim**

Infrastruktur Hijau memberikan penghematan energi pada daerah perkotaan (adaptasi), mengurangi kebutuhan konsumsi energi untuk pemanasan dan pendinginan, disamping kontribusinya pada penyerapan gas rumah kaca (mitigasi) dan manfaat jangka panjang dalam mengurangi akibat perubahan iklim.

### **3.2. SUSTAINABLE DEVELOPMENT dan GOOD GOVERNANCE**

*Sustainable (urban) development* seharusnya menjadi prinsip dasar bagi kebijakan dan sistem pemerintahan kota *urban policy and governance* bagi mewujudkan *Eco-Sustainable City*. Ini berarti **mencari** sebuah kebijakan yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan pendapatan; perjuangan untuk mengurangi ketimpangan sosial, mempromosikan integrasi sosial dan politik, serta perwujudan perlindungan lingkungan.

Strategi perkotaan akan berhasil jika pemerintah nasional dan daerah bekerjasama secara intensif, jika pemerintah pusat menjabarkan lebih jelas distribusi paling efisien dari fungsi-fungsi antara tingkatan-tingkatan berbeda dalam pemerintahan, dan jika aktivitas politik mengikuti kerangka kerja yang koordinatif dan sistematis. Demikian pula bagi intensifikasi infrastruktur hijau perkotaan yang perlu dibangun untuk tujuan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan layak.

Pemerintahan yang baik, terlihat dari adanya usaha terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta, akan menempatkan **sustainable development** sebagai tujuan utamanya. Usaha ini harus melibatkan masyarakat, institusi pendidikan, NGO, dan pihak swasta.

### **3.3. UNDANG UNDANG PENATAAN RUANG**

**Intensifikasi Infrastruktur Hijau** sebagai implikasi dari sebuah pendekatan perancangan kawasan kota dalam konsep *Eco-Sustainable City* memiliki dukungan peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi **alat kendali** bagi **pemanfaatan, perencanaan dan perancangan kota-kota** di Indonesia.

Penekanan pada hal-hal yang bersifat sangat strategis sesuai perkembangan lingkungan, termuat pada; Pasal 28-30 UURI-PR menghendaki proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota minimal 30%, dimana proporsi RTH publik pada wilayah kota minimal 20%; Pasal 17 menghendaki proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan; Pasal 35-40 menghendaki pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi.

**Penerapan Intensifikasi Infrastruktur Hijau** perlu dikembangkan dalam bentuk pengembangan kawasan produktif dan *prospective landscape* terhadap kota-kota di Indonesia akan menjadikan kota-kota dan kawasan yang lebih luas; menjadi *setting places* yang berkelanjutan dan akan menciptakan *park system* bagi upaya peningkatan estetika, kualitas lahan dan sistem tata air.

Dukungan sistem pengelolaan kawasan terhadap moderasi iklim dan tempat berlindung, penanganan pencemaran, jaringan sanitasi dan drainase, persampahan, pengendalian banjir, kawasan konservasi, akan mewujudkan kawasan yang nyaman untuk dihuni.

**Sistem dan mekanisme pengawasan** perlu dibangun setara pelaksanaan undang-undangnya didukung adanya iklim **public dialogues** untuk berjalan secara konsisten.

## **4. KESIMPULAN**

**The green-park system development** (pembangunan sistem park dan kawasan hijau) dalam implikasi Ruang Terbuka Hijau membentuk **Eco-Sustainable City** merupakan

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

pendekatan utama perancangan perkotaan masa depan, mengisyaratkan kepada kita perlunya pembangunan kembali kawasan hijau dalam bentuk hutan, kawasan lindung, ruang-ruang terbuka hijau binaan sebagai sistem pengkondisian dan antisipasi kawasan agar dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya dalam hal keseimbangan sistem tata lingkungan, lahan dan ketersediaan sumber daya alam.

Landasan faktor-faktornya adalah pada ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air, faktor hutan, lahan produksi, faktor tepian, ruang-ruang terbuka, faktor tuntunan agama maupun budaya; sebagai sebuah pemikiran bijak yang memerlukan dukungan penuh dalam kebijakan politik nasional, sehingga manfaatnya dapat dibangun secara sistemik dan menerus.

Dengan demikian penekanan aspek dalam perencanaan-perancangan kota perlu menitik beratkan pada hal-hal berikut ;

- Aspek lingkungan yang didukung oleh pemikiran terhadap sistem ekologi, restorasi sistem alam, penggunaan sumberdaya alam secara efisien, mengurangi polusi, limbah dan ben cana.
- Aspek pemanfaatan lahan yang kompak dan efisien serta kebijakan batasan pertumbuhan kawasan,
- Aspek perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, baik pada sektor formal dan informal yang mengutamakan; restorasi ekonomi, ekonomi berorientasi pada masyarakat dan ekonomi berorientasi lokal,
- Aspek partisipasi dan keterlibatan warga kota serta *stakeholders*, serta sistem dan mekanisme pengawasan pembangunan oleh masyarakat,
- Aspek keadilan, yaitu persamaan hak, kesetaraan.
- Prinsip konservasi energi, terhadap pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penggunaan energi, termasuk industri, transportasi dan kebutuhan fasilitas umum,
- Etika pembangunan berwawasan lingkungan, dan preservasi nilai-nilai serta budaya lokal,
- Pengembangan estetika dan keindahannya baik alam maupun kawasan terbangun,
- Penegakan hukum, dukungan per aturan dan perundang-undangan,
- Kenikmatan atau kenyamanan hidup dan lingkungan hidup.

Kesembilan aspek tersebut mencerminkan pendekatan baru bagi terciptanya *eco-societies* dalam prinsip *sustainability*, melalui pembentukan *civil society* dan *good governance* yang akan melibatkan peran masyarakat dan pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang partisipatif.

Dukungan intensif dari perilaku hijau melahirkan *Urban Landscape Guidelines* (Pedoman Lansekap Perkotaan) yang diharapkan dapat menjadi alat kendali bagi pembangunan kawasan kota. Pengembangan kawasan produktif dan prospektif lansekap terhadap kota kota lain di Indonesia dapat menjadi acuan bijak bagi perencanaan-perancangan kota, dalam sistem dan mekanisme pengawasan pembangunan yang seksama.

Menjaga lingkungan urban dan batasan-batasan publik merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah tatanan masyarakat. Terdapat kebutuhan akan alat-alat dan proses perancangan yang memungkinkan masyarakat untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan, untuk mengerti **isu-isu rancang bangun** yang terlibat, dan untuk menggambarkan secara kreatif serta mengamati penerapan pilihan-pilihan yang berbeda. Implikasi Ruang Terbuka Hijau dalam konsep Eco Sustainable City bagi kota masa depan menghendaki pemahaman bahwa kota **dipengaruhi dan mempengaruhi secara sistem ekologi terhadap kawasan yang lebih luas yang diwujudkan dalam perancangan struktur fisik terencana dan terbangun diatas lahan dan perencanaan sumber daya alam dibawah lahan terbangun secara horizontal dan vertikal untuk dapat mewujudkan tujuan ideal sebuah perencanaan dan perancangan kota yang berkelanjutan**. Dan diperlukan pula **dukungan melalui pengelolaan perkotaan serta mekanisme pengawasan dalam pertumbuhan dan perkembangan serta pendaayagunaannya**.

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh pelaku pembangunan (**stakeholders**) ; pemerintah-kalangan tenaga ahli-institusi pendi dikamasyarakat luas. Sosialisasi pembangunan kawasan hendaknya melalui pengawasan masyarakat, dimana mekanisme pengawasan pembangunan perlu dilakukan secara vertikal-horizontal, sehingga dapat merupakan satu kesatuan, sustainable management, yang akan menghasilkan kepercayaan masyarakat dan hasil pembangunan perkotaan masa depan yang efektif dan efisien.

## **5. REKOMENDASI**

Implikasi Sistem Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan berbentuk Infrastruktur Hijau dapat dikembangkan dalam bentuk Urban Park System, yang merupakan kesatuan sistem dengan regional park sistem.

Infrastruktur Hijau harus:

1. Menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sebuah eco-sustainable city
2. Ditetapkan sebagai jaringan yang bervariasi, tersebar luas, terencana secara strategis dan saling berhubungan.
3. Menjadi unsur dalam penilaian lahan dan keputusan penentuan kepadatan perumahan dan struk tur pekotaan.
4. Aksesible bagi masyarakat lokal dan menyediakan sarana transportasi alternatif
5. Dirancang untuk mencerminkan dan menonjolkan karakter lokal, termasuk lansekap dan habitat lokal
6. Didukung dengan suatu strategi Intensifikasi Infrastruktur Hijau
7. Multifungsi; integrasi dan interaksi fungsi-fungsi berbeda pada tapak yang sama dan melintasi jaringan infrastruktur sebagai sebuah kesatuan.
8. Diimplementasikan melalui koordinasi perencanaan, pengiriman dan manajemen melalui kewenangan lokal dan batasan batasan di berbagai sektor
9. Mampu untuk mencapai hubungan fisik dan fungsional antar tapak pada tiap tingkatan; kota atau sub-region.
10. Diimplementasikan secara utuh melalui strategi utama intensifikasi infrastruktur hijau dan sistem perencanaan tata ruang dari *regional spatial strategies ke local development framework* yang diadopsi secara formal melalui ketentuan-ketentuan dan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan dukungan alokasi pembiayaan pemeliharaan dan adaptasi menerus.
11. Dukungan aspek legal dalam *political will* dalam peraturan daerah atau undang-undang yang lebih tinggi sebagai peraturan pendukung dalam implikasinya.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

1. Battle Guy and Christopher Mc.Carthy, 2001, ***Sustainable Ecosystems and the Built Environment***, Wiley Academy, John Wiley and Sons Ltd., New York.
2. Benedict, Mark, A., PhD, Edward, T., Mc. Mohan, JD., 2001, ***Green Infrastructure Smart Consrevation for 21<sup>st</sup> Century***, Sprawl Watch Greening House Monograph Series, England.
3. Benson, John. F, and Maggie H Roe, 2000, ***Landscape and Sustainability***, Spon Press, London.
4. Chapman, David, 1996, ***Creating Neighbour hoods and Places in the Built Environment***, E & FN Spon, London.
5. Cohen, Nahoum, 1999, ***Urban Conservation***, the MIT Press, Cambridge.
6. Foo, A.F., Belinda Yuen, Oct. 1992, ***Sustaina ble Cities Editorial, Environment and Urbanization, Vol.4, p.3.***

**SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012**  
**“Sticks and Carrots”**  
**Reward and Punishment**

---

7. Foo, A.F, Belinda Yuen, 1999, **Sustainable Cities in the 21<sup>st</sup> Century**, Faculty of Architecture, Building&Real Estate, National University of Singapore, Singapore University Press.
8. Hall, Peter and Ulrich Pfeiffer, 2000, **Urban Future 21, A Global Agenda For Twenty First Century Cities**, Federal Ministry of Transport, Building and Housing, E&FN Spon, New York.
9. Katz, Peter, 1994, **The New Urbanism toward an Architecture Community**, Mc Graw-Hill Inc, New York.
10. Leccese, Michael and Kathleen Mc. Cormick. Editor, 2000, **Charter of The New Urbanism, Congress for The New Urbanism**, Mc. Graw Hill, London.
11. Leilman, Josef, 1999, **Sustaining Cities, Environmental Planning and Management in Urban Design**, Mc. Graw Hill Book Company, New York.
12. Parfect, Michael and Gordon Power, 1997. **Planning for Urban Quality, Urban Design in Towns and Cities**, Routledge, London and New York.
13. Rogers, Richard and Phillip Gumuchdjan, 1997, **Cities for A Small Planet**, Westview Press, London , United Kingdom
14. Srinivas, Hari, 1997, **Information System in Urban Environmental Management**, International Seminar,Groningen.
15. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang PENATAAN RUANG, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jen deral Penataan Ruang
16. Uniaty, Quintarina, dkk 2007, **Pengembangan Kawasan Siap Bangun Berbasis Lingkungan**, Seminar Nasional Pengembangan Green Infrastructure Kawasan Permukiman Perkotaan Berwawasan Lingkungan, Kerja sama FALTL Universitas Trisakti dan DitJen Cipta Karya Dept Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
17. Uniaty, Quintarina, 2008, **Eco Urban Design, Sebuah Pendekatan Perancangan Urban**, Seminar Nasional Eco Urban Design, Potensi dan Tantangan Perencanaan Kota Kota Indonesia Dimasa Depan, Jur. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fak. Teknik, Universitas Diponegoro.
18. Uniaty, Quintarina, 2008, **INTENSIVE GREENERY SYSTEM; Telaah Teoritik terha dap Penataan Ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur; Sebuah Pendekatan Penataan Kawasan Yang Berkelanjutan**, Workshop Asosiasi Profesi “Telaah Kritis Terhadap Peraturan Presiden No. 54 tahun 2008, tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEK-BOPUNJUR, IAP-Dept PU, Hotel Borobudur – Jakarta.
19. <http://www.suntool.org>



## Studi Karakteristik Permukiman Tepian Sungai di Kalimantan Barat Studi Kasus: Kampung Beting, Pontianak

Hamdil Khaliesh<sup>1)</sup>, Ghoustanjiwani Adi Putra<sup>2)</sup>

Mahasiswa Magister Arsitektur, SAPPK<sup>1,2)</sup>

Institut Teknologi Bandung<sup>1,2)</sup>

E-mail : [hamdiel\\_st@yahoo.com](mailto:hamdiel_st@yahoo.com)<sup>1)</sup>

E-mail : [simplicity\\_gho2@yahoo.com](mailto:simplicity_gho2@yahoo.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*West Kalimantan is the province that most of its range through the river path both the large rivers and small rivers. In the past, these rivers acted as a media for main transport and became one of the indicators of the settlements establishment in coastal areas. As a result, many cities in West Kalimantan started its development from the river.*

*One of the settlements that grew up in West Kalimantan riverside area is Kampung Beting. This area has a historical connection with the early settlement of Pontianak which is the capital of West Kalimantan Province. Pontianak is one of the city that grew up by utilizing the easy access provided by nature toward the river. The city grew from the various ethnic groups of migrants who come with the purpose of trade or a religious mission trip by using the river path. Kampung Beting has its own uniqueness compared with other early settlements, because of related to its location on riverside, is also related to the history of the settlements establishment that formed spontaneously based on the people's desires. Unlike the other early settlements that are generally formed by the royal government policy at the time.*

*This study aims to describe the characteristics of the riverside settlement in West Kalimantan with the Kampung Beting as the object of the research. The research will be focussed on Doxiadis theory related to five elements settlement ekistik, namely; man, society, networks, shell and natural. Qualitative-descriptive methods is applied in identifying the characteristics of the settlement. The data that used in the form of photographs, interviews, and written documents. The resultsof the research are expected to identify the characteristics of the riverside settlements in Kampung Beting. This study is useful for scholarly study adding references related concepts riverside settlements as a manifestation of local culture.*

**Key words:** *Characteristics, riverside settlement, Kampung Beting*

### 1. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya di lalui jalur sungai baik sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil. Sungai-sungai tersebut merupakan salah satu media transportasi dan komunikasi utama pada masa lalu yang menghubungkan berbagai wilayah pesisir di Kalimantan Barat dan memberi peluang bagi para pelayar yang umumnya pedagang untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam melakukan perdagangan.

Pontianak merupakan salah satu kota di provinsi Kalimantan Barat yang dibangun berdasarkan kemudahan akses yang disediakan alam terhadap sungai. Terletak diantara jalur perdagangan Selat Malaka dan merupakan daerah transito perdagangan baik dari timur maupun barat nusantara, terutama Singapura sebagai pusat perdagangan setelah jatuhnya Kerajaan Malaka dan juga merupakan jalur pelayaran antara Cina dan India (Hasanuddin, dkk, 2000:3). Sejak di bukanya pada tahun 1771, Kota Pontianak terus mengalami perkembangan dengan berbagai kelompok etnis migran sebagai agen perubahan. Kota Pontianak merupakan kota yang dibentuk oleh aktivitas para kaum migran,

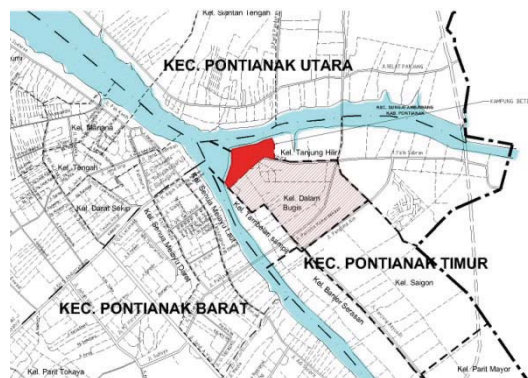
baik aktivitas ekonomi, sosial maupun keagamaan dengan sungai sebagai media komunikasinya (Listiana, 2009:1). Akibatnya banyak tumbuh permukiman-permukiman di daerah pesisir dan tepian sungai yang merupakan konsep dasar perkembangan Kota Pontianak sebagai kota yang berkembang secara *dendritic*<sup>2</sup> (Hasanuddin, 2000:30).

Menurut Hasyim (1999) dalam tesisnya menuliskan tumbuhnya permukiman-permukiman yang berdiri di tepian maupun diatas perairan sungai pada dasarnya lebih banyak disebabkan adanya keterkaitan aspek sosial budaya dan aspek historis terbentuknya permukiman. Beberapa faktor penyebab tumbuhnya permukiman-permukiman tersebut antara lain:

1. Permukiman yang penduduknya mengandalkan transportasi air, baik berupa transportasi laut maupun sungai sebagai prasarana lalu lintas utama pada saat prasarana transportasi darat (jalan raya) belum berkembang. Kebutuhan penduduk untuk memiliki akses yang mudah kepada air sebagai prasarana transportasi menjadi pilihan utama.
2. Permukiman yang penduduknya memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan kelautan atau sungai, seperti nelayan yang membutuhkan perumahan berada dekat atau diatas perairan.
3. Budaya penduduk yang erat dengan air dalam kehidupannya baik dalam pemenuhan ketersediaan air maupun kedekatandengan air.

Menurut Breen (1994) dalam tesisnya Hasyim (1999), pada waktu masyarakat belum mengenal kendaraan dengan jalan darat, untuk bepergian jarak jauh dilakukan dengan menggunakan perahu dan sungai merupakan sarana transportasi utama. Hal tersebut menyebabkan ada kecenderungan perkembangan lingkungan permukiman pada zaman dahulu berorientasi ke sungai.

Kampung Beting merupakan salah satu permukiman di Kota Pontianak yang terletak di percabangan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Posisinya yang strategis berada di pusat perkembangan kota menyebabkan banyak pendatang yang singgah untuk menetap. Kawasan Kampung Beting juga berdekatan dengan kompleks kawasan Istana Kadariah yang merupakan bangunan pemerintahan pertama di Kota Pontianak. Permukiman di Kampung Beting sangat menarik untuk diteliti karena karakteristik permukiman Kampung tersebut sangat berbeda dengan permukiman di daratan pada umumnya.



Gambar 1. Posisi Kampung Beting Dalam jalur Sungai Kapuas

## 2. ELEMEN EKISTIK PERMUKIMAN

<sup>2</sup> Menurut Bennet Bronson dalam bukunya Hasanuddin (2000) yang berjudul "Pontianak 1771-1900, Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi" dendritic merupakan pola perhubungan antar permukiman yang mirip dengan sebatang pohon yang semakin tinggi semakin bercabang hingga beranting dan di daerah muara sungai akan ditemui pusat perdagangan.

Menurut Doxiadis (1968: 21) terbentuknya sebuah permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara keseluruhan dapat dilihat elemen-elemen ekistiknya yaitu *man*, *society*, *network*, *shell* dan *natural*. Lebih lanjut Doxiadis menjabarkan 5 elemen ekistik kedalam beberapa sub elemen yaitu:

1. *Natural*
  - a) *Geological resources*
  - b) *Topographical resources*
  - c) *Soil resources*
  - d) *Water*
  - e) *Plant life*
  - f) *Animal*
  - g) *Climate*
2. *Man*
  - a) *Biological needs*
  - b) *Sensation and perception*
  - c) *Emotional needs*
  - d) *Moral values*
3. *Society*
  - a) *Population composition and density*
  - b) *Social stratifications*
  - c) *Culture pattern*
  - d) *Economic development*
  - e) *Education*
  - f) *Health and welfare*
  - g) *Law and administration*
3. *Shell*
  - a) *Housing*
  - b) *Community services*
  - c) *Shopping centres and markets*
  - d) *Recreational facilities*
  - e) *Civic and business centres*
  - f) *Industry*
  - g) *Transportation centres*
5. *Network:*
  - a) *Water supply systems*
  - b) *Power supply systems*
  - c) *Transportation systems*
  - d) *Communication systems*
  - e) *Sewerage and drainage*
  - f) *Physical layout*

Elemen *natural* berkaitan dengan keadaan alam permukiman terkait geologi, ketinggian topografi, keadaan tanah, sumber air, tanaman dan hewan. Elemen *man* berkaitan dengan karakter manusia terkait kebutuhan biologi (ruang, udara, suhu), sensasi dan persepsi (lima indra manusia), kebutuhan emosional, dan nilai-nilai moral. Elemen *society* berkaitan dengan masyarakat di dalam permukiman terkait komposisi dan kepadatan, stratifikasi masyarakat, bentuk-bentuk kebudayaan, perkembangan ekonomi, pendidikan dan hukum administrasi. Elemen *shell* berkaitan dengan bangunan di dalam permukiman terkait rumah, fasilitas umum, pusat perdagangan, pusat rekreasi, pusat industri, dan pusat pergerakan. Elemen *network* berkaitan dengan sistem yang mengatur permukiman terkait sistem jaringan air, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembuangan/drainase dan layout fisik.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif-eksploratif, deskriptif dengan pendekatan etnografi. Teknis penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, serta foto lapangan. Metode eksploratif dilakukan karena basis data dalam penelitian ini menggunakan data lapangan yang berupa wawancara secara mendalam untuk menelaah sosial budaya masyarakat.

Studi etnografi mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya berkaitan dengan sistem ilmu pengetahuan suatu kelompok sosial (Geertz, 1973; Philipsen, 1992). Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Penelitian etnografi memiliki ciri khas yaitu penelitian bersifat holistik, *integrative*, *thick description* dan menggunakan analisis kualitatif dalam mencari sudut pandang yang semula (*native's point of view*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi-partisipasi dan wawancara secara terbuka dan mendalam. Data primer berupa hasil wawancara tersebut, sedangkan data pendukung berupa foto-foto, dokumen tertulis dan penelitian sebelumnya.

Sampel kawasan penelitian adalah 3 RW dari total 6 RW yang melingkupi kawasan Kampung Beting. Pemilihan 3 RW ini berdasarkan keterangan keterangan penduduk bahwa RW-RW

tersebut termasuk kawasan awal permukiman. Narasumber dipilih berdasarkan kedekatan hubungannya dengan objek penelitian dengan katagori:

1. Penduduk asli rumah model lama
2. Penduduk asli rumah model baru
3. Penduduk pendatang
4. Pemimpin Kampung
5. Pengamat sosial



- RW 11, RW 13, RW10, RW 2, RW 12 termasuk dalam Kelurahan dalam Bugis, RW 1 termasuk dalam Kelurahan Tanjung Hilir

**Gambar 2.** Kiri, Unit sample penelitian; Kanan, Kawasan Kampung Beting

#### 4. SEJARAH PERKEMBANGAN KAMPUNG BETING

Berdasarkan media Pontianak Post Online, Senin 9 september 2009 dan Kompasiana, 10 Oktober 2010 menyebutkan bahwa Kampung Beting merupakan cikal bakal Kota Pontianak. Menurut Sy. Selamat Yusuf Alkadrie, salah satu kerabat Keraton Kesultanan Kadariah tersebut (Pontianak Post, Agustus 2009) menjelaskan pada masa awal permukiman, hunian di daerah tesebut menggunakan struktur terapung atau dikenal dengan nama rumah lanting (gambar 3). Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada beliau pada tanggal 18 Januari 2012 yang menjelaskan tahap awal hunian tepian sungai di Kampung Beting adalah tahap di masa era kesultanan Kadariah ke-6 yaitu Sultan Syarif Muhammad Alkadri bin Sultan Syarif Yusuf Alkadri yang berkuasa pada tahun 1895-1944 berupa hunian tepian sungai dengan model rumah lanting. Ketika perkembangan permukiman semakin ramai, hunian dengan struktur rumah terapung mulai tersisih dan menjadi rumah tiang.

Pada masa awal bermukim sistem pergerakan dari rumah ke rumah masih menggunakan perahu atau sampan. Hal ini terjadi lokasi permukiman yang terletak di daerah rawa dan jalur pasang surut sungai. Namun perkembangan berikutnya ketika hunian mulai berkembang menjadi rumah tiang, sistem pergerakan juga mulai berubah menggunakan gertak( jalan berbentuk jembatan yang dibuat membentuk pedestrian yang menghubungkan rumah-rumah.

Pada tahun 1950-an mulai berkembang rumah tiang (sebutan rumah tiang berdasarkan keterangan penduduk) dengan struktur kayu dengan masuknya etnis china, lokasi perumahan berada di daerah pinggiran sungai bersamaan dengan berkembangnya perindustrian. Pada masa awalnya industri yang berkembang adalah industri saomil (perkayuan). Hal ini terjadi karena kemudahan transportasi dari hulu ke hilir menggunakan transportasi sungai. Rumah tiang ini merupakan rumah-rumah baru setelah masa rumah

lanting. Perkembangan kembali meningkat setelah R.A Siregar (Walikota Pontianak 1993-1999) melakukan pembenahan fasilitas gertak dengan program HKS tahun 1996-1997. Pada tahun 2006 pemerintah kembali melakukan pembenahan fasilitas gertak dengan melakukan pengecoran sehingga lebih mempermudah akses.

Saat ini bentuk hunian di Kampung Beting berkembang menjadi bentukan yang lebih modern dengan struktur kayu dan beton, namun tetap menggunakan struktur panggung dan dihubungkan dengan gertak sebagai infrastruktur jaringan pergerakan Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, hunian-hunian dengan karakter yang lebih modern umumnya dilakukan oleh keluarga generasi kedua atau ketiga. Mereka pindah dari rumah orang tua dan mendirikan bangunan baru, walaupun umumnya masih dalam satu kampung.

## 5. KARAKTERISTIK KAMPUNG BETING

Secara administratif terletak di kawasan kelurahan Dalam Bugis dan berlokasi di percabangan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Secara administratif terletak di kawasan kelurahan Dalam Bugis dan berlokasi di percabangan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Kampung Beting secara geografis terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Dalam Bugis. Adapun batasan Kelurahan Dalam Bugis di batasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Hilir
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saigon
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tambelan Sampit
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecil

Sedangkan menurut RTBL kawasan wisata Beting kota Pontianak menuliskan sebagian besar Kampung Beting termasuk dalam bagian Kelurahan Dalam Bugis yang terdiri dari 5 RW ( RW 11, RW 13, RW 2, RW 10, RW 13) dan 1 RW terletak pada bagian Kelurahan Tanjung Hilir yaitu RW 1 (gambar 2).

Berdasarkan teori permukiman Doxiadis, unsur pembentuk permukiman dipengaruhi lima elemen eksitik yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Pembahasan studi karakteristik permukiman tepian air di Kampung Beting akan di jabarkan berdasarkan lima elemen eksitik tersebut.

### a) Alam

Kondisi alam Kampung Beting sangat berhubungan dengan sungai yang melalui Kalimantan Barat. Sungai-sungai tersebut saling terhubung dari muara hilir hingga ke hulu. Sungai terbesar di Kalimantan barat adalah sungai Kapuas dan membelah menjadi anak-anak sungai yang menerus hingga ke daerah pedalaman. Posisi Kampung Beting berada pada persimpangan sungai kapuas kecil dan sungai landak yaitu persimpangan pertama dari induk Sungai Kapuas.



**Gambar 3.** Kiri, Posisi Kampung Beting Dalam jalur Sungai Kapuas; Kanan, Sampah di kampung Beting

Sumber: [http://bandarpontianak.blogspot.com/2008\\_06\\_01\\_archive.html](http://bandarpontianak.blogspot.com/2008_06_01_archive.html),

Kondisi lahan sebagian besar berupa berupa tanah rawa dengan sampah-sampah yang menumpuk. Menurut salah satu penduduk, sampah-sampah yang terkumpul berasal dari sungai-sungai besar yang terbawa arus pasang surut. Sampah-sampah ini menyebabkan permukiman terkesan kumuh, namun sampah-sampah ini pula yang menyebabkan tanah rawa semakin padat. Kondisi pasang menyebabkan seluruh kawasan termasuk daerah rawa tergenang air, hal ini yang menyebabkan seluruh permukiman menggunakan struktur gantung dengan tiang yang menerus ke lapisan rawa.



**Gambar 4.** Kiri, kondisi surut (pengambilan foto tanggal 11-04-2012, pukul 16.30); kanan, kondisi pasang (pengambilan foto tanggal 09-09-2011, pukul 12.30)

#### b) Bangunan

Bentuk pola permukiman terintegrasi membentuk kelompok perumahan padat sebagai hasil evolusi masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Bangunan publik terdiri dari bangunan masjid, bangunan sekolah, bangunan pasar serta beberapa gudang industri (udang, minuman, kayu, kapal). Bangunan masjid adalah fasilitas publik utama dan dari observasi 3 RW ditemukan 2 surau dan 1 masjid utama. Masjid tersebut dinamakan masjid Jami' dan merupakan bangunan pertama di Kota Pontianak.



**Gambar 5.** Kiri, Masjid Jami Pontianak 1958; kanan, Masjid Jami Pontianak 2012

Pusat perdagangan berada pada tepian sungai, karena kegiatan bongkar muat langsung dari sampan atau motor boat. Pasar ini di bangun diatas tahun 1980an (Sy. Selamat Yusuf Alkadrie,74) sedangkan menurut Juanda,33 (staff Kelurahan dalam Bugis) pasar tersebut di bangun pada tahun 1990an. Pada tahun sebelumnya kegiatan perdagangan dilakukan langsung dari sampan ke rumah-rumah dengan menggunakan sampan melewati sungai-sungai kecil (penduduk lokal menyebutnya parit) yang melintasi kampung tersebut.



**Gambar 6.** dari kiri; 1,2 bongkar muat di pasar; 3,4 kegiatan transportasi di parit lingkungan kampung

Pembentukan kapling juga terjadi secara gradual dan spontan berdasarkan ketersediaan lahan kosong. Pada awalnya hak kepemilikan lahan membangun didapat berdasarkan kesepakatan antar warga bahwa si pemilik akan membuat rumah di lokasi A yang nantinya akan di saksikan oleh kepala kampung, dengan catatan lahan tersebut masih kosong atau belum ada pemiliknya. Kepala kampung akan membuat SKT (surat keterangan tanah) berdasarkan kesaksian warga di sekitarnya dan SKT tersebut saat ini dapat di ubah menjadi surat kepemilikan resmi dari pemerintah.

Menurut hasil wawancara dari beberapa penduduk disimpulkan ada beberapa tipe karakteristik bangunan rumah yaitu:

1. Rumah dengan model rumah lanting bersifat non permanen dan dapat bergerak seperti perahu, tipe rumah kampung; atap pelana daun, dinding papan simpan, rangka kayu biasa, lantai papan, dengan struktur pondasi berupa batang pohon bulat yang di susun menyerupai rakit sehingga rumah mengapung.
2. Rumah dengan model rumah tiang, bersifat permanen/tetap, tipe rumah lama; atap limas atau pelana sirap, dinding papan kelas 1, rangka kayu kelas 1, lantai papan kela1, dengan struktur pondasi gantung (struktur panggung).
3. Rumah dengan model rumah tiang, bersifat permanen/tetap, tipe rumah modern; atap limas atau pelana seng atau metal, dinding batako, rangka kayu finishing beton, lantai beton finishing keramik dengan struktur pondasi gantung (struktur panggung)

Tipe rumah lanting sudah tidak dapat di temukan lagi di kampung tersebut. Rumah tersebut merupakan rumah sementara bagi pedagang yang tinggal jauh dari pusat kota. Bersifat non permanen dan dapat bergerak seperti perahu. Mereka membentuk komunitas berdasarkan kedekatan kekeluargaan. Ketika mereka berhasil dengan dagangannya, maka datang lagi keluarga untuk bermukim sehingga tumbuh rumah-rumah secara liar. Ketika permukiman semakin padat, model rumah lanting semakin di tinggalkan hal ini diperkirakan terkait dengan semakin sulit memperoleh lahan bermukim yang sesuai sehingga tidak bebas lagi bergerak. Selain itu hak kepemilikan saat ini begitu penting berbeda pada masa awal<sup>2</sup> perkembangan yang penduduk dengan seenaknya berpindah-pindah dan mematok lahan. Namun jejak rumah lanting masih dapat ditelusuri pada daerah-daerah pedalaman Kalimantan, seperti di Sanggau, Kapuas Hulu atau di daerah Sambas. Tipe rumah lanting mulai bberkembang di Kampung Beting sekitar tahun 1930 dan mulai berangsur menghilang sekitar tahun 1960-1980 (berdasarkan wawancara penduduk lokal Kampung Beting dan pengamat sosial Kalimantan Barat).



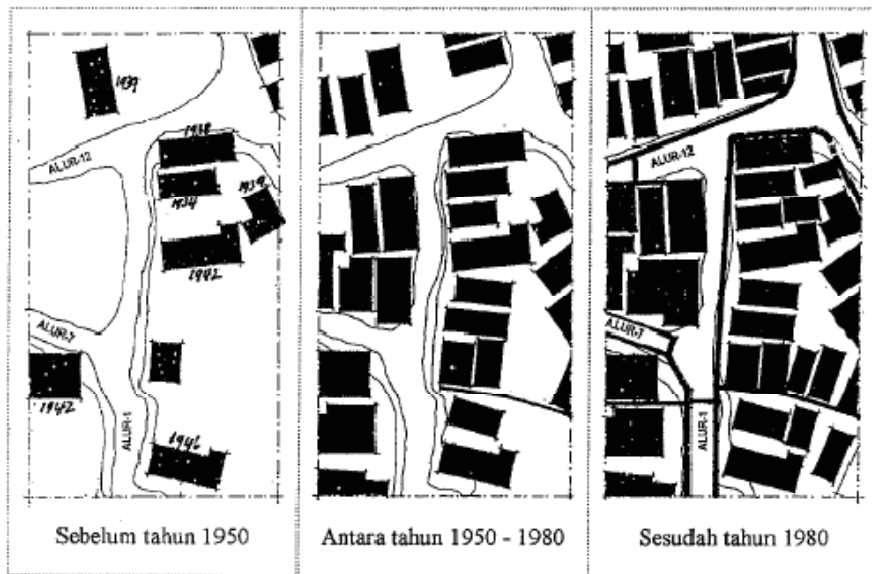
**Gambar 7.** dari atas; baris 1, tipe rumah tiang lama bekas rumah lanting; baris 2 tipe rumah tiang lama; baris 3 tipe rumah tiang baru

Tipe rumah tiang lama sebenarnya sudah ada sebelum berkembang rumah lanting pada permukiman Kampung Beting. Tipe rumah tiang umumnya merupakan prototype tipe rumah-rumah yang terdapat pada masyarakat yang tinggal di dataran keras baik di daerah kekuasaan Keraton kadariah (Pontianak Timur), daerah bermukim etnis Tionghoa (Pontianak utara) maupun yang berada di daerah kolonial (Pontianak Barat). Kota Pontianak berkembang berdasarkan keragaman etnis, raja kesultanan Kadariyah selalu memberikan izin bagi para pendatang yang berniat baik untuk bermukim. Sehingga bentuk arsitektur rumah lama sangat dipengaruhi budaya dari masing-masing etnis. Tipe rumah ini mulai berkembang di tahun 1950-an, dan mulai berkembang ketika permukiman di Kampung Beting semakin padat sehingga mengundang banyak penduduk untuk bermukim. Proses jual beli juga tidak bersifat formal, karena kepemilikan tanah juga berdasarkan kesepakatan warga sehingga sulit di lacak kepemilikannya. Rumah tiang bersifat permanen sehingga pembangunannya membutuhkan lebih banyak biaya di bandingkan rumah lanting.



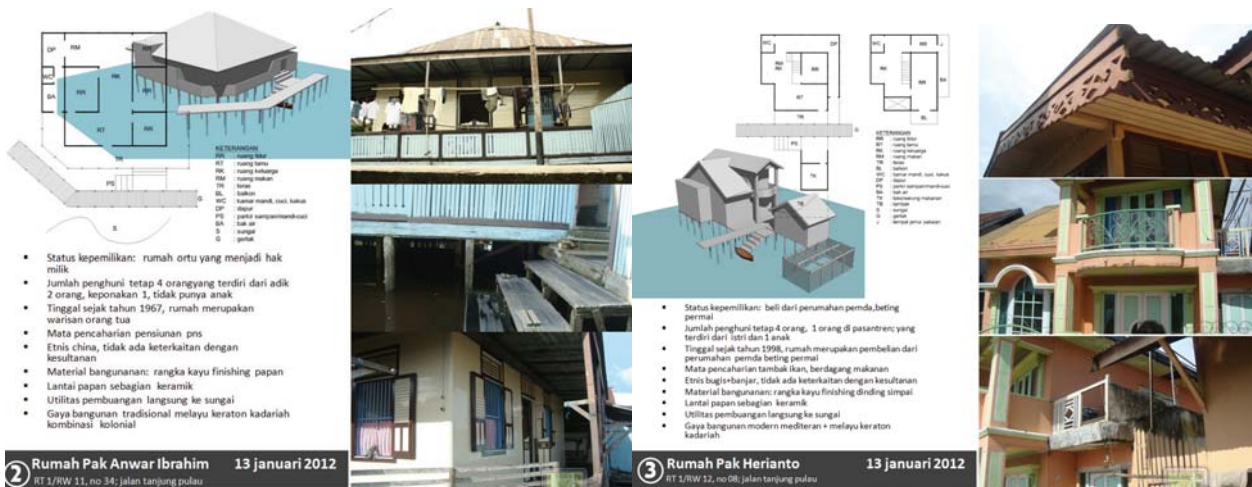
**Gambar 8.** Atas kiri-kanan, 1) miniatur rumah lanting di museum Kal-Bar, 2) komunitas rumah lanting di Kal-Teng; Bawah kiri-kanan, 3) Rumah di danau Trahayon Lanting di Kal-Teng, 4) rumah lanting di Kapuas Hulu Kal-Bar





**Gambar 9.** Proses Okupansi lahan di Kampung Beting  
Sumber: Hasyim (1999)

Tipe rumah tiang baru dengan model yang lebih modern berkembang setelah tahun 1980 (wawancara penduduk lokal kampung Beting dan Pengamat sosial). Perkembangan tersebut didukung dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi. Tipe rumah tiang baru sudah menggunakan material-material beton namun tetap menggunakan struktur rangka kayu.



**Gambar 10.** Kiri; Tipe Rumah Tiang Lama, Kanan; Tipe Rumah Tiang Baru

**c) Manusia & Masyarakat**

Komposisi masyarakat di Kampung Beting bersifat plural dengan terdiri dari beragam etnis diantaranya bugis, jawa, cina, arab, banjar dan melayu. Keragaman etnis ini disebabkan kebijakan Kesultanan Kadariyah yang mendukung para pendatang untuk bermukim sehingga terbentuk pluralitas masyarakat. Dengan keberagaman etnis tersebut menyebabkan keberagaman adat dan budaya. Menurut Dian, 34 (penduduk pendatang dari Jawa), adat di Kampung Beting masih kental dengan suasana mistis walaupun sebagian besar beragama islam. Misalnya ketika seorang wanita hamil 7 bulan masyarakat Bugis melakukan *tradisi buang-buang* yaitu tradisi membuang-buang beberapa makanan ke sungai untuk keselamatan. Sama halnya dengan masyarakat Banjar, untuk keselamatan mereka melakukan *tradisi tumbang apam*.



**Gambar 11.** Arak-arakan keliling kampung dengan pakaian khas Melayu setelah acara Maulidan

Tingkat interaksi sosial masyarakat masih sangat tinggi, gotong royong dan musyawarah masih sering dilakukan. Kegiatan sosial masyarakat umumnya ditampung dalam suatu kegiatan seperti kelompok pengajian atau Majelis Taklim, kelompok Haderah (semacam kesenian gambus), kelompok arisan, kelompok remaja masjid, karang taruna, dan kelompok profesi seperti kelompok penambang sampan (ojek sampan).

Hampir semua kegiatan penduduk berhubungan dengan sungai, mulai dari kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, gosok gigi, kegiatan bermain anak-anak, memancing, kegiatan berdagang hingga transportasi.



**Gambar 12.** Dari Atas: baris 1, kegiatan transportasi; baris 2, kegiatan santai dan bermain; baris 3, kegiatan mandi dan mencuci

#### d) Jaringan

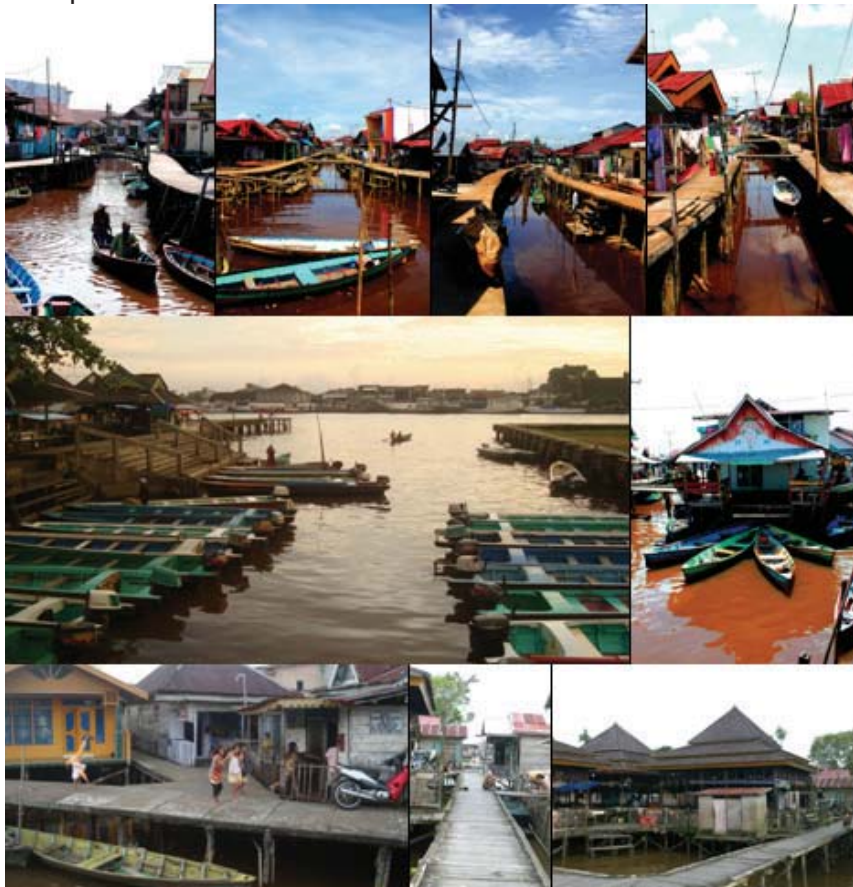
Pola sirkulasi kawasan berupa kanal-kanal atau sungai kecil (penduduk menyebutnya parit) yang berfungsi sebagai lalu lintas perahu, sedangkan jaringan jalan yang ada berupa jaringan pedestrian yang terbuat dari konstruksi kayu, penduduk lokal menyebutnya gertak.

Pada awal perkembangan permukiman, jaringan pergerakan utama adalah parit-parit yang membelah kawasan Kampung Beting. Parit-parit ini sudah terbentuk dengan sendirinya dari awal permukiman terbentuk dan belum ada jaringan jalan atau jembatan. Satu-satunya

media transportasi adalah menggunakan sampan. Ada dua jenis sampan yang digunakan sampan untuk keseharian di dalam kampung di sebut *Jalor* yaitu hanya berupa susunan kayu belah yang dicoak di tengahnya dan digapitkan, sedangkan sampan untuk menyeberang sungai besar di sebut *sampan tambang*, sampan ini sudah di tambahkan papan bagian atasnya (penduduk menyebutnya timbau) sehingga daya muatan penumpang jadi lebih banyak.

Gertak atau jembatan pedestrian mulai berkembang setelah tahun 1950-an yaitu setelah berkembang rumah-rumah tiang di Kampung Beting. Gertak pertama dibangun secara swadaya dengan koperasi masyarakat. Bentuk pertama gertak berupa susunan papan dan gelegar yang ditopang tiang menerus hingga ke dalam parit. Gertak ini disusun menyusuri tepian parit. Pemasangan gertak tidak dilakukan secara sekaligus menyeluruh di setiap rumah penduduk, namun hanya pada parit utama. Untuk mencapai gertak utama tersebut masyarakat membuat jembatan yang hanya terdiri dari 1-2 susun batang kayu bulat yang disusun hingga mencapai gertak utama (penduduk lokal menyebutnya jembatan titian). Tahun 1996 pemerintah memberikan bantuan lewat program HKS (Hari Kesetiakawanan Sosial) untuk dibangun gertak ke seluruh Kampung dan terakhir tahun 2006 dengan bantuan dana dari pemerintah hampir seluruh gertak di Kampung Beting dicor dengan beton.

Walaupun bentuk jaringan pergerakan di Kampung Beting sudah menggunakan gertak, sungai dan parit masih tetap digunakan sebagai media jaringan pergerakan, sehingga pada bagian-bagian tertentu dibuat semacam dermaga sebagai terminal sampan. Ada dua jenis terminal sampan utama di kampung Beting, yang pertama yaitu pangkalan sampan tradisional yang merupakan terminal sampan-sampan dengan mesin rakitan atau sampan dayung dan yang kedua adalah pangkalan sampan modern yang didominasi sampan-sampan bermesin pabrikasi.



**Gambar 13.** Dari atas; baris 1, parit-parit penunjang jaringan pergerakan sungai; baris 2, terminal sampan;  
baris 3 gertak beton dan gertak papan

## 6. KESIMPULAN

Permukiman adalah merupakan produk dari evolusi dan adaptasi suatu sistem dalam jangka waktu yang lama. Perubahan pada suatu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain yang kemudian akan membentuk sistem pengaturan ruang hidup yang spesifik sesuai kebutuhan hidup. Doxiadis (1968:23) menjelaskan hubungan antar elemen ekistik dapat dilakukan menjadi beberapa kombinasi dan setiap kombinasi akan menghasilkan makna yang berbeda.

Dalam kasus permukiman tepian sungai di Kampung Beting, Kalimantan Barat-Pontianak elemen yang menjadi karakter utama adalah sungai. Dari awal, perkembangan permukiman terbentuk karena kemudahan akses yang disediakan alam dengan jaringan sungai-sungai yang membelah Kalimantan Barat. Kampung Beting merupakan daerah perhentian sementara para pedagang yang menjual dagangannya dari pedalamaan. Sehingga terkumpul berbagai masyarakat dengan berbagai etnis. Keragaman ini menciptakan pluralitas adat dan budaya, kesamaan nasib dan tujuan membentuk masyarakat yang kompak dan saling tolong menolong. Jaringan sungai dan parit-parit juga menyebabkan segala aktivitas termasuk transportasi sangat berhubungan dengan sungai. Walaupun pada akhirnya tercipta alternatif jaringan pergerakan lain berupa gertak, namun tetap berkaitan dengan sungai. Gertak menjadi garis yang mempertegas batasan parit-parit yang membagi sub-sub kawasan Kampung. Gertak juga terbentuk karena adanya perubahan bentuk rumah dari rumah lanting ke rumah tiang karena rumah tiang posisinya lebih tinggi dari rumah lanting sehingga memerlukan jembatan untuk melewatinya. Perubahan rumah lanting ke rumah tiang disebabkan perkembangan penduduk yang semakin padat, perkembangan teknologi material serta perkembangan ekonomi masyarakat.

## 7. ACKNOWLEDGMENT

The paper originally made to fulfill the requirements for "theses" subject in Architecture Department, School Architecture, Planning, and Policy Development, Institute Technology Bandung (ITB), Indonesia

## 8. DAFTAR PUSTAKA

1. **Bronson, Bennet.** (1977). Exchange at The Upstream and Downstream Ends: Notes Toward a Fuctional Model of The Coastal State in Southest Asia. Michigan Pappers on South and Southest Asia. The University of Michigan. Center for South and Southest Asian Studies. United States
2. **Doxiadis, C. A.** 1968. Ekistic, an Introduction to the Science of Human Settlements. London: Hutchinson of London.
3. **Geertz, C.** (1973). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. In The Interpretation of Cultures: Selected Essays (pp 3-30). New York: Basic Books, Inc., Publishers
4. **Hasanuddin, Bambang Hendrata S. P, Pembayun Sulistyorini.** (2000): Pontianak 1771-1900 Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi. Romeo Grafika Pontianak.
5. **Hasyim, Agus Cholid.** (1999): Bentuk Pengkaplingan Pada Permukiman Kota Diatas Perairan Sungai Di Kampung Beting, Kota Pontianak. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
6. **Listiana, Dana.** (2009). Ibu kota Pontianak 1779-1942, Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak
- Soenarpo, Herry Wuryanto, Pasifikus Ahok, Barmaniki, Mahidin Mahsor.** 1986.

Arsitektur Tradisional Kalimantan Barat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah. Jakarta

7. **Philipsen, G.** (1992). *Speaking Culturally: Explorations in Social Communication*. Albany, New York: State University of New York Press
8. **Pontianak Post.** <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=25779>. didownload 15 Januari 2012
9. **Kompasiana.** <http://sosbud.kompasiana.com/2010/10/10/kampung-beting-harmonisasi-kejahatan-dan-kebaikan/>. didownload 15 Januari 2012

# MODEL PANDUAN PENATAAN PEMBANGUNAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN TRADISIONAL : ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG BERKELANJUTAN

Studi Kasus : Jeron Beteng, Kraton, Yogyakarta

Riandy Tarigan<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The emphasis of this paper is to provide an alternative construction of the problems that arise in a residential area that has been established as a traditional and historic neighborhoods. The problem that emerges is the conflict between government policies in order to maintain the area so as not destroyed by the changing times with the needs of local communities. The other problems in society is the inability to treat the building as well as the division of land resulting from changes in ownership and so on. With government policy and economic conditions may lead to environmental degradation.*

*Studies conducted on spatial changes in the courtyard a traditional Javanese residence, and second, studies performed on change the division of land resulting from a change of ownership.*

*Model policy guidelines refer to the structure of the home position to changes resulting from the addition of living space on a traditional Javanese house. The study was conducted on the structure, function, philosophy and characteristics of the building that became the basis for understanding the changes that occur. The goal is to produce a pattern of buildings that have this level of adaptability to the environment that have a strong tradition and high level of capability for the dynamic activity of the community (residents) in the use of outer space.*

*The study was conducted to observe aspects of the change in the space, building orientation, building density and height of buildings. The review resulted in the decrees of which is the basic reference in building traditional neighborhoods. These guidelines can be used by communities and local governments so that the community can accommodate changes in the public interest without losing the characteristics of a traditional environment.*

*This guide is produced to control the growth of new buildings around a traditional house. The guidelines became the basis to regulate the circulation system, system utilities, open space, building height and building density. The presence of these guidelines then the traditional neighborhoods can be maintained and adapted to the needs of society to space.*

**Key words:** *model guidelines, a change of ownership, system of architectural space and form*

## 1. Latar Belakang

### Fenomena Perubahan Budaya

Perubahan yang diakibatkan oleh masuknya budaya-budaya luar tidak menjadikan kultur Jawa berubah, karena khususnya suku Jawa yang memiliki *open minded tolerance* atau *savoir vivre* (lapang dada) dalam menanggapi berbagai kebudayaan asing yang hadir sepanjang sejarah Indonesia.<sup>4</sup> Dan sebagian masyarakat masih mempunyai pandangan terhadap mitos dan mistik yang telah berada dan berpengaruh di Jawa sebelum Hinduisme masuk. Setiap perkembangan dan proses inkulturasi agama tertentu tidak terlepas dari persoalan inkulturasi budaya. Hal ini diperlihatkan pada pemanfaatan religi-religi pra-Hindu

---

<sup>3</sup> Penulis adalah staf edukatif tetap di Progdii Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Email: riandyt@rocketmail.com

<sup>4</sup> ROG Benedict Anderson, (1969), *Mythology and Tolerance of the Javanese*, New York : Cornell University diambil dari Djoko Soekiman, (2000), *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Di Jawa (abad xviii – medio abad xx)*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Indonesia, hal. 14.

maupun Hindu dalam setiap proses keagamaan di Jawa, seperti : wayang, tahlilan, perkawinan yang masih menggunakan pandangan-pandangan terhadap mitos yang masih berkembang di masyarakat Jawa.

Perubahan budaya arsitektur juga telah terjadi dalam prosesnya. Budaya arsitektural di Jawa nampaknya masuk dalam budaya transisional. Menurut Prof. Dr. Sjafrin<sup>5</sup>, masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, telah mengalami keadaan yang ambigu, yaitu antara "mengejar dan melestarikan". Mengejar dalam arti mencapai modernitas, sedangkan melestarikan adalah masih memelihara budaya lama. Aspek perubahan budaya khususnya dalam dunia arsitektur sangat kuat terekspresikan di dalam huniannya, karena hunian atau rumah merupakan pengejawantahan paling dekat dengan kebudayaan manusia. Rapoport<sup>6</sup> mengatakan bahwa rumah merupakan bentuk kebudayaan yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Dari hunian tersebut, budaya muncul. Dalam rumah tinggal, manusia pertama kali tumbuh untuk memahami nilai hubungan antar manusia dan spasialitas terhadap huniannya sebelum memahami spasialitas dan hubungan antar manusia di luar rumah. Ketika penghuni mengalami posisi transisi antara kebudayaan aslinya dengan kebudayaan baru yang masuk maka secara signifikan akan berpengaruh pula terhadap sistem yang terbentuk ke dalam rumah dan pekarangannya.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan

Tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan studi tentang perubahan spasial pada bangunan tradisional dan elemen pekarangan yang tetap dimanfaatkan oleh masyarakat penghuni.
- Melakukan studi terhadap perubahan kepemilikan, perkembangan hunian di dalam pekarangan.

### 2. Sasaran

Sasaran pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendapatkan elemen-elemen perubahan spasial ruang tradisional tradisional sebagai elemen yang tetap dipertahankan dalam penataan bangunan.
- Untuk mendapatkan pola pembagian ruang berdasarkan perkembangan pembangunan rumah.
- Untuk mendapatkan model panduan sebagai acuan dalam pembangunan kawasan pada umumnya, rumah tradisional pada khususnya.

## 3. KONSEP RUANG DALAM TRADISIONAL

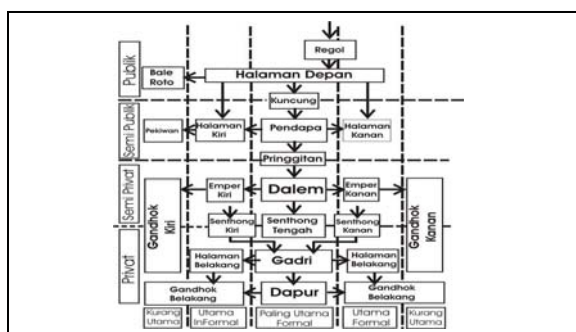
Pada dasarnya, secara fisik, susunan rumah tinggal Jawa terdiri dari : *pendopo*, *pringgitan*, *dalem*, *sentong*, *jogan* dan *gandhok* (Gambar 1). Masing-masing nama itu mempunyai tujuan dan fungsi yang khusus, meskipun setiap nama tidak selalu mencerminkan fungsi. Dalam perkembangan rumah Jawa, perubahan itu selalu terjadi tanpa meninggalkan hakekat dari konsep ruang itu. Dengan memperhatikan pandangan hidup orang Jawa tercermin dalam pembagian ruang-ruang dalam huniannya. Priyotomo<sup>7</sup> menemukan bahwa rumah Jawa sebagian besar disusun menurut pengaturan linier dan sentripetal yang masing-masing bermuara pada prinsip dualitas dan pemusatan. Pendopo merupakan bangunan yang terbuka yang mewakili dunia luar yang diperlihatkan tanpa adanya dinding penyekat secara berangsur-angsur menuju ketertutupan yang diwakili oleh

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Sjafrin Sairin, (2002), *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hal. 172.

<sup>6</sup> Amos Rapoport, (1979), *Cultural Origins of Architecture* dalam James C. Snyder dan Anthony J. Catanese (ed.), *Introduction to Architecture*, New York: McGraw-Hill Book Company, hal. 2.

<sup>7</sup> Revianto Budi Santosa, (2000), hal. 19.



Gambar 1. Bagan Hubungan Ruang pada Rumah Tradisional Jawa

*sentong* dan *dalem* yang mewakili dunia dalam diri manusia. Hal ini diperlihatkan dengan “kegelapan” atau ketiadaan cahaya dalam ruang untuk mencapai kedalaman diri manusia dengan pengisolasian terhadap pengaruh luar. Selain itu *dalem* merupakan perwujudan dari kekuasaan yang sebenarnya dari pemilik rumah terhadap tatanan rumahnya (dalam hal ini laki-laki). Karena *omah* adalah ranah domestik yang merupakan tempat yang terlindungi karena ada kewenangan yang jelas didalamnya,

dimana dapat mengontrol siapa yang masuk ke rumah dengan menentukan apakah seseorang yang datang adalah tamu terhormat atau tidak.

Pemahaman terhadap perubahan konsep rumah Jawa masa kini ditinjau aspek-aspek yang tercantum di bawah ini, terdiri dari:

1. Fungsi dan Aktivitas.

Ruang pada rumah Jawa mempunyai konsep tersendiri. Secara umum, fungsi rumah tinggal Jawa adalah kegiatan domestik, kegiatan religi-spiritual dan kegiatan sosial. Kegiatan domestik adalah kegiatan pribadi dan rutin, seperti: kegiatan memasak, mencuci, tidur dan sebagainya. Kegiatan religi adalah kegiatan individu yang berkaitan dengan hubungan vertikal berbentuk kegiatan pemujaan terhadap *Dewi Sri*, seorang dewi yang memberikan sandang-pangan terhadap penghuni dengan memberikan seenggok padi hasil pertaniannya. Kegiatan ini dilakukan di *senthong tengah*. Sedangkan kegiatan sosial adalah kegiatan yang berjaitan dengan hubungan horisontal (masyarakat). Kegiatan ini dilakukan diberbagai tempat, tergantung dari status, kedudukan dan tingkatan pengunjung serta status penghuni (Bapak, Ibu atau anak-anak, pembantu).

Kegiatan domestik banyak dilakukan di bagian *gandhok omah buri*, pekarangan dalam (belakang) sesuai dengan fungsi unit rumah Jawa. Bagian *dalem* terdapat ruang tidur (*senthong kanan dan kiri*) yang dikhususkan untuk tempat tidur orang tua atau untuk ruang tidur bagi tamu yang dihormati. *Gandhok* secara umum berfungsi sebagai pusat pelayanan dari kehidupan keseharian penghuni rumah. Kegiatan religi dilakukan oleh orang tua penghuni rumah. Kegiatan ini bersifat pribadi dan tertutup yang dilakukan di *senthong tengah*. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dilakukan di *dalem (omah)*, *pringgitan* dan *pendhopo*.

2. Pola Sirkulasi

Sirkulasi rumah tinggal Jawa terdiri dari 2 sifat ditinjau dari kedudukan dan sifat pengguna/pelakunya. Sirkulasi formal diwakili oleh pintu masuk ke dalam *dalem*, dimana sirkulasi ini adalah sirkulasi khusus untuk menerima tamu yang bersifat formal, hirarkial, dan kepentingan laki-laki (orang tua). Pintu utama ini hanya dibuka apabila ada tamu yang menemui laki-laki (orang tua) pemilik rumah. Sedangkan pintu utama samping berfungsi sebagai sirkulasi utama bagi seluruh keluarga dengan kegiatan non-formal, seperti menerima tamu perempuan. Dengan demikian pintu-pintu utama ini menjadi bagian penting untuk membagi sirkulasi masing-masing kegiatan.

3. Posisi/Perletakan Ruang

Perletakan ruang ditentukan oleh hirarkial konsep ruang tersebut, secara keseluruhan *senthong* sebagai inti rumah tersebut bukan berada posisi paling belakang, melainkan paling tengah, meskipun apabila dilihat secara umum, *senthong* terletak paling belakang. Hal ini diakibatkan oleh konsep sentripetalnya dunia mikrokosmos yang diterjemahkan ke dalam rumah terhadap peran makrokosmosnya. *Senthong* sebagai pusat bukan merupakan bentuk yang besar dan megah, melainkan bentuk yang sempit,



gelap dan sumpek. Kemenduaan ini merupakan karakteristik posisi ruang-ruang pada rumah Jawa. Semakin menjauh dari pusat rumah (*senhong*), hirarki ruang semakin berkurang tingkat keformalan; membentuk sebuah lingkaran. Hal ini diperlihatkan dalam peran *pendopo* dan *gandhok* yang berada di bagian periferi (tepi) dari pusat rumah.

4. Orientasi

Ditinjau dari luar, bangunan Jawa nampaknya berorientasi utara-selatan, sebagai salah satu ketaklukan orang Jawa terhadap penguasanya, dalam hal ini kraton. Orientasi ini merupakan orientasi untuk tidak mempersamakan diri dengan penguasa kraton yang secara hirarkis-religius merupakan wakil dari Tuhan di dunia. Orientasi rumah raja kraton Yogyakarta menghadap ke Timur merupakan "awal dari kehidupan" yang disimbolkan oleh munculnya matahari, meskipun secara kseseluruhan, orientasi kraton menghadap ke utara. Rumah di Jero Beteng, baik rumah Pangeran maupun *abdi dalem* selalu berorientasi ke selatan atau utara. Dalam arti, ada perbedaan konsep orientasi antara tradisi Timur dan Barat. Orientasi Barat sering dikaitkan dengan fungsi, sedangkan orientasi Timur lebih ditekankan pada akses spiritualnya.

5. Ruang Sakral dan Ruang Profan

Ruang terbagi 2 sifat dalam rumah tradisional Jawa, yakni: ruang profan dan ruang sakral. Ruang sakral diterapkan dalam *senhong tengah* sebagai tempat pemujaan, penyimpanan pusaka dan sebagainya, yang tidak dapat digunakan oleh kegiatan manusia. Sedangkan ruang profan meliputi seluruh ruang yang ada di rumah tinggal tersebut.

6. Bentuk Arsitektur

Bentuk arsitektur tradisional Joglo yang selama dikenal sesungguhnya bukan inti dari rumah tradisional. Rumah tradisional tidak diperlihatkan dalam bentuknya. Nampaknya bentuk bangunan hanya untuk membedakan hirarki dan strata dalam masyarakat Jawa. Bentuk arsitektur tradisional Jawa sangat terkait dengan status sosial penghuni dan fungsi bangunan. Secara substansial inti dari keseluruhan rumah tinggal adalah ekspresi dari nilai-nilai dan pandangan mistis individu, pembagian kewenangan, serta nilai sosial.

7. Karakteristik Batas Ruang

Untuk mengembangkan konsep pandangan hidup dan keteraturan dalam hubungan harmonis di dalam masyarakat ditunjukkan dalam penetapan ekspresi batas ruang yang bersifat "mendua". Semakin transparan batas ruangnya tidak menunjukkan semakin terbukanya orang Jawa, namun semakin tertutup dan formal dan sebaliknya ruang yang semakin tertutup yang memberikan nilai kebebasan individu untuk mengekspresikan perilaku batiniah dan jasmaniahnya.

**4. KEBERADAAN RUMAH TINGGAL SETELAH TERJADINYA PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN**

**Keberadaan Rumah di Jl. Siliran Lor No. 25, Jeron Beteng, Kraton**

A. Rumah Keluarga Bapak Soewardi

Pak Soewardi mendapatkan hak kepemilikan pada bagian di *pendhopo* dan *pringgitan*. Pada awalnya *pendhopo* merupakan ruang yang terpisah dengan soko guru serta kolom pendukungnya. Saat ini dengan adanya kebutuhan ruang, maka *pendhopo* telah berubah menjadi ruang tertutup setelah penambahan dinding batu bata di sekeliling *pendhopo* tersebut. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 1943 secara bertahap untuk memenuhi kebutuhannya setelah pembagian kepemilikan dilakukan. Terdapat 5 fungsi kegiatan yang terjadi dalam *pendhopo* yaitu : ruang tamu, warung, teras, wartel, ruang tengah dan ruang makan. Warung telpon dan teras berada di *emperan* depan *pendhopo*. Melihat kondisi perubahan ini, menurut pemilik rumah, hanya mengacu pada pemanfaatan ruang yang telah diberikan tanpa merubah kondisi ruang yang ada.

*Pringgitan* dalam rumah ini sebagai satu kesatuan *pendhopo* yang menjadi bagian dari Pak Soewardi. *Pringgitan* disekat menjadi 2 ruang yaitu ruang tidur dan dapur dengan menggunakan bahan dari kayu dan tripleks. Luas ruang tidur adalah 2/3 dari panjang, sedangkan dapur menggunakan 1/3nya. Ruang pembantu dan gudang berada di bangunan tambahan di sebelah Barat yang terpisah dengan struktur ruang utama. Dengan terpisahnya kegiatan antara *pringgitan* dengan *pendhopo*, maka pintu tengah tidak digunakan lagi. Pintu yang digunakan adalah pintu yang menghubungkan dapur dan ruang tidur dengan *pendhopo*. Pintu yang menghubungkan *pringgitan* dengan *dalem* tidak digunakan karena keterkaitan kepemilikan yang berbeda.

B. Rumah Keluarga Ny. Kusdilah

Ibu Kusdilah mendapatkan hak kepemilikan di bagian *Dalem* dan telah membeli *gandhok* bagian barat. Pintu masuk ke keluarga Kusdilah melalui jalan samping melalui *emperan dalem*. *Emperan* ini difungsikan pula sebagai ruang tamu. Sedangkan *dalem* telah berfungsi sebagai ruang tidur dengan sekat kayu. Nampaknya keluarga ini membiarkan ketertutupan sebagai ciri khas *dalem*, tanpa melakukan pembukaan-pembukaan dinding untuk penerangan atau penghawaan. Seluruh *senthong* yang ada telah berubah menjadi fungsional yaitu sebagai ruang tidur bagi keluarga Kusdilah. *Dalem* dan *senthong* tidak nampak lagi pembagian ruang yang bersifat hirarkial sebagaimana yang terjadi pada *dalem* dengan peninggian lantainya. Batas dinding antara *senthong* tengah, kiri dan kanan telah dibongkar dan saat ini hanya digunakan sebagai ruang tidur.

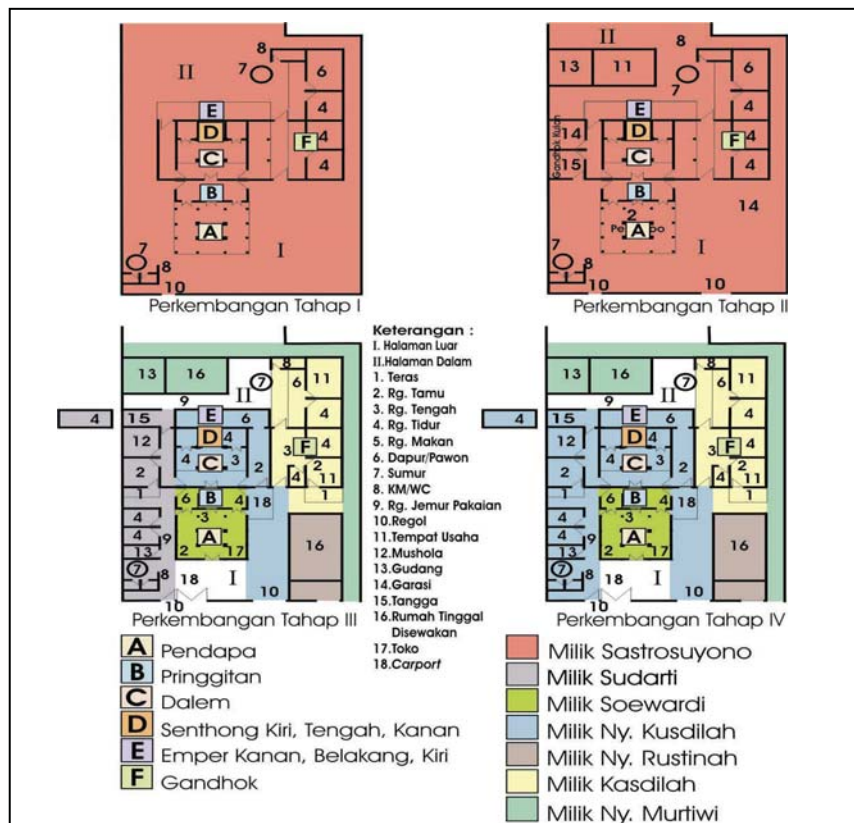
*Gandhok* sebelah barat semula dimiliki oleh keluarga Soedarti, namun saat ini telah dibeli oleh Ibu Kusdilah. Bagian depan *gandhok* barat telah dirubah menjadi teras rumah, sedangkan dibagian belakang dibuat ruang berlantai 2 untuk ruang tidur. Pada lantai dasar difungsikan sebagai ruang tamu, ruang tidur, musholla dan kamar mandi. Dengan demikian, pintu utama melalui *gandhok* barat, sedangkan pintu samping melalui *emper dalem* bagian timur. Oleh karena itu, dengan dimilikinya *gandhok* barat, maka saat ini *dalem* mempunyai pekarangan luar baik di bagian barat maupun timur serta pekarangan dalam.

C. Rumah Keluarga Ny. Wanieta.

Keluarga Ny. Wanieta menghuni bagian *gandhok* sebelah timur. Selain sebagai rumah tinggal, *gandhok* difungsikan sebagai tempat usaha pembuatan kaos dan penyablonan. Ruang bagian depan digunakan untuk kantor dan gudang kantor. Ruang di belakang kantor digunakan untuk ruang tidur. Ruang terbuka digunakan untuk ruang tengah, sedangkan lengkong digunakan area sirkulasi ke belakang. Ruang di bagian belakang digunakan untuk dapur, kamar mandi serta pembuatan dan penyablonan kaos oblong (*t-shirt*).

Pintu masuk ke daerah belakang merupakan *seketheng*, yakni pintu samping yang menuju *gandhok*. Sedangkan sirkulasi untuk tamu dibuatkan pintu masuk tersendiri dengan membongkar dinding *gandhok* serta dibuat teras. Dengan demikian, orientasi *gandhok* yang sebelumnya menghadap ke arah *dalem* (barat), saat ini orientasi berubah menghadap ke selatan menjadi bangunan yang terpisah dan berdiri sendiri.

D. Rumah Keluarga Ny. Rustinah.  
 Rumah Ibu Rustinah merupakan rumah tambahan yang dibangun didepan *gandhok* timur, karena mendapatkan tanah pada lokasi tersebut. Sekarang rumah ini disewakan kepada orang lain. Rumah ini tidak mempunyai pekarangan dalam (belakang). Seluruh tapaknya dikelilingi oleh dinding rumah. Akses ke rumah hanya melalui pintu depan, meskipun di bagian samping



Gambar 2. Skema Perkembangan Spasial pada Rumah di Jl. Siliran Lor No. 25.

kanan, belakang dan kiri bangunan terdapat ruang luar yang berupa jalur sirkulasi.

Di samping kanan bangunan terdapat cekungan dinding yang digunakan untuk perletakan jendela. Arah jendela tidak menghadap langsung ke jalan masuk, melainkan menyamping. Perletakan ini nampaknya untuk menjaga agar jendela tidak langsung berhadapan dengan ruang publik yang mengganggu ke bagian ruang privat (ruang dalam).

E. Rumah Ny. Murtiwi

Ny. Murtiwi mendapatkan tapak yang terletak dibagian belakang rumah. Tapak tersebut merupakan bangunan tunggal yang berfungsi sebagai rumah dan gudang. Saat ini bangunan tersebut tidak ditempati oleh pemilik, namun disewakan kepada orang lain. Berbeda dengan bangunan sebelumnya yang menghadap ke selatan, bangunan ini menghadap ke utara. Posisi bangunan yang terletak di belakang, maka satu-satunya akses adalah melalui gang dengan lebar 1 m yang terletak di samping *gandhok* timur. Batas tanah sengaja tidak satu garis dengan dinding terluar dari *gandhok*, karena khusus untuk akses ke bangunan ini.

Meskipun sudah terdapat akses, nampaknya bangunan ini tidak dikembangkan dan cenderung tidak terawat dengan baik. Hal ini disebabkan pemilik yang telah mempunyai tempat tinggal sendiri dan posisi bangunan yang tidak menguntungkan.

**Rumah di Jl. Siliran Lor No. 15, Jeron Beteng, Kraton**

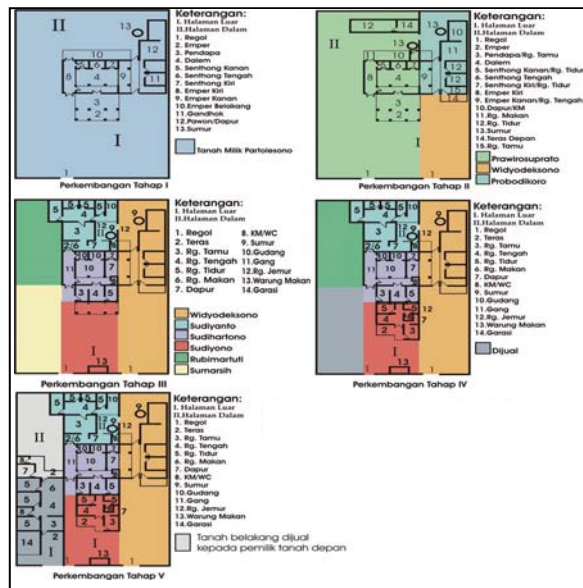
A. Rumah Keluarga Pak Sudyanto  
 Rumah Pak Sudyanto terletak di pekarangan belakang. Sebelumnya sudah bangunan di bagian belakang sebagai tempat gudang dan dapur. Bangunan baru didirikan setelah Pak Sudyanto setelah mendapatkan hak kepemilikan, yaitu di bagian belakang berhimpitan dengan bagian *ndalem*. Sebagai bangunan baru, maka sistem ruang yang dikembangkan hanya berdasarkan pada aspek kebutuhan ruang dan fungsi semata.

B. Rumah Keluarga Pak Sudihartono  
 Ditinjau dari pembagian kepemilikan, Pak Sudihartono menempati posisi yang cukup strategis, karena ruang yang digunakan adalah *dalem* dan *pendhopo* yang telah ada struktur bangunannya, apabila dibandingkan dengan bagian lainnya. Namun dengan pembagian hak kepemilikan yang tidak memperlihatkan hubungan antara satu dengan hunian lainnya mengakibatkan kendala dalam mengembangkan rumahnya untuk menjadi hunian yang memenuhi berbagai kegiatannya. Kendala yang ditemui dari hasil wawancara adalah:

Lavatory dan dapur terpaksa dibuat di dalam *ndalem* yang semestinya mempunyai nilai yang penting ditinjau dari segi historis dan kosmologi, karena dalam pembagian hak kepemilikan Pak Sudihartono tidak mendapatkan ruang terbuka untuk mengembangkan tata letak ruangnya.

C. Rumah Pak Sudyono  
 Rumah tersebut merupakan rumah baru yang didirikan di depan rumah pak Sudihartono. Rumah ini terletak berhimpitan di depan *pendhopo*. Dengan kedudukan rumah paling depan, maka akses ke rumah paling mudah dan permasalahan yang timbul pada rumah ini dapat dikatakan paling sedikit.

Pak Sudyono mendapatkan bagian emperan dari *pendhopo* dan lahan kosong di bagian depan *pendhopo*. Untuk memenuhi kebutuhan ruang, maka pemilik hak kepemilikan mendirikan bangunan baru di depan *pendhopo*. Kedudukan bangunan baru tersebut menempel pada bangunan tradisional, menghadap ke jalan umum. Dengan berdirinya bangunan baru, maka timbul permasalahan tentang keberadaan bangunan tradisional tersebut terhadap tuntutan kebutuhan ruang dan bangunan.



**Gambar 3.** Pola Perkembangan Spasial pada Rumah di Jl. Siliran Lor No. 15

**5. SISTEM BANGUNAN**

A. Orientasi dan Bentuk Massa Bangunan  
 Orientasi bangunan merupakan salah satu metode untuk mengembangkan keterkaitan dalam pekarangan. Dalam penerapannya orientasi bangunan tidak bersifat naif yang hanya mendasarkan pada nilai dan bentuk tradisional semata. Orientasi bangunan untuk massa bangunan baru didasarkan atas 2 pertimbangan, yaitu nilai-nilai tradisional dan kekinian yang dalam prakteknya sering kali bertentangan. Nilai tradisional mengandung muatan spiritual, sedangkan nilai kekinian menitikbertkan pada fungsi.

Kondisi kekinian menuntut persyaratan orientasi rumah ditinjau dari kebutuhan akses dan estetika tampak bangunan. Orientasi rumah secara fungsi dikaitkan dengan posisinya terhadap jalan umum. Biasanya rumah selalu menghadap ke jalan umum dengan suatu pemahaman bahwa fasade bangunan adalah wajah bangunan yang selalu menghadap ke daerah publik. Dalam hal ini, orientasi bangunan juga akan berpengaruh terhadap letak pintu masuk utama. Pintu utama ditempatkan menghadap ke arah jalan umum sebagai orientasi bangunan dan titik tangkap pengunjung.

Pertentangan dua kondisi ini menjadi dasar dalam menetapkan orientasi rumah. Orientasi rumah menjadi “ambigu” atau “ambivalen” antara tuntutan tradisional dengan tuntutan fungsional, yaitu: antara orientasi selatan-utara dengan orientasi ke jalur sirkulasi. Orientasi jalur sirkulasi di dalam pekarangan meliputi arah ke utara, selatan, timur dan barat tergantung tipe sirkulasi primernya.

Keambiguan orientasi dapat diterapkan ke dalam elemen arsitektur rumah, yakni: bentuk massa dan letak pintu masuk utama. Bentuk atap dan bentuk massa merepresentasikan nilai-nilai tradisional dengan orientasi ke arah utara atau selatan, sedangkan pintu masuk utama merupakan representasi dari kondisi kekinian yang menghadap ke jalur sirkulasi dalam pekarangan.

#### B. Bentuk Atap

Dasar-dasar dalam perancangan bentuk arsitektur pada lingkungan rumah tradisional ini meliputi 2 kondisi yang saling kontradiktif. Satu sisi menghendaki bentuk arsitektur tradisional masih dapat dikembangkan untuk kepentingan eksistensi kawasan sebagai kawasan kraton dan kawasan konservasi, sedangkan pada sisi lain didasarkan atas kondisi kebutuhan penghuni terhadap arsitektur yang lebih pribadi dan fungsional. Dari beberapa pengamatan di lapangan, konsep masyarakat terhadap bentuk arsitektur, khususnya masyarakat menengah ke bawah, menghendaki bentuk yang sederhana, fungsional dan mudah dalam perawatannya. Sedangkan masyarakat ekonomi menengah ke atas menghendaki bentuk arsitektur yang menekankan estetika selain fungsi. Estetika yang dimaksud terlihat pada elemen ornamen dan penggunaan bahan bangunan.

Kondisi yang kontradiktif ini mempengaruhi proses perancangan dengan saling tidak meniadakan entitas satu dengan lainnya, bahkan dikembangkan menjadi entitas baru yang merupakan percampuran ke dua entitas tersebut di atas tanpa adanya ruang yang memisahkan. Perwujudan bentuk arsitekturnya merupakan perwujudan yang tidak saling menghilangkan, sekaligus tanpa menghadirkan bentuk-bentuk dan ornamen-ornamen lama.

Metode percampuran (hibrid) bentuk bangunan yang diterapkan, antara lain : pertama, percampuran antara *dalem* sebagai pusat masa lalu dengan pertumbuhan rumah baru di sekeliling *dalem* yang menjadi pusat-pusat baru menurut kondisi masa kini. Percampuran ini memperlihatkan perubahan makna pusat yang diwujudkan pada eksistensi *dalem* yang telah termarginalisasi ke setiap wujud bangunan. *Dalem* saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya pusat dari bangunan-bangunan lainnya, namun telah menjadi salah satu pusat dari pusat-pusat yang terbentuk. Secara spasial, *dalem* tidak lagi menjadi pusat kehidupan penghuni di dalam pekarangan tersebut. Saat ini pekaranganlah yang menjadi pusat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan antar penghuni.

Ke dua, percampuran antara bentuk atap joglo (tradisional) yang menjadi pusat dari bentuk atap tradisional lainnya (*kampung*, *limasan*, dan *panggung pe*) dengan bentuk atap kontemporer yang tidak memusat lagi. Perancangan bentuk atap dapat mengacu kepada karakter atap-atap yang digunakan pada rumah tradisional dengan berbagai perubahan untuk memperlihatkan keterkaitan antara pusat lama dan pusat baru. Dari

pengamatan di lapangan telah diketahui bahwa penggunaan joglo dan limasan lebih ditekankan pada atap *dalem* demikian juga pendhopo, sedangkan gandhok selalu menggunakan atap kampung (pelana). Oleh karena itu, untuk letak rumah di samping kanan, belakang dan kiri *dalem* sebaiknya menggunakan dasar atap kampung yang dimodifikasi dengan bentuk atap yang bujur sangkar-limasan. Atap bujur sangkar ini menandakan adanya pusat baru yang terbentuk di dalam rumah tersebut, sedangkan atap pelana dapat menandakan jejak dari struktur tradisional. Sedangkan bentuk atap rumah yang terletak di depan *dalem* dapat dikembangkan dari bentuk limasan atau variannya. Hal ini disebabkan karena bentuk atap menyesuaikan dengan bentuk atap *pendhopo*.

#### C. Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan pada bangunan yang mengelilingi rumah tradisional didasarkan pada kondisi dan peraturan yang berlaku pada kawasan ini. Peraturan bangunan dikeluarkan oleh pihak pemda dan kraton sebagai salah satu alat kontrol pengendalian pembangunan di kawasan kraton melalui Ijin Mendirikan Bangunan. Ketinggian bangunan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi 2 lantai. Hal ini dilakukan untuk menghindari perubahan bentuk *sky line* yang menempatkan kraton sebagai pusatnya. Oleh karena itu, peruntukan guna tapak pada kawasan Jero Beteng hanya digunakan untuk fungsi permukiman saja, sedangkan peruntukan untuk fasilitas publik komersial, seperti hotel tidak diperbolehkan dibangun di kawasan ini. Peninggian bangunan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan pudarnya citra lingkungan yang telah terbentuk sebagai kawasan yang khas, karena ketinggian bangunan akan merubah bentuk *sky line* dan menutupi bangunan tradisional.

#### D. Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas lahannya. Tujuan dari aturan tentang kepadatan ini adalah untuk mendapatkan ruang terbuka tanpa atap bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka untuk penghawaan, pencahayaan, vegetasi serta penyerapan air ke dalam tanah. Prosentase kepadatan bangunan masing-masing kawasan berbeda sesuai dengan peruntukan lahannya. Kawasan perdagangan diperbolehkan prosentase kepadatan hingga 100%. Sedangkan untuk kawasan permukiman satu dengan lainnya juga berbeda tergantung kondisi geografisnya.

Kawasan Jero Beteng pada awalnya adalah sebuah permukiman dengan kepadatan bangunan yang rendah. Dalam perkembangan berikutnya, dengan bertambahnya jumlah penduduk, permukiman ini menjadi permukiman kota yang berkepadatan tinggi. Pada bagian kawasan tertentu, terutama pada kawasan kosong (kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman tradisional) telah menjadi perkampungan dengan kepadatan bangunan hingga 75%. Hal ini mengakibatkan penambahan kepadatan bangunan seiring dengan penambahan kebutuhan ruang. Tumbuhnya rumah baru yang mengelilingi rumah tradisional tidak dapat dihindari lagi.

Pemenuhan kebutuhan pekarangan ditinjau dari nilai tradisional, fungsi dan sosial sebagai ruang terbuka, dibutuhkan prosentase kepadatan bangunan yang tepat. Kebutuhan maksimal perlu mempertimbangkan kebutuhan perkembangan ruang dalam dan ruang luar. Dari studi terhadap kasus yang ada diperlihatkan bahwa kepadatan 40% masih dapat memberikan kontribusi besaran luas pekarangan dan ruang dalam pada skema pembagian hak kepemilikan 9 petak dan pada skema tipe tapak 3x. Pada kasus ini, rata-rata luas bangunan di atas 45 m<sup>2</sup>. Apabila dibandingkan dengan standar perumahan di Indonesia, maka besaran ini telah memenuhi persyaratan hunian optimal

untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Apabila luas bangunan di bawah 45 m<sup>2</sup> sebaiknya kaplingnya tidak untuk dibangun, melainkan sebagai tanah yang dijual kepada pemilik kapling lainnya.

Dari hasil luas kapling dan bangunan dalam tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah yang melalui pengendalian pembagian hak kepemilikan dapat dimanfaatkan sebagai hunian. Sebagian kecil kapling yang tidak dapat dibangun dimanfaatkan untuk dijual kepada pihak lain, namun dapat sebagai hak kepemilikan. Pengendalian hak kepemilikan memberikan dampak terhadap pengendalian kepadatan bangunan mencapai kurang lebih 60% dari luas pekarangan. Luas ruang terbuka 40% memberi pengaruh terhadap sistem-sistem yang terdapat pada permukiman, seperti sistem utilitas, pencahayaan, penghawaan dan sanitasi dapat bekerja dengan baik.

## 6. MODEL PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN

### A. Pembagian Kepemilikan dalam Tapak

Dalam pembagian kepemilikan rumah tradisional yang mengakibatkan pembagian atas kapling-kapling baru maka pekarangan harus memiliki jalan utama yang dapat digunakan bersama sebagai jalur sirkulasi menuju ke rumah bagian belakang, meskipun jalan tersebut dimiliki oleh penghuni yang berada di bagian depan.

Jalan utama dan ruang terbuka di dalam pekarangan tidak boleh dibangun bangunan permanen tanpa persetujuan atau kesepakatan bersama penghuni lainnya.

#### 1. Jalan umum di luar pekarangan

Akses utama ke kawasan perumahan perlu dibuat menjadi lebih tertutup dengan penempatan pintu gerbang pada setiap ujung jalan. Ukuran lebar jalan dapat dikurangi dengan penanaman pepohonan di sepanjang jalan pada ke dua sisi. Parkir untuk kendaraan roda 4 dapat ditempatkan di sepanjang jalan akses utama.

#### 2. Jalan di dalam pekarangan

Jalur sirkulasi ditempatkan pada batas-batas kapling tanah yang telah terbagi. Akses ke masing-masing hunian dilakukan dengan membuat jalan sepanjang batas kapling menuju ke belakang. Posisi jalan disesuaikan dengan letak pintu gerbang, dan jalan diperuntukkan bagi kendaraan berkecepatan rendah dan tidak bising, yakni : manusia, sepeda, gerobak, motor. Lebar jalan tersebut berkisar antara 1,5 m - 2,5 m.

Jalan dengan lebar 2,5 m digunakan untuk jalur utama distribusi ke setiap rumah, sedangkan jalan dengan lebar 1,5 m digunakan untuk pencapaian ke pekarangan belakang masing-masing hunian. Jalan dengan lebar 1,5 m tidak boleh lebih panjang dari 15 m.

#### 3. Ruang Terbuka (*pelataran*)

*Pelataran* merupakan pelebaran jalan yang terdapat pada setiap persimpangan jalan di dalam pekarangan. Posisi *pelataran* berada di bagian samping rumah tradisional dengan ukuran minimal 16 m<sup>2</sup>. Fungsi *pelataran* sebagai tempat berbincang-bincang, tempat menjemur pakaian, tempat membuka usaha dan tempat penghentian gerobak makanan, sebagai parkir sementara kendaraan berkecepatan rendah milik penghuni dan sebagainya.

### B. Rumah tinggal tradisional

KDB pada rumah tradisional setelah di bagi hak kepemilikan diperbolehkan mencapai 100%. Elemen bangunan yang dapat dibongkar hanya emperan yang difungsikan sebagai jalur sirkulasi hunian. Seluruh elemen bentuk bangunan *pendhopo*, *pringgitan*, *dalem* dan *gandhok* tidak dapat dirubah secara fisik. Perubahan hanya dapat dilakukan

pada tata ruang dalam dan dinding bangunan. Perubahan tersebut untuk kebutuhan fungsi ruang, pencahayaan dan penghawaan dengan cara melakukan pembukaan pada dinding, penambahan dinding serta mengganti bahan bangunannya.

C. Rumah tinggal non-tradisional (hunian baru)

KDB untuk rumah non-tradisional setelah dibagi hak kepemilikan perlu dibatasi sebesar 60% dari luas tapak yang telah terbagi.

Sehubungan dengan keselarasan dengan lingkungan kraton, jumlah lantai bangunan baru tidak boleh melebihi dari 2 lantai. Orientasi pintu masuk utama mengarah ke jalan utama, sedangkan orientasi pintu masuk belakang dapat mengarah pada jalan utama ataupun jalan sekunder. Bagian samping dinding rumah yang menghadap ke jalan akses utama diberi batas dinding tebal setinggi 30 cm. Fungsi dinding tebal sebagai tempat duduk.

Orientasi pintu masuk utama (depan) masing-masing hunian menghadap ke *pelataran*, sedangkan pintu masuk samping dapat menghadap ke jalur sirkulasi utama atau sirkulasi sekunder sebagai kontrol terhadap kebersihan lingkungan. Sedangkan perletakkan dan ukuran pintu dan jendela rumah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan dan penghawaan dan tidak mengganggu jalur sirkulasi di dalam pekarangan. Untuk memberikan pencahayaan dan penghawaan pada ruang dalam dan ruang sirkulasi, maka lebar tritisan rumah maksimal 50 cm.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

1. Dakung, Sugiyarto, Drs., (1982), *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
2. Habraken, N.J., (1998), *The Structure of The Ordinary: Form and Control in the Built Environment*, Massachusetts: The MIT Press.
3. Ikaputra, (1995), *A Study on The Contemporary Utilization of the Javanese Urban Heritage and its Effect on Historicity : An Attempt to Introduce the Contextual Adaptability into the Preservation of Historic Environment of Yogyakarta*, Japan: The Course of Environment Engineering Graduate School of Engineering, Osaka University.
4. Lombard, Denys, (2000), *Nusa Jawa: Silang Budaya* (terjemahan oleh ), Jakarta: PT. Gramedia.
5. Mulder, Niels, (1983), *Jawa-Tahiland : Beberapa Perbandingan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
6. Rapoport, Amos, (1990), *History and Precedent in Environment Design*, New York: Plenum Press.
7. Ronald, Arya, Ir., (1990), *Ciri-Ciri Karya Budaya Di Balik Tabir Keagungan Rumah Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
8. Sairin, Sjafri, Prof. Dr., (2002), *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
9. Santosa, Reviando Budi, (2000), *Omah : Membaca Makna Rumah Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Bentang Budaya.
11. Shachi, Atree, dkk. (ed), (-), *Human Settlements Training Packages Planning Guidelines*, Centre for Minimum Cost Housing, Mc Gill University, Montreal, Canada and Vastu-Shilpa Foundation, Ahmedabad, India, Montreal: Mc.Gill University.
12. Soekiman, Djoko, (2000), *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Di Jawa (abad xviii – medio abad xx)*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Indonesia.



## RELASI RANCANGAN KOTA DAN ANARKI WARGA

**Edi Purwanto**

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur FT Universitas Diponegoro

Email: [Edipurw4nto@yahoo.com](mailto:Edipurw4nto@yahoo.com); [edipoer@yahoo.com](mailto:edipoer@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Recent days, there are occurrences caused by citizen's behavior called as anarchy in urban space, which is destructive, criminal, arrogant-judging, and other behaviors that ignore either the authority or other people around. It seems like there are no regulated law and ignorance against the authority, which causes anarchism becoming negative-label connotation that frightens other citizens.*

*Several anarchy incidents happened in big cities in Indonesia are demonstration effort causing chaos, crime done by teenagers like motorbike gang, inter-student groups dispute, and vandalism.*

*The question is upon what kind of relation do the citizen's anarchy phenomenon and the urban design have?*

*The characteristic of anarchy occurs from the depressed feeling of the citizen. The feeling is worsened when they live in the urban environment whereas the urban design does not accommodate the people's desire to express their depressed feeling. As the consequence, in the time of the opportunity to express the feeling appears, the anarchy action also appears as the form of mass celebration against the misery experienced years.*

*The paper discusses issues upon the relation between urban design and phenomenon of the citizen's anarchy occurrence that happens recently, especially in Indonesian big cities.*

**Key words:** *relation, urban design, citizen's anarchy*

### 1. PENDAHULUAN

Fenomena desain atau rancangan kota yang tidak melibatkan aspirasi warga banyak dijumpai di negara-negara berkembang. Akibatnya keinginan warga tidak terakomodasi dalam wadah kota tersebut untuk menjalankan kehidupan keseharian dengan baik. Akibatnya muncul stres dan rasa frustrasi yang mendalam, dan apabila perasaan tersebut dibiarkan bukan tidak mungkin akan melahirkan sifat maupun sikap warga yang negatif seperti misalnya agresivitas dan anarkisme.

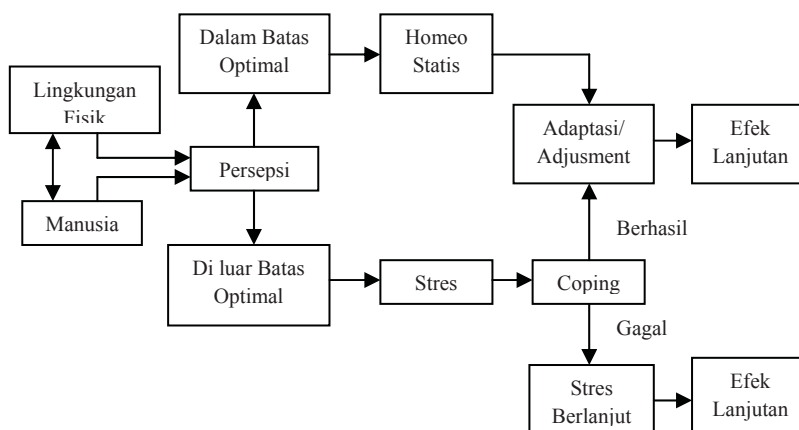
Selama ini paradigma perencanaan yang terlalu teknokratik dan deterministik ini sebenarnya telah dikritik habis-habisan oleh Jane Jacobs, melalui beberapa bukunya, terutama buku yang terbit lebih dari tiga dasawarsa lalu yakni *The Death and Life of American Cities* (1962). Dalam buku ini Jacobs menunjukkan betapa proses-proses perencanaan dan perancangan kota yang terlalu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis matematis cenderung menghasilkan suatu lingkungan kehidupan yang kurang manusiawi kering, dan tidak beridentitas. Ia menawarkan pendekatan perencanaan dan perancangan kota yang lebih "humanistis" yang memberikan perhatian lebih pada aspek modal sosial yang sudah tersedia. Jacobs menggunakan istilah itu ketika dia menjelaskan bahwa jaringan sosial yang sangat padat yang terdapat di permukiman urban yang lebih tua dan yang penggunaan lahannya beragam merupakan sebetulnya modal sosial yang mendorong keamanan umum. Permukiman seperti North End di Boston, pada bagian pertama abad ke-20 dihuni oleh banyak imigran Italia dan keturunannya. Bagi orang luar, tempat itu kumuh dan kacau balau. Namun, meski komunitas itu relatif miskin jika dibandingkan dengan warga lainnya di wilayah Boston, permukiman tersebut memiliki banyak cadangan modal sosial yang melekat pada hubungan antar keluarga yang terjalin di setiap blok. Jacobs mengemukakan bahwa pengendalian kejahatan di situ terutama diserahkan kepada orang dewasa – secara harfiah berarti sejumlah orang dewasa turun ke jalan untuk mengawasi para remaja yang mungkin berbuat onar dan orang luar yang

mungkin menyesatkan mereka. Di lingkungan yang padat seperti itu, orang lalu-lalang di jalan setiap waktu, bekerja, berbelanja, makan, dan memenuhi berbagai keperluan lainnya. Para pemilik kedai, khususnya berkepentingan dengan apa yang terjadi di luar kedai, karena kejahatan bisa merugikan usaha. Peruntukan lahan di bagian kota itu yang bersifat campuran – sebagian dijadikan tempat tinggal, sebagian lagi dijadikan tempat usaha, dengan beberapa industri kecil – mengharuskan peningkatan jumlah "mata di jalan" setiap saat baik siang maupun malam. Pada tahun-tahun selanjutnya, banyak lingkungan kota di sekitar Boston dirobek untuk melancarkan proyek perumahan. Sering kali hal itu dilakukan atas nama pembangunan kota yang sangat modern untuk mewujudkan lingkungan yang serba teratur demi keindahan semata. Akibatnya muncul masalah sosial, diantara yang serius adalah peningkatan angka kriminal, kejahatan ada dimana-mana dan tumbuh dengan subur.

Makalah ini mencoba membahas hubungan antara desain (rancangan) kota tempat warga bermukim dengan sifat dan sikap warga yang diciptakannya berupa agresivitas dan anarkisme. Dalam studi arsitektur, lingkungan, dan perilaku disebut hubungan timbal balik manusia – lingkungan. Hanya ada dua kemungkinan dari hubungan tersebut, yaitu lingkungan mempengaruhi perilaku manusia atau sebaliknya perilaku manusia mempengaruhi lingkungan, namun kecenderungan yang terjadi adalah pada kemungkinan pertama.

## 2. ANARKISME: KEGAGALAN DALAM PROSES ADAPTASI LINGKUNGAN (TELAH TEORI)

Terbangunnya keberhasilan dan atau kegagalan adaptasi terhadap lingkungan tidak lepas dari pemahaman interaksi manusia dengan lingkungannya. Perilaku manusia merupakan pusat perhatian dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Manusia menginderakan objek di lingkungannya, hasil penginderaan diproses sehingga timbul makna tentang objek tersebut yang kemudian disebut dengan persepsi (Sarwono, 1992). Persepsi merupakan proses untuk memperoleh informasi tentang lingkungan seseorang (Lang, 1987). Persepsi bisa berubah-ubah karena adanya proses fisiologik. Dalam hal interaksi manusia dengan lingkungannya, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh keselarasan dengan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kemampuan kognitif untuk mengadakan reaksi-reaksi tertentu terhadap lingkungan yang memuat hal-hal tertentu yang menarik minatnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Proses hubungan dengan lingkungan yang terjadi sejak manusia berinteraksi melalui penginderaan sampai dengan terjadinya reaksi, digambarkan dalam skema persepsi oleh Bell (dalam Sarwono, 1992) sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Persepsi  
Sumber: Sarwono, 1992

Hasil interaksi manusia dengan objek menghasilkan persepsi manusia tentang objek tersebut. Jika persepsi berada dalam batas optimal, maka manusia dikatakan dalam keadaan homeo statis, yaitu keadaan yang serba seimbang dan biasanya selalu ingin dipertahankan oleh setiap manusia karena menimbulkan perasaan yang menyenangkan. Sebaliknya, jika objek dipersepsikan sebagai di luar batas optimal, maka manusia akan mengalami stres, terjadi peningkatan energi, sehingga harus dilakukan *coping* untuk menyesuaikan lingkungan pada kondisi dirinya. Penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi, sedangkan penyesuaian lingkungan terhadap manusia disebut *adjustment*. Dalam hal interaksi manusia dengan lingkungannya, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh keselarasan dengan lingkungannya.

Tentang adaptasi, Hardesty (1977) mengemukakan bahwa: "*Adaptation is the process through which beneficial relationships are established and maintained between an organism and its environment*". Sementara itu para ahli ekologi budaya (*cultural ecologists*) mendefinisikan bahwa adaptasi adalah suatu strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk merespon terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan sosial (Alland 1975, Harris 1968, Moran 1982).

Ketika manusia dihadapkan pada situasi padat, yang dapat dipersepsikan sebagai situasi yang mengancam eksistensinya, manusia akan melakukan adaptasi. Hal ini berarti bahwa ada hubungan interaksionis antara lingkungan dan manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi manusia, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan (Holahan, 1982). Oleh karena bersifat saling mempengaruhi maka terdapat proses adaptasi dari individu dalam menanggapi tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan. Dalam batas tertentu, manusia mempunyai kelenturan yang memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini mempunyai nilai untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam proses adaptasi, diharapkan manusia akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan menjadi sebuah kekhawatiran yang besar karena akan memicu stres. Hal inilah yang patut diwaspadai dalam kehidupan kota, karena hal tersebut sudah menjadi ranah kajian arsitektur, lingkungan dan perilaku.

### **3. DESAIN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MENJADI SALAH SATU PEMICU**

Sekarang ini di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta sudah banyak sekali permukiman-permukiman kumuh, penduduk di sana biasanya berasal dari kalangan ekonomi bawah. Penduduk di permukiman kumuh biasanya mempunyai mata pencaharian seperti pemulung, pengamen, pedagang asongan dan lain-lain. Penduduk di permukiman kumuh lama-kelamaan semakin bertambah setiap tahunnya, itu semua disebabkan karena angka urbanisasi yang semakin meningkat dan makin banyak orang-orang yang kesulitan ekonomi yang akhirnya pindah ke permukiman tersebut. Kepadatan di permukiman kumuh sekarang ini sudah menyebabkan kesesakan di daerah itu, karena terus bertambahnya penduduk yang tinggal disana dan rumah-rumah yang dibangun dengan tidak terencana dan tidak beraturan sehingga permukiman kumuh terlihat sangat sesak. Selain penduduk kota Jakarta asli, penduduk di permukiman kumuh juga banyak yang berasal dari luar kota Jakarta, seperti pedesaan dan perkampungan. Banyak orang-orang yang berurbanisasi dari luar kota ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah di kota Jakarta atau untuk sekadar membangun rumah, maka dari itu mereka mencari tempat tinggal yang murah, dan mereka membangun rumah di permukiman kumuh dengan dana seadanya. Dengan banyaknya orang yang bertransmigrasi dari luar Jakarta dan memilih tinggal di permukiman kumuh menyebabkan permukiman kumuh menjadi bertambah padat penduduknya dan terlihat sangat sesak. Jadi permukiman kumuh di kota Jakarta merupakan salah satu contoh problem kepadatan dan kesesakan. Dengan terjadinya kesesakan dan kepadatan justru menciptakan masalah sosial budaya yang besar terutama berkaitan dengan hubungan antar warga. Kepadatan dan kesesakan melahirkan

stres yang bermuara pada rasa frustrasi. Apabila rasa frustrasi ini tidak tersalurkan maka bagi individu yang sudah mempunyai sifat dasar "keras" akan melahirkan sikap beringas (agresif) yang kemudian berujung pada anarkis.



**Gambar 2.** Lingkungan Permukiman Kumuh dapat Memicu Stress bagi Penghuninya  
Sumber: Ridho, 2009



**Gambar 3.** Lingkungan Permukiman di Rumah Susun yang Padat dapat Memicu Stress bagi Penghuninya  
Sumber: Ridho, 2009

Kecenderungan warga kota besar (seperti Jakarta) yang semakin agresif, maka tidak ada jalan lain, kecuali mengurangi kepadatan penduduk. Kebijakan apapun yang mengakibatkan urbanisasi menjadi tidak terkendali dan tidak dapat dipertahankan. Menjadikan pendatang sebagai objek ekonomi tanpa memikirkan kesehatan mental warganya hanya akan membuktikan terjadinya chaos dalam kehidupan kota. Hubungan antara kepadatan dan perilaku agresif dapat dengan mudah kita lihat dari perseteruan abadi antar warga Jakarta yang tinggal di kawasan padat penduduk, misalnya antara warga Manggarai dengan warga Tambak, warga Berland dengan Palmeriam, warga Galur dengan Tanah Tinggi dan sebagainya (Halim, 2008). Perseteruan di antara mereka sudah terjadi sejak lama, dan telah memakan banyak korban, dan dipicu oleh masalah kurangnya ruang gerak sampai kepada perebutan lahan yang bernilai ekonomis. Namun apapun pemicunya pasti terkait dengan isu ruang dan biasanya perang tersebut terjadi pada situasi yang padat, bahkan "perang" akan semakin besar dan super agresif jika massa dari kedua belah pihak yang terlibat semakin banyak. Tidak jarang terjadi pembunuhan dan saling membakar tempat hunian. Namun fenomena menarik yang dapat dilihat adalah ketika mereka berperang, biasanya mereka akan keluar dari kepadatan di tempat tinggalnya dan mencari ruang yang lebih leluasa untuk

berperang, misalnya warga Berland dan warga Palmeriam yang menjadikan jalan Matraman sebagai medan perang, jalan LetJen Suprpto untuk warga Tanah Tinggi dan Galur, jalan Proklamasi untuk warga Tambak dan sebagainya (Halim, 2008).



**Gambar 4.** Peristiwa Laten: Tawuran antar Warga di kota Jakarta  
Sumber: poskota.com

Berdasarkan teori umum dalam psikologi sosial, agresivitas adalah bentuk dari rasa frustrasi individu, yaitu kondisi kejiwaan yang muncul ketika seseorang merintangi tujuan individu tersebut. Agresivitas bisa muncul karena ada provokasi (Berkowitz dalam Halim, 2008). Agresivitas bisa muncul dalam bentuk verbal maupun fisik. Dalam tingkat yang paling melukai adalah penyerangan fisik yang dapat menimbulkan kematian atau merusak/membakar properti orang lain. Saat itulah sifat anarkis akan muncul dengan sendirinya.

Sifat anarkis tercipta bisa saja karena warga merasa tertekan, perasaan tertekan diperparah ketika mereka tinggal dalam lingkungan kota tidak mampu mengakomodasikan keinginan warga untuk mengekspresikan atau menumpahkan rasa ketertekanan mereka. Akibatnya ketika ada kesempatan meluapkan emosinya untuk mengurangi rasa ketertekanan lingkungan perkotaan yang mereka alami bertahun-tahun, maka dengan sangat mudah tindakan anarkis muncul sebagai bentuk perayaan massal terhadap penderitaan yang selama ini mereka rasakan.

Membiarkan permukiman kumuh berkembang tanpa arah akan menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik yaitu dengan cara meningkatkan kualitas dan kapasitas lingkungan permukiman tersebut. Baik dari segi infrastruktur maupun dari segi komunitasnya sendiri. Karena itu perlu dilakukan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh. Namun celakanya implementasi penataan lingkungan permukiman kumuh dengan model membangun rumah susun tidak selamanya berhasil, minimal dilihat dari aspek masalah sosial budaya. Mengaca dari kasus pembangunan rumah susun (apartemen di luar negeri), di dapatkan gambaran bahwa penghuni mengalami proses adaptasi yang tidak mudah, bahkan tidak mungkin mengalami tekanan mental yang luar biasa karena terjadi "shock culture" dari hunian horisontal ke hunian vertikal.

Kecenderungan membangun keatas (bersusun), secara besar-besaran, menurut catatan sejarahnya diawali di Chicago, pada abad ke 19, yakni untuk mawadahi kegiatan perkantoran, lantas diikuti dengan munculnya hotel-hotel pencakar langit, baru kemudian menyusul rumah susun (Sasaki dalam Budihardjo, 2009). Selanjutnya diungkapkan bahwa dalam kenyataannya pembangunan rumah susun (*flat*) dimancanegara tersebut, banyak mengalami kegagalan-kegagalan, ditandai dengan adanya fenomena berikut ini:

- a. Rumah susun 12 lantai "Pruit Igoe di St Louis, karya arsitek "Minoru Yamasaki", yang sudah dihuni hanya beberapa tahun, kemudian dihancurkan sendiri oleh pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 15 Juli 1972, karena begitu banyaknya masalah-masalah

sosial yang ditimbulkannya, antara lain Vandalisme, meningkatnya frekuensi bunuh diri, mahal biaya pemeliharaan dan sebagainya.

- b. Rumah susun di Inggris, pernah juga terjadi pembongkaran rumah susun bertingkat banyak yaitu Rumah Susun "Ronan Point" pada tahun 1968, karena dianggap tidak layak (*unfit*) untuk kehidupan berkeluarga, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penghuni merasa terasing dan merana, beberapa ibu rumah tangga menderita ketegangan jiwa dan penyakit syaraf, anak-anak menjadi agresif, dan lain-lain. Kemudian menyusul aturan yang merekomendasikan hanya bujangan dan keluarga tanpa anak yang dapat tinggal di rumah susun bertingkat banyak.
- c. Rumah susun di Singapura; berdasarkan laporan "Stephen Yeh (Housing Asia's Million", IDRC, 1977) bahwa secara fisik dan kuantitatif *Public Housing Estate*-nya dinilai berhasil, tetapi dilihat dari kaca mata sosial-budaya dinilai gagal. Sebagai salah satu penyebabnya adalah karena faktor manusianya agak lepas dari pengamatan

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, Budiharjo (2009) menghimbau agar kita mesti cukup bijak untuk memanfaatkan pengalaman pahit dan kegagalan yang telah dialami negara lain, sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.



Gambar 5. Rumah Susun di Pruitt Igoe dihancurkan Karena Menciptakan Perilaku Negatif Warga Penghuninya

Sumber: wordpress.com

#### 4. SISTEM TRANSPORTASI YANG GAGAL: MUNCULNYA KEMACETAN

Problem sistem transportasi di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang sudah sampai pada tahap yang kronis.

Jika kita melihat kota-kota besar di Indonesia saat ini seperti Jakarta dan Surabaya, adalah terjadinya perkembangan kota yang padat dan semakin melebar secara horisontal tanpa batas yang jelas. Pelebaran ini mengakibatkan munculnya kota-kota pinggir yang menjadi penyangga akibat perkembangan kota Jakarta seperti kota Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang dan lain-lainnya. Banyak warga yang bekerja di kota Jakarta tetapi tinggalnya di kota-kota pinggir tersebut hal ini sudah dipastikan terjadi inefisiensi waktu, tenaga, dana, sumber-sumber energi dan lain-lain. Inefisiensi itu lebih diperparah lagi ketika perkembangan kota-kota besar itu belum diiringi dengan penyediaan transportasi massal yang representatif dan memadai. Bagi kota-kota besar di Indonesia, dalam hal ini penyediaan transportasi publik seperti busway, monorail dan berbagai jenis mode transportasi massal jelas sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemacetan di kota-kota besar akibat meningkatnya volume kendaraan karena bertambahnya pengguna mobil pribadi adalah sesuatu yang mesti segera diakhiri.

Macet tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu penyebab stres warga Jakarta. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan 159 warga Jakarta setiap harinya terdaftar sebagai pasien rumah sakit jiwa. Data lain menyebutkan sepanjang 2011, sekitar 19 juta warga Jakarta mengalami stres tingkat rendah hingga berat. Lonjakan tajam terjadi tahun 2011 hingga 2012. Kemacetan sepertinya sudah menjadi harga mati untuk warga Jakarta. Buruknya transportasi umum harus ditelan pahit-pahit oleh warga Jakarta.

Dalam sehari sekitar 1.300 kendaraan bermotor tumpah ruah di jalan raya Ibu Kota. Tidak heran jika tahun 2014, Jakarta diperkirakan mengalami macet total. Rata-rata warga Jakarta kehilangan tiga jam dalam sehari hanya untuk menghabiskan waktu di jalan (Metrotvnews.com, 20 Maret 2012).

Hidup di kota besar tak bisa lepas dari masalah kemacetan. Ternyata jalan yang macet bisa mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, salah satunya adalah *traffic stress syndrom* atau TSS (sindrom stres akibat macet).



Gambar 6. Kemacetan yang Parah di Jalan-Jalan Protokol Kota Jakarta  
Sumber: Metrotvnews.com

Saat menemukan kemacetan terkadang seseorang mengalami peningkatan detak jantung, telapak tangan mulai berkeringat hingga kram perut. Kondisi ini kemungkinan menandakan gejala dari TSS. Kemacetan yang terjadi tidak hanya menyebabkan suasana hati seseorang menjadi buruk, tapi juga bisa merusak kesehatan. Dalam studi diketahui seseorang yang mengalami TSS akan mulai muncul gejala stres dalam waktu 3-5 menit, sedangkan orang yang tidak TSS, gejala stres mulai akan muncul jika sudah mengalami kemacetan sekitar 13-14 menit. "Mengalami TSS akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku pengemudi seperti kehilangan konsentrasi, sulit untuk fokus dan mengemudi secara berbahaya atau berisiko.

Kemacetan lalu lintas seperti fenomena bom waktu bagi penderita TSS. Biasanya ia akan mempercepat kecepatannya saat ada kesempatan dan terkadang mengabaikan peraturan yang ada sehingga berisiko mengalami kecelakaan. Gejala yang dialami oleh seseorang dengan TSS termasuk:

1. Peningkatan detak jantung
2. Sakit kepala
3. Telapak tangan berkeringat
4. Mual
5. Pusing
6. Kram perut
7. Mudah tersinggung dan marah
8. Khawatir

Gejala ke-7 akan sangat berbahaya dan jika terakumulasi terus menerus setiap hari dapat memicu munculkan perilaku agresif dan bukan tidak mungkin bagi individu tertentu

yang temperamental akan memunculkan perilaku anarki sebagai cara untuk mengungkapkan ketertekanannya.



Gambar 7. Dampak Kemacetan bagi Warga: Stress  
Sumber: blogbintang.com

## 5. DESAIN KOTA YANG RAMAH DAN MENYEJAHTERAKAN WARGA SEBAGAI SOLUSI

Pendekatan perilaku menekankan pada keterkaitan yang dialektik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkannya atau menghuni ruang tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia atau masyarakat yang berbeda-beda di setiap tempat dalam memanfaatkan ruang. Ruang dalam pendekatan ini dilihat mempunyai arti dan nilai yang plural dan berbeda, tergantung tingkat apresiasi dan kognisi individu-individu yang menggunakan ruang tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasikan konsep dan wujud ruang yang berbeda pula (Rapoport dalam Haryadi dan Setiawan, 1995). Selanjutnya secara konseptual, pendekatan perilaku menekankan bahwa manusia merupakan makhluk berpikir yang mempunyai persepsi dan keputusan dalam interaksinya dengan lingkungan. Konsep ini dengan demikian meyakini bahwa interaksi manusia dan lingkungan tidak dapat diinterpretasikan secara sederhana dan mekanistik, melainkan kompleks dan cenderung dilihat sebagai sesuatu yang "probabilistik". Didalam interaksi yang kompleks ini, pendekatan perilaku memperkenalkan apa yang disebut sebagai proses kognitif (*cognitive process*) yakni proses mental ketika orang mendapatkan, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuannya untuk memberi "arti" dan "makna" terhadap ruang yang digunakannya (Bell, 2001).

Secara umum pendekatan perilaku mulai mendapatkan momentum yang menarik dan penting ketika beberapa disiplin ilmu, terutama psikologi, geografi, sosial, perancangan (arsitektur dan kota) secara kolektif bekerjasama dan saling berbagi pengetahuan untuk menguak misteri dan kompleksitas hubungan antara lingkungan dan perilaku. Kerjasama kolektif ini terutama ditujukan untuk memahami bagaimana aspek-aspek psikologi, kultur dan sosiologi berperan memediasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dengan kata lain, studi arsitektur lingkungan dan perilaku kemudian berkembang menjadi bidang kajian yang interdisiplin, menggabungkan beberapa disiplin ilmu secara holistik dipakai untuk memahami interaksi manusia dengan lingkungannya. Pada saat ini juga disepakati bahwa orientasi kajian arsitektur lingkungan dan perilaku harus diarahkan pada upaya-upaya untuk memecahkan persoalan lingkungan yang semakin kompleks (Haryadi dan Setiawan, 1995).

Menurut Siregar (2000), tiap kota yang ada sekarang, sebagai lingkungan binaan, telah melalui perkembangan sejarahnya masing-masing, yang membuatnya menjadi suatu tempat (*place*) dan ruang (*space*). Perkembangan itulah yang menentukan karakter atau identitasnya, yang merefleksikan berjalannya kehidupan, yaitu budaya dan tradisi, dengan lingkungan fisik-spasial. Walaupun budaya-budaya di Indonesia mungkin tidak terlampau



tua, akarnya – terutama budaya Jawa – merujuk jauh ke belakang. Budaya-budaya Indonesia, dan perwujudannya pada lingkungan fisik, telah melalui proses perkembangan, mengalami perubahan dan penyesuaian karena kontak dengan – bahkan “invasi” dari – budaya dan kekuatan besar lain. Untuk konteks Indonesia, identitas itu agaknya bukan dalam pengertian sesuatu yang *mono-characteristic* seperti banyak dikemukakan bahkan diidamkan, yang bagaimana pun menyarankan suatu keadaan ideal yang tunggal, yang merefleksikan inkarnasi impian utopia. Identitas kota Indonesia yang kita yakini didasarkan pada realitas *urban* yang kontemporer, yang selalu mempertahankan kekhususan konteks waktu dan tempatnya, dan dengan demikian unik untuk setiap kota di Indonesia, dan di mana pun. Oleh karena itu tiap kota seyogyanya dipahami secara spesifik, bukan dengan generalisasi. Di sinilah kiranya arsitektur dapat mengambil peran pentingnya. Menurut Kostof (1991) mengemukakan pengertian yang sederhana: “*cities are places made up of buildings and people*”. Berdasarkan pengertian tersebut, tatanan fisik spasial lingkungan binaan (terutama kota) menjadi titik tolak masuknya pendekatan arsitektur ke dalam masalah perkotaan (*urban*) yang kompleks. Dari arah pendekatan itu dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, karena membicarakan lingkungan perkotaan berarti seyogyanya sekaligus membicarakan kegiatan yang dilakukan di tempat itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas bahwa ketika terjadi hubungan timbal balik antara warga dengan lingkungan kotanya maka yang terjadi adalah kemampuan warga untuk bisa mempengaruhi lingkungan kota agar terbangun seperti yang diharapkan (ramah dan manusiawi) atau lingkungan kota mempengaruhi perilaku warga secara positif dan konstruktif. Oleh karena itu desain-desain perkotaan harus dirancang seramah mungkin bagi warganya.

## 6. PENTINGNYA RUANG PUBLIK BAGI WARGA

Kota-kota di Indonesia sebagian besar tumbuh dan berkembang karena peran kampung-kampung kota. Karena perkembangan kota yang sedemikian pesat, mengakibatkan kampung-kampung kota menjadi sangat padat, karena dihuni tidak hanya oleh warga asli namun juga oleh warga pendatang yang membutuhkan tempat tinggal sementara agar tidak jauh dari tempat kerjanya. Pada awalnya kampung-kampung kota menyediakan ruang bersama (disebut juga sebagai ruang publik), berupa pekarangan atau lapangan kecil yang cukup untuk berinteraksi sosial bagi warga dan arena bermain bagi anak-anak.

Permasalahan yang jamak terjadi di kota-kota besar di Indonesia adalah minimnya ruang publik bagi warganya. Bagi penguasa dan pemegang modal, ruang publik dianggap sebagai ruang yang tidak menarik karena mempunyai nilai ekonomi yang rendah, akibatnya beberapa ruang publik yang pada awalnya tersedia kemudian menjadi hilang berubah bentuk menjadi ruang yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan beberapa ruang publik yang seharusnya dapat diakses oleh setiap warga saat kapanpun oleh penguasa diberi pembatasan. Kita masih ingat saat ruang publik di sekitar Monumen Nasional Jakarta diberi pagar yang tinggi karena ketakutan penguasa dan untuk membatasi ruang gerak warga yang ingin berdemonstrasi mendekati istana tempat presiden berkantor.

Desain kota dengan penyediaan ruang publik yang cukup bagi warganya merupakan sebuah keharusan. Privatisasi ruang publik dan dibatasinya secara ketat penggunaan ruang-ruang terbuka kota adalah masalah krusial lainnya yang harus diperhatikan oleh penentu kebijakan.

Tidak adanya pemahaman bahwa ruang terbuka kota sebenarnya menjadi hak publik untuk bersosialisasi, berinteraksi dan berdemokrasi, adalah pola pikir feodal dari pihak penguasa dalam memandang ruang kota sebagai aset kekuasaan. Bagi mereka, cara pandang ekonomi serta pengamanan fisik berlebih ruang publik di sekelilingnya ternyata lebih penting ketimbang upaya memberdayakan tempat-tempat terbuka umum sebagai tempat interaksi sosial dan kegiatan berdemokrasi warganya.



Gambar 8. Ruang Publik Kota yang Terintegrasi dengan Sistem Transportasi  
Sumber: Kompasiana.com

Ruang publik juga menjadi penting dalam hal membuat kota-kota modern semakin hidup dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada karena berkumpulnya warga dari berbagai latar belakang dan minat yang berbeda. Di ruang publiklah warga dapat bertemu dan saling berinteraksi dengan yang lainnya. Adalah penting bahwa tempat-tempat seperti itu dibuat secara terbuka dan dapat diakses oleh siapapun sehingga warga dapat memilih untuk bersosialisasi menurut waktu luang mereka masing-masing. Seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya secara penuh di ruang publik, dimana peran-peran sosial dan hirarki yang ada saat di rumah atau tempat kerja cenderung membatasi hal tersebut.

Dan yang lebih penting lagi, ketersediaan ruang publik yang cukup bagi warga kota dalam bersosialisasi, berinteraksi dan berdemokrasi akan membangun cara berfikir yang sehat dan positif yang pada akhirnya akan menciptakan pola perilaku warga yang mendasarkan pada norma, etika, empati, toleransi, yang akan berujung pada berkurangnya pola perilaku egois, agresif dan destruktif yang menjadi dasar terciptanya perilaku anarkis.

## 7. PENUTUP

Pada dasarnya kota dibentuk oleh sekumpulan bangunan arsitektur, bahwa karya arsitektur sebagai sebuah lingkungan fisik binaan dapat menjadikan media untuk membentuk perilaku yang baik bagi warga kota, namun juga menyadari bahwa arsitektur juga dapat menciptakan perilaku negatif bagi warga kotanya.

Sebuah kota yang baik seharusnya dibentuk oleh jaringan transportasi sebagai penghubung antar kegiatan warga yang baik dan terencana pula dengan upaya penghindaran pada potensi-potensi terjadi kemacetan dan polusi.

Oleh karena itu desain kota harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bagi warganya yang ramah dan manusiawi yang bertujuan untuk menghindari penciptaan perilaku-perilaku negatif bagi warga kota seperti perilaku agresif dan anarkis.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

1. Bell, P.A., 2001, *Environmental Psychology*, Harcourt Brace College Publisher, Forth Worth.
2. Budihardjo, E., 2009; *Sejumlah masalah Permukiman Kota*, (cetakan terbaru) Alumni Bandung.
3. Budihardjo, E., 2009, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, (cetakan terbaru) Gajahmada University Press, Yogyakarta.
4. Halim, DK, 2008, *Psikologi Lingkungan Perkotaan*, Bumi Aksara, Jakarta.

5. Haryadi & Setiawan B., 1995, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku : Suatu Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Direktorat Jendral DIKTI, Depdikbud.
6. Holahan, 1982, *Envorinmental Psychology*, NY: Random House.
7. Jacobs, J., 1969, *The Death and Life Great American City*, New York: Random House.
8. Kostof, S., 1991, *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History*, Thames and Hudson, London.
9. Rapoport, A., 1977, *Human Aspect of Urban Form*, Oxford: Pergamon Press.
10. Rapoport, A., 1982, *The Meaning of Built Environment*, Beverly Hills, California : Sage Publications.
11. Rapoport, A., 1986, *The Use and Design of Open Spaces in Urban Neighborhoods* dalam D.Frick (eds) *The Quality of Urban Life*, Berlin: Walter de Gruiter and Co.
12. Ridlo, M.A., 2009, *Penelitian Permukiman Kumuh Orang Miskin di Kota Semarang*, Hasil Survey Penelitian Program Doktor.
13. Sarwono, S.W., 1992, *Psikologi Lingkungan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

## **ADAPTIVE SPACE SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN HOMESTAY**

### **DI DESA WISATA**

**Studi Kasus Desa Wisata Gilangharjo Bantul Yogyakarta**

**Vincentia Reni Vita Surya<sup>1)</sup>**

Pusat Studi Kewirausahaan<sup>1)</sup>

Universitas Atma Jaya Yogyakarta<sup>1)</sup>

E-mail : [reni792003@yahoo.com](mailto:reni792003@yahoo.com), [renivs@staf.uajy.ac.id](mailto:renivs@staf.uajy.ac.id)<sup>1)</sup>

### **ABSTRAK**

Tinggal di rumah adalah bentuk pariwisata atau tinggal di rumah dapat didefinisikan sebagai publik atau penduduk suatu desa yang menyediakan ruang atau ruang untuk membiarkan kepada wisatawan. Dalam kaitannya dengan industri pariwisata, homestay bisa difungsikan menjadi 2 hal yaitu sebagai obyek atau daya tarik wisata dan sebagai sarana akomodasi wisata di suatu daerah. Desa Gilangharjo yang terletak di kabupaten Bantul Yogyakarta, adalah salah satu desa yang mengarahkan perkembangan desanya menjadi desa wisata. Berbagai potensi wisata telah di kembangkan, diantaranya adalah potensi alam, kerajinan rumah tangga serta kehidupan dan adat istiadatnya. Kondisi alamnya yang unik merupakan model desa pertanian tradisional yang sangat ideal. Pertanian yang mendominasi sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat memiliki ciri khas yang menarik yaitu pertanian organik, sehingga desa ini lebih banyak dikenal sebagai salah satu sentra hasil pertanian organik yang cukup terkenal di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu yang menarik adalah keunikan dari desa Gilang harjo adalah adat istiadat kesehariannya, terkait dengan tradisi dan ritual masyarakat desa tersebut. Hal ini belum banyak di kembangkan karena salah satu cara untuk menikmati wisata ini adalah dengan hidup bersama warga setempat. Hal ini tentu saja membutuhkan sarana atau homestay yang memadai.

Desa Gilang harjo sudah memiliki sebuah *homestay* yang bersifat permanen dengan kapasitas 2 kamar dilengkapi dengan pendopo dan fasilitas penunjang lainnya, namun seiring perkembangan wisata nya, kebutuhan ini dirasa kurang, sehingga diperlukan pengembangan di tempat lain. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan rumah – rumah penduduk setempat yang bersedia dijadikan *homestay*. Permasalahan yang timbul adalah keterbatasan ruang dan modal atau biaya untuk membangun. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat ruang – ruang adaptif yang dapat difungsikan sebagai kamar – kamar homestay yang bersifat temporer. Ruang – ruang adaptif tersebut adalah bagian dari ruang – ruang dalam rumah yang sudah ada, namun dapat dialihfungsikan sementara waktu. Solusi ini bersifat unik dan spesifik sesuai dengan kondisi yang dimiliki warga, sehingga tantangan untuk membuat sarana akomodasi sesuai dengan kebutuhan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

**Kata kunci:** *homestay*, adaptive space, desa wisata, pariwisata

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar belakang desa Gilangharjo**

Desa Gilangharjo, memiliki luas 726 ha. terdiri dari 15 Dusun dan 91 RT. Jumlah penduduk 16390 jiwa yang terbagi menjadi 4653 KK. (*sumber : survey pada tahun 2009*) Potensi Wisata Desa Gilangharjo ini sudah ada dan sudah mulai berkembang, namun selama ini yang terfokus lebih pada salah satu dusun yaitu dusun Kadekrowo. Di dusun Kadekrowo tersebut telah terdapat sanggar yang sudah dikunjungi oleh wisatawan asing yaitu Sanggar Giri Gino Guno yang juga dilengkapi dengan fasilitas *homestay* berkapasitas 2

(dua) kamar. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pendiri sanggar banyak turis asing terutama dari Perancis yang datang untuk mengunjungi desa ini. Selain turis dari Perancis, desa ini juga dikunjungi beberapa turis domestic. Sebagian besar dari turis domestik berasal dari bidang pendidikan yang berkunjung untuk mengadakan penelitian atau studi lapangan di desa ini.

Wilayah Desa Gilangharjo berupa tanah dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang cukup baik, sehingga berpotensi untuk lahan pertanian terutama tanaman padi dan palawija. Mata pencaharian masyarakat Desa Gilangharjo adalah petani, yaitu sebesar 1022 jiwa atau 6,34 %, sedangkan sekitar 1866 jiwa atau 11,5% bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan/tukang/bengkel, sisanya berprofesi sebagai pedagang pegawai negeri dan lain – lain. Kesenian tradisi juga masih dipertahankan oleh masyarakat Gilangharjo. Di desa ini masih hidup kelompok-kelompok kesenian tradisi semacam Jatilan, Reog dan ketoprak, Gejog lesung, Tek-tek, Sholawatan, Mocopatan. Di Desa Gilangharjo juga terdapat tempat yang masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat, hal ini masyarakat mempercayai bahwa tempat- tempat ini memiliki nilai sejarah atau budaya seperti petilasan "Selo Gilang", "Sendang Plempoh" dan makam Tambalan yang merupakan tempat pemakaman Bupati Bantul pertama.



**Gambar 1.** Situs sejarah petilasan Selo Gilang. (sumber : RPJMDES Gilangharjo, 2010)

Potensi ekonomi di Desa Gilangharjo cukup banyak selain lahan pertanian yang masih luas, juga banyak industri rumah tangga atau sentra kerajinan baik kerajinan kayu, bambu, anyaman, makanan olahan, perdagangan, peternakan , perikanan dan lainnya.



**Gambar 2.** Aneka kerajinan khas yang terdapat di desa Gilangharjo  
(Sumber : RPJMDES Gilangharjo, 2010)

### **Persyaratan *homestay***

Tinggal di rumah adalah bentuk pariwisata. Tinggal di rumah dapat didefinisikan sebagai publik atau penduduk suatu desa yang menyediakan ruang atau ruang untuk membiarkan kepada wisatawan. Dalam kaitannya dengan industri pariwisata, *homestay* bisa difungsikan

menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai obyek atau daya tarik wisata dan sebagai sarana akomodasi wisata di suatu daerah. Dalam operasionalnya, aspek kesehatan dan kebersihan, menjadi syarat utama.

Persyaratan *homestay* secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bersih, meliputi kebersihan lingkungan rumah, kamar hingga fasilitas MCK.
2. Sehat, memiliki standar rumah dan lingkungan yang sehat, misalnya jauh dari kandang ternak, tidak lembab dan lain sebagainya.
3. Aman, *homestay* menjamin keamanan dari tamu yang menginap.
4. Nyaman, memiliki standar kenyamanan seperti sirkulasi udara dan pencahayaan yang pas dan perabot yang memadai. (sumber : artikel KR online, 12/08/2010)

### **Adaptive space sebagai konsep pengembangan homestay**

*Adaptive space* dapat diterjemahkan sebagai ruang yang mampu beradaptasi, konsep ini meliputi dimensi atau besaran ruang, fungsi ruang hingga karakter ruang. Penerapan konsep ini adalah salah satu cara yang banyak dipergunakan oleh perancang terutama untuk mensiasati keterbatasan lahan terutama pada hunian modern sehingga lambat laun menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

*DK Ching dalam Interior Design* memberikan gambaran bagaimana memodifikasi ruang yang sudah ada menjadi ruang baru diantaranya dengan menata ulang baik perabot maupun elemen arsitektural dan menambahkan ruang. Modifikasi yang dapat dilakukan dalam konteks *adaptive space* adalah dengan menata ulang atau dengan kata lain tidak menambah besaran ruang yang telah terbentuk.

Tatanan baru tersebut dibagi menjadi :

1. Tatanan elemen arsitektural berupa pembatas ruang
2. Tatanan perabot berupa penggunaan perabot yang mudah dipindahkan (*movable furniture*) dan perabot multi fungsi

Konsep ini adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan fasilitas *homestay* di desa wisata, hal ini dengan pertimbangan dari segi ekonomis dan kemudahan bagi masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi yang dipergunakan dalam penerapan konsep *adaptive space* sebagai alternatif pengembangan *homestay* adalah dengan pengamatan dan katagorisasi kasus rumah yang telah memenuhi standar utama untuk *homestay* yaitu bersih, sehat dan aman. Dari contoh kasus yang telah didapat dilakukan analisis pembahasan dari tiap katagori untuk di rancang ulang dengan mempergunakan potensi yang dimiliki oleh setiap rumah. Rancangan dibatasi dengan syarat meminimalkan dana dan kemudahan pelaksanaan bagi pemilik rumah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan konsep *adaptive space* pada fasilitas kamar *homestay***

Konsep *adaptive space* yang diterapkan sebagai alternatif pengembangan *homestay* dengan penekanan pada fasilitas kamar di desa wisata ini mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- Fleksibilitas ruang, yaitu menggunakan ruang – ruang yang sudah ada atau yang menjadi bagian dari rumah warga, misalnya ruang tidur, ruang kerja, ruang keluarga dan lain – lain.

- Fleksibilitas pengguna, dengan mempertimbangkan variasi hubungan pengguna yang akan memanfaatkan ruangan tersebut misalnya pemilik rumah dengan tamu yang akan menginap.
- Fleksibilitas aktivitas, dengan melihat variasi aktivitas yang dapat dilakukan dalam ruangan tersebut.

Kondisi ini disesuaikan dengan persyaratan dasar *homestay* yaitu :

- Memenuhi standar dasar rumah sehat
- Memiliki akses yang dapat dijangkau
- Aman

### Tipologi Rumah Layak *Homestay*

#### a. Rumah dengan ruang sisa

Rumah dengan ruang sisa adalah rumah dengan ruang yang tidak dipergunakan lagi atau frekuensi penggunaannya jarang. Pada kasus yang kami jumpai di desa Gilangharjo adalah ruang keluarga milik Ibu Hadi yang penggunaan semula sebagai ruang serba guna. Di dalam ruang sudah terdapat satu set sofa tamu dan kasur, ruang ini juga memiliki jendela sehingga mendapatkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.

Tabel 1: Identifikasi Tipologi rumah dengan ruang sisa

Jenis	Deskripsi	Potensi	Permasalahan
Ruang keluarga serbaguna milik Ibu Hadi 	Sketsa denah rumah  Sketsa layout ruangan 	 sirkulasi udara dan pencahayaan alami  sofa dan kasur	-perabot tidak sesuai kebutuhan ruang untuk kamar <i>homestay</i> - penataan yang belum teratur

Sumber : survey penulis, 2011

#### b. Rumah dengan ruangan sisa

Rumah dengan ruangan sisa adalah rumah yang memiliki ruang tidur yang sudah tidak dihuni lagi atau jarang ditempati oleh penghuni rumah tersebut. Pada kasus yang kami jumpai, kamar ini sudah tidak ditempati lagi oleh anak dari pemilik rumah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas *homestay* di desa Gilangharjo. Perabot yang sudah ada adalah perabot kamar tidur, sehingga yang dilakukan adalah penataan kembali perabot agar lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kenyamanan dari penghuni kamar. Ruang ini pun memiliki jendela sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan alami dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2: Identifikasi Tipologi rumah dengan ruangan sisa

Jenis	Deskripsi	Potensi	Permasalahan
Ruang tidur salah satu anggota keluarga milik Ibu Sarwi	Sketsa denah rumah  Sketsa denah ruangan 	 - Jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami - Perabot standar perlengkapan tidur	- penataan perabot belum efektif dan efisien

Sumber : survey penulis, 2011

### Pembahasan kasus pada tiap tipologi rumah layak *homestay*



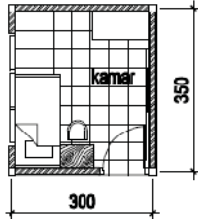

Pembahasan yang dilakukan adalah dengan membuat alternatif desain sebagai solusi permasalahan dari masing – masing tipologi yang ada.

#### a. Rumah dengan ruangan sisa

Pembahasan alternatif desain sebagai solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan modifikasi ruangan. Langkah yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan perabot yang dimiliki pemilik rumah untuk mengisi ruang tersebut sehingga dapat menjadi kamar layak huni. Batas fisik ruangan sudah jelas berupa tembok dengan pintu masuk permanen. Alternatif lain yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan perabot multi fungsi jika ingin menghemat waktu dalam memodifikasi ruang keluarga menjadi kamar tidur atau sebaliknya, namun solusi ini membutuhkan biaya investasi perabot, sehingga hanya menjadi tambahan saran. Penataan fisik dengan mengganti perabot ruang keluarga menjadi perabot kamar tidur.



**Tabel 3:** Pembahasan dan alternatif desain kamar *homestay* pada rumah dengan ruangan sisa

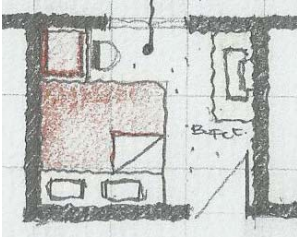
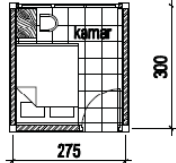

Jenis	Pembahasan	Sebelum	Sesudah
Ruang keluarga serbaguna milik Ibu Hadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan pembatas ruang masif.</li> <li>2. pemanfaatan perabot yang tersedia</li> <li>3. pemanfaatan perabot multifungsi</li> <li>4. penataan kembali</li> </ol>	  <p>Perabot tidak sesuai kebutuhan</p>	 <p>layout kamar 1</p>  <p>Perabot disesuaikan dengan kebutuhan</p>

Sumber : pembahasan penulis, 2011

b. Rumah dengan ruang sisa

Pembahasan alternatif desain sebagai salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menata kembali perabot yang sudah tersedia sehingga layak dan nyaman untuk dijadikan kamar *homestay*. Ruang tidur ini sudah memenuhi kebutuhan standar bagi sebuah kamar *homestay*, permasalahan yang dijumpai adalah tata letak perabot yang masih belum tertata dengan baik sehingga terkesan pengap dan sumpek. Upaya yang dilakukan adalah menyingkirkan perabot yang kurang dibutuhkan seperti meja komputer dan menata ulang perabot standar yang menjadi kebutuhan bagi kamar *homestay* yaitu tempat tidur dan meja.

**Tabel 4:** Pembahasan dan alternatif desain kamar *homestay* pada rumah dengan ruang sisa

Jenis	Pembahasan	Sebelum	Sesudah
Ruang tidur salah satu anggota keluarga milik Ibu Sarwi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali ruangan menjadi kamar <i>homestay</i></li> <li>2. Pemanfaatan perabot yang sudah ada.</li> </ol>		 <p>layout kamar 2</p>  <p>Penataan ulang perabot standar</p>

Sumber : pembahasan penulis, 2011

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah konsep *adaptive space* yang dapat dipergunakan sebagai model untuk pengembangan homestay di desa wisata. Tema ini masih terus dikembangkan untuk menemukan tipologi lain dari ruang – ruang yang sudah tersedia di rumah penduduk. Data dan pengamatan yang sudah dilakukan terbatas oleh waktu sehingga dimasa yang akan datang akan dilanjutkan dan dilengkapi dengan kasus – kasus yang lain sehingga dapat memperkaya model *adaptive space* ini untuk dapat diterapkan di desa wisata yang lain.

Arahan desain yang dapat dirumuskan antara lain :

a. Alternatif desain ruangan sisa sebagai pengembangan *homestay*

Pengembangan desain berupa:

- pemanfaatan batas ruang baik batas masif atau fleksibel misalnya sketsel, tirai dan lain – lain
- pemanfaatan dan penataan kembali perabot kebutuhan kamar *homestay*
- penggunaan perabot multifungsi sebagai pilihan untuk menghemat tempat

b. Alternatif desain ruang sisa sebagai pengembangan *homestay*

Pengembangan desain berupa:

- Pemanfaatan dan penataan kembali perabot kebutuhan kamar *homestay*

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

1. F. DK Ching, 1943, *Interior Desain Illustrated*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
2. Pemerintah Desa Gilangharjo, 2010, *RPJM Desa Gilangharjo 2010 – 2015*, Propinsi DIY.
3. Kedaulatan Rakyat Online, 2010, *Mengikuti "HOMESTAY FAMTRIP TOURISM MALAYSIA bagian 1 Konsep Terpadu Menjual Desa Wisata*, Yogyakarta.
4. Matanews.com, 2010, *Menggenjot Wisata Homestay untuk Devisa*,

## PENGELOLAAN BANGUNAN DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Ir. Yulita Titik S, M.T.  
Dr. Y Trihoni Nalesti Dewi, S.H.,M.Hum.

[yulita\\_ts@yahoo.co.id](mailto:yulita_ts@yahoo.co.id)  
[trihoniharianja@yahoo.com](mailto:trihoniharianja@yahoo.com)

### ABSTRACT

*A cultural heritage is a representation of human history. Understanding the cultural heritage as a relic of history can be considered as an attempt to understand the history that happened in it, which not only has a meaning related to the past, but also to understand the present and will give an overview future. Cultural heritage in Indonesia is largely managed by the Government, while community involvement is very limited. The Indonesian government is still using a "top-down" in managing cultural heritage. This approach contains dilemma both in the government and society, so that now needs to be a new approach by combining the two approaches: the policy approach and the community based participation approach.*

*This study aims to 1) evaluate positive law provisions applicable in the management of buildings and cultural heritage area, 2) identify the significance of heritage buildings to determine the type of treatment of heritage buildings so that building can be properly managed and sustainable 3) identifying and evaluation of participation of local communities to see the level of public awareness and find a model of community participation in the management of sustainable heritage buildings, 4) review the management of heritage buildings that had been done, both at national and local levels as well as to evaluate whether management has been through a proper stage.*

*The results of the study on the management of heritage buildings and areas in the Central old city of Semarang and some precedent studies done, are 1) Community-based management capable of raising public awareness of the importance of conservation of old buildings as a shaper of identity and community pride 2) the management of cultural heritage buildings entirely by the government, making the community less concerned, as a result of supervision and more stringent controls are needed, 3) There are 5 priority activities that need to be done in the central old city of Semarang: The rescue of building, environmental management; increasing the economic value of the area, preparation of guidelines and policies of regional and field implementation, community capacity building, 4) The importance of giving awards to owners of buildings such as reducing taxes for the building conservation efforts.*

*Key word: conservation, participation, management model*

### 1. PENDAHULUAN

Memahami warisan budaya sebagai peninggalan sejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya, tidak hanya mempunyai arti yang berkaitan dengan masa lalunya, tetapi juga untuk memahami masa sekarang dan memberi gambaran akan masa depan (*"understanding the present and representing the future"*). Pengelolaan warisan budaya yang tepat akan memberi manfaat bagi masyarakatnya, karena selain untuk kepentingan sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan, warisan budaya juga memberi manfaat ekonomi. Aspek penting lain yang tampaknya merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah warisan budaya adalah ketidaktersediaan akan standard dan petunjuk dalam melakukan konservasi. Ketiadaan standard dan petunjuk ini akan menyebabkan aksi konservasi terhadap warisan budaya semakin rumit lagi karena tanpa petunjuk atau referensi bagi para pelaku konservasi maupun Pemerintah.

Kawasan Kota Lama Semarang berada pada kawasan kota yang strategis, Selama ini pengelolaan bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang masih menemui

berbagai kendala yang salah satunya adalah belum tersedianya suatu panduan pengelolaan. Kondisi tersebut mempersulit tugas pengelolaan karena tidak ada standard yang dapat digunakan sebagai acuan (pedoman). Tersedianya sebuah model pengelolaan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam perspektif yang lebih luas, diharapkan juga akan memberikan atmosfer dan dorongan positif pada kesadaran akan pentingnya memelihara dan melestarikan bangunan cagar budaya.

Ada beberapa permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- Preseden model pengelolaan bangunan cagar budaya dari beberapa negara
- Disain model pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya di kawasan pusat kotalama Semarang

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam pengelolaan suatu bangunan cagar budaya, dibutuhkan suatu manajemen pengelolaan bangunan cagar budaya. Sebagaimana ilmu manajemen, manajemen pengelolaan bangunan cagar budaya bertujuan untuk keperluan pengelolaan sumberdaya (modal/input) melalui suatu tahapan aktivitas tertentu (proses) serta melalui cara yang mangkus dan sangkil (effective and efficient) untuk mendapatkan hasil yang optimum (output).<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1992 menyebutkan bahwa perlindungan dan pemeliharaan benda budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran. Perlindungan dilakukan untuk penyelamatan dan pengamanan untuk mencegah kerusakan karena factor alam dan atau akibat ulah manusia, beralihnya pemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak, berubahnya keaslian dan nilai sejarahnya.

Konservasi bangunan cagar budaya adalah bagian integral dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab masyarakat secara berkesinambungan. Penanganan spasial dan sosial-budaya-ekonomi di kawasan bersejarah dengan bertumpu pada pemberdayaan komunitas merupakan upaya pendekatan *bottom-up* guna membangkitkan kembali vitalitas komunitas untuk berkreasi di tengah masyarakat yang serba modern sekaligus untuk menciptakan kawasan bersejarah sebagai pusat kebudayaan dalam perspektif demokratis. Dengan demikian, diharapkan mampu menumbuhkan daya tahan budaya terhadap tekanan-tekanan modernisasi yang terjadi.

Dalam perkembangannya pengelolaan bangunan cagar budaya di Indonesia diatur oleh sejumlah ketentuan hukum, sehingga jika berbicara pengelolaan bangunan cagar budaya di suatu wilayah seperti halnya di kawasan Kota Lama Semarang, tidak akan terlepas dari kebijakan yang bersifat nasional maupun lokal. Karena Perda RTBL dibuat tahun 2003 maka Pemerintah Daerah Kota Semarang mendasarkan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Lama berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999. Dengan dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru yaitu UU nomor 32 Tahun 2004.

Perda RTBL dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan program penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama Semarang dan perlindungan kawasan Kota Lama Semarang dari berbagai kegiatan yang menyimpang rencana dan yang hendak menghilangkan sisa-sisa bangunan kuno yang bernilai sejarah, arsitektural, ilmu pengetahuan dan budaya.<sup>9</sup> Lebih jauh Perda bertujuan untuk mengembangkan kawasan

---

<sup>8</sup>Henry Cleere, 1984, "*Approaches to the archaeological heritage*"

<sup>9</sup> Pasal 3

Kota Lama sebagai kawasan historis yang hidup dan memungkinkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata modern.<sup>10</sup> Disamping itu, jika hendak melakukan pembahasan pengelolaan bangunan cagar budaya, maka tidak akan terlepas dari pembahasan masalah perencanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya pertama-tama yang harus dijadikan pedoman adalah Undang-Undang No 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya, dasar hukum lain yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan yang diantaranya berguna untuk perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya tersebut.<sup>11</sup> Langkah pengaturan ditingkat daerah inilah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Propinsi yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan strategi pengelolaan bangunan cagar budaya yang ada di wilayahnya.

Pendekatan partisipatif digunakan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat dan *stake holder* dalam proses pembangunan. Proses ini mencakup dari perencanaan awal, penyusunan konsep dan implementasi sampai pada pengelolaan. Dalam proses ini aspirasi masyarakat dan inisiatif menjadi penting. Dengan pendekatan ini, masyarakat ditumbuhkan rasa memiliki dari lingkungan di mana mereka tinggal.

Ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Penyadaran komunitas akan potensi dan kapasitas yang dimiliki, melalui inventarisasi modal sosial, memperkuatnya serta mobilisasi masyarakat dan sumberdaya
- b. Mensinergikan peran lintas pelaku (multi stakeholder) untuk keberlanjutan sistem mata penghidupan (*livelihood system*) komunitas yang dapat dilakukan dengan cara membangun sistem jejaring

Dua aspek penting dalam membangun jejaring adalah *relationship* dan *partnership*. *Relationship* mendasarkan pada: saling percaya (*mutual trust*), keterbukaan (*fairness*), kesetaraan (*equity*), penghormatan/ penghargaan satu sama lain (*respect*), akuntabilitas, berbagi (*sharing*) nilai dan aspirasi. *Partnership* mengacu pada hubungan antara sektor *public, community* dan privat (*market*).

Beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, yaitu: <sup>13</sup> a. Cakupan: semua pihak harus terwakili; b. Kesetaraan dan kemitraan (*equal partnership*); c. Transparansi; d. Kesetaraan wewenang (*sharing power / equal powership*); Kesetaraan tanggungjawab (*sharing responsibility*); e. Pemberdayaan (*empowerment* f. Kerjasama)

Ada empat tingkatan cara berpartisipasi, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 4

<sup>11</sup> Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470

<sup>12</sup> Soenarno, 2002, Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional, makalah disajikan pada Seminar Nasional – Kekuatan Komunitas sebagai Pilar Pembangunan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Jakarta 24 April 2002

<sup>13</sup> ---, Pendekatan Partisipatif, Seri Panduan Pelayanan yang bermutu, Bank Dunia.

<sup>14</sup> Malvicini, Cindy F dan Anne C Sweetser, Cara-Cara Partisipasi, makalah tentang kemiskinan dan pembangunan sosial, makalah no 6/ Juli 2003, Asian Development Bank, hal 5-6

**1. Partisipasi dengan berbagi informasi**

Bentuk partisipasi dengan berbagi informasi merupakan tingkatan partisipasi yang paling dangkal, berupa penyebarluasan program atau meminta para stakeholder untuk memberikan informasi yang akan digunakan untuk membantu merencanakan atau mengevaluasi kegiatan. Model komunikasi lebih bersifat satu arah dari pada interaktif

**2. Partisipasi melalui konsultasi**

Pada tngkatan ini partisipatif diartikan lebih sempit. Partisipasi lebih mengacu pada orang yang diminta pendapatnya mengenai sesuatu, para profesional pembangunan mendengarkan pandangan mereka, dan tidak wajib memasukkan pandangan mereka. Model ini mengandung resikonya antara lain: Hanya mengambil (ekstraktif), stakeholder jarang mengetahui bagaimana umpan balik mereka digunakan; orang kurang memiliki motivasi untuk berpartisipasi; dan dapat menjadi sekadar proforma untuk mensahkan agenda para profesional.

**3. Partisipasi dengan Kolaborasi**

Cara ini dilakukan dengan mengundang para stakeholder untuk menjadi mitra dalam pengambilan keputusan, dan ada kolaborasi antar stakeholder. Stakeholder diikutsertakan sejak pencarian fakta dan penyusunan konsep. Dalam proses yang bersifat kolaboratif, masing-masing stakeholder melakukan pembahasan dan menyusun dokumen serta mengembangkan bersama. Stakeholder ikut ambil bagian dalam keputusan. Proses ini dapat mengembangkan rasa memiliki yang dapat memotivasi mereka secara berkelanjutan.

**4. Partisipasi melalui pemberdayaan /kendali bersama**

Partisipasi melalui kendali bersama, melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih dalam daripada partisipasi dengan kolaborasi. Dalam prosesnya warga masyarakat menjadi lebih diberdayakan dengan menerima tanggung jawab yang makin bertambah atas pengembangan dan pelaksanaan rencana, dan pembuat keputusan terpusat pada masyarakat. Masyarakat (stakeholder) mengembangkan rencana tindakan dan mengelola kegiatan mereka berdasar prioritas dan gagasan mereka sendiri. Profesional pembangunan menjadi fasilitator. Dalam pendekatan ini memungkinkan para stakeholder menjadi pelaku penuh dalam pembangunan mereka

Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan partisipasi, antara lain:<sup>15</sup>

- a. *Pelatihan*, pelatihan diperlukan untuk: peningkatan kapasitas; memberi pemahaman terhadap teknik-teknik penyelesaian masalah; membuat stakeholder lebih nyaman dengan pendekatan partisipatif dibanding top down Meningkatkan ketrampilan berorganisasi.
- b. *Memperkuat kerangka pembangunan partisipatif*, dengan memperbanyak staf yang memiliki ketrampilan dan pengalaman dalam partisipatif.
- c. *Menempatkan pendekatan dan metoda partisipatif pada arus utama*.
- d. *Membina lingkungan belajar*.

Hasil yang sudah dicapai pada penelitian tahap satu mencakup:

- a. Dalam pengelolaan bangunan budaya yang ada di Kota Lama Semarang, beberapa hukum positif (perundang-undangan) baik pada level nasional maupun lokal menjadi dasar hukum pengelolaan. Ketentuan pada level nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 mengenai Perlindungan Benda Cagar Budaya yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 sebagai pedomannya. Disamping kedua

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 25-28

perundang-undangan tersebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga menjadi acuan. Sementara ditingkat lokal, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai dasar hukum pengelolaan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari perundang-undangan tersebut adalah:

- 1) Perda RTBL belum melakukan penyesuaian dengan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan yang ada di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perda RTBL juga harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, karena Perda mendasarkan pada undang-undang yang lama sementara masalah penataan ruang sudah diubah oleh ketentuan yang baru.
- 2) Beberapa ketentuan dalam Perda RTBL belum dapat dilaksanakan secara baik seperti:
  - masalah kerangka penataan kawasan (zonasi kelompok fungsi) dimana pemanfaatan ruang dalam prakteknya tidak sesuai segmentasi/zona peruntukan yang diatur dalam Perda RTBL.
  - terjadi ketidak-konsistenan antara peraturan dan kebijakan yang berlaku terutama berkaitan dengan kerangka kerja kawasan dan fungsi bangunan.
  - Belum adanya sinergi antara pemerintah, badan pengelola kawasan, pemilik dan pengguna bangunan di kawasan dalam pengelolaan bangunan di kawasan Kota Lama Semarang sedangkan hal ini secara jelas sudah diatur dalam Perda RTBL.
- b. Beberapa masalah identifikasi signifikansi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan budaya terlihat antara lain dari:
  - 1) Keterkaitan dengan (*linkage*) kawasan sekitar, kawasan Kota Lama mempunyai posisi yang strategis, dan secara ekonomis dapat dikembangkan sebagai kawasan budaya dan kawasan penyangga untuk kawasan sekitar.
  - 2) Secara visual, kawasan kota lama mempunyai karakter yang spesifik, dan kawasan ditata dengan system pemandangan yang mengarah pada pusat (Taman Srigunting). Pengarahan ini pada awalnya sesuai dengan posisi pintu gerbang, serta akses dengan lingkungan sekitar. Namun sayangnya, dalam perkembangannya pengaturan arah jalan/ orientasi yang ada sekarang ini berlawanan dengan pergerakan sesuai dengan system pemandangan yang direncanakan pada awalnya sehingga menyebabkan secara system pemandangan kawasan, keindahan lansekap kota lama menjadi tidak terlihat.
  - 3) Dari sisi sejarah, kawasan kota lama merupakan cikal bakal perkembangan kota Semarang sebagai sebuah kota modern. Kebanyakan bangunan yang ada mengikuti aliran modern awal dan bergaya high renaissance dan classic order.
- c. Dari hasil identifikasi dan evaluasi peran serta masyarakat lokal/ *local community* (pengelola, penghuni, pemakai, dan pemilik) guna melihat tingkat kepedulian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya terlihat hal-hal seperti tersebut dibawah ini:
  - 1) Peran serta masyarakat yang diwadahi dalam BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama) belum dapat dijalankan dengan baik karena tidak mendapat dukungan pemerintah. Wewenang BPK2L masih tumpang tindih dengan dinas-dinas terkait. Disamping itu, hambatan dalam permasalahan kepemilikan yang kebanyakan merupakan asset privat sehingga menyebabkan campur tangan BPK2L dalam pelestarian agak sulit terhadap asset privat terutama dalam pemberian pengertian pada pemilik tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik bangunan budaya serta kesulitan dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi program.
  - 2) Peran serta dari pemilik dan pengguna bangunan sudah mulai dirintis secara baik dalam pengelolaan bangunan cagar budaya yaitu antara lain pengurus yayasan Gereja Blenduk, pemilik rumah makan Sate 29, pemilik bangunan depan Sri Gunting, pemilik bangunan toko peralatan depan de Spiegel, pemilik Galeri Semarang dan

pemilik Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur. Bangunan cagar budaya tersebut dikelola baik untuk kepentingan sosial, keagamaan maupun bisnis.

- 3) Permasalahan yang timbul berkaitan dengan minimnya peran serta masyarakat lokal/ *local community* (penghuni, pemakai, dan pemilik) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Banyak bangunan yang ditinggalkan/dibiarkan oleh pemiliknya sehingga banyak bangunan yang mempunyai signifikansi cukup tinggi cenderung menjadi rusak
  - b) Munculnya permasalahan sosial akibat bangunan kosong dan terlantar, seperti pengokupasian bangunan oleh pendatang secara liar, serta permasalahan lingkungan yang disebabkan kurang berjalan dan kurang tersedianya utilitas di kawasan ini.

The Lijiang Sustainable Tourism Models, merupakan model pengelolaan cagar budaya dan pariwisata yang dikembangkan oleh Unesco bersama Nordic World Heritage Foundation di Lijiang- China. Ada 4 model yang dikembangkan, yaitu<sup>16</sup>:

- Model 1: Fiscal Management, dalam model ini diterapkan pemberian conservation insentive dan financial support systems bagi pemilik bangunan cagar budaya.
- Model 2: Invesment by Tourism Industry, model ini mendorong pemanfaatan kembali (reuse) bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, seperti hotel dsb.
- Model 3: Community Education & Skill, menekankan pada human resource development di semua tingkatan.
- Model 4: Build Community Consensus, model ini untuk mengembangkan dialog antar stakeholder, dan membangun kepedulian bersama.

### 3. PRESEDEN MODEL DI BEBERAPA KOTA DAN NEGARA

#### 1. Kota Tua Jakarta

##### a. Model Pemanfaatan Bangunan

Berdasarkan perda nomor 9 tahun 1999, Bangunan Cagar Budaya di Kota Tua Jakarta digolongkan menjadi 3 , yaitu: golongan A, B dan C.

- Bangunan cagar budaya golongan A merupakan bangunan yang harus dipertahankan secara keseluruhan dan tidak diperkenankan adanya perubahan baik tampak, selubung bangunan dan interior bangunan yang dilestarikan.
- Golongan B, merupakan bangunan cagar budaya yang dalam pemanfaatannya tampak dan selubung bangunan tidak diperbolehkan untuk dirubah, namun interiornya boleh dirubah sesuai dengan fungsi baru yang diwadahi.
- Golongan C, hanya tampaknya saja yang dipertahankan, selubung bangunan dan interiornya boleh dirubah sesuai dengan peruntukan fungsi baru

Bangunan cagar budaya golongan A yang sekarang digunakan untuk museum, umumnya dimiliki oleh Pemerintah (museum Sejarah Fatahillah, Museum Keramik, dsb) dan BUMN (Museum Bank Mandiri, Museum). Bangunan milik privat sebagian besar digunakan untuk kantor, dan sebagian dibiarkan kosong dan cenderung mengalami pelapukan (rusak)



**Gambar 1:** bangunan cagar budaya gedung singa, yang dibiarkan kosong dan terlantar, bangunan banyak ditumbuhi tanaman liar, yang berpotensi untuk merusak bangunan  
Sumber: Pengamatan lapangan

<sup>16</sup> Nordic World heritage, 2004, CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND TOURISM Models for Co-operation Among Stakeholders, The 2004 UNDP Development Report



Pada kawasan inti di tengah pusat kota, sekitar taman Fatahilah dan Jl Cengkeh ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan. Lapangan terbuka ditengah yang merupakan ciri dari sebuah centrum tetap dipertahankan dan difungsikan sebagai aktivitas sosial. Kondisi ini sangat mendukung sebagai upaya pemaknaan sebagai kawasan centrum, selain itu dengan adanya penetapan kawasan ini sebagai kawasan yang bebas kendaraan menjadikan bangunan di kawasan inti tidak cepat rusak yang disebabkan oleh getaran kendaraan yang lewat. Dibandingkan dengan kawasan Pusat Kota Lama Semarang, DKI lebih mempunyai ketegasan dalam membatasi kendaraan bermotor.

### **b. Apek kebijakan**

Pengelolaan Kawasan Kota Tua di Jakarta mendasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2006. Perda menggolongkan lingkungan cagar budaya berdasar kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, tengeran (landmark) dan arsitektur dalam 3 (tiga) golongan. Golongan I yaitu lingkungan cagar budaya yang memenuhi seluruh kriteria termasuk yang mengalami sedikit perubahan tetapi masih memiliki tingkat keaslian yang utuh. Pelestarian lingkungan cagar budaya golongan I ini meliputi bahwa lingkungan dan bangunan tidak boleh diubah dari aslinya.<sup>17</sup> Golongan II yaitu lingkungan cagar budaya yang telah mengalami perubahan namun masih memiliki beberapa unsur keaslian, dimungkinkan dilakukan pembangunan baru dan dimungkinkan dilakukannya adaptasi terhadap fungsi-fungsi baru sesuai rencana kota tanpa mengurangi keaslian dan ciri khas kawasan.<sup>18</sup> Golongan III yaitu lingkungan cagar budaya yang hanya memenuhi 3 kriteria yang telah mengalami banyak perubahan dan kurang mempunyai keaslian.<sup>19</sup>

### **c. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bangunan cagar budaya dapat dilihat tiga aspek, yaitu dilihat dari pemerhati, pemerintah dan pemilik bangunan. Dari sisi pemerhati bangunan cagar budaya partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan dilihat dari banyaknya, pakar yang mengkritisi penanganan bangunan cagar budaya di kotatua,<sup>20</sup> serta masukan dari pakar pada saat sidang pemugaran bangunan cagar budaya kotatua. Walaupun peran ini masih dalam batas wacana/masukan dan sering tidak diimplementasikan, namun kondisi ini cukup menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya

## **2. Kota-Kota di Belanda**

### **a. Model Pemanfaatan Bangunan**

Di kota Maastrich Belanda, pemanfaatan bangunan cagar budaya diarahkan pada fungsi yang mempunyai nilai ekonomis. Fungsi bangunan sedikit agak bebas dalam arti bangunan tidak harus difungsikan sesuai dengan fungsi awal bangunan. Sebagai contoh pemanfaatan bangunan gereja yang digunakan sebagai toko buku, serta bekas kompleks bangunan biara yang digunakan sebagai hotel.

Berkaitan dengan alih fungsi yang sangat berbeda, tentunya dilakukan juga penyesuaian-penyesuaian yang disesuaikan dengan fungsi baru. Bentuk penyesuaian bangunan diatur dengan 2 kategori bangunan (wawancara dengan pengelola bangunan gereja yang digunakan untuk toko buku, 10 April 2010)

- Kategori 1: Bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan monumental. Untuk kategori ini, seluruh elemen bangunan harus di pertahankan, dan penyesuaian dengan fungsi baru tidak diperbolehkan untuk merusak bangunan..

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 8, 9 dan 16

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 8, 9 dan 17

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 8 dan 9

<sup>20</sup> Wawancara dengan ibu ....., sekretaris UPT kotatua Jakarta, 29 Juli 2010



**Gambar 2:** Interior bekas Gereja yang difungsikan sebagai toko buku di kota Maastricht Belanda

**Sumber:** Pengamatan lapangan

- Kategori 2: Bangunan yang dinilai mempunyai sumbangan/mendukung pada pembedaan citra visual kota. Untuk kategori ini, Tampilan luar bangunan harus dipertahankan, hanya untuk interiornya diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan sesuai fungsi yang baru, hanya perubahan ini secara keseluruhan tidak akan merusak bangunan



**Gambar 3:** Model penyelesaian bangunan untuk menjaga citra visual kawasan

**Sumber:** Pengamatan lapangan

### **b. Strategi Pengelolaan Heritage**

Dalam pengelolaan Heritage, Belanda menerapkan strategy public – privat partnership didalam merestorasi kota. Pengelolaan heritage di Belanda menjadi tanggung jawab semua pihak

## **3. Kota Antwerpen Belgia**

### **a. Kebijakan dan strategi**

Pada abad pertengahan kota Antwerp merupakan kota yang terbesar dan terpenting di Eropa Barat<sup>21</sup>. Kota ini terkenal dengan kota produsen berlian terbesar dengan kualitas tinggi, pelabuhan berkembang pesat. Pada perang Dunia ke 2 kota ini hancur, banyak bangunan yang punya karakter unik hancur. Pada tahun 1960 kota mulai dibangun dengan bangunan-bangunan modern. Kota antwerp menjadi kehilangan keunikannya. Kota yang atraktif menjadi hilang.

Mulai tahun 1993, pemerintah kota Antwerp mulai mencanangkan pengkonservasian bangunan lama untuk mengembalikan kejayaan kota pada waktu itu. Pemerintah mulai merenovasi bangunan-bangunan heritage. Membuat pendekatan yang terintegrasi untuk pusat kota. Pusat kota di kembangkan, memberikan fungsi baru untuk pelabuhan dan bangunan pabrik, dan bangunan bersejarah. Pemerintah membuka kesempatan kepada privat untuk berinvestasi di sektor pertokoan (fashion city), restaurant (gourmet city), hotel, art centers & festivals, dan wisata pelabuhan. Kota antwerp dikembangkan sebagai kota tujuan wisata. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan promosi besar-besaran di seluruh Eropa. Peran pemerintah sangat besar dalam pengelolaan bangunan. Boleh dikata inisiatif muncul dari pemerintah, baru kemudian pemerintah mengandeng masyarakat.

### **b. Model Pemanfaata Bangunan**

Dari pengamatan lapangan, sebagian besar bangunan yang dikonservasi di kota antwerp merupakan reuse. Bagian bangunan yang dipertahankan adalah bagian luar bangunan ( shape dan fasade bangunan), Interiornya sudah mengalami banyak perubahan. Kondisi ini terjadi pada bangunan-bangunan yang dialih fungsikan sebagai bangunan komersial

<sup>21</sup> Cor Dijkgraaf, 2003, INVESTMENT IN INNER CITY REVITALIZATION URBAN HERITAGE :Cultural, Social and Economic Values , Success stories and disasters, Urban Solution, Materi Training.

Untuk bangunan yang digunakan sebagai fungsi komersial pada sector shopping, galeri serta restoran, tampilan fasade pada sisi atas dipertahankan, pada bagian lantai bawah mengalami penyesuaian



**Gambar 4:** Contoh bangunan yang masih mempertahankan bentuk-bentuk arcade di bawahnya, bagian bawah sudah mengalami penyesuaian, namun secara keseluruhan masih terlihat utuh

**Sumber:** Pengamatan lapangan

Dalam skala kota, bangunan cagar budaya di kota Antwerp terpisah pisah, terutama pada daerah yang difungsikan untuk zona komersial (shopping city). Bangunan lama berbaur dengan bangunan baru, yang terkadang banyak bangunan baru yang kurang memperhatikan bangunan lama.

#### 4. Melaka, Malaysia

##### a. Kebijakan Pengelolaan Heritage

Warisan budaya telah diidentifikasi sebagai produk niche baru untuk dikembangkan secara luas dalam pengembangan pariwisata.<sup>22</sup> Pengkonservasian bangunan heritage ada dibawah Departemen Kebudayaan Seni dan Warisan, sedang pengembangannya ada di bawah Departemen pariwisata. Hal ini menunjukkan pengakuan pemerintah bahwa pariwisata sebagai sektor potensial negara nomor satu dan bergerak untuk menghargai nilai warisan negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan yang digunakan dalam pengelolaan bangunan warisan budaya di Malaysia, antara lain<sup>23</sup>:

- i. Antiquities UU 1976 (UU 168)
- ii. Hukum Deposit Bahan Undang-undang Perpustakaan, 1986 (UU A667)
- iii. UU Perpustakaan Nasional, 1972; Perpustakaan Nasional (Amandemen) Undang-Undang, 1987
- iv. Arsip Nasional Act, 1966 (UU 44), (Revisi 1971), (UU A85), (Revisi 1993), (UU 511)
- v. Pedoman tentang Konservasi George Town rincian Inner City
- vi. Undang-Undang tahun 1976 atau 172 UU, National Land Code (kanun Tanah Negara), Jalan, Drainase dan Bangunan 133 Undang-undang

##### b. Model Pengelolaan Heritage

Bangunan warisan budaya di Melaka Malaysia di kelompokkan menjadi 2 kategori. Kategorin pertama merupakan bangunann warisan budaya yang menjadi milik pemerintah, serta kategori kedua merupakan bangunan warisan budaya yang boleh dimiliki oleh swasta. Semua bangunan warisan budaya di Melaka, terutama untuk bangunan peninggalan budaya westwren ( Dutch, Portugis dan Inggris) dicat dengan warna merah. Hal ini juga yang menyebabkan Melaka terkenal dengan Bangunan Heritage Merah. Bangunan-bangunan ini terkumpul dalam satu kawasan di area dekat bekas Benteng Portugis.

Untuk bangunan ini kawasan yang boleh dimiliki swasta, pada umumnya adalah rumah-rumah pecinan di seberang dari kawasan merah ini. Umumnya mereka adalah bekas rumah toko (shop house) pada waktu itu. Kawasan ini menjadi pendukung kawasan merah. Kawasan ini dikembangkan untuk pusat penjualan souvenir dan hotel. Pada umumnya bagian yang dipertahankan adalah bagian fasade, sedangkan bagian dalam boleh

<sup>22</sup> Badaruddin Mohamed (Assosiate professor Sekolah Perumahan, Bangunan dan Perencanaan Universi Sains Malaysia, Penagng, Malaysia), 2005, **Promosi Wisata Budaya dan kebijakan dalam sebuah Malaysia**, artikel materi training. Hal 3.

<sup>23</sup> Ibid hal 6

mengalami perubahan. Pengeloan dan perawatan merupakan bagian investasi dari pihak swasta.



**Gambar 6:** Bangunan warisan budaya milik pemerintah ditandai dengan warna cat merah. Walaupun sebenarnya sedikit menyalahi dengan aturan konservasi bangunan international, karena telah merubah aslinya  
**Sumber:** Pengamatan lapangan

## 5. Singapura

### a. Aspek kebijakan dan partisipasi privat

Tahun 2001, Singapura mulai membangun central Bussiness District, dan mencoba melirik kawaan pecinan yang saat itu merupakan kawasan slum. Pada saat ini pula muncul pertimbangan apakah akan meredevelop kawasan ini menjadi kawasan baru atau mengkonservasi bangunan yang ada untuk memberikan identitas Singapura, karena pada kenyataannya Singapura secara arsitektural tidak mempunyai kekhasan. Keputusan yang diambil adalah untuk mengkonservasi bangunan yang ada.

Setelah diputuskan kawasan ini untuk dikonservasi, kawasan ini kemudian dikembangkan untuk kawasan wisata dan bussines industri kecil. Bangunan- bangunan yang ada direstorasi, bagian fasade dikembangkan dan bagian dalam (interiornya) disesuaikan dengan kebutuhan. Yang diperlukan hanya fasade untuk memberikan identitas kota dan sebagai penanda sejarah perkembangan Singapura.

Sejak tahun 1966, pemerintah Singapura mempunyai legislatif frame work, yang memberikan otorita kepada pemerintah untuk mengakuisisi semua lahan di Singapura dan pngloalan diserahkan kepada badan otorita yang bernama URA untuk membuat planning pengembangan kawasan. Untuk bangunan bangunan yang dianggap bangunan kunci, URA melakukan restorasi sendiri (tidak ditenderkan), sdang yang lain ditenderkan ke swasta.

### b. Model Pemanfaat Bangunan dan Pengembangan kawasan

Bangunan hanya di pertahankan fasadenya saja, dan kawasan ini dikembangkan untuk area pedestrian. Kawasan ini dijadikan daerah oase bagi singapura yang dianggap jenuh bagi bangunan modern. Namun karena fungsinya sebagai kawasan komersial, aspek modernitas tidak juga terlepas. Penambahan street furniture di beberapa tempat, yang berlebihan justru mengurangi karakter bangunan



**Gambar 7:** Penggantian bahan matrial dan warna dijinakan (gambar kiri dan tengah), sedang penambahan furniture street yang berlebihan mengaburkan karakter fasade bangunan (kanan)  
**Sumber :** Pengamatan lapangan

## 4. DISAIN MODEL PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT KOTALAMA SEMARANG

### a. Model Partisipasi Masyarakat

Disain proses partisipasi masyarakat dilakukan melalui tahapan-tahapan:

- 1) Pelibatan Masyarakat, pelibatan masyarakat yang dianggap strategis,yaitu: pemilik bangunan (sebagai orang yang akan terlibat langsung dalam usaha pelestarian dan

pengembangan kawasan) , BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama), dan Pemerintah Kota Semarang.

- 2) Menentukan strategi, yang dilanjutkan dengan menentukan level partisipasi. Tahapan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: kondisi lingkungan (masalah dan potensi), dan dampak sosial. Penentuan strategi pengelolaan penting untuk menentukan analisis dan visioning; strategi dan action plan; serta implementasi bersama dalam kelompok masyarakat melalui kelompok kerja
- 3) Pembentukan kelompok kerja. Pembentukan kelompok kerja didasarkan pada sektor yang akan dikembangkan. Berdasarkan dari analisa keterkaitan dengan (*linkage*) kawasan sekitar, kawasan Kota Lama mempunyai posisi yang strategis, dan secara ekonomis dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata budaya dan kawasan penyangga untuk kawasan sekitar. Kawasan berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata budaya karena kawasan kotalama mempunyai banyak bangunan cagar budaya yang merupakan bukti sejarah dari awal perkembangan arsitektur modern di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, serta berpotensi untuk menjadikannya sebagai identitas kota. Hanya yang perlu dicermati dan adalah permasalahan lingkungan seperti masalah rob dan infrastruktur, kerusakan bangunan cagar budaya, pengokupansian kawasan oleh penghuni liar/ homeless serta permasalahan kejelasan secara hukum. Dapat dikatakan ada tiga aspek yang perlu ditangani di kawasan kota lama:
  - a. Aspek Fisik, mencakup renovasi dan penyelamatan bangunan cagar budaya, serta upgrading infrastruktur.
  - b. Aspek Sosial: menciptakan kesadaran bagi pemilik dan penghuni bangunan cagar budaya, mencari solusi bagi penghuni liar; peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan sinergi antara pemerintah, BPK2L (sebagai badan pengelola kawasan), pemilik dan pengguna bangunan dikawasan dalam pengelolaan bangunan di kawasan Kota Lama Semarang.
  - c. Aspek Legal: pengaturan dan penyusunan kebijakan dan peraturan; peningkatan konsistenan antara peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Dari permasalahan yang ada, perlu dibuat kelompok-kelompok kerja yang melibatkan sektor publik dan sektor privat untuk menanganinya. Kelompok yang diusulkan untuk kotalama Semarang adalah:

1. Kelompok kerja penyelamatan bangunan,
2. Kelompok kerja pengelolaan lingkungan dan peningkatan infrastruktur
3. Kelompok kerja pengembangan wisata budaya dan peningkatan nilai ekonomi kawasan
4. Kelompok kerja penyusunan guideline dan kebijakan kawasan serta implementasi lapangan
5. Kelompok kerja pendidikan masyarakat dan peningkatan kapasitas stakeholder

Dalam menyusun strategi, proses partisipasi dapat dikelompokkan dalam 4 level dari tingkatan paling rendah sampai tingkat tinggi, yaitu: partisipasi dengan berbagi informasi; partisipasi melalui konsultasi, partisipasi dengan kolaborasi , dan partisipasi melalui pemberdayaan.

Tahapan perencanaan dibagi dalam 3 tahapan:

**Tahap 1:** political vision yang dilakukan melalui kegiatan bersifat konsultasi publik, dan dapat dilakukan melalui seminar, diskusi dan pameran

**Tahap 2:** memformulasikan visi dan strategi tiap-tiap kelompok kerja dengan level partisipasi yang digunakan adalah level kendali bersama dan melakukan studi kelayakan (level partisipasi dengan partisipasi) yang kemudian secara bersama disinergikan, dan ditetapkan sebagai strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan dan level partisipasi yang digunakan adalah level kendali bersama.

**Tahap 3:** pemilihan dan penetapan urutan proyek yang harus dikerjakan dan implementasi proyek dan hasilnya diinformasikan ke publik melalui pusat informasi kawasan pusat kota lama Semarang, sebagai salah satu alat untuk memonitoring bersama serta penyampaian informasi ke masyarakat luas

**b. Panduan kebijakan**

Panduan kebijakan digunakan untuk memberikan arahan dan landasan hukum bagi proses pelestarian bangunan cagar budaya kawasan pusat kota lama, yang mencakup:

- (1) Batasan Wilayah Kawasan Kota Lama Semarang
- (2) Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama sebagai Bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (3) Kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Acuan Penataan Kawasan kota Lama Semarang
- (5) Upaya Perlindungan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang
- (6) Hak dan Kewajiban Orang dalam Upaya Perlindungan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang

**c. Model Pemanfaatan**

Dari analisis hasil karakteristik kawasan, secara visual, kawasan kota lama mempunyai karakter yang spesifik, dan kawasan ditata dengan system pemandangan yang mengarah pada pusat (Taman Srigunting). Dalam upaya pengaturan sistem pergerakan perlu dipertimbangkan karakter visual kawasan. Penguatan terhadap focal point menjadi penting untuk menumbuhkan daya tarik visual.

Penetapan perlakuan terhadap bangunan cagar budaya lebih ditekankan pada pelestarian bangunan sesuai dengan tingkatannya, Bangunan monumental atau bangunan pendukung citra kawasan seperti di Belanda. Ketegasan ini diperlukan untuk mempermudah pemilik dan atau penghuni dalam mengambil sikap untuk pengelolaan bangunan cagar budaya.

Keterkaitan dengan (*linkage*) kawasan sekitar, kawasan Kota Lama mempunyai posisi yang strategis, dan secara ekonomis dapat dikembangkan sebagai kawasan budaya dan kawasan penyangga untuk kawasan sekitar, pengaturan akses kawasan dan zona fungsi kawasan harus mengacu pada posisi strategis kawasan untuk meningkatkan nilai ekonomis kawasan. Pemintakatan (Zoning) peruntukan kawasan harus diperhatikan pergerakan lalu lintas sekitar kawasan karakter bangunan dan perlakuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah kerusakan bangunan akibat getaran kendaraan dan mengingat bangunan cagar budaya di kawasan pusat kota lama hanya dapat dinikmati dalam skala jalan kaki, maka penetapan kawasan Pusat Kota Lama menjadi kawasan yang bebas kendaraan menjadi penting. Untuk itu perlu diupayakan dalam mengatasi masalah panas untuk pejalan kaki, tanpa merusak karakter visual kawasan.

Pengembalian sistem kanal di sekeliling kawasan serta pengoptimalan fungsi polder dan kali Semarang penting dilakukan untuk mengatasi masalah rob dikawasan pusat kota lama Semarang

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Australian Heritage Commission, 1999, ***Protecting Local Heritage Places, A guide for Communities***, Canberra

Beatrice Kaldun, 2003, ***Partnership for Empowered Participation: Mainstreaming a Community-Based Paradigm for World heritage Management***, World heritage papers 13, on "Linking Universal and Local Values, Managing a Sustainable Future for World Heritage" a conference organised by The Netherlands National Commission for UNESCO, 22-24 May 2003

Burra Charter, 1998, 1987, ***Charter for the Conservation and Cultural Place***

Cindy F. Malvicini dan Anne T. Sweetser, 2003, ***Cara-Cara Partisipasi: Makalah Tentang Kemiskinan dan Pembangunan Sosial***, No 6/Juli 2003, Asian Development Bank.

Fielden, Bernard M ***"Challenge to Heritage Preservation in Industrially Developed Countries" Why Preserve the Past***, (Ed by Yudhisthir Raj isar, UNESCO, Paris, 1986

Fred N. Kerlinger (diterjemahkan Landung R. Simatupang), 2003, ***Asas-asas Penelitian Behavioral***, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 217

Hampton, Mark, P. 2005. ***Heritage, Local Communities, and Economic Development***. In: *Anal of Tourism Research*, vol 32, No.3, Elsevier Ltd (Great Britain), hal. 739

Henry Cleere, 1984, ***"Approaches to the archaeological heritage"***

ICOMOS, 1971, ***"The Venice Charter" (International Charter for the Conservation and Restoration of Monument and Sites)***.

Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470

Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. ***The Illustrated BURRA CHARTER. Making good decisions about the care of important places***. Australia: ICOMOS.

Marta de la Torre & Erica Avrami, 2000, ***Value and Heritage Conservation, The Getty Conservation Institute***, Los Angeles

Marta de La Tore and Randy Mason, 2000, ***Economics and Heritage Conservation: Issues and Ideas on Valuing Heritage***, Getty Conservation Institute, LA, California

Navrud Stale and Richard C. Ready (ed), 2002, ***Valuing Cultural Heritage, Applying Environmental Valuation techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts***, Edward Elgae Publishing ltd, UK

Nordic World heritage, 2004, ***CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND TOURISM Models for Co-operation Among Stakeholders***, The 2004 UNDP Development Report

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan LEMbaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 9

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516

Sidharta and Budihardjo (1989), ***Konservasi Bangunan Bersejarah***, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, hal 9

Soenarno, 2002, ***Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional***, makalah disajikan pada Seminar Nasional – Kekuatan Komunitas sebagai Pilar Pembangunan, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Jakarta 24 April 2002

Sudikno Mertokusumo, 1985, ***Mengenal Hukum***, Liberty, Yogyakarta, hal. 16

Sullivan Sharon, 2003, ***Local Involvement and Traditional Practises in the World Heritage System***, working paper on "Linking Universal and Local Values, Managing a Sustainable Future for World Heritage" a conference organised by The Netherlands National Commission for UNESCO, 22-24 may 2003

Teo, Peggy and Huang Shirlena. 1995. *Tourism and Heritage Conservation in Singapore*. In: *Annals of Tourism Research*, Vol 22, No.3, Elsevier Science Ltd (United States), hal. 590

Teresa Dutli, 2002, *Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, International Committee of The Red Cross, Geneva,

Tim penyusun, 2007, *Sejarah Kota Tua*, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta

Tim penyusun, 2007, *Guidelines Kota Tua*, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725

Undang\_Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247

Watkin D, 1986, *A History of Western Architecture*, Barrie&Jenkins, Melbourne, hal 176-234

---, 2003, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama, dalam lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2003, tidak dipublikasikan, hal. I.3 – I.4



## MASA DEPAN ARSITEKTUR TRADISIONAL DI TENGAH ARUS MODERNISASI

**B.Sumardiyanto**

Laboratorium Perencanaan Perancangan Lingkungan dan Kawasan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail : [pak\\_mardiyanto@yahoo.com](mailto:pak_mardiyanto@yahoo.com)

### ABSTRAK

*The development of humanism has brought about the birth of modernism which is understood as a movement that is separated from tradition. Modern architecture is, consequently also understood as an opponent to traditional architecture. Considering the fact that modernism as well as modern architecture have developed entire the world, this paper attempts to discuss the future of traditional architecture.*

*In the first place it will be explained the definition of modern, modernization, modernity and modernism. This is considered important as each word has different consequent if it is used in a sentence. Then the concept of modernity is described in the following part. This constitutes the four different concepts of modernity: programmatic, transitory, pastoral and counterpastoral. These 4 different concepts of modernity indicate that modernity is something debatable. The next part is a description of modern architecture, it's promise and it's failures.*

*The discussion is held to find some possibilities and opportunities of the future of traditional architecture. This starts with the discussion on the contradiction between modernity and dwelling. While modernity is always associated with rationalism such as functionality and usefulness, dwelling on the other hand always relates also to something beyond rationalism, such as uselessness. Sociologist says that modernity is identical with homelessness. This brings about to the dilemma which is faced by architecture which is discussed in the next part. The dilemma constitutes a question on which is suitable architecture for modernity, a figurative or non-figurative one? The debates between Christian Norberg Schulz and Massimo Cacciari as well as between Christopher Alexander and Peter Eisenman are described briefly. The next part is an explanation of best practices in integrating modernity in traditional architecture which is done by humanist architects Henri Maclaine Pont and YB. Mangunwijaya.*

*The conclusion explains that there is still opportunities for traditional architecture to exist. However some efforts should be made such as endless discourse and exploration of the possibilities of integrating between modernity and traditional architecture both in theoretical and practical field by academicians, theoreticians and practitioners.*

**Keywords:** *modernity, modern architecture, traditional architecture, dwelling.*

### 1. PENDAHULUAN

Humanisme merupakan paham yang mengutamakan kepentingan olah akal untuk menyelesaikan berbagai masalah dari pada mempercayai dogma-dogma dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Menurut paham ini manusia hanya mampu mengetahui dan memahami kebenaran melalui fakta yang dapat diamati secara nyata dan mengolahnya dengan metode ilmiah. Tradisi humanis memiliki ciri kebebasan ekonomi, politik dan intelektual individu. Kebebasan tersebut didasari kebebasan berpikir yang menolak segala sesuatu tanpa proses berpikir. Kebebasan dan kemampuan berpikir tersebut mengembangkan kemampuan mengetahui sesuatu. Pesatnya kemajuan berpikir tersebut memunculkan paham modernisme.

Popper (dalam Adianto, 2010) mendefinisikan gerakan modern sebagai usaha menemukan pemikiran yang berbeda dengan tradisi yang sudah ada. Dalam bahasa Heynen (1999) modern adalah keterputusan dari tradisi dan menolak warisan dari masa lalu. Karakter utama dari modernisme adalah pembebasan rasio dan etika yang tengah berlaku pada suatu masa (Habermas, 1987 dalam Adianto, 2010). Dalam bidang arsitektur (modern), pembebasan ini diartikan sebagai menghilangkan kesinambungan dengan tradisi berpikir yang sudah ada (Trachtenberg dan Hyman, 1986).

Karena gerakan modernisme berkembang dengan sangat kuat dan tidak mungkin dihentikan, maka konsekuensinya arsitektur modern pun akan semakin berkembang. Kalau modernitas dimaknai sebagai putusnya kesinambungan dengan masa lalu, bagaimana masa depan arsitektur tradisional yang telah memberi dan menjadi identitas suatu kelompok masyarakat atau bahkan bangsa?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### A. Arsitektur Tradisional

Arsitektur tradisional pada umumnya dibangun oleh masyarakat agraris yang lebih maju dibandingkan masyarakat primitif (Sumalyo, 2005). Arsitektur tradisional dibentuk oleh tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Arsitektur tradisional dibangun atas dasar intuisi, naluri dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Adapun tradisi terbentuk oleh ikatan atau hubungan sosial pada suatu tempat tertentu dalam waktu yang lama. Oleh karena itu konsep, pola pemikiran atau budaya berpikirnya adalah abstrak, mendasarkan pada hal-hal yang bersifat ritual, spiritual, magis dan religius. Ciri lain dari arsitektur tradisional adalah tidak mendasarkan diri pada teori-teori dan ilmu pengetahuan. Bahan dan proses pembangunan (konstruksi) langsung diambil dari alam, diolah secara sederhana, tanpa melibatkan banyak pihak.

Oleh karena itu arsitektur tradisional cenderung menyatu dengan alam. Dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, arsitektur tradisional merupakan bagian dari kajian antropologi dan bagian dari ilmu kebudayaan. Arsitektur tradisional mengalami perubahan yang sangat lambat, bahkan bisa saja tidak mengalami perubahan selama tidak ada pengaruh dari luar.

Dalam berbagai diskusi, terutama ketika dihadapkan pada modernitas, sering terjadi pergeseran pengertian akan arsitektur tradisional yang tidak lagi hanya pada wujudnya tetapi terhadap cara berpikirnya. Artinya, karena modernitas merupakan ekspresi dan representasi dari rasionalitas maka apapun yang bertentangan dengan modernitas dianggap sebagai sesuatu yang tradisional. Bahkan secara sederhana arsitektur tradisional sering dipahami sebagai arsitektur yang telah ada atau arsitektur eksisting.

### B. Modern: Modernisasi, Modernitas dan Modernism

Menurut Heynen (1999) ada tiga pengertian dari kata modern. Pertama, pengertian yang paling dasar dari kata modern adalah 'kini'/'sekarang', sebagai lawan dari kata 'lampau atau 'yang sudah lalu'. Pengertian yang kedua dari kata modern adalah 'baru' yang merupakan lawan dari 'kuno' atau 'lama'. Namun akhir-akhir ini sering muncul istilah yang menggunakan kata modern seperti 'postmodern' atau 'neomodern'. Kalau modern diartikan sebagai sekarang, tentu saja tidak ada waktu yang lebih kini dari pada sekarang. Berdasarkan fenomena tersebut maka muncul pengertian modern yang ketiga yaitu sifat 'kesementaraan' (*transient*). Artinya, kalau orang menggunakan kata modern tidak harus kemudian terikat

pada suatu kurun waktu tertentu, tapi lebih dimaksudkan sebagai suatu cara berpikir alternatif.

Selanjutnya kata *modern* dapat berkembang menjadi *modernization* (modernisasi), *modernity* (modernitas) dan *modernism* (modernisme). Agar masing-masing kata dapat dipergunakan secara tepat maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian dari kata-kata tersebut.

- **Modernisasi**

Modernisasi adalah proses perkembangan sosial. Ciri-ciri dari modernisasi adalah kemajuan teknologi dan industrialisasi, urbanisasi dan penambahan populasi, penguatan birokrasi dan kekuatan negara bangsa dan perkembangan sistem komunikasi massa, demokratisasi dan perluasan pasar dunia.

- **Modernitas**

Modernitas mengacu pada ciri-ciri tipikal era modern dan cara dari ciri-ciri tersebut dialami oleh manusia. Modernitas mewakili sikap terhadap hidup yang dikaitkan dengan proses evolusi dan transformasi yang tiada henti dengan orientasi menuju masa depan yang berbeda dengan masa lalu dan masa kini.

- **Modernisme**

Modernisme secara umum merupakan istilah umum aliran pemikiran teoritis dan artistik tentang modernitas yang memungkinkan pria dan wanita mampu mengendalikan perubahan yang terjadi di dunia termasuk perubahan atas diri mereka.

Modernitas, baik dalam arti lampau, kuno maupun sementara mengandung pengertian akan adanya perbedaan dengan masa lalu dan tentu saja mengandung makna mengarah pada masa depan. Selain itu, modernitas juga dapat dipahami sebagai 'garis batas' dengan tradisi sekaligus mengindikasikan penolakan terhadap keterkaitan dengan masa lalu. Pemahaman atas waktu yang linier ini bertentangan dengan pandangan masyarakat klasik yang melihat waktu sebagai sesuatu yang siklikal. Menurut pandangan masyarakat klasik, masa lalu suatu saat akan berulang di masa datang dalam rangka mencari wujud ideal dari sesuatu yang abadi. Namun demikian harus diakui bahwa pandangan masyarakat klasik ini sering dilupakan dan saat ini orang lebih mengikuti cara berpikir model yang progresif yang melihat setiap era adalah unik dan tak dapat berulang dan merupakan kelanjutan dari era yang mendahuluinya. Maka dapat dipahami apabila dalam pandangan progresif yang eskrem maka modernitas selalu mengalami konflik dengan tradisi.

### C. Konsep Modernitas

Meskipun secara umum modernitas dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan tradisi, namun hal tersebut sama sekali tidak berarti bahwa konsep tentang modernitas bersifat denotatif. Ada beberapa konsep yang dapat dipakai untuk memahami tentang modernitas. Berdasarkan Heynen (1999) berikut ini diuraikan dua pandangan berbeda yang dapat menjadi alternatif untuk memahami tentang modernitas.

- **Konsep Programatik dan Transitori**

Modernitas dapat dipahami sebagai konsep programatik dan konsep *transitori*. Dalam konsep programatik, modernitas dilihat sebagai proyek. Sebagai sebuah proyek maka modernitas harus selesai, harus ada hasil. Proyek yang dimaksud adalah proyek untuk kemajuan dan emansipasi yang menekankan adanya potensi pembebasan yang terkandung dalam modernitas. Konsep programatik melihat modernitas terutama pada kebaruannya yang membedakan era sekarang dari era sebelumnya. Pendekatan programatik ini memuat dua elemen penting. Pertama, modernitas ditandai dengan kemunculan otonomi dalam bidang sains, seni, dan moralitas yang berkembang sesuai dengan 'logika dalam' yang mendasarinya (*inner logic*). Kedua, modernitas sebagai

proyek harus mencapai suatu produk yang kualitasnya diukur berdasarkan relevansinya dengan dunia praksis kehidupan sehari-hari.

Sementara itu dalam konsep transitori (sesuai dengan pengertian ketiga dari modern) modernitas dipahami sebagai sebuah kesementaraan. Modernitas adalah pengungsian atau ketergantungan. Meminjam gejala yang terjadi pada bidang seni, Jean Baudrillard menyatakan bahwa inti dari modernitas adalah pencarian inovasi dan pemberontakan terhadap tekanan-tekanan tradisi. Menurutnya nilai dari modernitas adalah perubahan dan kritik. Nilai modernitas (perubahan dan kritik) yang terus menerus didengungkan ini akhirnya justru menjauhkan modernitas dari relasinya dengan perspektif kemajuan. Konsep ini nantinya menjadi awal kelahiran dari postmodernisme.

- **Konsep Pedesaan (*Pastoral*) dan Perkotaan (*Counterpastoral*)**

Modernitas juga melibatkan konsep atau cara berpikir pedesaan (*pastoral*) dan perkotaan (*counterpastoral*). Pandangan pedesaan menyangkal adanya kontradiksi, ketidakcocokan/ ke-tidaksesuaian dan ketegangan yang terjadi dalam modernitas. Modernitas dilihat sebagai perjuangan bersama mencapai kemajuan, menyatukan pekerja, kaum industrialis dan para seniman menuju ke suatu tujuan bersama. Politik, ekonomi dan kebudayaan semua bergerak menuju kemajuan. Konflik-konflik yang ada diabaikan.

Sedang dalam pandangan perkotaan, modernitas ditandai dengan adanya ketidaksesuaian (*discrepancy*) antara ekonomi dan kebudayaan modern. Modernitas ditandai pemecah-belahan dan fragmentasi kehidupan yang menghasilkan jurang perbedaan yang tak terjembatani dan kontradiksi yang sangat parah. Hal ini diperparah dengan adanya otonomi dalam berbagai domain yang tidak mungkin disatukan untuk mendapatkan landasan bersama.

Tampak bahwa konsep-konsep modernitas tidak hanya berbeda tapi bahkan berlawanan, dan inilah yang membuat modernitas menjadi sangat menarik. Marshall Berman menyatakan bahwa dalam aras pribadi pengalaman terhadap modernitas adalah kombinasi antara elemen programatik dan *transitori*. Pendulum kehidupan seolah bergoyang dari perjuangan pengembangan pribadi tiada henti di satu sisi dan nostalgia masa lalu yang hilang di sisi yang lain. "Menjadi modern adalah menemukan diri kita dalam sebuah lingkungan yang menjanjikan petualangan, kekuasaan, kenikmatan, pertumbuhan dan transformasi diri dan dunia, dan pada saat yang sama semuanya itu menantang kita untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah kita miliki, kita ketahui dan apapun kita."

#### **D. Arsitektur Modern**

Berdasarkan konsep modernitas yang masih beragam, lalu bagaimana dengan Arsitektur Modern? Modernitas selalu memiliki relasi dengan peradaban kapitalis dan kebudayaan modern itu sendiri. Terlepas dari sifat relasi yang dapat terbangun antara kebudayaan secara umum dan kapitalisme, namun yang jelas dalam bidang arsitektur relasi tersebut menjadi tidak terhindarkan karena arsitektur bergerak baik dalam ranah aktivitas kultural sekaligus dalam ranah kekuasaan dan uang. Bahkan dapat dikatakan bahwa estetika modern memiliki relasi yang sangat transparan dengan peradaban elit modern kapitalistik.

Sebagai produk pemikiran humanisme, seperti halnya modernitas, arsitektur modern memiliki relasi yang sangat kuat dengan perkembangan teknologi sistem struktur, konstruksi dan bahan bangunan untuk dapat mengakomodasi ekspresi dan kreativitas baru. Pada saat yang sama, modernisme mendorong teknologi di bidang industri untuk semakin efisien dan efektif, termasuk dalam teknologi industri/ fabrikasi komponen bangunan. Oleh karena itu

pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia arsitektur sangatlah dahsyat. Jika pada masa sebelumnya karya arsitektur kaya dengan bentuk-bentuk buah karya *craftmanship* kemudian berganti menjadi bentuk-bentuk geometris buah karya pabrik yang dituntut untuk mampu memproduksi secara massal. Pendek kata telah terjadi penyederhanaan bentuk terjadi secara radikal.

Sebenarnya arsitektur modern dengan landasan pengembangan rasionalitasnya berusaha untuk memperkenalkan dan mengubah pola kehidupan yang lebih baik bahkan mendekati kesempurnaan. Namun karena arsitektur modern gagal membendung kemajuan teknologi untuk ikut serta di dalamnya maka alih-alih menawarkan lingkungan hidup yang lebih baik, arsitektur modern dengan bahasa bentuk universalnya justru tidak lagi mengindahkan keragaman nilai sosial dan estetika dalam masyarakat.

Ilustrasi karya arsitektur modern yang paling menarik adalah proyek apartemen murah Pruitt-Igoe di St. Louis Amerika Serikat yang dirancang oleh George Hellmuth dan Minoru Yamasaki, para arsitek modern ortodoks, pada tahun 1951. Selesai dibangun tahun 1956, apartemen yang dirancang dengan ideologi arsitektur modern ternyata menghasilkan wujud yang monoton, tidak manusiawi, kemacetan jaringan air, kriminalitas, vandalisme, dan pornografi yang tidak lagi dapat ditoleransi. Kegagalan tersebut mengantar Pruitt-Igoe mengantarnya ke eksekusi pada tanggal 15 Juli 1972 ketika akhirnya dihancurkan dengan bantuan ledakan dinamis.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Kontradiksi antara Modernitas dan *Dwelling*

Kata *dwelling* yang secara leksikal berarti tinggal atau bermukim tampaknya menemukan makna yang luar biasa untuk mengkritisi modernitas dan sekaligus arsitektur modern. Hal ini terjadi karena *dwelling* mempunyai dimensi yang luas. Dari sisi pelaku, tidak hanya mengandung pengertian fisik tapi juga non-fisik, konsekuensinya kegiatan *dwelling* itu sendiri dapat bersifat nyata/ kongkret dan dapat pula bersifat abstrak. Konsekuensi lebih lanjut, dari aspek wadahnya maka dimensinya pun meliputi dimensi fisik dan non fisik, dan secara spasial bergerak dari sebuah ruang hingga alam semesta. Untuk tetap memelihara makna yang ada di dalamnya maka dalam tulisan ini kata *dwelling* tidak diterjemahkan.

Dalam perspektif filosofi, modernitas sering dipandang berada dalam posisi diametral dengan *dwelling*. Heidegger (dalam Heynen, 1999) misalnya, memiliki pandangan yang menarik untuk disimak tentang modernitas. Menurutnya kata bangunan (*building*) secara etimologis berasal dari kata 'buan' (bahasa Inggris Kuno dan Jerman Tinggi) yang artinya tinggal/ bermukim (*dwelling*) serta memiliki kaitan dengan kata 'saya' (*I am*). Bahkan kata 'buan' juga terkait dengan 'proses mengada' (*being*). Menurutnya *dwelling* mengandung makna menjaga, mengasuh dan memelihara agar sesuatu eksis dalam esensinya. Artinya, dalam *dwelling* manusia dijaga dan dipelihara agar tetap eksis dalam esensinya, dalam hal ini manusia dijaga agar tetap memiliki relasi dengan empat unsur fundamental yaitu (1) bumi (*earth*) sebagai pemberi kehidupan, (2) surga (*heaven*) dalam bentuk kosmos yang mengatur musim, mengatur siklus siang dan malam, (3) kematian (*mortal*) sebagai akhir dari kehidupan yang tak terhindarkan, dan adanya (3) para dewa (*divinities*) sebagai pembawa pesan keilahian.

Dalam *dwelling* yang sejati (*authentic dwelling*) manusia harus terbuka terhadap empat hal fundamental tersebut. Selanjutnya bangunan (arsitektur) dipahami sebagai upaya mematerialisasikan relasi manusia dengan empat hal fundamental tersebut. Dalam pemahaman Heidegger, orang harus mampu untuk ber-*dwelling* sebelum kemudian mampu membuat bangunan (*building*).

Dalam perspektif sosiologi, beberapa penulis seperti Peter Berger, Brigitte Berger dan Hansfried Kellner, menyatakan bahwa modernitas identik dengan situasi gelandangan

(*homelessness*). Mereka mengidentifikasi modernitas itu berpilar pada pengembangan teknologi produksi dan organisasi birokrasi dari kehidupan sosial dan bergantung pada prinsip rasionalitas, anonimitas dan semakin abstraknya hubungan sosial. Semuanya ini mengarah pada pluralisasi kehidupan. Ketika orang hidup dalam dunia kerja, hidup di rumah, hidup dalam masyarakat maka akan berlaku norma dan aturan yang bisa saja kontradiktif dan berubah-ubah. Memang, modernitas membebaskan orang dari situasi keterkungkungan yang diciptakan oleh keluarga, atau lingkungan tradisi. Namun kebebasan tersebut tidak didapat secara gratis. Kebebasan itu harus dibayar dengan berbagai ketidak-pastian dan kehilangan berbagai makna yang bagi banyak orang bukan sesuatu yang mudah untuk menjalani atau melaluinya.

Sementara itu, dalam pandangan kaum eksistensialis kehidupan modern sifatnya hanyalah instrumental/ semu karena semua ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan kebermanfaatan (*usefulness*). Dengan kata lain, *dwelling* yang memiliki makna tradisi, keamanan dan keserasian dengan situasi kehidupan yang menjamin keterhubungan dan makna (yang kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak produktif) tidak dijumpai dalam kehidupan modern. Pandangan ini menyadari bahwa dalam modernitas ada hal-hal yang justru mengasingkan manusia dari eksistensinya sendiri. Menggunakan pemahaman dasar tentang *dwelling*, Heidegger ingin mengatakan bahwa arsitektur modern telah gagal mewartakan kehidupan manusia.

Heynen (1999) juga mengemukakan pendapat-pendapat yang senada dengan Heidegger. Antara lain Cacciari yang menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi 'rumah sejati' karena 'rumah sejati' hanya bagian dari masa lalu. Juga Theodor Adorno yang mengatakan bahwa *dwelling* dalam pengertian yang benar sekarang sudah menjadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Lebih jauh dia mengatakan bahwa dalam sistem sosial kehidupan masa kini yang penuh dengan ketidakadilan, tidak ada tempat di mana orang dapat merasa '*feel at home*.' Pandangan Heidegger yang diperkuat oleh Cacciari dan Theodor Adorno ini semakin meyakinkan adanya ketegangan antara *dwelling* dan arsitektur.

## B. Arsitektur Menghadapi Dilema

Arsitektur tidak dapat melepaskan diri dari ketegangan antara modernitas dan *dwelling*. Arsitektur memberi bentuk pada *dwelling* atau dengan kata lain tugas utama dari arsitektur mematerialisasi dunia di mana manusia melakukan *dwelling*. Apa jadinya kalau pernyataan bahwa modernitas sama dengan gelandangan adalah benar? Akankah arsitektur menjadi tamat pada titik tersebut? Jawabannya tentu saja membutuhkan pemikiran yang mendalam dan pasti sangat beragam.

Christian Norberg-Schulz menyikapi pendapat Heidegger tentang empat hal fundamental yang harus dipenuhi dalam *dwelling* dengan menyatakan bahwa arsitektur harus memiliki sesuatu yang sekaligus memuat tiga karakter, yaitu: (1) harus mampu memicu munculnya suatu citra (*image*); (2) harus nyata/ kongkret, dan (3) memiliki signifikansi. Artinya, arsitektur yang tepat dalam tugas mematerialisasi *dwelling* adalah arsitektur yang figuratif, arsitektur yang dapat dikenali karena adanya tiga karakter tersebut. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa dalam *dwelling*, sesuai pendapat Heidegger, orang harus mengalami eksistensi sebagai sesuatu yang bermakna. Pengalaman tersebut akan menjadi bermakna apabila rancangan arsitekturalnya memberi peluang untuk adanya orientasi dan identifikasi. Hal ini berarti bahwa ruang yang dibangun harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terwujud ruang yang nyata yang memiliki karakter sesuai dengan *genius loci*-nya. Dengan kata lain tugas arsitektur adalah menjadikan *genius loci* sebagai sesuatu yang tampak terlihat. Lebih lanjut *dwelling* diartikan sebagai suatu kepenuhan (*fullness*), bagian dari (*belonging*), keberakaran (*rootedness*) dan solidaritas antara manusia dengan tempat dan manusia dengan manusia. Menurut Norberg-Schulz semua itu dapat diwujudkan dalam arsitektur figuratif. Bahkan klaim Heidegger yang mengatakan bahwa modernitas adalah

'gelandangan' menurut Norberg-Schulz hanyalah bersifat sementara dan bukanlah sesuatu yang fundamental.

Sementara itu Massimo Cacciari memiliki pendapat yang bertolak belakang. Dia menolak pandangan Norberg-Schulz yang melihat jurang antara *dwelling* dan arsitektur sekedar masalah instrumental yaitu belum adanya bahasa arsitektur yang tepat. Menurut pandangan Cacciari modernitas telah mereduksi hubungan antara manusia dengan dunianya yang berakibat dilupakannya proses mengada (*being*). *Dwelling* sejati sudah tidak mungkin lagi ada dan karenanya bangunan sejati juga tidak mungkin lagi diadakan. Dalam arsitektur yang tinggal hanyalah arsitektur tanpa tanda, atau arsitektur yang merefleksikan ketidakbergunaan (*uselessness*). Pendapat Cacciari ini secara nyata terwujud dalam bangunan "Menara Kaca" di Berlin karya Mies van der Rohe. Menurutnya, kaca secara mudah dapat dipahami sebagai negasi nyata dari konsep *dwelling*.

Konflik yang mirip juga terjadi antara Christopher Alexander dan Peter Eisenman. Alexander menyatakan bahwa arsitektur harus mempertimbangkan perasaan manusia yaitu mewujudkan pengalaman akan keselarasan (*harmony*). Manusia dan dunia sekelilingnya adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keselarasan, katanya, ada pada susunan tersembunyi yang harus ditemukan oleh arsitektur. Sementara Eisenman mengatakan bahwa di dunia modern ini adanya adalah ketidak-harmonisan (*disharmony*). Dunia dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak sempurna, fragmentasi, 'kemangkrakan', sesuatu yang tidak pas (terlalu besar atau terlalu kecil). Arsitektur tidak akan mampu mengatasi perasaan-perasaan tersebut.

### C. Arsitektur Modern: Ancaman yang Terancam

Meskipun masih berada dalam tarik ulur antar konsep yang saling berseberangan, dari gambaran tentang arsitektur modern di atas, terlihat bahwa keunikan karya arsitektur yang lahir dalam konteks waktu dan tempat telah hilang sama sekali. Akibatnya arsitektur pada hakekatnya adalah wadah kegiatan manusia dan menjembatani hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya justru menjauh dari kehidupan manusia yang diwadahnya. Teknologi pengkondisian ruang misalnya, di satu sisi dianggap sebagai keberhasilan modernitas mengatasi problema kondisi kenyamanan lingkungan, tapi di sisi yang lain telah membuat manusia kehilangan kontak dengan realitas lingkungannya. Hal ini oleh Baudelaire disebut sebagai paradoks dalam arsitektur (dalam Ward & Patty, 2001). Bahkan Jencks (1987) mengatakan bahwa produk arsitektur tidak mampu berperan sebagai solusi spasial, seperti yang seharusnya, tetapi hanya sebagai wujud identitas individual. Bahkan dalam masyarakat yang memiliki heterogenitas kondisi dan latar belakang, arsitektur justru sering tampil sebagai pencipta konflik spasial.

Akan tetapi, difasilitasi oleh perkembangan situasi global dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, modernisasi secara spasial berkembang demikian pesat mencapai setiap sudut bumi. Bahkan oleh Heynen (1999) dikatakan bahwa modernitas sudah demikian mengakar dalam kehidupan masyarakat kontemporer sehingga tidak mungkin lagi menemukan tempat yang tidak tersentuh modernitas. Arsitektur modern tak terkecuali yang dalam hal ini secara tak terhindarkan lalu bertabrakan langsung dengan arsitektur tradisional. Karena arsitektur tidak bergerak sendiri, kerana selalu bersama dengan kapitalisme dan kebudayaan modern, sementara di sisi lain arsitektur tradisional 'hanya' didukung oleh masyarakat (yang celaknya juga sudah bergerak menuju masyarakat modern). Maka 'rivalitas' antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional tidak dalam posisi seimbang. Jelas hal ini merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi arsitektur tradisional.

Mililah kenyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa arsitektur modern ada dalam posisi yang unik yaitu terancam sekaligus menjadi ancaman. Terancam, karena banyak faktor di dalam maupun luar dirinya yang tidak dapat dikendalikan (misalnya debat yang tak berkesudahan tentang konsep modernisme dan pengaruh dunia kapitalisme yang menuntut

serba efisien dan efektif). Namun di sisi lain, dengan fenomena globalisasi, perkembangan arsitektur yang tidak dapat dibendung akan menjadi ancaman serius dan siap melabrak dan membinasakan arsitektur tradisional. Nilai-nilai tradisi akan dianggap usang dan layak untuk diabaikan dan bahkan ditinggalkan.

#### D. Membangun Masa Depan Arsitektur Tradisional Indonesia

Bagaimana arsitektur modern berkembang dalam konteks Indonesia yang sangat kaya dengan arsitektur tradisional? Dalam pandangan yang bersifat pesimistik ancaman modernitas terhadap arsitektur tradisional bisa saja terjadi di mana arsitektur tradisional akan tersingkir punah. Namun bisa saja terjadi hal yang sebaliknya. Ada berbagai strategi yang dapat diaplikasikan dalam mengembangkan arsitektur tradisional dalam menghadapi modernitas. Berikut ini disampaikan contoh karya dari dua arsitek humanis yang mencoba menampilkan modernitas di tengah-tengah situasi yang didominasi oleh tradisionalitas, yaitu Henri Maclaine Pont dan Y.B. Mangunwijaya.

- **Arsitektur Henri Maclaine Pont**

Contoh yang pertama adalah adalah apa yang dilakukan oleh Heri Maclaine Pont, seorang arsitek yang berasal dari Belanda. Dalam berkarya (di Indonesia) dia berusaha mengawinkan antara rasionalitas arsitektur modern dan arsitektur tradisional. Karya yang terkenal antara lain Aula Barat Institut Teknologi Bandung dan Gereja Puh Sarang Kediri (lihat Gambar 1 dan 2).



**Gambar 1.**

Aula Barat Kampus Institut Teknologi Bandung



**Gambar 2.**

Gereja Puh Sarang Kediri

Pont mendasarkan pemikiran dan praksis arsitekturnya pada spirit kemanusiaan secara utuh. Ia menolak penyeragaman nilai dan wujud modernisme dan berupaya memadukan modernitas universal dan tradisi lokal dalam kerja arsitekturalnya agar rancangannya manusiawi. Karya arsitekturnya mempunyai ciri-ciri antara lain: mempertahankan nilai-nilai kesetimbangan alam dan manusia, kekokohan dan keunikan sosok luar, memiliki integritas, kebersamaan, kejujuran, harmoni, keadilan, kebenaran, rasa dan karakter (jatidiri).

Pont berusaha merumuskan Arsitektur Hindia dalam wujud wacana dan praktis berarsitektur. Dia secara konsisten menekankan pendekatan terhadap budaya dan alam di mana dia merancang sebagai landasan terbentuknya Arsitektur Hindia. Penekannya selain pada kesatuan antara bentuk dan fungsi, juga pada kesatuan dengan konstruksi sebagai perwujudan dari tradisi dalam hubungannya dengan arsitektur. Menurut Pont, modernisasi arsitektur tradisional (lokal) tidak cukup hanya dengan menekankan aspek rasional dan fungsional saja, tetapi juga aspek keselarasan dengan lingkungan sekitar dan mengkaitkan dengan budaya setempat. Arsitektur tradisional dipahami sebagai sebuah ungkapan spiritual dari suatu masyarakat.

Dilatar-belakangi pemikiran romantisisme dan historisisme yang sedang berkembang di Eropa, Pont mengasumsikan pentingnya pengejawantahan *volkgeist* (jiwa masyarakat) demi



terbentuknya identitas sekaligus menjaga kesinambungan sejarah dan perkembangan optimal masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu Pont mencoba menggali *volkgeist* kaum pribumi dalam mewujudkan Arsitektur Hindia. Dia menampilkan *volkgeist* Sunda Besar dan Majapahit masing-masing pada Aula Barat ITB dan pada Gereja Puh Sarang.

Harapan Pont pada dua karya tersebut adalah agar rancangannya menghasilkan pesona bagi masyarakat pribumi sebagai kesaksian atas kejayaan leluhur mereka di masa lampau, dan selanjutnya menjadi penting bagi pembangunan harga diri mereka. Rancangan yang dihasilkan, baik pada Aula Barat ITB maupun Gereja Puh Sarang, mengacu pada bentuk atap berbagai rumah etnis Nusantara dan pada saat yang sama beradaptasi dengan iklim dan ketersediaan material lokal. Harapan itu menjadi kenyataan karena kedua bangunan tersebut benar-benar memiliki kualitas seperti yang digagas arsiteknya.

- **Arsitektur Y.B.Mangunwijaya**

Dalam pandangan Mangunwijaya arsitektur adalah bangunan kehidupan, bukan sekedar perwujudan rancang bangun yang bersifat fisik semata. Sebagai bangunan kehidupan maka harus ada substansi utama yang berupa nilai, gagasan atau sikap batin (Prawoto, 2009). Arsitektur bukanlah entitas, melainkan merupakan rangkaian relasi yang majemuk. Selain harus kuat, kokoh dan unik pada tampilan eksteriornya, arsitektur harus mengutamakan integritas, kebersamaan, kejujuran, harmoni, keadilan, jati diri, rasa dan kebenaran. Oleh karena itu, dalam berarsitektur bagi Mangunwijaya adalah memerdekakan manusia, menyadarkan ke-ada diri-annya, mengangkat harga diri, merefleksikan identitas diri dalam kesetaraan dan mengejawantahkan nilai-nilai. Secara kongkret arsitektur Mangunwijaya selalu memiliki karakter bersatu dengan hukum alam, hemat, jujur-jernih, kreatif-estetik-unik, memiliki daya hidup, dan bernilai spiritual.

Pada rancangan kompleks peziarahan Sendangsono terlihat bagaimana modernitas diartikulasikan dan dibawa ke dalam konteks pribumi sedemikian rupa sehingga substansi keduanya masih tetap eksis (Wismantara, 2008). Dalam dialog kritis antara unsur-unsur yang kontradiktif unsur-unsur pribumi tampil sebagai subyek yang menyesuaikan, menyasiasi dan memaknai modernitas, dan selanjutnya menafsirkan kebaruan arsitekturnya yang tetap berpijak pada kedua unsur. Dengan kata lain, proses perumusan identitas rancangan kompleks peziarahan Sendangsono ditempuh lewat dialog kritis antar unsur-unsur arsitektur pribumi dengan unsur-unsur arsitektur modern (lihat Gambar 3 dan 4). Lebih lanjut Wismantara (2010) menyatakan bahwa rancangan arsitektur Sendangsono melakukan apropriasi atas unsur modernitas yang datang kepadanya dan mengajukan unsur pribumi menjadi motor untuk menghidupkan arsitektur baru yang hibrida dan bercorak lokal.



**Gambar 3.**

Perkuatan tebing sungai yang sekaligus dimanfaatkan sebagai tribune bagi peziarah saat melaksanakan doa bersama



**Gambar 4.**

Rancangan teras-teras ruang luar yang diolah berdasarkan wujud terasering persawahan yang terdapat di sekitarnya

- **Strategi Monolog dan Strategi Dialog**

Menurut Wisnantara (2010) baik Pont maupun Mangunwijaya sama-sama menolak penyeragaman nilai dan wujud arsitektural dengan melakukan *counterknowledge* atas arsitektur modern. Mereka memadukan modernitas universal dan tradisi lokal dalam kerja arsitekturalnya. Meskipun secara fisik visual rancangan keduanya memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan, namun landasan pikiran humanisme di antara keduanya berakibat adanya beberapa perbedaan konseptual.

Strategi yang diterapkan oleh Pont dalam modernisasi arsitektur tradisional adalah strategi monolog. Satu-satunya aspek tanragawi yang dipertimbangkan adalah nilai rasional sistem struktur dan konstruksi modern. Dalam kedudukannya sebagai subyek, aspek tanragawi yang berupa nilai modern ini diupayakan untuk menyesuaikan diri atau menyelaraskan diri dengan aspek ragawi arsitektur pribumi sebagai obyek yang perlu diakomodasi dalam rancangan arsitektur baru. Aspek ragawi yang bercorak pribumi dipandang sebagai obyek dan bukan ditempatkan sebagai subyek yang berbicara.

Adapun Mangunwijaya lebih memilih strategi dialog. Aspek tanragawi dan ragawi arsitektur pribumi sebagai subyek yang berbicara itu menyesuaikan, menyiasati, dan memaknai aspek tanragawi dan ragawi arsitektur modern. Ada pertemuan yang saling menghargai antara unsur pribumi dengan unsur modern, dan bersama-sama membentuk arsitektur yang khas dan baru. Terdapat proses timbal-balik yang produktif-kreatif, yang melibatkan dua subyek (yaitu pribumi dan modern) yang aktif melakukan akomodasi, dialog, negosiasi dan retensi.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan kenyataan masih terus berkembangnya konsep modernitas, maka modernisme sebagai gerakan belum akan selesai, dan bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis, arsitektur modern juga tidak akan pernah selesai. Perdebatan tentang konsep arsitektur modern juga tidak akan pernah mengerucut. Apalagi, seperti sudah berkali-kali diutarakan, arsitektur modern selalu bergerak bersama dengan perkembangan teknologi, maka kemungkinan besar arsitektur modern tidak akan pernah mencapai konsep yang utuh. Oleh karena itu ancaman arsitektur terhadap arsitektur tradisional harus disikapi secara bijaksana bukan sebagai sesuatu yang akan membinasakan. Sebaliknya arsitektur modern justru akan memperkaya perkembangan arsitektur tradisional. Namun untuk mencapai hal itu harus dipenuhi berbagai prasyarat. Salah satu prasyarat dasar yang harus dilakukan adalah pelaksanaan diskursus arsitektur yang terus menerus dengan menggunakan berbagai sudut pandang keilmuan seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan sebagainya. Dalam bidang filsafat, abad 21 ini ditengarai munculnya berbagai ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu-ilmu besar yang sudah mengalami keterbatasan karena tidak mampu lagi menjelaskan realitas yang terus berkembang. Diskursus tersebut harus dilakukan dan melibatkan baik kalangan akademisi, teoritis dan juga para praktisi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

1. Adiarto, Joko. (2010). Arsitektur di Persimpangan: Antara Rasio Individual dan Kesadaran Hidup Keseharian Manusia, dalam prosiding Seminar Nasional *Humanisme, Arsitektur dan Perencanaan*. JUTAP FT-UGM.
2. Heynen, Hilde. (1999) *Architecture and Modernity*, London: MIT Press.
3. Jencks, CA. (1987). *Post-Modernism*. New York: Rizolli.
4. Prawoto, Eko. (2009). Arsitektur Mangunwijaya: Pencarian Panjang Memanusiakan Manusia, dalam *Peziarahan Panjang Humanisme Mangunwijaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

5. Sumalyo, Yulianto. (2005). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
6. Trachtenberg, M dan Hyman, I. (1986). *Architecture: From Prehistory to Post-Modern*. London: Academy Edition.
7. Ward, PA and Patty JS. (2011). *Baudelaire and the Poetics of Modernity*. Baltimore: Vanderbilt University Press.
8. Wismantara, Pudji P (2008). Konstruksi Arsitektur Gereja Katholik Nusantara, dalam prosiding Seminar Nasional *Kebhinekaan Bentuk Arsitektur Nusantara*. Surabaya: ITS Press.
9. Wismantara, Pudji P (2010). Arsitektur untuk Kemanusiaan: Humanisme Liberal Pont vis a vis Humanisme Pemerdekaan Mangunwijaya, dalam prosiding Seminar Nasional *Humanisme, Arsitektur dan Perencanaan*. JUTAP FT-UGM.

## PENGARUH PERUBAHAN PERSIL BANGUNAN DALEM TERHADAP TAMPILAN FASADE DI JALAN MONDORAKAN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA

**Augustinus Madyana Putra**  
E-mail : Thelightofjava@gmail.com

### ABSTRACT

*The phenomenon of façade changes from old buildings occurred in many historic sites is something that could not be not be prevented. However, if these changes do not consider the uniqueness of the region, many feared it will abolish its exceptional identity. The same thing also happened in Kotagede, a former area of the kingdom of Mataram, which is the embryo of Kasunanan Surakarta and Kasultanan Yogyakarta, so Kotagede is declared as a world heritage of the 100 threatened, and all efforts must be made to secure it.*

*Change of ownership of a Dalem lot will influence the facade viability in the area.*

*Study shows that most of ownership changes lead to facade changes. However, the role of government and community component will affect public awareness to preserve the character of their building facades.*

**Keywords:** Identity, Façade, Lot

### 1. PENDAHULUAN

Kotagede merupakan suatu kawasan yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Selain dikenal sebagai kota perak, tahun 1578 Kotagede adalah ibukota Kerajaan Mataram Islam, yang menjadi cikal bakal Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. (Kedaulatan Rakyat, 15 Juni 2007; hal 1). Namun, kawasan yang sarat dengan warisan budaya tersebut termasuk dalam salah satu dari 100 situs bersejarah yang terancam keberadaannya. Berbagai upaya perlu segera dilakukan agar identitas bersejarah yang dimiliki Kotagede tetap terbaca di masa-masa yang akan datang.

Keunikan atau kekhasan suatu lokasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga. Keunikan inilah yang akan membedakan antara suatu lokasi dengan lokasi lain yang merupakan identitas lokasi tersebut (Lynch, 1981). Sedangkan bagian kota yang paling mudah dikenali adalah wajah jalan. Baik buruknya citra sebuah kota dapat dilihat dari wajah jalannya (Jacobs dalam Moughtin, 1992). Berkait dengan pernyataan tersebut, maka salah satu hal yang cukup membantu lestariannya identitas sebuah kawasan adalah karakter fasade yang ada di kawasan tersebut. Ada beberapa ruas jalan yang terdapat di Kotagede, yaitu Jalan Kemas, Jalan Karanglo, Jalan Mondorakan, Jalan Mentaok Raya, dan Jalan Watugilang. Jalan Kemas dan Karanglo mengantarkan pengunjung ke pusat Kotagede, yakni pasar. Pasar Kotagede inilah yang menjadi titik pusat Kotagede pada saat ini, ditandai dengan kesepakatan masyarakat Kotagede untuk menentukan pasar sebagai titik nol Kotagede.

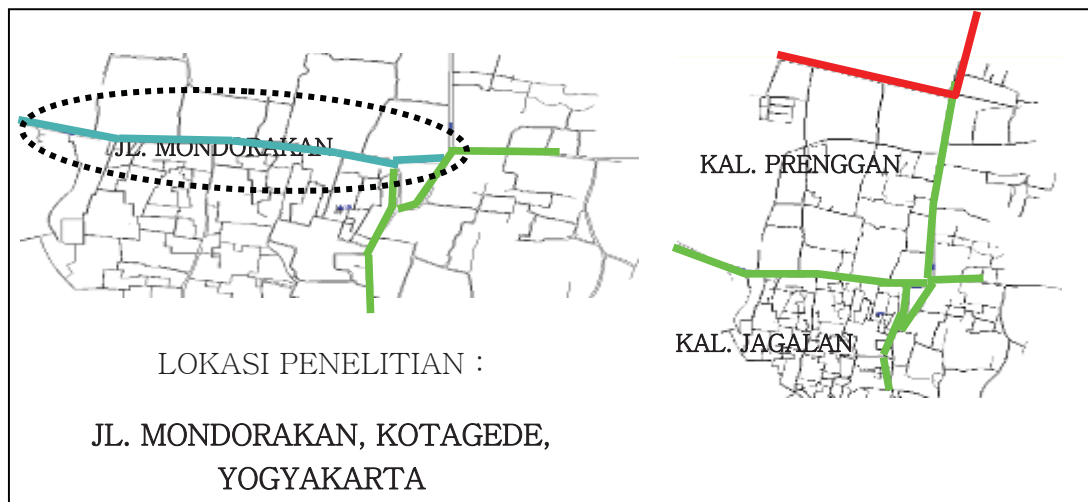
Seiring berjalannya waktu, keberadaan fasade yang memberikan identitas di ruang jalan ini lambat laun mengalami perubahan. Salah satu hal yang dikhawatirkan ikut mempercepat perubahan pelingkup vertikal di ruang Jalan Mondorakan ini adalah perubahan status kepemilikan persil bangunan dalem di sisi utara dan selatan jalan.

## 2. PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimanakan perubahan fasade akibat perubahan status kepemilikan persil bangunan dalam di jalan Mondorakan Kotagede, Yogyakarta?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan mempelajari peta kawasan, citra satelit, pengumpulan foto-foto lama, pemotretan fasade masa kini dan penggambaran dua dimensional fasade eksisting. Tahapan selanjutnya adalah melakukan *in depth interview* pada beberapa narasumber. Hasil wawancara mendalam ini kemudian di cek ulang dengan data-data foto lama, sehingga diperoleh gambaran yang mendekati kondisi masa lalu fasade bangunan terpilih. Hasil penggambaran yang relatif utuh berdasarkan beberapa masukan ini sangat membantu menemukan karakter fasade bangunan lama di Jalan Mondorakan ini, mengingat kondisi bangunan pada saat penelitian sudah tidak utuh lagi.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

## 4. KAJIAN TEORI

### 4.1. Persil bangunan

Menurut Tricart dalam Rossi, 1981, p: 48, untuk mencermati suatu ruang jalan, skala amatan yang perlu dilakukan adalah ruang jalan berikut bangunan dan ruang-ruang terbuka yang melingkupinya. Sehingga kajian yang perlu dilakukan untuk mengenali sebuah ruang jalan adalah (1) ruang jalan dan *enclosure*nya, dan (2) persil lahan yang ada di sekitar ruang jalan tersebut.

Persil yang berisikan bangunan dan kelengkapannya di tepi sebuah jalan merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Persil merupakan sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk perkebunan atau perumahan (Poerwadarminta, 1972). Seperti yang diungkapkan Rossi, 1986, bangunan tempat tinggal dalam sebuah pemukiman merupakan suatu hal yang paling cepat berubah. Perubahan yang terjadi pada bangunan di atas persil tersebut akan mengubah tampilan fasade bangunan tersebut.

#### 4.2. Fasade

Kekhasan suatu tampilan fisik pelingkup ruang jalan ikut mendukung terciptanya suatu identitas kawasan, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh sebuah kualitas visual yang baik. Kualitas visual yang baik ini dapat dihasilkan melalui desain citra eksternal bangunan (Bentley, 1980: 10).

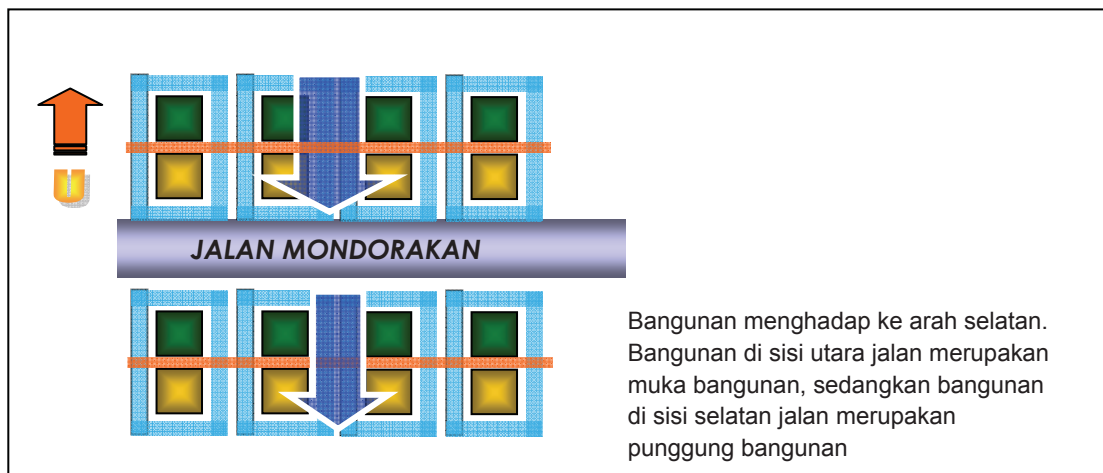
Fasade diambil dari dari bahasa italia *facciata* atau *faccia*. *faccia* sendiri berasal dari bahasa latin *facies*, yang selanjutnya berkembang menjadi *face*. Tampilan eksternal sekelompok bangunan di suatu kawasan bersejarah ini menjadi sangat berarti untuk menjaga identitas kawasan bersejarah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Lynch (1972 p:32). "*OUTSIDES*" are public, historic, and regulated, while "*INSIDES*" are private, fluid, and free. Tampilan luar bangunan di kawasan bersejarah yang pada kenyataannya merupakan milik publik ini perlu untuk diatur sedemikian rupa bukan untuk kepentingan nostalgia masa silam, namun untuk 'merayakan' dan 'memberi penekanan' pada sebuah kekinian. Sehingga pengaturan yang ada tidak kaku, namun tetap memberikan peluang bagi tuntutan perkembangan di masa mendatang.

#### 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

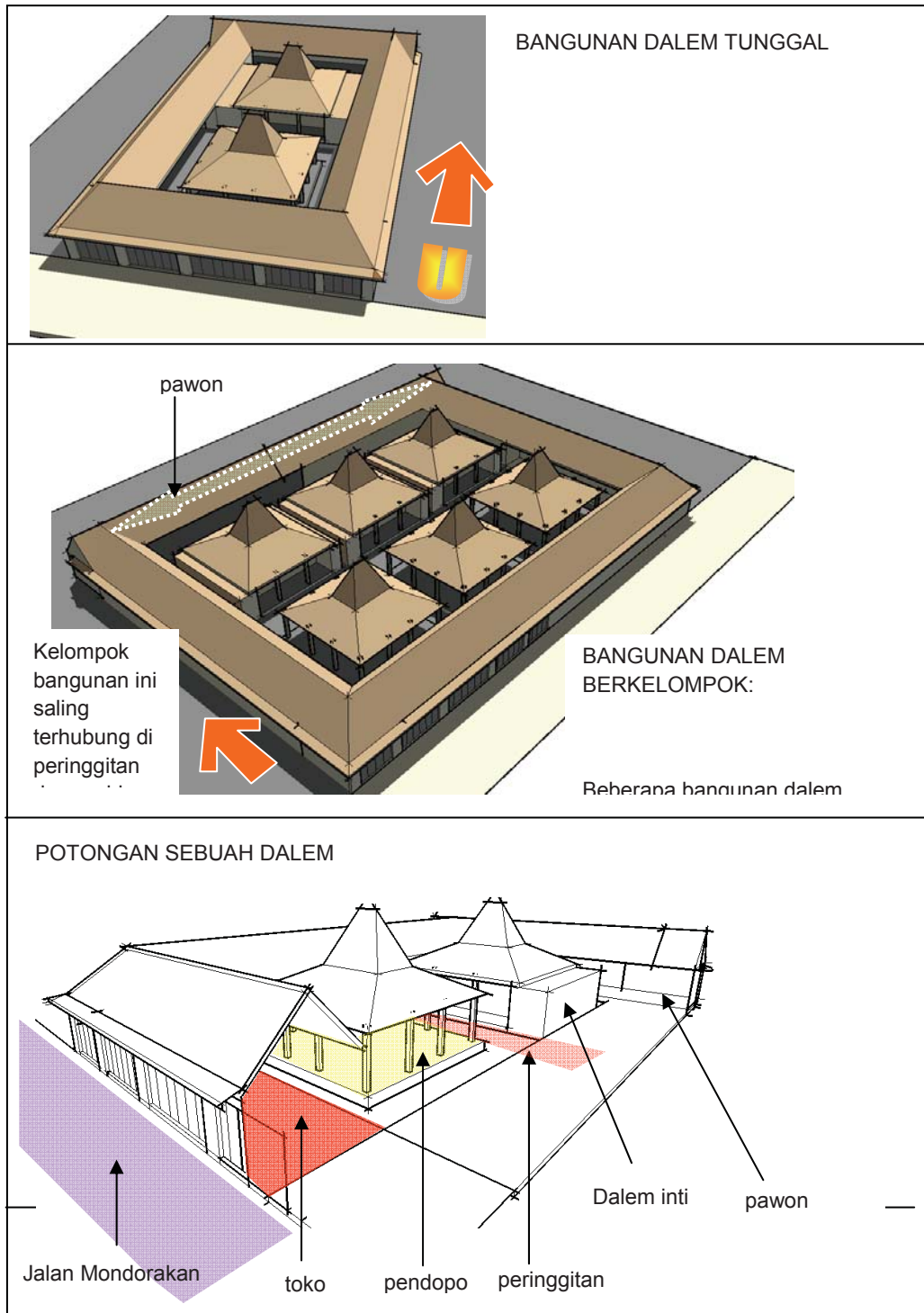
Fasade bangunan yang memberikan identitas Kawasan Kotagede adalah fasade bangunan lama, yang terbagi dalam beberapa kepemilikan. Dari bangunan dalam yang masih bertahan di Jalan Mondorakan dapat dibagi berdasarkan tata masanya, yakni:

1. Bangunan dalam tunggal
2. Bangunan dalam kelompok

Bangunan dalam tunggal merupakan sebuah bangunan Jawa lengkap yang berdiri sendiri pada satu buah persil. Bangunan ini mempunyai bangunan inti dan pendopo yang dikelilingi oleh masa bangunan samping (*gandok*), sedangkan bangunan di muka biasanya berfungsi sebagai toko. Bangunan dalam berkelompok adalah kelompok beberapa bangunan dalam yang dibangun pada sebuah persil. Biasanya kelompok bangunan ini milik sebuah keluarga besar. Lengkap tidaknya jenis ruang dalam dalam ini sangat tergantung dari luasan lahan atau kemampuan pemiliknya. Deretan rumah sebuah keluarga besar ini biasanya dihubungkan oleh pintu yang terletak pada bagian *gadri* dan *peringgitan*.



Gambar 2. Orientasi Bangunan Dalam di Jalan Mondorakan



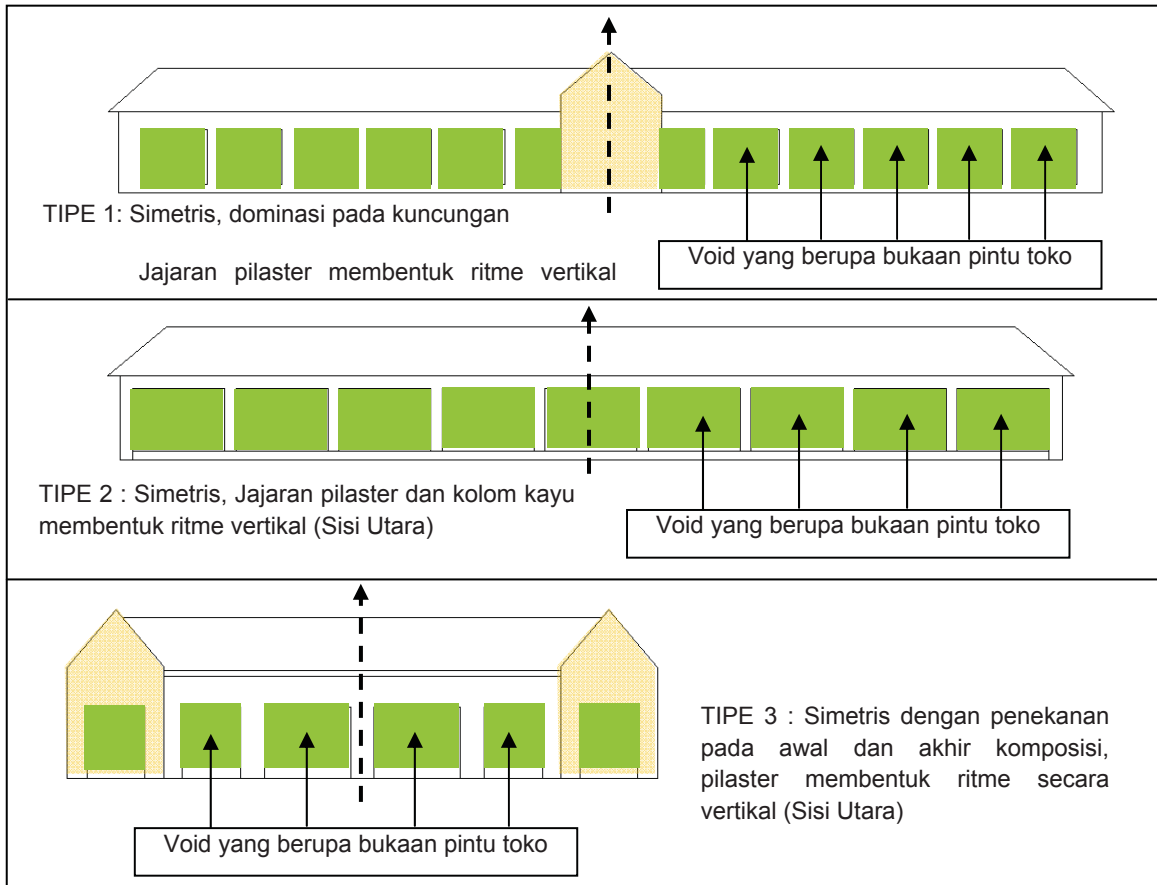
**Gambar 3.** Konsep Bangunan Dalem Tunggal dan Bangunan Dalem Berkelompok

### 5.1. Wujud Fasade Bangunan Dalem

Fasade sisi bangunan dalem sisi utara Jalan Mondorakan terbentuk oleh ketinggian bangunan dan bentuk atap kios. Secara umum bangunan kios merupakan bangunan memanjang dengan atap sejajar dengan jalan. Bentuk ini dilengkapi dengan kuncungan

yang memotong komposisi. Apabila disederhanakan, komposisi fasade yang terbentuk dari tatanan tersebut adalah:

1. Tipe 1 . Fasade dengan kuncungan di tengah.
2. Tipe 2 . Fasade tanpa kuncungan
3. Tipe 3. Fasade dengan kuncungan di samping kiri dan kanan.

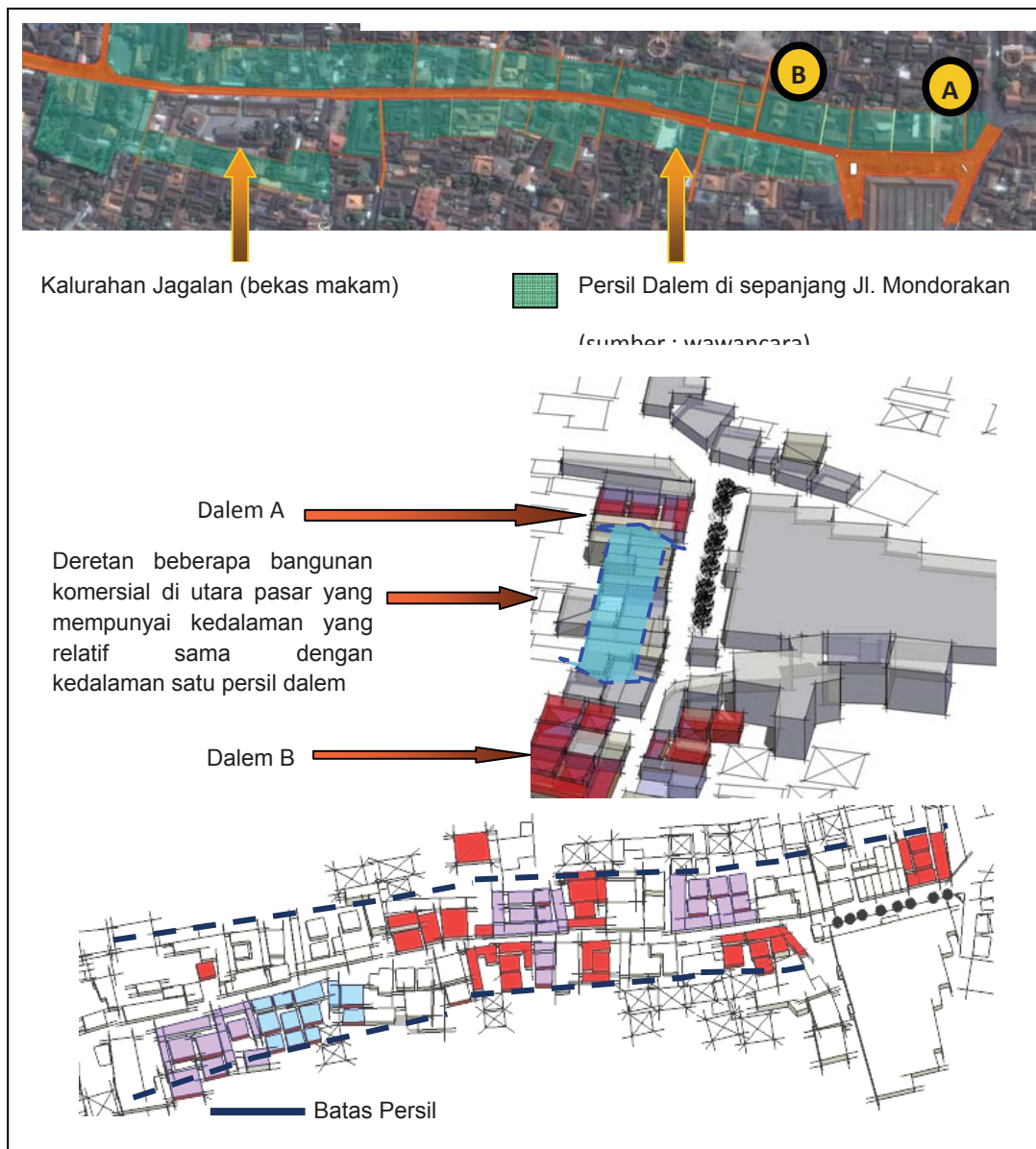


Gambar 4. Penyederhanaan Wujud Fasade Bangunan Dalem Utara

## 5.2. Persil Bangunan Dalem di Jalan Mondorakan

Pada mulanya deretan persil di Jalan Mondorakan merupakan deretan persil bangunan dalem. Hal ini diperjelas dengan jarak kedalaman persil deret pertama baik di sisi utara maupun selatan jalan menunjukkan kedalaman yang hampir sama. Konsep jalan rukunan yang membelah persil-persil tersebut juga ditemukan pada beberapa persil yang masih asli. Beberapa persil juga didapati sudah terbagi pada garis yang menindih jalan rukunan tersebut, yang menandakan proses bagi waris pada masa lalu.





**Gambar 5.** Kesegarisan Persil Bangunan Dalem di Tepi Jalan Mondorakan

### 5.3. Gang Sebagai Pemisah Persil

Jalur-jalur gang yang berhubungan langsung dengan jalan Mondorakan diharapkan mampu memberikan petunjuk tentang batas-batas persil bangunan Dalem. Jalur sirkulasi ini menghubungkan antara jalan Mondorakan dengan jalan rukunan yang membelah sekelompok bangunan dalem. Kelompok dalem ini biasanya saling terhubung pada bagian gadri, perpanjangan peringgitan yang kemudian menjadi jalan rukunan. Kelompok bangunan Dalem ini juga dikelilingi oleh gang di sisi luarnya.

Mengacu pada apa yang diungkapkan Rossi, 1986, bahwa artefak kota yang mempunyai nilai permanensi tinggi adalah ruang sirkulasi, maka pencermatan letak gang-gang yang ada menjadi hal yang sangat penting. Gang ini akan tetap eksis walaupun bangunan rumah tinggal di sisi kiri maupun kanannya terus berubah. Dengan demikian kehadiran sebuah

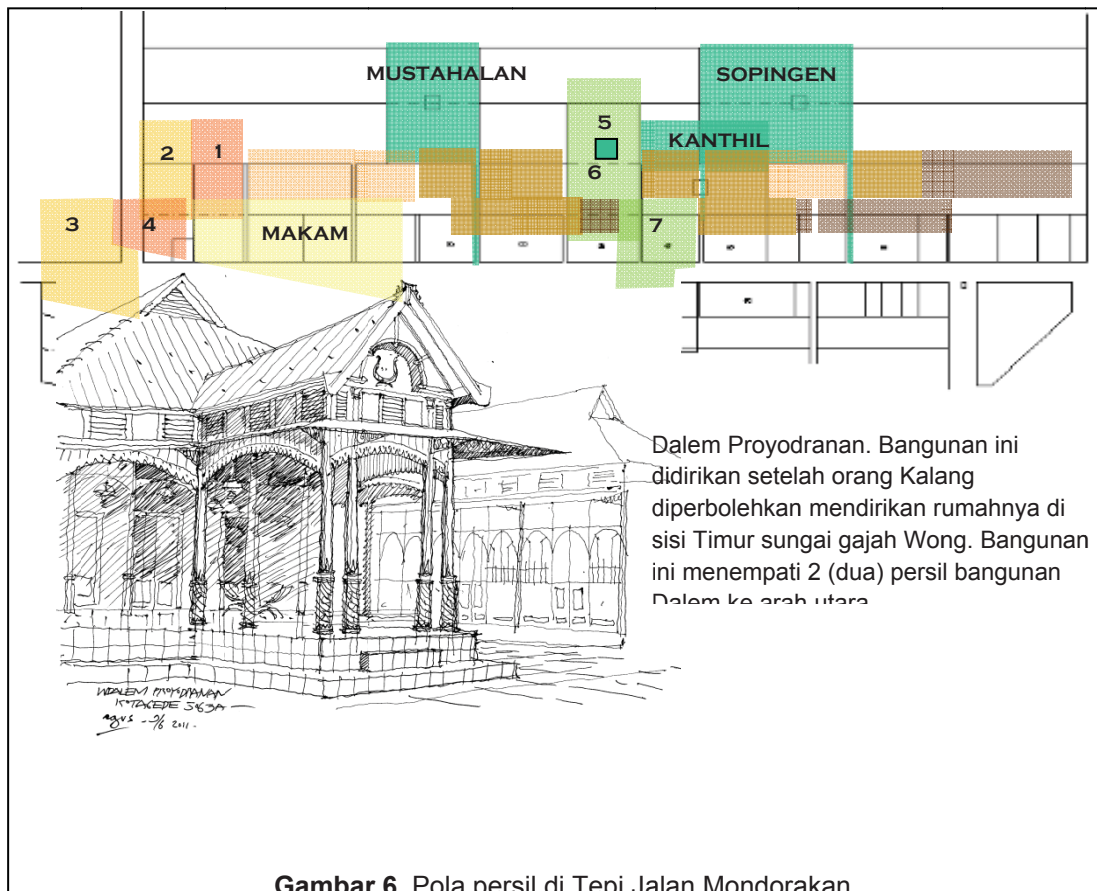
gang di Kotagede merupakan suatu petunjuk penting adanya pemisahan persil sebuah Dalem.

Apabila gang-gang tersebut dipetakan dalam deretan fasade di Jalan Mondorakan, maka dapat diperoleh beberapa petunjuk yang menyatakan kemungkinan lebar fasade sebuah atau sekelompok Dalem. Hal ini diperkuat dengan penuturan yang dikemukakan oleh narasumber mengenai status kepemilikan tanah oleh beberapa saudagar di masa lalu.

Lebar sebuah bangunan dalem sangat beragam. Persil sebuah bangunan Dalem tunggal biasanya memiliki lebar total antara 15 – 30 m, sedangkan lebar persil sebuah bangunan dalem berkelompok berkisar antara 33 – 50 m. Namun demikian lebar sebuah pendopo dan dalem inti pada dalem tunggal dan dalem berkelompok berkisar antara 8-9 m, sangat tergantung dari ukuran *kilanan* pemilik bangunan tersebut.

Apabila posisi gang yang ada di jalan Mondorakan disederhanakan (gambar 6), akan terlihat dengan jelas pola persil bangunan dalem dengan kedalaman yang sama. Penggabungan beberapa persil dalem juga sudah terjadi sejak lama. Sebagai contoh, bangunan rumah Kalang Proyodranan memakai 2 persil ke arah dalam.

Tiga dalem ageng yang ada di jalan Mondorakan ini mempunyai kelipatan unit yang sama. Dalem Mustahalan dan Dalem Sopingan juga mempunyai kedalaman 2 (dua) buah Dalem, sedangkan Dalem Kanthil mempunyai kedalaman sebuah Dalem.



Gambar 6. Pola persil di Tepi Jalan Mondorakan

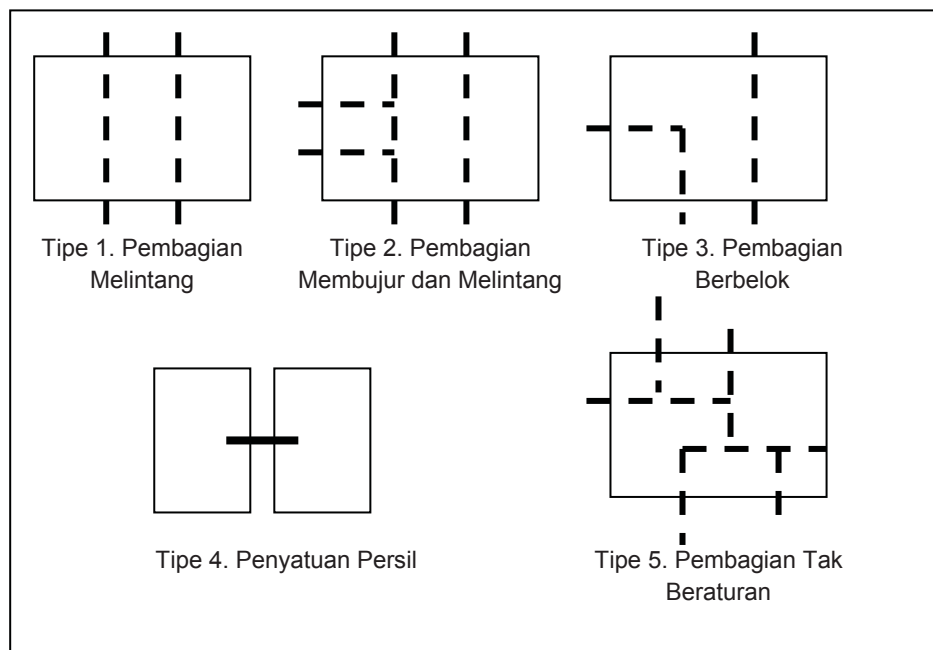
#### 5.4. Perubahan Persil di Mondorakan

Perubahan persil bangunan Dalem yang terjadi di Jalan Mondorakan apabila dicermati dari bentuk perubahannya mempunyai 5 tipe perubahan. Tipe perubahan tersebut adalah : (1) Pembagian melintang, (2) Kombinasi membujur dan melintang, (3) Pembagian berbelok, (4) Penyatuan persil, (5) Pembagian tidak beraturan.

Perubahan persil tersebut biasanya segera diikuti dengan beberapa penyesuaian agar setiap persil dapat memenuhi fungsi baru yang utuh, entah sebagai tempat tinggal maupun sebagai fasilitas komersial. Penyesuaian-penyesuaian ini pada gilirannya akan mengubah karakter fasade dalam yang sebelumnya merupakan kekuatan tampilan ruang jalan di Mondorakan ini. perubahan ini sangat jelas terjadi pada titik amatan yang terletak di sisi utara pasar Kotagede. Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) persil bangunan dalam. Semenjak sebelum tahun 1950, dalam A sudah terpecah menjadi dua bagian, bangunan dalam B menjadi sebuah ruko (1930an), bangunan dalam C terpecah menjadi 3 bagian. Dari waktu ke waktu perubahan wajah bangunan dalam tersebut mengikuti perubahan fungsi yang dilakukan pada persil tersebut.

Perubahan fasade dipercepat dengan tekanan alam, yakni gempa bumi 26 Mei 2006. Beberapa waktu sesudah gempa, para pemilik bangunan segera membangun persil mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagian persil dalam B yang pada mulanya sudah berupa rumah toko (ruko) berubah menjadi 6 (enam) bangunan ruko kecil sesuai persil masing-masing. Perubahan tampilan fasade masing-masing ruko tidak melanjutkan karakter bangunan Dalam yang sebelumnya telah ada, namun sesuai dengan ide masing-masing pemilik bangunan.

Perubahan kepemilikan tidak selalu diikuti dengan perubahan fasade. Hal ini terjadi pada satu titik amatan, yakni Toko Mundur.



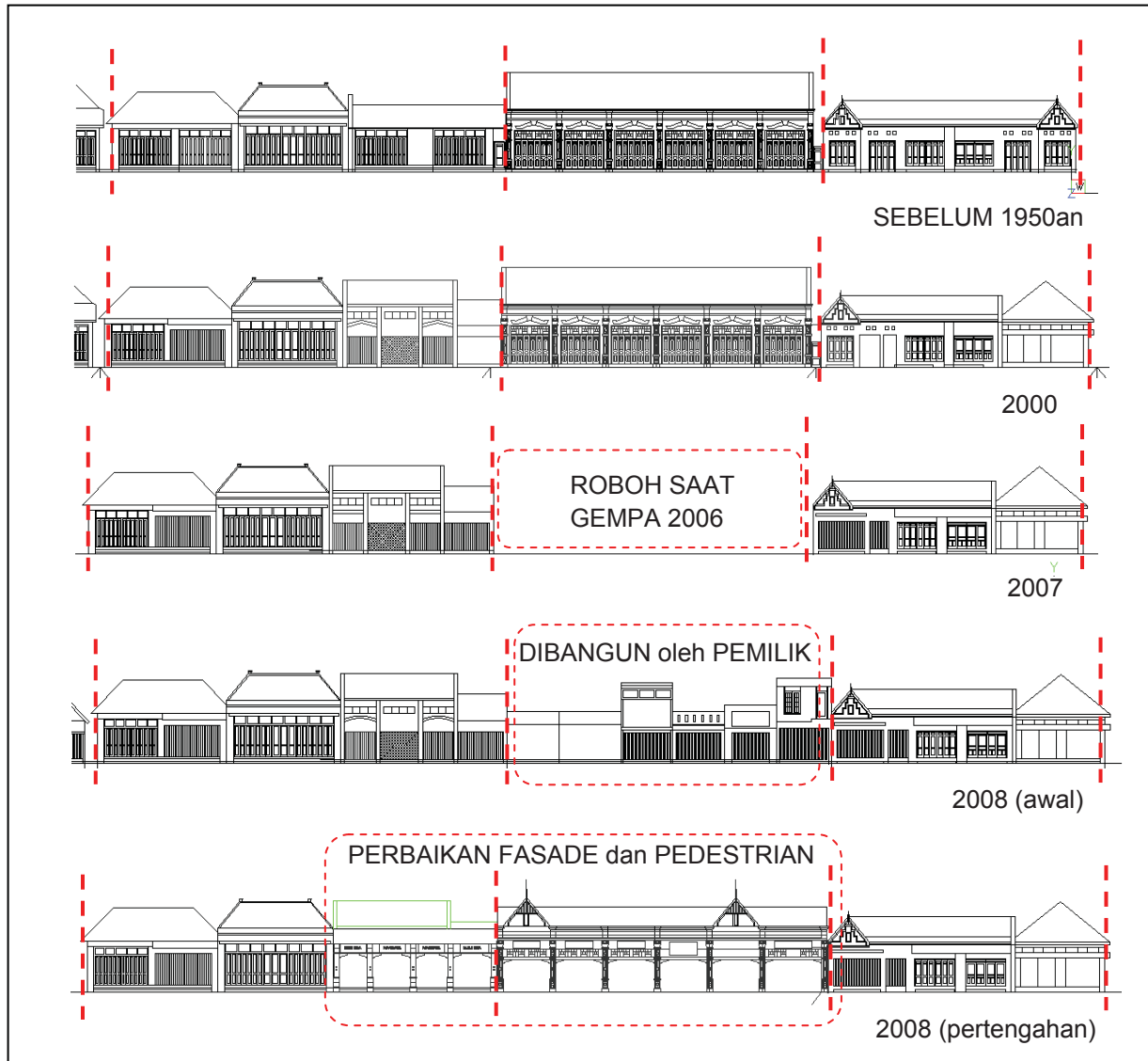
**Gambar 7.** Tipe Perubahan Persil di Tepi Jalan Mondorakan

Kajian terhadap pola perubahan fasade akibat perubahan kepemilikan persil di Jalan Mondorakan menemukan adanya 6 tipe perubahan, yakni 1) Tidak berubah, 2) Berubah Sebagian Selaras, 3) Berubah Seluruhnya Selaras, 4) Berubah Sebagian Tidak Selaras, 5) Berubah Banyak Tidak selaras, 6) Berubah Total Tidak Selaras.

### **Perubahan Fasade Yang Disesuaikan dengan Karakter Fasade di Jalan Mondorakan**

Pada pertengahan tahun 2008, pihak Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan kanthil, sebuah yayasan yang pada saat itu sangat aktif dalam upaya penyelamatan bangunan bersejarah di Kotagede melakukan suatu tindakan yang sangat positif. Berangkat dari kajian bahwa karakter fasade tiap bangunan dalam sudah semestinya

tetap bertahan, maka dilakukan beberapa upaya perbaikan pada titik bangunan persil Dalam di depan pasar Kotagede. Perbaikan ini dilakukan pada persil bangunan dalam B dan C (gambar 8 )



Gambar 8. Perubahan Fasade Bangunan Dalam

## 6. KESIMPULAN

1. Pola perubahan persil yang ada di Jalan Mondorakan ini dapat di bedakan menjadi 5 tipe perubahan. Tipe perubahan tersebut adalah : 1) Pembagian melintang, 2) Kombinasi membujur dan melintang, 3) Pembagian berbelok, 4) Penyatuan persil, 5) Pembagian tidak beraturan.
2. Perubahan kepemilikan persil tersebut ternyata tidak selalu menjadi pendorong perubahan fasade (satu kasus), dan pola perubahan yang terjadi ada 6 tipe, yakni 1) Tidak berubah, 2) Berubah Sebagian Selaras, 3) Berubah Seluruhnya Selaras, 4) Berubah Sebagian Tidak Selaras, 5) Berubah Banyak Tidak selaras, 6) Berubah Total Tidak Selaras.

3. Dukungan pemerintah dan yayasan yang peduli tentang pelestarian keunikan kawasan sangat bersejarah sangat penting untuk terwujudnya suatu keberlanjutan identitas kawasan

## 7. DAFTAR PUSTAKA

1. Angkatan Muda Muhammadiyah Kotagede, 2008, *"Brosur No 47 Tahun XLVII/1429-2008"*, Kotagede, Yogyakarta
2. Bentley, Ian., Alcock, Alan., Murrain, Paul., Mc Glynn, Sue., dan Smith, Graham, 1985, *"Responsive Environments"*, Butterworth-Heinemann Ltd, London
3. Lynch, Kevin, 1972, *"What time is This Place"*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
4. Lynch, Kevin, 1977, *"Managing the Sense of a Region"*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
5. Lynch, Kevin, 1981, *"Good City Form"*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
6. Moughtin, Cliff, 1992, *"Urban Design: Street and Square"*, Butterworth-Heinemann Ltd, Linacre House, Jordan Hill, Oxford
7. Moughtin, Cliff, 1995, *"Urban Design: Ornament and Decoration"*, Butterworth-Heinemann Ltd, Linacre House, Jordan Hill, Oxford
8. Martokusumo, Widjaja, Ir, Ing, Dr, 2005, *"Konservasi Lingkungan Perkotaan"*, Penerbit ITB, Bandung
9. Indartoro, Laurentius, 2006, *Kesinambungan dan Perubahan Peran Jalan Rukunan di Kampung Kotagede Yogyakarta : Masa Tahun 1930 – 1993*, Tesis S2 Arsitektur Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
10. Rossi, Aldo, 1982, *"The Architecture of the City"*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
11. Tim Peneliti Lembaga Studi Jawa, 1997, *"Kotagede: Pesona dan Dinamika Sejarahnya"*, Penerbit Lembaga Studi Jawa, Yogyakarta
12. Soekiman, Djoko, 1992, *"KOTAGEDE"*, *Proyek Pengembangan Media Kebudayaan*, Jakarta

## MENUJU ARSITEKTUR BALI YANG BERKELANJUTAN

**Roni Sugiarto**

Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Universitas Katolik Parahayangan

Ciumbuleuit 94 Bandung, Indonesia

[roni\\_sugiarto@yahoo.com](mailto:roni_sugiarto@yahoo.com)

### ABSTRAK

*Masyarakat tradisional Bali merupakan masyarakat yang harmonis, selalu memadukan antara kebahagiaan lahir dan batin dalam skala dan niskala. Setiap aktivitas dilakukan dalam wadah kemagisan simbolik yang padat makna natur dan kultur. Demikian pula halnya dengan arsitektur tradisional Bali telah lama dikenal memiliki keseimbangan antara citra dan guna yang merepresentasikan keseimbangan Tuhan, manusia dan alam.*

*Setelah perang dunia II berakhir, banyak negara memerdekan diri. Indonesia termasuk salah satu negara tersebut, dengan Bali sebagai bagian dari nusantara bergabung di dalamnya. Pembangunan nasional dilakukan, masyarakatpun mengalami perubahan. Disatu pihak semakin makmur dan pandai namun dilain pihak mulai mengalami perubahan pikir. Konsep pariwisata budaya semakin marak dan makin meledak-ledak,. Terjadi silang budaya yang makin rumit ditelusuri, dan pada akhirnya masyarakat Bali mengalami konflik batin. Sementara kapitalisme semakin merajalela, kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali yang super religius mulai diterjang sekularisme dan materialisme.*

*Dunia arsitektur Bali pasca tradisionalpun mengalam berbagai perubahan. Terjadi pluralism arsitektur dari modernism hingga postmodernisme yang merupakan cerminan dari keadaan transisioner pola pola pikir masyarakat dan budayanya. Yang merisaukan adalah arsitektur tidak mampu membentuk manusia seutuhnya, sebaliknya memberikan pembenaran keadaan kebudayaan yang seperti itu.*

*Masyarakat dan arsitektur Bali memerlukan sebuah kontrak sosial yang baru, dan mampu memberikan keseimbangan antara budaya, tradisi, dan tuntutan secara positif dan berkelanjutan. Studi ini akan memberikan deskripsi tentang keadaan arsitektur pada masa transisi dan sekaligus memberikan suatu strategi yang berkelanjutan bagi perkembangan arsitektur Bali di masa ini dan masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *Arsitektur Bali, strategi keberlanjutan, tradisi budaya.*

### 1. Sustainable Architecture ; Harmonisasi Budaya, Ekonomi, Lingkungan

"... ada 3 alasan bagi kita untuk belajar dari masa silam pada saat menciptakan arsitektur baru. Alasan pertama sudah pasti pragmatis. Masalah dasar dari arsitektur terbatas jumlahnya dan pada prinsipnya tetap sama sepanjang sejarahnya... seperti halnya peralatan tradisional para tukang/pengrajin, pemecahan-pemecahannya telah demikian disederhanakan dan disempurnakannya sehingga yang tersisa hanyalah penghalusan (*refinement*) saja... Alasan ke dua dijabarkan dari yang pertama, tapi lebih menyentuh aspek komunikatif dari arsitektur. Pemecahan-pemecahan dasar yang telah dilakukan selama ini... sudah merupakan yang paling baik karena yang telah dilakukan selama ini ... sudah merupakan yang paling baik karena telah diulang terus-menerus, merupakan yang paling bisa dimengerti. Itu berarti bahwa kreatifitas dan inovasi ... berada dalam aturan-aturan yang hanya dapat diefektifkan saja aturan-aturan dimana arsitektur masa kini dijabarkan secara logis dan arsitektur masa lampau, mempertahankan sifat independen dan permanennya dalam hubungan dialektis dengan pelbagai pengaruh luar .... Dalam konteks masa kini bahasa masa lampau mendapatkan arti dan fungsi baru. Alasan ketiga sangat sederhana dan sangat kasar kedengarannya yaitu "kita semuanya mempunyai nostalgia masa silam" (Vittorio Magnago Lampugnani, *the Origin of Truth*).

Uraian di atas jelas sekali hal yang paling diperlukan dalam pengembangan kebudayaan dan arsitektur Bali adalah adanya suatu system kontrol yang mampu menciptakan keseimbangan antara budaya, ekonomi dan lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Bali saja melainkan diseluruh dunia, kecepatan kemajuan dalam bidang pengetahuan dan ekonomi mengakibatkan krisis identitas dalam masyarakat dunia.

Pada tahun 1992, 172 negara dan 108 kepala negara berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil dalam rangka KTT Bumi (*Earth Summit*) yang memiliki agenda global untuk mempromosikan suatu rencana pembangunan yang berkelanjutan<sup>24</sup>. Salah satu dampaknya adalah kesepakatan asosiasi arsitek se-dunia dalam konferensi UIA di Chicago pada tahun 1993 tentang masa depan yang berkelanjutan (*sustainable future*) yang membangkitkan perancangan arsitektur yang berwawasan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

Di Bali rencana ini ditindaklanjuti oleh sekelompok professor dari universitas Waterloo Amerika dan UGM Jogjakarta yang bergabung dalam BSDP (*Bali Sustainable Development Project*) (Martopo, 1995:v-vi, foreword). Yang menjadi tujuan BSDP adalah untuk menciptakan keseimbangan antara budaya, ekonomi dan lingkungan hidup, seperti yang dituliskan di bawah ini;

".... Sustainable development 'must be concerned not only with the balance between the demand for and supply of resources for good life, but with the culturally based balances within the heritage of Bali.

1. *The continuity of natural resources and production*
2. *The continuity of culture and the balances within culture*
3. *Development as process that enhances the quality of life.*

Bagaimana penerapannya dalam menanggapi permasalahan arsitektur Bali? Pemikiran harus diarahkan untuk "membangun Bali" bukan "membangun di Bali". Perbedaan satu kata ini menimbulkan perbedaan makna yang sangat dalam. "Membangun Bali" berarti membangun masyarakat dan alam Bali melalui arsitektur dan erat kaitannya dengan *dharma* (segala sesuatu yang mendukung untuk mencapai kebenaran dan kebaikan), sedangkan "membangun di Bali" berarti arsitektur ditempatkan pada posisi tidak berkaitan langsung dengan masyarakatnya, melainkan berhubungan dengan kepentingan golongan tertentu yang dilakukan di Bali. Hal ini adalah hal yang berat namun sekaligus tidak berat, tidak berat sebab pada dasarnya semua ditentukan hati naruni masyarakat sendiri termasuk para arsitek, sebaliknya sangat berat sebab melakukan apa yang dikehendaki hati nurani pada zaman kapitalisme ekonomi dan pariwisata di Bali sangat sulit.

Bagaimana strategi pencapaian arsitektur yang berkelanjutan di Bali? Jawabannya akan diarahkan pada usaha kontrol/penyelarasan antara budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam bidang arsitektur.

## 2. Tradisi Statis atau Dinamis?

Apa yang akan kita pertahankan pada titik transisi? Apakah sebuah tradisi statis yang pasti akan "mati" bila tidak mampu beradaptasi dengan zaman atau tradisi dinamis, proses peralihan yang harus digali maknanya?

Dalam usaha menuju keselarasan pada masa transisi, tradisi dibutuhkan sebagai norma penyaring yang bersifat universal agar masyarakat tidak terjerumus pada pendangkalan makna yang menyesatkan. Dalam dunia arsitektur ini berarti melakukan refleksi pada arsitektur tradisional Bali. Umumnya akan menjadi dua jawaban; (1) hal tersebut tidak mungkin sebab arsitektur tradisional tidak mampu menjawab kebutuhan dan selera masyarakat dan (2) hal tersebut tidak mungkin sebab struktur masyarakat sudah berubah.

---

<sup>24</sup> Konsep *Sustainable Development* pertama kali dicetuskan oleh komisi yang diketuai oleh seorang wanita Swedia yaitu Brundlant untuk mengatasi pemerkosaan alam akibat pembangunan secara semena-mena.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, perlu diketahui 2 hal yang membawa masyarakat dan atau arsitek berpendapat seperti itu.

1. Refleksi pada arsitektur tradisional dilakukan dengan pengulangan bentuk, bukan mencari esensi dan keunikan arsitektur tradisional secara utuh, untuk kemudian diejawantahkan kembali dalam wujud baru yang menyiratkan kesan kekiniaan dan modernitas (Budiharjo, 1997c:15). Walaupun ada usaha memberikan kesan kekiniaan dalam arsitektur tradisional, masih berupa budaya dadakan (*instant culture*) sehingga tetap tidak memuaskan masyarakat.
2. "Arsitektur adalah mode" sehingga arsitek mengeksploitasi kebodohan dan keterbelakangan selera masyarakat dengan mode-mode mutakhir sehingga arsitektur tradisional terlihat tertinggal zaman dan masyarakat tidak menyadari bahwa arsitektur mode yang tidak berakar pada budaya adalah pemiskinan budaya tersebut.

Melihat kecenderungan di atas tampak jelas bahwa tradisi dianggap statis, tidak dinamis. Tradisi pada dasarnya berarti perlimpahan pada generasi berikutnya Roxana Waterson dalam *the Living House* (1990:234), menuliskan tradisi dari segi etimologi sebagai berikut;

".... its root being the Latin traditionem, from trader-to hand over of deliver. The Latin noun had the senses of (i) delivery, (ii) handling down knowledge, (iii) passing on a doctrine, (iv) surrender of betrayal.

Yang harus dipertanyakan adalah haruskah tradisi diwariskan tanpa perubahan sama sekali? Pada masa tradisional jelas sekali tradisi diwariskan begitu saja dengan hanya sedikit perubahan dan variasi.

Konsep arsitektur dilakukan berulang-ulang dan diresapi masyarakatnya sekana ratusan tahun, karena kebudayaannya sendiri tidak menuntut perubahan pada pelimpahannya. Namun dengan percepatan perubahan budaya oada masa kini (yang dikatakan oleh van peursen "*cultur is stroomversnelling*" atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "kebudayaan yang sedang terkena banjir bandang"), tampaknya pemikiran tradisi harus dikoreksi sebagai sesuatu yang dinamis dengan gerak dinamis masyarakatnya.

Gerak dinamis dalam masyarakat Bali adalah penyesuaian dengan *Deca-Kala-Patra* (waktu-tempat-dan suasana). Waktu dan suasana (*kala* dan *patra*), yang ada di Bali (*deca*) sekarang berbeda dengan saat zaman tradisional sehingga tuntutan dinamisasi nilai tradisi adalah wajar dan harus dilakukan.

Menurut Koentjaraningrat bahwa dalam pergeseran budaya harus di bedakan dengan jelas masalah mengenai unsure-unsur kebudayaan apa saja yang mudah diganti atau diubah, dan unsure-unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah. Tradisi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) tradisi bentuk (penurunan artefak budaya) dan (2) tradisi dalam arti makna (umumnya penurunan adat istirahat, kepercayaan dan religi. Tradisi bentuk adalah sesuatu yang berhubungan dengan dunia material (non-spiritual) sehingga lebih mudah berubah dibandingkan dengan tradii dalam arti makna. Dengan membandingkan arsitektur tradisional dengan arsitektur yang tumbuh pada era pasca-tradisional dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk tradisional sudah berubah jauh dalam "arsitektur *cilak* atau *arsitektur style Bali*". Bukankah makna dalam arsitektur Bali juga sudah berubah dan menjadi sekuler? Dalam arsitektur kecenderungannya memang demikian, namun hal itu harus dilihat sebagai cerminan penyelewengan arsitektur dari masyarakat Bali yang sebagian besar masih religius pada arsitektur yang semata-mata fungsionalis. Seharusnya makna-makna yang tidak mudah berubah tersebut (karena sudah menjadi tradisi statis namun mampu hidup dalam kedinamisan masyarakat) harus dianggap sebagai suatu hal yang positif untuk dikembangkan dalam usaha kontrol (*contra-roll*) arsitektur terhadap perkembangan negative yang terjadi dalam masyarakat.

### 3. Universalisme Nilai Tradisi

Dengan mengembalikan pertanyaan mengapa tradisi dijadikan orientasi dalam pengembangan arsitektur Bali, dapat direfleksikan dari strategi pengembangan budaya Bali



dalam transisi. Persoalan utama yang muncul dalam masa transisi adalah hilangnya komunikasi komunal arsitektur Bali dan berkembangnya kemajemukan dalam arsitektur sebagai cerminan keinginan masyarakat Bali untuk menikmati rasa kekinian, yang salah satu dampaknya adalah *visual chaos*. Pada modernisme di Bali, misalnya Bali Beach, ruko-ruko komunikasi yang ada adalah jenis komunikasi yang menjadikan manusia sebagai alat untuk menghidupi fungsi saja tanpa adanya suatu makna lain yang tersirat. Sedangkan perbaikan yang dilakukan juga tidak membawa suatu hasil yang lebih baik, sebab post-modernisme yang diangkat diterjemahkan ke dalam revisi kulit bangunan dengan memberi *lipstick* pada ruko-ruko tersebut. Seiring dengan itu muncul pula arsitektur mode dengan berbagai macam jenis arsitektur yang tidak berakar langsung pada kebudayaan Bali. Komunikasi yang terjadi terhalang, masyarakat tidak bisa mengapresiasi dengan baik karena terjadi reduksi makna dari arsitek sampai ke masyarakat. Maka tugas arsitektur sesuai dengan strategi kebudayaannya adalah untuk mengendalikan masyarakat dari gejala hilangnya komunikasi yang menjurus pada gejala individualisasi desain ke dalam suatu arsitektur yang kompak dan dimengerti secara komunal (untuk mengatasi ketidakharmonisan)

Kemajemukan di Bali adalah tantangan baru bagi perkembangan arsitektur Bali sebab masalah komunikasi menjadi lebih rumit lagi. Dengan melihat kecenderungan perkembangan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa tantangan untuk sebuah perkembangan yang dapat berkelanjutan adalah diperlukan sebuah pedoman yang semakin mendasar, tidak rumit, dan berlaku bagi semua orang; namun dilain pihak mampu menjawab disfungsi sosial dan *visual chaos* yang terjadi akibat arsitektur. Universalisme<sup>25</sup> nilai tradisi adalah sebuah jalan yang dapat membawa perkembangan yang berkelanjutan. Tradisi walaupun didasari oleh agama Hindu namun sudah tumbuh menjadi budaya, sehingga tradisi dapat tumbuh menjadi alat komunikasi universal seluruh masyarakat Bali (tak terbatas pada masyarakat Hindu Bali saja).

Yang menjadi permasalahan seperti apakah universalisme tradisi tersebut? Meliputi hal-hal apa saja? Tradisi yang digeneralkan adalah makna tradisi dan bukan bentuk-bentuk arsitektur tradisional yang sudah tidak mampu menjawab percepatan zaman. Universalisme bentuk arsitektur hanya akan membunuh tradisi itu sendiri sebab seiring terjadinya disfungsi baik pada bentuk maupun kebutuhan (Rapoport, 1982:47) dan seiring ketidakpuasan masyarakat, akan mengakibatkan 'pengasingan' yang membuat masyarakat terkurung antara nilai tradisi dan kebutuhan. "Pengasingan" tersebut diikuti kegagalan mencapai *ekuilibrium* dengan nilai yang baru yakni kebutuhan fungsional, sementara para arsitek memulai penjelajahannya sebagai "Columbus" daripada menjawab "pengasingan" itu dengan penggalan nilai tradisi. Di Bali, terjadi "pengasingan" pada bentuk-bentuk yang dirasakan tidak sesuai dengan *deca-kala-patra* masyarakat Bali masa kini. Jadi universalisme nilai tradisi ini harus dilakukan pada makna-makna dasarnya yang memang tidak pernah berubah. Dilain pihak tradisi memang tidak universal ketika agama masuk dalam bentuk konkrit (masyarakat Bali sekarang tidak homogen) misalnya masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk melakukan suatu upacara keagamaan dalam mendirikan rumah atau meresmikan rumah. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah merasionalkan konsep-konsep arsitektur tradisional Bali sebagai suatu kebiasaan budaya. Secara kasar dapat dirumuskan universalisme makna tradisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tri Hita Karana*<sup>26</sup> dalam segala bidang, tentunya konsep ini dapat direvisi dengan mengganti *Sang Hyang Widhi* dan *Tri Murti* dengan Tuhan yang Maha Kuasa, *Bhuana Alit* dengan membangun manusia seutuhnya dan *bhuwana agung* dapat diterjemahkan sebagai arsitektur yang berwawasan lingkungan.
2. Orientasi *Kaja-Kelod* dan *kangin-Kauh*

<sup>25</sup> Universalisme : melakukan usaha-usaha yang berlaku general bagi semua orang, untuk semua kasus

<sup>26</sup> *Tri Hita Karana* adalah landasan utama konsep keseimbangan dalam arsitektur Bali yang berlaku dari skala yang paling kecil hingga skala yang paling besar. Berasal dari bahasa sansekerta. *Tri* berarti tiga, *hita* berarti sejahtera dan *karana* berarti penyebab. Sehingga *tri hita karana* berarti tiga macam hal yang menyebabkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keharmonisan.

3. Tri Mandala (utama-madya-nista, hulu-teben)
4. Tri Loka (badan. Kepala, kaki)
5. Estetika yang didasarkan pada budaya Bali

Usaha pembudayaan secara universal ini tidak akan berjalan tanpa dipergunakan oleh usaha-usaha ke arah itu. Jalur-jalur apa sajakah yang dapat dipergunakan dalam mendukung usaha itu? Permasalahannya adalah universalisme nilai tradisi mungkin akan dipertanyakan apakah tidak mengarah pada suatu gejala monism seperti di zaman modernism? Untuk menjawab ini dapat dikembalikan pada tujuan masing-masing yang berbeda. Modernisme berusaha menemukan suatu hal yang umum, yang berlaku untuk semua orang dan dengan tegas menolak bahwa manusia memiliki "free-will" sedangkan universalisme nilai-nilai tradisi di Bali bertujuan untuk menemukan makna yang berlaku umum untuk menghindari *visual chaos* dan memberikan kebebasan bagi *free-will* masyarakat. Jadi universalisme nilai tradisi ini harus dikembangkan untuk memberikan keseimbangan bagi hasrat kekinian masyarakat Bali dalam hal desain maupun teknologi.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana mengembangkan arsitektur Bali tersebut dalam wacana kekinian. Eko Budihardjo mengatakan kreativitas dapat dicapai dengan usaha memberikan konteks kekinian pada tradisi lewat suatu transformasi bukan lewat *eclecticismus* (Atmadi, 1997:130). Dan apakah yang dimaksud dengan pendekatan transformasi tersebut? Antoniades dalam *poetic of space*, menjelaskan bahwa transformasi adalah suatu proses perubahan bentuk dimana bentuk mencapai tahap terakhir dalam merespon terhadap dinamika eksternal maupun internal. Terdapat 3 (tiga) strategi yang dilakukan dalam transformasi yaitu (1) strategi tradisional<sup>27</sup>, (2) strategi Pinjaman<sup>28</sup>, (3) Strategi De-konstruksi atau De-komposisi<sup>29</sup>.

Strategi pertama adalah strategi yang banyak digunakan di Bali seperti halnya arsitektur *style Bali* yang banyak berkembang di Bali. Munculnya komposisi ganjil dalam konfigurasi arsitektur Bali bak "perempuan mengenakan rok tapi berselendang dan bersanggul, serta memakai sepatu boot, mungkin akan terjawab adanya universalisme nilai tradisi yang memberikan dasar bagi perancangan. Tetapi apakah arsitektur Bali dalam keadaan yang oleh Richard Windstedt dikatakan "kurus kering"?

Strategi kedua dapat dikatakan dengan dua cara transformasi dari sebuah metafor wacana kekinian atau metafor yang dikembangkan dari nilai masa lalu yang belum tergalil. Strategi metafor ini dapat dikembangkan dengan melihat kecenderungan rasionalisasi agama yang ada di Bali dimana masyarakat Bali sekarang ini bukan hanya pelaku agama saja namun mulai bertindak sebagai pemikir agama. Hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah batu loncatan untuk mengembangkan arsitektur yang kreatif berdasarkan pendekatan *semiotic* dimana arsitektur dapat dipakai sebagai *signifier* dari filsafat-filsafat agama yang dikembangkan.

Dengan mendasarkan pada nilai universal tradisi, arsitek dituntut untuk mengembangkan kemampuan berdasarkan *morphologi* bahasa menjadi suatu bangunan baik itu rumah tinggal, bangunan umum yang bernapaskan religius kontemporer seperti hanya karya Le Corbusier, Notre Dame du Haut di Roschamps Prancis. Bagi masyarakat Bali yang tidak beragama Hindu pendekatan semiotik ini dapat menjadi lahat kreatif selain mendasarkan pada prinsip universalisme tradisi tadi.

<sup>27</sup> Strategi tradisional adalah evolusi secara progresif dari suatu tahap ke tahap penyesuaian dengan kendala eksternal (seperti tapak, pemandangan, orientasi, arah mata angin, criteria lingkungan) serta kendala internal (seperti fungsi, program ruang, struktur) serta kendala artistic (kemampuan, keinginan, sikap arsitek dalam memanipulasi bentuk sejalan dengan criteria pragmatic dan sikap arsitek terhadap budget bangunan)

<sup>28</sup> Strategi Pinjaman, Peluang meminjam berangkat dari seni melukis, patung, objek bebas, dan artefak lainnya, serta dengan meminjam sifat dua dan tiga dimensi dari suatu konsep yang terkait erat dengan interpretasi arsitek. Ini tentu dengan mengingat validasi dan kemungkinannya untuk diterapkan.

<sup>29</sup> Strategi de-konstruksi atau de-komposisi, strategi ini menganjurkan suatu proses dimana arsitek mengambil secara keseluruhan dari suatu bagian agar dapat menemukan cara-cara baru untuk mengkombinasikan bagian-bagian serta mencoba kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh keseluruhan baru dari tatanan baru dengan strategi struktur maupun komposisi yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya.



**Gambar 1.** Regionalism Gereja  
Kepundung, Bali - Denpasar

Di Bali sudah banyak contoh-contoh positif. Gereja, Masjid, atau Vihara yang mampu menterjemahkan filsafat religi ke dalam suatu desain yang kompak sehingga mampu memperkaya arsitektur Bali.

Tentunya pengembangan ini tidak hanya terbatas pada bangunan ibadah saja, sebab masyarakat Bali adalah contoh positif sebuah pribadi yang selalu mencerminkan setiap tindakan pada prinsip religi. Bukankah hidup dalam alam pikir religi adalah sesuatu yang positif? Bukankah ini sebuah

pemikiran yang berkelanjutan bagi agama dan kekayaan budaya religi Bali. Seperti Einstein ucapkan, "ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh"

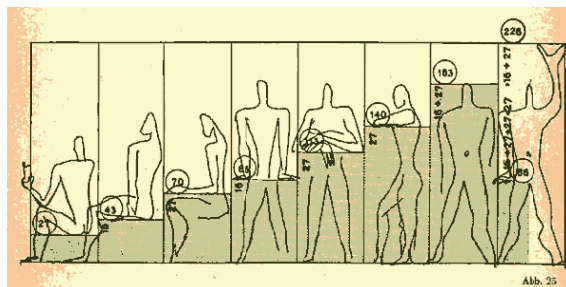
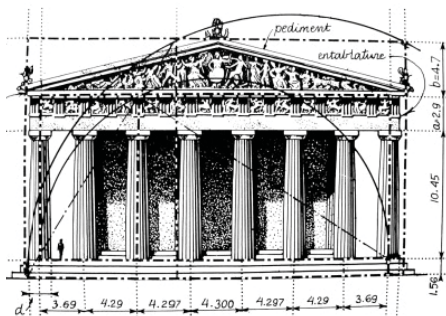


**Gambar2.** Niti Mandala Renon,  
transformasi dari tattwa agama  
yang dipinjam dari arsitektur candi  
lengkap dengan settingnya  
sebagai public space yang hidup  
dan inspiratif

Lalu bagaimana mengembangkan arsitektur masa lalu dalam konteks kekinian? Hal ini mungkin lebih sulit dan kasuistik, namun tidak menutup kemungkinan menjadi sangat relevan dengan keadaan masa kini.

Hal ini berkali-kali ditekankan oleh *undagi* A.A Artha bahwa arsitektur tradisional Bali jangan begitu saja dilupakan dan tidak dipelajari lagi sebab banyak inspirasinya. Beliau memberikan sebuah contoh tentang penerapan *gegulak*<sup>30</sup> yang selama ini dianggap kuno sebagai system proporsi masa depan dan mampu membangun manusia Bali. Namun, arsitek dan masyarakat cenderung menyukai teori-teori proporsi *golden section*, teori-teori *renaissance*, teori modularnya Le Corbu yang distandarkan oleh Neufert, mempelajari sistem modular dari budaya bangsa lain seperti *ken* (dari Jepang) atau justru teori-teori tertentu dan hanya berpangkal pada keindahan estetik perancangannya saja yang bersifat subjektif. *Golden section* adalah sistem proporsi orang Yunani yang didasarkan pada tubuh manusia seperti halnya *gegulak* di Bali yang didasari oleh perhitungan rasio matematis.

Sistem-sistem matematika dari proporsi berasal dari konsep Phytgoras dari semua angka dan percaya bahwa hubungan angka-angka tertentu menghasilkan struktur alam yang harmonis. Mempercayai bahwa keduanya manusia dan kuil-kuil seharusnya menjadi milik kekukasaan alam yang lebih tinggi... (Ching, 1993:300)



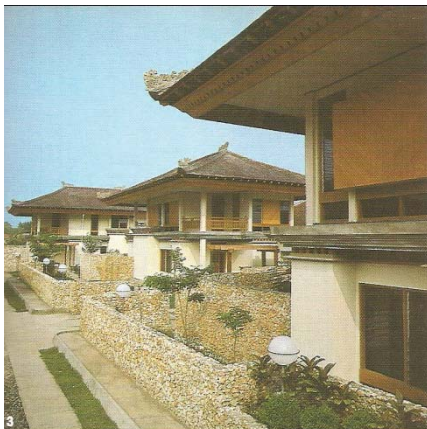
**Gambar 3 dan 4.** Golden section dan Le Corbusier Modular

<sup>30</sup> Sistem *gegulak* sebagai sistem proporsi adalah sistem ukuran dasar bangunan yang tidak berdasarkan satuan meterik namun dengan menggunakan anggota-anggota tubuh pemilik bangunan.

Sekilas terlihat bahwa teori-teori proporsi *golden section*, modular Le Corbu, sampai Ken diawali oleh rasio matematika, demikian pula dalam sistem *gegulak* di Bali. Namun ada perbedaan besar pada konsep *gegulak* dengan konsep proporsi yang lain yaitu pada citra manusianya. Konsep-konsep proporsi dan keindahan cenderung terjebak dalam rasio matematikanya dan lupa untuk memanusiakan rasio matematika tersebut. Pada sistem *gegulak* di Bali rasio matematika, perbandingan dimanusiakan dengan mengambil citra manusia dari ukuran jari, lengan, tangan, kaki dll. Hal ini menyebabkan arsitektur Bali disebut perpanjangan dari manusia, bukan rasionalisasi estetis saja.

Lebih lanjut ternyata makna dari sistem *gegulak* ini adalah masalah psikologi manusia dan berhubungan erat dengan kehidupan. Pada masa transisi yang sarat dengan permasalahan hidup, bangunan memegang peranan penting dalam menciptakan suasana ruang dan kenyamanan pemakai. Seiring dengan percepatan zaman manusia membutuhkan sebuah nilai keharmonisan dalam hidupnya dan masalah psikologi ini nampak sudah dipikirkan betul oleh para *undagi* yang membuat konsep ini. Sistem *gegulak* ini masih banyak harapan pengembangan menuju sebuah psikologi desain yang memberikan tempat bagi kehidupan manusia pada tempat yang tinggi. Permasalahannya mungkin bagaimana menyesuaikan kemajuan teknologi untuk mendukung konsep ini, misalnya dengan mengumpulkan teori proporsinya dan menggunakan standar seperti centimeter, meter, dan masing-masing ukuran musti, rai, depa dll untuk membantu memudahkan konversi dan pelaksanaan. Magnago Lempugnani menyebutkan dengan demikian kemajuan teknologi bukan untuk mengubur tradisi tetapi menghaluskan tradisi tersebut. Robi Sularto mengungkapkan keoptimisannya terhadap konsep *gegulak* ini:

"hal ini mengagumkan dalam sistem *gegulak* adalah ketika saya mencobanya untuk segala macam proporsi bahkan dengan berbagai macam kelipatan, tanpa diragukan keindahan proporsinya masih tampak jelas..."



Dalam masyarakat sekarang terjadi pula sebuah trend transformasi arsitektur tradisional Bali secara sederhana yaitu menempatkan rumah tradisional di lantai atas untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan. Bukti ini secara tersirat menunjukkan bahwa arsitektur tradisional mampu dikembangkan sesuai dengan *Deca-Kala-Patra*-nya.

**Gambar 5.** Perumahan Dinas Bank Ekspor Impor Sanur, karya Robi Sularto yang mendapatkan IAI award

#### 4. Arsitek Bali dan Undagi

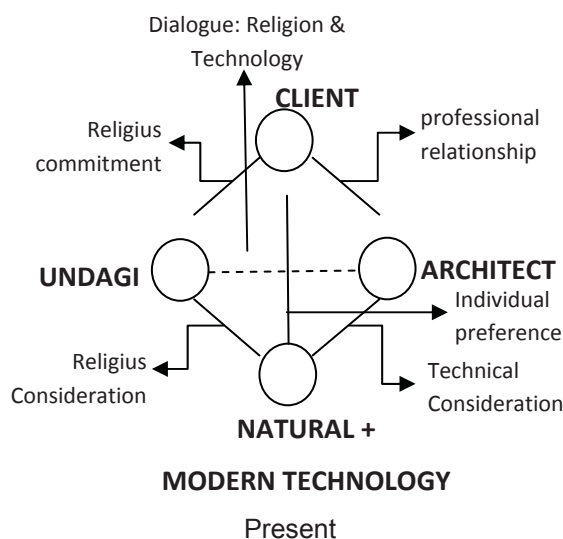
Akhirnya keseluruhan dharma desain terletak pada tangan arsitek yang berkarya di Bali. Sangat sulit mengharapakan pengembangan arsitektur tidak dihantui oleh bayang-bayang kekuatan kapitalisme ekonomi baik yang dibawa oleh pembangunan maupun oleh pariwisata. Arsitek-arsitek selain tidak berdaya juga cenderung merupakan produk-produk *money oriented* dan *output oriented* yang selalu ingin menonjolkan diri sebagai si penemu dan tidak peka terhadap kehidupan sosial budaya. Hal ini disebabkan orientasi pendidikan yang cenderung menekankan pada suatu permasalahan tertentu saja sehingga yang muncul adalah spesialisasi bidang-bidang tertentu atau *vested interest* pada bidang-bidang tertentu saja.

Padalah arsitektur selalu diharapkan sebagai "the most political science in the world", sehingga membutuhkan pengetahuan yang luas pada segala bidang kehidupan. Atau pendapat yang menyatakan bahwa arsitektur adalah seperti bawang, begitu banyak kulitnya dan tidak dapat dicari intinya. "architecture is nothing, but also everything".

Bukankah itu berarti arsitek adalah seorang yang tahu segalanya, sesuai dengan asal katanya *arkhee* atau yang dituakan? Tidak mungkinkah mengharapakan arsitek masa kini menjadi seorang seperti *undagi*? Untuk mengharapakan dunia pendidikan tentunya tidsk mungkin, sebab waktu yang tersedia sangat singkat untuk mempelajari sedemikian banyak ilmu, namun tidak menutup kemungkinan agar sistem pendidikan diarahkan kepada suatu komitmen untuk membangun dalam arti sebenar-benarnya.

Bagi pendidikan tidak memungkinkan membentuk seorang arsitek generalis Bali, jalan apakah yang harus ditempuh untuk mendapatkan desain yang bermutu tinggi baik dan segi tenis, estetis maupun sosial religinya? Yuswadi Saliya (1975:122) menekankan perlunya suatu hubungan professional baru dalam arsitektur Bali yang menyertakan undagi dalam suatu proyek. Beliau menjelaskan hubungan tersebut sebagai berikut,

*"it might be interesting to see a possibility of a new kind of team work between an undagi and a formally educated architect. Phenomenologically, the architect may become the "form giver" while the undagi becomes "the religious value giver". With having to temper each other's domain and responsibility. In the pasr, there were three related parties instead, namely 'undagi', ' the client' and 'nature'. Now there are four parties instead 'undagi, 'the client', "nature" and 'nature+technological agregate'.*



a possible new professional relationship between *undagi* and architect as compared to past relationships

**Gambar 6.** Hubungan kerja arsitek, undagi, klien dan alam

Apa yang disampaikan beliau adalah sebuah jalan yang baik sebab akan terjadi hubungan timbale balik yang saling emnguntungkan. Arsitek dapat belajar untuk menjadi lebih arif dan belajar menerapkan kehidupan dalam desain, sedangkan *undagi* dapat belajar efisiensi dan teknologi baru. Mungkinkah konsep ini terjadi?

Robi Sularto mengatakan bahwa *undagi* di Bali yang benar-benar memiliki pengetahuan tinggi jumlahnya tnggal sekitar 20 orang, shingga rasanya sulit untuk melakukan konsep ini secara simultan pada saat ini juga. Konsep beliau tentang arsitek Bali adalah hubungan serupa dengan yang diusulkan oleh Yuswadi Saliya namun perbedaanya *undagi* tidak dilibatkan langsung dalam proyek.

Selain kareka *undagi* yang tinggi ilmunya cenderung tidak *money oriented*. Umurnya juga rata-rata sudah tua. Untuk menyelamatkan ilmu-ilmu mereka, seharusnya tukang-tukang ukir desa-desa yang harus diangkat sebagai seorang *pra-undagi*.

Tentunya lewat sebuah badan pendidikan yang formal sehingga para tukang yang sudah di tambah ilmunya ini dapat menjadi partner bagi arsitek profesional dalam melakukan proyeknya. Ini adalah sebuah proyek yang berat dan idealis yang sampai sekarang belum terwujud...

Ini adalah sebuah konsep yang dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah Bali dalam perbaikan budaya di bidang arsitektur yang tentunya membutuhkan kemauan politis sebab membutuhkan peraturan baru dan membutuhkan dana untuk pendidikannya. Penekanan untuk menjadi seorang arsitek sejati mungkin membutuhkan waktu lama namun ada suatu hal penting yang harus diingat yaitu bahwa kita tidak perlu membutuhkan kehadiran arsitek yang genius, atau pendeta arsitek yang agung, yang sarat dengan doktrin-doktrin. Arsitek yang genius dalam penciptaan bentuk ternyata tidak secara otomatis genius dalam perekayasaan sosial. Kita lebih membutuhkan arsitek kaki telanjang yang kepekaan sosio-kulturalnya mampu menghasilkan karya arsitektur yang biarpun sederhana maupun puitis menyentuh jiwa dan memperkaya kehidupan manusia.

Hal ini selaras dengan pemikiran Robi Sularto tentang arsitektur “**Architecture as dharma is born not made**”

## 5. Kesimpulan

Akhirnya studi yang didasari pada konsep *Tri* masa Hindu ini masih lebih jauh dari kesempurnaan dan masih jauh dari sebuah strategi yang utuh dalam menjawab kebutuhan zaman dan masyarakat Bali dalam arsitektur. *Atitha*, *warthamana* dan *Nagatha* yang lain harus selalu dilakukan dalam setiap waktu dan kesempatan untuk menghindari keburukan dan sebagai cermin introspeksi diri terhadap kesalahan yang dilakukan manusia apalagi pada kebudayaan Bali sekarang yang disebut Robi Sularto sebagai kebudayaan yang “super kompleks”, “berlayer banyak”, “penuh kontradiksi”.

Maka diperlukan arah pada pengembangan masyarakat seutuhnya dengan cara memperluas pandangan pada setiap lapisan masyarakat. Modernisme yang dilakukan dengan adopsi dari kebudayaan lain, misalnya “ilmu barat” yang didapatkan pada umumnya perguruan tinggi harus diakulturasikan dengan seksama untuk menghindari dampak negative *budaya dadakan/instant culture* yang dapat ditimbulkan arsitektur. Akhirnya, diperlukan studi lebih lanjut yang bersifat kasusistik untuk mendapatkan pemikiran yang lebih dalam dan objektif bagi usaha pengembangan arsitektur Bali yang berkelanjutan dan harmonis dari segi budaya, ekonomi, dan lingkungan, sesuai dengan *deca-kala-Patra* yang ada.

Kesimpulan mengenai perlunya sebuah kontrak sosial yang baru dan langkah-langkahnya yang disebutkan di atas adalah hanya disebutkan adalah sebuah usulan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Mengutip Sopandi (1997:106)

... tidak pernah ada “laboratorium” yang cocok melakukan eksperimen selain dunia nyata sendiridan mengingat akan mahalnnya harga sebuah kesalahan yang harus ditanggung banyak pihak, maka sudah sepatutnya profesi arsitek tidak “bermain-main” dengan kuasa juga sekaligus ketidak berdayaan posisi di masyarakat, terhadap alam dan terhadap Tuhannya.

**KELOMPOK D**

**ETIKA DAN POLITIK**





## TELAAH ETIKA & ARAH POLITIK PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN (Review Terhadap Undang-undang Tata Ruang Nomor 26 – 2007)

**Udjianto Pawitro**

Jurusan Teknik Arsitektur FTSP – Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung

Jalan PH Hasan Mustopha 23 Bandung 40124

E-mail : udjianto\_pawitro@yahoo.com

### ABSTRACT

*Spatial Law No. 26 - 2007 is basically an umbrella of rules concerning the implementation of spatial planning at a more granular level. Through space planning, to control the use of 'territoriality' is set. Therefore reviews in more detail about the legislation referred spatial - basically to see the progress and goals to be reached in connection with the setting of space, especially in urban areas.*

*Examine the ethical aspects of planning and political direction in urban planning became interesting to do, given the characteristics of the wider community in Indonesia was still heterogeneous and prularis. The style of Indonesian society that still tends to 'community' space will require a more tolerant in the use of space or territorial, especially in urban areas. The existence of informal sector in urban communities, it need to find a way out to get a chance to be fair in use space.*

*Spatial planning activities that also have an impact on economic activity, it need also to be explored, so the arrangement of space in urban areas is more biased to the group of powerful capitalists, but also its empathy to community groups broad a more limited ability of social-economic. By examining the ethical aspects and the political direction of planning in urban areas - through review of Law No.26 - 2007 is expected we can see the progress and goals to be achieved through spatial planning.*

**Keywords:** *space planning, urban areas, ethics & political of planning*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade belakangan ini (era 1980 – 2000-an) pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di berbagai belahan dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Demikian pula berkaitan dengan pembangunan kawasan perkotaan untuk saat sekarang ini mengalami peningkatan yang sangat besar. Prediksi dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan dalam pembentukan kawasan perkotaan dari 75% : 25% (kawasan rural : kawasan kota) di era 1980-an menjadi sekitar 60% : 40% untuk era 2000-an. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu dua puluh tahun saja terjadi peningkatan pembentukan kawasan perkotaan yang sangat besar.

Kondisi serupa juga terjadi pada era memasuki abad 21, para ahli perkotaan memprediksi bahwa terjadi fenomena yang sangat mencengangkan yaitu sebagian besar masyarakat di belahan dunia mulai cenderung hidup di kawasan yang bercorak urban. Selain terjadinya proses urbanisasi terjadi pula proses 'urbanisme' yang merubah kondisi kehidupan corak pedesaan menjadi kondisi kehidupan dengan corak kota. Untuk kurun waktu 2000 – 2025 akan terjadi lonjakan besar dalam proses pembentukan kawasan kota (lihat Peter Hall & Ulrich Pfiesser – 2000).

Menurut laporan UNHCS tahun 1996 PBB memprediksi bahwa dalam dua dekade ini terjadi lonjakan jumlah penduduk kawasan perkotaan atau waga kota dari 2,4 milyar di tahun 2000-an menjadi 5,0 milyar di tahun prediksi 2025. Juga prediksi bahwa populasi kawasan perkotaan untuk tahun 2000-an diperkirakan 47%, melonjak tajam menjadi 61% untuk predisksi tahun 2025. Oleh karena itu abad 21 sering disebut sebagai 'The First Urban

*Century'* atau Abad / Millenium Urban Pertama – dimana terjadi pembentukan kawasan perkotaan yang besar di berbagai belahan dunia.

Peristiwa atau fenomena pembentukan kawasan kota dan pembentukan masyarakat perkotaan di awal abad 21 ini berlangsung terus, terutama di kawasan-kawasan: Asia Timur, Afrika Utara dan Amerika Latin. Tidak terkecuali juga terjadi di kawasan Asia Tenggara yang merupakan lanjutan dari kawasan Asia Timur. Untuk kawasan-kawasan disebut diatas, diperkirakan pada tahun 2015 kondisinya sbb.: 27 kota-kota di kawasan diatas akan berpenduduk lebih dari 10 juta orang, 516 kota-kota sedang tumbuh dengan jumlah penduduk mendekati 1 juta orang. Secara keseluruhan untuk kawasan perkotaan di belahan dunia tersebut diprediksi akan dihuni oleh 4 milyar orang. (Peter Hall & Ulrich Pfeiffer – 2000).

Demikian pula untuk kondisi di Indonesia, proses pembentukan dan perkembangan kawasan perkotaan juga mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini ditandai dengan pembentukan area perkotaan yang besar, dan hal ini dapat dilihat terutama di Pulau Jawa, pulau Sumatra, serta di beberapa kota besar di pulau yang lain. Pembentukan kota-kota besar di Indonesia mulai meningkat pesat, terutama kota-kota yang dihuni oleh lebih dari tiga juta orang. Misalnya: kota Bandung, Semarang, Jogjakarta, Medan, Makassar, dsb.

Demikian pula terjadi pembentukan kota megapolitan dimana jumlah penduduknya lebih dari delapan juta orang, seperti: Jabodetabek dan Gebangkertosusilo. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah perkotaan yang semakin hari semakin besar, maka Departemen PU Republik Indonesia sudah jauh hari sejak tahun 1992 membentuk BKTRN atau Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. BKTRN tersebut merupakan badan inter-departemental yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan Tata Ruang skala nasional.

Karena pembentukan dan pembangunan kawasan perkotaan pada saat sekarang ini membutuhkan atau memerlukan 'ruang' yang juga cukup besar, maka pemerintah sejak tahun 1992 membuat dan menetapkan UU Nomor 24 – Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 26 – Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia.. Dalam UU Nomor 26 – Tahun 2007 ini ditetapkan pokok-pokok persoalan penanganan masalah yang berkaitan dengan: (a) Perencanaan Tata Ruang, (b) Pemanfaatan Tata Ruang dan (c) Pengendalian Tata Ruang.

## **2. TELAHAH POLITIK PERENCANAAN DAN ETIKA PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN**

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia, secara spesifik dibahas tentang sepuluh (10) hal utama, yaitu: (a) Ketentuan Umum, (b) Azas dan Tujuan, (c) Klasifikasi Penataan Ruang, (d) Tugas dan Wewenang, (e) Pengaturan dan Pembinaan, (f) Pelaksanaan Penataan Ruang, (g) Pengawasan Penataan Ruang, (h) Hak – Kewajiban dan Peran Masyarakat, (i) Penyelesaian Sengketa, dan (j) Penyidikan. Ditambah 3 hal tambahan, yaitu: (a) Ketentuan Pidana, (b) Ketentuan Peralihan dan (c) Ketentuan Penutup.

Di bawah ini dibahas tiga topik utama tulisan yang berkaitan dengan: (a) Arah-arrah Kebijakan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan di Indonesia, (b) Telaah Politik Perencanaan dan (c) Etika Perencanaan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan.

### **a) Arah-arrah Kebijakan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan di Indonesia**

Mengamati dan menelaah arah-arrah kebijakan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan di Indonesia, pada dasarnya kita mesti mengamati dan menelaah serangkaian tata-peraturan dan tata-kebijakan yang berkait di dalamnya. Salam satu objek review adalah apa yang tertera dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 terutama pada Bab VI - Bagian IV tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (mulai dari Pasal 41 s/d Pasal 47). Juga review terhadap PP (Peraturan Pemerintah) tentang Perencanaan dan Penataan Kawasan

Perkotaan – dimana didalamnya termuat arah-arah kebijakan dalam kegiatan perencanaan dan penataan untuk kawasan Perkotaan.

Secara garis besar jika mereview ke substansi UU Nomor 26 Tahun 2007 dimaksud maka kita melihat pada bagian azas dan tujuan, yang menyatakan: Bab II – ayat 2 : Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan: (a) keterpaduan, (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, (c) keberlanjutan, (d) keberdaya-gunaan dan keberhasilan-gunaan, (e) keterbukaan, (f) kebersamaan dan kemitraan, (g) perlindungan kepentingan umum, (h) kepastian hukum dan keadilan, serta (i) akuntabilitas.

Azas-azas yang digunakan dalam mendukung serta mengarahkan pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2007 ini terlihat sudah (sangat) lengkap, sehingga aspek-aspek kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan atau paling tidak mengurangi dampak negatif dan kemungkinan kondisi buruk yang harus dihindarkan. Dalam kegiatan perencanaan tata ruang, terutama menyangkut kawasan perkotaan, secara normatif dapat dipertanggung-jawabkan terutama dari aspek naskah / draft akademis.

Apa yang tertera dalam Pasal 2 - Azas dan Tujuan pada UU Nomor 26 Tahun 2007 ini terlihat secara normatif dan formatif dinilai 'baik' dan 'komprehensif' / 'lengkap' – karena aspek-aspek pertimbangan yang tertera dalam azas - azas pada UU tersebut sudah lengkap. Arah kebijakan yang diambil dalam awal mula penyusunan UU tersebut, pada dasarnya juga terlihat mempunyai keinginan atau kehendak untuk melibatkan seluruh stakeholder (pemangku-kepentingan) dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian Tata Ruang. Hal itu dapat dilihat dalam azas – azas : keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Nilai yang terkandung dari semangat awal penyusunan UU ini ditujukan guna kepentingan umum (masyarakat luas) dalam arti segenap masyarakat bangsa Indonesia, dapat dilihat pada azas-azas yang dicantumkan pada Pasal 2, yaitu: keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, adanya kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Azas perlindungan kepentingan umum yang tertera pada dasarnya untuk memberi kondisi bahwa UU Penataan Ruang memberi perlindungan pada apa yang disebut 'kepentingan umum' atau 'kepentingan luas masyarakat'.

## **b) Telaah Tentang Politik Perencanaan dalam Konteks Perencanaan Kawasan Perkotaan**

Politik Perencanaan atau '*The Politic of Planning*' adalah nilai – nilai atau semangat atau bidang yang berkaitan dengan bagaimana 'politik' atau 'kekuasaan' atau 'power' dari penyelenggara kegiatan perencanaan dilakukan. Semangat politik perencanaan yang termuat dalam undang-undang Penataan Ruang pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok yang didasarkan pada madzhab politik dan ekonomi politik yang hendak dijalankan dari undang-undang tersebut.

Pertama, semangat politik perencanaan yang bermadhab 'kapitalis'. Politik perencanaan pada kelompok ini adalah politik perencanaan yang didasarkan pada paham: politik kapitalisme, politik liberalism yang mempunyai tujuan utama bahwa kegiatan perencanaan (planning) digunakan sebagai alat utama untuk meningkatkan nilai kapital atau modal guna pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dalam politik perencanaan yang bermadhab 'kapitalisme' ini - bercirikan bahwa kegiatan perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan lebih diarahkan semangatnya untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Karena itu kelompok yang cukup dominan dalam madzhab kapitalisme adalah para pengusaha - pengusaha dengan modal besar, disamping kekuasaan tertentu yang masih dimiliki negara.

Kedua, semangat politik perencanaan yang bermadhab 'sosialisme'. Politik perencanaan pada kelompok ini adalah politik perencanaan yang didasarkan pada kekuatan / power Negara sebagai sentral politik yang dapat mengatur dan mengarahkan seluruh masyarakat

kedalam kondisi pemerataan hasil - hasil pembangunan. Dalam politik perencanaan yang bermadhab 'sosialisme' ini - bercirikan bahwa kegiatan perencanaan yang merupakan kegiatan pembangunan lebih diarahkan bagi tujuan pemerataan hasil-hasilnya bagi kalangan masyarakat luas. Dalam madhab sosialis ini peran dari Negara atau Pemerintah Pusat masih sangat besar dan terkesan dominan. Peran serta dari komponen sector swasta dan sektor masyarakat luas memang masih terbatas.

Ketiga, semangat politik perencanaan yang bermadhab 'alternatif' yang disebut madhab 'participatory'. Politik perencanaan pada kelompok ini adalah politik perencanaan yang didasarkan pada perlunya adanya dan makin besarnya peran serta (partisipasi) dari seluruh pelaku-pelaku kegiatan pembangunan. Setidaknya terdapat tiga kelompok besar dari pelaku-pelaku dalam kegiatan pembangunan, yaitu: (a) sektor pemerintah (*the government sector*), (b) sektor swasta (*the private sector*) dan (c) sektor masyarakat luas (*the community sector*). Dalam politik perencanaan pada madhab partisipatori ini diupayakan adanya peran serta yang besar lagi baik serta adanya unsur keseimbangan antar pelaku-pelaku yang terlibat. (lihat Branch, Melville C. - 1985).

Telaah tentang Politik Perencanaan (*The Politic of Planning*) dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ini dapat dilihat dan diamati pada bagian awal / pembukaan dari UU, kemudian bagian Batang-Tubuh beserta rinciannya, dan bagian akhir / penutup dari UU. Persoalan yang dihadapi dalam melihat dan mengamati semangat 'politik perencanaan' adalah sbb. : (a) Tidak semua atau hanya sebagian kecil dalam teks UU yang mencantumkan semangat atau nilai-nilai secara eksplisit, (b) Menilik semangat 'politik perencanaan' yang tercantum dalam UU akan lebih lengkap jika dilanjutkan ndengan menelusuri hal yang serupa pada turunan UU berupa PP (Peraturan Pemerintah) beserta Perda-Perda yang menjabarkannya.

### c) Telaah Tentang 'Etika Perencanaan' dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan

Etika Perencanaan atau *The Ethics of Planning* adalah tata perilaku serta tata nilai bergaul/ bertindak yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan. Dalam konteks kegiatan perencanaan kawasan perkotaan, telaah tentang etika perencanaan akan berkaitan dan berhubungan dengan beberapa hal penting, seperti: (a) Etika dengan Tujuan dan Azaz dari Kegiatan Perencanaan, (b) Etika dengan Semangat Politik Perencanaan, dan (c) Etika dengan Pelaksanaan Profesi Perencana (*Urban Planners*) di Lapangan.

Etika Perencanaan yang berkaitan dengan Azaz dan Tujuan dari kegiatan Perencanaan, terlihat pula dari Etika para wakil-wakil rakyat yang tercermin dalam representasi fraksi-fraksi dari anggota Perlemen atau DPR. Fraksi atau Wakil rakyat dimaksud juga mengusung nilai dan semangat 'tertentu' dalam penyusunan Draft Rencana-UU yang berkaitan dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tersebut. Azaz dan Tujuan yang termuat dalam UU Penataan Ruang ini merupakan cerminan dari semangat dan nilai yang diarahkan untuk tujuan yang hendak dicapai. Kondisi ideal dari tujuan yang hendak dicapai ini terlihat dalam Azaz dan Tujuan yang termuat dalam UU dimaksud.

Persoalan penting yang perlu diamati adalah pada aspek penerapan etika perencanaan pada tataran peraturan yang lebih rendah, misalnya etika perencanaan pada pembuatan dan pelaksanaan RUTRK, RDTRK maupun RTRK. Dalam tataran peraturan yang lebih rendah tersebut (misalnya: Perda / Peraturan Daerah, Perkot / Peraturan Kota), akan terlihat hal-hal yang lebih jelas, misalnya: ciri khas dan kontekstual dari daerah / wilayah, peran dan kewenangan dari Pemerintahan Daerah / Pemerintah Kota, serta arahan - arahan khusus yang termuat dalam peraturan daerah / peraturan kota yang dibuat.

Etika yang berkaitan dengan Pelaksanaan Profesi Perencanaan khususnya Perencana Kota atau *Urban Planner*. Etika ini sering disebut sebagai 'Etika Profesi Perencana'. Asosiasi profesi perencana, dalam hal ini di Indonesia adalah IAP (Ikatan Ahli Perencanaan), merupakan asosiasi profesi di bidang perencanaan kota (dan wilayah) yang membuat dan memberi rambu-rambu berkaitan dengan etika profesi perencana. Etika profesi atau '*The*

*Ethics of Profession* mengatur pula tata-laku dan tata pergaulan berprofesi dalam kegiatan pembuatan rencana kota dan wilayah. Dalam etika profesi tersebut diatur tentang apa yang seharusnya dan apa yang harus dihindarkan dalam kegiatan perencanaan kota - terutama berkaitan dengan *'vested - interest'* atau 'kepentingan para pelaku' yang terkait. (lihat Susanto, Agus - 2009).

## 2. METODOLOGI PENULISAN

Makalah ini membahas tiga topik utama yaitu: (a) Politik Perencanaan dalam konteks Perencanaan Kawasan Perkotaan, (b) Etika Perencanaan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan dan (c) Review Undang - undang Tentang Penataan Ruang – Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan metoda penulisan yang dilakukan adalah 'metoda analisis deskriptif' berbasis 'topikal' yang berkaitan dengan tiga topik utama tersebut diatas. Dasar dalam melakukan pembahasan atau diskusi adalah berbasis kepada dua hal, (a) Telaah Pustaka tentang Politik Perencanaan dan Etika Perencanaan, dan (b) Telaah Isi (Substansi) terhadap Bab VI - Bagian IV Penataan Ruang Kawasan Perkotaan pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007.

Fokus utama telaah tentang Politik Perencanaan dan Etika Perencanaan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan (pada Undang-undang Nomor 26 – Tahun 2007) ini adalah pada Bab VI - Bagian IV – Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 47) serta beberapa Pasal dalam Undang-undang yang dianggap relevan.

## 3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN - ARAH POLITIK & ETIKA PERENCANAAN DALAM PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN

### a) Aspek Politik Perencanaan Dalam Kegiatan Perencanaan Kawasan Perkotaan

Jika dilihat secara tekstual dalam bagian Pendahuluan pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 terutama yang berkaitan dengan Pasal 2 Azas dan Tujuan, jika kita perhatikan butir-butir Azas yang melandasi UU ini dinilai cukup lengkap atau komprehensif. Setidaknya memuat Sembilan azas yang terdiri dari: (a) keterpaduan, (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, (c) keberlanjutan, (d) keberdaya-gunaan dan keberhasilan-gunaan, (e) keterbukaan, (f) kebersamaan dan kemitraan, (g) perlindungan kepentingan umum, (h) kepastian hukum dan keadilan serta (i) akuntabilitas.

Berkaitan dengan arah-arrah dari semangat politik perencanaan yang termuat dalam Undang-undang ini, setidaknya melibatkan beberapa azas penting, seperti: (a) keterbukaan, (b) kebersamaan dan kemitraan, (c) perlindungan terhadap kepentingan umum, serta (d) adanya kepastian hukum dan keadilan. Kegiatan perencanaan - pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan perkotaan didasarkan pada asas keterbukaan (*transparancy*). Hal ini mempunyai arti bahwa semua pihak serta segenap masyarakat luas dapat mempunyai akses atau mengetahui isi (substansi) dan informasi yang berkaitan dengan rencana kawasan perkotaan yang dibuat.

Adanya azas kebersamaan dan kemitraan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan perkotaan, mengandung arti bahwa seluruh atau semua pihak atau pelaku atau pengampu-kepentingan mempunyai rasa bersama dan tidak merasa diabaikan kepentingannya serta mempunyai kedudukan atau posisi sebagai 'mitra' atau 'pihak sejawat' yang sama derajatnya. Azas kebersamaan dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 ini mempunyai makna bahwa seluruh atau semua pihak yang terlibat dalam penataan ruang kawasan perkotaan, oleh Pemerintah diberi ruang gerak dan peran serta yang diikat satu dengan yang lain serta diarahkan dalam kedudukan 'bersama' bukan kedudukan yang 'masing-masing' pihak / pelaku.

Azaz 'perlindungan terhadap kepentingan umum' diartikan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ini tetap memberi perlindungan atau tempat yang sewajarnya terhadap 'kepentingan umum' atau kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Guna menjamin terlaksananya pemanfaatan tata ruang kawasan perkotaan, pihak Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat, Daerah / Kota – dengan sungguh-sungguh memberi perhatian yang lebih besar dimana kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas akan ditempatkan diatas kepentingan kelompok atau golongan atau pihak-pihak tertentu.

Azaz 'kepastian hukum dan keadilan' dicantumkan secara jelas dalam Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 ini, dimaksudkan bahwa semua pihak atau seluruh pelaku atau seluruh pengampu-kepentingan (*the stakeholder*) mendapat jaminan kepastian hukum tentang akibat-akibat atau konsekuensi dari penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang dibuat. Dalam azaz kepastian hukum ini semua pihak atau seluruh pelaku atau semua stakeholder yang terlibat diberi pula keadaan yang memuat unsur keadilan, Lihat pula pasal 38 ayat 1 s/d ayat 6 – tentang Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Tata Ruang Perkotaan..

Dilihat dari isi pada pasal 41 hingga pasal 47 terlihat 7 pasal yaitu Pasal 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 – yang didalam menjalankannya domain atau pihak pemerintah (*Government sector*) memiliki peran yang besar dan cukup dominan didalamnya. Sedangkan untuk pihak-pihak lain, yaitu pihak Sektor Swasta maupun Sektor Masyarakat Luas – perannya dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan – hanya terlihat pada Pasal 47 yaitu : Kerja sama Penataan Kawasan Perkotaan. Kedudukan dari Peran-serta Masyarakat atau *Community Participatory* dimungkinkan ada atau terlibat dalam kegiatan Perencanaan - tercantum dalam Pasal 65 ayat 1, 2, dan 3.

Berkaitan dengan ketentuan Pidana yaitu pada Pasal 69 hingga pasal 75 – berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan atau pihak-pihak tertentu dikenakan hukum pidana berupa kurungan penjara dan atau denda yang jumlahnya cukup besar yaitu Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Tindak Pidana yang dimuatkan dalam UU ini pada dasarnya untuk menegakkan aturan atau peraturan berupa Rencana Tata Ruang, namun secara eksplisit lebih menyangkut perseorangan / individu bukan kepada pihak-pihak atau kelompok orang. Sehingga jenis pidana kurungan serta denda yang ditetapkan terasa sangat berat atau besar.

## **b) Aspek Etika Perencanaan dalam Perencanaan Kawasan Perkotaan**

Membahas tentang 'Etika Perencanaan' pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 ini agak sulit dilakukan, karena dari Bagian Pendahuluan, Bagian Batang Tubuh hingga Bagian Penutup sedikit sekali pasal atau ayat yang secara eksplisit memuat atau menyiratkan tentang Etika Perencanaan. Bahasan berkaitan dengan etika perencanaan, pada kesempatan ini lebih pada mengungkap secara normative apa-apa yang perlu dan patut dilakukan atau dijalankan dalam kerangka kegiatan perencanaan tata ruang kawasan perkotaan.

Kegiatan perencanaan (*the planning activity*) pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan (*the development activity*). Perencanaan dalam rangka hukum (tata) negara dan administrasi negara –adalah merupakan kegiatan pada 'domain publik'. Dalam arti semua jenis perencanaan termasuk didalamnya perencanaan tata ruang kawasan perkotaan – menyangkut dan melibatkan pihak publik atau masyarakat umum / masyarakat luas. Karena itu kegiatan perencanaan kota harus merupakan 'hasil kesepakatan' publik yang merupakan tindakan kolektif. (lihat Eaton W. - 1986).

Kemajemukan dari tata nilai, pengetahuan dan norma dalam ranah publik (*public domain*) mengakibatkan adanya usulan berupa model-model, pendekatan (*approach*) maupun cara pandang (*perspectives*) yang berbeda. Namun objektifitas dalam menyusun

kesepakatan publik – didalamnya memerlukan: nilai-nilai logis, terukur dan dapat diterapkan dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Karena itu dalam kerangka menyusun 'kesepakatan publik' didalamnya diperlukan 'etika- perencanaan' (*the ethics of planning*).

Jika kita mengamati arti penting dari Etika Perencanaan dan Profesi Perencana, maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan, seperti:

- a) Pengendalian perilaku pihak yang terlibat dalam perencanaan dan mengikatnya agar bertanggung-jawab dalam ranah publik
- b) Kegiatan Perencanaan menekankan pada proses (*the process oriented*) bukan pada produk atau hasil akhir.
- c) Mengendalikan dan mereduksi perbedaan kepentingan dan selalu memposisikan semua pihak (pemangku kepentingan) agar selalu pada kondisi netral.
- d) Mewajibkan semua pihak menerima tata nilai secara 'terbuka' (*transparency*), bebas (*freedom*) dan jujur (*honesty*).
- e) Membuka sumbatan komunikasi yang berdasarkan pada: rasionalitas, nilai social yang berlaku serta nilai moral yang dianut. (lihat pula Etika Profesi - IAP – 2002).

Sedangkan jika kita melihat apa yang menjadi elemen dalam Etika Profesi, berikut dibawah ini dimuat secara lengkap, yaitu: (a) komunikatif, (b) transparansy / keterbukaan, (c) interaksi social, (d) kejujuran / honesty, (e) kebebasan / freedom, (f) psikologi massa, (g) heterogen, (h) persepsi dan (i) integritas atau kepercayaan. Mengecek adanya semangat dari etika profesi dalam kegiatan perencanaan (tata ruang kawasan perkotaan), pada dasarnya tidak dapat hanya melihat pada tekstual hasil rencana yang dibuat, tetapi juga melihat pada proses pembuatan rencana yang dilakukannya.

Berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang heterogen dan beragam serta masyarakat yang kental dengan corak paguyuban, ruang gerak penggunaan kawasan perkotaan, pada hasil telaah tidak terdapat bahasan secara isi (substansi) yang eksplisit. Elemen heterogenitas hanya terdapat dalam kajian akademis pada pustaka tentang Etika Perencanaan. Latar-belakang kondisi masyarakat serta kontekstual daerah kemungkinan besar akan termuat pada Peraturan Daerah / Peraturan Kota dalam bentuk RUTRK, RDTRK maupun RTRK beserta penjelasannya, dimana dimungkinkan adanya bahasan tentang kondisi masyarakat setempat.

### **c) Catatan Akhir Pada Bagian Diskusi**

Telaah aspek Politik Perencanaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, pada kenyataannya termuat secara acak dan tersebar baik pada Bagian Pendahuluan, Bagian Batang Tubuh Undang - undang, hingga Bagian Penutup. Berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan – fokus bahasan tentang hal-hal diatas diarahkan pada Bagian IV Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dari Pasal 41 hingga Pasal 47. Namun untuk melihat secara lebih rinci berkaitan dengan semangat dan nilai - nilai Politik Perencanaan, ada baiknya juga mereview terhadap PP (Peraturan Pemerintah) yang berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

Telaah aspek Etika Perencanaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, pada kenyataannya agak sulit untuk ditemukan mengingat sedikit sekali pasal atau ayat-ayat yang langsung berkaitan dengan aspek Etika Perencanaan. Dalam pasal 2 tentang Azaz dan Tujuan, tercantum Sembilan azaz – yang kesemuanya dinilai sangat lengkap atau komprehensif. Etika Perencanaan juga dapat terlihat pada pasal 38 ayat 1 sampai dengan 6 yang berkaitan dengan Insentif dan Disinsentif dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang. Namun jika kita ingin melihat penerapan dari azaz-azaz perencanaan yang tertuang tersebut, ada baiknya juga mereview pada proses penyusunan RUTRK, RDTRK maupun RTRK.

#### 4. KESIMPULAN

Telaah Politik Perencanaan atau *The Politic of Planning* dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dilihat dan diamati pada bagian awal / pembukaan dari UU, kemudian bagian Batang-Tubuh beserta rinciannya, dan Bagian Akhir atau Penutup dari UU. Persoalan yang dihadapi dalam melihat dan mengamati semangat 'politik perencanaan' adalah sbb. : (a) Tidak semua atau hanya sebagian kecil dalam teks UU yang mencantumkan semangat atau nilai-nilai secara eksplisit, (b) Menilik semangat 'politik perencanaan' yang tercantum dalam UU akan lebih lengkap jika dilanjutkan dengan menelusuri hal yang serupa pada turunan UU berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang menjabarkannya.

Berkaitan dengan arah-arrah dari semangat politik perencanaan yang termuat dalam Undang-undang ini, setidaknya melibatkan beberapa azaz penting, seperti: (a) keterbukaan, (b) kebersamaan dan kemitraan, (c) perlindungan terhadap kepentingan umum, serta (d) adanya kepastian hukum dan keadilan. Kegiatan perencanaan dan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang kawasan perkotaan, didasarkan atas dasar unsur 'keterbukaan'. Hal ini mempunyai arti bahwa semua pihak serta segenap masyarakat luas dapat mempunyai akses atau mengetahui informasi yang berkaitan dengan rencana kawasan perkotaan yang dibuat.

Azaz kebersamaan dan kemitraan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan perkotaan, mengandung arti bahwa seluruh atau semua pihak atau pelaku atau pengampu-kepentingan mempunyai rasa bersama dan tidak merasa diabaikan kepentingannya serta mempunyai kedudukan atau posisi sebagai 'mitra' atau 'pihak sejawat' yang sama tinggi atau sama rendah. Azaz kebersamaan mempunyai makna bahwa seluruh atau semua pihak yang terlibat dalam penataan ruang kawasan perkotaan, Pemerintah memberi ruang gerak dan peran serta yang diikat satu dengan yang lain serta diarahkan dalam kedudukan 'bersama' dari pihak-pihak terkait.

Azaz 'perlindungan terhadap kepentingan umum' diartikan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ini tetap memberi perlindungan atau tempat yang sewajarnya terhadap 'kepentingan umum' atau kepentingan public atau kepentingan masyarakat luas. Guna menjamin terlaksananya pemanfaatan tata ruang kawasan perkotaan, pihak Pemerintah dengan sungguh-sungguh memberi perhatian yang lebih besar dimana kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas akan ditempatkan diatas kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu.

Azaz 'kepastian hukum dan keadilan' dicantumkan secara jelas dalam Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 ini, dimaksudkan bahwa semua pihak atau seluruh pelaku atau seluruh pengampu-kepentingan (the stakeholder) mendapat jaminan kepastian hukum tentang akibat-akibat atau konsekuensi dari penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang dibuat. Dalam azaz kepastian hukum ini semua pihak atau seluruh pelaku atau semua stakeholder yang terlibat diberi keadaan yang memuat unsur keadilan.

Dilihat dari substansi pada pasal 41 hingga pasal 47 terlihat 7 pasal yaitu Pasal 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 – yang didalam menjalankannya domain atau pihak pemerintah (Government sector) memiliki peran yang besar didalamnya. Sedangkan untuk pihak-pihak lain, yaitu pihak Sektor Swasta maupun Sektor Masyarakat Luas – perannya dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan – hanya terlihat pada Pasal 47 yaitu : Kerja sama Penataan Kawasan Perkotaan. Kedudukan dari Peran-serta Masyarakat atau Community Participatory dimungkinkan ada atau kerlibat dalam kegiatan Perencanaan - terlihat pada Pasal 65 ayat 1, 2, dan 3.

Telaah Etika Perencanaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007, pada kenyataannya agak sulit untuk dilakukan mengingat sedikit sekali pasal atau ayat-ayat yang langsung berkaitan dengan aspek Etika Perencanaan. Dalam pasal 2 tentang Azaz dan Tujuan, tercantum Sembilan azaz – yang kesemuanya dinilai sangat lengkap atau komprehensif. Etika Perencanaan juga dapat terlihat pada pasal 38 ayat 1 sampai dengan 6



yang berkaitan dengan Insentif dan Disinsentif dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Asosiasi profesi perencana kota (dan daerah) dalam hal ini di Indonesia adalah IAP (Ikatan Ahli Perencanaan), merupakan asosiasi profesi di bidang perencanaan kota dan wilayah yang membuat dan memberi rambu - rambu berkaitan dengan etika profesi perencana. Etika profesi atau '*The Ethics of Profession*' mengatur pula tata-laku dan tata-pergaulan dalam kegiatan pembuatan rencana kota dan wilayah. Dalam etika profesi perencana tersebut diatur tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus dihindarkan terutama berkaitan dengan 'kepentingan-kepentingan tertentu (*vasted interest*) dari para pelaku' yang terkait.

Berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang heterogen dan beragam serta masyarakat yang kental dengan corak paguyuban, ruang gerak penggunaan kawasan perkotaan, pada hasil telaah tidak terdapat bahasan secara isi atau substansi yang dicantumkan secara eksplisit. Elemen heterogenitas hanya terdapat dalam kajian akademis pada pustaka tentang Etika Perencanaan. Latar - belakang kondisi masyarakat serta kontekstual daerah / wilayah kemungkinan besar akan termuat pada Peraturan Daerah / Peraturan Kota dalam bentuk RUTRK, RDTRK maupun RTRK beserta penjelasannya, dimana dimungkinkan adanya bahasan tentang kondisi masyarakat setempat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

1. Branch, Melville C, 1985, *Comprehensive City Planning – Introduction & Explanation*, The Planners Press of APA, Chicago, USA.
2. Eaton W, Joseph, (1986) : *Institution Building And Development – From Concepts To Application*, Pennsylvania University Press, Pennsylvania, USA.
3. Hall, Peter & Pfeiffer, Ulrich, (2000) : *Urban Future 21 : A Global Agenda For Twenty First Century Cities*, E and F Spoon Publishing Co., New York.
4. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), (2002) : *Kode Etik Bagi Profesi Perencana Kota*, Bidang Pembinaan Profesi IAP-Pusat, Jakarta.
5. Sekretariat Negara RI, (2007) : *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 – Tentang Penataan Ruang*, Penerbit Biro Hukum & Perundang-undangan Setneg RI, Jakarta.
6. Susanto, Agus, (2009) : *Pengembangan Profesi Perencanaan Ruang Melalui Spesialisasi dan Etika Profesi*, Buletin Penataan Ruang, Departemen PU, Jakarta. At [http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=\\_fullart&idart=51](http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=51)
7. Udjiyanto Pawitro, (2009) : *Tinjauan Aspek Zonning Regulation Dan Rinciannya Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, (Makalah), Seminar Nasional Implikasi UU. Nomor 26 Tahun 2007 Terhadap Konsep Pengembangan Kota dan Wilayah Berwawasan Lingkungan, PWK FT Unibraw, Malang, 2009.

## FILSUF ARSITEKTUR SEBAGAI PROPOSISI KEEMPAT DALAM UPAYA REGENERASI BUDAYA TRADISIONAL

Studi kasus : *Ndalem Pangeranan* di kampung Baluwarti  
Kraton Kasunanan Surakarta

**Dyah.S.Pradnya.P,ST,MT**

Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

E-mail : dyah\_pradnya@yahoo.com

### ABSTRACT

*An architectural traditional product which is the Ndalem Pangeranan , the work of a master piece past become a landmark in scope Kampong Baluwarti . Historical value immeasurable , sinkritisme culture , tastes art , limitation of building materials and technologies hand , drive like the existence of Ndalem Pangeranan . This condition has menstimulan various efforts of learning and research on the traditional an architectural product . In addition , efforts to revitalize architecture traditionally has also discussed and executed in national and international scope. But often morein of learning , research and the revitalization of being constrained , because of limited quantity and capacity sources competent. So that the conditions to cause deviations data and efforts to revitalize done . Ndalem Pangeranan is also plays role as a product of the past that is appreciated and positioned as of works inheritance passively . While the role of the elders and the heir Ndalem Pangeranan as sources , also lacks understanding or it apathy . Moreover , if the sources of the dead , then affect in the embryo of the extinction of data resources .*

*Research done by the Naturalistic Qualitative method , for 6 months. The sample is used to as an exploration of the unit that was in the 15 of Ndalem Pangeranan ,1 Ndalem Kerabat Kraton dan 1 Ndalemfacility of Kraton Kasunanan Surakarta in Kampong Baluwarti. In the process of observation, the researcher is always exploring data and deepen the information through a variety of resource. While the process of data collection is done by way of Purposive Sampling, Snowball Sampling and Cross Crosssectional System The results of research and explained that data sources in Ndalem Pangeranan more scarce , information about Ndalem Pangeranan limited and be understood by some degree of the house of an owner , of cultural values in Ndalem Pangeranan tend to difficult search and have not regeneration*

**Keywords** : *philosopher ; praksis , traditional , regeneration , one of those rare*

### 1. PENDAHULUAN

Produk desain arsitektur di era modern, mayoritas lebih cenderung berorientasi pada sisi nilai komersial, kecanggihan teknologi bangunan maupun keberagaman teknik-produksi bahan bangunan. Penerapan teknologi yang berlabel dan bersertifikat *New Technology*, memberikan kontribusi dan tolok ukur terhadap hasil kerja para arsitek. Di samping itu, proyek-proyek yang ditawarkan melalui lingkup akademis ( hibah penelitian ) dan lingkup non akademis ( *tender / lelang* ), juga mengacu pada efisiensi, jadwal dan nilai profit , yang berprinsip dasar pada unsur kebaruan. Sehingga motivasi untuk menghasilkan produk konsep maupun desain yang baru, menjadi tolok ukur utama dari pemenang kompetisi proposal proyek. Meskipun desain arsitektur juga bertumpu pada proses re-desain , penanganan lingkungan kumuh dan *heritage*, namun hasil penelitian kurang sesuai dengan fungsi dasar dan *prototype* . Sementara di sisi lain, proses produk desain arsitektur lebih dikenal dan dinilai oleh masyarakat, bila tampilan visual mampu mengemas nilai estetik-artistik dan fungsi. Visualisasi ide desain tersebut didukung pula oleh faktor finansial dan regulasi pemerintahan berskala regional, nasional dan internasional, yang sarat dengan

pesan politik dan hukum. Dengan demikian, peran profesi arsitek sebagai Akademisi, Praktisi, dan Birokrat, menjadi siklus kompetensi yang terikat oleh kebijakan akademis dan regulasi.

Berdasarkan situasi di era modern, eksistensi *Ndalem Pangeranan* sebagai produk arsitektur tradisional pun mengalami pengaruh degradasi, kehilangan posisi dan kurang dikenal oleh publik. Sehingga *Ndalem Pangeranan* hanya berperan sebagai produk masa lalu (*Heritage*) yang bersifat pasif serta hanya cukup dikagumi, diapresiasi dan diposisikan sebagai karya warisan. Sementara untuk mereproduksi desain *Ndalem Pangeranan*, terbentur pada keterbatasan faktor finansial, tenaga ahli yang menguasai teknik bangunan arsitektur tradisional dan juga kebutuhan luasan lahan terpakai. Karena ke-3 faktor tersebut menjadi prasyarat yang mengikat eksistensi karya warisan tersebut. Di samping itu, produk desain *Ndalem Pangeranan* hanya dapat diapresiasi dan dimaknai oleh publik, bila disertai dengan aktivitas dan pelaku kebudayaan yang melekat. Bila produk desain *Ndalem Pangeranan* tersebut difungsikan untuk aktivitas modern, maka kesan tradisional menjadi lemah atau justru bias dengan invasi kebudayaan modern. Misal: *Ndalem Pangeranan* yang dipergunakan untuk tempat latihan karate. Sementara peran keturunan keluarga maupun *sesepuh* pewaris *Ndalem Pangeranan* sebagai sumber data, juga sering kurang memahami atau justru apatis terhadap karya adiluhung tersebut. Apalagi bila para sumber data tersebut meninggal, maka punah pula sejarah kebudayaan *Ndalem Pangeranan*. Kondisi tersebut menjadi hambatan yang signifikan dalam proses desain terhadap *Ndalem Pangeranan*. Dengan demikian, eksistensi *Ndalem Pangeranan* sebagai produk arsitektur tradisional semakin tergerus dengan keterbatasan finansial dan keahlian.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Rumah merupakan produk arsitektur yang berfungsi pula sebagai cerminan kepribadian pemilik rumah. Seperti yang disampaikan oleh Heidegger dalam Schultz (1971), bahwa:

*Dwelling is the basic principle of existence*

Di samping itu, Gaston Bachelard dalam Schultz (1971), menjelaskan lebih lanjut, bahwa:

*The house as "one of the great integrative forces in man's life"*

Berkaitan dengan ruang, Bachelard dalam Schultz (1971), menambahkan, bahwa:

- *The image of the house, therefore, depends on the existence of differentiated places which interact among themselves and with the environment in varying ways.*
- *The character is determined by concrete 'things' such as the fire place, the table and the bed*

Sementara simbol merupakan *descriptive image* yang menjelaskan data eksplisit dan implisit objek. Seperti pernyataan Jenks (1969) dalam Nesbitt (1996), bahwa:

*This is perhaps the most fundamental idea of semiology and meaning in architecture, the idea that any form in the environment or sign in language is motivated, or capable of being motivated* (halaman 117)

Hal tersebut didukung oleh Handler (1970) dalam Nesbitt, sebagai berikut:

- Suatu bangunan merupakan perwujudan logika ketika suatu titik di sisi luar dari material dan visualisasi membentuk suatu prinsip universal yang valid, ketika hal itu memberikan visi dari peraturan di samping kepemilikan lapangan, jangkauan tentang beberapa hal yang mempunyai tujuan dan mendorong untuk mempresentasikan kembali menjadi konsep umum yang menyediakan penjelasan dan interpretasi dalam skema yang lebih luas (halaman 32)
- Pemaknaan logika yang dinyatakan dengan simbol tidak menandakan abstraksi terhadap religi, pendidikan, hukum atau komunitas (halaman 32)
- Logika yang dinyatakan dengan simbol tersebut tidak dapat dilihat karena bersifat abstrak dan universal (halaman 33)
- Usaha manusia dan perilaku sosial tergantung pada penyelarasan dengan logika perilaku (halaman 33)

Rapoport (1986), menyatakan pula, bahwa :

*The region attributes modified human action. There are divided in 3 levels , namely :*

1. *Fix feature : building*
2. *Semi fix feature : furniture*
3. *Non fix feature : behavior*

Eliade (1957) juga mengatakan mengenai *mistycal meaning* dalam simbol, bahwa :

*Cosmic symbolism is found in the very structure of the habitation* (hal.53)

Di sisi lain, Morris (1938) dalam Nesbitt (1996) juga menjelaskan mengenai simbol, yaitu :

- *Pragmatik " deals with the origins, uses (by those who actually make them) and the effects of signs (on those who interpret them) within the (total range of) behaviour in which they occur* (hal.126)
- *Semantic " deals with the signification of signs in all modes of signifying " that is with the ways in which they actually " carry " meanings* (hal.126)
- *Syntactic " deals with the combination of signs (such as the way in wich words are put together to form sentences) without regard to their specific significations (meanings) or their relation, to the behavior in which they occur " thus ignoring the effects those meanings have on those who interpret them* (hal.12)

Lalu Eco (1968) dalam Nesbitt (1996) halaman 135, menjelaskan mengenai simbol, yaitu:

1. *Denotation*

*The meaning which a form has for all who use it*

2. *Connotation*

*The special shades of meaning (based on emotional or other factors ) that a form has for its individual user*

Lalu dilanjutkan pula oleh Pierce (1974) dalam Nesbitt (1996), yang menjelaskan aplikasi simbol dalam *sign* yang terbagi dalam 3 klasifikasi, yaitu:

1. *An icon is a sign which refers to the object that it denotes by virtue of certain characters of its own and which it possesses just the same, whether any such object actually exist or not* (hal.136)
2. *A symbol is 'a sign which refers to the object that it denotes by virtue of law, usually any associations of general ideas, which operates to cause that symbol to be interpreted as referring to that object'* (hal.136)
3. *An index is a sign, or representation 'which refers to its object not so much because of any similarity of, or analogy with it, nor because it is associated with general character which that object happens to posses, but because it is in dynamical (including spatial) connection, both with the individual object on the one hand and with the senses or memory of the person for whom it acts as a sign* (halaman 136)

*Genius Loci (The Spirit of Place)* merupakan *image* yang dimiliki suatu tempat secara implisit. Seperti penjelasan Schultz (1984), bahwa:

- *This spirit gives life to people and places, accompanies them from birth to death, and determines their character or essence.*
- *It is of great esxistential importance to come to terms with the genius of the locality where his life takes place*

Penjelasan tersebut didukung oleh Lynch dalam Schultz (1984) yang mengatakan, bahwa :

*A good environmental image gives its possessor an important sense of emotional security*

Demikian juga Linch dalam Paul (1994) menjelaskan serta memperkuat pernyataan, bahwa:

*A sense of place (which) in it self enhances every human activity that occur there, and encourages the deposit of a memory trace*

Di sisi lain, Peter Downtown dalam Paul (1994) mengatakan melalui bentukan ruang bahwa:

*Places are not entities; places are processes*

Sedangkan berdasarkan dari proses berpikir dan filsafat, Lorens (2002), menjelaskan bahwa :

Preposisi merupakan pernyataan yang memiliki 2 arti

Praksis merupakan aktivitas dari suatu pemikiran

Sedangkan Rapar (1996) menjelaskan mengenai berpikir secara mendalam, sedangkan Yuyun (2001) menjelaskan mengenai perincian berpikir secara mendalam.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian telah dilakukan dengan metode Naturalistik Kualitatif, selama 6 bulan. Sampel digunakan sebagai unit eksplorasi yang berada di 15 *Ndalem Pangeranan*, 1 *Ndalem Kerabat* dan 1 *Ndalem Fasilitas Kraton Kasunanan Surakarta* di Kampung Baluwarti. Dalam proses observasi, peneliti selalu mengeksplorasi data dan memperdalam informasi melalui berbagai nara sumber. Sementara proses pengumpulan data dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, *Snowball Sampling* dan *Cross Sectional System*.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Degradasi Eksistensi Empiris Sejarah**

Dalam proses eksplorasi data mengenai latar belakang sejarah ke-15 *Ndalem Pangerana*, 1 *Ndalem Kerabat Kraton* dan 1 *Ndalem fasilitas Kraton Kasunanan Surakarta*, nara sumber yang kompeten dalam bidang tersebut jarang ditemui. Demikian juga kondisi yang ditemui saat menterjemahkan peninggalan berejarah tersebut. Sebagian besar nara sumber adalah para *tenggan* , sedangkan sebagian kecil merupakan keturunan keluarga para pangeran. Bahkan dijumpai pula *Ndalem Pangeranan* yang sudah berpindah kepemilikan. Sehingga sangat sulit untuk merunut sejarah dan data yang diperoleh sangat terbatas. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



**Gambar 1.** Kondisi *Ndalem Pangeranan*, *Ndalem Kerabat* dan *Ndalem Fasilitas Kraton Kasunanan* di Kampung Baluwarti, Surakarta  
 Sumber : Data lapangan , 2010

**Simpulan :** Terjadi perbedaan data dan hasil temuan dalam berbagai penelitian, sehingga mempengaruhi penyimpangan hasil. Status hubungan kekeluargaan maupun hubungan perkenalan antara peneliti dan nara sumberpun, tidak cukup kuat untuk mengeksplorasi data lapangan. Nara sumber yang merupakan keturunan keluarga para Pangeran, juga menunjukkan potensi pemahaman yang kurang maksimal. Dalam upaya eksplorasi data, dapat disimpulkan bahwa dalam siklus kehidupan dalam setiap *Ndalem Pangeranan*, terdapat semacam larangan atau batasan untuk mengetahui berbagai hal mengenai *Ndalem Pangeranan*. Sehingga pada generasi terdahulu sampai dengan generasi terakhirpun juga banyak yang kurang mengerti riwayat *Ndalem Pangeranan* yang ditempati. Informasi yang mampu diberikan hanya terbatas sebagian kecil memori yang dipahami secara subyektif. Sehingga ketika para Pangeran generasi terakhir meninggal, maka puna jugalah sejarah mengenai *Ndalem Pangeranan*. Meskipun demikian, data yang terbatas tersebut masih bisa dirunut melalui kitab dan surat kuno, yang harus diterjemahkan secara utuh serta memerlukan upaya yang ulet. Kesulitan tata bahasa-penulisan ( huruf Jawa kuno ) dan naskah yang sudah rusak serta tidak lengkap, menyebabkan proses eksplorasi menjadi sulit

dan tidak lengkap. Sehingga para peneliti (terutama kalangan arsitek) kehilangan banyak data, dan harus berinterpretasi serta menterjemahkan objek sesuai dengan visualisasi yang kurang mendalam.

### Landasan Emosional Status Keningratan

Mayoritas para *tenggan*, *abdi dalem* dan keturunan keluarga para Pangeran, memiliki landasan emosional yang kuat dengan almarhum/ almarhumah para Pangeran. Landasan tersebut mempunyai pengaruh kuat yang mengikat mulai dari usia kanak-kanak, dewasa sampai tua. Bahkan pengaruh itu juga masih dirasakan meskipun sudah hidup berjauhan maupun keluar dari lingkup *Ndalem Pangeranan*, yang terlihat pada saat pergelaran temu keluarga (misal: Kol-kolan: peringatan arwah setelah 1000 hari, yang diadakan setiap tahun tergantung kemampuan) Ikatan tersebut terasa tulus, suci dan penuh dengan kebahagiaan yang senantiasa tertanam dan terbentuk dalam jiwa dan hati. Pengejawantahan para Pangeran sebagai figur "Penguasa lahir dan batin" membawa wibawa yang sangat besar dalam kehidupan para *tenggan*, *abdi dalem* maupun keturunan keluarga para Pangeran. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



**Gambar 2.** Para keturunan keluarga para Pangeran, kerabat, *tenggan* dan *abdi dalem* di Ndalem Pangeranan Kraton Kasunanan Surakarta , kampung Baluwarti  
 Sumber : Data lapangan , 2010

**Simpulan :** Penghormatan, kepatuhan dan tata krama yang tinggi, telah membentuk ikatan psikis para keluarga, kerabat, para *tenggan* dan para *abdi dalem* dalam rentang waktu seumur hidup terhadap para Pangeran. Segala larangan dan nasehat dianggap sebagai batasan yang diterapkan, dipertimbangkan dan mengandung resiko. Ikatan psikis yang terbentuk secara kuat dan dilakukan setiap saat, telah mengikat kebebasan seumur hidup. Kondisi tersebut secara tidak langsung telah mengorientasikan tujuan hidup pada keberadaan dan aktivitas para Pangeran. Dengan demikian, para keluarga, kerabat, para *tenggan* dan para *abdi dalem* tidak mempunyai keberanian untuk mengubah kondisi. Sifat keingintahuan mengenai berbagai hal, justru sering dianggap sebagai upaya yang melampaui batas kesopanan, terutama bagi pihak didalam lingkup keluarga. Namun demikian, para Pangeran memiliki otoritas penuh untuk memilih orang-orang tertentu guna menyampaikan informasi mengenai berbagai hal. Sifat kepasrahan dan memahami posisi diri dalam siklus hidup di *Ndalem Pangeranan*, telah mengarahkan aktivitas harian.

### **Disorientasi Warisan Peradaban**

Pada masa para Pangeran bertahta di setiap *Ndalem Pangeranan*, tidak pernah berorientasi untuk mempublikasikan *Ndalem* yang ditinggali untuk menjadi aset wisata. Para Pangeran hanya mengorientasikan fungsi *Ndalem Pangeranan* untuk aktivitas pribadi bersama keluarga, kerabat dan *tenggan* (*abdi dalem*). Di samping itu, aset *Ndalem Pangeranan* dipandang identik dengan kepribadian pemilik, yang justru tidak boleh disebarluaskan sebagai aset umum. Para tamu atau pihak luar yang tertarik terhadap *Ndalem Pangeranan*, berlandaskan ketertarikan secara pribadi tanpa publikasi dari pihak *Ndalem Pangeranan*. Para Pangeran hanya diwajibkan memfungsikan dan merawat *Ndalem Pangeranan*, yang juga merupakan kekayaan Karton Kasunanan Surakarta. Rasa hormat terhadap para Eyang Leluhur, telah menumbuhkan rasa untuk menjaga dan menutup segala yang berhubungan dengan informasi tersebut. Perilaku penuh kehati-hatian dan menutup informasi menjadi bentuk sikap keseharian para keluarga, kerabat, *tenggan* dan *abdi dalem*, yang bermaksud sebagai aplikasi sikap hormat dan bakti. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut:





**Gambar 3.** Suasana Ndalem Pangeranan, Ndalem Kerabat dan Ndalem Fasilitas Kraton Kasunanan di Kampung Baluwarti, Surakarta  
Sumber : Data lapangan , 2010

**Simpulan :** Antisipasi perubahan kondisi kehidupan, kurang dibelajarkan selama hidup dalam lingkup *Ndalem Pangeranan*. Maka ketika Kejayaan Kraton Kasunanan Surakarta mulai menurun dan para Pangeran meninggal, banyak pihak yang tidak mampu mengatasi perubahan situasi. Maka *Ndalem Pangeranan* di lingkup Baluwarti hanya berposisi sebagai bangunan kosong dan cenderung rusak. Sejarah *Ndalem Pangeranan* juga sulit dirunut sementara generasi keturunan keluarga juga kurang memahami perihal tersebut. Para keturunan keluarga para Pangeran, kerabat, *tanggan* dan *abdi dalem*, juga memiliki kemampuan yang lemah untuk mengubah orientasi fungsi *Ndalem Pangeranan*. Karena selama mendiang para Pangeran masih hidup, segala keputusan berada dalam kekuasaan beliau. Jadi ketika para Pangeran meninggal, figur pengambil keputusan (keluarga) tidak memiliki orientasi yang jelas. Rasa kehilangan, kerinduan akan kejayaan masa lalu dan ketidakmampuan mengatasi perubahan jaman, menjadi beban psikis yang sulit dihilangkan. Sementara terjadi kelemahan prediksi bahwa *Ndalem Pangeranan* merupakan warisan dunia yang bernilai adiluhung. Dalam kondisi tersebut, terjadi paradoks antara kondisi fisik dan kemampuan psikis yang rumit dan berat.

## 5. KESIMPULAN

1. Data dan nara sumber tentang *Ndalem Pangeranan* semakin langka
2. Informasi mengenai *Ndalem Pangeranan* hanya dipahami secara terbatas oleh tingkatan tertentu dari keturunan keluarga para Pangeran
3. Nilai-nilai adiluhung cenderung bersifat tertutup dan belum diregenerasikan

## 6. SARAN

1. Diperlukan arsitek yang memiliki kompetensi sebagai seorang filsuf yang khusus mempelajari kitab-kitab kebudayaan kuno tentang arsitektur tradisional (*Ndalem Pangeranan*). Dengan demikian ahli-ahli arsitektur tradisional dapat diregenerasikan dan tidak selalu harus bersumber pada keluarga atau *sesepuh* pewaris arsitektur tradisional. Sehingga arsitektur di masa depan, tidak akan kehilangan produk pemikiran maupun visual *master piece* arsitektur tradisional.
2. Perawatan produk arsitektur tradisional juga diperhitungkan sebagai antisipasi masa pakai/durasi bahan bangunan dalam spesifikasi tertentu.
3. Eksplorasi kompetensi arsitek sebagai filsuf perlu dibentuk agar nilai-nilai luhur kebudayaan di seluruh Indonesia, dapat diregenerasikan secara terukur, konsisten dan terencana.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

1. Alan Johnson, Paul.1994. *The Theory of Architecture*, Van Nostrand Reinhold, USA
2. Bungin, Burhan.2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
3. Bagus,Lorens.2002, Kamus Filsafat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
4. Eliade, Mircea.1959.*The Sacred & The Profane : The Nature of Religion*, Harcourt Brace Javanovich Publisher, USA
5. Moleong, Lexy.J.1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
6. Nesbitt, Kate.1996. *Theorizing A New Agenda For Architecture*, Princenton Architectural Press, New York
7. Rapoport, Amos. 1995.*House Form and Culture*, University of Wisconsin, Milwaukee,
8. Rapar, Jan Hendrik, 1996. Pengantar Logika, asas-asas penalaran sistematis,Kanisius, Yogyakarta
9. Schultz, Christian Norberg.1971.*Existence, Space & Architecture*, Paeger Publisher, New York
10. Schultz, Christian Norberg.1984. *Genius Loci, Towards A Phenomenology of Architecture*, Rizzoli, New York
11. Suriasumantri, Jujun.S.2001, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

## KAJIAN MEKANISME, KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PERIJINAN SERTA PENGAWASAN PADA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI RUANG DI KABUPATEN/ KOTA SE JAWA TENGAH

Ir. Marie Ning Murdiyanti MTP<sup>1)</sup>

Pengajar/Dosen Jurusan Asitektur Universitas Atmajaya dan Praktisi Kawasan dan Tata Ruang<sup>1)</sup>

E-mail : [marie\\_nm@yahoo.com](mailto:marie_nm@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Spatial function change control is a problem which happens in all regions, including in Central Java Province. Space function control has been decided in spatial plan with the Perda, Pergub, Perbup, Perwali. The various case of the spatial function change control needs to be monitored to understand how to control the spatial function change plan. Besides the various characteristics of the region space, there are also various mechanism, organizations, procedure, regulations, and monitoring activity. This paper will describe about these substances.*

**Keyword** : Spatial Function Change Control

### 1. LATAR BELAKANG

Implikasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang tuntutan perkembangan pemanfaatan ruang, serta kebijakan Pemerintah Daerah, secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pelaksanaan penataan ruang di daerah khususnya bagi Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, dibutuhkan pengendalian pemanfaatan yang lebih konsisten dan berkesinambungan, secara lebih rinci yang mudah diterapkan.

Secara eksisting mekanisme pengendalian alih fungsi ruang di wilayah kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah beragam. Beragam mempunyai konotasi positif karena dapat diaplikasikan langsung pada wilayahnya pada kabupaten/kota masing-masing, namun kadang dijumpai pula situasi dan kondisi : 1). Dirasa pengendalian yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang telah lengkap. 2). Setelah dilaksanakan ternyata mengalami beberapa kendala dalam aplikasi perijinannya, pemantauannya, dst. 3). Wilayah satu dengan yang lainnya mendapatkan situasi pengalaman yang berbeda, karena ragam kasus yang ada serta solusi pengambilan keputusannya. 4). Ada pula wilayah yang belum mengaplikasikan rencana tata ruang wilayah tersebut, karena produk tata ruang wilayah relatif baru saja selesai atau diperdakan beberapa saat yang belum lama. 5). Ada pula wilayah yang saat ini sedang mengolah mekanisme pengendalian alih fungsi ruangnya, hal ini mayoritas dikarenakan perijinan IMB yang digunakan secara baku kadang dijumpai tentang arahan/aturan fungsi lahan yang sulit diterapkan. Dengan kondisi seperti tersebut diatas maka dibutuhkannya kajian mekanisme, kelembagaan dan prosedur perijinan serta pengawasan pada pengendalian alih fungsi ruang di kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Peran kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting, dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan yang dapat mengendalikan alih fungsi ruang.

Tulisan ini mengupas tentang kondisi permasalahan, mekanisme, kelembagaan dan prosedur pengawasan pada pengendalian alih fungsi ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah termasuk melibatkan peran kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang menjadi sangat penting, dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan yang dapat mengendalikan alih fungsi ruang.

Studi ini dapat menghasilkan arahan (1). Prosedur dan mekanisme pengendalian Alih Fungsi Ruang di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta (2). Terlaksananya penerapan perijinan terkait dengan insentif dan desinsentif pemanfaatan ruang di kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah. (3). Tersusunnya pedoman operasional bagi kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian ruang di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dari studi ini dapat menjadi masukan dalam Penyusunan Peraturan Pengendalian Alih Fungsi Ruang di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Pedoman tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan strategi yang berisi pengawasan, perijinan, penertiban, serta masukan lebih lanjut bagi penerapan insentif dan disinsentif pelaksanaan pengendalian alih fungsi ruang yang dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta disusun secara terpadu oleh seluruh pemangku kegiatan (*stakeholders*) di bidang tata ruang, yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## **2. PERMASALAHAN**

Hampir di semua wilayah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah membutuhkan panduan alih fungsi ruang dalam upaya mengawal penerapan Rencana Tata Ruang yang telah diperdakan. Studi ini khusus mencermati mekanisme, kelembagaan dan prosedur pengawasan pada pengendalian alih fungsi ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.

## **3. METODE PEMBAHASAN**

Studi ini disusun menggunakan data sekunder untuk produk tata ruangnya, serta pendataan primer untuk tingkat kedetilan permasalahan-persoalan yang ada dengan cara kuesioner dan wawancara.

Hasilnya kemudian dapat dijadikan masukan substansial dalam mengajukan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati ataupun peraturan walikota dari aspek mekanisme, kelembagaan, prosedur perijinan dan pengawasan.

## **4. MANFAAT PENULISAN**

Manfaat studi peraturan gubernur tentang pengendalian alih fungsi ruang ini dapat digunakan (1) sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengawal Rencana Tata Ruangnya. (2). Atau sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang akan membuat peraturan pengendalian ruang di masing-masing wilayahnya.

## **5. RUANG LINGKUP**

Lingkup wilayah studi adalah mencermati sebab perubahan alih fungsi ruang, alat pengendaliannya mencakup kebijakan, mekanisme, kelembagaan dan prosedur pengawasan alih fungsi ruang di seluruh kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah

Dengan mengelompokkan obyek studi berdasarkan karakteristik wilayah, kemudian mengkomparasikannya wilayah satu dan lainnya maka banyak ditemukan permasalahan, persoalan maupun peluang-peluang solusi yang dapat diungkap lanjut.

Ruang lingkup studi adalah di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Seperti pada peta tersebut di bawah ini :



## 6. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *kualitatif dan komparativ*. Studi ini memilah atau mengelompokkan sampel wilayah kabupaten/kota berdasarkan 5 (lima) karakteristik sampel wilayah studi yaitu : (1). Luas Wilayah, (2). Jenis pemerintahan Kabupaten/Kota, (3). Lokasi keberadaan wilayah di pegunungan, dataran rendah atau pantai, (4). Kepadatan penduduk serta (5). Pengaruh jenis Tata Pemerintahan di masa lalu (wilayah negarigung atau bukan).

Kemudian menggunakan *kuesioner* dan *wawancara* diajukan pertanyaan dengan substansi penekanan pada pencermatan terhadap mekanisme, kelembagaan dan prosedur pengawasan pada pengendalian alih fungsi ruang di Kabupaten/Kota se provinsi Jawa Tengah. Sedang Rencana Tata Ruang dan Gambaran Studi masing-masing Kabupaten/Kota di dapatkan dari data sekunder.

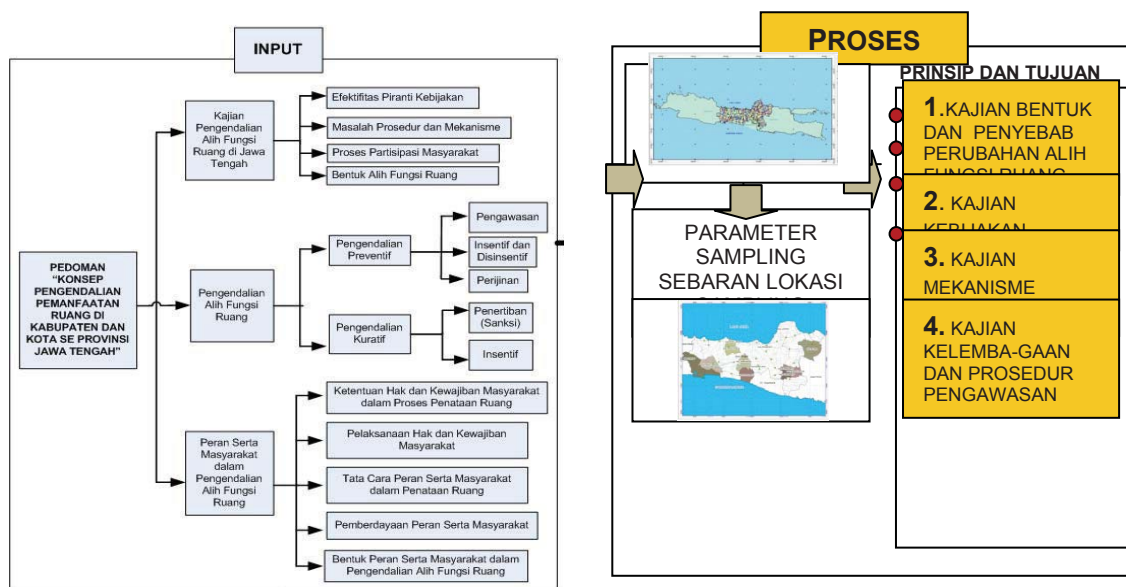
Analisis dilakukan secara bertahap : *Tahap pertama*, data yang didapat dari kuesioner dan hasil wawancara diurutkan sesuai dengan muatan substansi standart produk hukum. Kemudian dikomparasikan satu dan yang lain. Hasil analisis tahap pertama adalah : (1). ragam kelengkapan mekanisme, (2).kelembagaan (3).prosedur pengawasan pada pengendalian alih fungsi ruang. (4). permasalahan dan (5). Potensi dan solusi yang telah dilakukan di masing-masing kabupaten kota disimpulkan kelebihan dan kekurangannya. *Tahap Kedua*, hasil analisis tahap pertama dipersandingkan terhadap Teori terkait dan harapan responden kemudian dianalisis kemungkinan-kemungkinan alternatif solusinya. *Tahap Ketiga*, Hasil analisis tahap kedua tersebut dikelompok-kelompokkan kembali dimasukkan sesuai urutan produk hukum yang dipersiapkan.

## 7. KONSEP DASAR STUDI

Konsep yang diterapkan dalam studi ini adalah :

**Kajian Pengendalian Alih Fungsi Ruang yang "Reliable dan Applicable"**

- "Reliable", dapat dipercaya atau dapat diandalkan artinya bahwa kajian substansi peraturan ini disusun menggunakan kriteria terukur yang dapat dijadikan pegangan.
- "Applicable", dapat diterapkan artinya bahwa kajian substansi peraturan ini disusun dapat diterapkan di masing-masing daerah, karena kajian ini disusun berdasarkan pada karakteristik daerah.



Gambar 1. Diagram Cakupan Pengendalian Alih Fungsi Ruang

### 7.1. Prinsip dan tujuan pengendalian alih fungsi ruang

a. Prinsip Pengendalian Alih Fungsi Ruang.

Pengendalian alih fungsi ruang dilakukan berdasarkan pada prinsip mewujudkan tertib tata ruang untuk mencapai kualitas ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

b. Tujuan Pengendalian Alih Fungsi Ruang.

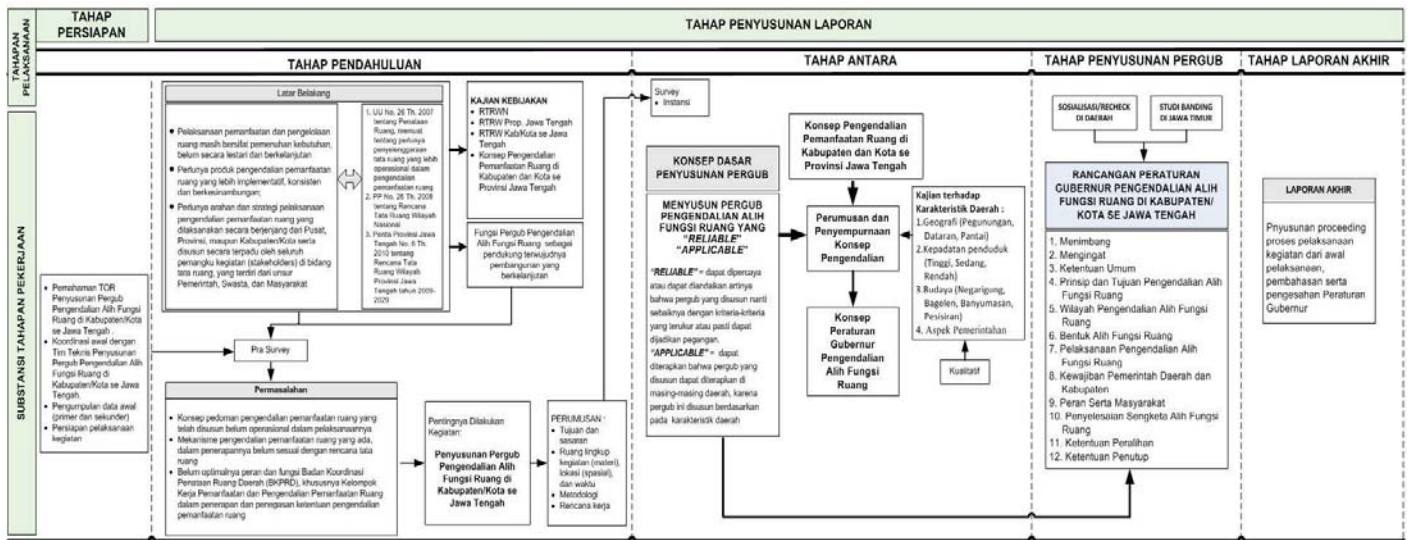
Pengendalian alih fungsi ruang dilakukan dengan tujuan:

- b.1. memanfaatkan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b.2. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada tata pemerintahan yang baik; dan
- b.3. mencegah terjadinya alih fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Prinsip dan Tujuan Pengendalian dijadikan panduan dalam proses penyusunan sehingga yang mewarnai hasil kajian studi.

### 7.2. Alur pikir kegiatan

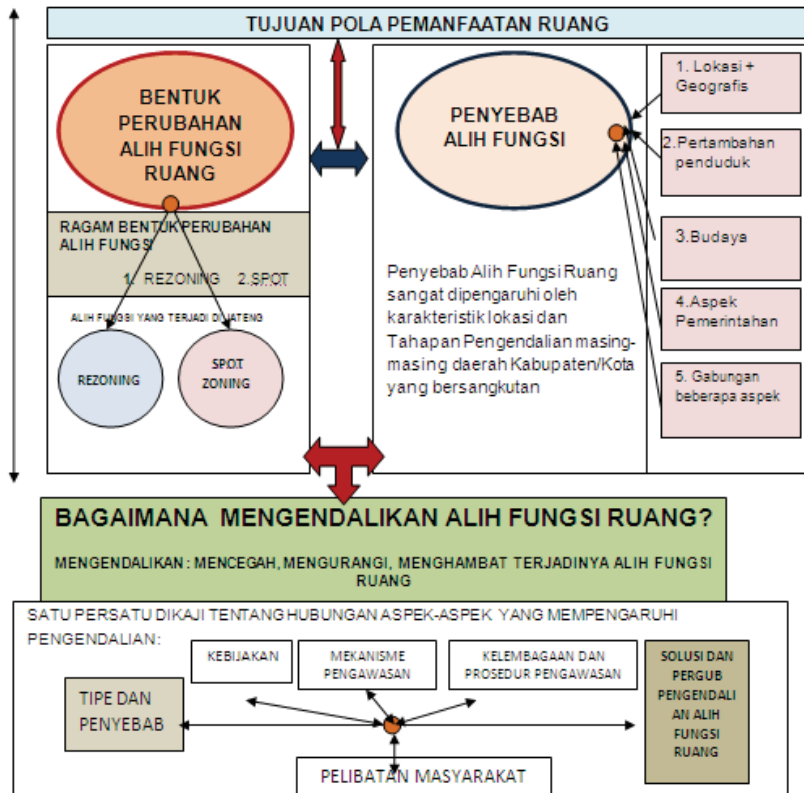
Alur pikir kegiatan merupakan serangkaian proses kegiatan yang akan dilaksanakan kajian studi ini. Secara keseluruhan alur pikir kegiatan tersaji dalam tabel pendekatan dan metodologi di bawah.



## 8. HASIL ANALISIS

### 8.1. Bentuk dan penyebab alih fungsi ruang

Bentuk perubahan alih fungsi ruang sangat dipengaruhi oleh penyebabnya yang dipicu oleh banyak ragam pengaruh. Secara urutan, kajian bentuk dan penyebab alih fungsi ruang tersebut dapat digambarkan seperti diagram di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Hubungan Terjadinya Perubahan Alih Fungsi Ruang

### **8.1.1. Penyebab Perubahan Alih Fungsi Ruang**

Penyebab perubahan alih fungsi ruang di kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah diketahui berdasarkan hasil wawancara kepada Pemkab/kota. Yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 1 : Analisis Kekuatan Pengaruh Sebab Terjadinya Alih Fungsi Ruang Di Provinsi Jawa Tengah**

No	Kuesioner	HASIL KLASIFIKASI DAN KATEGORISASI PENGARUH SEBAB TERJADINYA ALIH FUNGSI RUANG DI PROVINSI JAWA TENGAH								
		Kota Surakarta 3	Kabupaten Sukoharjo 4	Kabupaten Karanganyar 5	Kabupaten Purworejo 6	Kota Magelang 7	Kategori Pengaruh			
1	Apa Penyebab Alih Fungsi Ruang tersebut?	Tidak terjadi alih fungsi	Penyebab <ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi</li> <li>kebutuhan akan tempat tinggal</li> </ul>	Kategori Pengaruh (3) (2), (1)	Penyebab <ul style="list-style-type: none"> <li>kebutuhan untuk pembangunan khususnya kebutuhan ruang untuk permukiman</li> <li>bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten Karanganyar</li> </ul>	Kategori Pengaruh (2), (1)  (2)	Penyebab <ul style="list-style-type: none"> <li>kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kawasan permukiman</li> <li>kepemilikan tanah hanya satu-satunya</li> </ul>	Kategori Pengaruh (2), (1)  (2), (1)	Penyebab <ul style="list-style-type: none"> <li>kepadatan penduduk yang meningkat</li> <li>perbedaan pemahaman terkait dengan aturan yang berlaku dari tiap-tiap instansi</li> <li>kurangnya ketegasan dari pemerintah</li> <li>kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan ruang</li> <li>keterbatasan personil yang menyebabkan kurangnya monitoring</li> <li>kurangnya kesadaran masyarakat</li> <li>belum adanya pengendalian ruang yang komprehensif</li> <li>belum berjalannya/terbentuknya lembaga khusus PR</li> <li>kurang maksimalnya koordinasi antar lembaga/SKPD</li> <li>kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dalam mencari data</li> <li>pendanaan yang masih terbatas dalam pendataan dan manajemen monitoring evaluasi Penataan Ruang</li> </ul>	Kategori Pengaruh (2) (3), (4) (3), (4) (3) (3), (4) (3) (3) (4) (4) (4) (2) (4)
2	Jumlah kekuatan pengaruh per Kabupaten/Kota	-	(1) : 1 (2) : 1 (3) : 1	(1) : 1 (2) : 2	(1) : 2 (2) : 2	(2) : 2 (3) : 5 (4) : 7				

Sumber : hasil Wawancara kepada Pemkab/Kota tahun 2011, Hasil Analisis tahun 2011

Total nilai pengaruh : (1) Kebutuhan akan tempat tinggal : 10  
 (2) Perkembangan penduduk yang semakin padat : 15  
 (3) Investasi/ Usaha Tambahan : 16  
 (4) Manajemen Tata Ruang : 7

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012

"Sticks and Carrots"

Reward and Punishment

Lanjutan Tabel 1 : Analisis Kekuatan Pengaruh Sebab Terjadinya Alih Fungsi Ruang Di Provinsi Jawa Tengah

No	Kuesioner	HASIL KLASIFIKASI DAN KATEGORISASI PENGARUH SEBAB TERJADINYA ALIH FUNGSI RUANG DI PROVINSI JAWA TENGAH				
		Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Pekalongan	
1	2	8	9	10	11	12
		Penyebab	Penyebab	Penyebab	Penyebab	Penyebab
		Kategori Pengaruh	Kategori Pengaruh	Kategori Pengaruh	Kategori Pengaruh	Kategori Pengaruh
1	Apa Penyebab Alih Fungsi Ruang tersebut?	- penambahan jumlah penduduk - kepentingan ekonomi (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pemenuhan kebutuhan ruang pembangunan masyarakat</li> <li>▪ perkembangan kota</li> <li>▪ pertumbuhan industri seperti pertambangan, misal : pasir, batu</li> </ul> (1), (2) (3), (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebutuhan pemilik lahan</li> <li>▪ Perluasan perkotaan</li> </ul> (2), (3) (1), (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh warga sehingga untuk membangun rumah mereka mendaratkan sawah yang mereka miliki</li> <li>▪ Adanya kepentingan bisnis dan ekonomi</li> <li>▪ Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal/rumah</li> <li>▪ Kebutuhan masyarakat untuk usaha sebagai penambahan pendapatan</li> <li>▪ Kebutuhan pengusaha untuk mendirikan tempat usaha</li> </ul> (1) (1) (2), (1) (3) (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluanya pembangunan pengolahan gas sebagai penopang kebutuhan nasional</li> <li>▪ Perluanya pembuatan sumur eksplorasi minyak</li> </ul> (1), (3)
2	Jumlah kekuatan pengaruh per Kabupaten/Kota	(2) : 1 (3) : 1	(1) : 2 (2) : 3 (3) : 1	(1) : 1 (2) : 2 (3) : 1	(1) : 2 (2) : 1 (3) : 3	(1) : 2 (3) : 2

## Alih Fungsi Ruang di Perkotaan Kabupaten dan Kota

Dengan parameter yang sama, alih fungsi ruang Perkotaan di Kabupaten se Jawa Tengah, mempunyai permasalahan dan karakteristik yang hampir sama. Dibandingkan dengan alih fungsi ruang kota, perubahannya mempunyai trend yang lebih lambat. Pengaruh terbesar dengan urutan 1). Pengaruh investasi/usaha tambahan, 2). Perkembangan penduduk yang semakin padat. 3).Kebutuhan akan tempat tinggal. 4).Permasalahan manajemen tata ruang

### 8.1.2. Bentuk Perubahan Alih Fungsi Ruang Di Provinsi Jawa Tengah

#### Pedoman pengendalian perubahan alih fungsi ruang

Sebelum membahas tentang perubahan alih fungsi ruang perlu difahami bersama, semua kajian harus bepedoman pada Tujuan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang, muatannya adalah sebagai berikut :

Tujuan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang adalah:

- (1). Mengatur keseimbangan keserasian pemanfaatan ruang dan menentukan program tindak operasional pemanfaatan ruang atas suatu satuan ruang;
- (2). Melindungi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat;
- (3). Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan;
- (4). Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat (pengendalian pemanfaatan ruang : pengaturan perijinan).

#### Bentuk Perubahan Alih Fungsi Ruang.

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke daerah kabupaten/kota sampling, semua Pemkab/Kota menjawab : "Ada" atau "Terjadi Alih Fungsi Ruang". Bentuk Perubahan tersebut beragam.

Dilihat dari jenjang perubahan pola ruangnya, ragam perubahan yang terjadi cukup signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

#### Bentuk Penanganan Pengendalian Alih Fungsi Ruang (Peraturan Zonasi)

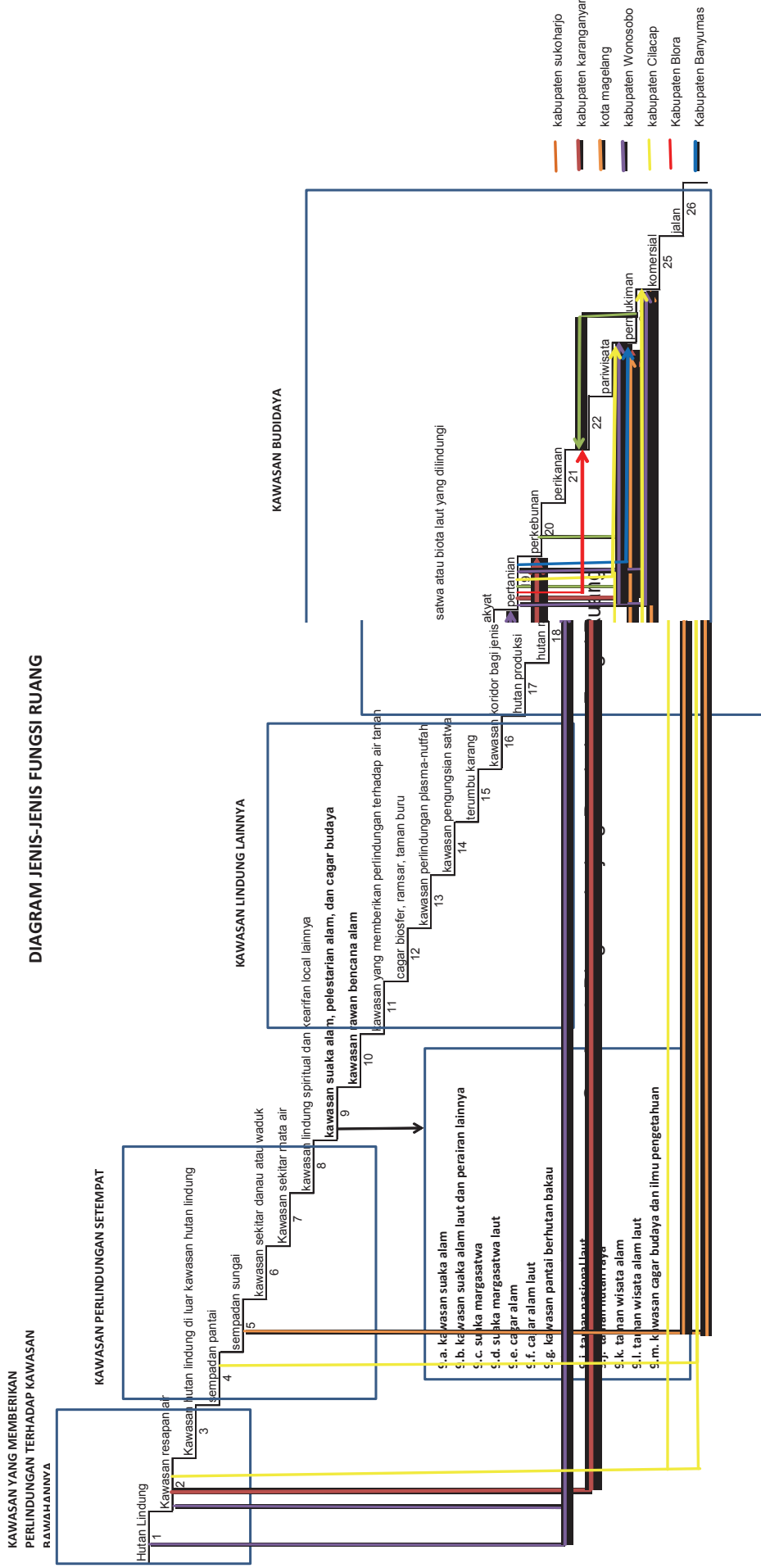
Dari diagram di atas, dapat dilihat makin tebal garis makin luas terjadi perubahan alih fungsi ruang. Dalam penjaringan permasalahan kasus ini, tidak dapat dilakukan secara mendetail, perolehan data hanya berupa garis besar hasil wawancara/ kuesioner. Rata-rata menyebutkan luas, cukup luas, sedikit/tidak menyebut angka m<sup>2</sup> luas. Kedalaman dari wawancara ini tidak menghasilkan angka yang akurat/ rinci sampai dengan menyebutkan luasan berapa Ha. Dalam analisis ini disimpulkan bahwa kategorisasi Penanganan Pengendalian Alih Fungsi Ruang tepat dikelompokkan ditangani dengan 2 (dua) jenis pengendalian alih fungsi lahan yaitu : berupa *Rezoning* dan *Spot Zoning*.

Maksud dari *rezoning* adalah perubahan fungsi ruang pada pola pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya mencakup luasan yang besar misal sampai dengan 5 Ha atau lebih dari 50% (lima puluh persen) fungsi lahan sudah berubah dari rencana pola ruang yang ditetapkan. Hingga kawasan tersebut harus beralih fungsi dari rencana yang ditetapkan.

Sedangkan *spot zoning* merupakan perubahan rencana skala kecil pada kawasan biasanya untuk kebutuhan kawasan atau pelayanan skala lokal kawasan misalnya fungsi perdagangan di kawasan permukiman. Namun dalam prakteknya, bentuk alih fungsi ruang

tersebut dapat memicu perubahan pola ruang secara keseluruhan kalau tidak segera dikendalikan. Biasanya pada awalnya terjadi penetrasi perubahan fungsi berupa *spot zoning*. Untuk itu pentingnya pengendalian kemudian berkembang menjadi perubahan yang bersifat invasi atau dominasi terhadap fungsi eksisting.

SEMINAR NASIONAL SCAN#3:2012  
 "Sticks and Carrots"  
 Reward and Punishment



Hasil analisis banyak memberikan masukan untuk kedalaman Draft Pergub Pengendalian Alih Fungsi Ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, seperti misalnya :

a. Kondisi Karakteristik Alih Fungsi Ruang di Kabupaten Sukoharjo

Di Kabupaten Sukoharjo karena tingginya permintaan pasar atas pengembangan investasi dan kebutuhan permukiman bagi wilayah Kota Solo di sekitarnya dengan PDRB yang tinggi, dari gambar dan tabel penyebab perubahan tersebut di atas dapat dilihat bahwa : a). rentang jenjang perubahan cukup panjang, dan b). volume perubahan cukup besar. Dilihat dari penyebabnya bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh aspek (1). Letak lokasi dan Kondisi geografis : yaitu pengaruh perkembangan kota Solo sangat kuat. (2).Pertambahan kepadatan secara cepat. (4).Aspek pemerintahan, terkait dengan manajemen monitoring yang tidak dapat tertangani karena kurangnya personil.

Hal ini akan berpengaruh pada Draft Konsep Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah khususnya **tentang Prinsip Pengendalian harus dikaitkan dengan Kekuatan Daya Jangkau Pelaku Pengendali**. Contoh untuk Kota Solo permasalahan alih fungsi ruang banyak dan kompleks, tapi tertangani dengan baik karena daya jangkaunya kekuatan Badan Pengendali cukup. (Kekuatan/ Daya Jangkau Badan Pengendali dipengaruhi oleh : Jumlah dan kapasitas Personil serta sistim kendali yang tepat dipengaruhi oleh tingginya rentang jenjang, luas dan kecepatan perubahan alih fungsi ruang. Makin tinggi rentang jenjang perubahan, makin luas perubahan ruang yang terjadi, dan makin cepat frekuensi perubahan alih fungsi ruangnya harus diikuti dengan Karakteristik Badan Pengendalinya termasuk Jumlah dan kapasitas Personil serta sistim kendali).

b. Banyak pula daerah kabupaten/kota seperti contoh : Kota Magelang dan Kabupaten Banyumas yang dalam kuesioner menyatakan "Kurang sosialisasi tentang pemanfaatan ruang". Sehingga untuk menjelaskan saja memerlukan proses yang panjang. Apalagi memberikan saran, penolakan dengan kesulitan. Alasan para pemohon alih fungsi adalah : "*Belum disosialisasikan koq sudah dilarang*". Secara klasik dapat dipersepsikan seperti ayam dan telur. Mana yang harus dilahirkan/dicetuskan terlebih dahulu agar alih fungsi ruang dapat dikendalikan. **Hal yang dapat dilakukan solusi Sosialisasi yang lebih digencarkan secara serentak sekaligus penegasan aturan dilaksanakan dengan ketat secara bersamaan (dalam waktu yang sama).**

## 8.2. Kebijakan

Dikaji beberapa substansi yang penting untuk diperhatikan dalam kebijakan RTRW Nasional terkait pengendalian alih fungsi ruang antara lain pada **bab pengendalian pemanfaatan ruang wilayah** dari :

- a. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Ruang menurut RTRWN.
- b. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Ruang menurut RTRWP Jawa Tengah
- c. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Ruang menurut draft RTRW Kabupaten/ Kota

Setelah dikaji secara rinci tentang kebijakan pengendalian Kabupaten / Kota di masing-masing wilayah dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner tentang inventori jenis-jenis pola pemanfaatan ruangnya, dan inventori peraturan yang dipedomani (yang telah ada aturannya) dirinci peraturan yang terkait dengan jenis pola ruang yang teralih fungsi, seperti : Hutan, Kawasan Konservasi Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi Cagar Alam Geologi, Kawasan Budidaya Sawah.

Permasalahan terkait alih fungsi ruang di Kabupaten/Kota secara beragam kasus, seperti dikarenakan adanya rencana yang disusun sering dirubah, atau Perda Alih Fungsi Lahan belum ada, ada beberapa sertifikat tanah dalam bentuk leter C yang kemudian diubah statusnya, tetap terjadi alih fungsi walaupun tidak ada ijin, kurangnya sosialisasi tentang penataan ruang kepada masyarakat, masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar Tata Ruang.

### 8.3. Mekanisme Pengendalian

Pada bab ini menguraikan cara kerja organisasi untuk bidang Pengendalian Alih Fungsi Ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pengendalian alih fungsi ruang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, perijinan, dan penerapan insentif dan disinsentif.

Permasalahan terkait mekanisme pengendalian alih fungsi ruang di kabupaten/kota berdasarkan hasil wawancara : belum mempunyai standar mekanisme pengendalian, Pemkab / Kota bersifat pasif, pengendalian masih mengandalkan laporan dari masyarakat, ada yang sudah mempunyai mekanisme pengendalian namun belum efektif pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait mekanisme pengendalian yang telah diterapkan di kabupaten/kota di atas, maka melalui dasar-dasar klasifikasi berupa efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, dapat disimpulkan seperti tersaji pada tabel di bawah.

**Tabel 2** : Klasifikasi Mekanisme Pengendalian Alih Fungsi Ruang

No.	Mekanisme Pengendalian	Efektifitas	Efisiensi
1	Perijinan	Sudah efektif dilaksanakan, dimana perijinan merupakan mekanisme yang sudah pasti harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan alih fungsi lahan dan secara umum sudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat	Perijinan belum sepenuhnya menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan, karena pada kenyataan di lapangan masih banyak bangunan yang tidak berijin.
2.	Pengawasan	Belum efektif dilaksanakan, – peran serta masyarakat dalam pelaporan masih sangat kurang, – pemantauan dari instansi terkait juga belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana pemantauan dilaksanakan setelah adanya pelaporan terkait alih fungsi, belum dilaksanakan secara rutin.	Belum efisien, – belum adanya prosedur yang baku terkait mekanisme pengawasan – belum adanya keterpaduan pemahaman antar instansi
3.	Insentif-Disinsentif	Belum efektif : belum diterapkan secara penuh di masing-masing kabupaten/kota	Belum efisien : belum diterapkan secara penuh di masing-masing kabupaten/kota
4.	Penertiban/Sanksi	Efektif bila sudah terjadi pelanggaran	Cukup efisien

Sumber: Hasil Wawancara, 2011, Hasil Analisis 2011

### 8.4. Kelembagaan dan prosedur pengawasan

#### 1.4.1. Ragam Kelembagaan Alih Fungsi Ruang Yang Telah Diterapkan Di Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Ragam kelembagaan Alih Fungsi Ruang yang telah diterapkan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah beragam sesuai dengan karakteristik kasus di masing-masing wilayah.

#### 1.4.2. Usulan Kelembagaan Dan Prosedur Pengendalian

##### a. Usulan Kelembagaan

Berdasarkan rangkaian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang harus dibentuk kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi ruang secara terpadu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat atau bertanggung jawab dalam pengendalian alih fungsi ruang adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Tata Kota
- b. Dinas Permukiman dan Tata Ruang
- c. Dinas Pekerjaan Umum
- d. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota
- e. BPPT
- f. BPN
- g. Dinas Pertanian
- h. BLH
- i. Lembaga Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga tersebut bertindak secara teknis dan administrasi, yang dilandasi keterpaduan pemahaman pelaksanaan.

##### b. Prosedur Pengendalian

Berdasarkan rangkaian analisis di atas dan kajian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan prosedur pengendalian yang diterapkan adalah berupa :

- a. Pengawasan
- b. Perijinan
- c. Penertiban, dan
- d. Insentif dan disinsentif.

## 9. KESIMPULAN

1. Penyebab perubahan alih fungsi ruang di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, mempunyai permasalahan dan karakteristik yang hampir sama. Dibandingkan dengan alih fungsi ruang kota, perubahannya mempunyai trend yang lebih lambat. Pengaruh terbesar dengan urutan 1). Pengaruh investasi/usaha tambahan, 2). Perkembangan penduduk yang semakin padat. 3).Kebutuhan akan tempat tinggal. 4).Permasalahan manajemen tata ruang
2. **Solusi alih fungsi ruang** pada kasus penelitian ini dapat dilakukan dengan *Spot Zoning* atau *Rezoning*.
3. Mayoritas **kebijakan** sudah mulai menjadi acuan. Namun yang telah melaksanakan secara ketat baru beberapa pemda. Seperti di Kota Solo, acuan pola ruang sudah dilaksanakan. Masyarakat umum masih belum paham dengan aturan pola ruang di wilayahnya. Perlu sosialisasi lebih lanjut.
4. **Mekanisme pengendalian alih fungsi ruang** sangat dipengaruhi oleh cara kerja organisasi bidang pengendalian tersebut. (a).Rata-rata **Struktur organisasi di semua wilayah kabupaten/kota telah lengkap** dan sinkron dengan tupoksi personilnya. cara kerja organisasi pengendalian pada bagian perijinan sudah berjalan baik, persoalannya terletak pada **sikap pemerintahnya dalam pengambilan keputusan**. Ada pemerintah kota/ kabupaten yang tegas melaksanakan pengendalian. Namun ada pula yang masih dalam taraf 'memulai'. Sehingga keputusan diambil makan waktu yang lama.



(b). Pengawasan dan pemantauan belum efisien dan belum efektif, apalagi peran serta masyarakat belum terlibat secara signifikan. (c). Insentif-desinsentif belum dilaksanakan. (d). Penertiban atau **sanksi sudah efektif dilaksanakan apabila sudah terjadi pelanggaran, pencegahan belum populer di masyarakat.**

5. **Kelembagaan pengendalian dan prosedur pengawasan alih fungsi ruang pada masing-masing kabupaten/kota beragam.** Hal ini karena pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang ditinjau dari ragam kasus yang muncul pada kompleksitas masing-masing wilayah juga berbeda.

## 10. REKOMENDASI

1. Pengendalian alih fungsi ruang harus tetap terus-menerus disosialisasikan. Dapat dilakukan dengan berbagai media baik di tingkat nasional, regional maupun daerah kabupaten/kota masing-masing, bahkan bisa sampai dengan tingkat RT/ RW.
2. Memperbaiki kekuatan Tim Pengendali agar memenuhi target daya jangkau wilayahnya.
3. Masing-masing tipe pengendalian alih fungsi ruangnya memperhatikan karakteristik wilayahnya. Kabupaten/ Kota dengan melihat urutan pengaruh penyebab alih fungsi ruang.
4. **Solusi alih fungsi ruang** dapat dilakukan minimal dengan *Spot Zoning* atau *Rezoning*. Untuk ke depannya semua ragam alternatif peraturan zonasi harus benar-benar dikuasai oleh tim perijinan dan BKPRD diterapkan bertahap sesuai karakteristik wilayahnya.
5. **Kebijakan** efektif untuk dijadikan panduan pengendalian alih fungsi ruang.
6. Untuk memahami kebijakan makro s/d mikro di suatu wilayah kabupaten/kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu re-organisasi bagi personil ini harus benar dipersiapkan sejak dini.
7. Sikap pengambilan keputusan oleh pemerintah makan waktu yang lama perlu segera diubah. Hal ini karena kadang ada beberapa pertimbangan yang masih melibatkan berbagai pejabat yang mempunyai rentang perbedaan yang terlalu panjang.
8. Kelembagaan pengendalian dan prosedur pengawasan alih fungsi ruang pada masing-masing kabupaten/kota beragam tidak menjadi masalah, justru positif karena dapat untuk menjadi kontrol antar pemerintah kabupaten/kota.

## Indeks Penulis

Arinto, FX.E II.124	Surya, R.V II.226
Cahyadi, A II.49	Tarigan, R II.203
Darmanijati, M II.73	Uniaty, Q II.177
Depari, C II.145	Widhiari, L.P II.113
Hadiwono, A II.22	Wulandari, L.D II.80
Khaliesh, H II.165	
Liauw, F II.66	
Mohamadi, L II.56	
Mulyani, IM.T.H II.103	
Murdiyanti, M.N II.301	
Nursanty, E II.134	
Pawitro, U II.283	
Permatawati, D II.91	
Pradnya, D.S II.292	
Purbadi, Y.D II.155	
Purwanto, E II.215	
Putra, A.M II.264	
Putra, G.A II.165, II.190	
Rahadi, A II.39	
Senasaputro, B.B II.28	
Sugiarto, R II.274	
Sumardiyanto, B II.253	
Sumarwanto II.1	
Sunarimahingsih, Y.T II.233	

